PEMERINTAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

RPJMD

2025-2029



LUWU TIMUR

MAJU DAN SEJAHTERA

2025-2029



Cita-cita luhur Anak Bangsa untuk mewujudkan Masyarakat Adil, Makmur & Sejahtera

Ir. H. IRWAN BACHRI SYAM, ST, IPM
Bupati Luwu Timur

Dra. Hj. PUSPAWATI HUSLER
Wakil Bupati Luwu Timur

BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional untuk mewujudkan sinergitas pelaksanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
b. bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam meningkatkan kesejahteraan sosial di Kabupaten Luwu Timur;
c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);

10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 340);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 70);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 154);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 162);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

dan

BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterahkan masyarakat.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
8. Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
9. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil Pembangunan.
11. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah rencana pembangunan Nasional yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selajutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah rencana pembangunan tahunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

16. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah yang mengatur struktur dan pola ruang Daerah.
17. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah rencana pembangunan tahunan PD yang merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah rencana 5 (lima) tahunan yang menggambarkan analisis lingkungan strategis, faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan dan sasaran, strategi, serta evaluasi kinerja.
19. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di Daerah untuk mewujudkan visi Daerah.
20. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
21. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
22. Pokok-Pokok Pikiran adalah kajian permasalahan pembangunan Daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan hasil penyerapan aspirasi masyarakat melalui reses.
23. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan Misi.
24. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran secara terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya, sebagai masukan *(input)* untuk menghasilkan keluaran *(output)* dalam bentuk barang atau jasa.
25. Subkegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud penyusunan RPJMD yakni menyiapkan dokumen pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang merupakan landasan dan acuan bagi penyusunan Renstra-PD selama kurun waktu Tahun 2025-2029.

Pasal 3

Penyusunan RPJMD bertujuan untuk:

a. menjabarkan Visi, Misi, tujuan dan sasaran pembangunan serta program Bupati dan Waki Bupati ke dalam arah kebijakan dan Program pembangunan yang lebih rinci, terarah, terukur, dan dapat dilaksanakan selama periode 5 (lima) tahun ke depan;
b. menjadi rujukan resmi bagi seluruh PD Pemerintah Daerah, dalam menentukan prioritas Program dan Kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD;
c. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Daerah dengan kabupaten sekitar, Daerah dengan Provinsi, dan Pemerintah pusat;
d. menjadi tolok ukur kesinambungan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih;
e. menjadi tolok ukur penilaian keberhasilan Kepala PD dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mewujudkan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati;
f. menjadi pedoman seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di Daerah;
g. menjadi acuan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam mengendalikan penyelenggaraan pembangunan daerah dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD;
h. mewujudkan pengelolaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan demi terciptanya pembangunan berkelanjutan; dan
i. merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang mengakomodasi berbagai kepentingan dan aspirasi seluruh lapisan masyarakat.

BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 4

(1) Sistematika RPJMD Tahun 2025-2029, meliputi:
    a. BAB I PENDAHULUAN;
    b. BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH;
    c. BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
    d. BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH; dan
    e. BAB V PENUTUP.
(2) Substansi dan uraian RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

(1) Visi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, yakni Luwu Timur Maju dan Sejahtera.

(2) Misi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, meliputi:

a. meningkatkan sumber daya yang berkualitas, berbudaya, dan berdaya saing;

b. meningkatkan daya saing ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;

c. mempercepat pertumbuhan dan pengembangan wilayah yang merata dan berkeadilan;

d. meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang terintegrasi; dan

e. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien, dan bersih melalui transformasi digital.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

(1) Bupati melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD.

(2) Pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Badan.

Pasal 7

Pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD meliputi:

a. pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan;

b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan; dan

c. evaluasi terhadap hasil.

Pasal 8

(1) Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dilakukan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah telah berpedoman pada RPJMN, RPJPD, dan RTRW.

(2) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah Daerah, telah dilaksanakan melalui RKPD.

(3) Evaluasi terhadap hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Daerah dapat dicapai untuk mewujudkan Visi Daerah dan pembangunan jangka menengah nasional.

BAB V

PENINJAUAN KEMBALI

Pasal 9

Setiap tahun dapat dilakukan peninjauan kembali paling lama 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran dan hanya dapat dilakukan sampai dengan tahun kedua pelaksanaan 2025-2029.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 20 Agustus 2025
BUPATI LUWU TIMUR,

IRWAN BACHRI SYAM

Diundangkan di Malili
pada tanggal 20 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

BAHRI SULI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI SULAWESI SELATAN: B.HK.04.051.25

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan secara berhasil guna dan berdaya guna, diperlukan pedoman yang akan memberikan arah sekaligus acuan sehingga akan terjadi sinkronisasi serta konsistensi tujuan yang dalam mewujudkan cita-cita pembangunan daerah sesuai dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berlaku selama 5 (lima) tahun.

RPJMD sebagai dokumen perencanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahah Daerah, Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, dan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, ditetapkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.

RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati Luwu Timur yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Luwu Timur dan memerhatikan RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan, RTRW Kabupaten Luwu Timur, RPJMD kabupaten tetangga.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu untuk menyusun Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 sebagai pedoman perencanaan pembangunan Kabupaten Luwu Timur selama 5 (lima) tahun ke depan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 168

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029



SAMBUTAN BUPATI LUWU TIMUR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.

Dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, saya menyampaikan apresiasi atas tersusunnya Dokumen **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029**. Dokumen ini merupakan langkah awal yang sangat penting dalam merancang masa depan pembangunan yang sesuai dengan visi ***"Luwu Timur Maju dan Sejahtera"***.

Pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari perencanaan yang matang. Dokumen RPJMD ini disusun melalui pendekatan yang komprehensif dan partisipatif, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik dari pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, hingga akademisi. Hal ini merupakan cerminan semangat kolaborasi kita untuk memastikan bahwa arah kebijakan dan program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat serta selaras dengan prioritas pembangunan nasional dan provinsi.

Saya mengajak semua elemen masyarakat untuk memberikan masukan yang konstruktif demi penyempurnaan dokumen ini. Sinergi dan kontribusi dari berbagai pihak sangat diperlukan agar RPJMD ini dapat benar-benar menjadi landasan yang kokoh bagi pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berperan dalam penyusunan dokumen ini. Semoga upaya kita bersama selalu mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Esa.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam sejahtera,

Bupati Luwu Timur



Ir. H. IRWAN BACHRI SYAM, ST.,IPM

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 dapat dilaksanakan. Dokumen ini merupakan langkah awal yang penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang lebih terencana dan berkesinambungan.

Mengacu pada visi besar "Luwu Timur Maju dan Sejahtera", dokumen ini disusun dengan pendekatan yang partisipatif dan berorientasi pada hasil. RPJMD ini memuat arah kebijakan pembangunan, strategi, program prioritas, serta indikator kinerja utama yang akan menjadi pedoman dalam mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Luwu Timur dalam lima tahun mendatang.

Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan dokumen ini, baik melalui sumbangan data, pemikiran, maupun masukan konstruktif. Kami juga berharap dokumen ini dapat menjadi bahan diskusi dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan guna menyempurnakan Dokumen RPJMD Kabupaten Luwu Timur.

Akhir kata, semoga dokumen ini bermanfaat sebagai landasan strategis dalam menyusun kebijakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Kami juga menyadari bahwa dokumen ini masih memerlukan penyempurnaan, sehingga kami sangat terbuka terhadap saran dan masukan yang membangun demi menghasilkan dokumen perencanaan yang lebih baik di masa depan.

Malili, 20 Agustus 2025
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
Kabupaten Luwu Timur



Drs. DOHRI AS'ARI



"WANUA MAPPATUO NA' EWAI ALENA"

Cita-cita Besar untuk mewujudkan sebuah negeri yang makmur, sejahtera, dan penuh kedamaian.

DAFTAR ISI

SAMBUTAN BUPATI LUWU TIMUR ..... **i**

KATA PENGANTAR ..... **ii**

DAFTAR ISI ..... **iv**

DAFTAR TABEL ..... **vi**

DAFTAR GAMBAR ..... **xv**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 LATAR BELAKANG **1**

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN **5**

1.3 HUBUNGAN ANTARA DOKUMEN RPJMD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN LAINNYA. **7**

1.3.1 RPJMD KABUPATEN LUWU TIMUR DENGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) 2025-2029 8

1.3.2 RPJMD KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2029 DENGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2025 – 2029 8

1.3.3 RPJMD KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2029 DENGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJPD) KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025 – 2045 9

1.3.4 RPJMD KABUPATEN LUWU TIMUR DENGAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2044 9

1.3.5 RPJMD KABUPATEN LUWU TIMUR DENGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR 9

1.3.6 RPJMD KABUPATEN LUWU TIMUR DENGAN KLHS RPJMD KABUPATEN LUWU TIMUR 10

1.3.7 RPJMD KABUPATEN LUWU TIMUR DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN TEKNIS KABUPATEN LUWU TIMUR LAINNYA 10

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN **11**

1.4.1 MAKSUD 11

1.4.2 TUJUAN 11

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN **12**

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH **14**

2.1 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH **14**

2.1.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI 14

2.1.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 48
2.1.3 ASPEK DAYA SAING DAERAH 85
2.1.4 ASPEK PELAYANAN UMUM 108
2.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA INDIKATOR DAERAH 157
2.2.1 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR DAERAH (IKD) 157
2.2.2 KINERJA STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) 187
2.2.3 KINERJA TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SDGS) 192
2.3 GAMBARAN KEUANGAN DAERAH 205
2.3.1 REALISASI APBD TAHUN ANGGARAN 2020-2024 206
2.3.2 KERANGKA PENDANAAN 236
2.4 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS. 250
2.4.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH. 250
2.4.2 ISU STRATEGIS DAERAH 257
BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 262
3.1 VISI DAN MISI. 262
3.1.1 VISI 262
3.1.2 MISI 264
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RPJMD TAHUN 2025-2029. 269
3.3 STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 278
3.3.1 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH. 296
3.3.2 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN 321
BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH 350
4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH. 350
4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH. 425
4.2.1 INDIKATOR KINERJA MAKRO 425
4.2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 427
4.2.3 INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD) 430
4.2.4 INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) 459
4.2.5 INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/ SUISTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (TPB/SDGS) 463
BAB V PENUTUP 475
5.1 PEDOMAN TRANSISI 475
5.2 KAIDAH PELAKSANAAN. 475

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Luas Wilayah Persentase menurut Kecamatan Kabupaten Luwu Timur 15
Tabel 2. 2 Kondisi Kelerengan Kabupaten Luwu Timur 15
Tabel 2. 3 Kondisi Topografi Kabupaten Luwu Timur 16
Tabel 2. 4 Danau, Kedalaman, Luas dan Lokasi Danau di Wilayah Kabupaten Luwu Timur 17
Tabel 2. 5 Suhu dan Kelembaban Udara Kabupaten Luwu Timur 18
Tabel 2. 6 Angin dan Tekanan Udara Kabupaten Luwu Timur 18
Tabel 2. 7 Curah Hujan Kabupaten Luwu Timur 19
Tabel 2. 8 Penggunaan Lahan Kabupaten Luwu Timur 20
Tabel 2. 9 Wilayah Sungai (WS) Kabupaten Luwu Timur 21
Tabel 2. 10 Kejadian Bencana Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 - 2024 22
Tabel 2. 11 Luas Kawasan Tanaman Pangan Kabupaten Luwu Timur 22
Tabel 2. 12 Kawasan Perkebunan Kabupaten Luwu Timur 23
Tabel 2. 13 Kawasan Holtikultura Kabupaten Luwu Timur 23
Tabel 2. 14 Kawasan Suaka Alam Kabupaten Luwu Timur 24
Tabel 2. 15 Kawasan Taman Wisata Alam Kabupaten Luwu Timur 24
Tabel 2. 16 Kawasan Pariwisata Kabupaten Luwu Timur 26
Tabel 2. 17 Kawasan Pertambangan Mineral Bukan Logam Kabupaten Luwu Timur 26
Tabel 2. 18 Kawasan Pertambangan Mineral Logam di Kabupaten Luwu Timur 27
Tabel 2. 19 Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik Kabupaten Luwu Timur 27
Tabel 2. 20 Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Luwu Timur 27
Tabel 2. 21 Potensi Air Kabupaten Luwu Timur 28
Tabel 2. 22 Ketersedian dan Kebutuhan Air Kabupaten Luwu Timur 29
Tabel 2. 23 Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan Kabupaten Luwu Timur 30
Tabel 2. 24 Konsumsi Listrik Perkapita Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 – 2024 31
Tabel 2. 25 Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 – 2024 32
Tabel 2. 26 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PoU) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 – 2024 32
Tabel 2. 27 Kapasitas Air Baku Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 – 2024 33
Tabel 2. 28 Kapasitas Air Baku dan Kapasitas Terpakai Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 33
Tabel 2. 29 Rekapitulasi Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Luwu Timur 33
Tabel 2. 30 Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 – 2024 34
Tabel 2. 31 Akses Air Minum Aman Perpipaan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 – 2024 34
Tabel 2. 32 Akses Rumah Tangga Terhadapa Air Minum Aman Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 – 2024 35

Tabel 2. 33 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 – 2024 36
Tabel 2. 34 Indeks Kualitas Air Luwu Timur Tahun 2020 – 2024 36
Tabel 2. 35 Indeks Kualitas Udara Luwu Timur Tahun 2020 – 2024 37
Tabel 2. 36 Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 – 2024 37
Tabel 2. 37 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 – 2024 38
Tabel 2. 38 Timbulan Sampah dan Sampah Terkelola Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 – 2024 38
Tabel 2. 39 Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 – 2024 39
Tabel 2. 40 Proporsi Realisasi Penyaluran Pupuk Organik terhadap Pupuk Kimia Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 – 2024 40
Tabel 2. 41 Proporsi Sawah Irigasi Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 - 2024 41
Tabel 2. 42 Indeks Pertanaman (IP) Padi Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 – 2024 41
Tabel 2. 43 Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 – 2024 43
Tabel 2. 44 Jumlah Penduduk Dirinci Menurut Kecamatan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 – 2024 44
Tabel 2. 45 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 45
Tabel 2. 46 Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan Kabupaten Luwu Timur 46
Tabel 2. 47 Data Sex Ratio Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 - 2024 47
Tabel 2. 48 Data Jumlah Penduduk, Laju Petumbuhan Penduduk (LPP), Kepadatan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 – 2024 47
Tabel 2. 49 Proyeksi Data Jumlah Penduduk, Laju Petumbuhan Penduduk (LPP), Kepadatan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 - 2030 48
Tabel 2. 50 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Luwu Timur Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020 - 2024 49
Tabel 2. 51 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Luwu Timur (Miliar Rupiah) Tahun 2020 - 2024 50
Tabel 2. 52 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah) 51
Tabel 2. 53 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Luwu Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020 - 2024 (Persen) 53
Tabel 2. 54 Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu Timur dibanding dengan Daerah Sekitarnya Tahun 2020 - 2024 55

Tabel 2. 55 Perbandingan Tingkat kemiskinan Kabupaten Luwu Timur dengan Kabupaten disekitarnya Tahun 2020 - 2024 57
Tabel 2. 56 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 - 2024 59
Tabel 2. 57 Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Luwu Timur dengan Kabupaten/Kota Sekitarnya Tahun 2020 - 2024 61
Tabel 2. 58 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 - 2024 62
Tabel 2. 59 Capaian Indikator Bidang Kesehatan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 - 2024 64
Tabel 2. 60 Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 - 2024 66
Tabel 2. 61 Jumlah Kematian Ibu Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 – 2024 ... 66
Tabel 2. 62 Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis 68
Tabel 2. 63 Capaian Penemuan Kasus Tuberkulosis Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 - 2024 69
Tabel 2. 64 Persentase Keberhasilan Pengobatan Tuberculosis Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 - 2024 69
Tabel 2. 65 Rasio Dokter Per Satuan Penduduk Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 - 2024 70
Tabel 2. 66 Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 - 2024 70
Tabel 2. 67 Rasio Puskesmas Per Penduduk Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 - 2024 71
Tabel 2. 68 Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional 72
Tabel 2. 69 Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia Diatas 15 Tahun Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 - 2024 72
Tabel 2. 70 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 - 2024 73
Tabel 2. 71 Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 - 2024 73
Tabel 2. 72 Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022-2024 74
Tabel 2. 73 Angka Partisipasi Murni Kabupaten Luwu Timur 74
Tabel 2. 74 Proporsi Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 - 2024 75
Tabel 2. 75 Rasio Siswa Terhadap Ketersediaan Ruang Belajar Pada Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 - 2024 76
Tabel 2. 76 Jumlah Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Pendidikan yang Ditamatkan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 - 2024 76
Tabel 2. 77 Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Assesmen Tingkat Nasional Tahun 2020 - 2024 77
Tabel 2. 78 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 - 2024 78
Tabel 2. 79 Indeks Masyarakat Digital Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 - 2024 78

Tabel 2. 80 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 - 2024 79
Tabel 2. 81 Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 - 2024 80
Tabel 2. 82 Presentase Benda, Bangunan, Struktur, dan Situs Cagar Budaya yang Telah ditetapkan Terhadap Total Registrasi Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 - 2024 81
Tabel 2. 83 Indeks Pembangunan Keluarga Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 - 2024 82
Tabel 2. 84 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 – 2024 83
Tabel 2. 85 Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 - 2024 85
Tabel 2. 86 Angka Ketergantungan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 - 2024 86
Tabel 2. 87 Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 - 2024 86
Tabel 2. 88 Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 - 2024 87
Tabel 2. 89 Jumlah Industri Ekonomi Kreatif Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 - 2024 87
Tabel 2. 90 Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 - 2024 88
Tabel 2. 91 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 - 2024 91
Tabel 2. 92 Jumlah Wisatawan Domestik dan Wisatawan Mancanegara Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 - 2024 92
Tabel 2. 93 Persentase Koperasi Berpredikat Sehat Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 - 2024 92
Tabel 2. 94 Nilai Tukar Nelayan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 - 2024 93
Tabel 2. 95 Angka Konsumsi Ikan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 - 2024 94
Tabel 2. 96 Produktivitas Perikanan Budidaya Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 - 2024 94
Tabel 2. 97 Produktivitas Perikanan Tangkap Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 - 2024 95
Tabel 2. 98 Produktivitas Padi (Ton/ha/thn) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 - 2024 95
Tabel 2. 99 Indeks Ekonomi Hijau Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 96
Tabel 2. 100 Indeks Ekonomi Biru Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 96
Tabel 2. 101 Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 97
Tabel 2. 102 Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PDRB) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 - 2024 99
Tabel 2. 103 Volume dan Nilai Ekspor Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 - 2024 99
Tabel 2. 104 Net Ekspor Barang dan Jasa (%PDRB) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 - 2024 100

Tabel 2. 105 Indeks Layanan Infrastruktur Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 - 2024 101
Tabel 2. 106 Proporsi Kontribusi PDRB Kebupaten Luwu Timur Terhadap Provinsi Tahun 2020 - 2024 102
Tabel 2. 107 Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses terhadap Hunian Layak, dan Terjangkau Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020-2024 103
Tabel 2. 108 Jumlah dan Persentase Desa Mandiri Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 - 2024 103
Tabel 2. 109 Persentase BUMDes yang Menghasilkan Laba Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 - 2024 104
Tabel 2. 110 Persentase Desa yang Memiliki Layanan Administrasi Berbasis Digital Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 - 2024 104
Tabel 2. 111 Rasio Pajak Terhadap PDRB Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 - 2024 105
Tabel 2. 112 Pertumbuhan Investasi Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 - 2024 106
Tabel 2. 113 Proporsi Anggaran Riset Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur terhadap APBD Tahun 2020 - 2024 107
Tabel 2. 114 Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 - 2024 108
Tabel 2. 115 Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 - 2024 109
Tabel 2. 116 Nilai Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 - 2024 109
Tabel 2. 117 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 - 2024 110
Tabel 2. 118 Indeks Survey Penilaian Integritas Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 - 2024 111
Tabel 2. 119 Indeks Persepsi Anti Korupsi Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 - 2024 111
Tabel 2. 120 Indeks Maturitas SPIP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020-2024 112
Tabel 2. 121 Nilai MCP KPK Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 - 2024 112
Tabel 2. 122 Nilai SAKIP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 – 2024 113
Tabel 2. 123 Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 - 2024 114
Tabel 2. 124 Tindak Kriminal yang ditangani Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 - 2024 114
Tabel 2. 125 Persentase gangguan Trantibum Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 - 2024 115
Tabel 2. 126 Persentase Perempuan Terpilih Terhadap Total Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur Periode 2014-2029 115
Tabel 2. 127 Perda Inisiatif DPRD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 - 2024 .. 116
Tabel 2. 128 Pesentase Perempuan Pengurus Partai Politik Kabupaten Luwu Timur 117

Tabel 2. 129 Jumlah Kerjasama antara Pemda Kabupaten Luwu Timur dengan Stakeholder Lainnya Tahun 2020 - 2024 118
Tabel 2. 130 Persentase Kerjasama yang Ditindaklanjuti Tahun 2021 - 2024 118
Tabel 2. 131 Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 - 2024 118
Tabel 2. 132 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pendidikan Tahun 2020 - 2024 .. 120
Tabel 2. 133 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Tahun 2020 - 2024 123
Tabel 2. 134 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2020 - 2024 126
Tabel 2. 135 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2020 - 2024 129
Tabel 2. 136 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020 - 2024 130
Tabel 2. 137 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Sosial Tahun 2020 - 2024 131
Tabel 2. 138 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Tenaga Kerja Tahun 2020-2024. 132
Tabel 2. 139 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020 - 2024 134
Tabel 2. 140 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pangan Tahun 2020 - 2024 135
Tabel 2. 141 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pertanahan Tahun 2020 - 2024.. 135
Tabel 2. 142 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2020 - 2024 136
Tabel 2. 143 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020 - 2024 138
Tabel 2. 144 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020 - 2024 139
Tabel 2. 145 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020 - 2024 140
Tabel 2. 146 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Tahun 2020-2024 143
Tabel 2. 147 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 - 2024 144
Tabel 2. 148 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Koperasi,Usaha Kecil,dan Menengah Tahun 2020 - 2024 144
Tabel 2. 149 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal Tahun 2020 - 2024 145
Tabel 2. 150 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2020 - 2024 145
Tabel 2. 151 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Statistik Tahun 2020 - 2024 146
Tabel 2. 152 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Persandian Tahun 2020 - 2024 .. 147
Tabel 2. 153 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan Tahun 2020 - 2024 147
Tabel 2. 154 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan Tahun 2020 - 2024 148
Tabel 2. 155 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kearsipan Tahun 2020 - 2024.... 148
Tabel 2. 156 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pariwisata Tahun 2020 - 2024.... 149
Tabel 2. 157 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pertanian Tahun 2020-2024 149
Tabel 2. 158 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perdagangan Tahun 2020-2024. 150
Tabel 2. 159 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perindustrian Tahun 2020-2024150

Tabel 2. 160 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 - 2024 151
Tabel 2. 161 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2020 - 2024 152
Tabel 2. 162 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Keuangan Tahun 2020 - 2024 153
Tabel 2. 163 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan Tahun 2020 - 2024 154
Tabel 2. 164 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2020 - 2024 155
Tabel 2. 165 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengawasan dan Pengembangan Tahun 2020 - 2024 155
Tabel 2. 166 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Sekretariat Dewan dan Pengembangan Tahun 2020 - 2024 156
Tabel 2. 167 Indikator Kinerja Daerah(IKD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 - 2024 158
Tabel 2. 168 Kinerja Standar Pelayanan Minimal(SPM) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 - 2024 188
Tabel 2. 169 Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 - 2024 193
Tabel 2. 170 Realisasi Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 - 2024 209
Tabel 2. 171 Proporsi Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 - 2024 *(Dalam Persen)* 211
Tabel 2. 172 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 - 2024 214
Tabel 2. 173 Proporsi Jenis Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 - 2024 (Dalam Persen) 215
Tabel 2. 174 Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupten Luwu Timur Tahun 2020 - 2024 218
Tabel 2. 175 Realisasi Neraca Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 - 2024 223
Tabel 2. 176 Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur 226
Tabel 2. 177 Proporsi rincian Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupten Luwu Timur Tahun 2020 - 2024 227
Tabel 2. 178 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 - 2024 228
Tabel 2. 179 Rasio Fiskal Daerah Kabupaten Luwu Timur 229
Tabel 2. 180 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 - 2024 230
Tabel 2. 181 Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020-2024 232
Tabel 2. 182 Share Belanja Daerah terhadap Nilai PDRB Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020-2024 233
Tabel 2. 183 Ratio Likuiditas dan Solvabilitas Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020-2023 235
Tabel 2. 184 Cash Flow Ratio Analysis Kab.Luwu Timur 2020-2023 236

Tabel 2. 185 Proyeksi Indikator Makro Ekonomi dan Sosial Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2030 237
Tabel 2. 186 Target Pendapatan Tahun 2025 dan Proyeksi Pendapatan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2026-2030 239
Tabel 2. 187 Target Belanja Tahun 2025 dan Proyeksi Belanja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2026-2030 241
Tabel 2.188 Target Pembiayaan Daerah Tahun 2025 – 2030 243
Tabel 2. 189 Analisis Proyeksi Belanja Wajib dan Mengikat dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2030 245
Tabel 2. 190 Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah untuk membiayai Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2030 .. 247
Tabel 2. 191 Rencana Alokasi Penggunaan Kemampuan Keuangan Daerah Menurut Kelompok Prioritas Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2030 249
Tabel 3. 1 Perwujudan Visi RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2025-2029 263
Tabel 3. 2 Keselarasan Visi RPJMN 2025-2029, Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 264
Tabel 3. 3 Keselarasan Visi dan Misi serta Penjelasan Misi RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 265
Tabel 3. 4 Keselarasan Misi RPJMD Kab. Luwu Timur Tahun 2025-2029, RPJMD Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 dan RPJM Nasional (Asta Cita) 267
Tabel 3. 5 Keterkaitan Tujuan, dan Sasaran Pembangunan RPJMD Kabupaten Luwu Timur terhadap Misi RPJMD Provinsi dan Misi RPJMN/ Asta Cita/ Prioritas Nasional 271
Tabel 3. 6 Target Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2030 274
Tabel 3. 7 Arah Kebijakan dan Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025 -2029 279
Tabel 3. 8 Pentahapan RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2025-2030 296
Tabel 3. 9 Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Timur . 297
Tabel 3. 10 Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Misi Pembangunan Daerah 301
Tabel 3. 11 Cascading Tujuan, Sasaran, Outcome dan Program Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Kabupaten Luwu Timur 303
Tabel 3. 12 Highlight Indikasi Intervensi Pembangunan Wilayah Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama 323
Tabel 3. 13 Sasaran Pembangunan Kabupaten/Kota di Kawasan Palopo 334
Tabel 3. 14 Lokasi Indikasi Highlight Intervensi berdasarkan kecamatan, mengacu pada Struktur dan Pola Ruang pada RTRW Kabupaten Luwu Timur 344
Tabel 4. 1 Indikasi Rencana Program Perangkat Daerah yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2026-2030 352
Tabel 4. 2 Indikator Makro Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2030 426

Tabel 4. 3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2030 428
Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2030 431
Tabel 4. 5 Penetapan Target Indikator SPM Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2030 460
Tabel 4. 6 Matriks Bagian 1 : Target Pencapaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (Tpb/Sdgs) Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 – 2029 464

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Keterkaitan antara Dokumen Perencanaan Pusat dan Daerah 8
Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kabupaten Luwu Timur 14
Gambar 2. 2 PDRB Perkapita Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2024 58
Gambar 3. 1 Peta Arah Pembangunan dan Lokasi Prioritas Wilayah Sulawesi Selatan dalam RPJMN 2025-2029 322

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2. 1 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 – 2024 31
Grafik 2. 2 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 – 2024 42
Grafik 2. 3 Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Luwu Timur 43
Grafik 2. 4 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 – 2024 45
Grafik 2. 5 Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020-2024 51
Grafik 2. 6 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 - 2024 (Miliar Rupiah) 52
Grafik 2. 7 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 - 2024 (Miliar Rupiah) 52
Grafik 2. 8 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 - 2024 54
Grafik 2. 9 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kab. Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020 - 2024 55
Grafik 2. 10 Tingkat kemiskinan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 - 2024 56
Grafik 2. 11 Perbandingan Tingkat kemiskinan Kabupaten Luwu Timur dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020 - 2024 57
Grafik 2. 12 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Luwu Timur dengan Kabupaten/Kota disekitarnya Tahun 2020 - 2024 59
Grafik 2. 13 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Luwu Timur dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020 - 2024 60
Grafik 2. 14 Indeks Gini Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 - 2024 60
Grafik 2. 15 Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Luwu Timur dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2019 – 2024 61
Grafik 2.16 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Luwu Timur dengan Kabupaten/Kota Sekitarnya Tahun 2020 - 2024 63
Grafik 2. 17 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Luwu Timur dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020 - 2024 63
Grafik 2. 18 Umur Harapan Hidup Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 - 2024 ..64
Grafik 2. 19 Perbandingan Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) Kabupaten Luwu Timur dengan Kabupaten/Kota disekitarnya Tahun 2020-2024 65
Grafik 2. 20 Perbandingan Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Luwu Timur dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020 - 2024 65
Grafik 2. 21 Prevalensi Stunting Pada Balita (pendek dan sangat pendek) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020-2024 67
Grafik 2. 22 Perbandingan Prevalensi Stunting Kabupaten Luwu Timur dengan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 – 2024 68
Grafik 2. 23 Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 – 2024 83

Grafik 2. 24 Perbandingan Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Luwu Timur dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 – 2024 84
Grafik 2. 25 Tingkat Partisiasi Angkatan Kerja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 - 2024 88
Grafik 2. 26 Perbandingan TPAK Kabupaten Luwu Timur dengan Kabupaten/Kota disekitarnya Tahun 2020 - 2024 89
Grafik 2. 27 Perbandingan TPAK Kabupaten Luwu Timur dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020 - 2024 90
Grafik 2. 28 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 – 2024 90
Grafik 2. 29 Laju Inflasi Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 - 2024 106
Grafik 2. 30 Persentase Proporsi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 - 2025 229
Grafik 2. 31 Rasio Belanja Pegawai dan Belanja Modal terhadap Belanja Daerah Tahun 2020 – 2030 231
Grafik 2. 32 Rasio Derajat DesntralisasI Fiskal Murni Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020-2024 232
Grafik 2. 33 Share Belanja Modal terhadap PMTB Tahun 2020-2023 234

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan merupakan proses yang sistematis dan terstruktur dalam menentukan tujuan, strategi, dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai kemajuan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam suatu wilayah. Perencanaan pembangunan secara umum merupakan aspek yang fundamental dalam kontestasi pembangunan, disamping aspek pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi. Perencanaan yang rasional, berkualitas akan menuntun pada keberhasilan pembangunan. Sebaliknya, perencanaan pembangunan yang buruk berpotensi menghadirkan kegagalan (inefisiensi dan inefektifitas) dalam pembangunan. Dengan demikian, rumusan perencanaan pembangunan, selain dituntut mengedepankan keterpaduan dengan komponen pembangunan lain, baik secara kewilayahan maupun sektoral, juga dikonstruksi secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan, bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 memberikan amanat kepada pemerintah daerah untuk menyusun dokumen RPJMD. Dijelaskan lebih lanjut bahwa dokumen RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Berdasarkan Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tersebut, RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dilantik. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah setelah pelantikan pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah harus segera

menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dibentuk berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan. Tujuan umum dibentuknya Kabupaten Luwu Timur selaras dengan semangat dan nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat di Tana Luwu yang merupakan warisan leluhur diantaranya yaitu "wanua mappatuo na ewai alena", (Negeri yang Menghidupi, dan mampu memberdayakan dirinya sendiri). Sampai saat ini, capaian pembangunan Kabupaten Luwu Timur telah dirasakan hasil dan manfaatnya oleh masyarakat. Kabupaten Luwu Timur telah mampu mentransformasikan diri menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, pusat perkembangan Industri dan Pusat Pengembangan Sektor Pertanian yang penting di Sulawesi Selatan. Walaupun demikian, seiring dengan dinamika masyarakat dan tantangan Pembangunan yang semakin kompleks, diperlukan keberlanjutan dan perubahan yang lebih baik dari aktivitas pembangunan yang sedang berlangsung sehingga dapat benar-benar mewujudkan tujuan yang diinginkan.

Kabupaten Luwu Timur, sebagai bagian dari Kawasan Strategis Nasional Sorowako di Sulawesi Selatan, memainkan peranan penting dalam mendukung transformasi ekonomi kawasan Palopo dan sekitarnya. Dengan kontribusi sebesar 4,36 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Sulawesi Selatan, Luwu Timur menegaskan posisinya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional yang strategis. Peran utama Luwu Timur dalam ekonomi regional tak lepas dari kekayaan sumber daya alam, khususnya sektor pertambangan nikel. Sebagai komoditas andalan, nikel memberikan sumbangsih besar terhadap dinamika ekonomi daerah ini. Namun demikian, ketergantungan yang tinggi pada sektor pertambangan menyebabkan fluktuasi ekonomi yang cukup signifikan, mengikuti gejolak harga dan produksi global. Meski demikian, Luwu Timur menunjukkan tren pertumbuhan ekonomi yang relatif positif. Sejak tahun 2005 dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,57 persen, angka ini terus meningkat hingga mencapai 9,66 persen pada tahun 2023. Namun tantangan tetap ada, terbukti dari perlambatan yang terjadi pada tahun 2024 dengan laju pertumbuhan ekonomi turun menjadi 3,27 persen.

Di sisi pembangunan manusia, Kabupaten Luwu Timur mencatat kemajuan yang membanggakan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari kategori sedang sebesar 69,41 poin pada tahun 2005 menjadi 76,44 poin pada tahun 2024, yang merupakan capaian tertinggi di antara kabupaten lainnya. Hal ini mencerminkan peningkatan kualitas hidup masyarakat, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan standar hidup.

Tingkat pengangguran terbuka tahun 2024 tercatat sebesar 4,58 persen, atau sekitar lima orang dari setiap seratus penduduk usia kerja masih menganggur. Sementara itu, tingkat kemiskinan berhasil ditekan hingga 6,55 persen, menunjukkan adanya kemajuan dalam distribusi kesejahteraan. Penurunan rasio ketimpangan pendapatan menjadi 0,344 poin menegaskan keberhasilan pemerintah daerah dalam

mengurangi kesenjangan ekonomi, meskipun upaya pemerataan pembangunan tetap menjadi prioritas.

Pendapatan per kapita masyarakat juga menunjukkan peningkatan yang signifikan, yakni mencapai 97,18 juta rupiah per tahun pada tahun 2024. Ini menandakan pertumbuhan ekonomi telah berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meskipun capaian pembangunan cukup menggembirakan, tantangan ke depan tetap memerlukan perhatian serius. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur perlu terus mengoptimalkan potensi daerah serta memperkuat sektor-sektor ekonomi lainnya guna menciptakan struktur ekonomi yang lebih seimbang dan berkelanjutan. Pembangunan yang merata dan berkelanjutan menjadi kunci untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh masyarakat Luwu Timur.

RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 adalah merupakan implementasi tahap pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Luwu Timur 2025-2045. Visi, Misi, dan sasaran pembangunan Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode tahun 2025-2029, Ir. H. Irwan Bachri Syam ST.,IMP dan Dra Hj. Puspawati Husler mengusung 4 pilar utama pembangunan yaitu (1) Kelembagaan pemerintahan yang berkualitas dan transformasi pelayanan publik, (2) Peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, (3) Struktur ekonomi yang terus tumbuh dan maju serta (4) Lingkungan hidup yang terjaga, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim.

Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal (7), dan amanat Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2025-2029 disusun berdasarkan pendekatan perencanaan pembangunan meliputi :

a. ***Teknokratik***, pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah oleh lembaga yang secara fungsional bertugas untuk itu.

b. ***Partisipatif***, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Pelibatan ini adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.

c. ***Politik***, pendekatan ini memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan para calon kepala daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah saat kampanye kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

d. ***Atas-bawah (top-down)*** dan ***Bawah-atas (bottom-up)***, Pendekatan *top-down* dan *bottom-up* dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas tersebut diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik ditingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan.

e. ***Holistik-Tematik***, pendekatan ini dilaksanakan dengan melihat perencanaan sebagai satu kesatuan utuh dengan fokus pada tempat dan isu tertentu. Pendekatan ini memastikan bahwa seluruh perencanaan mempertimbangkan seluruh aspek terkait dan tidak hanya fokus pada satu bagian saja.

f. ***Integratif***, pendekatan ini menyatukan berbagai aspek atau elemen yang relevan menjadi satu kesatuan yang terpadu yaitu dengan mempertimbangkan berbagai sektor, isu dan pemangku kepentingan secara bersamaan dan terintegrasi.

g. ***Spasial***, pendekatan ini dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek ruang, lokasi, dan fungsi dari berbagai kegiatan dan pembangunan disuatu wiayah seperti permukiman, industri, pertanian, dan transportasi, saling terkait dan terdistribusi dalam ruang fisik.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2025-2029 merupakan rangkaian yang berkesinambungan, mulai dari tahap persiapan sampai dengan penetapan Perda tentang RPJMD. Pada tahap persiapan telah dilakukan penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD, sesuai amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Hasil dari rancangan teknokratik RPJMD menjadi salah satu input bagi penyusunan Rancangan Akhir RPJMD. Selanjutnya, Rancangan Akhir disusun dan disempurnakan dengan hasil konsultasi publik, pembahasan dan kesepakatan dengan DPRD Luwu Timur serta hasil konsultasi ke Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Rancangan Akhir yang telah disempurnakan menjadi dasar bagi perangkat daerah untuk menyempurnakan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Selanjutnya Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah menjadi masukan untuk perumusan Rancangan RPJMD dan siap untuk di bahas dalam Musrenbang RPJMD. Musrenbang RPJMD dilakukan untuk penyempurnaan rancangan akhir RPJMD yang akan diajukan ke DPRD untuk dibahas dan disetujui menjadi Peraturan Daerah tentang RPJMD. Penyusunan RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 juga telah memperhatikan capaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kab. Luwu Timur Tahun 2025-2029, yang diwujudkan melalui penetapan program prioritas daerah sebagai bentuk respon terhadap janji politik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan aspirasi masyarakat serta pokok-pokok pikiran DPRD. Tahapan selanjutnya, Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD dievaluasi oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD, yang akan ditetapkan dengan Perda tentang RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029. Selanjutnya akan menjadi pedoman perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah dan selanjutnya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen rencana tahunan. Dengan demikian akan tercipta keselarasan RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2025-2029 dengan rencana strategis Perangkat Daerah.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6123);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20l9 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6633);
13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2019 Nomor 112);
14. Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana KerjaPemerintahDaerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 459);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);

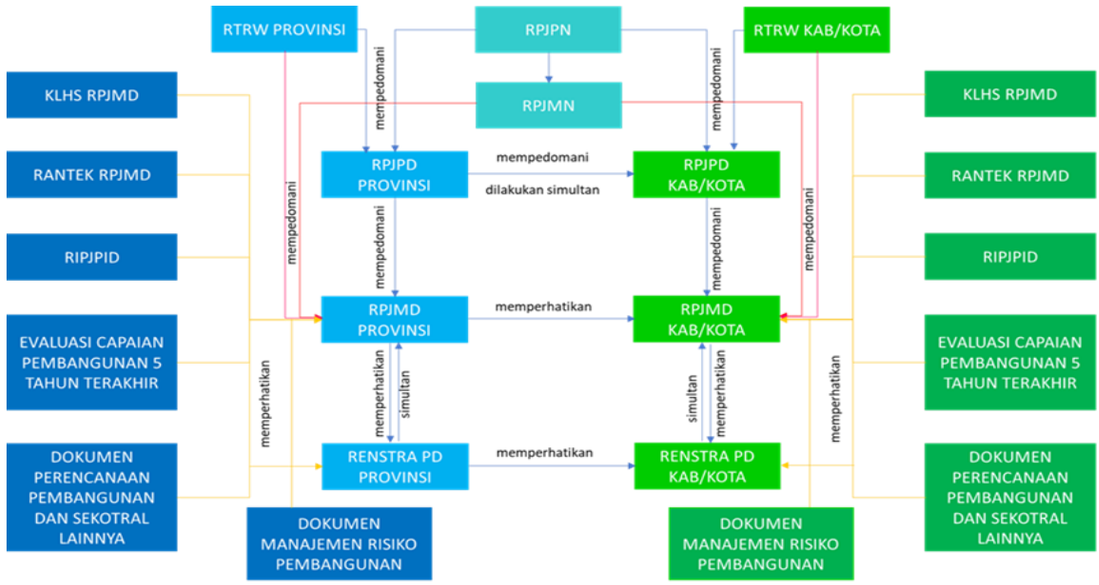
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1419);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 322);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045;
24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 Nomor 1,Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 341);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah KabupatenLuwu Timur Nomor 154);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 162);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);

1.3 HUBUNGAN ANTARA DOKUMEN RPJMD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN LAINNYA.

Koordinasi dan konsistensi antara berbagai dokumen perencanaan sangat penting agar pembangunan dapat dilaksanakan secara terarah dan efisien sesuai dengan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Penyusunan RPJMD Kabupaten disusun mengacu pada RPJMN, RPJMD Provinsi, berpedoman pada RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten. Serta isu-isu strategis dalam kajian Lingkungan Hidup

Kabupaten Luwu Timur. Keterkaitan Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dengan dokumen Perencanaan Pusat dan dokumen lainnya yaitu memedomani dan memperhatikan sebagaimana dapat digambarkan dalam skema pada gambar 1.1 sebagai berikut ini:

Gambar 1. 1 Keterkaitan antara Dokumen Perencanaan Pusat dan Daerah



Sumber : Inmendagri nomor 2 tahun 2025

1.3.1 RPJMD KABUPATEN LUWU TIMUR DENGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) 2025-2029

RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025–2029 disusun dengan memperhatikan keselarasan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029. Sinkronisasi ini dilakukan untuk menjamin integrasi vertikal perencanaan antara pusat dan daerah, serta mendorong pencapaian agenda strategis nasional di tingkat lokal. Beberapa isu nasional yang diarusutamakan meliputi penanggulangan kemiskinan, peningkatan kualitas SDM, transformasi ekonomi, ketahanan pangan dan energi, serta pembangunan berkelanjutan. Integrasi ini memastikan bahwa pembangunan di Kabupaten Luwu Timur sejalan dengan visi pembangunan nasional dan mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs).

1.3.2 RPJMD KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2029 DENGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2025 – 2029

RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025–2029 disusun dengan memperhatikan keselarasan arah kebijakan, prioritas pembangunan, dan sasaran strategis yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025–2029. Integrasi ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan konsistensi dan sinergi antara perencanaan pembangunan kabupaten dengan perencanaan pembangunan di tingkat provinsi, sesuai dengan prinsip perencanaan pembangunan nasional yang terintegrasi secara vertikal. Perhatian terhadap RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan

dilakukan agar program dan kegiatan strategis Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dapat mendukung pencapaian target-target pembangunan provinsi, khususnya dalam bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan pengurangan kesenjangan wilayah. Selain itu, keselarasan ini memperkuat posisi Kabupaten Luwu Timur dalam menjalin kerja sama lintas wilayah serta mengakses dukungan pendanaan dari provinsi dan pusat. Dengan demikian, penyusunan RPJMD Kabupaten Luwu Timur tidak dilakukan secara sektoral dan parsial, tetapi mempertimbangkan arah pembangunan daerah secara menyeluruh dan terpadu dalam kerangka pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025–2029.

1.3.3 RPJMD KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2029 DENGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJPD) KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025 – 2045

RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025–2029 disusun dengan memedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025–2045. RPJMD ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahap pertama dalam periode 20 tahun RPJPD, yang menempati fase Penguatan Landasan Transformasi. Sebagai tahap awal, RPJMD 2025–2029 memiliki posisi strategis dalam membentuk fondasi yang kokoh bagi transformasi struktural, peningkatan daya saing daerah, dan penguatan tata kelola pembangunan. Seluruh arah kebijakan dan program prioritas diarahkan untuk menciptakan kondisi yang mendukung tercapainya visi jangka panjang: “Luwu Timur Lebih Maju, Berkelanjutan, dan Harmonis Tahun 2045.” Dengan demikian, RPJMD ini bukan hanya berfungsi sebagai instrumen lima tahunan, tetapi juga sebagai penentu arah keberhasilan pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan dan inklusif.

1.3.4 RPJMD KABUPATEN LUWU TIMUR DENGAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2044

RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025–2029 disusun selaras dengan RTRW Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025–2044 untuk memastikan pembangunan daerah berjalan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. RTRW menjadi dasar pengaturan pemanfaatan ruang, yang mencakup struktur ruang, pola ruang, serta zonasi wilayah. Integrasi ini bertujuan untuk mengarahkan pembangunan secara spasial agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta menghindari konflik pemanfaatan ruang antar sektor. Keterpaduan antara RPJMD dan RTRW juga memperkuat dasar hukum pelaksanaan program prioritas, pengendalian pembangunan, serta mendukung terwujudnya pembangunan yang terarah, efisien, dan berkelanjutan.

1.3.5 RPJMD KABUPATEN LUWU TIMUR DENGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025–2029 menjadi pedoman utama bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) masing-masing. Renstra perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang harus disusun dengan mengacu secara langsung pada arah, kebijakan, dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Dalam proses penyusunannya, setiap perangkat daerah wajib memperhatikan visi dan misi Kepala Daerah yang telah dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran RPJMD. Rumusan tujuan Renstra perangkat daerah disusun dengan memperhatikan sasaran pembangunan jangka menengah daerah, sedangkan arah kebijakan dalam Renstra merupakan bentuk operasionalisasi dari arah kebijakan RPJMD, yang kemudian diturunkan secara sistematis ke dalam program dan kegiatan prioritas perangkat daerah.

Seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan yang dirumuskan dalam Renstra perangkat daerah wajib memedomani RPJMD, baik dari sisi substansi, target kinerja, maupun konsistensi pencapaian prioritas pembangunan daerah. Dengan demikian, keterpaduan dan sinergi antara dokumen perencanaan daerah di seluruh tingkatan dapat terjaga, dan pelaksanaan pembangunan daerah dapat berlangsung secara efektif, terarah, dan selaras dengan visi pembangunan jangka menengah daerah.

1.3.6 RPJMD KABUPATEN LUWU TIMUR DENGAN KLHS RPJMD KABUPATEN LUWU TIMUR

RPJMD Kabupaten Luwu Timur disusun dengan mengintegrasikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. KLHS berperan penting dalam mengidentifikasi isu strategis lingkungan dan sosial yang berdampak terhadap keberlanjutan pembangunan daerah. Hasil KLHS menjadi dasar dalam merumuskan visi, misi, tujuan, sasaran, dan arah kebijakan RPJMD agar sejalan dengan prinsip keberlanjutan, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta pengurangan risiko bencana dan perubahan iklim. Proses penyusunannya melibatkan pemangku kepentingan lintas sektor secara partisipatif.Dengan terintegrasinya KLHS ke dalam RPJMD, diharapkan pembangunan di Kabupaten Luwu Timur dapat berlangsung secara inklusif, adil, dan menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang.

1.3.7 RPJMD KABUPATEN LUWU TIMUR DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN TEKNIS KABUPATEN LUWU TIMUR LAINNYA

RPJMD Kabupaten Luwu Timur disusun dengan mengacu dan terintegrasi dengan berbagai dokumen perencanaan teknis dan strategis lainnya di tingkat daerah. Integrasi ini bertujuan untuk memastikan keterpaduan kebijakan dan program pembangunan lintas sektor, serta menjaga konsistensi pelaksanaan pembangunan jangka menengah secara sistematis dan berkelanjutan. Beberapa dokumen perencanaan teknis yang diharmonisasikan dalam penyusunan RPJMD antara lain: Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RPB), Kajian Risiko Bencana (KRB), Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim (RAD API), Rencana Umum Energi Daerah (RUED), Rencana Aksi Daerah Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK), serta dokumen strategis lainnya yang relevan dengan konteks pembangunan daerah.

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

1.4.1 MAKSUD

Maksud penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 adalah tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan pedoman dan arah penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Luwu Timur dalam kurun waktu lima tahun kedepan.

1.4.2 TUJUAN

Penyusunan RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025–2029 bertujuan untuk:

1. Menjabarkan tahap pertama dari periodesasi RPJPD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025–2045;
2. Menjabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan serta program kerja Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan yang lebih rinci, terarah, terukur, dan dapat dilaksanakan dalam periode lima tahun ke depan;
3. Menjadi pedoman resmi dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), guna menjamin konsistensi perencanaan pembangunan daerah dari jangka menengah ke tahunan;
4. Menjadi rujukan resmi bagi seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan melalui sumber pembiayaan dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, serta sumber dana lainnya;
5. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan kabupaten/kota sekitar, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan Pemerintah Pusat;
6. Menjadi tolok ukur kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih;
7. Menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam merancang, melaksanakan, dan mengawal proses pembangunan di wilayah Kabupaten Luwu Timur;
8. Menjadi acuan bagi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan daerah dan dalam menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai prioritas dan sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD;
9. Mewujudkan pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, adil, dan berwawasan lingkungan guna mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan;
10. Merumuskan arah kebijakan dan program pembangunan yang mengakomodir berbagai kepentingan serta aspirasi dari seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Luwu Timur.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Dengan berpedoman pada Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Umum Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 maka Dokumen RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, memuat:

1. Latar belakang;
2. Dasar hukum penyusunan;
3. Hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya;
4. Maksud dan tujuan; dan
5. Sistematika penyusunan.

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH, memuat:

1. Gambaran Umum Kondisi Daerah
   a. Aspek geografi dan demografi;
   b. Aspek kesejahteraan masyarakat;
   c. Aspek daya saing daerah;
   d. Aspek pelayanan umum, termasuk Standar Pelayanan Minimal dan Kerjasama daerah;
2. Gambaran Keuangan Daerah, memuat :
   Penjelasan tentang realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024 (dari tahun 2020 hingga tahun 2024) dan proyeksi keuangan daerah Tahun Anggaran 2025-2029
3. Permasalahan dan Isu Strategis, memuat:
   a. Permasalahan pembangunan daerah; dan
   b. Isu strategis daerah

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH, memuat:

1. Visi, Misi, Tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.
2. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH, memuat:

1. Program Perangkat Daerah, memuat:
   a. Daftar program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dalam mencapai kinerja pembangunan daerah; dan
   b. Indikator program, target dan pagu indikatif program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
2. Kinerja Penyelenggaran Pemerintah Daerah, memuat:
   a. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU); dan

b. Target penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (IKD).

BAB V PENUTUP, memuat:

Kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

BAB II
GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1.1 ASPEK GEOGRAFI

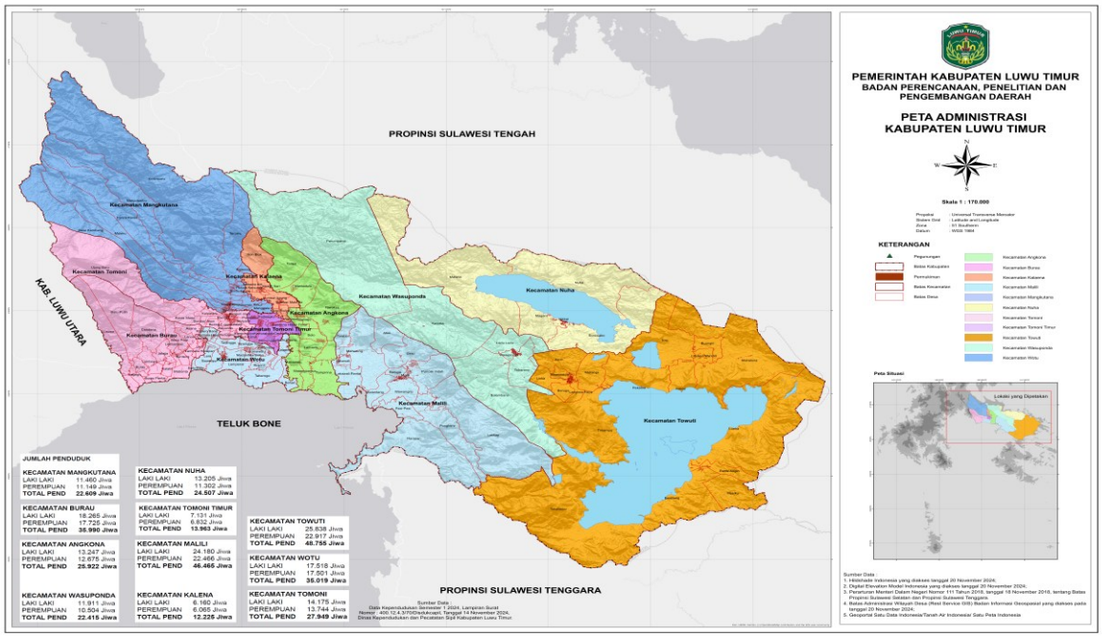
2.1.1.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah

2.1.1.1.1.1 Wilayah Administrasi

Kabupaten Kabupaten Luwu Timur merupakan salah satu dari 24 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, dan merupakan kabupaten paling timur di Provinsi Sulawesi Selatan. Ibu Kota Kabupaten Luwu Timur adalah Malili, yang terletak di ujung utara teluk bone. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Tahun 2025, Kabupaten Luwu Timur memiliki luas wilayah sekitar 6.747,93 Km^2, namun terakhir data luas wilayah Kabupaten Luwu Timur telah diupdate melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri No 300.2.2-2138 tanggal 25 April 2025 tentang Pemberian dan Pemukhtahiran data wilayah administrasi pemerintahan dan pulau menjadi seluas 6.745,772 Km^2. Secara administrasi, Kabupaten Luwu Timur berbatasan dengan dua Provinsi yaitu Sulawesi Tengah di sebelah utara dan timur dan Provinsi Sulawesi Tenggara di sebelah selatan. Selain itu Kabupaten Luwu Timur juga berbatasan langsung dengan Teluk Bone di sebelah selatan.

Berdasarkan letak astronomis, Kabupaten Luwu Timur terletak pada $2^0$03'00'' - $3^0$03'25'' Lintang Selatan, serta 119^{0}28'56'' – 121^{0}47'27'' Bujur Timur berada pada jalur trans Sulawesi dimana sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Poso dan Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Marowali Provinsi Sulawesi Tengah, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Konawe dan Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara serta Teluk Bone, dan sebelah Barat berbatasan Kabupaten Luwu Utara.

Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kabupaten Luwu Timur



Sumber : RTRW Kabupaten Luwu Timur 2025-2044

Kabupaten Luwu Timur secara administratif terdiri dari 11 Kecamatan, 125 Desa dan 3 Kelurahan. Adapun 11 Kecamatan, yaitu Kecamatan Burau, Wotu, Tomoni, Tomoni Timur, Angkona, Malili, Towuti, Nuha, Wasuponda, Mangkutana, dan Kalaena. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Towuti yang mencapai 1,926,13 km^2 atau sekitar 28,54 persen dari luas wilayah Kabupaten Luwu Timur. Malili merupakan ibu kota Kabupaten Luwu Timur terletak ±550 km sebelah utara kota Makassar, ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan dan dapat dicapai dengan perjalanan darat (±12 jam) ataupun udara (Bandara Sorowako ±45 menit dari Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar). Adapun luas wilayah berdasarkan kecamatan sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Luas Wilayah Persentase menurut Kecamatan Kabupaten Luwu Timur

Kecamatan	Luas Wilayah (Km^2)	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Persentase (%)
Burau	275,4	18		4,08
Wotu	147,64	17		2,19
Tomoni	274,69	12	1	4,07
Tomoni Timur	44,86	8		0,66
Angkona	294,93	10		4,37
Malili	883,62	14	1	13,09
Towuti	1,926,13	18		28,54
Nuha	859,71	4	1	12,74
Wasuponda	834,85	6		12,37
Mangkutana	1.147,02	11		17
Kalaena	59,08	7		0,88
Luwu Timur	6.747,93	125	3	100

Sumber: BPS, Kabupaten Luwu Timur dalam Angka tahun 2025

A. Topografi

Kabupaten Luwu Timur yang sebagian besar wilayahnya berada pada kawasan Pegunungan Verbeck merupakan daerah yang bertopografi pegunungan. Namun di beberapa tempat merupakan daerah pedataran hingga rawa-rawa. Wilayah-wilayah yang bergunung adalah bagian utara dan barat sedangkan wilayah pedataran adalah bagian selatan dan barat. Kondisi datar sampai landai terdapat pada semua wilayah kecamatan dengan yang terluas di Kecamatan Angkona, Burau, Wotu, Malili dan Mangkutana. Sedangkan kondisi bergelombang dan bergunung yang terluas di Kecamatan Nuha, Mangkutana dan Towuti.

Analisis peta topografi menunjukkan bahwa Kabupaten Luwu Timur dapat dibagi menjadi 4 wilayah lereng dan satu danau. Penggolongan tersebut adalah pegunungan (>40%), perbukitan (15 – 40%), bergelombang (8 – 15%) dan pedataran (0 – 8%). Luas wilayah dengan kemiringan >40% mencapai 161.334,47 Ha (23,15%), kemiringan 0-2% mencapai 262.503,60 Ha, kemiringan 2-5% mencapai 11.955,91 Ha, kemiringan 25-40% mencapai 138.387,20 Ha.

Tabel 2. 2 Kondisi Kelerengan Kabupaten Luwu Timur

No	Kelerengan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	0 - 2 %	262.503,60	37,67
2	2 - 5 %	11.955,91	1,72
3	5 - 15 %	41.339,53	5,93

No	Kelerengan	Luas (Ha)	Persentase (%)
4	15 - 25 %	81.245,66	11,66
5	25 - 40 %	138.387,20	19,86
6	> 40 %	161.334,47	23,15
Total		**674,862.99**	**100,00**

Sumber : Peta kelerengan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011

Kabupaten Luwu Timur didominasi oleh wilayah pegunungan (422.306,86 Ha), menandakan bahwa sebagian besar wilayah ini berada pada ketinggian. Jika dilihat posisi wilayah ini dari muka laut, maka Kabupaten Luwu Timur dikelompokkan menjadi 5 kelompok yaitu 0 – 100m, 100 – 500m, 500 – 1000m dan >1000m. Sebagian besar wilayah Kecamatan Nuha berada pada daerah pegunungan, sedangkan Angkona dan Wotu didominasi oleh daerah pedataran. Sejalan dengan kelerengan, maka ketinggian juga menunjukkan bahwa Kecamatan Nuha berada pada wilayah ketinggian di atas 3.000 mdpl. Demikian halnya dengan Kecamatan Towuti yang didominasi oleh pegunungan dengan ketinggian > 1.000 mdpl.

Tabel 2. 3 Kondisi Topografi Kabupaten Luwu Timur

No	Ketinggian	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	**Danau**	**76.819,15**	
	300 – 400	75.500,17	10,83
	400 – 500	923,92	0,13
	500 – 600	300,89	0,04
	600 – 700	94,17	0,01
2	**Luwu Timur**	**620.059,15**	
	0 – 100	106.250,23	15,25
	100 – 200	26.042,79	3,74
	1000 – 1100	22.114,41	3,17
	1100 – 1200	18.601,79	2,67
	1200 – 1300	20.124,69	2,89
	1300 – 1400	20.954,58	3,01
	1400 – 1500	18.949,25	2,72
	1500 – 1600	13.945,33	2,00
	1600 – 1700	9034,23	1,30
	1700 – 1800	6979,38	1,00
	1800 – 1900	4525,82	0,65
	1900 – 2000	2721,56	0,39
	200 – 300	24.661,79	3,54
	2000 – 2100	1643,44	0,24
	2100 – 2200	1538,95	0,22
	2200 – 2300	1402,93	0,20
	2300 – 2400	1278,5	0,18
	2400 – 2500	1051,18	0,15
	2500 – 2600	844,31	0,12
	2600 – 2700	658,13	0,09
	2700 – 2800	436,16	0,06
	2800 – 2900	201,17	0,03
	2900 – 3000	48,07	0,01
	300 – 400	67.837,67	9,73
	400 – 500	63.866,77	9,16
	500 – 600	50.437,36	7,24
	600 – 700	43.057,18	6,18
	700 – 800	35.789,87	5,14
	800 – 900	29.761,21	4,27
	900 – 1000	25.300,4	3,63

No	Ketinggian	Luas (Ha)	Persentase (%)
Total		**674,862.99**	**100,00**

Sumber : Peta Topografi Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011

B. Hidrogeologi

Kondisi Sumberdaya air di Kabupaten Luwu Timur sangat dipengaruhi oleh sistem danau dan sungai yang saling terhubung. Terdapat tiga danau utama yaitu Danau Matano, Danau Mahalona, dan Danau Towuti, serta dua danau kecil (satelit) yaitu Danau Masapi dan Danau Wawontoa. Danau Matano yang merupakan hulu sistem hidrologi memiliki daerah tangkapan seluas 48.242 Ha dengan kedalaman hingga 583 meter, dan airnya mengalir ke Danau Mahalona melalui Sungai Petea. Danau Mahalona dengan kedalaman 10 meter dan daerah tangkapan 26.085 Ha menerima aliran dari Matano serta tambahan dari Sungai Lamangka, tempat dibangunnya Dam Fiona sebagai pengendali sedimen tambang, lalu mengalir ke Danau Towuti melalui Sungai Tominanga. Danau Towuti merupakan yang terbesar dengan luas genangan 58.500 Ha, kedalaman 293 meter, dan daerah tangkapan 170.042 Ha. Muka air danau ini dipengaruhi operasional PLTA Batubesi yang mengatur aliran ke Sungai Larona. Selain itu, Danau Wawontoa terhubung ke Towuti melalui sungai kecil, sedangkan Danau Masapi bermuara langsung ke Sungai Larona. Selanjutnya, Sungai Larona bergabung dengan Sungai Pongkeru dan akhirnya bermuara ke Teluk Bone.

Tabel 2. 4 Danau, Kedalaman, Luas dan Lokasi Danau di Wilayah Kabupaten Luwu Timur

No	Nama Danau	Luas (Km^2)	Kedalaman (m)	Lokasi
1	Matano	245,7	589	Kec. Nuha
2	Mahalona	25	95	Kec. Towuti
3	Towuti	585	95	Kec. Towuti
4	Taparang Masapi	2,43	*	Kec. Towuti
5	Lantoa	1,72	*	Kec. Towuti

Sumber: BPS, Kabupaten Luwu Timur Dalam Angka Tahun 2021

Sungai Larona merupakan outlet dari Dam Batubesi dengan daerah tangkapan air seluas 33.578 Ha yang didominasi hutan dan sedikit pemukiman serta perladangan. Sungai ini memiliki panjang sekitar 20 km dengan gradien curam (0,01) dan substrat berbatu, sehingga alirannya sangat deras dan turbulen. Anak Sungai Larona, yaitu Sungai Pongkeru, memiliki daerah tangkapan air 28.000 Ha yang sebagian besar berupa hutan produksi terbatas serta sedikit pemukiman dan perladangan. Aliran Sungai Pongkeru melewati lereng terjal (>45%) dan membawa muatan sedimen lebih besar dibanding Sungai Larona, mencerminkan tingkat erosi yang lebih tinggi di daerah tangkapannya.

C. Klimatologi

Berdasarkan data klimatologi, suhu udara di Kabupaten Luwu Timur sepanjang tahun relatif stabil dengan kisaran minimum antara 22,0–23,7°C, suhu rata-rata berkisar 26,4–28,3°C, dan suhu maksimum dapat mencapai 32,6–36,4°C. Suhu terendah tercatat pada bulan Juli dengan rata-rata 26,4°C, sedangkan suhu tertinggi terjadi pada bulan November dengan maksimum 36,4°C. Kondisi ini menunjukkan bahwa wilayah Luwu Timur memiliki iklim tropis dengan suhu cenderung hangat sepanjang tahun. Dari sisi kelembaban udara, nilai minimum

tercatat antara 53–74%, rata-rata 76,9–85,8%, dan maksimum dapat mencapai 98% hampir di seluruh bulan. Kelembaban tertinggi secara rata-rata terjadi pada bulan Juli sebesar 85,83%, sedangkan terendah pada bulan Oktober dengan 77,53%. Pola ini menggambarkan bahwa Luwu Timur memiliki tingkat kelembaban tinggi yang konsisten sepanjang tahun, dengan sedikit penurunan pada periode peralihan musim, sehingga berpengaruh terhadap kenyamanan iklim serta aktivitas pertanian dan perikanan masyarakat setempat.

Tabel 2. 5 Suhu dan Kelembaban Udara Kabupaten Luwu Timur

Bulan	Suhu (0C)			Kelembaban (%)		
	Minimum	Rata-Rata	Maksimum	Minimum	Rata-Rata	Maksimum
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Januari	23,6	27,83	35,6	53	81,24	98
FebruarI	23,4	27,65	34,7	56	82,62	98
Maret	23,7	28,2	35,2	57	82,86	98
April	23,4	27,81	34,6	58	84,28	98
Mei	23,4	27,65	34,2	56	85,11	98
Juni	22,4	27,2	33,8	57	83,66	98
Juli	22,1	26,4	32,6	66	85,83	98
Agustus	22,4	26,44	32,7	74,25	83,17	92,25
September	22	27,71	34,8	65,5	76,87	87
Oktober	23,2	28,27	35,2	70,5	77,53	88
November	22,8	28,26	36,4	73,5	79,79	85,75
Desember	23,1	27,55	34,8	74	82,32	92

Sumber :BPS, Kabupaten Luwu Timur Dalam Angka tahun 2025

Berdasarkan data klimatologi, kecepatan angin di Kabupaten Luwu Timur sepanjang tahun relatif rendah dengan nilai minimum yang konsisten berada pada 0 knot, rata-rata berkisar 0,61–1,06 knot, dan maksimum dapat mencapai 10,20 knot pada bulan Agustus. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum kondisi angin di wilayah ini tenang hingga sedang, dengan peningkatan kecepatan angin pada bulan-bulan tertentu yang kemungkinan terkait dengan pola musim angin timuran. Sementara itu, tekanan udara tercatat bervariasi pada kisaran 999,3–1006,4 mbar untuk nilai minimum, 1004,57–1008,67 mbar untuk rata-rata, dan maksimum mencapai 1010,9 mbar. Tekanan udara cenderung lebih tinggi pada pertengahan tahun, khususnya Juni–Agustus, seiring dengan musim kemarau, sedangkan nilai yang lebih rendah terjadi pada awal dan akhir tahun. Secara keseluruhan, kondisi angin dan tekanan udara ini menggambarkan pola iklim tropis yang relatif stabil dengan sedikit fluktuasi musiman yang dapat memengaruhi aktivitas kelautan, pertanian, dan perikanan masyarakat setempat.

Tabel 2. 6 Angin dan Tekanan Udara Kabupaten Luwu Timur

Bulan	Kecepatan Angin (knot)			Tekanan Udara (knot)		
	Minimum	Rata-Rata	Maksimum	Minimum	Rata-Rata	Maksimum
1	2	3	4	5	6	7
Januari	0	0,98	6,7	999,3	1005,12	1010
Februari	0	1,01	6,2	1000,6	1006,35	1010,9
Maret	0	0,81	5,1	1000,2	1005,57	1009,9
April	0	0,88	5,7	999,7	1004,57	1008,7
Mei	0	0,77	5,1	1000,7	1005,26	1009,2

Bulan	Kecepatan Angin (knot)			Tekanan Udara (knot)		
	Minimum	Rata-Rata	Maksimum	Minimum	Rata-Rata	Maksimum
1	2	3	4	5	6	7
Juni	0	0,65	4,6	1002,4	1006,61	1010,2
Juli	0	0,68	4,12	1002,2	1007,34	1010,2
Agustus	0	0,61	10,2	1006,4	1008,67	1010,3
September	0	0,74	4,63	1004,6	1007,58	1009,8
Oktober	0	1,01	5,14	1006,4	1007,5	1009,3
November	0	1,06	5,66	1003,5	1006,23	1009,1
Desember	0	0,82	5,66	1002,8	1004,9	1008,7

Sumber :BPS,Kabupaten Luwu Timur Dalam Angka tahun 2025

Berdasarkan data curah hujan, hari hujan, dan penyinaran matahari, terlihat bahwa Kabupaten Luwu Timur memiliki karakteristik iklim tropis basah dengan curah hujan yang cukup tinggi sepanjang tahun. Jumlah curah hujan tahunan bulanan bervariasi antara 110,10 mm (September) hingga 751,50 mm (Mei). Bulan-bulan dengan curah hujan tertinggi terjadi pada Februari, Mei, dan Juli, sedangkan curah hujan terendah terjadi pada September dan Oktober. Jumlah hari hujan juga cukup tinggi, berkisar antara 18 hari (Januari) hingga 31 hari (Agustus, Oktober, dan Desember), menunjukkan bahwa hampir setiap bulan terjadi hujan dengan intensitas berbeda.

Sementara itu, penyinaran matahari relatif terbatas pada bulan-bulan dengan curah hujan tinggi, seperti Mei hingga Agustus, di mana rata-rata lama penyinaran hanya sekitar 3,2–3,8 jam per hari. Sebaliknya, bulan Oktober dan November mencatat penyinaran yang lebih panjang, masing-masing 7,1 jam dan 6,8 jam, seiring dengan curah hujan yang relatif lebih rendah. Secara keseluruhan, pola ini menunjukkan bahwa musim hujan panjang terjadi hampir sepanjang tahun dengan periode kering relatif singkat, serta fluktuasi penyinaran matahari yang berbanding terbalik dengan curah hujan dan jumlah hari hujan.

Tabel 2. 7 Curah Hujan Kabupaten Luwu Timur

Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm/tahun)	Jumlah Hari Hujan (hari)	Penyinaran Matahari (jam)
1	*2*	*3*	*4*
Januari	444,5	18	5,5
Februari	736,9	24	5,4
Maret	353,2	24	4,8
April	487,6	27	4,8
Mei	751,5	29	3,8
Juni	386,2	26	3,7
Juli	736,8	30	3,5
Agustus	319,6	31	3,2
September	110,1	30	5,3
Oktober	245	31	7,1
November	403,9	30	6,8
Desember	501,9	31	4,2

Sumber : BPS, Kabupaten Luwu Timur Dalam Angka tahun 2025

D. Pola Penggunaan Lahan

Jenis penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Luwu Timur didominasi oleh Hutan Lahan Rendah Primer Kerapatan Sedang, yakni masing-masing mencakup

areal seluas 387.904,45 Ha (57.48 %) Ladang/tegalan dengan palawija seluas 93.188.77 Ha (13.81%), Danau/telaga alami seluas 74.636.63 Ha (11,06%). Secara rinci luas masing-masing jenis penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Luwu Timur sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 2. 8 Penggunaan Lahan Kabupaten Luwu Timur

Jenis Penggunaan Lahan	Luas Lahan (Ha)	%
Bangunan industri, perdagangan dan perkantoran	162.3	0.02
Bangunan permukiman desa	6969.35	1.03
Bangunan permukiman kota	596.16	0.09
Danau/telaga alami	74636.63	11.06
Hamparan batuan/pasir lain	515.19	0.08
Hamparan pasir pantai non volkanik	63.18	0.01
Hutan Lahan Rendah Primer Kerapatan Sedang	387904.45	57.48
Hutan Mangrove Sekunder Kerapatan Sedang	4635.92	0.69
Kolam ikan air tawar	97.57	0.01
Ladang/tegalan dengan palawija	93188.77	13.81
Lahan terbuka lain	286.05	0.04
Landas Pacu dan Taxiway	9.9	0.00
Padang Golf	57.2	0.01
Pelabuhan	17.27	0.00
Pembangkit Listrik	6.01	0.00
Perkebunan / Kebun	31821.51	4.72
Pertambangan terbuka bukan sirtu	6516.77	0.97
Rawa pesisir tak bervegetasi	9.39	0.00
Sawah dengan padi diselingi tanaman lain	1187.52	0.18
Sawah dengan padi terus menerus	26081.62	3.86
Semak Belukar	19022.06	2.82
Sungai	5110.48	0.76
Tambak Ikan/Udang	15949.92	2.36
Terminal Bandara	3.02	0.00
Waduk Multiguna	13.72	0.00
Total	**674861.96**	**100.00**

Sumber: Hasil Interpretasi Citra Spot, Tahun 2019

E. Daerah Aliran Sungai (DAS)

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No: 04/PRT/M/2015, sungai-sungai yang ada di Kabupaten Luwu Timur masuk ke dalam 3 wilayah sungai, diantaranya sebagian besar Wilayah Sungai Pompengan-Larona (05.14.A2), Wilayah Sungai Towari-Lasusua (05.18.A2), dan Wilayah Sungai Laa-Tambalako (05.12.B) (Lihat Gambar 1.3). DAS terbesar yang ada di Kabupaten Luwu Timur adalah DAS Lorena yang berada di WS Pompengan-Larona dengan Danau Towuti, yang merupakan danau alam terbesar di Sulawesi, sebagai hulu dari Sungai Larona, Danau Matano sebagai hulu Sungai Malili, dan Danau Mahalona sebagai penghubung antara Danau Towuti dan Danau Matano.

WS Towari-Lasusua adalah wilayah sungai yang termasuk ke dalam WS Lintas Provinsi dan terdiri dari 28 DAS, dengan hanya 1 DAS saja yang masuk ke wilayah Kabupaten Luwu Timur, yaitu DAS Latowu. Wilayah sungai ini melingkupi sebagian besar wilayah Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Kolaka Timur, dan Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tengah, serta sebagian kecil Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan.

WS Pompengan-Larona adalah wilayah sungai yang termasuk ke dalam WS Lintas Provinsi dan terdiri dari 27 DAS, 7 DAS diantaranya masuk wilayah Kabupaten Luwu Timur. Wilayah sungai ini melingkupi Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu, dan Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan, serta Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka Utara, dan Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara.

WS Laa-Tambalako adalah wilayah sungai yang termasuk ke dalam WS Strategis Nasional dan terdiri dari 89 DAS, dengan hanya 2 DAS saja yang masuk ke wilayah Kabupaten Luwu Timur, yaitu DAS Laa dengan Sungai Laa sebagai sungai utamanya dan DAS Tambalako dengan Sungai Ue Tambalako sebagai sungai utamanya. Wilayah sungai ini melingkupi sebagian besar wilayah Kabupaten Morowali, Kabupaten Morowali Utara, dan Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah serta sebagian kecil wilayah Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan.

Tabel 2. 9 Wilayah Sungai (WS) Kabupaten Luwu Timur

No	Wilayah Sungai	Luas (Ha)
1	**BPDAS PALU POSO**	**38452,11**
a	Karaupa	794,21
b	Laa	7258,87
c	Larongsangi	1,19
d	Poso	9186,47
e	Tambalako	21211,37
2	**BPDAS SADDANG**	**657079,3**
a	Angkona	38875,45
b	Balease	95,36
c	Bungadidi	6443,19
d	Cerekang	71277,67
e	Kalanena	138338,49
f	Labongko	5863,68
g	Lampia	3432,32
h	Legogo	1571,56
i	Pongkeru	360227,26
j	Singgaena	11173,78
k	TG. Bulopo	346,55
l	TG. Parasulu	512,45
m	TL. Lebetabuta	159,04
n	TL. Monoho	1441,56
o	Wotu	16452,92
P	(blank)	868,02
3	**BPDAS SAMPARA**	**874,33**
a	Lasolo	806,5
b	Puungkeu	67,83
Total		**696.405,74**

Sumber: BBWS-PJ, Tahun 2020

F. Kawasan Rawan Bencana

Kejadian bencana dijabarkan berdasarkan kejadian bencana yang pernah terjadi dan di Kabupaten Luwu Timur. Dari DIBI, Kabupaten Luwu Timur pernah mengalami 5 (lima) jenis kejadian bencana yang utama diluar kejadian Kebakaran Rumah. Kejadian bencana yang pernah terjadi menimbulkan dampak baik korban jiwa, kerugian ekonomi dan fisik serta kerusakan lingkungan yang tidak sedikit.

Kejadian bencana yang pernah terjadi di Kabupaten Luwu Timur disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 10 Kejadian Bencana Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2020 - 2024

Tahun	Jenis Bencana						
	Banjir	Kebakaran Rumah	Kebakaran Hutan dan Lahan	Orang Hilang/ Tenggelam	Tanah Longsor	Gempa Bumi	Cuaca Ekstrim
2020	7	4	1	8	6	102	14
2021	2	10	0	5	2	153	6
2022	6	12	18	6	6	246	21
2023	8	19	30	7	3	267	7
2024	18	19	5	11	3	245	23
Total	**41**	**64**	**54**	**37**	**20**	**1013**	**71**

Sumber: BPBD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

2.1.1.1.2 Potensi Sumber Daya Alam

Gambaran potensi sumber daya alam Kabupaten Luwu Timur dicerminkan dari potensi pada kawasan pertanian, kawasan konservasi, pengembangan kawasan perikanan tangkap, pengembangan kawasan perikanan budidaya, pengembangan kawasan pariwisata, kawasan pertambangan dan energi, dan pengembangan kawasan industri,

2.1.1.1.2.1 Kawasan Pertanian

Kawasan Pertanian meliputi pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura.

A. Kawasan Pertanian Tanaman Pangan

Kawasan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Luwu Timur dikembangkan seluas 28.325,48 Ha yang tersebar di seluruh kecamatan. Komoditas tanaman pangan di Kabupaten Luwu Timur meliputi padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, talas dan lain-lain disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 11 Luas Kawasan Tanaman Pangan Kabupaten Luwu Timur

No	Kawasan Tanaman Pangan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Kecamatan Angkona	3.705,37	13,08
2	Kecamatan Burau	3.498,39	12,35
3	Kecamatan Kalaena	2.766,24	9,77
4	Kecamatan Malili	1.204,06	4,25
5	Kecamatan Mangkutana	2.382,46	8,41
6	Kecamatan Nuha	79,47	0,28
7	Kecamatan Tomoni	1.299,98	4,59
8	Kecamatan Tomoni Timur	2.796,93	9,87
9	Kecamatan Towuti	5.017,89	17,72
10	Kecamatan Wasuponda	1.318,30	4,65
11	Kecamatan Wotu	4.256,38	15,03
Jumlah		**28.325,48**	**100**

Sumber: RTRW Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2044

Dalam rangka menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan, ditetapkan beberapa kawasan pertanian tanaman pangan

sebagai Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan (KP2B) untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten.

B. Kawasan Perkebunan

Kawasan perkebunan merupakan kawasan peruntukan bagi tanaman tahunan yang menghasilkan bahan pangan dan bahan baku industri. Komoditas tanaman perkebunan yang dihasilkan antara lain meliputi kelapa sawit, kakao dan lada. Rencana pengembangan Kawasan perkebunan di Kabupaten Luwu Timur meliputi areal seluas kurang lebih 56.591,45 Ha yang tersebar di diseluruh wilayah kecamatan disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 12 Kawasan Perkebunan Kabupaten Luwu Timur

No	Kawasan Perkebunan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Kecamatan Angkona	6.627,13	11,71
2	Kecamatan Burau	9.709,77	17,16
3	Kecamatan Kalaena	2.951,21	5,22
4	Kecamatan Malili	2.897,23	5,12
5	Kecamatan Mangkutana	9.094,89	16,07
6	Kecamatan Nuha	1.824,70	3,22
7	Kecamatan Tomoni	4.876,42	8,62
8	Kecamatan Tomoni Timur	971,47	1,72
9	Kecamatan Towuti	8.745,72	15,45
10	Kecamawsatan Wasuponda	6.316,62	11,16
11	Kecamatan Wotu	2.575,37	4,55
Jumlah		**56.591,45**	**100**

Sumber: RTRW Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2044

C. Kawasan Hortikultura

Kawasan Hortikultura di Kabupaten Luwu Timur tersebar di seluruh wilayah kecamatan Kabupaten Luwu Timur. Adapun komoditas tanaman holtikultura yang dihasilkan antara lain holtikultura sayur-sayuran yang meliputi cabe, sawi, kacang panjang, kangkung, terong, bayam dan lain-lain. Sedangkan hortikultura buah-buahan yang meliputi durian, mangga, manggis, lengkeng, pisang, rambutan dan lain-lain. Pengembangan kawasan pertanian hortikultura di Kabupaten Luwu Timur direncanakan seluas kurang lebih 5.613,80 Ha disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 13 Kawasan Holtikultura Kabupaten Luwu Timur

No	Kawasan Holtikultura	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Kecamatan Angkona	1.054,56	18,79
2	Kecamatan Burau	39,39	0,70
3	Kecamatan Kalaena	8,56	0,15
4	Kecamatan Malili	397,95	7,09
5	Kecamatan Mangkutana	6,40	0,11
6	Kecamatan Nuha	3,01	0,05
7	Kecamatan Tomoni	250,82	4,47
8	Kecamatan Tomoni Timur	35,57	0,63
9	Kecamatan Towuti	2.318,55	41,30
10	Kecamatan Wasuponda	413,33	7,36
11	Kecamatan Wotu	1.085,66	19,34
Jumlah		**5.613,80**	**100**

Sumber: RTRW Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2044

2.1.1.1.2.2 Kawasan Konservasi

A. Kawasan Cagar Alam (CA)

Pengelolaan kawasan cagar alam merupakan komponen yang penting dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang di Kabupaten Luwu Timur untuk menjaga kelestarian lingkungan. Beberapa upaya pengelolaan kawasan cagar alam di Kabupaten Luwu Timur antara lain:

- Menambah dan memelihara keanekaragaman flora dan fauna di dalam kawasan.
- Memperketat penjagaan dan pengawasan kawasan cagar alam dan disekitarnya guna tetap terpeliharanya kawasan sesuai dengan fungsi kelestariannya.

Luas rencana kawasan cagar alam di Kabupaten Luwu Timur adalah 84.415,42 Ha disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 14 Kawasan Suaka Alam Kabupaten Luwu Timur

No	Kawasan Cagar Alam	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Kecamatan Angkona	3.518,41	4,17
2	Kecamatan Kalaena	1.817,14	2,15
3	Kecamatan Malili	1.543,26	1,83
4	Kecamatan Mangkutana	18.666,00	22,11
5	Kecamatan Nuha	16.166,22	19,15
6	Kecamatan Wasuponda	42.704,39	50,59
Jumlah		84.415,42	100

Sumber: SK.6626/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 dan Hasil Pengolahan Tahun 2024

B. Kawasan Pelestarian Alam (KPA)

Kawasan pelestarian alam (KPA), dapat meliputi: Taman Wisata Alam. Taman wisata alam di Kabupaten Luwu Timur terdiri dari kawasan pelestarian alam khusus taman wisata alam Danau Matano, Danau Mahalona, dan Danau Towuti. Kondisi Kawasan Taman Wisata Alam Kabupaten Luwu Timur disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 15 Kawasan Taman Wisata Alam Kabupaten Luwu Timur

No	Lokasi	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Kecamatan Nuha	23.241,09	26,52
2	Kecamatan Towuti	64.410,31	73,48
3	Kecamatan Wasuponda	0,10	0,0001
Jumlah		**87.651,50**	**100**

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 dan Hasil Pengolahan Tahun 2024

C. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, yang terdapat di Kabupaten Luwu Timur yaitu suaka pulau kecil dengan luas 39,41 Ha yang terletak di Kecamatan Malili.

2.1.1.1.2.3 Pengembangan Kawasan Perikanan Tangkap

Produksi perikanan tangkap di Kabupaten Luwu Timur cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan konsumen dalam dan luar daerah. Adapun potensi perikanan tangkap yang dominan berasal dari jenis ikan pelagis kecil seperti tembang, teri, kembung, dll. Kawasan Perikanan tangkap laut di Kabupaten Luwu Timur dengan sebaran berada pada wilayah pesisir yaitu Kecamatan angkona, Kecamatan Burau,

Kecamatan Malili, dan Kecamatan Wotu. Komoditas yang dihasilkan dari aktifitas penangkapan antara lain cakalang, tuna, tenggiri, layang, kembung, kerapu, cucut, teri, kepiting, kakap, bawal, baronang dan jenis ikan lainnya yang setiap musim dapat menghasilkan produksi yang cukup tinggi.

2.1.1.1.2.4 Pengembangan Kawasan Perikanan Budidaya

Kawasan perikanan budidaya merupakan salah satu potensi investasi yang sangat potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Luwu Timur. Hal ini didukung dengan potensi lahan yang layak untuk budidaya sangat luas. Tingkat pemanfaatan lahan untuk pengembangan komoditi perikanan budidaya sampai dengan saat ini belum mencapai 30 persen dari potensi lahan yang dapat dikembangkan sehingga target produksi yang dicapai pun masih sangat rendah dari potensi produksi yang dapat dicapai.

Adapun potensi perikanan budidaya Kabupaten Luwu Timur secara umum meliputi :

1. Perikanan Budidaya di Air Laut

   Kabupaten Luwu Timur memiliki Kawasan budidaya laut yang cukup besar di wilayah perairan teluk Bone, dengan garis pantai 117,4 km sepanjang pesisir Kec. Burau, Wotu, Angkona dan Malili. Kondisi perairan laut yang masih alami dan tidak mengalami pencemaran merupakan salah satu faktor utama yang mendukung pengembangan potensi budidaya laut di wilayah ini. Komoditi unggulan yang dikembangkan antara lain komoditi teripang dan lobster dan komoditi rumput laut *euchema cottonii.*
2. Perikanan Budidaya Air Payau

   Kawasan perikanan budidaya air payau atau tambak di Kabupaten Luwu Timur memiliki luas lahan mencapai 12.061,89 Ha. Adapun komoditi unggulan yang dikembangkan antara lain komoditi rumput laut *gracillaria sp,*Komoditi Ikan Bandeng dan Komoditi Udang Windu/Vanamae.
3. Budidaya Air Tawar

   Kawasan pengembangan perikanan budidaya air tawar di Kabupaten Luwu Timur secara umum dapat dilaksanakan di seluruh kecamatan. Hal ini didukung dengan ketersediaan air yang melimpah dan layak bersumber dari sungai, irigasi dan danau.

2.1.1.1.2.5 Pengembangan Kawasan Pariwisata

Kawasan pariwisata merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi pengembangan kegiatan pariwisata, serta mempunyai salah satu kondisi sebagai berikut:

- Keindahan alam dan keindahan panorama.
- Masyarakat dengan kebudayaan bernilai tinggi dan diminati oleh wisatawan.
- Bangunan peninggalan budaya dan atau mempunyai nilai sejarah tinggi.
- Kawasan yang mendukung upaya pelestarian Budaya dan lingkungan.

Dalam arahan pengembangan pariwisata di Kabupaten Luwu Timur terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

a) Kawasan Wisata alam, memiliki fungsi utama untuk wisata alam danau dengan keunikan danau, dengan wisata pendukung meliputi wisata alam,

wisata pantai danau, wisata snorkeling. Ekosistem dan keragaman hayati yang sangat endemis membuat Danau Matano dimasukkan dalam kategori Global Ecoregions. Lokasi wisata yang populer antara lain Pantai Ide, Pantai Kupu-kupu dan Pantai Salonsa

b) Kawasan Wisata Pesisir Pantai Laut/Bahari, memiliki fungsi utama sebagai pintu masuk wisatawan serta pusat transit wisatawan dengan kegiatan wisata adalah wisata alam dan wisata bahari. Sebaran potensi wisata pesisir pantai laut/bahari di Kecamatan Burau.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka pengembangan kegiatan wisata dapat dikembangkan pada kawasan lain yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kegiatan wisata seperti kawasan cagar budaya, kawasan hutan lindung, kawasan sempadan pantai dan sebagainya.

Kawasan pariwisata yang akan dikembangkan untuk mendukung struktur perekonomian Kabupaten Luwu Timur pada masa yang akan datang kurang lebih seluas 333,16 Ha disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 16 Kawasan Pariwisata Kabupaten Luwu Timur

No	Kawasan Pariwisata	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Kecamatan Burau	191,76	57,56
2	Kecamatan Malili	15,83	4,75
3	Kecamatan Mangkutana	3,02	0,91
4	Kecamatan Nuha	97,41	29,24
5	Kecamatan Tomoni	5,11	1,53
6	Kecamatan Towuti	13,55	4,07
7	Kecamatan Wotu	6,48	1,95
Jumlah		**333,16**	**100**

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 dan Hasil Pengolahan Tahun 2024

2.1.1.1.2.6 Kawasan Pertambangan dan Energi

Kawasan peruntukan pertambangan dan energi di kabupaten Luwu Timur, terdiri atas:

a. Kawasan Pertambangan Mineral

Kawasan pertambangan mineral yang ada di Kabupaten Luwu Timur, yaitu:

1) Kawasan Pertambangan Mineral Bukan Logam

Kawasan pertambangan mineral bukan seluas 3,64 Ha disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 17 Kawasan Pertambangan Mineral Bukan Logam Kabupaten Luwu Timur

No	Lokasi	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Kecamatan Kalaena	2,91	79,82
2	Kecamatan Mangkutana	0,74	20,18
Jumlah		**3,64**	**100**

Sumber: Perda RTRW Kab.Luwu Timur Tahun 2025-2044

2) Kawasan Pertambangan Mineral Logam

Kawasan pertambangan mineral logam seluas 13.340,14 Ha disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 18 Kawasan Pertambangan Mineral Logam di Kabupaten Luwu Timur

No	Lokasi	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Kecamatan Angkona	248,92	1,87
2	Kecamatan Malili	2.321,19	17,40
3	Kecamatan Mangkutana	2,24	0,02
4	Kecamatan Nuha	4.165,41	31,22
5	Kecamatan Towuti	6.283,39	47,10
6	Kecamatan Wasuponda	316,90	2,38
Jumlah		**13.340,14**	**100**

Sumber:Perda RTRW Kab.Luwu Timur Tahun 2025-2044

b. Kawasan Pembangkit Tenaga Listrik

Kawasan pembangkit tenaga listrik merupakan kawasan yang mendukung kegiatan produksi tenaga listrik seperti kawasan yang ditempati untuk pembangkit listrik, ataupun sebagai gardu listrik. Kawasan pembangkit tenaga listrik di Kabupaten Luwu Timur memiliki luas 10,61 Ha, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 19 Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik Kabupaten Luwu Timur

No	Lokasi	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Kecamatan Malili	0,74	6,99
2	Kecamatan Wotu	9,87	93,01
Jumlah		**10,61**	**100**

Sumber: Perda RTRW Kab.Luwu Timur Tahun 2025-2044

2.1.1.1.2.7 Pengembangan Kawasan Industri

Kegiatan industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah,bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.Tujuan pengembangan kawasan industri di Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai berikut:

- Menyediakan ruangan bagi kegiatan-kegiatan produksi suatu barang yang mempunyai nilai lebih untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan yang berkaitan dengan lapangan kerja perekonomian lainnya
- Memberikan kemudahan pertumbuhan industri baru dengan mengendalikan pemanfaatan ruanglainnya, untuk menjaga keserasian lingkungan sehingga mobilitas antar ruang tetap terjamin serta terkendalinya kualitas lingkungan Kawasan peruntukan industri di Kabupaten Luwu Timur memiliki luas 6.332,33 Ha disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 20 Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Luwu Timur

No	Kawasan Peruntukan Industri	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Kecamatan Angkona	50,03	0,79
2	Kecamatan Malili	6.005,38	94,84
3	Kecamatan Tomoni	276,92	4,37
Jumlah		**6.332,33**	**100**

Sumber: Perda RTRW Kab.Luwu Timur Tahun 2025-2044

2.1.1.1.3 Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya, sedangkan daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Berdasarkan analisis daya dukung sumber daya di Kabupaten Luwu Timur, ketersediaan air hingga tahun 2029 sangat memadai dengan total pasokan mencapai ±13,21 miliar m^3, jauh melampaui kebutuhan aktual maupun proyeksi serta ambang batas penduduk, sehingga seluruh kecamatan berada pada kondisi aman tanpa defisit air. Sementara itu, ketersediaan pangan secara agregat kabupaten juga tergolong surplus, yakni 421,27 miliar kkal ekuivalen dibandingkan kebutuhan 248,86 miliar kkal (2025) dan 272,00 miliar kkal (2029). Namun, distribusi pangan antar kecamatan tidak merata: beberapa wilayah seperti Burau, Kalaena, Tomoni, Tomoni Timur, dan Wotu mengalami defisit, sedangkan kecamatan lain dalam kondisi surplus. Dengan demikian, meskipun daya dukung air dan pangan secara umum ideal, diperlukan strategi distribusi dan pengelolaan pangan lintas kecamatan agar ketahanan pangan dapat tercapai merata dan berkelanjutan. Berikut gambaran daya dukung daya tampung lingkungan

A. Daya Dukung Penyediaan Air

Daya dukung penyediaan air, atau kapasitas penyediaan air, merujuk pada kemampuan sistem atau infrastruktur air untuk menyediakan pasokan air yang cukup dan bermutu bagi penduduk yang membutuhkannya. Kehadiran kapasitas ini sangat krusial dalam menjamin ketersediaan air yang memadai untuk berbagai kebutuhan, termasuk untuk rumah tangga, sektor komersial, industri, pertanian, dan bidang lainnya di suatu daerah. Evaluasi status daya dukung penyediaan air melibatkan perbandingan antara perhitungan ketersediaan air dan kebutuhan air khususnya di Kabupaten Luwu Timur. Langkah pertama dalam perhitungan ini melibatkan identifikasi potensi air berdasarkan data potensi wilayah Sungai yang diperoleh dari data debit air setiap DAS yang bersumber dari Pola Wilayah Sungai Pompengan-Larona dan data potensi air danau dan potensi air tanah. Adapun potensi air di Kabupaten Luwu Timur diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2. 21 Potensi Air Kabupaten Luwu Timur

No.	Sumber Air	Potensi Air (juta m^3)
A	**Daerah Aliran Sungai**	
1	Bungadidi	131,82
2	Labongko	90,40
3	Singgena	136,02
4	Wotu	168,85
5	Kalaena	1.819,75
6	Angkona	494,45
7	Larona	6.655,53
B	**Danau**	
1	Matano	42,34

No.	Sumber Air	Potensi Air (juta m^3)
2	Mahalona	644,87
3	Towuti	47,55
4	Wawantoa	1,00
5	Masapi	1,00
C	**Cekungan Air Tanah**	
1	Bone-bone	1.444,43
2	Wasopote	1.240,43

Sumber: KLHS RPJMD tahun 2025-2029

Perhitungan akan ketersedian dan kebutuhan air bagi aktivitas manusia termasuk untuk pertanian, industri dan sektor lainnya diuraikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2. 22 Ketersedian dan Kebutuhan Air Kabupaten Luwu Timur

Kecamatan	Jumlah Populasi	Ketersediaan Air (m^3)	Kebutuhan Air 2025 (m^3)	Kebutuhan Air 2029 (m^3)	Ambang Batas Penduduk (jiwa)	Status Ambang Batas Penduduk (jiwa)
Angkona	26.984	553.733.208	202.824.366	204,509,166	456,109	427,019
Burau	36.332	482.752.826	185.54935	186,014,035	398,456	361,543
Kalaena	12.610	174.299.339	77.327.595	77,422,795	130,496	117,767
Malili	48.769	1.536.727.511	162.197.086	164,469,886	1,733,902	1,682,292
Mangkutana	23.764	2.044.949.553	158.296.318	158,462,718	2,346,627	2,322,655
Nuha	25.568	1.749.925.174	68.720.819	69,334,419	2,094,153	2,067,818
Tomoni	28.864	526.224.184	92.153.927	93,036,327	563,240	533,273
Tomoni Timur	14.169	103.816.874	83.110.483	84,292,883	38,133	22,486
Towuti	48.390	4.085.128.870	367.011.113	380,474,313	4,626,983	4,561,764
Wasuponda	23.627	1.651.474.119	159.627.390	159,939,390	1,850,954	1,826,937
Wotu	35.594	304.058.445	143.413.922	146,431,522	230,961	191,595
Total	324.671	13.213.090.105	1.700.232.255	1,724,387,455	14,470,014	14,115,149

Sumber : KLHS RPJMD tahun 2024-2029

Berdasarkan data ketersediaan air dan kebutuhan air tahun 2025–2029, total ketersediaan air di seluruh kecamatan sebesar 13,21 miliar m^3 masih jauh lebih tinggi dibandingkan total kebutuhan air, baik pada tahun 2025 (±1,70 miliar m^3) maupun proyeksi 2029 (±1,72 miliar m^3). Selain itu, ambang batas penduduk (±14,47 juta jiwa) jauh melampaui jumlah penduduk aktual (±324 ribu jiwa). Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan air di Kabupaten Luwu Timur sangat ideal dan aman untuk mencukupi kebutuhan penduduk dalam jangka menengah. Tidak ada kecamatan yang berada pada kondisi defisit air.

B. Daya Dukung Penyediaan Pangan

Daya dukung penyediaan pangan menggambarkan kapasitas suatu wilayah dalam memenuhi kebutuhan pangan penduduknya secara berkelanjutan, melibatkan aspek-aspek integral seperti produksi pertanian, keberlanjutan ekologi, ketersediaan lahan pertanian, dan kerangka kebijakan pangan. Adanya pertanian yang berkelanjutan dan pelestarian sumber daya alam menjadi elemen esensial agar wilayah tersebut mampu terus memproduksi pangan yang memadai untuk masa depan. Ketersediaan dan kebutuhan pangan Kabupaten Luwu Timur berdasarkan jumlah populasi (jiwa) dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. 23 Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan Kabupaten Luwu Timur

Kecamatan	Jumlah Populasi (jiwa)	Ketersediaan Pangan (kg)	Kebutuhan Pangan Aktual (kkal)	Kebutuhan Pangan Proyeksi (kkal)	Ambang Batas Penduduk (jiwa)	Status Ambang Batas Penduduk (jiwa)
Angkona	26.984	20.865.424.350	20.683.236.000	22.297.485.000	30.053	963
Burau	36.332	17.236.565.265	27.848.478.000	28.293.814.500	26.114	-10.799
Kalaena	12.610	6.275.994.161	9.665.565.000	9.756.778.500	9.093	-3.636
Malili	48.769	55.847.275.918	37.381.438.500	39.559.065.000	81.997	30.387
Mangkutana	23.764	64.286.311.293	18.215.106.000	18.374.538.000	100.979	77.007
Nuha	25.568	52.142.325.314	19.597.872.000	20.185.777.500	76.074	49.739
Tomoni	28.864	16.827.815.508	22.124.256.000	22.969.705.500	26.423	-3.544
Tomoni Timur	14.169	4.034.247.117	10.860.538.500	11.993.425.500	5.852	-9.795
Towuti	48.390	113.462.498.347	37.090.935.000	49.990.363.500	163.217	97.998
Wasuponda	23.627	58.019.009.333	18.110.095.500	18.409.030.500	88.158	64.141
Wotu	35.594	12.279.928.762	27.282.801.000	30.174.039.000	17.117	-22.249
Total	324.671	421.277.395.368	248.860.321.500	272.004.022.500	625.077	270.212

Sumber : KLHS RPJMD Tahun 2025-2029

Secara total, ketersediaan pangan di Kabupaten Luwu Timur sebesar 421,27 miliar kkal ekuivalen masih lebih besar daripada kebutuhan pangan aktual tahun 2025 sebesar 248,86 miliar kkal maupun proyeksi kebutuhan tahun 2029 sebesar 272,00 miliar kkal. Hal ini menunjukkan bahwa pada skala kabupaten, kondisi pangan masih dalam kategori surplus dan ideal. Namun demikian, pada tingkat kecamatan terlihat adanya ketimpangan. Kecamatan Burau, Kalaena, Tomoni, Tomoni Timur, dan Wotu mengalami defisit pangan karena kebutuhan pangan lebih tinggi dibandingkan ketersediaan pangan lokal yang tercermin dari status ambang batas penduduk yang bernilai negatif. Sebaliknya, Kecamatan Angkona, Malili, Mangkutana, Nuha, Towuti, dan Wasuponda berada pada kondisi surplus pangan karena ketersediaan jauh melebihi kebutuhan. Dengan demikian, meskipun secara agregat kabupaten dalam kondisi ideal, distribusi pangan antar kecamatan tidak merata sehingga diperlukan upaya distribusi dan pengelolaan pangan lintas wilayah agar ketahanan pangan dapat terjamin secara adil di seluruh kecamatan.

2.1.1.1.4 Berketahanan Energi, Air Dan Kemandirian Pangan

Kondisi berketahanan energi, air, dan kemandirian pangan mencerminkan kemampuan suatu daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri dan berkelanjutan. Ketahanan energi ditandai dengan ketersediaan pasokan energi yang cukup, terjangkau, dan ramah lingkungan. Ketahanan air mencakup akses yang adil terhadap air bersih untuk kebutuhan rumah tangga, pertanian, dan industri, serta upaya menjaga kualitas dan keberlanjutan sumber daya air. Sementara itu, kemandirian pangan menunjukkan kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan pangan dari produksi lokal, mengurangi ketergantungan impor, dan menjamin akses pangan bagi seluruh penduduk. Ketiga aspek ini saling terkait dan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan yang tangguh dan berkelanjutan.

A. Konsumsi Listrik Per Kapita

Konsumsi listrik per kapita (kWh) diukur dengan menghitung total jumlah energi listrik yang digunakan di suatu wilayah, dibagi dengan jumlah penduduknya dalam periode satu tahun. Hal ini menunjukkan rata-rata konsumsi listrik tiap

penduduk, biasanya diukur dalam kilowatt jam per tahun (kWh/per tahun) atau kilowatt jam per bulan (kWh/per bulan). Tingkat konsumsi listrik perkapita Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020-2024 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 24 Konsumsi Listrik Perkapita Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 – 2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Konsumsi Listrik Perkapita	227	237	246	254	290.16

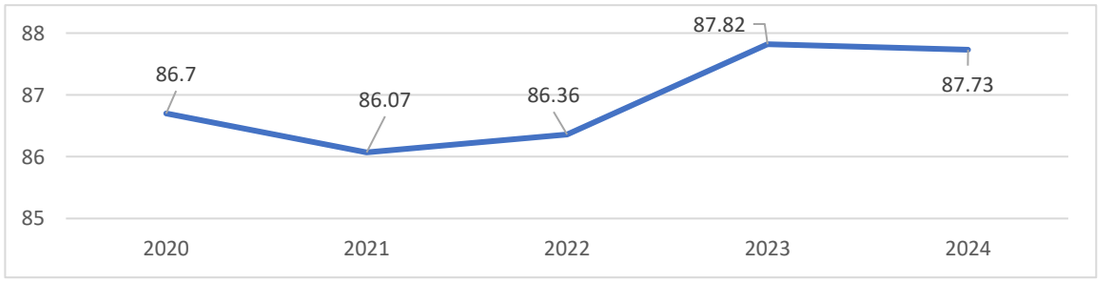
Sumber: PLN Tahun 2025

Konsumsi Listrik Kabupaten Luwu Timur pada Tahun 2023 sebesar 254 kWh/kapita/tahun. Nilai ini Meningkat sebesar 14.22 persen pada tahun 2024 atau mencapai 290.16 kWh/kapita/tahun. Peningkatan Konsumsi listrik ini di sebabkan karena bertambahnya jumlah penduduk Luwu Timur dari 313.400 jiwa pada tahun 2023 naik menjadi 323.422 jiwa pada tahun 2024. Selain itu peningkatan ini juga disebabkan adanya peningkatan aktifitas ekonomi, ditandai dengan bertambahnya aktifitas kegiatan industri yang beroperasi di Kabupaten Luwu Timur.

B. Indeks Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat secara berkelanjutan, baik dari segi jumlah, mutu, keamanan, keberagaman, distribusi, keterjangkauan, maupun kesesuaiannya dengan nilai budaya dan keyakinan lokal. Sebagai isu strategis, ketahanan pangan berperan penting dalam mendukung kesehatan masyarakat, stabilitas sosial, dan pembangunan ekonomi. Risiko kerawanan pangan dapat berdampak langsung pada produktivitas dan kesejahteraan penduduk. Untuk mengukur dan memantau capaian ketahanan pangan, digunakan Indeks Ketahanan Pangan (IKP), yang mencakup tiga dimensi utama: ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan. IKP menjadi dasar bagi perumusan kebijakan, penentuan wilayah prioritas, dan penguatan sistem pangan daerah. Grafik berikut menyajikan perkembangan Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur tahun 2020 –2024 :

Grafik 2. 1 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 – 2024



Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan data olah tahun 2025

Berdasarkan data grafik diatas, Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Luwu Timur mengalami sedikit penurunan pada tahun 2021 sebesar 86,07, indeks kembali mengalami kenaikan bertahap menjadi 86,36 pada 2022 dan 87,82 pada 2023. Pada tahun 2024, indeks sedikit menurun menjadi 87,73, namun tetap berada pada level yang tinggi. Secara keseluruhan, terjadi peningkatan sebesar 4,73 poin dalam kurun waktu tujuh tahun, mencerminkan perbaikan yang relatif stabil dalam

aspek ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan di wilayah ini. Capaian tersebut menunjukkan kinerja positif pemerintah daerah dalam memperkuat sistem pangan lokal dan mengurangi kerentanan pangan masyarakat. Konsistensi capaian IKP ini memberikan dasar kuat bagi perumusan kebijakan ketahanan pangan ke depan, dengan fokus pada peningkatan kapasitas produksi lokal, penguatan distribusi pangan, dan perbaikan akses masyarakat terhadap pangan bergizi dan aman secara berkelanjutan.

C. Skor Pola Pangan Harapan

Pola Pangan Harapan adalah sebuah tolak ukur dalam melihat situasi keberagaman konsumsi pangan dan merupakan salah satu indikator kinerja pemerintah untuk menilai kualitas konsumsi masyarakat dan penyediaan pangan. Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 25 Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 – 2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Skor Pola Pangan Harapan	92	92,2	89,6	89,6	90,4

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2024

Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Luwu Timur selama periode 2020–2024 menunjukkan fluktuasi ringan namun cenderung stabil. Pada tahun 2021, skor PPH berada di angka 92,2, kemudian menurun menjadi 89,6 pada tahun 2022 dan tetap pada angka yang sama di tahun 2023. Meskipun demikian, pada tahun 2024 terjadi sedikit peningkatan menjadi 90,4. Skor ini mencerminkan kualitas konsumsi pangan masyarakat yang cukup baik, meskipun masih terdapat ruang perbaikan untuk mendekati skor ideal 100, yang mencerminkan konsumsi pangan yang sesuai pedoman Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA).

D. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PoU)

Capaian Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PoU) merupakan proporsi penduduk yang asupan energinya lebih rendah daripada kebutuhan energi minimum yang direkomendasikan untuk hidup sehat dan aktif. Istilah ini sering dipakai dalam *Food Insecurity Experience Scale* (FIES) atau dalam indikator SDG 2.1.1 (*Prevalence of Undernourishment*/PoU). Data prevalensi ketidakcukupan pangan (PoU) di Kabupaten Luwu Timur tahun 2020-2024 tergambar pada tabel di berikut :

Tabel 2. 26 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PoU) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 – 2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PoU)	n/a	7	8,77	6,85	5,23

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024

Capaian Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PoU) di Kabupaten Luwu Timur menunjukkan tren membaik dalam empat tahun terakhir. Setelah sempat meningkat dari 7,00 persen pada 2021 menjadi 8,77 persen pada 2022 akibat

dampak ekonomi pasca pandemi, angka PoU menurun signifikan menjadi 6,85 persen pada 2023 dan kembali turun ke 5,23 persen pada 2024. Perkembangan ini menggambarkan peningkatan akses masyarakat terhadap pangan serta perbaikan kondisi ketahanan pangan daerah, dengan capaian terkini yang lebih rendah dibanding tahun-tahun sebelumnya dan mengindikasikan arah yang positif menuju ketahanan pangan yang lebih kuat dan berkelanjutan.

E. Kapasitas Air Baku

Air baku adalah air dari sumber alam yang digunakan sebagai bahan baku untuk kebutuhan air bersih. Kapasitas air baku mencerminkan volume ketersediaan air untuk menunjang kebutuhan domestik dan non-domestik, yang dipengaruhi oleh potensi sumber daya air, infrastruktur, serta permintaan pengguna. Data Kapasitas Air Baku Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020–2024 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 27 Kapasitas Air Baku Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 – 2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kapasitas Air Baku (m^3/detik)[2]	1,873	1,873	1,873	1,873	1.873

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

Data kapasitas air baku dan kapasitas terpakai untuk nasing-masing sumber air baku yaitu Sungai Uelanti, Bendung, Sungai Labongko, Sungai Mantadulu, Sungai Balai Kembang, Sungai lawape 2, Sungai Karebbe dan Sungai Kali Dingin digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 28 Kapasitas Air Baku dan Kapasitas Terpakai Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024

No	Nama	Air Baku Induk	Jenis	Kapasitas (L/Det)	Kapasitas Terpakai (L/Det)
1	Sungai Uelanti	-	Sungai	300	60
2	Bendung Sungai Labongko	-	Sungai	300	50
3	Sungai Mantadulu	-	Sungai	500	0
4	Sungai Balai kembang	-	Sungai	35	20
5	Sungai Lawape 2	-	Sungai	180	0
6	Sungai karebbe	-	Sungai	58	0
7	Sungai Kali Dingin	-	Sungai	100	0

Sumber: SIMSPAM Kementerian PU 2024

Adapun data alokasi air baku, kapasitas terpasang, kapasitas produksi, dan kapasitas distribusi, kapasitas air terjual, *idle capacity* terpasang dan idle capacity produksi sejumlah 46 unit SPAM di Kabupaten Luwu Timur baik yang dikelola berbasis masyarakat maupun non berbasis masyarakat sebagai berikut:

Tabel 2. 29 Rekapitulasi Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Luwu Timur

Kab	Jumlah Unit SPAM	Alokasi air baku (liter /detik)	Kapasitas terpasang (liter /detik)	Kapasitas produksi (liter /detik)	Kapasitas distribusi (liter /detik)	Kapasitas air terju (liter /detik)	Idle cap terpasang (liter /detik)	Idle cap produksi (lite /detik)
Luwu Timur	46	588,77	268,77	222,00	179,64	129,14	320,00	46,77

Sumber: SIMSPAM Kementerian PU Tahun 2024

F. Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan

Akses rumah tangga terhadap air perpipaan, diukur dari proporsi rumah tangga yang menggunakan air perpipaan/ PDAM sebagai sumber air minum. Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan di Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 30 Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 – 2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	29,88

Sumber: data diolah Bappelitbangda Prov.Sulawesi Selatan, Tahun 2024

Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan di Kabupaten Luwu Timur mulai data yang dimiliki pada tahun 2024 dengan capaian sebesar 29,88 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa dari seluruh rumah tangga perkotaan, baru sekitar sepertiga yang telah terlayani jaringan air perpipaan untuk kebutuhan air minum. Rendahnya capaian tersebut mengindikasikan masih terbatasnya ketersediaan infrastruktur dan layanan air minum perpipaan di wilayah perkotaan, sehingga ke depan diperlukan upaya peningkatan kapasitas jaringan, perluasan jangkauan pelayanan, serta penguatan kelembagaan pengelola untuk mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat secara lebih merata dan berkelanjutan.

G. Akses Air Minum Aman Perpipaan

Akses air minum aman perpipaan merupakan indikator yang menunjukkan persentase rumah tangga yang terlayani jaringan perpipaan dengan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas yang memenuhi standar, dimana capaian ini mencerminkan tingkat ketersediaan infrastruktur dasar yang mendukung kesehatan, produktivitas, dan kesejahteraan masyarakat, sehingga semakin tinggi akses yang diperoleh menandakan semakin baiknya pelayanan publik dalam pemenuhan kebutuhan dasar air minum yang layak dan berkelanjutan. Berikut akses air minum aman perpipaan di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020-2024:

Tabel 2. 31 Akses Air Minum Aman Perpipaan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 – 2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Sambungan Rumah	n/a	n/a	n/a	n/a	24.924
Sambungan Rumah Aman (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	41,54

Sumber: data diolah Bappelitbangda Prov.Sulawesi Selatan, Tahun 2024

Jumlah sambungan rumah air minum perpipaan di Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2024 tercatat sebanyak 24.924 unit dengan persentase sambungan rumah aman sebesar 41,54%. Hal ini menunjukkan bahwa dari total sambungan rumah yang tersedia, sekitar dua perlima di antaranya telah memenuhi kategori aman sesuai standar kualitas, kuantitas, dan kontinuitas layanan air minum.

H. Akses Rumah Tangga Terhadap Air Minum Aman

Akses rumah tangga terhadap air minum aman adalah persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air minum yang memenuhi persyaratan kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan keterjangkauan sesuai standar kesehatan. Air minum aman diartikan sebagai air minum yang berasal dari sumber yang terlindungi (seperti perpipaan, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, atau air hujan yang ditampung dengan benar) dan telah memenuhi standar kualitas air minum berdasarkan parameter fisik, kimia, dan mikrobiologi sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.

Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum aman dengan total rumah tangga, kemudian dinyatakan dalam persentase. Data bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) maupun hasil survei khusus seperti Survei Kualitas Air Minum Rumah Tangga (SKAMRT). Akses rumah tangga terhadap air minum aman di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 32 Akses Rumah Tangga Terhadapa Air Minum Aman Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 – 2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Akses Rumah Tangga terhadap Air Minum Aman (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	12,8

Sumber: data diolah Bappelitbangda Prov.Sulawesi Selatan, tahun 2024

Akses rumah tangga terhadap air minum aman di Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2024 tercatat sebesar 12,8 persen. Angka ini menunjukkan bahwa dari seluruh rumah tangga yang ada, baru sebagian kecil yang memperoleh layanan air minum dengan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sesuai standar aman.

2.1.1.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas

Kondisi lingkungan hidup yang berkualitas ditandai dengan udara yang bersih, air yang layak, tutupan lahan yang lestari, serta rendahnya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan. Lingkungan yang sehat mendukung kesejahteraan masyarakat, keberlanjutan ekosistem, dan ketahanan terhadap perubahan iklim. Upaya menjaga kualitas lingkungan dilakukan melalui pengelolaan sampah yang baik, pelestarian hutan, pengendalian emisi, serta pengawasan terhadap aktivitas industri dan pertambangan. Lingkungan hidup yang berkualitas menjadi dasar penting bagi pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

A. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah indikator komposit yang digunakan untuk mengukur tingkat kualitas lingkungan suatu wilayah berdasarkan tiga komponen utama Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan

Indeks Kualitas Lahan (IKL). Berikut adalah data IKLH serta rincian data komponen IKLH Kabupaten Luwu Timur tahun 2020 - 2024:

Tabel 2. 33 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 – 2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	n/a	74,51	79,48	80,09	77,93

Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2025

Berdasarkan data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Luwu Timur, capaian pada periode 2021–2024 menunjukkan tren yang relatif baik meskipun sempat mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021, nilai IKLH tercatat sebesar 74,51, kemudian meningkat pada tahun 2022 menjadi 79,48 dan mencapai puncaknya pada tahun 2023 dengan nilai 80,09. Namun, pada tahun 2024 terjadi sedikit penurunan menjadi 77,93. Secara umum, capaian ini menggambarkan bahwa kualitas lingkungan hidup di Luwu Timur berada pada kategori baik, dengan upaya pemeliharaan dan pengelolaan lingkungan yang cukup efektif, meskipun diperlukan perhatian lebih untuk menjaga kestabilan nilai indeks agar tidak mengalami penurunan di tahun-tahun mendatang.

B. Indeks Kualitas Air

Indeks Kualitas Air (IKA) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pencemaran air berdasarkan parameter fisik, kimia, dan biologi, guna menilai mutu perairan terhadap baku mutu yang ditetapkan. Berikut adalah data Indeks Kualitas Air Kabupaten Luwu Timur tahun 2020 – 2024.

Tabel 2. 34 Indeks Kualitas Air Luwu Timur Tahun 2020 – 2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kualitas Air	n/a	55	65,88	66,25	65

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan Tahun 2025

Indeks Kualitas Air di Kabupaten Luwu Timur dalam periode 2021–2024 menunjukkan perkembangan yang relatif stabil dengan kecenderungan meningkat pada awal periode. Pada tahun 2021, nilai indeks tercatat sebesar 55, kemudian mengalami kenaikan menjadi 65,88 pada tahun 2022 dan kembali meningkat menjadi 66,25 pada tahun 2023. Namun demikian, pada tahun 2024 terjadi sedikit penurunan dengan capaian sebesar 65. Secara umum, capaian tersebut menggambarkan adanya perbaikan kualitas lingkungan perairan di Kabupaten Luwu Timur, meskipun masih terdapat fluktuasi yang perlu menjadi perhatian dalam menjaga keberlanjutan kualitas air di masa mendatang.

C. Indeks Kualitas Udara

Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah indikator yang menunjukkan tingkat pencemaran udara berdasarkan konsentrasi partikel dan gas berbahaya seperti PM2.5, PM10, SO_2, dan NO_2. Nilai IKU dibagi dalam beberapa kategori, mulai dari "Baik" hingga "Berbahaya", untuk menunjukkan dampaknya terhadap kesehatan. Pemantauan IKU penting sebagai dasar pengendalian pencemaran dan perlindungan lingkungan. Berikut adalah data Indeks Kualitas Udara Kabupaten Luwu Timur :

Tabel 2. 35 Indeks Kualitas Udara Luwu Timur Tahun 2020 – 2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kualitas Udara	n/a	92,11	94,27	95,97	91,85

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2025

Indeks Kualitas Udara di Kabupaten Luwu Timur pada periode 2021–2024 menunjukkan kondisi yang relatif baik dengan nilai yang berada pada kisaran di atas 90. Pada tahun 2021, indeks tercatat sebesar 92,11 kemudian meningkat menjadi 94,27 pada tahun 2022 dan kembali naik menjadi 95,97 pada tahun 2023. Namun demikian, pada tahun 2024 terjadi sedikit penurunan dengan capaian sebesar 91,85. Secara keseluruhan, capaian ini mencerminkan kualitas udara di Kabupaten Luwu Timur berada dalam kategori baik, meskipun fluktuasi yang terjadi menunjukkan perlunya upaya menjaga konsistensi kualitas udara secara berkelanjutan.

D. Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) adalah indikator yang menggambarkan kondisi dan fungsi ekologis tutupan lahan di suatu wilayah. Semakin tinggi nilai IKTL, semakin baik kualitas dan keberlanjutan tutupan lahannya, seperti hutan atau vegetasi alami. Sebaliknya, nilai rendah mencerminkan degradasi akibat alih fungsi lahan yang berlebihan. Indeks ini penting untuk memantau perubahan tata guna lahan dan mendukung kebijakan pembangunan berkelanjutan. Berikut adalah data Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Luwu Timur tahun 2020 – 2024:

Tabel 2. 36 Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 – 2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kualitas Tutupan Lahan	n/a	75,45	75,45	74,46	74,40

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan Tahun 2025

Indeks Kualitas Tutupan Lahan di Kabupaten Luwu Timur pada periode 2021–2024 menunjukkan kondisi yang relatif stabil dengan kecenderungan sedikit menurun. Pada tahun 2021 dan 2022, nilai indeks tercatat sebesar 75,45, kemudian mengalami penurunan menjadi 74,46 pada tahun 2023 dan kembali turun tipis menjadi 74,40 pada tahun 2024. Perkembangan ini mengindikasikan adanya perubahan kualitas tutupan lahan yang perlu menjadi perhatian, terutama dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan pemanfaatan ruang wilayah.

E. Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman

Rumah tangga dengan akses sanitasi aman adalah rumah tangga yang menggunakan fasilitas sanitasi yang layak dan mampu menjamin pembuangan tinja secara higienis, sehingga tidak mencemari air, tanah, maupun lingkungan sekitar. Akses terhadap sanitasi aman berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat serta pencegahan penyakit yang ditularkan melalui air dan tinja, seperti diare, kolera, dan infeksi parasit.

Akses sanitasi aman juga merupakan komponen penting dalam upaya pembangunan berkelanjutan, sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), khususnya TPB 6 yang menargetkan tercapainya akses air minum dan sanitasi yang aman dan merata bagi semua pada tahun 2030.

Kondisi sanitasi di Kabupaten Luwu Timur dapat diukur melalui persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi aman. Perkembangan capaian indikator ini di Kabupaten Luwu Timur selama periode tahun 2020 hingga 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 37 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 – 2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	n/a	3,18	5,1	8,01	11,88
Jumlah Rumah Tangga	n/a	2.045	3.915	7.664	7.804

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

Berdasarkan data tabel diatas, persentase rumah tangga dengan akses sanitasi aman di Kabupaten Luwu Timur menunjukkan tren peningkatan dalam empat tahun terakhir. Pada tahun 2021, capaian akses sanitasi aman baru mencapai 3,18 persen, atau setara dengan 2.045 rumah tangga. Angka ini meningkat pada tahun 2022 menjadi 5,10 persen (3.915 rumah tangga), dan kembali mengalami kenaikan signifikan pada tahun 2023 menjadi 8,01 persen atau sebanyak 7.664 rumah tangga. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2024 dengan capaian sebesar 11,46 persen, yang mencakup 7.804 rumah tangga.

Peningkatan ini antara lain disebabkan oleh keberadaan fasilitas pengolahan air limbah domestik, seperti sistem pengolahan limbah *F-Lagon* milik PT Vale, yang telah membantu mengelola air limbah rumah tangga secara aman dan higienis. Selain itu, diharapkan dengan mulai beroperasinya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Malili, persentase rumah tangga dengan akses sanitasi aman akan terus meningkat di tahun-tahun mendatang.

F. Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah

Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah adalah jumlah sampah yang berhasil dikelola atau diolah melalui fasilitas pengolahan sampah yang tersedia. Pengolahan ini mencakup proses seperti pemilahan, daur ulang, komposting, pengomposan, dan/atau konversi sampah menjadi energi atau bahan berguna lainnya, bukan hanya sekadar dikumpulkan dan dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir(TPA). Capaian kinerja pengelolaan sampah di Kabupaten Luwu Timur dari tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2. 38 Timbulan Sampah dan Sampah Terkelola
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 – 2024

Tahun	Timbulan Sampah Tahunan (Ton/ Tahun)	Pengurangan Sampah	Penanganan Sampah	Sampah Terkelola Tahunan (Ton/ Tahun)	Daur Ulang Sampah Tahunan (Ton/ Tahun)	Sampah Masuk TPA (Ton/ Tahun)	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Sampah Terdaur Ulang (%)
2020	43.752,26	3.656,99	24.637,50	28.294,49	2.576,10	24.455,00	8,78	5,89
2021	43.874,61	6.824,00	24.528,00	31.352,00	5.926,37	24.455,00	15,72	13,51
2022	43.874,61	6.852,23	24.528,00	31.380,23	5.640,72	24.455,00	15,78	12,86
2023	44.606,07	7.116,83	25.081,70	32.198,53	5.679,72	25.002,50	16,13	12,73
2024	45.045,38	6.489,13	14.681,03	21.170,16	5.826,59	14.600,00	14,59	12,93

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

Berdasarkan data tabel diatas, Persentase timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah di Kabupaten Luwu Timur menunjukkan tren peningkatan selama periode tahun 2020–2024. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), total timbulan sampah pada tahun 2023 tercatat sebesar 44.606,07 ton, meningkat sebanyak 732,07 ton atau sekitar 1,67 persen dibandingkan tahun 2022. Dari jumlah tersebut, sebanyak 37.878,25 ton atau 85 persen sampah telah dikelola melalui berbagai fasilitas pengolahan sampah, sedangkan sisanya sebesar 6.727,82 ton atau 15 persen masih belum terkelola. Selain itu, jika dilihat dari indikator persentase timbulan sampah terkelola (yang mencakup sampah yang dikumpulkan dan diproses melalui sistem formal dan fasilitas pengolahan), Kabupaten Luwu Timur mencatatkan capaian 59,45 persen pada tahun 2023. Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2022 yang berada pada 58,67 persen. Peningkatan ini mencerminkan perbaikan dalam sistem pengelolaan sampah di daerah, baik dari sisi pengumpulan, pemilahan, hingga pengolahan akhir, serta menunjukkan kemajuan dalam mendukung pengelolaan sampah berkelanjutan.

G. Proporsi Rumah Tangga Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah

Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah adalah indikator yang menunjukkan persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengumpulan sampah secara rutin dan menyeluruh oleh penyedia layanan formal. Berikut disajikan proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah di Kabupaten Luwu Timur 2020-2024 dalam tabel berikut:

Tabel 2. 39 Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 – 2024

Tahun	Jumlah Rumah Tangga Seluruhnya	Jumlah RT Yang Terlayani Pengumpulan Sampahnya	Proporsi RT Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% Ruta)
2020	73.674,00	29.860,00	40,53
2021	74.186,00	30.095,00	40,57
2022	75.128,00	30.439,00	40,52
2023	75.558,00	31.018,00	41,05
2024	76.106,00	32.068,00	42,14

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

Berdasarkan data tabel diatas, Proporsi rumah tangga yang mendapatkan layanan penuh pengumpulan sampah di Kabupaten Luwu Timur menunjukkan tren peningkatan meskipun relatif lambat. Pada tahun 2021, dari total 74.186 rumah tangga, sebanyak 30.095 rumah tangga atau sekitar 40,57 persen tercatat menerima layanan penuh pengumpulan sampah oleh pihak resmi. Pada tahun 2022, jumlah rumah tangga meningkat menjadi 75.128, dengan 30.439 rumah tangga di antaranya terlayani, yang menghasilkan proporsi sebesar 40,52 persen. Meskipun terdapat peningkatan jumlah rumah tangga yang terlayani, proporsinya sedikit menurun akibat pertumbuhan jumlah rumah tangga secara keseluruhan. Kemudian pada tahun 2023 dan 2024, proporsi layanan kembali meningkat. Total 76.106 rumah tangga pada Tahun 2024, sebanyak 32.068 rumah tangga telah menerima layanan penuh pengumpulan sampah, sehingga menghasilkan proporsi sebesar 42,14 persen.

H. Proporsi Realisasi Penyaluran Pupuk Organik terhadap Pupuk Kimia

Indikator ini mengukur perbandingan antara jumlah pupuk organik yang berhasil disalurkan kepada petani dengan jumlah pupuk kimia yang disalurkan dalam periode tertentu. Dalam rangka mendorong transformasi menuju pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menetapkan indikator proporsi realisasi penyaluran pupuk organik terhadap pupuk kimia sebagai salah satu tolok ukur pengelolaan sektor pertanian. Praktik pertanian masih sangat tergantung pada penggunaan pupuk kimia yang dalam jangka panjang berdampak pada penurunan kualitas tanah, ekosistem mikro, dan keberlanjutan hasil produksi. Oleh karena itu, peningkatan pemanfaatan pupuk organik menjadi langkah strategis. Proporsi pupuk organik terhadap pupuk kimia yang semakin tinggi menjadi indikasi keberhasilan dalam mengarahkan sistem pertanian yang produktif sekaligus ramah lingkungan. Berikut merupakan data proporsi realisasi penyaluran pupuk organik terhadap pupuk kimia di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 – 2024:

Tabel 2. 40 Proporsi Realisasi Penyaluran Pupuk Organik terhadap Pupuk Kimia Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 – 2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Proporsi Realisasi Penyaluran Pupuk Organik terhadap Pupuk Kimia	7,00	6,93	10,43	0	0

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Secara keseluruhan, realisasi pupuk 2020–2024 selalu lebih rendah dari RDKK. Terkait dengan proporsi realisasi pupuk orgnaik dalam RDKK hanya sebesar 2.052 Ton dari Total 31.344,80 Ton yang direalisasikan melalui RDKK Tahun 2020, pada tahun 2021 realisasi pupuk organik sebesar 1.992,25 Ton dari total realisasi pupuk sebesar 30.725,28 Ton dalam RDKK, semntara di tahun 2022 pupuk oraganik sebesar 2.854,04 Ton dari 30.725,28 Ton realisasi pupuk dalam RDKK. Urea dan NPK konsisten mendominasi, sedangkan ZA, SP36, dan Organik terus menurun hingga nol pada 2 tahun terkhir. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesadaran petani terhadap pemanfaatan pupuk organik masih sangat rendah dan ketergantungan pada pupuk kimia masih sangat tinggi, dimana hal tersebut akan sangat berdampak pada kualitas lahan pertanian dalam jangka panjang.

I. Proporsi Sawah Irigasi

Proporsi sawah irigasi adalah indikator yang menggambarkan persentase luas sawah yang memiliki akses terhadap sistem irigasi teknis, semi-teknis, atau sederhana, dibandingkan dengan total luas sawah yang ada di suatu wilayah. Dalam rangka mendukung produktivitas pertanian dan kemandirian pangan daerah, ketersediaan irigasi menjadi prasyarat utama dalam sistem budidaya tanaman pangan. Proporsi sawah irigasi menjadi indikator penting dalam mengukur sejauh mana layanan irigasi telah menjangkau lahan pertanian produktif di Kabupaten Luwu Timur. Proporsi sawah irigasi di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 41 Proporsi Sawah Irigasi Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 - 2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Proporsi Sawah Irigasi (%)	93,8	90,36	89,7	89,84	88,61

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Proporsi sawah irigasi di Kabupaten Luwu Timur mengalami tren penurunan dalam lima tahun terakhir, yakni dari 93,8 persen pada tahun 2020 menjadi 90,36 persen pada 2021, 89,7 persen pada 2022, sedikit meningkat menjadi 89,84 persen pada 2023, namun kembali menurun hingga 88,61 persen pada 2024. Perkembangan ini menunjukkan bahwa luas sawah yang terlayani jaringan irigasi semakin berkurang, yang kemungkinan dipengaruhi oleh alih fungsi lahan, kerusakan jaringan irigasi, maupun bertambahnya sawah tadah hujan. Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya stabilitas dan produktivitas pertanian padi di daerah ini.

J. Indeks Pertanaman (IP) Padi

Indeks Pertanaman (IP) adalah indikator yang menunjukkan jumlah musim tanam (panen) padi yang dilakukan pada lahan pertanian dalam satu tahun pada lokasi tertentu. Indikator ini menggambarkan intensitas penggunaan lahan untuk produksi pertanian (khususnya padi) dalam kurun waktu satu tahun. Sektor pertanian tanaman pangan masih menjadi salah satu penggerak utama ekonomi masyarakat di Kabupaten Luwu Timur. Dalam konteks produktivitas dan efisiensi pemanfaatan lahan pertanian, Indeks Pertanaman (IP) Padi digunakan sebagai indikator utama untuk menilai tingkat intensifikasi usaha tani. IP menunjukkan seberapa sering petani dapat menanam dan memanen padi dalam satu tahun pada lahan sawah yang sama. Berikut disajikan Indeks Pertanaman Padi di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020-2024:

Tabel 2. 42 Indeks Pertanaman (IP) Padi Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 – 2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pertanaman (IP) Padi	1.6	1.8	1.9	1.68	1.78

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahan Pangan Kabupaten Luwu Timur tahun 2025

Indeks Pertanaman (IP) Padi di Kabupaten Luwu Timur menunjukkan kecenderungan fluktuatif dalam lima tahun terakhir, dengan nilai IP sebesar 1,6 pada tahun 2020 yang meningkat hingga 1,9 pada 2022, namun kembali menurun menjadi 1,68 pada 2023, dan naik lagi menjadi 1,78 di tahun 2024. Indikator ini menunjukkan bahwa rata-rata petani di Luwu Timur mampu melakukan tanam padi hampir dua kali dalam setahun, yang menandakan tingkat intensifikasi lahan sawah yang cukup baik. Fluktuasi IP mencerminkan adanya pengaruh dinamika faktor teknis seperti ketersediaan air irigasi, kondisi cuaca, serta adopsi teknologi pertanian. Meski belum mencapai IP ideal 2 (dua) atau lebih, tren yang ada menunjukkan potensi peningkatan produktivitas melalui optimalisasi sarana irigasi, perbaikan kalender tanam, dan penguatan kapasitas petani. Oleh karena itu, IP Padi menjadi salah satu indikator penting dalam upaya meningkatkan efisiensi penggunaan lahan dan mendukung ketahanan pangan daerah secara berkelanjutan.

2.1.1.1.6 Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

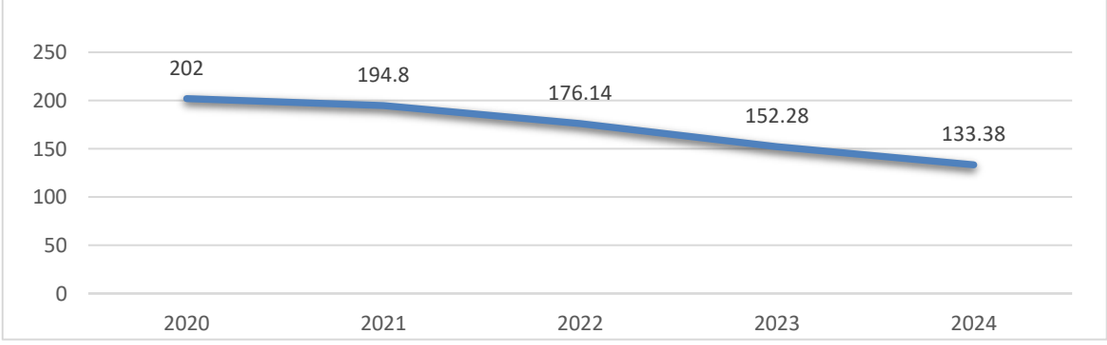
Kondisi resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim mencerminkan kemampuan suatu daerah dalam mengantisipasi, merespons, dan pulih dari dampak bencana alam maupun krisis iklim. Resiliensi yang baik ditunjukkan melalui sistem peringatan dini yang efektif, infrastruktur tangguh, kapasitas kelembagaan, serta keterlibatan masyarakat dalam mitigasi dan adaptasi. Dengan tingkat resiliensi yang kuat, risiko kerugian akibat banjir, longsor, kekeringan, dan dampak perubahan iklim lainnya dapat diminimalkan, sehingga pembangunan daerah dapat berlangsung secara aman dan berkelanjutan.

A. Indeks Risiko Bencana

Bencana adalah suatu kejadian atau serangkaian kejadian yang menimbulkan ancaman dan gangguan, baik disebabkan oleh kejadian alam, kejadian bukan alam, maupun tindakan manusia, yang menghasilkan dampak berupa kehilangan nyawa, kerusakan lingkungan, kerugian harta, dan efek psikologis. Risiko, di sisi lain, dapat diartikan sebagai nilai kehilangan, seperti korban jiwa, luka-luka, kerusakan bangunan, dan sebagainya, yang timbul akibat dari adanya bahaya atau bencana. Indeks risiko bencana ini bertujuan untuk menyediakan informasi mengenai tingkat risiko bencana di berbagai daerah.

Perhitungan tingkat risiko dilakukan dengan mempertimbangkan faktor bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Bahaya (hazard) mencakup unsur-unsur yang berasal dari kondisi hidrometeorologis, geofisika, atau tindakan manusia yang memberikan ancaman terhadap kehidupan, properti, atau lingkungan. Kerentanan (vulnerability) merujuk pada tingkat rentan dari elemen-elemen yang terpapar, seperti korban manusia, mata pencaharian, dan harta benda. Gambaran indeks risiko bencana Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020-2024 disajikan pada grafik berikut :

Grafik 2. 2 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 – 2024



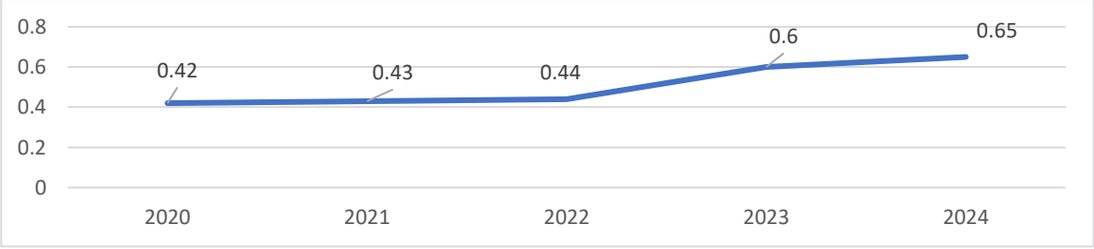
Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025.

Berdasarkan data pada grafik di atas, Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Luwu Timur menunjukkan tren penurunan yang signifikan dalam kurun waktu 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, nilai IRB tercatat sebesar 202, kemudian menurun menjadi 194,8 pada tahun 2021. Tren penurunan berlanjut secara drastis pada tahun 2022, dengan nilai IRB mencapai 176,14, dan sedikit meningkat menjadi 133,38 pada tahun 2024. Penurunan nilai IRB hingga tahun 2022 mengindikasikan peningkatan kapasitas mitigasi risiko bencana, baik dari sisi kebijakan, sistem peringatan dini, maupun kesiapsiagaan masyarakat.

B. Indeks Ketahanan Daerah (Bencana)

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kesiapsiagaan dan kemampuan suatu daerah dalam menghadapi, merespons, dan pulih dari bencana. Indeks ini mencerminkan kapasitas suatu wilayah dalam mengelola risiko bencana melalui aspek pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan, respon darurat, serta pemulihan pasca-bencana. IKD disusun berdasarkan berbagai indikator yang mencakup aspek fisik, sosial, ekonomi, kelembagaan, dan lingkungan. Nilainya berada pada skala 0 sampai 1, di mana semakin mendekati 1 berarti semakin tinggi ketahanan suatu daerah terhadap bencana. Berikut disajikan capaian Indeks Ketahanan Daerah di Kabupaten Luwu Timur 2020-2024 dalam grafik sebagai berikut:

Grafik 2. 3 Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Luwu Timur



Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Luwu Timur tahun 2024

Berdasarkan data grafik di atas, Nilai Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Luwu Timur menunjukkan tren peningkatan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, indeks tercatat di angka 0,42. Kemudian mengalami kenaikan bertahap menjadi 0,43 di tahun 2021 dan 0,44 di tahun 2022. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2023, ketika indeks melonjak menjadi 0,60, dan kembali naik menjadi 0,65 di tahun 2024. Tren ini mencerminkan peningkatan kapasitas dan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi risiko bencana, termasuk aspek pencegahan, mitigasi, respons, dan pemulihan.

C. Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) merupakan pelepasan gas-gas seperti CO_2, CH_4, dan N_2O ke atmosfer yang menyebabkan pemanasan global. Aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan pertanian intensif menjadi penyebab utamanya. Upaya mitigasi dilakukan melalui penggunaan energi terbarukan, efisiensi energi, dan pengelolaan limbah. Di Kabupaten Luwu Timur, berbagai perangkat daerah telah melaksanakan aksi mitigasi, seperti pembangunan PLTS dan PLTMH, penggunaan Lampu Hemat Energi, pengelolaan sampah, rehabilitasi hutan dan lahan, pemanfaatan pupuk organik, penanaman mangrove, serta kegiatan car free day. Namun, selama lima tahun terakhir, data penurunan GRK belum tersedia karena belum aktifnya pelaporan melalui aplikasi AKSARA.

Tabel 2. 43 Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 – 2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (Ton CO2 eq)	n/a	n/a	n/a	168.429,98	168.568,098

Sumber: https://pprk.bappenas.go.id/aksara/

Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca di Kabupaten Luwu Timur mulai tercatat pada tahun 2023 dengan capaian sebesar 168.429,98 ton CO_2 ekuivalen, kemudian mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2024 menjadi 168.568,10 ton CO_2 ekuivalen. Capaian ini menunjukkan adanya kontribusi daerah dalam upaya mitigasi perubahan iklim melalui pengurangan emisi, meskipun data baru tersedia pada dua tahun terakhir periode pengamatan.

2.1.1.2 ASPEK DEMOGRAFI

Aspek demografi adalah kajian atau elemen yang berkaitan dengan karakteristik penduduk dalam suatu wilayah tertentu. Aspek ini mencakup berbagai data dan informasi yang digunakan untuk menggambarkan struktur, dinamika, dan perubahan penduduk dari waktu ke waktu. Kondisi demografi atau kependudukan Kabupaten Luwu Timur ditunjukkan melalui beberapa indikator yaitu jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk dan rasio jenis kelamin. Data demografi di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020-2024 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 44 Jumlah Penduduk Dirinci Menurut Kecamatan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 – 2024

Kecamatan	Jumlah Penduduk				
	2020	2021	2022	2023	2024
Burau	34.214	34.306	34.529	35.655	36.703
Wotu	33.345	33.657	34.101	34.723	35.640
Tomoni	26.406	26.644	26.986	27.727	28.654
Tomoni Timur	13.515	13.602	13.741	13.900	14.141
Angkona	25.075	25.247	25.516	25.814	26.406
Malili	42.826	43.640	44.641	45.853	48.132
Towuti	42.087	43.586	45.310	48.076	50.605
Nuha	23.399	23.575	23.844	24.486	24.978
Wasuponda	21.610	21.840	22.157	22.357	22.780
Mangkutana	22.232	22.316	22.485	22.551	23.000
Kalaena	12.032	12.098	12.211	12.262	12.383
Jumlah	**296.741**	**300.511**	**305.521**	**313.404**	**323.422**

Sumber : BPS, Kabupaten Luwu Timur dalam Angka Tahun 2025

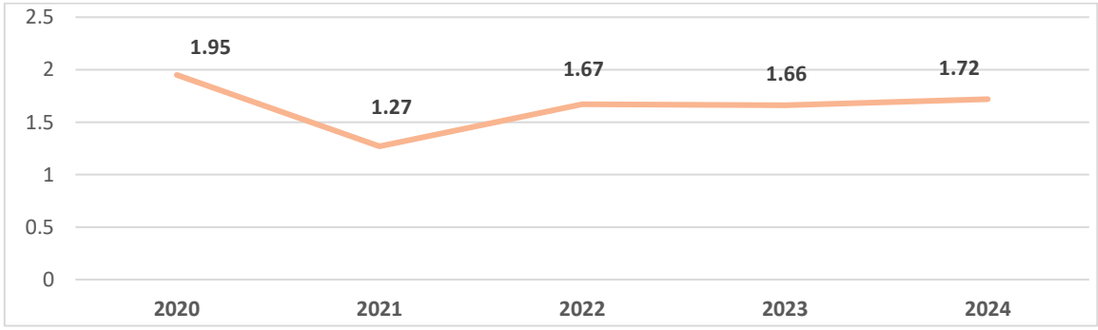
Data jumlah penduduk Kabupaten Luwu Timur menurut kecamatan menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020 jumlah penduduk tercatat sebanyak 296.741 jiwa, meningkat menjadi 300.511 jiwa pada 2021, 305.521 jiwa pada 2022, 313.404 jiwa pada 2023, dan mencapai 323.422 jiwa pada 2024. Hampir semua kecamatan mengalami pertumbuhan penduduk, dengan peningkatan terbesar terjadi di Kecamatan Towuti yang dari 42.087 jiwa pada 2020 naik menjadi 50.605 jiwa pada 2024, serta Kecamatan Malili yang dari 42.826 jiwa pada 2020 meningkat menjadi 48.132 jiwa pada 2024. Pertumbuhan penduduk yang konsisten ini menunjukkan adanya dinamika demografis yang positif, baik karena faktor kelahiran, migrasi, maupun perkembangan wilayah, yang menjadi tantangan sekaligus peluang dalam perencanaan pembangunan daerah ke depan.

A. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju Pertumbuhan Penduduk adalah persentase kenaikan atau penurunan jumlah penduduk dalam suatu wilayah pada periode waktu tertentu, biasanya

dihitung setiap tahun. Indikator ini mencerminkan dinamika demografi yang terjadi akibat kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas), dan perpindahan penduduk (migrasi masuk dan keluar). Data laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Luwu Timur 2020-2024 disajikan pada grafik sebagai berikut:

Grafik 2. 4 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 – 2024



Sumber : BPS, Kabupaten Luwu Timur dalam Angka Tahun 2025

Berdasarkan data grafik diatas, Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Luwu Timur dalam lima tahun terakhir menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2020, laju pertumbuhan penduduk tercatat sebesar 1,95 persen, kemudian mengalami penurunan signifikan pada tahun 2021 menjadi 1,27 persen. Penurunan ini kemungkinan dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19, baik dari sisi mobilitas penduduk maupun faktor demografis lainnya. Namun, pada tahun 2022 laju pertumbuhan kembali meningkat menjadi 1,67 persen, dan stabil di angka 1,66 persen pada tahun 2023. Kenaikan ini menandakan mulai pulihnya aktivitas sosial-ekonomi masyarakat. Tren positif berlanjut pada tahun 2024, di mana laju pertumbuhan naik tipis menjadi 1,72 persen.

B. Komposisi Penduduk

Komposisi penduduk adalah pengelompokan atau pembagian penduduk suatu wilayah berdasarkan ciri atau karakteristik tertentu, sehingga dapat menunjukkan susunan atau struktur penduduk tersebut. Berikut disajikan Komposisi peduduk di Kabupaten Luwu Timur dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 45 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024

Kelompok Umur	Jenis Kelamin/*Sex*		
Age Groups	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
	Male	***Female***	***Total***
(1)	(2)	(3)	(4)
0–4	13.404	12.220	25.624
5–9	15.742	14.535	30.277
10–14	15.796	14.640	30.436
15–19	14.310	13.382	27.692
20–24	15.898	14.802	30.700
25–29	14.376	13.376	27.752
30–34	12.084	11.285	23.369
35–39	11.683	11.406	23.089
40–44	12.619	11.925	24.544
45–49	11.554	10.759	22.313

Kelompok Umur	Jenis Kelamin/*Sex*		
Age Groups	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
	Male	***Female***	***Total***
(1)	(2)	(3)	(4)
50–54	9.522	8.471	17.993
55–59	6.839	6.220	13.059
60–64	4.494	4.546	9.040
65+	8.613	8.921	17.534
Luwu Timur	**166.934**	**156.488**	**323.422**

Sumber : BPS, Kabupaten Luwu Timur dalam Angka Tahun 2025

Berdasarkan data komposisi penduduk Kabupaten Luwu Timur, jumlah penduduk tahun tersebut mencapai **323.422 jiwa**, terdiri dari **166.934 laki-laki** dan **156.488 perempuan**. Struktur umur menunjukkan bahwa kelompok usia produktif (15–64 tahun) mendominasi, yaitu sekitar dua pertiga dari total penduduk, sementara kelompok usia muda (0–14 tahun) cukup besar dengan lebih dari 86 ribu jiwa, menandakan potensi pertumbuhan penduduk di masa depan. Kelompok lansia (65 tahun ke atas) berjumlah 17.534 jiwa atau sekitar 5,4% dari total, yang berarti beban ketergantungan lansia masih relatif rendah. Secara umum, komposisi ini menunjukkan Luwu Timur memiliki basis penduduk produktif yang kuat dengan dukungan populasi muda yang signifikan, sehingga berpotensi menjadi modal tenaga kerja dan pembangunan daerah jika dikelola dengan baik.

C. Kepadatan Penduduk

Kepadatan Penduduk adalah ukuran yang menunjukkan jumlah penduduk yang menempati suatu wilayah tertentu dalam satuan luas, biasanya dihitung sebagai jumlah jiwa per kilometer persegi (jiwa/km^2). Kepadatan penduduk Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 46 Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan Kabupaten Luwu Timur

No	Kecamatan	Tahun 2024	
		Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km)
1	Burau	36.703	133,27
2	Wotu	35.640	241,40
3	Tomoni	28.654	104,31
4	Tomoni Timur	14.141	315,23
5	Angkona	26.406	89,53
6	Malili	48.132	54,47
7	Towuti	50.605	26,27
8	Nuha	24.978	29,05
9	Wasuponda	22.780	27,29
10	Mangkutana	23.000	20,05
11	Kaleana	12.383	209,60
Jumlah		**323.422**	**47,93**

Sumber : BPS, Kabupaten Luwu Timur dalam Angka Tahun 2025

Berdasarkan data tabel diatas, kepadatan penduduk tertinggi di Kabupaten Luwu Timur tercatat di Kecamatan Tomoni Timur sebesar 315,23 jiwa per kilometer persegi, sedangkan kepadatan terendah terdapat di Kecamatan Mangkutana yaitu

20,05 jiwa per kilometer persegi. Kepadatan penduduk dihitung dengan membagi jumlah penduduk dengan luas wilayah masing-masing kecamatan.

D. Rasio Penduduk

Rasio Penduduk adalah perbandingan antara dua kelompok penduduk dalam suatu wilayah untuk tujuan analisis demografis. Rasio penduduk merupakan konsep yang mencakup berbagai jenis rasio untuk menganalisis struktur dan dinamika demografis. Data sex ratio Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020-2024 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 47 Data Sex Ratio Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 - 2024

Tahun	Laki-Laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (orang)	*Sex Ratio*
2020	155.726	146.313	302.039	106,43
2021	157.367	147.571	304.938	106,63
2022	159.043	149.487	308.530	106,39
2023	161.542	151.862	313.404	106,37
2024	166.934	156.488	323.422	106.68

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan data tabel diatas, bahwa jumlah penduduk Kabupaten Luwu Timur terus mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga 2024, yaitu dari 302.039 jiwa pada tahun 2020 menjadi 323.422 jiwa pada tahun 2024. Dalam periode ini, jumlah penduduk laki-laki selalu lebih banyak dibandingkan perempuan, dengan Sex Ratio yang relatif stabil, berkisar antara 106,37 hingga 106,68. Ini berarti terdapat sekitar 106–107 laki-laki untuk setiap 100 perempuan, menunjukkan keseimbangan gender yang konsisten selama lima tahun terakhir.

Tabel 2. 48 Data Jumlah Penduduk, Laju Petumbuhan Penduduk (LPP), Kepadatan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 – 2024

TAHUN	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Penduduk	305.407	300.511	308.350	313.404	323.422
LPP	1,98	1,27	1,67	3,76	1,72
Kepadatan Penduduk	43	44	43,99	46,44	47,93
Rasio Jenis Kelamin	105,97	105,99	105,72	106,37	106.68

Sumber: BPS, Kabupaten Luwu Timur Dalam Angka Tahun 2025

Perubahan struktur penduduk mempengaruhi **rasio ketergantungan** di Kabupaten Luwu Timur. BPS Kabupaten Luwu Timur mencatat rasio ketergantungan penduduk pada tahun 2024 sebesar 32,11 yang berarti setiap 100 penduduk usia produktif (15-64 tahun) menanggung 32 penduduk usia 0-14 tahun dan penduduk 65 tahun ke atas. Rasio ketergantungan yang semakin tinggi menunjukkan beban yang lebih besar bagi populasi usia produktif, karena mereka perlu menyediakan dukungan bagi populasi yang lebih besar dari mereka yang tidak produktif secara ekonomi.

E. Proyeksi dan Analisis Penduduk

Berdasarkan Proyeksi kependudukan Kabupaten Luwu Timur tahun 2025 hingga 2030 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Pada tahun 2025, jumlah penduduk diperkirakan mencapai 330.149 jiwa, dan akan terus bertambah

hingga mencapai 337.160 jiwa pada tahun 2030. Rasio jenis kelamin juga mengalami peningkatan dari 106,69 pada tahun 2025 menjadi 107,42 pada tahun 2030, yang menunjukkan jumlah penduduk laki-laki diproyeksikan tetap lebih banyak dibandingkan perempuan. Kepadatan penduduk pun turut meningkat dari 48,93 jiwa/km^2 pada tahun 2025 menjadi 53,13 jiwa/km^2 pada tahun 2030. Selama periode tersebut, laju pertumbuhan penduduk diperkirakan stabil pada angka 2,08 persen per tahun. Proyeksi ini mencerminkan dinamika demografi yang perlu diantisipasi dengan kebijakan pembangunan berkelanjutan, terutama terkait penyediaan infrastruktur, pelayanan dasar, serta perencanaan ruang yang adaptif di Kabupaten Luwu Timur. Berikut disajikan proyeksi penduduk Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2030.

Tabel 2. 49 Proyeksi Data Jumlah Penduduk, Laju Petumbuhan Penduduk (LPP), Kepadatan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 - 2030

Tahun	Proyeksi Jumlah Penduduk	Proyeksi Rasio Jenis Kelamin	Proyeksi Kepadatan Penduduk (jiwa/km^2)	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)
2025	330.149	106,69	48,93	2,08
2026	321.020	106,87	49,94	2,08
2027	325.110	107,05	50,98	2,08
2028	329.150	107,23	52,04	2,08
2029	333.140	107,41	53,13	2,08
2030	337.160	107,42	53,13	2,08

Sumber: BPS; Data olah 2024

2.1.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Aspek Kesejahteraan Masyarakat adalah dimensi yang mencerminkan tingkat kualitas hidup, kemakmuran, dan kesehatan sosial-ekonomi penduduk di suatu wilayah. Aspek ini digunakan untuk menilai sejauh mana kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi dan bagaimana masyarakat dapat hidup secara layak, sehat, dan produktif. Aspek kesejahteraan masyarakat meliputi aspek kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial budaya.

2.1.2.1 KESEJAHTERAAN EKONOMI

Karakteristik kesejahteraan masyarakat dari perspektif ekonomi tercermin melalui kemampuan individu atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Indikator ekonomi seperti pendapatan per kapita, tingkat kemiskinan, kesempatan kerja, dan distribusi pengeluaran menjadi cerminan langsung tingkat kesejahteraan tersebut. Semakin tinggi daya beli masyarakat dan semakin merata distribusi pendapatan, maka semakin baik tingkat kesejahteraan ekonomi suatu daerah. Kesejahteraan juga erat kaitannya dengan akses terhadap lapangan kerja yang layak dan produktif, serta ketersediaan infrastruktur ekonomi yang mendukung aktivitas masyarakat.

A. Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto atau sering disingkat dengan PDRB sering digunakan sebagai indikator yang mewakili besarnya suatu daerah dari sisi pendapatan regional suatu wilayah. Terdapat dua model penyajian data PDRB, yaitu:

(a) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dimana harga untuk menghitung nilai tambah atau nilai barang dan jasa akhir menggunakan harga yang berlaku di setiap tahun perhitungan PDRB; (b) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dimana harga untuk menghitung nilai tambah atau nilai barang dan jasa akhir menggunakan harga tahun tertentu yang tetap untuk setiap tahun perhitungan PDRB. Berikut disajikan Gambaran PDRB t atas dasar harga berlaku dan harga konstan menurut lapangan usaha Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Tabel 2. 50 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Luwu Timur Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020 - 2024

Kategori	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023*	2024**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-0,25	4,19	-1,65	1,19	3,25
B	Pertambangan dan Penggalian	1,66	-7,81	1,66	16,74	1,67
C	Industri Pengolahan	-2,71	6,58	7,50	-2,55	2,87
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,92	6,10	5,57	5,95	9,71
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Daur Ulang	9,34	11,76	9,24	2,5	-6,81
F	Konstruksi	3,15	7,65	2,56	6,14	8,58
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-1,08	6,72	7,83	4,05	4,24
H	Transportasi dan Pergudangan	-12,94	6,73	11,67	2,93	2,73
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-12,78	2,34	9,91	4,16	5,02
J	Informasi dan Komunikasi	11,27	7,64	6,72	-3,27	1,44
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,98	5,08	2,40	4,06	9,42
L	Real Estate	5,95	5,72	6,17	0,66	4,20
M	Jasa Perusahaan	-8,52	3,79	6,33	5,71	7,20
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0,76	5,98	2,93	7,67	8,57
O	Jasa Pendidikan	6,28	5,60	2,97	8,08	7,36
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	11,72	9,58	7,40	6,14	5,98
Q	Jasa lainnya	-12,32	6,54	7,32	3,80	9,41
Produk Domestik Regional Bruto		1,46	-1,39	1,99	9,66	3,27

Sumber : BPS, Kabupaten Luwu Timur Dalam Angka Tahun 2025

Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Luwu Timur menurut lapangan usaha pada periode 2020–2024 menunjukkan dinamika yang cukup beragam di masing-masing sektor. Pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan sempat melambat pada tahun 2021 dengan kontraksi -1,39 persen, namun kembali pulih dan mencapai puncaknya pada 2023 sebesar 9,66 persen sebelum melambat menjadi 3,27 persen pada 2024. Beberapa sektor mencatat pertumbuhan stabil dan positif, seperti sektor pengadaan listrik dan gas yang tumbuh konsisten setiap tahun, dengan pertumbuhan tertinggi pada 2024 sebesar

9,71 persen. Sektor jasa pendidikan dan jasa kesehatan juga menunjukkan tren pertumbuhan yang positif sepanjang periode. Sementara itu, sektor pertambangan dan penggalian mengalami fluktuasi signifikan, termasuk kontraksi -7,81 persen pada 2021 dan lonjakan 16,74 persen pada 2023. Sektor-sektor lain seperti industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, serta pertanian dan perikanan menunjukkan pola pertumbuhan yang naik-turun, mencerminkan ketergantungan terhadap kondisi eksternal dan internal daerah.

Tabel 2. 51 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Luwu Timur (Miliar Rupiah) Tahun 2020 - 2024

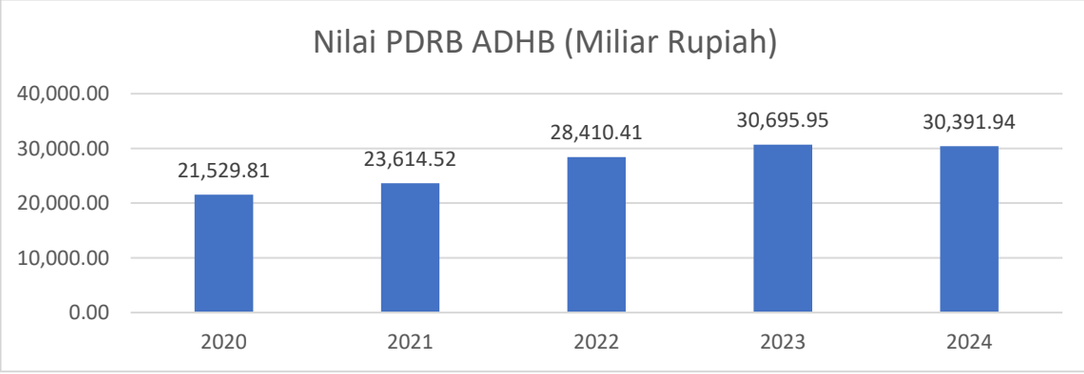
Kategori	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023*	2024**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.157,68	5.906,03	6.229,88	6.799,93	7.870,34
B	Pertambangan dan Penggalian	9.677,50	10.387,74	14.212,80	15,441,18	13.373,29
C	Industri Pengolahan	790,88	862,98	958,55	952,05	1.012,37
D	Pengadaan Listrik dan Gas	10,60	11,35	12,09	13,16	14,51
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Daur Ulang	1,62	1,85	2,05	2,12	1,97
F	Konstruksi	2.269,46	2.544,55	2.752,09	3.017,09	3.299,28
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	883,23	961,72	1.077,26	1.162,10	1.234,28
H	Transportasi dan Pergudangan	147,15	167,57	200,23	221,51	232,72
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	41,37	42,48	48,38	50,15	53,66
J	Informasi dan Komunikasi	362,77	390,48	420,65	405,52	414,46
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	221,04	255,26	255,26	274,71	303,70
L	Real Estate	542,98	574,09	629,84	611,98	653,17
M,N	Jasa Perusahaan	11,27	11,94	13,20	14,46	15,81
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	573,81	613,94	636,87	696,14	773,68
P	Jasa Pendidikan	486,91	515,92	540,25	588,16	653,42
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	325,95	359,29	391,02	414,32	450,55
R,S,T,U	Jasa lainnya	25,57	27,28	29,98	31,35	34,73
Produk Domestik Regional Bruto		21.529,81	23.614,52	28.410,41	30.695,95	30.391,94

Sumber : BPS, Kabupaten Luwu Timur dalam Angka Tahun 2025

Struktur ekonomi Kabupaten Luwu Timur dalam lima tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan yang ditopang oleh sektor unggulan seperti pertambangan dan penggalian serta pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sektor pertambangan tetap menjadi penyumbang terbesar terhadap PDRB, dengan nilai tertinggi pada tahun 2023 sebesar Rp15.441,18 miliar meskipun mengalami penurunan menjadi Rp13.373,29 miliar pada tahun 2024. Sementara itu, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menunjukkan pertumbuhan yang stabil dari Rp5.157,68 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp7.870,34 miliar pada tahun 2024. Di samping itu, beberapa sektor lain seperti konstruksi, perdagangan, jasa pendidikan,

dan jasa kesehatan juga mencatatkan tren positif. Nilai total PDRB atas dasar harga berlaku meningkat dari Rp21.529,81 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp30.695,95 miliar pada 2023, meskipun sedikit menurun pada tahun 2024 menjadi Rp30.391,94 miliar. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh fluktuasi pada sektor utama, namun secara keseluruhan struktur ekonomi Luwu Timur menunjukkan arah pertumbuhan yang positif dan mulai bergerak menuju diversifikasi sektor-sektor produktif lainnya. Berikut disajikan perkembangan PDRB ADHK Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020-2024 dalam grafik sebagai berikut:

Grafik 2. 5 Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020-2024



Sumber : BPS, Kabupaten Luwu Timur Dalam Angka Tahun 2025

Sektor Pertambangan dan Penggalian memiliki kontribusi terbesar terhadap PDRB, sedangkan sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Daur Ulang memiliki nilai yang relatif kecil,hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 52 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah)

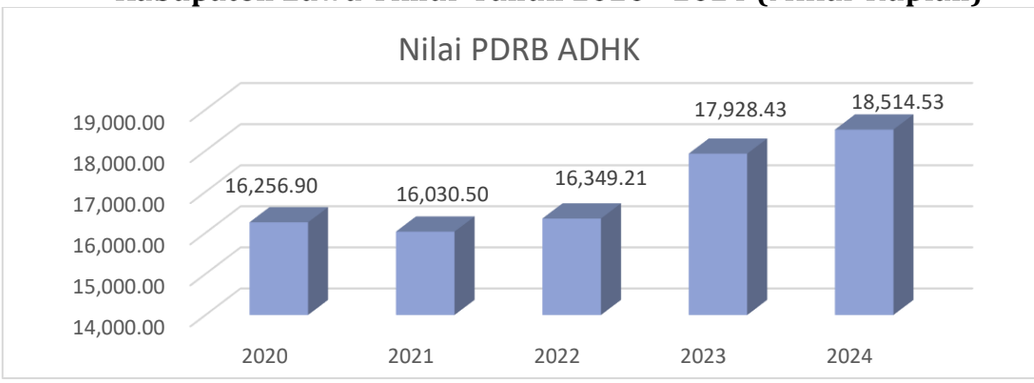
Kategori	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023*	2024**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.175,95	3.308,98	3.254,37	3.293,12	3.400,12
B	Pertambangan dan Penggalian	8.587,77	7.916,77	8.048,03	9.395,08	9.552,43
C	Industri Pengolahan	507,75	541,15	581,75	566,92	583,21
D	Pengadaan Listrik dan Gas	10,52	11,17	11,79	12,49	13,70
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Daur Ulang	1,32	1,47	1,61	1,65	1,54
F	Konstruksi	1.448,20	1.559,00	1.598,88	1.697,12	1.842,74
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	662,57	707,10	762,50	793,34	826,95
H	Transportasi dan Pergudangan	97,39	103,94	116,07	119,47	122,73
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	24,23	24,80	27,26	28,39	29,81
J	Informasi dan Komunikasi	328,12	353,19	376,91	364,59	369,84

Kategori	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023*	2024**
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	147,33	154,80	158,81	164,95	180,48
L	Real Estate	313,48	331,40	351,83	354,14	369,01
M,N	Jasa Perusahaan	7,15	7,42	7,89	8,34	8,94
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	345,81	366,50	377,25	406,18	441,00
P	Jasa Pendidikan	337,64	356,56	367,14	396,82	426,03
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	245,15	268,62	288,51	306,21	324,52
R,S,T,U	Jasa lainnya	16,54	17,62	18,91	19,63	21,48
Produk Domestik Regional Bruto		**16.256,90**	**16.030,50**	**16.349,21**	**17.928,43**	**18.514,53**

Sumber : BPS, Kabupaten Luwu Timur Dalam Angka 2025

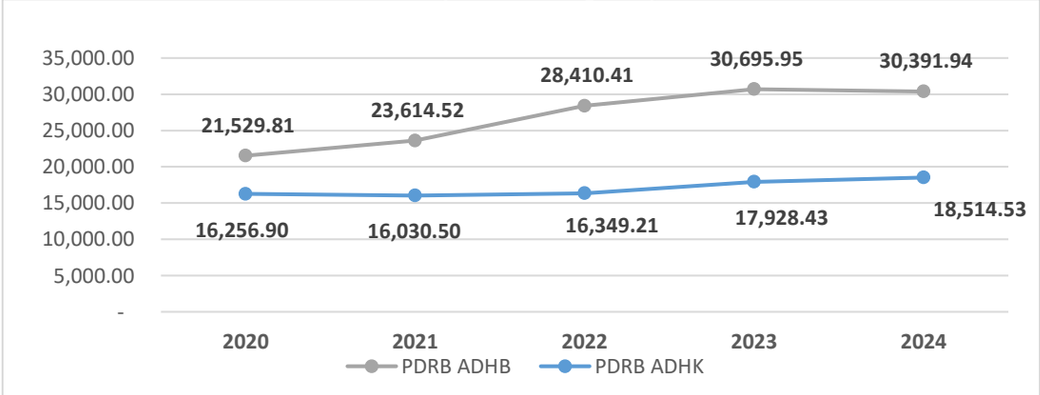
Berdasarkan data tabel diatas, menunjukkan secara keseluruhan, pertumbuhan PDRB ADHK di Kabupaten Luwu Timur menunjukkan tren yang positif diberbagai sektor lapangan usaha. Sebagian besar sektor menunjukkan pertumbuhan positif yang konsisten diantaranya pada sektor pertanian, kehitanan dan perikanan, pertambangan dan penggalian, industry pengolahan. Adapun beberapa sektor yang mengalami fluktuasi yaitu sektor jasa keuangan dan asurasi, jasa perusahaan dan jasa lainnya.

Grafik 2. 6 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 - 2024 (Miliar Rupiah)



Sumber : BPS, Kabupaten Luwu Timur dalam Angka Tahun 2025

Grafik 2. 7 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 - 2024 (Miliar Rupiah)



Sumber : BPS, Kabupaten Luwu Timur dalam Angka Tahun 2025

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Luwu Timur berdasarkan harga berlaku (ADHB) dan harga konstan (ADHK) menunjukkan tren meningkat selama periode 2020–2024. PDRB ADHB meningkat dari Rp21.529,81 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp30.391,94 miliar pada tahun 2024. Peningkatan tertinggi terjadi antara tahun 2021 dan 2022, yaitu sebesar Rp4.795,89 miliar. PDRB ADHK juga mengalami pertumbuhan, dari Rp16.256,90 miliar pada 2020 menjadi Rp18.514,53 miliar pada 2024, mencerminkan pertumbuhan ekonomi riil yang stabil. Meskipun terjadi sedikit penurunan PDRB ADHB pada 2024 dibanding 2023 (Rp30.695,95 miliar menjadi Rp30.391,94 miliar), secara umum tren lima tahunan menunjukkan penguatan kapasitas ekonomi daerah, dari sisi nominal maupun riil.

Tabel 2. 53 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Luwu Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020 - 2024 (Persen)

Kategori	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023*	2024**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	23,96	25,01	21,93	22,15	25,90
B	Pertambangan dan Penggalian	44,95	43,99	50,03	50,30	44,00
C	Industri Pengolahan	3,67	3,65	3,37	3,10	3,33
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,05	0,04	0,04	0,05
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Daur Ulang	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
F	Konstruksi	10,54	10,78	9,69	9,83	10,86
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,10	4,07	3,79	3,79	4,06
H	Transportasi dan Pergudangan	0,68	0,71	0,70	0,72	0,77
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,19	0,18	0,17	0,16	0,18
J	Informasi dan Komunikasi	1,68	1,65	1,48	1,32	1,36
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,03	1,00	0,90	0,89	1,00
L	Real Estate	2,52	2,43	2,22	1,99	2,15
M,N	Jasa Perusahaan	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,67	2,60	2,24	2,27	2,55
P	Jasa Pendidikan	2,26	2,18	1,90	1,92	2,15
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,51	1,52	1,38	1,35	1,48
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,12	0,12	0,11	0,10	0,11
Produk Domestik Regional Bruto		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber : BPS, Kabupaten Luwu Timur Dalam Angka 2025

Berdasarkan data tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa sektor Pertambangan dan Penggalian merupakan penyumbang terbesar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Luwu Timur, dengan persentase yang terus meningkat dari tahun 2020 hingga 2024. Sektor ini mendominasi struktur ekonomi Kabupaten Luwu Timur, menyumbang 50,3% PDRB pada tahun 2023 dan 44% pada tahun 2024. Selain itu, sektor Industri Pengolahan , Konstruksi dan Administrasi Pemerintahan juga menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, mengindikasikan perkembangan ekonomi yang positif di Kabupaten Luwu Timur. Namun, penting

untuk dicatat bahwa sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Daur Ulang mengalami penurunan persentase PDRB. Hal ini menunjukkan bahwa sektor ini perlu mendapatkan perhatian khusus untuk meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian Kabupaten Luwu Timur.

B. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Laju Pertumbuhan Ekonomi adalah indikator yang menunjukkan seberapa besar peningkatan nilai produksi barang dan jasa (Produk Domestik Regional Bruto/PDRB) di suatu wilayah dalam periode waktu tertentu, biasanya dihitung per tahun. Berikut ini adalah data grafik laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Luwu Timur 2020- 2024 sebagai berikut:

Grafik 2. 8 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 - 2024



Sumber: BPS Kabupaten Luwu Timur dalam Angka 2025

Berdasarkan data grafik diatas, Laju pertumbuhan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang fluktuatif, namun cenderung mengalami peningkatan. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu Timur sangat dipengaruhi oleh kegiatan pertambangan nikel, yang sebagian besar dikelola oleh PT Vale Indonesia Tbk.

Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu Timur mengalami kontraksi hingga mencapai minus 1,39 persen. Kondisi ini disebabkan oleh dampak pandemi Covid-19 yang masih memengaruhi perekonomian daerah, terutama dalam kegiatan ekspor nikel ke mancanegara.

Memasuki tahun 2022, pertumbuhan ekonomi mulai menunjukkan pemulihan dengan peningkatan sebesar 1,99 persen, dan selanjutnya mengalami lonjakan signifikan pada tahun 2023 menjadi 9,66 persen. Peningkatan tajam ini didorong oleh sektor-sektor utama pembentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), terutama sektor pertambangan yang memberikan kontribusi sebesar 50,03 persen. Selain itu, beberapa sektor lainnya juga mengalami pertumbuhan, antara lain: sektor pertanian sebesar 22,15 persen, sektor jasa pendidikan sebesar 8,08 persen, serta sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 7,67 persen. Peningkatan pertumbuhan ini juga dipicu oleh adanya peremajaan alat produksi oleh PT Vale Indonesia Tbk, yang menyebabkan peningkatan volume produksi.

Namun, pada tahun 2024, laju pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini terutama disebabkan oleh

menurunnya kontribusi sektor pertambangan menjadi 44,00 persen, meskipun sektor pertanian menunjukkan peningkatan kontribusi menjadi 25,90 persen, naik sekitar 3,75 persen dibandingkan tahun 2023.

Tabel 2. 54 Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu Timur dibanding dengan Daerah Sekitarnya Tahun 2020 - 2024

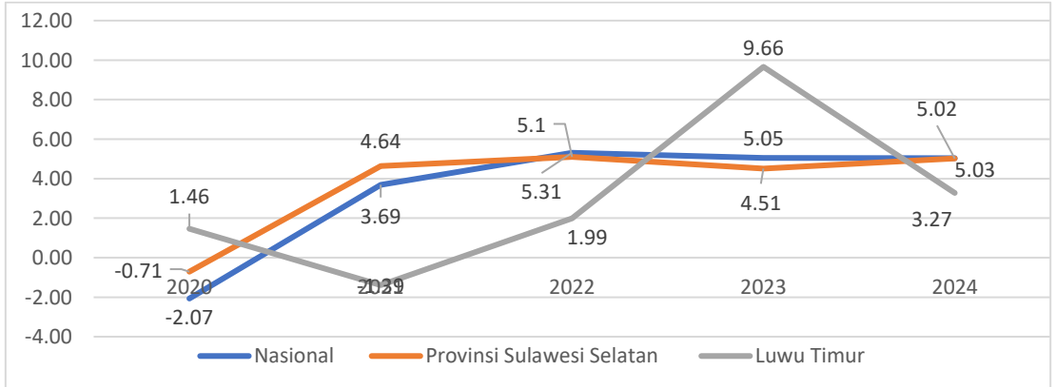
URAIAN	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Luwu Timur	1,46	-1,39	1,99	9,66	3,27
Luwu Utara	-0,59	3,9	4,54	5,12	4.30
Luwu	1,3	6,03	5,69	5,64	4,36
Palopo	0,45	5,41	5,83	4,34	4,4
Tana Toraja	-0,28	5,19	5,12	3,66	5,2
Toraja Utara	0,17	4,05	5,27	3,94	4,49

Sumber : Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan Tahun 2025

Berdasarkan data lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu Timur menunjukkan pola yang fluktuatif dibandingkan kabupaten/kota lain di wilayah Tana Luwu dan Toraja. Tahun 2020, Luwu Timur mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 1,46 persen, namun mengalami kontraksi di tahun 2021 sebesar -1,39 persen, yang merupakan pertumbuhan terendah di kawasan Palopo dan sekitarnya. Pemulihan mulai terlihat pada 2022 dengan pertumbuhan 1,99 persen, meski masih tertinggal dari daerah lain. Puncaknya terjadi pada 2023 dengan lonjakan pertumbuhan 9,66 persen, tertinggi di wilayah tersebut, yang kemungkinan dipengaruhi oleh sektor unggulan seperti pertambangan. Namun, tahun 2024 pertumbuhan melambat drastis menjadi 3,27 persen, kembali menjadi yang terendah. Sementara itu, daerah seperti Luwu, Palopo, dan Toraja Utara menunjukkan tren pertumbuhan yang lebih stabil dalam kisaran 4–6 persen. Tana Toraja, yang sempat berada di posisi bawah pada 2023, justru mencatat pertumbuhan tertinggi di 2024 sebesar 5,20 persen. Secara keseluruhan, meskipun Luwu Timur sempat mencatat capaian tertinggi, pertumbuhan ekonominya cenderung tidak stabil, sehingga diperlukan diversifikasi sektor ekonomi agar pertumbuhan ke depan lebih berkelanjutan.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu Timur dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 2. 9 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kab. Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020 - 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2025

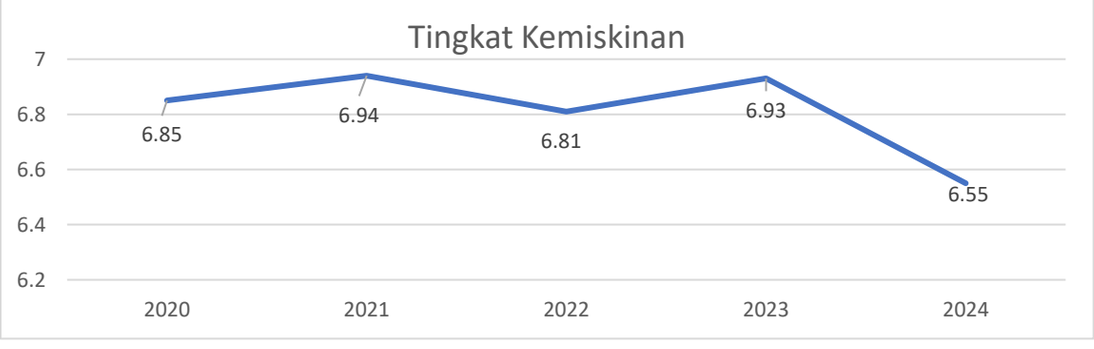
Berdasarkan data grafik di atas, dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu Timur menunjukkan fluktuasi yang cukup tajam dibandingkan Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional yang lebih stabil. Pada 2020, Luwu Timur mencatat pertumbuhan positif 1,46 persen saat nasional dan provinsi mengalami kontraksi. Namun, pada 2021, Luwu Timur justru mengalami penurunan menjadi -1,39 persen, tertinggal dari pemulihan yang mulai terjadi secara nasional dan provinsi. Pada 2022, meskipun kembali tumbuh 1,99 persen, angka tersebut masih di bawah pertumbuhan provinsi dan nasional yang sudah di atas 5 persen. Tahun 2023 menjadi puncak pertumbuhan Luwu Timur dengan capaian 9,66 persen—tertinggi di antara ketiganya—namun tidak berlanjut pada 2024 yang turun signifikan menjadi 3,27 persen, kembali lebih rendah dari nasional dan provinsi. Tren ini mencerminkan bahwa meskipun Luwu Timur mampu tumbuh tinggi, pertumbuhannya tidak stabil. Ini menunjukkan pentingnya diversifikasi ekonomi untuk menciptakan kestabilan pertumbuhan yang lebih berkelanjutan.

C. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan multidimensional yang memiliki implikasi serius terhadap keberhasilan pembangunan daerah, termasuk di Kabupaten Luwu Timur. Secara konseptual, kemiskinan dapat diartikan sebagai kondisi ketidakmampuan individu atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar secara layak, yang mencakup kebutuhan akan pangan, sandang, papan, pendidikan, dan layanan kesehatan.

Sebagai indikator kesejahteraan masyarakat, tingkat kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur menjadi salah satu parameter penting dalam evaluasi capaian pembangunan sosial ekonomi. Tren perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 2. 10 Tingkat kemiskinan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 - 2024



Sumber: BPS, Kabupaten Luwu Timur dalam Angka Tahun 2025

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur menunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023, Tingkat kemiskinan tercatat sebesar 6,93 persen, mengalami kenaikan sebesar 0,12 persen dibandingkan tahun 2022. Namun, pada tahun 2024, angka tersebut menurun menjadi 6,55 persen atau turun sekitar 0,38 persen dari tahun sebelumnya.

Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan ini adalah meningkatnya garis kemiskinan. Garis kemiskinan yang sebelumnya sebesar Rp 438.178 per kapita per bulan pada tahun 2023, naik menjadi Rp 460.356 per kapita per bulan pada tahun 2024, atau mengalami kenaikan sekitar 5,06 persen. Peningkatan ini menyebabkan perubahan dalam jumlah penduduk yang dikategorikan miskin, dari 21.570 orang pada tahun 2023 menjadi 20.700 orang pada tahun 2024. Perbandingan tingkat kemiskinan Kabupaten Luwu Timur dengan kabupaten/kota di sekitarnya dapat dilihat pada tabel berikut:

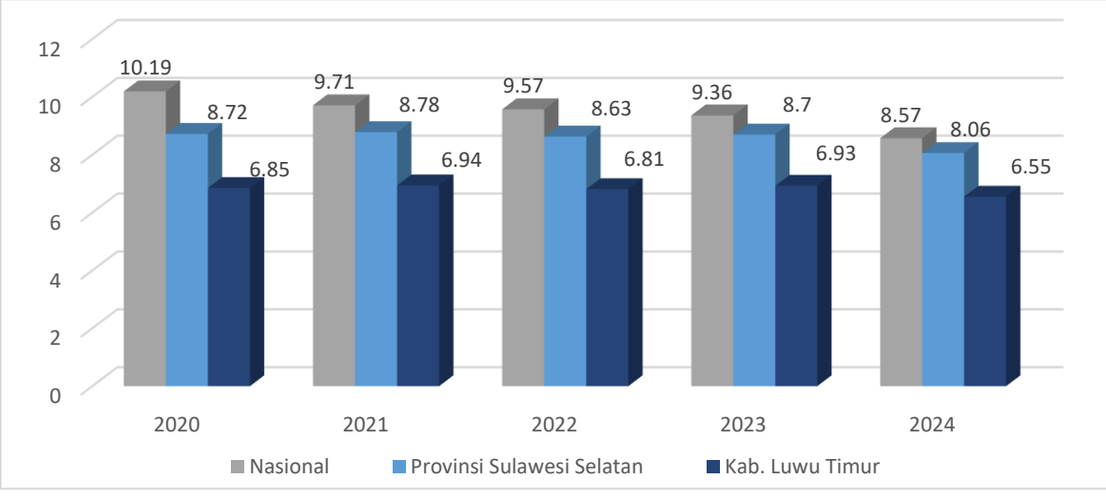
Tabel 2. 55 Perbandingan Tingkat kemiskinan Kabupaten Luwu Timur dengan Kabupaten/Kota disekitarnya Tahun 2020 - 2024

Wilayah	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Luwu Timur	6,85	6,94	6,81	6,93	6,55
Luwu Utara	13,41	13,59	13,22	12,66	11,24
Palopo	7,85	8,14	7,78	7,69	7,35
Luwu	12,65	12,53	12,49	12,71	11,70
Tana Toraja	12,10	12,27	12,18	12,48	10,79
Toraja Utara	12,01	11,99	11,65	12,12	10,73

Sumber: BPS, Kabupaten Luwu Timur dalam Angka Tahun 2025

Pada tahun 2024, tingkat kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur tercatat lebih rendah dibandingkan dengan sejumlah kabupaten/kota di sekitarnya. Jika dibandingkan dengan Kabupaten Luwu Utara, tingkat kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur lebih rendah sebesar 4,69 persen. Dibandingkan dengan Kota Palopo, selisihnya sebesar 0,80 persen, sementara dibandingkan dengan Kabupaten Luwu selisihnya mencapai 5,15 persen. Kabupaten Luwu Timur juga mencatat tingkat kemiskinan yang lebih rendah dibandingkan Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara, masing-masing sebesar 4,24 persen dan 4,18 persen. Selain itu, perbandingan tingkat kemiskinan Kabupaten Luwu Timur dengan rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan dan tingkat kemiskinan nasional dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 2. 11 Perbandingan Tingkat kemiskinan Kabupaten Luwu Timur dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020 - 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan Tahun 2025

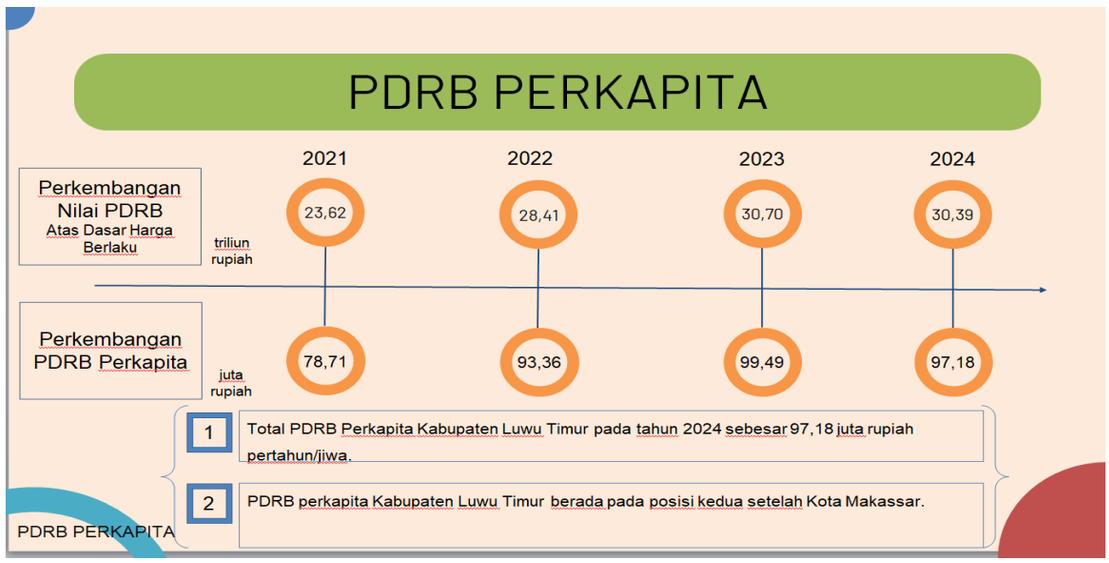
Tingkat kemiskinan Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2024 sebesar 6,55 persen. Jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Nasional, lebih rendah 2,02

persen pada tahun yang sama. Jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2024, tingkat kemiskinan Kabupaten Luwu Timur lebih rendah 1,51 persen. Ini menunjukkan bahwa Kabupaten Luwu Timur memiliki kinerja yang lebih baik dalam mengurangi kemiskinan dibandingkan dengan provinsi dan rata-rata nasionl

D. PDRB Per Kapita

PDRB Per kapita merupakan indikator yang menggambarkan pendapatan rata-rata penduduk yang didapat dari hasil bagi antara PDRB dengan populasi penduduk ditahun tertentu. produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita adalah ukuran nilai total barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah (seperti negara, provinsi, atau kabupaten) dibagi dengan jumlah penduduk di wilayah tersebut. PDRB per kapita memberikan gambaran tentang seberapa banyak pendapatan rata-rata yang dihasilkan oleh setiap individu di wilayah tersebut. Berikut disajikan Gambaran PDRB perkapita Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2024 :

Gambar 2. 2 PDRB Perkapita Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan

Berdasarkan Gambar diatas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan yang signifikan PDRB Perkapita Pada tahun 2022 dengan peningkatan sebesar 93,36 Juta Rupiah dari 78,71 Juta Rupiah tahun 2021 dan pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 99,49 Juta Rupiah. Peningkatan ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan peningkatan PDRB per kapita ini menandakan bahwa kemakmuran dan tingkat pembangunan di Kabupaten Luwu Timur selama 5 tahun terakhir berjalan cukup baik meskipun di Tahun 2024 mengalami penurunan seiring dengan nilai PDRB ADHB juga mengalami penurunan akibat volume produki sektor pertambangan dan penggalian juga menurun di tahun 2024.

E. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan tetapi sedang aktif mencari kerja atau sedang mempersiapkan suatu usaha. Indikator ini digunakan untuk mengukur ketersediaan

lapangan kerja dan daya serap pasar tenaga kerja di suatu wilayah. Berikut disajikan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020-2024 pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 56 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 - 2024

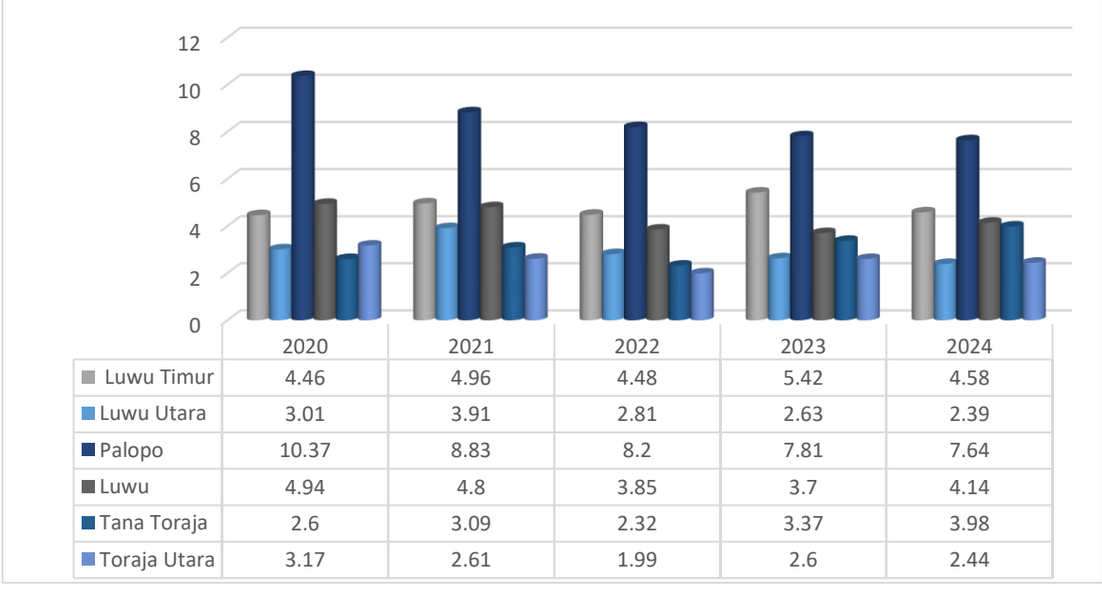
Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4.46	4.96	4.48	5.42	4,58

Sumber: Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan Tahun 2025

Berdasarkan data tabel diatas, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Luwu Timur selama lima tahun terakhir menunjukkan pola yang fluktuatif. Pada tahun 2020, TPT tercatat sebesar 4,46 persen dan mengalami kenaikan menjadi 4,96 persen pada 2021. Angka ini menurun menjadi 4,48 persen di tahun 2022, namun kembali meningkat cukup signifikan pada 2023 menjadi 5,42 persen. Pada tahun 2024, TPT berhasil ditekan turun menjadi 4,58 persen. Fluktuasi ini mencerminkan dinamika pasar kerja di Luwu Timur yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi, ketersediaan lapangan kerja, serta penyesuaian sektor usaha pasca-pandemi.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Luwu Timur dibandingkan dengan TPT Kabupaten/Kota disekitarnya Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Grafik dibawah ini:

Grafik 2. 12 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Luwu Timur dengan Kabupaten/Kota disekitarnya Tahun 2020 - 2024



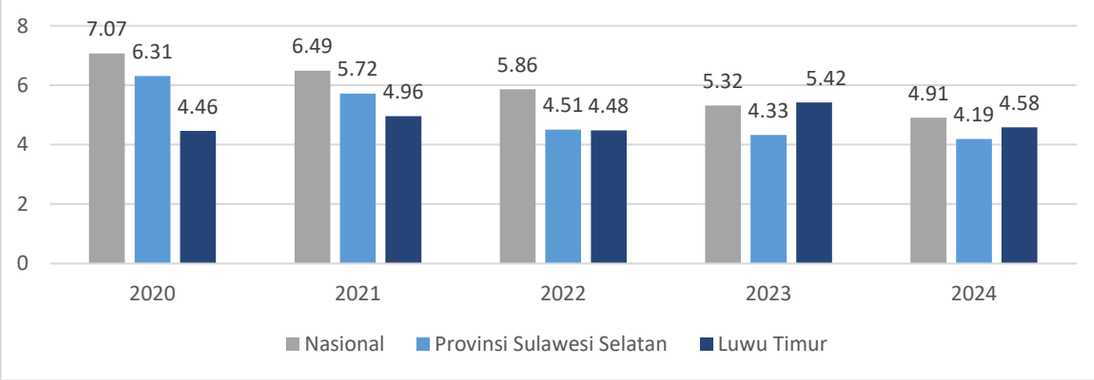
	2020	2021	2022	2023	2024
Luwu Timur	4.46	4.96	4.48	5.42	4.58
Luwu Utara	3.01	3.91	2.81	2.63	2.39
Palopo	10.37	8.83	8.2	7.81	7.64
Luwu	4.94	4.8	3.85	3.7	4.14
Tana Toraja	2.6	3.09	2.32	3.37	3.98
Toraja Utara	3.17	2.61	1.99	2.6	2.44

Sumber: Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan Tahun 2025

Dari data grafik diatas, Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2024 lebih tinggi jika dibandingkan dengan Kabupaten Luwu Utara, Luwu, Tana Toraja dan Toraja Utara. Namun lebih rendah jika dibandingkan dengan Kota Palopo.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Luwu Timur dibandingkan dengan TPT Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional dari Tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 2. 13 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Luwu Timur dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020 - 2024



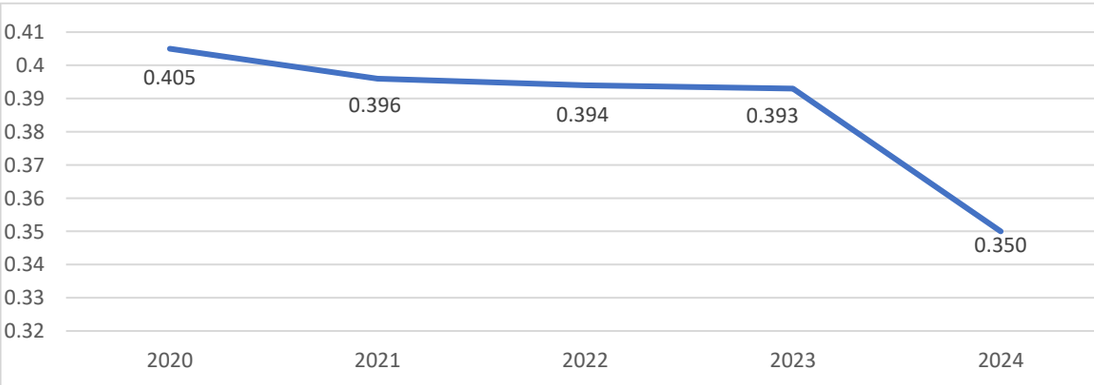
Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2025

Berdasarkan data grafik, Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2024 berada pada posisi tertinggi dibanding dengan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sulawesi selatan dan Nasional yaitu sebesar 4,58 persen yang berarti terdapat 5 pengangguran per 100 angkatan kerja. Berdasarkn data sebelumnya, angka kemisikinan di Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2024 sebesar 6,55%. Sementara itu TPT pada tahun 2024 sebesar 4,58%. Meskipun TPT menurun pada tahun 2024, tingkat kemiskinan masih relatif tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur, seperti kurangnya akses ke pendidikan dan pelatihan yang berkualitas, rendahnya pendapatan, dan kurangnya kesempatan kerjayang layak.

F. Indeks Gini

Rasio Gini adalah suatu ukuran statistik yang digunakan untuk menggambarkan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan atau kekayaan dalam suatu populasi. Rasio Gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan ekonomi di antara individu dalam suatu negara atau wilayah. Semakin tinggi nilai rasio Gini, semakin besar ketimpangan distribusi pendapatan atau kekayaan. Sebaliknya, semakin rendah nilai rasio Gini, semakin merata distribusinya, yang mencerminkan tingkat kesetaraan ekonomi yang lebih tinggi di dalam populasi. Berikut ini adalah grafik rasio gini yang terjadi di Kabupaten Luwu Timur sejak tahun 2020 – 2024:

Grafik 2. 14 Indeks Gini Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 - 2024



Sumber: BPS, Kabupaten Luwu Timur Dalam Angka Tahun 2025

Berdasarkan grafik diatas, tren rasio gini Indonesia selama periode tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, rasio gini tercatat sebesar 0,405, yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan relatif tinggi. Selanjutnya, terjadi penurunan pada tahun 2021 menjadi 0,396, dan menurun menjadi 0,394 di tahun 2022. Pada tahun 2023, rasio gini sedikit menurun menjadi 0,393, menunjukkan perbaikan kecil dalam pemerataan pendapatan. Namun, penurunan paling signifikan terjadi pada tahun 2024, di mana rasio gini menurun tajam menjadi 0,350.

Penurunan yang konsisten ini mencerminkan adanya perbaikan distribusi pendapatan selama lima tahun terakhir, dengan kemajuan yang paling mencolok pada tahun terakhir. Jika tren ini berlanjut, maka dapat menjadi indikator positif terhadap peningkatan kesejahteraan dan kesetaraan ekonomi di Indonesia.

Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Luwu Timur dengan Kabupaten/Kota disekitarnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 57 Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Luwu Timur dengan Kabupaten/Kota Sekitarnya Tahun 2020 - 2024

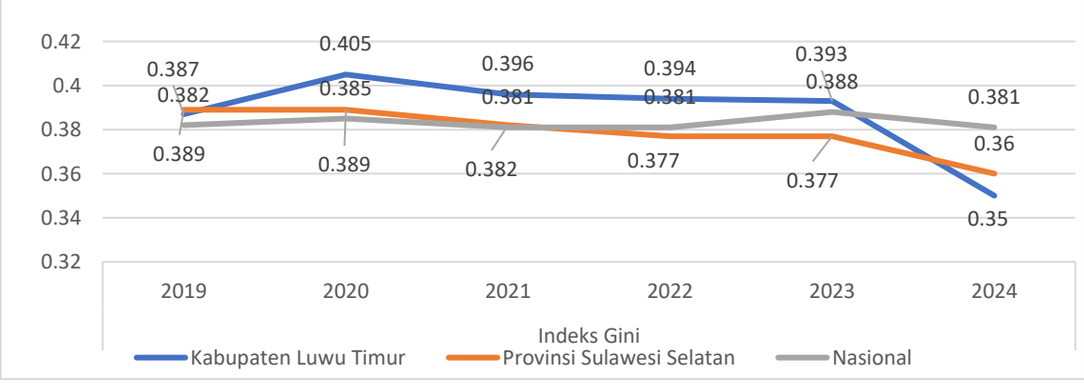
Wilayah	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Luwu Timur	0,405	0,396	0,394	0,393	0,350
Luwu Utara	0,344	0,341	0,349	0,342	0,272
Palopo	0,354	0,358	0,371	0,367	0,333
Luwu	0,366	0,375	0,364	0,341	0,319
Tana Toraja	0,348	0,378	0,355	0,35	0,320
Toraja Utara	0,384	0,372	0,356	0,348	0,316

Sumber: Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan Tahun 2025

Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, indeks gini Kabupaten Luwu Timur selalu berada di atas indeks gini Kabupaten/Kota disekitarnya. Pada tahun 2024, indeks gini Kabupaten Luwu Timur lebih tinggi 0,078 poin jika dibandingkan dengan indeks gini Kabupaten Luwu Utara dan lebih tinggi 0,017 poin dari indeks gini Kota Palopo, lebih tinggi 0,031 poin dari indeks gini Kabupaten Luwu, lebih tinggi 0,030 poin dari Kabupaten Tana Toraja, serta lebih tinggi 0,034 dari Kabupaten Toraja Utara.

Perbandingan indeks gini Kabupaten Luwu Timur dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional didapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 2. 15 Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Luwu Timur dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2019 – 2024



Sumber: BPS Sulawesi Selatan Tahun 2025

Dari data grafik diatas diketahui bahwa Indeks Gini Kabupaten Luwu Timur 2024 lebih baik 0,01 poin dari provinsi Sulawesi Selatan dan lebih baik 0,031 poin dari capaian Indeks Gini Nasional. Pemerintah daerah perlu melakukan kebijakan yang tepat untuk mengurangi ketimpangan ekonomi di Kabupaten Luwu Timur. Beberapa kebijakan yang dapat dilakukan antara lain meningkatkan akses ke pendidikan dan pelatihan yang berkualitas, meningkatkan kesempatan kerja yang layak, dan meningkatkan pendapatan rumah tangga.

G. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator komposit yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan manusia dalam tiga dimensi dasar: 1) Umur panjang dan hidup sehat, diukur melalui angka harapan hidup saat lahir; 2) Pengetahuan, diukur dari rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah; 3) Standar hidup layak, diukur dengan pengeluaran per kapita yang disesuaikan (untuk mengukur daya beli)

IPM mencerminkan tingkat keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan ekonomi secara merata dan berkelanjutan. Nilai IPM berada pada rentang 0 hingga 100, di mana semakin tinggi nilainya menunjukkan semakin tinggi pula capaian pembangunan manusia di wilayah tersebut.

Capaian nilai IPM di Kabupaten Luwu Timur sejak tahun 2020 – 2024 digambarkan pada tabel berikut ini:

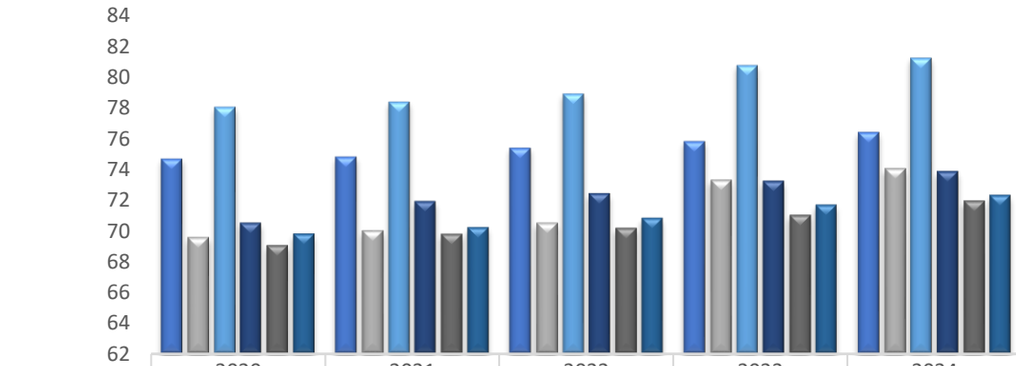
Tabel 2. 58 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 - 2024

No	Tahun	IPM
1	2020	74,71
2	2021	74,83
3	2022	75,41
4	2023	75,84
5	2024	76,44

Sumber : BPS, Kabupaten Luwu Timur Dalam Angka Tahun 2025

Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Luwu Timur secara umum mengalami tren positif dengan peningkatan IPM setiap tahunnya. Pada tahun 2023, capaian IPM Kabupaten Luwu Timur adalah tertinggi untuk skala kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tahun 2024 kembali meningkat sebesar 0,6 dari tahun 2023. Berdasarkan data diatas juga dapat disimpulkan adanya peningkatan komponen penyusun IPM. Indeks pendidikan melalui harapan lama sekolah mengalami peningkatan dari 13,01 pada tahun 2023 naik menjadi 13,18 pada tahun 2024. Dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2024 di Kabupaten Luwu Timur memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 74,55 tahun, meningkat 0,23 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Adapun Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Luwu Timur dengan Kabupaten/Kota sekitarnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 2.16 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Luwu Timur dengan Kabupaten/Kota Sekitarnya Tahun 2020 - 2024

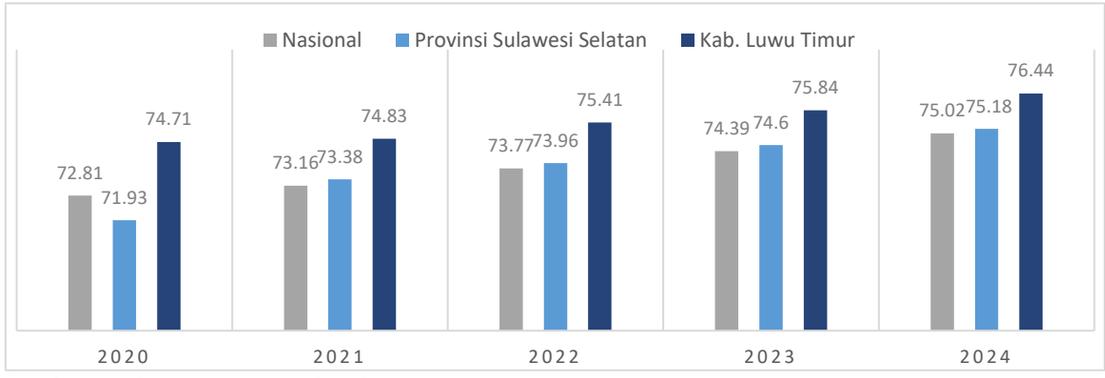


	2020	2021	2022	2023	2024
Luwu Timur	74.71	74.83	75.41	75.84	76.44
Luwu Utara	69.57	70.02	70.51	73.31	74.04
Palopo	78.06	78.38	78.91	80.77	81.25
Luwu	70.51	71.92	72.42	73.23	73.86
Tana Toraja	69.05	69.78	70.16	71.01	71.94
Toraja Utara	69.80	70.22	70.83	71.69	72.31

Sumber: Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan Tahun 2025

Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2024 melampaui capaian IPM Kabupaten/Kota yang berada di sekitarnya. Jika dibandingkan dengan IPM Kabupaten Luwu Utara pada tahun 2024, IPM Kabupaten Luwu Timur lebih tinggi 2,53 persen, lebih tinggi 2,61 persen dari Kabupaten Luwu. Namun IPM Kabupaten Luwu Timur lebih rendah 4,93 persen dari IPM Kota Palopo. Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Luwu Timur dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 2. 17 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Luwu Timur dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020 - 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2025

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Luwu Timur dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2024, IPM Kabupaten Luwu Timur mencapai 76,44 lebih tinggi dari nilai IPM Nasional sebesar 75,02 dan Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 75,18 di tahun yang sama.

2.1.2.2 KESEHATAN UNTUK SEMUA

Kesehatan untuk semua adalah prinsip bahwa setiap orang, tanpa terkecuali, berhak memperoleh layanan kesehatan yang bermutu, mudah diakses, dan

terjangkau. Konsep ini mencakup pencegahan penyakit, promosi hidup sehat, pengobatan yang efektif, serta perlindungan finansial dari risiko kesehatan. Tujuannya adalah memastikan seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan terpencil, dapat hidup sehat dan produktif tanpa terbebani biaya kesehatan yang memberatkan. Gambaran Kesehatan di Kabupaten Luwu Timur di wakili oleh beberapa indikator dengan capaian dari tahun 2020 hingga 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 59 Capaian Indikator Bidang Kesehatan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 - 2024

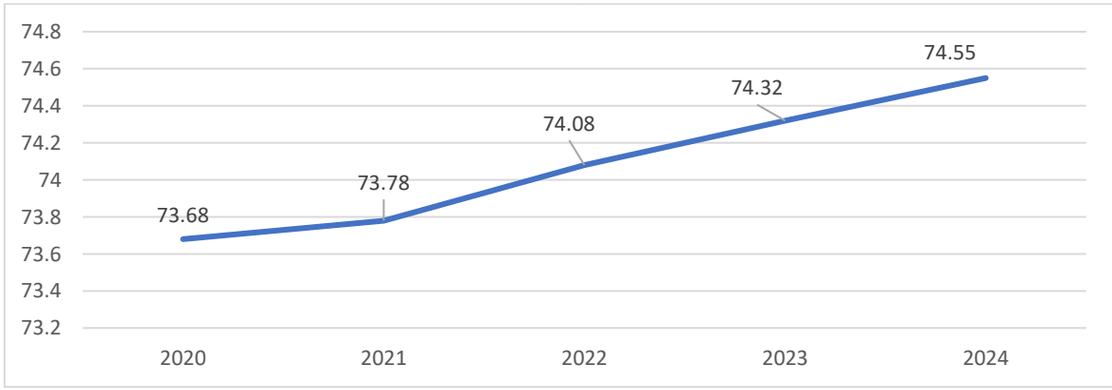
INDIKATOR	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Umur Harapan Hidup(UHH)	73,68	73,78	74,08	74,32	74,55
Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	108,74	147,09	133,3	122,22	141,21
Jumlah Kematian Ibu	6	8	7	5	6
Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan (SPM)	92,76	99,63	99,90	99,96	99,84
Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan (Rumus menggunakan proporsi)	92,76	93,20	91,25	88,60	81,91
Prevalensi Stunting pada Balita	0	19:09	22:06	26	21,8
Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan	92,98	93,51	91,33	88,63	82,04
Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis	100	100	100	100	100
Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis	97,74	97,40	96,33	97,67	95,5

Sumber: Dinas Kesehatan Kab.Luwu Timur Tahun 2025

A. Umur Harapan Hidup (UHH)

Umur Harapan Hidup (UHH) adalah perkiraan rata-rata usia yang diharapkan akan dicapai oleh seseorang atau sekelompok penduduk dalam suatu wilayah atau negara. UHH sering dijadikan indikator utama untuk menilai derajat kesehatan, kesejahteraan, serta kualitas hidup suatu populasi. Selain itu, UHH juga digunakan sebagai salah satu ukuran dalam menilai kemajuan pembangunan sosial. Adapun perkembangan Umur Harapan Hidup Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2. 18 Umur Harapan Hidup Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 - 2024

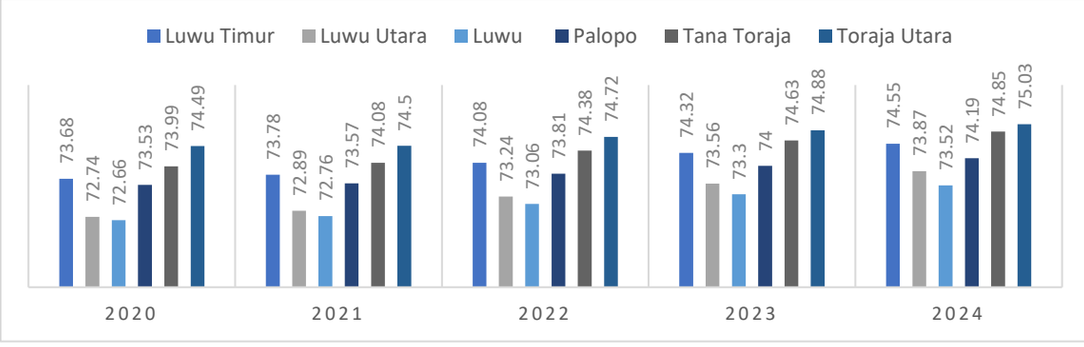


Sumber : Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan Tahun 2025

Berdasarkan grafik di atas, selama lima tahun terakhir, Umur Harapan Hidup (UHH) di Kabupaten Luwu Timur menunjukkan tren peningkatan yang stabil. Pada tahun 2020, UHH berada pada angka 73,68 tahun, kemudian naik menjadi 73,78 tahun di tahun 2021. Peningkatan ini terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya, yaitu 74,08 tahun pada 2022, 74,32 tahun pada 2023, dan mencapai 74,55 tahun pada 2024. Kenaikan ini mencerminkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam kualitas hidup masyarakat, terutama terkait dengan akses terhadap pelayanan kesehatan, perbaikan gizi, sanitasi, serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan pola hidup sehat.

Tingkat Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Luwu Timur dibandingkan dengan UHH Kabupaten/Kota disekitarnya Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

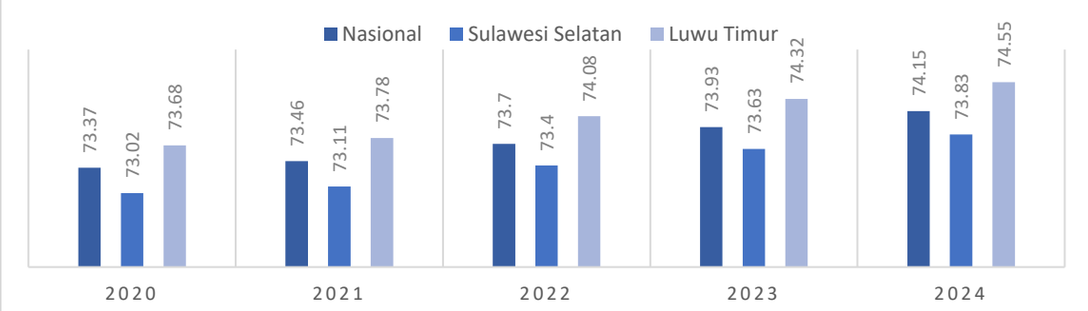
Grafik 2. 19 Perbandingan Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) Kabupaten Luwu Timur dengan Kabupaten/Kota disekitarnya Tahun 2020 - 2024



Sumber : Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan Tahun 2025

Berdasarkan grafik di atas, Umur Harapan Hidup (UHH) di Kabupaten Luwu Timur mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, meskipun kenaikannya relatif kecil. Pada periode 2020–2024, UHH Luwu Timur naik dari 73,68 tahun menjadi 74,55 tahun. Jika dibandingkan dengan daerah lain disekitarnya posisi UHH Luwu Timur masih berada di bawah Kota Palopo, Kabupaten Tana Toraja, dan Kabupaten Toraja Utara. Sementara itu, UHH Kabupaten Luwu Timur cenderung lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Luwu Utara, tetapi relatif setara dengan Kabupaten Luwu. Tingkat Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Luwu Timur dibandingkan dengan UHH Provinsi Sulawesi selatan dan Nasional dari Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 2. 20 Perbandingan Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Luwu Timur dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020 - 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan Tahun 2025

Berdasarkan Grafik di atas Jika dibandingkan dengan capaian UHH Nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan, UHH Kabupaten Luwu Timur secara konsisten berada di posisi lebih tinggi pada setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Luwu Timur relatif lebih baik dibandingkan rata-rata provinsi maupun nasional.

B. Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan

Persalinan di fasilitas kesehatan adalah proses persalinan atau kelahiran bayi yang dilakukan di tempat-tempat yang telah ditetapkan sebagai fasilitas pelayanan kesehatan. Tempat-tempat ini biasanya mencakup rumah sakit, puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat), klinik bersalin, atau tempat pelayanan kesehatan lainnya yang dilengkapi dengan tenaga medis dan sarana serta prasarana yang sesuai untuk menangani proses persalinan. Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Luwu Timur tahun 2020 – 2024 seperti tabel di bawah ini:

Tabel 2. 60 Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 - 2024

No	Tahun	Jumlah Ibu Hamil di Fasilitas Kesehatan	Cakupan Persalinan di Fasilitas Kesehatan (%)
1	2020	88.34	92.71
2	2021	91.61	93.13
3	2022	86.55	91.26
4	2023	95.73	99.96
5	2024	96,88	99,88

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

Berdasarkan tabel dapat di jelaskan bahwa data menunjukkan bahwa jumlah ibu hamil yang mengakses fasilitas kesehatan di Kabupaten/Lokasi terus meningkat dari tahun 2020 (88,34%) hingga 2024 (96,88%). Sejalan dengan itu, cakupan persalinan di fasilitas kesehatan juga sangat tinggi dan konsisten, bahkan hampir mencapai 100% pada tahun 2023 (99,96%) dan 2024 (99,88%). Hal ini menandakan bahwa layanan kesehatan ibu dan anak di daerah tersebut telah berjalan optimal dengan akses dan pemanfaatan fasilitas kesehatan yang sangat baik.

C. Jumlah Kematian Ibu (Per 100.000 Kelahiran Hidup)

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah jumlah kematian perempuan yang terjadi selama masa kehamilan, saat persalinan, atau dalam waktu 42 hari setelah berakhirnya kehamilan, tanpa memandang lama kehamilan dan tempat persalinan. Kematian tersebut disebabkan oleh kehamilan itu sendiri atau penanganannya, bukan karena sebab-sebab lain. AKI dinyatakan dalam satuan per 100.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 61 Jumlah Kematian Ibu Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 – 2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah ibu hamil, bersalin, dan nifas yang meninggal	Orang	6	8	7	5	6
2	Jumlah kelahiran hidup	Orang	5.518	5.439	5.251	4.909	4249

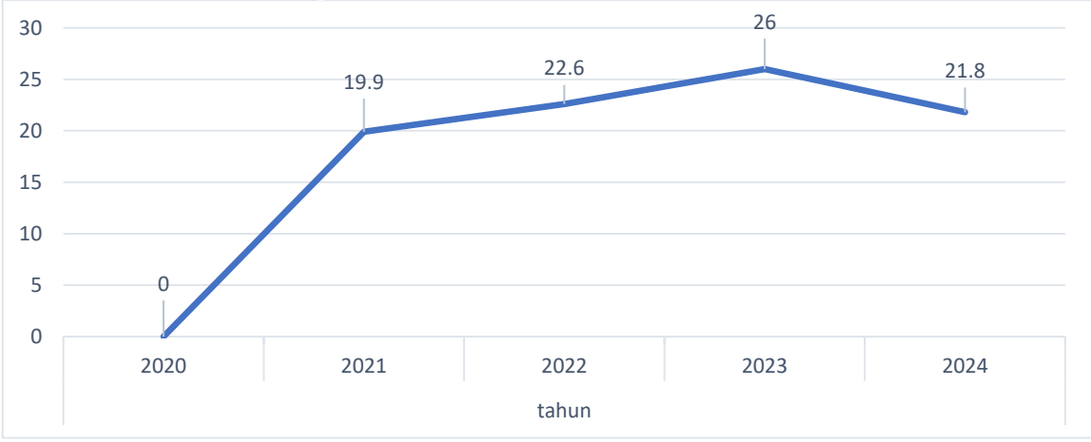
Sumber: Dinas Kesehatan kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

Berdasarkan data tahun 2020–2024, indikator Jumlah Kematian Ibu menunjukkan fluktuasi dengan angka yang relatif kecil namun tetap menjadi perhatian penting. Jumlah kematian ibu tercatat 6 orang pada 2020, meningkat menjadi 8 orang pada 2021, lalu menurun menjadi 7 orang pada 2022, mencapai titik terendah 5 orang pada 2023, dan kembali naik menjadi 6 orang pada 2024. Jika dibandingkan dengan jumlah kelahiran hidup yang setiap tahunnya berkisar antara 5.518 hingga 4.249, maka angka kematian ibu tergolong rendah, namun tetap mencerminkan adanya risiko yang harus terus ditekan. Pergerakan data ini menegaskan pentingnya peningkatan mutu layanan kesehatan ibu, mulai dari pemeriksaan kehamilan, persalinan di fasilitas kesehatan, hingga penanganan komplikasi secara cepat dan tepat, agar tren penurunan kematian ibu dapat lebih konsisten dan berkelanjutan.

D. Prevalensi Stunting

Prevalensi stunting mengacu pada persentase anak-anak di suatu populasi yang memiliki tinggi badan di bawah standar yang diharapkan untuk usia dan jenis kelamin mereka sebagai akibat dari kekurangan gizi kronis atau faktor-faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan mereka. Tingkat Prevalensi stunting di Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 2. 21 Prevalensi Stunting Pada Balita (pendek dan sangat pendek) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020-2024

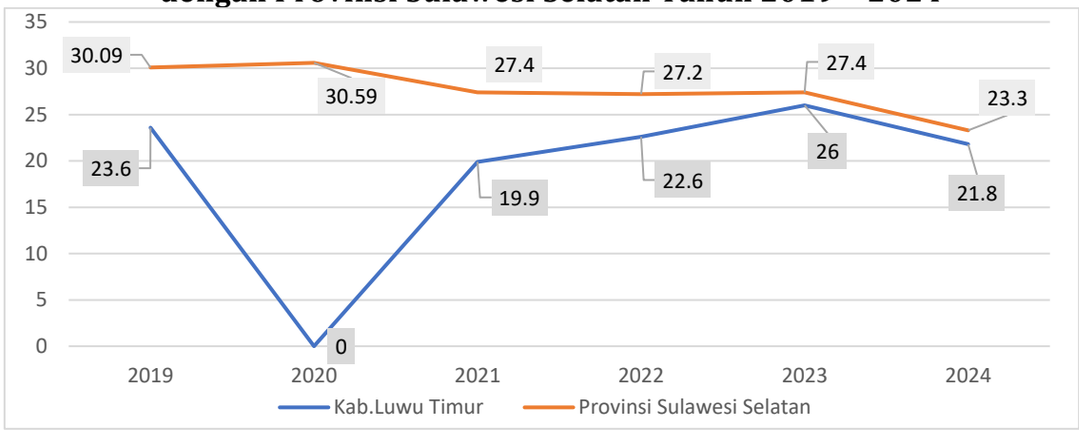


Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

Prevalensi stunting di Kabupaten Luwu Timur menunjukkan fluktuasi selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020 tercatat 0 persen, yang kemungkinan besar disebabkan oleh ketidaktersediaan atau kendala dalam pengumpulan data. Selanjutnya, terjadi peningkatan dari 19,9 persen pada 2021 menjadi 22,6 persen di 2022, dan mencapai puncaknya pada 2023 sebesar 26 persen. Meski demikian, upaya percepatan penurunan stunting mulai menunjukkan hasil pada tahun 2024 dengan penurunan angka menjadi 21,8 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa meskipun tantangan masih ada, arah kebijakan dan intervensi gizi mulai memberikan dampak positif terhadap penurunan prevalensi stunting di daerah tersebut.

Perbandingan prevalensi stunting Kabupaten Luwu Timur dengan prevalensi stunting Provinsi Sulawesi selatan dalam kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 2. 22 Perbandingan Prevalensi Stunting Kabupaten Luwu Timur dengan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 – 2024



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur 2025

Perbandingan prevalensi stunting Kabupaten Luwu Timur dengan prevalensi Provinsi Sulawesi Selatan dalam kurung waktu 6 (enam) tahun terakhir menunjukkan bahwa Kabupaten Luwu Timur senantiasa memiliki angka yang lebih rendah dari Provinsi Sulawesi Selatan yang mengidentifikasikan adanya kontribusi perbaikan dalam penanganan stuunting di Sulawesi Selatan.

E. Penanganan Tuberkulosis

Keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (TB) didefinisikan sebagai penyembuhan pasien atau menghentikan penyebaran infeksi TB aktif. Keberhasilan pengobatan TB tergantung pada beberapa faktor, termasuk tingkat keparahan infeksi, jenis TB, kepatuhan pasien terhadap regimen pengobatan, ketersediaan obat yang efektif, dan kualitas sistem perawatan kesehatan. Angka keberhasilan pengobatan TB Kabupaten Luwu Timur tahun 2020-2024 disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2. 62 Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah penderita baru TB CBTA	Orang	445	310	409	426	536
2	Jumlah Perkiraan penderita baru TBC BTA dalam kurun waktu yang sama	Orang	445	310	409	426	536
3	Cakupan penemuan dan Penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

Selama periode 2020 hingga 2024, jumlah penderita baru TBC BTA di Kabupaten Luwu Timur mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020, terdapat 445 kasus baru, yang kemudian menurun menjadi 310 kasus pada 2021. Jumlah ini kembali meningkat menjadi 409 pada 2022, 426 pada 2023, dan mencapai 536 kasus pada 2024. Menariknya, jumlah penderita baru yang ditemukan selalu sama dengan jumlah perkiraan penderita baru setiap tahunnya. Hal ini mencerminkan bahwa cakupan penemuan dan penanganan TBC BTA mencapai 100 persen selama lima tahun berturut-turut. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya deteksi dan penanganan kasus TBC BTA di Kabupaten Luwu Timur berjalan secara optimal, di

mana seluruh kasus yang diperkirakan berhasil ditemukan dan ditangani sesuai standar program pengendalian TBC.

Tabel 2. 63 Capaian Penemuan Kasus Tuberkulosis Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 - 2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Capaian Penemuan Kasus Tuberkulosis (%)	48,18	47,46	51,36	40,92	43,56

Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2025

Cakupan Penemuan Kasus TBC di Sulawesi Selatan Tahun 2024, Kabupaten Luwu Timur menunjukkan cakupan sebesar 44 persen. Angka ini tergolong rendah bila dibandingkan dengan target ideal maupun capaian kabupaten/kota lain seperti Palopo (144%), Makassar (127%), dan Parepare (121%). Cakupan 44% menandakan bahwa upaya deteksi dini kasus TBC di Luwu Timur masih terbatas, sehingga ada kemungkinan banyak kasus TBC yang belum terlaporkan atau belum terakses layanan kesehatan. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan strategi penemuan kasus, baik melalui penguatan jejaring layanan kesehatan, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, maupun sosialisasi dan keterlibatan masyarakat agar cakupan penemuan TBC bisa lebih optimal

F. Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis

Indikator yang menjadi gambaran kondisi pada aspek kesejahteraan sosial dari sektor kesehatan adalah cakupan Tuberkulosis. Insidensi Tuberkulosis (TB) merujuk pada jumlah kasus baru yang terjadi dalam suatu populasi tertentu selama periode waktu tertentu, biasanya diukur dalam jumlah kasus per 100.000 orang per tahun.

Tuberkulosis adalah penyakit menular yang penyebabnya adalah bakteri Myobacterium tuberculosis. Beban masalah penyakit tuberkulosis di dunia dan setiap wilayah direpresentasikan dalam angka prevalensi, dan kematian akibat penyakit Tuberkulosis. Penanganan tuberkulosis meliputi Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis serta angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis.

Tabel 2. 64 Persentase Keberhasilan Pengobatan Tuberculosis Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 - 2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Angka keberhasilan Pengobatan Tuberculosis (%)	97.74	97.47	96.33	97.67	95.5

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupten Luwu Timur tahun 2025

Angka keberhasilan pengobatan tuberculosis (TB) di Kabupaten Luwu Timur pada periode 2020–2024 menunjukkan tren yang konsisten tinggi dan berada di atas standar nasional. Pada tahun 2020, angka keberhasilan mencapai 97,74 persen, sedikit menurun menjadi 97,47 persen di 2021, dan kembali turun ke 96,33 persen pada 2022. Meski demikian, capaian ini meningkat kembali menjadi 97,67 persen pada tahun 2023, mencerminkan keberlanjutan intervensi yang efektif dalam penemuan kasus dan pengobatan pasien TB. Secara keseluruhan, capaian ini menunjukkan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dan fasilitas layanan

kesehatan dalam mengendalikan TB, serta menjaga tingkat kepatuhan pengobatan pasien tetap tinggi selama lima tahun terakhir.

G. Sumber Daya Manusia Kesehatan

Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) adalah seluruh tenaga kerja yang bekerja di sektor kesehatan, baik yang memberikan pelayanan secara mencakup berbagai jenis profesi, mulai dari tenaga medis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, hingga tenaga pendukung administrasi kesehatan. Berikut disajikan SDMK Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020-2024 dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 65 Rasio Dokter Per Satuan Penduduk Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 - 2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Dokter	Orang	43	47	50	58	62
2	Jumlah Penduduk	Orang	302.039	304.938	306.082	313.404	323.422
3	Rasio Dokter Persatuan Penduduk	Rasio	0,142	0,154	0,163	0,185	0,192

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, selama periode 2020 hingga 2024, jumlah dokter di Kabupaten Luwu Timur mengalami peningkatan yang cukup konsisten. Pada tahun 2020, tercatat sebanyak 43 dokter, dan jumlah ini meningkat menjadi 47 dokter pada 2021, lalu naik lagi menjadi 50 dokter pada 2022. Tren ini terus berlanjut dengan jumlah dokter mencapai 58 orang di tahun 2023 dan 62 orang pada tahun 2024. Peningkatan jumlah dokter ini berjalan seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, yang naik dari 302.039 jiwa pada tahun 2020 menjadi 323.422 jiwa pada tahun 2024. Sebagai hasilnya, rasio dokter per 1.000 penduduk juga menunjukkan peningkatan, dari 0,142 pada tahun 2020 menjadi 0,192 pada tahun 2024. Meski rasio ini masih di bawah standar ideal WHO (yaitu 1 dokter per 1.000 penduduk), tren positif ini mencerminkan upaya Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam meningkatkan ketersediaan tenaga medis untuk melayani kebutuhan masyarakat.

Rasio tenaga medis per satuan penduduk adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui ketersediaan tenaga kesehatan, seperti dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya, terhadap jumlah penduduk di suatu wilayah. Indikator ini penting untuk mengevaluasi akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Berikut disajikan Rasio Tenaga Medis Kabupaten Luwu Timur 2020-2024:

Tabel 2. 66 Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Tenaga Medis	Orang	89	93	79	93	95
2	Jumlah Penduduk	Orang	302.039	304.938	306.082	313.404	323.422
3	Rasio Tenaga Medis	Rasio	0,294	0,304	0,258	0,296	0,293

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2025

Merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya

Kesehatan, ditetapkan Standar Ketenagaan Berdasarkan Rasio Tenaga terhadap Jumlah Penduduk yakni 1: 1.000 sehingga diperoleh angka 29,37 pada tahun 2024.

Berdasarkan tabel di atas jumlah tenaga medis di tahun 2024 meningkat sebanyak 95 orang dengan rasio per penduduk 29,37 di banding tahun sebelumnya jumlah tenaga medis tahun 2023 sebanyak 93 orang dengan rasio per perduduk 29,67.

H. Rasio Puskesmas Per Penduduk

Rasio Puskesmas per penduduk adalah ukuran yang menggambarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama (Puskesmas,Poliklinik, dan Pustu) yang tersedia untuk melayani sejumlah penduduk dalam suatu wilayah tertentu. Rasio ini digunakan untuk menilai tingkat aksesibilitas layanan kesehatan dasar di suatu daerah. Berikut disajikan rasio puskesmas per penduduk Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020-2024:

Tabel 2. 67 Rasio Puskesmas Per Penduduk Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Puskesmas, Poliklinik, Pustu	Orang	98	107	110	168	168
2	Jumlah Penduduk	Orang	302.039	304.938	306.082	313.404	323.422
3	Rasio Puskesmas Per Penduduk	Rasio	0,32	0,35	0,36	0,54	0,52

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

Berdasarkan data tabel di atas, Capaian rasio Puskesmas per penduduk di Kabupaten Luwu Timur menunjukkan tren peningkatan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2021, rasio tercatat sebesar 0,35 dan meningkat menjadi 0,36 pada tahun 2022. Peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2023 dengan rasio mencapai 0,54, meskipun sedikit menurun menjadi 0,53 pada tahun 2024. Secara umum, capaian ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam memperluas akses layanan kesehatan dasar, meskipun masih terdapat ruang perbaikan agar rasio ideal per 1.000 penduduk dapat tercapai.

I. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional

Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah persentase jumlah penduduk yang telah menjadi peserta program JKN dibandingkan dengan total jumlah penduduk suatu wilayah atau negara. Indikator ini mencerminkan sejauh mana akses penduduk terhadap layanan perlindungan kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah, melalui BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara. Semakin tinggi cakupan kepesertaan, semakin banyak penduduk yang terlindungi secara finansial dari risiko pembiayaan pelayanan kesehatan. Cakupan ini merupakan salah satu indikator utama dalam mengukur kemajuan menuju Cakupan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage/UHC). Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020-2024 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 68 Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional

No	Tahun	Kepesertaan JKN (%)
1	2020	96,6
2	2021	98,08
3	2022	99,4
4	2023	100,78
5	2024	104,29

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

Berdasarkan data tabel diatas, Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Luwu Timur menunjukkan peningkatan signifikan selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, kepesertaan tercatat sebesar 96,6 persen dari total penduduk. Angka ini terus mengalami kenaikan, mencapai 98,08 persen pada tahun 2021 dan 99,4 persen pada tahun 2022. Peningkatan ini mencerminkan upaya berkelanjutan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam memastikan akses layanan kesehatan yang lebih merata dan inklusif bagi seluruh warganya. Pada tahun 2023, cakupan JKN di Luwu Timur tercatat 100,78 persen, yang berarti cakupan telah melebihi jumlah penduduk. Pada tahun 2024 cakupan kepesertaan JKN lebih dari 100 persen dengan jumlah peserta JKN adalah sebesar 323.835 orang, melebihi jumlah penduduk Luwu Timur sebanyak 323.422 jiwa . Hal ini terjadi karena terdapat perserta JKN yang tidak ber KTP Luwu Timur tetapi terdatar di dalam JKN Luwu Timur. Peserta JKN ini adalah penduduk dari luar Kabupaten Luwu Timur yang bekerja di wilayah Kabupaten Luwu Timur (Perusahaan) dan yang terbanyak berada di Kecamatan Nuha (Sorowako).

2.1.2.3 PENDIDIKAN BERKUALITAS YANG MERATA

Pendidikan memegang peran sentral dalam meningkatkan kualitas hidup manusia karena melalui pendidikan, individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang membentuk karakter dan daya saing. Pendidikan yang baik mendorong terciptanya masyarakat yang lebih sadar, produktif, dan mandiri, sehingga mampu berkontribusi dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya. Dalam jangka panjang, pendidikan menjadi fondasi utama bagi terwujudnya kehidupan masyarakat dan bangsa yang bermartabat, adil, dan berkeadaban. Kualitas pendidikan yang merata menjadi kunci untuk mengurangi kesenjangan dan memperkuat kemajuan bangsa secara berkelanjutan.

A. Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia Diatas 15 Tahun

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia di atas 15 tahun adalah indikator yang menunjukkan jumlah tahun yang telah dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk mengikuti pendidikan formal, baik yang sedang maupun yang telah selesai ditempuh. Untuk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun dan tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun. Berikut Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 Tahun di Kabupaten Luwu Timur:

Tabel 2. 69 Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia Diatas 15 Tahun Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 - 2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia diatas 15 Tahun	8,80	8,81	8,92	8,93	8,94

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

Dari data tabel, angka rata-rata lama sekolah sejak tahun 2020 - 2024 mengalami peningkatan. Pada tahun 2024 angka rata-rata lama sekolah adalah 8,94, menggambarkan bahwa tahun 2024 penduduk usia 15 tahun di Kabupaten Luwu Timur rata-rata bersekolah pada jenjang pendidikan SMP kelas 9.

B. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah indikator yang menggambarkan perkiraan rata-rata lama waktu (dalam tahun) seseorang yang berusia 7 tahun pada saat ini akan mengenyam pendidikan selama hidupnya, jika mengikuti pola pendidikan yang berlaku saat ini. Harapan lama sekolah Kabupaten Luwu Timur tahun 2020-2024 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 70 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 - 2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,83	12,84	13,00	13,01	13,18

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

Berdasarkan data tabel diatas, HLS Kabupaten Luwu Timur tahun 2020 - 2024 mengalami tren peningkatan. Pada tahun 2024 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Luwu Timur adalah 13,18, hal ini menggambarkan bahwa rata rata tingkat pendidikan penduduk di Kabupaten Luwu Timur selama 13 tahun atau sampai pada tingkat pertama pada perguruan tinggi.

C. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah persentase penduduk pada kelompok umur tertentu yang sedang mengikuti pendidikan, baik di jalur formal maupun nonformal yang setara, dibandingkan dengan total penduduk pada kelompok umur tersebut. Indikator ini digunakan untuk menggambarkan tingkat keterlibatan penduduk usia sekolah dalam kegiatan pendidikan pada saat data dikumpulkan. Pengelompokan usia biasanya disesuaikan dengan jenjang pendidikan, misalnya usia 7–12 tahun untuk sekolah dasar atau sederajat, 13–15 tahun untuk sekolah menengah pertama atau sederajat, dan 16–18 tahun untuk sekolah menengah atas atau sederajat. APS tidak menunjukkan kualitas pembelajaran atau angka kelulusan, melainkan hanya mengukur proporsi anak atau remaja yang sedang bersekolah. Berikut disajikan capaian APS di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Tabel 2. 71 Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 - 2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 Tahun	95,95	90,87	97,09	94,58	98,72
Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 Tahun	98,49	71	82,67	84,73	87,75

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Luwu Timur Tahun 2025

Pada periode 2020–2024, Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7–12 tahun di Kabupaten Luwu Timur berada pada kisaran tinggi, yaitu antara 90,87 persen hingga 98,72 persen, dengan capaian tertinggi pada tahun 2024. Sementara itu, APS usia 13–15 tahun cenderung fluktuatif, dari 98,49 persen pada 2020 menurun tajam menjadi

71 persen pada 2021, kemudian meningkat secara bertahap hingga mencapai 87,75 persen pada 2024. Hal ini menunjukkan partisipasi sekolah dasar relatif stabil, sedangkan partisipasi tingkat SMP masih perlu ditingkatkan.

D. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah persentase jumlah seluruh peserta didik pada jenjang pendidikan tertentu, tanpa memandang usia, terhadap jumlah penduduk pada kelompok umur resmi jenjang pendidikan tersebut. Indikator ini digunakan untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah, sekaligus mencerminkan tingkat pemerataan akses pendidikan. Nilai APK dapat melebihi 100 persen apabila terdapat peserta didik yang berusia di luar kelompok umur resmi, seperti siswa yang masuk sekolah lebih awal atau yang terlambat lulus. Berikut disajikan capaian APK di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Tabel 2. 72 Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 - 2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	103,13	99,41	103,04	98,87	99,78
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	103,56	97,37	90,23	92,78	94,1

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Luwu Timur Tahun 2025

Pada periode 2020–2024, Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang SD di Kabupaten Luwu Timur berada pada kisaran 98,87 persen hingga 103,13 persen, menunjukkan daya serap pendidikan dasar yang sangat baik meski sempat turun di tahun 2021 dan 2023. Sementara itu, APK jenjang SMP cenderung menurun dari 103,56 persen pada 2020 menjadi 90,23 persen pada 2022, namun kembali meningkat hingga mencapai 94,10 persen pada 2024. Data ini mengindikasikan akses pendidikan dasar relatif stabil, sedangkan akses pendidikan menengah pertama masih memerlukan penguatan.

E. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah peserta didik yang berusia sesuai kelompok umur resmi jenjang pendidikan tertentu terhadap total penduduk pada kelompok umur tersebut. Indikator ini digunakan untuk mengukur ketercapaian partisipasi pendidikan tepat usia, sehingga dapat menunjukkan efisiensi penyelenggaraan pendidikan. Nilai APM yang tinggi mencerminkan bahwa sebagian besar anak mengikuti pendidikan pada jenjang yang sesuai dengan usianya, sedangkan nilai yang rendah menunjukkan masih adanya anak yang terlambat masuk sekolah, tinggal kelas, atau putus sekolah. Berikut disajikan capaian APM di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Tabel 2. 73 Angka Partisipasi Murni Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 - 2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Partisipasi Murni (APM) 7-12 Tahun	95,95	90,87	97,09	94,58	98,72
Angka Partisipasi Murni (APS) 13-15 Tahun	98,49	71	82,67	84,73	87,75

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Luwu Timur Tahun 2025

Pada periode 2020–2024, Angka Partisipasi Murni (APM) usia 7–12 tahun di Kabupaten Luwu Timur berada pada kisaran tinggi, yakni antara 90,87 persen hingga 98,72 persen, dengan capaian tertinggi pada 2024. Sementara itu, untuk usia 13–15 tahun, capaian menunjukkan fluktuasi cukup tajam, dari 98,49 persen pada 2020 turun signifikan menjadi 71 persen pada 2021, kemudian berangsur meningkat hingga mencapai 87,75 persen pada 2024. Kondisi ini mencerminkan bahwa partisipasi pendidikan dasar tepat usia relatif terjaga, sedangkan pada tingkat menengah pertama masih terdapat tantangan dalam mempertahankan partisipasi siswa sesuai usia sekolah.

F. Proporsi Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi

Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi dapat menggambarkan tingkat pendapatan dan produktivitas seseorang serta sebagai bahan evaluasi akses ke perguruan tinggi dan kesetaraan diantara kelompok sosial dan ekonomi yang berbeda. Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi di Kabupaten Luwu Timur seperti tabel dibawah ini:

Tabel 2. 74 Proporsi Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 - 2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Proporsi Penduduk Usia 15 Tahun keatas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi di Kabupaten Luwu Timur 2020-2024	11.32	12.08	9.73	10.03	n/a

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Luwu Timur Tahun 2025

Penduduk usia 15 tahun ke atas yang memiliki kualifikasi pendidikan tinggi pada tahun 2022 sebesar 9,73 persen menurun jika dibandingkan tahun 2021 dengan nilai 12,08 persen. Penurunan ini disebabkan oleh tingginya lulusan SD, SMP dan SMA sederajat yang berusia 15 tahun keatas yang bekerja dan tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk yang bekerja sesuai jenjang pendidikan yang ditamatkan (SD-SMA) sebesar 132.901 jiwa pada tahun 2022. Pada tabel juga memperlihatkan bahwa pada tahun 2023 pesentase Penduduk usia 15 tahun ke atas yang memiliki kualifikasi pendidikan tinggi sebesar 9,73 persen meningkat jika dibandingkan tahun 2022 sebesar 10,03 persen. Untuk data tahun 2024 belum tersedia.

G. Rasio Siswa Terhadap Ketersediaan Ruang Belajar Pada Jenjang Pendidikan Dasar

Rasio Siswa terhadap Ketersediaan Ruang Belajar pada Jenjang Pendidikan Dasar adalah perbandingan antara jumlah peserta didik pada jenjang pendidikan dasar (SD/MI atau sederajat) dengan jumlah ruang kelas yang tersedia dan digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Indikator ini digunakan untuk menggambarkan tingkat ketersediaan sarana ruang belajar dalam menampung jumlah siswa yang ada. Semakin rendah rasio menunjukkan kondisi yang lebih ideal, karena beban per ruang kelas lebih seimbang dan proses pembelajaran lebih efektif. Rasio Siswa terhadap Ketersediaan Ruang Belajar pada Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten Luwu Timur di sajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 75 Rasio Siswa Terhadap Ketersediaan Ruang Belajar Pada Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 - 2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Siswa Terhadap Ketersediaan Ruang Kelas Belajar Pada Jenjang Pendidikan Dasar	22,85	20,23	22,9	21,53	21,87

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

Berdasarkan data tabel, Capaian Rasio Siswa Terhadap Ketersediaan Ruang Belajar Pada Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Luwu Timur menunjukkan tren yang relatif stabil dan cukup ideal dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, rasio tercatat sebesar 22,85, kemudian lebih ideal menjadi 20,23 pada tahun 2021, dan kembali naik menjadi 22,9 pada tahun 2022. Meskipun mengalami sedikit perbaikan menjadi 21,53 pada tahun 2023, namun kemabali naik pada tahun 2024 menjadi 21,87 angka ini tetap mencerminkan pemerataan akses pendidikan dasar yang baik pada jenjang pendidikan dasara. Secara umum, capaian ini menggambarkan aksebilitas terahadap ketersedian ruang belajarpada tingkat SD dan SMP di Luwu Timur telah memiliki akses terhadap layanan pendidikan dasar yang cukup memadai.

H. Jumlah Penduduk Berusia 15 tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Pendidikan Tinggi yang Ditamatkan

Jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang bekerja menurut pendidikan tinggi yang ditamatkan menggambarkan seberapa besar bagian dari populasi usia 15 tahun ke atas yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi dalam suatu wilayah atau negara yang telah bekerja. Ini sering digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat pendidikan dari tenaga kerja yang aktif di pasar kerja. Ini mencerminkan seberapa besar bagian dari angkatan kerja yang memiliki pendidikan menengah, diploma, sarjana, atau pendidikan yang dapat berdampak pada berbagai aspek seperti lapangan kerja, ekonomi, dan perkembangan sosial. Berikut disajikan dalam tabel kondisi Kabupaten Luwu Timur tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Tabel 2. 76 Jumlah Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Pendidikan yang Ditamatkan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 - 2024

Tingkat Pendidikan yang ditamatkan yang bekerja (orang)	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
SD	49.587	55.722	57.976	57.193	49.587
SMP	24.974	24.380	23.870	21.220	24.974
SMA	56.296	52.799	48.794	47.639	56.296
Perguruan Tinggi	24.131	29.281	23.600	22.727	24.131

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Luwu Timur Tahun 2025

Berdasarkan data tabel diatas, komposisi penduduk yang bekerja di Kabupaten Luwu Timur menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan selama periode tahun 2020–2024 menunjukkan bahwa mayoritas pekerja masih didominasi oleh lulusan SD dan SMA. Pada tahun 2024, jumlah pekerja dengan pendidikan terakhir SMA mencapai 56.296 orang, disusul oleh lulusan SD sebanyak 49.587 orang. Jumlah pekerja berpendidikan SMP sebanyak 24.974 orang, sementara lulusan Perguruan Tinggi tercatat 24.131 orang. Tren selama lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan dan penurunan yang fluktuatif di semua jenjang

pendidikan. Lulusan SD sempat meningkat hingga 57.976 orang pada tahun 2022, namun turun di tahun 2024 ke angka awal yakni 49.587. Lulusan SMA juga mengalami penurunan hingga 47.639 di tahun 2023, kemudian naik kembali pada tahun 2024. secara umum hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pekerja di Kabupaten Luwu Timur memiliki latar belakang pendidikan relatif rendah sehingga pemerintah daerah perlu melakukan kebijakan yang tepat untuk meningkatkan kesempatan kerja yang layak bagi pekerja.

I. Persentase Satuan Pendidikan Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Assesmen Tingkat Nasional

Assesmen Nasional adalah program evaluasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan memotret input, proses dan output pembelajaran diseluruh satuan pendidikan. Assesmen kompetensi minimum merupakan kompetensi penilaian mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dengan berpartisipasi positif pada masyarakat. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada assesmen tingkat Nasional di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020–2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2. 77 Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Assesmen Tingkat Nasional Tahun 2020 - 2024

Indikator	Literasi Membaca				
	2020	2021	2022	2023	2024
Presentase Satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada assesmen tingkat nasional kategori literasi membaca	Na	11,90	20,94	34,01	51,42
Presentase Satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada assesmen tingkat nasional kategori Numerasi	Na	7,82	6,94	25,59	44,79
Presentase Peserta Didik yang mencapai standar kompetensi minimum pada assesmen tingkat nasional kategori literasi Numerasi	Na	49,13	58,57	65,89	71,82
Presentase Peserta Didik yang mencapai standar kompetensi minimum pada assesmen tingkat nasional kategori Numerasi	Na	31,06	41,13	58,79	44,79

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi-Selatan

Data Asesmen Nasional tahun 2020–2024 menunjukkan gambaran capaian literasi membaca dan numerasi sebagai kompetensi minimum yang menjadi fokus utama evaluasi mutu pendidikan di tingkat nasional. Pada aspek numerasi, persentase satuan pendidikan yang memenuhi standar meningkat dari 7,82 persen pada 2021 menjadi 44,79 persen pada 2024, meskipun capaian peserta didik sempat naik hingga 65,89 persen pada 2023 lalu turun ke 44,79 persen pada 2024. Sementara itu, literasi membaca menunjukkan tren positif yang lebih konsisten, dengan capaian satuan pendidikan naik dari 11,90 persen pada 2021 menjadi 51,42 persen pada 2024, dan capaian peserta didik meningkat dari 49,31 persen menjadi 71,82 persen pada periode yang sama. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan Asesmen Nasional berperan penting dalam memotret kualitas pendidikan, sekaligus menjadi dasar evaluasi kebijakan untuk memperkuat strategi pembelajaran

terutama dalam meningkatkan keterampilan numerasi yang masih menghadapi fluktuasi capaian.

J. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat perkembangan literasi di suatu daerah, mencakup kemampuan membaca, akses terhadap bahan bacaan, dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan literasi. IPLM disusun dari beberapa dimensi, seperti ketersediaan sumber daya literasi, pemanfaatan fasilitas literasi, dan dukungan lingkungan sosial terhadap budaya membaca. Nilai IPLM yang tinggi menunjukkan bahwa masyarakat memiliki akses yang baik terhadap sumber bacaan, memanfaatkan fasilitas literasi secara optimal, dan terlibat aktif dalam kegiatan yang mendorong peningkatan pengetahuan serta keterampilan membaca. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Luwu Timur tahun 2020 - 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 78 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 - 2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	n/a	n/a	54	86,37	88

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat di Kabupaten Luwu Timur menunjukkan peningkatan signifikan. Nilai indeks tercatat sebesar 54 pada 2022, melonjak menjadi 86,37 pada 2023, dan semakin meningkat menjadi 88 pada 2024. Capaian ini mencerminkan adanya kemajuan yang pesat dalam pengembangan literasi masyarakat, baik dari sisi akses terhadap bahan bacaan, pemanfaatan fasilitas literasi, maupun partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan literasi.

K. Indeks Masyarakat Digital Indonesia

Indeks Masyarakat Digital Indonesia merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat perkembangan dan kesiapan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital pada berbagai aspek kehidupan. Indeks ini mencakup dimensi keterampilan digital, pemanfaatan layanan digital, serta perilaku dan budaya bermedia digital yang aman dan produktif. Nilai indeks yang lebih tinggi menunjukkan semakin baiknya kemampuan masyarakat dalam mengakses informasi, mengoptimalkan teknologi untuk aktivitas ekonomi maupun sosial, serta berpartisipasi dalam ekosistem digital secara bijak. Dengan demikian, Indeks Masyarakat Digital Indonesia menjadi salah satu acuan penting dalam menilai keberhasilan transformasi digital serta mendukung pencapaian pembangunan daerah yang adaptif, inovatif, dan berdaya saing di era digital. Berikut merupakan Indeks masyarakat digital di Kabupaten Luwu Timur:

Tabel 2. 79 Indeks Masyarakat Digital Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 - 2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Masyarakat Digital Indonesia	n/a	n/a	24,65	42,21	41,92

Sumber : BPSDM Komdigi, https://imdi.sdmdigital.id

Indeks Masyarakat Digital Indonesia di Kabupaten Luwu Timur menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan pada periode 2022–2024. Pada tahun 2022, nilai indeks tercatat sebesar 24,65 kemudian meningkat tajam menjadi 42,21 pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024 terjadi sedikit penurunan dengan capaian sebesar 41,92. Secara keseluruhan, capaian ini mencerminkan adanya peningkatan kemampuan dan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital, meskipun masih terdapat fluktuasi yang menunjukkan perlunya konsistensi dalam penguatan literasi dan ekosistem digital di daerah.

2.1.2.4 PERLINDUNGAN SOSIAL YANG ADAKTIF

Perlindungan sosial merupakan elemen kunci dalam membangun masyarakat yang lebih tangguh dan inklusif, karena memberikan jaminan dasar bagi kelompok rentan dalam menghadapi risiko sosial dan ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran, bencana, atau krisis kesehatan. Melalui program seperti bantuan sosial, jaminan kesehatan, dan jaminan pensiun, perlindungan sosial membantu menjaga kelangsungan hidup serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan. Dengan perlindungan yang memadai, masyarakat tidak hanya mampu bertahan di tengah guncangan, tetapi juga memiliki peluang yang lebih adil untuk tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.

A. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Kewajiban sebagai peserta jaminan sosial bagi pekerja/buruh meliputi 2 jenis jaminan yaitu JKN dan BPJS Ketenagakerjaan. JKN memberikan perlindungan kepada pekerja/buruh dan keluarganya bila mengalami sakit dan membutuhkan layanan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun rumah sakit. Sedangkan BPJS Ketengakerjaan mempunyai cakupan perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Pensiun, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Berikut disajikan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020-2024:

Tabel 2. 80 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 - 2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	100	100	100	100	100
Jumlah pekerja (orang)	16.124	19.123	20.688	13.339	12.885
Jumlah pekerja jamsostek (orang)	16.124	19.123	20.688	13.339	12.885

Sumber: Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2025

Untuk meningkatkan kepesertaan jaminan sosial khususnya bagi pekerja/buruh maka Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja menjadikan kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagai persyaratan utama yang wajib dipenuhi bagi perusahaan yang akan mendapatkan layanan administrasi pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur. Mekanisme yang diberlakukan adalah setiap pengusaha yang akan mencatatkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) berkewajiban mendaftarkan seluruh pekerja/buruhnya menjadi peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja baik BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. Sebelum perusahaan mendapatkan

rekomendasi dari lembaga jaminan sosial tersebut maka proses layanan administrasi ketenagakerjaannya belum dapat diproses lebih lanjut. Dengan adanya pola seperti ini ternyata sangat efektif untuk memastikan bahwa seluruh pekerja/buruh yang akan bekerja telah mendapatkan perlindungan jaminan sosial.

B. Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal

Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk memperoleh gambaran aspek kesejahteraan di bidang perlindungan sosial. Secara umum, angka partisipasi penyandang disabilitas dalam sektor formal seringkali lebih rendah dibandingkan dengan individu tanpa disabilitas. Beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi ini termasuk akses terhadap pendidikan, pelatihan yang relevan, diskriminasi, stigma sosial, serta keterbatasan fisik atau mental yang tidak diakomodasi dengan baik di tempat kerja. Di Kabupaten Luwu Timur, data terkait partisipasi angkatan kerja penyandang disabilitas belum tersedia. Namun kenyataan dilapangan bahwa terdapat penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal tetapi jumlahnya sangat kecil dibandingkan non-disabilitas. Meskipun demikian, upaya inklusi yang terus dilakukan oleh pemerintah dan berbagai pihak diharapkan dapat meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas di sektor formal. Data persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal belum tersedia.

2.1.2.5 BERAGAMA MASLAHAT DAN BERKEBUDAYAAN MAJU

Penguatan peran agama sebagai landasan pembangunan menjadi penting dalam membentuk karakter masyarakat yang berakhlak, toleran, dan bertanggung jawab. Nilai-nilai keagamaan mendorong etika sosial yang positif dan memperkuat kohesi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Di sisi lain, pemajuan dan pelestarian kebudayaan memperkaya identitas bangsa serta memperkuat jati diri lokal di tengah arus globalisasi. Keduanya saling mendukung dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan, berakar pada nilai-nilai luhur, dan mencerminkan keberagaman yang harmonis dalam kehidupan nasional.

A. Indeks Kerukunan Umat Beragama

Indeks Kerukunan Umat Beragama merupakan indikator yang mengukur tingkat keharmonisan hubungan antarumat beragama di suatu wilayah. Indeks ini berperan penting dalam mencerminkan stabilitas sosial, politik, dan ekonomi daerah. Daerah dengan tingkat kerukunan yang tinggi cenderung lebih kondusif bagi pembangunan. Untuk memperoleh indeks kerukunan umat beragama, dilakukan survei dengan 3 (tiga) indikator utama yaitu toleransi, kesetaraan dan kerjasama. Nilai indeks Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2. 81 Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 - 2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kerukunan Umat Beragama	67,46	72,39	n/a	79,46	80,47

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas, Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Luwu Timur menunjukkan tren peningkatan selama periode 2020–2024. Pada tahun

2020, indeks tercatat sebesar 67,46, kemudian meningkat menjadi 72,39 pada 2021. Meskipun data tahun 2022 tidak tersedia, pada tahun 2023 indeks melonjak menjadi 79,46, dan kembali meningkat menjadi 80,47 pada 2024. Kenaikan ini mencerminkan membaiknya keharmonisan antarumat beragama di daerah, yang turut mendukung stabilitas sosial dan kondusifitas wilayah dalam mendukung pembangunan.

B. Persentase Benda, Bangunan, Struktur, Dan Situs Cagar Budaya yang Telah Ditetapkan Terhadap Total Registrasi

Benda cagar adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia. Benda, Bangunan, Struktur, Dan Situs Cagar Budaya yang telah ditetapkan di Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut:

Tabel 2. 82 Presentase Benda, Bangunan, Struktur, dan Situs Cagar Budaya yang Telah ditetapkan Terhadap Total Registrasi Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 - 2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan Benda, Bangunan, Struktur,dan Situs Cagar Budaya yang Telah Ditetapkan Terhadap Total Registrasi(%)	n/a	n/a	100	100	100

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

Berdasarkan data tahun 2020–2024, indikator Cakupan Benda, Bangunan, Struktur, dan Situs Cagar Budaya yang Telah Ditetapkan Terhadap Total Registrasi menunjukkan bahwa pada 2020 dan 2021 belum terdapat data karena belum ada situs yang terdaftar maupun ditetapkan sebagai cagar budaya. Mulai tahun 2022, cakupan mencapai 100 persen dengan ditetapkannya 4 situs/makam oleh pemerintah daerah, yaitu Makam Mokole Rahampu'u, Bangkai Kapal Jepang Sungai Malili, Gua Andomo di Malindoe, dan Lokasi Pulau Empat. Pada 2023, cakupan tetap 100 persen dengan bertambahnya 8 situs cagar budaya yang ditetapkan TACB Kabupaten Luwu Timur pada 6 Juni 2023, di antaranya Makam Syekh Al-Joefry, Benteng Wotu, Kompleks Makam Syekh Al-Joefry, Makam Temmallipa, To' Liang Batu, Sumur Tua Benteng Wotu, Peti Kubur To' Liang Batu, dan Kompleks Makam Temmallipa. Pada 2024, cakupan juga tetap 100 persen sehingga secara keseluruhan menunjukkan bahwa seluruh situs yang teregistrasi di Kabupaten Luwu Timur telah ditetapkan sebagai cagar budaya sesuai ketentuan yang berlaku.

2.1.2.6 KELUARGA BERKUALITAS, KESETARAAN GENDER, DAN MASYARAKAT INKLUSIF

Keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif merupakan fondasi penting dalam membentuk sumber daya manusia (SDM) yang tangguh dan berkualitas. Keluarga yang harmonis menciptakan lingkungan awal yang mendukung tumbuh kembang anak, sementara kesetaraan gender membuka ruang partisipasi setara bagi perempuan dan laki-laki dalam berbagai sektor kehidupan. Masyarakat inklusif memastikan bahwa tidak ada kelompok yang tertinggal, termasuk penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya. Ketiga elemen ini berperan

strategis dalam menciptakan SDM unggul yang mampu menjadi motor penggerak pembangunan yang berkeadilan, berdaya saing, dan berkelanjutan.

A. Pembangunan Keluarga/Indeks Kualitas Keluarga

Indeks Pembangunan Keluarga (IPK) adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan dan keberlangsungan keluarga dalam suatu masyarakat. Indeks ini mencakup berbagai dimensi yang penting untuk kesejahteraan keluarga, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, keamanan, dan hubungan interpersonal. Indeks Pembangunan Keluarga Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 83 Indeks Pembangunan Keluarga Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 - 2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Keluarga	Belum Tersedia	35,38	53,07	65,36	65,99

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB Kab. Luwu Timur Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas, Indeks Pembangunan Keluarga (IPKK) di Kabupaten Luwu Timur menunjukkan tren peningkatan yang positif selama periode 2021 hingga 2024. Meskipun pada tahun 2020 data belum tersedia, capaian IPKK mulai tercatat pada tahun 2021 sebesar 35,38 dan meningkat signifikan menjadi 53,07 pada tahun 2022. Peningkatan ini terus berlanjut dengan capaian 65,36 pada tahun 2023 dan meningkat menjadi 65,99 pada tahun 2024. Perkembangan ini mencerminkan perbaikan kualitas kehidupan keluarga di berbagai aspek seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan ketahanan sosial, serta menunjukkan efektivitas berbagai program pembangunan keluarga yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

B. Indeks Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak adalah alat ukur yang digunakan pemerintah, LSM, dan badan internasional untuk menilai komitmen dan kinerja pemerintah daerah dalam memenuhi hak dan melindungi anak demi tumbuh kembang optimal. Indeks ini juga berfungsi untuk melacak kemajuan perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Meskipun Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) belum mengukur indeks ini untuk Kabupaten Luwu Timur hingga tahun 2024, pemerintah daerah tersebut telah berupaya memenuhi kebutuhan dasar anak, seperti akses kesehatan dan pendidikan gratis/beasiswa, perlindungan dari kekerasan (fisik, emosional, seksual), perhatian khusus untuk anak terlantar/yatim piatu, serta kebebasan berpendapat bagi anak.

C. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian pembangunan manusia yang memperhitungkan kesenjangan gender antara laki-laki dan perempuan dalam tiga dimensi utama yaitu kesehatan (diukur melalui angka harapan hidup saat lahir), pendidikan (diukur melalui rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah), standar hidup layak (diukur melalui pengeluaran per kapita yang disesuaikan). Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020-2024 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2. 84 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 – 2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Gender	89,71	89,8	90,34	90,34	90,44

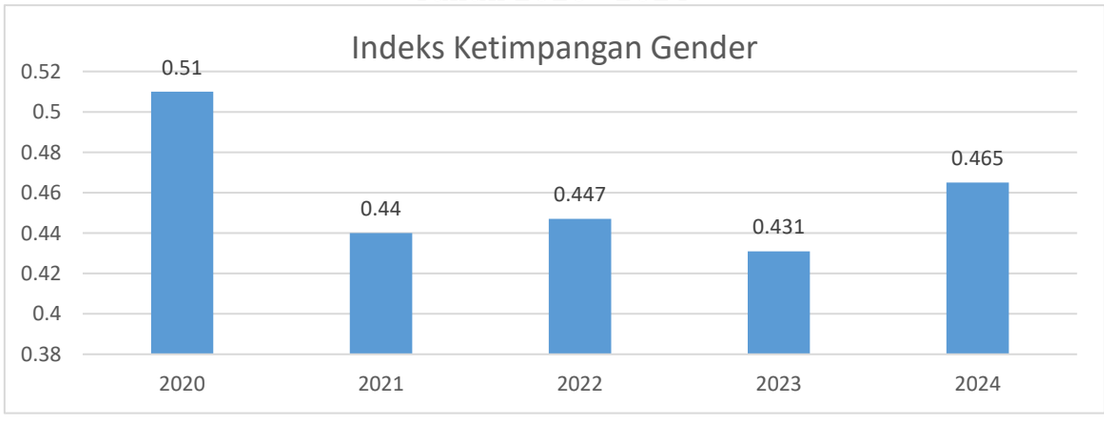
Sumber : BPS Kab. Luwu Timur Tahun 2025

Selama periode 2020 hingga 2024, Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Luwu Timur menunjukkan arah perbaikan yang konsisten meskipun berlangsung secara perlahan. Pada tahun 2020, IPG tercatat sebesar 89,71, kemudian mengalami peningkatan tipis menjadi 89,80 pada tahun 2021. Kenaikan yang lebih nyata terjadi pada tahun 2022 dengan nilai mencapai 90,34, dan angka tersebut berhasil dipertahankan hingga tahun 2023. Memasuki tahun 2024, IPG kembali meningkat menjadi 90,44. Tren ini mencerminkan adanya kemajuan dalam mengurangi kesenjangan gender, khususnya dalam dimensi kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Meskipun belum mencapai kesetaraan penuh (nilai IPG mendekati 100), capaian ini menunjukkan bahwa perempuan di Kabupaten Luwu Timur semakin mendekati tingkat pencapaian pembangunan yang setara dengan laki-laki.

D. Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (*Gender Inequality Index/GII*) adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur ketidaksetaraan gender dalam tiga dimensi utama: kesehatan reproduksi, pemberdayaan ekonomi, dan partisipasi politik. Indeks ini memberikan gambaran tentang seberapa jauh perbedaan gender mempengaruhi kemajuan seseorang dalam masyarakat. Indeks Ketimpangan Gender dinyatakan dalam skala antara 0 dan 1, di mana nilai 0 menunjukkan kesetaraan sempurna antara jenis kelamin dan nilai 1 menunjukkan ketimpangan gender yang maksimum. Semakin rendah nilai GII, semakin sedikit ketidaksetaraan gender dalam masyarakat. Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Luwu Timur 2020-2024 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 2. 23 Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 - 2024



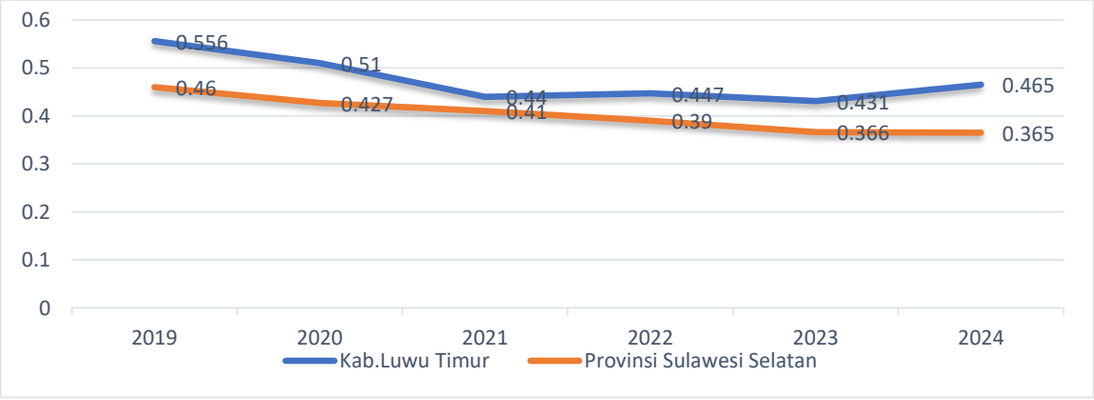
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025

Dari grafik di atas diketahui bahwa Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Luwu Timur menunjukkan tren fluktuatif sepanjang periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020 nilai indeks sebesar 0,51 semakin menurun ke 0,440 pada tahun 2021. Namun, pada tahun 2022, nilai IKG sedikit meningkat menjadi 0,447, lalu

kembali turun menjadi 0,431 di tahun 2023. Meski begitu, di tahun 2024, terjadi kenaikan nilai IKG menjadi 0,465. Secara umum, meskipun sempat mengalami peningkatan di beberapa tahun, nilai IKG Kabupaten Luwu Timur masih menunjukkan kecenderungan membaik jika dibandingkan dengan tahun 2020. Nilai IKG yang semakin rendah mencerminkan semakin kecilnya ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam pencapaian indikator kesehatan, partisipasi ekonomi, dan pemberdayaan politik.

Perbandingan Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Luwu Timur dengan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 2. 24 Perbandingan Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Luwu Timur dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 – 2024



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025

Berdasarkan data grafik diatas, Pada tahun 2019, IKG Luwu Timur tercatat sebesar 0,556, jauh lebih tinggi dibandingkan Provinsi yang berada di angka 0,460. Meski sempat menurun signifikan menjadi 0,440 pada tahun 2021, IKG Luwu Timur kembali naik menjadi 0,465 pada tahun 2024. Sebaliknya, Sulawesi Selatan terus mengalami penurunan IKG secara konsisten dari 0,460 di tahun 2019 menjadi 0,365 pada tahun 2024. Selisih ketimpangan antara Luwu Timur dan Provinsi Sulawesi Selatan pun semakin melebar pada 2024, yaitu sebesar 0,100 poin, yang mengindikasikan bahwa ketimpangan gender di Luwu Timur masih relatif lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi.

E. Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indikator yang mengukur sejauh mana perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat pembangunan. IDG biasanya disusun dari beberapa dimensi, seperti keterlibatan perempuan di parlemen, partisipasi dalam angkatan kerja, serta kontribusi perempuan dalam posisi manajerial dan profesional. Nilai IDG yang tinggi menunjukkan tingkat kesetaraan gender yang lebih baik, di mana perempuan memiliki peran yang setara dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial, sedangkan nilai yang rendah menunjukkan masih adanya kesenjangan yang perlu diatasi.

Indeks Pemberdayaan Gender di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020-2024 disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2. 85 Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 - 2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pemberdayaan Gender	50,76	54,09	55,4	53,38	n/a

Sumber : BPS Nasional Tahun 2020-2023

Pada periode 2020–2023, Indeks Pemberdayaan Gender di Kabupaten Luwu Timur menunjukkan tren fluktuatif. Nilai indeks meningkat dari 50,76 pada 2020 menjadi 54,09 pada 2021, lalu naik lagi menjadi 55,40 pada 2022. Namun, pada 2023 terjadi penurunan menjadi 53,38. Data ini menggambarkan bahwa meskipun ada kemajuan dalam pemberdayaan perempuan pada awal periode, masih diperlukan upaya berkelanjutan untuk menjaga dan meningkatkan kesetaraan peran gender di berbagai bidang.

2.1.3 ASPEK DAYA SAING DAERAH

Aspek Daya Saing adalah ukuran kemampuan suatu daerah dalam bersaing secara efektif dan berkelanjutan di pasar atau lingkungan tertentu. Dalam konteks pembangunan daerah atau nasional, aspek ini menunjukkan sejauh mana suatu wilayah mampu memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan keberlanjutan jangka panjang.

2.1.3.1 DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA

Daya saing sumber daya manusia (SDM) menjadi kunci utama dalam mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan perekonomian daerah. SDM yang unggul, terampil, dan adaptif mampu menjawab tantangan perubahan zaman serta mengisi berbagai sektor strategis secara produktif. Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan, pelatihan vokasi, dan penguatan kompetensi menjadi prioritas untuk menciptakan tenaga kerja yang kompetitif dan inovatif. Dengan demikian, SDM yang berdaya saing tinggi akan menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

A. Angka Ketergantungan

Angka Ketergantungan (Dependency Ratio) merupakan indikator penting untuk melihat beban penduduk usia produktif dalam menanggung kelompok usia non-produktif. Dalam konteks Kabupaten Luwu Timur tahun 2020–2024, angka ketergantungan yang cenderung menurun mencerminkan semakin besarnya proporsi penduduk usia kerja dibandingkan kelompok usia anak-anak dan lanjut usia. Kondisi ini berkaitan erat dengan fenomena bonus demografi, yaitu periode ketika jumlah penduduk usia produktif lebih dominan sehingga berpotensi memberikan keuntungan pembangunan ekonomi jika dikelola dengan baik. Dengan semakin kecilnya beban ketergantungan, Kabupaten Luwu Timur memiliki peluang besar untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi daerah, asalkan disertai dengan peningkatan kualitas pendidikan, keterampilan kerja, serta perluasan lapangan pekerjaan yang mampu menyerap tenaga kerja produktif tersebut.

Tabel 2. 86 Angka Ketergantungan Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2020 - 2024

TAHUN	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Ketergantungan	50,47	49,66	49,41	48,92	47,31

Sumber : BPS, Kabupaten Luwu Timur Dalam Angka Tahun 2025

Dalam periode 2020–2024, angka ketergantungan di Kabupaten/Lokasi menunjukkan tren menurun, dari 50,47 pada tahun 2020 menjadi 47,31 pada tahun 2024. Hal ini menandakan perbaikan struktur penduduk dengan semakin kecilnya beban tanggungan usia produktif, yang membuka peluang percepatan pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan bonus demografi. Penurunan Angka Ketergantungan ini menunjukkan bahwa proporsi penduduk usia produktif semakin besar dibandingkan dengan penduduk usia non-produktif. Hal ini dapat menjadi peluang bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Kabupaten Luwu Timur, karena penduduk usia produktif dapat menjadi sumber daya manusia yang produktif dan berkontribusi pada pembangunan daerah.

2.1.3.2 IPTEK, INOVASI, DAN PRODUKTIVITAS EKONOMI

Pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi menjadi fondasi penting dalam menjaga sekaligus mempercepat keberlanjutan produktivitas sektor-sektor ekonomi. Penguatan ekosistem inovasi mendorong efisiensi, nilai tambah, dan daya saing produk lokal, sekaligus mempercepat adopsi teknologi dalam proses produksi. Hal ini tidak hanya menopang pertumbuhan ekonomi saat ini, tetapi juga membangun struktur ekonomi yang tangguh dan adaptif dalam jangka panjang. Dengan demikian, IPTEK dan inovasi berperan strategis dalam menciptakan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan berorientasi masa depan.

A. Rasio PDRB Industri Pengolahan

Industri Pengolahan adalah kegiatan ekonomi yang mengubah bahan mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi melalui proses mekanis, kimiawi, atau fisik, yang biasanya dilakukan di pabrik atau bengkel produksi. Industri pengolahan memiliki kontribusi cukup besar dalam struktur PDRB Kabupaten Luwu Timur setelah sektor pertambangan/penggalian, pertanian dan kehutanan, konstruksi serta perdagangan besar dan eceran. Rasio PDRB industri pengolahan Kabupaten Luwu Timur tahun 2020 - 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 87 Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2020 - 2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio PDRB Industri Pengolahan	3,67	3,65	3,37	3,10	3,14

Sumber: Disdagkop UKM dan Perindustrian Tahun 2025

Berdasarkan data tabel di atas, Rasio Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor industri pengolahan terhadap total PDRB Kabupaten Luwu Timur menunjukkan tren penurunan dalam lima tahun terakhir, meskipun terdapat sedikit perbaikan di tahun terakhir. Pada tahun 2020, rasio industri pengolahan tercatat sebesar 3,67 persen, dan mengalami penurunan berturut-turut menjadi 3,65 persen di tahun 2021, 3,37 persen pada tahun 2022, dan mencapai titik terendah di angka 3,10 persen pada tahun 2023. Namun demikian, pada tahun 2024, terjadi sedikit

peningkatan menjadi 3,14 persen. Penurunan rasio ini mengindikasikan bahwa kontribusi sektor industri pengolahan terhadap total perekonomian daerah cenderung melemah dalam beberapa tahun terakhir, meskipun terdapat indikasi pemulihan pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan perlunya upaya strategis untuk memperkuat hilirisasi, meningkatkan kapasitas produksi, serta mendorong investasi di sektor industri pengolahan agar sektor ini dapat kembali berperan signifikan dalam struktur ekonomi daerah.

B. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan Dan Minum

PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dari sektor penyediaan akomodasi makan dan minum mencerminkan nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor tersebut dalam perekonomian suatu wilayah. Ini termasuk kontribusi dari berbagai usaha seperti hotel, restoran, kafe, dan layanan katering. Berikut rasio PDRB penyediaan akomodasi makan dan minum Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020-2024:

Tabel 2. 88 Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 - 2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	0,19	0,18	0,17	0,16	0,18

Sumber: Dinas Pariwisata , Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

Dari tabel diatas, kontribusi sektor penyediaan akomodasi serta makan dan minum terhadap PDRB Kabupaten Luwu Timur dalam lima tahun terakhir cenderung stabil namun menunjukkan sedikit penurunan. Pada tahun 2020, rasio sektor ini sebesar 0,19 persen, kemudian menurun secara bertahap menjadi 0,16 persen pada tahun 2023. Meskipun demikian, pada tahun 2024 rasio tersebut sedikit meningkat menjadi 0,18 persen. Pergerakan data ini menunjukkan bahwa sektor ini masih memiliki peran yang relatif kecil dalam struktur ekonomi daerah, namun tetap memiliki potensi untuk berkembang, terutama dukungan pariwisata, peningkatan mobilitas masyarakat, serta pertumbuhan usaha kuliner dan perhotelan.

C. Jumlah Industri Ekonomi Kreatif

Industri ekonomi kreatif merupakan salah satu indikator pendorong pertumbuhan ekonomi karena menciptakan lapangan kerja, mendorong inovasi, dan memperkaya budaya serta identitas lokal, juga dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan dan berkontribusi pada diversifikasi ekonomi. Industri ekonomi kreatif adalah sektor ekonomi yang mengandalkan kreativitas, keterampilan, dan inovasi untuk menghasilkan barang dan jasa yang bernilai tambah tinggi. Sektor ini mencakup berbagai bidang yang sering kali melibatkan seni, budaya, dan teknologi seperti desain, media, seni pertunjukan, kesenian visual, teknologi dan digital, pariwisata dan budaya. Jumlah indusri ekonomi kreatif yang tumbuh di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 89 Jumlah Industri Ekonomi Kreatif Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 - 2024

Indikator	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Industri Ekonomi Kreatif	n/a	17	17	108	n/a

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024

Pada tahun 2021 dan 2022 sebanyak 17 unit meningkat menjadi 128 unit usaha di tahun 2023. Kenaikan yang sangat tinggi ini disebabkan pandataan yang dilakukan secara intensif di wilayah Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2023. Unit usaha yang paling banyak bergerak di bidang kriya, desain fashion dan desain produk (sablon). Peningkatan jumlah industri ekonomi kreatif menjadi salah satu penyebab pendapatan perkapita Kabupaten Luwu Timur meningkat dari 93,36 juta rupiah pada tahun 2022 naik menjadi 99,49 juta rupiah pada tahun 2023. Data jumlah ekonomi kreatif tahun 2024 belum tersedia.

D. Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM)

Industri Kecil dan Menengah sering menjadi tulang punggung ekonomi di daerah, menyumbang secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan masyarakat. Pemerintah memberikan dukungan khusus kepada IKM melalui kebijakan dan program untuk membantu meningkatkan daya saing, akses pasar, dan akses modal. Berikut Proporsi jumlah industri kecil dan menengah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 – 2024 :

Tabel 2. 90 Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 - 2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah	1.080	1.193	1.306	1.421	1.536

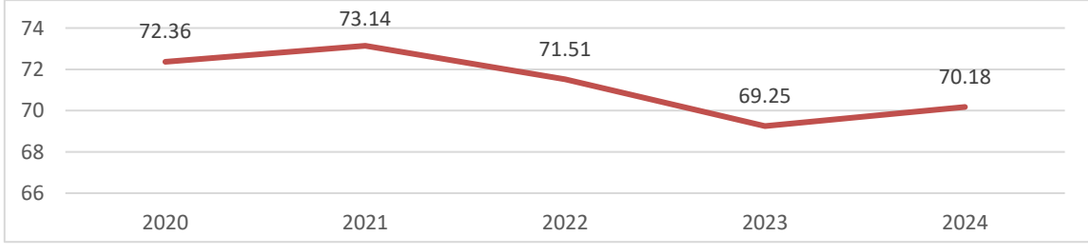
Sumber: Disdagkop UKM dan Perindustrian Tahun 2025

Berdasarkan data tabel diatas, Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kabupaten Luwu Timur menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Pada tahun 2020, tercatat sebanyak 1.080 IKM, dan jumlah tersebut terus bertambah setiap tahun hingga mencapai 1.536 IKM pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan adanya pertumbuhan sektor usaha produktif masyarakat, serta indikasi bahwa iklim kewirausahaan dan pemberdayaan ekonomi lokal di Luwu Timur semakin membaik. Penambahan lebih dari 450 unit IKM dalam lima tahun juga menunjukkan potensi sektor ini sebagai penggerak ekonomi daerah, terutama dalam mendukung penciptaan lapangan kerja dan peningkatan nilai tambah produk lokal.

E. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisiasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu negara/wilayah. Tingkat Partisiasi Angkatan Kerja Kabupaten Luwu Timur Tahun dari Tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 2. 25 Tingkat Partisiasi Angkatan Kerja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 - 2024

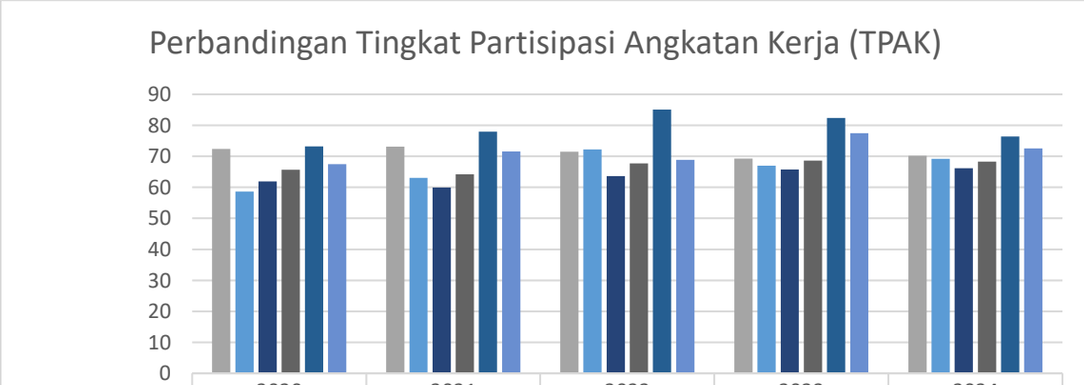


Sumber: BPS Kabupaten Luwu Timur dalam Angka Tahun 2025

Berdasarkan data grafik diatas, Pada Agustus 2023, jumlah angkatan kerja menurun 4.170 orang dibandingkan Agustus 2022, disertai penurunan TPAK dari 71,51 persen menjadi 69,25 persen. Penurunan ini mencerminkan berkurangnya partisipasi penduduk usia kerja di pasar kerja, seiring meningkatnya jumlah bukan angkatan kerja menjadi 69.853 jiwa. Terdapat pula perbedaan TPAK antara laki-laki dan perempuan. Pada Agustus 2024, penduduk usia kerja di Luwu Timur mencapai 231.443 orang, naik 4.308 orang dari tahun sebelumnya. Sebagian besar (162.431 orang) adalah angkatan kerja, terdiri dari 154.988 orang bekerja dan 7.443 pengangguran. Dibandingkan Agustus 2023, angkatan kerja naik 5.131 orang, penduduk bekerja bertambah 6.209 orang, dan pengangguran berkurang 1.078 orang.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Luwu Timur dibandingkan dengan TPAK Kabupaten/Kota di sekitarnya dari Tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 2. 26 Perbandingan TPAK Kabupaten Luwu Timur dengan Kabupaten/Kota disekitarnya Tahun 2020 - 2024



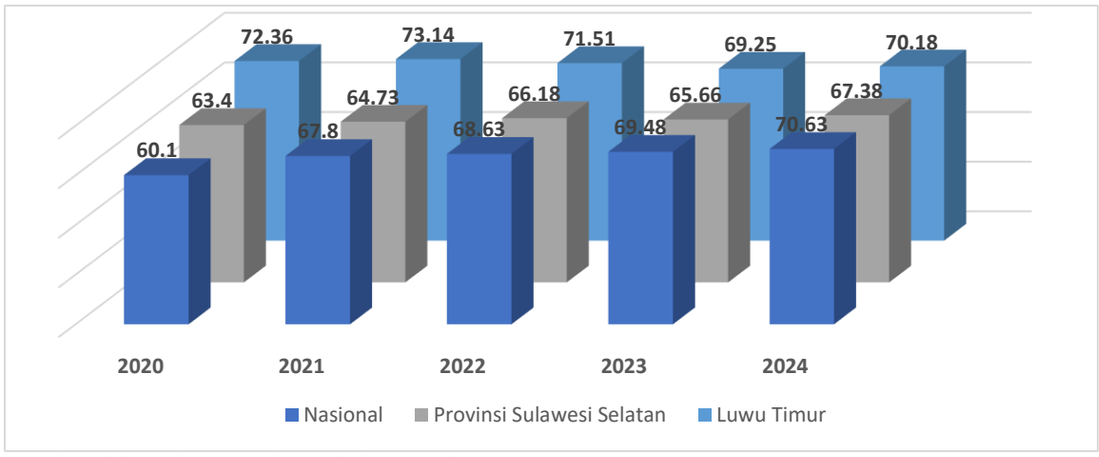
	2020	2021	2022	2023	2024
Luwu Timur	72.36	73.14	71.51	69.25	70.18
Luwu Utara	58.61	63.07	72.23	66.98	69.23
Palopo	61.94	59.95	63.65	65.75	66.19
Luwu	65.64	64.22	67.74	68.61	68.31
Tana Toraja	73.25	77.99	85.11	82.35	76.41
Toraja Utara	67.5	71.56	68.84	77.5	72.53

Sumber: BPS Sulawesi Selatan Tahun 2025

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2024 sebesar 70,18 persen lebih tinggi 0,95 persen jika dibandingkan dengan TPAK Kabupaten Luwu Utara sebesar 66,98 persen, lebih tinggi 3,99 persen jika dibandingkan dengan TPAK Kota Palopo sebesar 66,19 persen dan Lebih tinggi 1,87 persen jika dibandingkan dengan TPAK Kabupaten Luwu sebesar 68,31 persen. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Luwu Timur lebih rendah 6,23 persen jika dibandingkan dengan TPAK Kabupaten Tana Toraja dan sebesar 2,35 persen jika dibandingkan dengan Kabupaten Toraja Utara.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Luwu Timur dibandingkan dengan TPAK Provinsi Sulawesi selatan dan Nasional dari Tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 2. 27 Perbandingan TPAK Kabupaten Luwu Timur dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020 - 2024



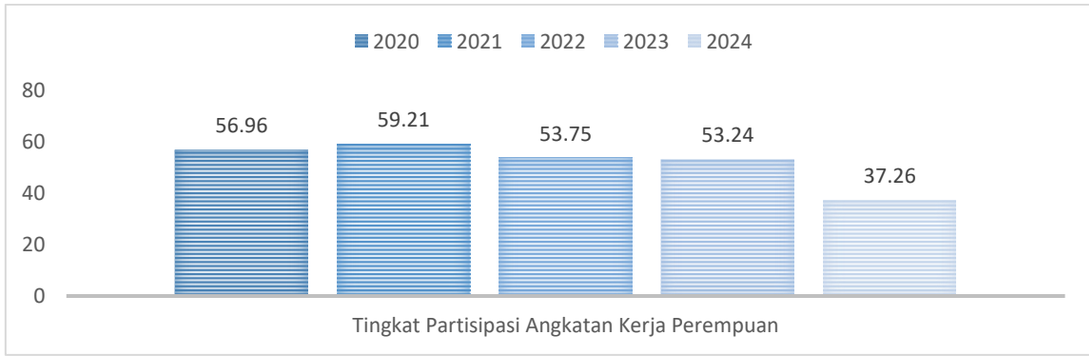
Sumber: BPS Sulawesi Selatan Tahun 2025

Berdasarkan data grafik diatas, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 sebesar 70,63 persen, lebih tinggi 3,25 persen jika dibandingkan dengan TPAK Provinsi Sulawesi Selatan dan lebih tinggi 0,45 persen dibandingkan dengan TPAK Nasional.

F. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan adalah perbandingan antara jumlah angkatan kerja perempuan terhadap jumlah penduduk usia kerja perempuan, dinyatakan dalam satuan persen. Semakin tinggi tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan artinya semakin banyak jumlah angkatan kerja perempuan terhadap jumlah penduduk usia kerja perempuan. Jika tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan sebesar 50 persen artinya 1 dari 2 orang penduduk usia kerja perempuan merupakan angkatan kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kabupaten Luwu Timur tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

Grafik 2. 28 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 – 2024



Sumber : BPS, Kabupaten Luwu Timur Dalam Angka Tahun 2025

Berdasarkan grafik tersebut menunjukkan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan di Kabupaten Luwu Timur dalam periode 2020–2024 menunjukkan dinamika yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, TPAK perempuan tercatat sebesar 56,96 persen dan mengalami peningkatan yang cukup tajam mencapai pada tahun 2021 sebesar 59,21 persen. Namun, setelah itu terjadi tren penurunan, dimulai pada tahun 2022 sebesar 53,75 persen dan sedikit menurun lagi pada 2023 menjadi 53,24 persen. Penurunan paling drastis terjadi pada tahun

2024, di mana TPAK perempuan anjlok menjadi 37,26 persen, angka terendah dalam enam tahun terakhir. Kondisi ini mencerminkan adanya tantangan serius dalam mempertahankan dan meningkatkan keterlibatan perempuan dalam angkatan kerja, yang perlu menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan ke depan.

G. Indeks Kapabilitas Inovasi

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan daya saing daerah, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur terus mendorong penguatan budaya dan sistem inovasi dalam tata kelola pemerintahan serta pelayanan publik. Salah satu indikator yang menggambarkan hal ini adalah Indeks Kapabilitas Inovasi Daerah, yang menilai kemampuan pemerintah daerah dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengelola kebijakan maupun program berbasis inovasi.Indeks Kapabilitas Inovasi Daerah adalah ukuran yang menggambarkan kemampuan dan kesiapan suatu daerah dalam mengelola, mengembangkan, dan mengimplementasikan inovasi secara sistematis dalam tata kelola pemerintahan maupun pembangunan masyarakat. Data Indeks Kapabilitas Inovasi hingga tahun 2024 belum tersedia secara publik.

H. Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah adalah alat pengukuran yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat inovasi dan kreativitas pemerintah daerah. Tujuannya adalah untuk memahami sejauh mana pemerintah daerah telah berhasil dalam mempromosikan dan mendukung inovasi dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, sosial, teknologi, dan lingkungan. Indeks inovasi daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 –2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2. 91 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 - 2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Inovasi Daerah	49 (Skor)	22.28 (Indeks)	54.28 (Indeks)	55,29 (Indeks)	60,01 (Indeks)

Sumber: Bapperida Kab. Luwu Timur Tahun 2025

Berdasarkan data tabel diatas, nilai indeks inovasi daerah Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2020 - 2024 terus mengalami peningkatan dari nilai 49 pada tahun 2020 menjadi 22,28 pada tahun 2021 dengan kategori kurang inovatif naik menjadi 60,02 poin tahun 2024 dengan kategori inovatif.

I. Jumlah Wisatawan Domestik dan Mancanegara

Wisatawan yang mengunjungi Kabupaten Luwu Timur dibedakan menjadi dua jenis yaitu wisatawan mancanegara dan wisatawan domestik. Wisatawan mancanegara adalah setiap pengunjung yang mengunjungi suatu negara di luar tempat tinggalnya, didorong oleh satu atau beberapa keperluan tanpa bermaksud memperoleh penghasilan di tempat yang dikunjungi dan lamanya kunjungan tersebut tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan, sedangkan wisatawan domestik adalah wisatawan yang berasal dari dalam negeri. Jumlah wisatawan mancanegara dan wisatawan domestik yang datang ke Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020-2024 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 92 Jumlah Wisatawan Domestik dan Wisatawan Mancanegara Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 - 2024

No	Tahun	Jumlah Tamu Wisatawan Domestik	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara
1	2020	2.608	0
2	2021	36.990	0
3	2022	306.863	0
4	2023	406.532	47
5	2024	410.816	7

Sumber: Dinas Pariwisata , Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

Jika dilihat dari data pada tabel tersebut diatas, Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Luwu Timur mengalami peningkatan signifikan dalam lima tahun terakhir, terutama dari wisatawan domestik. Pada tahun 2020, tercatat hanya 2.608 tamu domestik, namun angka ini melonjak tajam menjadi 306.863 orang pada 2022, dan terus meningkat hingga mencapai 410.816 orang pada tahun 2024. Sementara itu, kunjungan wisatawan mancanegara mulai tercatat pada tahun 2023 sebanyak 47 orang, dan sedikit menurun menjadi 7 orang di tahun 2024. Meski jumlahnya masih kecil, ini menunjukkan mulai terbukanya potensi Luwu Timur sebagai destinasi wisata internasional. Kenaikan jumlah kunjungan wisatawan domestik mencerminkan semakin berkembangnya sektor pariwisata daerah, baik dari sisi promosi, peningkatan infrastruktur, maupun daya tarik destinasi yang ada.

J. Persentase Koperasi Berpredikat Sehat

Koperasi berpredikat Sehat mempunyai arti bahwa koperasi yang mampu melayani kebutuhan anggotanya berupa pemberian pinjaman maupun pembelian barang atau produk, baik bagi anggota maupun masyarakat umum. Pengelolaan koperasi yang baik akan memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan bagi anggota. Selain itu pengelolaan koperasi oleh pengurus dengan baik dan tertib akan mendapatkan penilaian yang berpredikat sehat serta nilai yang tinggi. Persentase koperasi berpredikat sehat di Kabupaten Luwu Timur tahun 2020–2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 93 Persentase Koperasi Berpredikat Sehat Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 - 2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Koperasi berpredikat Sehat	28,98	30,43	33,33	33,82	33,82

Sumber: Disdagkop UKM dan Perindustrian Tahun 2025

Koperasi sehat Kabupaten Luwu Timur setiap tahun mengalami peningkatan. Untuk mengukur koperasi yang sehat, ada 7 indikator yang digunakan dalam penilaian kesehatan koperasi yaitu, permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, *Earning* (Beban Usaha), serta likuiditas koperasi. Pada tahun 2024, jumlah koperasi sehat sebanyak 23 lembaga dari 68 lembaga koperasi simpan pinjam maupun unit simpan pinjam.

K. Return On Aset (ROA) BUMD

ROA adalah rasio keuangan yang mengukur seberapa efisien sebuah perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba. Ini dihitung dengan membagi laba bersih dengan total aset. Semakin tinggi ROA, semakin efisien

penggunaan aset perusahaan untuk menghasilkan laba. Jika ROA rendah, itu bisa menunjukkan bahwa perusahaan tidak mengelola asetnya dengan baik untuk menghasilkan keuntungan yang optimal. Jadi, *"Return of Aset"* mengacu pada hasil atau kembalinya nilai ROA yang telah diukur atau diharapkan. Data ROA Kabupaten Luwu Timur tidak tersedia sampai dengan tahun 2024.

L. Nilai Tukar Nelayan

Nilai Tukar Nelayan (NTN) adalah indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan nelayan, diukur dari perbandingan antara indeks harga yang diterima nelayan dengan indeks harga yang dibayar nelayan. NTN menunjukkan daya beli nelayan terhadap barang dan jasa, termasuk kebutuhan konsumsi rumah tangga serta biaya produksi perikanan. Nilai NTN di atas 100 mengindikasikan bahwa pendapatan nelayan lebih tinggi daripada pengeluarannya, sehingga kondisi ekonomi mereka relatif surplus. Sebaliknya, nilai di bawah 100 menunjukkan pendapatan nelayan tidak mencukupi untuk menutup seluruh pengeluaran, yang berarti kondisi ekonomi mereka berada pada posisi defisit. Nilai Tukar Nelayan di Kabupaten Luwu Timur tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut di bawah ini:

Tabel 2. 94 Nilai Tukar Nelayan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 - 2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks yang di terima nelayan	%	127,34	127,36	127,4	128,09	131.82
2	Indeks yang di bayar nelayan	%	122,53	122,55	122,58	114,88	117.78
Nilai tukar nelayan		%	103,86	103,92	103,92	103,93	111.92

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

Pada periode 2020–2024, indeks yang diterima nelayan di Kabupaten Luwu Timur mengalami peningkatan dari 127,34 persen pada 2020 menjadi 131,82 persen pada 2024. Sementara itu, indeks yang dibayar nelayan relatif stabil pada kisaran 122 persen hingga 2022, kemudian turun menjadi 114,88 persen pada 2023 dan kembali naik menjadi 117,78 persen pada 2024. Nilai Tukar Nelayan (NTN) yang mencerminkan daya beli nelayan juga menunjukkan tren positif, dari 103,86 persen pada 2020 menjadi 111,92 persen pada 2024. Capaian ini menandakan adanya perbaikan kesejahteraan nelayan, terutama dari sisi peningkatan pendapatan bersih.

M. Angka Konsumsi Ikan

Nilai Angka Konsumsi Ikan (AKI) adalah indikator yang menunjukkan jumlah rata-rata ikan yang dikonsumsi oleh penduduk dalam satu tahun, biasanya dinyatakan dalam satuan kilogram per kapita per tahun. AKI digunakan untuk mengukur tingkat konsumsi protein hewani dari ikan, yang berperan penting dalam pemenuhan gizi masyarakat. Nilai AKI yang tinggi mencerminkan bahwa masyarakat memiliki akses yang baik terhadap ikan sebagai sumber pangan bergizi, sedangkan nilai yang rendah dapat mengindikasikan keterbatasan ketersediaan, akses, atau preferensi konsumsi ikan. Indikator ini sering digunakan sebagai acuan dalam perencanaan program peningkatan gizi dan pengembangan sektor perikanan. Berikut Angka Konsumsi Ikan (AKI) di Kabupaten Luwu Timur tahun 2020 - 2024 :

Tabel 2. 95 Angka Konsumsi Ikan Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2020 - 2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kosumsi ikan	Kg	45,42	45,85	46,28	46,71	47,15
2	Jumlah target daerah	Kg	45,39	45,82	46,25	46,68	47,12
Angka Konsumsi ikan		%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

Pada periode 2020–2024, jumlah konsumsi ikan di Kabupaten Luwu Timur mengalami peningkatan dari 45,42 kg per kapita pada 2020 menjadi 47,15 kg per kapita pada 2024. Capaian ini selalu memenuhi target daerah setiap tahunnya, dengan Angka Konsumsi Ikan (AKI) tercatat sebesar 100 persen sepanjang periode tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat konsumsi ikan masyarakat konsisten sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan, sekaligus mencerminkan ketersediaan dan akses ikan yang baik di wilayah ini.

N. Produktifitas Perikanan Budidaya

Perikanan Budidaya adalah kegiatan pemeliharaan, pembesaran, dan/atau pembiakan ikan (termasuk udang, kerang, rumput laut, dan organisme air lainnya) dalam lingkungan yang terkontrol oleh manusia, baik di air tawar, air payau, maupun air laut. Produktivitas Perikanan budidaya Kabupaten Luwu Timur tahun 2020 - 2024 disajikan pada tabel berikut di bawah ini :

Tabel 2. 96 Produktivitas Perikanan Budidaya Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2020 - 2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Produktivitas Perikanan Budidaya Ton/Ha/ Thn	22,292	22,313	22,559	26,833	26.455

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

Berdasarakan tabel di atas produktivitas perikanan budidaya di Kabupaten Luwu Timur menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2020 hingga 2023. Pada tahun 2020 tercatat sebesar 22,292 ton per hektar per tahun, sedikit naik menjadi 22,313 pada 2021, dan meningkat lagi menjadi 22,559 pada 2022. Peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2023 dengan capaian 26,833 ton per hektar per tahun, sebelum mengalami sedikit penurunan menjadi 26,455 ton per hektar per tahun pada 2024. Meskipun terjadi fluktuasi, tren dalam lima tahun terakhir tetap menunjukkan perkembangan positif.

O. Produktivitas Perikanan Tangkap

Produktivitas Perikanan Tangkap adalah jumlah hasil tangkapan ikan yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biasanya dinyatakan dalam satuan ton per tahun, dibandingkan dengan jumlah unit produksi atau kapasitas penangkapan yang digunakan, seperti jumlah kapal, alat tangkap, atau wilayah tangkap. Produktivitas perikanan tangkap Kabupaten Luwu Timur tahun 2020 - 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 97 Produktivitas Perikanan Tangkap Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 - 2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Produktivitas Perikanan Tangkap Ton/Thn	10.012	10.049	10.264	10.373	10.481,44

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

Berdasarkan data tabel diatas, Produktivitas perikanan tangkap di Kabupaten Luwu Timur menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, produksi tercatat sebesar 10.012 ton per tahun, kemudian meningkat sedikit menjadi 10.049 ton pada 2021. Kenaikan berlanjut pada 2022 dengan capaian 10.264 ton, lalu naik menjadi 10.373 ton di tahun 2023. Peningkatan produktivitas berlanjut pada tahun 2024, mencapai 10.481,44 ton per tahun, yang merupakan capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir. Peningkatan ini mencerminkan stabilitas sektor perikanan tangkap, yang didukung oleh kondisi perairan, peningkatan sarana dan prasarana nelayan, serta pengelolaan sumber daya perikanan yang relatif baik di Kabupaten Luwu Timur.

P. Produktivitas Padi

Produktivitas padi merupakan ukuran jumlah hasil panen padi yang diperoleh dari setiap satuan luas lahan tanam dalam kurun waktu satu tahun. Umumnya dinyatakan dalam ton per hektar per tahun (ton/ha/tahun). Indikator Produktivitas Padi (Ton/Ha/Tahun) mencerminkan kemampuan daerah dalam menghasilkan output pertanian secara efisien, serta menjadi ukuran penting dalam menilai ketahanan ekonomi petani dan ketersediaan pangan lokal. Berikut disajikan produktivitas padi di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020-2024:

Tabel 2. 98 Produktivitas Padi (Ton/ha/thn) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 - 2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Produktivitas Padi (Ton/ha/thn)	7,01	6,85	5,48	6,7	6,54

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024

Produktivitas padi di Kabupaten Luwu Timur mengalami penurunan pada 2021 menjadi 6,85 ton per hektar per tahun akibat rendahnya pemupukan, penggunaan pestisida yang tidak optimal, keterbatasan tenaga kerja, serta pengaruh iklim dan pengairan yang kurang maksimal. Namun, produktivitas meningkat pada 2022 ke 2023 menjadi 6,7 ton per hektar per tahun. Meskipun ada penurunan sedikit pada 2024 menjadi 6,54 ton per hektar per tahun.

2.1.3.3 PENERAPAN EKONOMI HIJAU DAN BIRU

Penerapan ekonomi hijau dan biru menjadi bagian penting dalam transformasi ekonomi menuju pertumbuhan yang tinggi dan berkelanjutan. Ekonomi hijau mendorong penggunaan sumber daya secara efisien serta ramah lingkungan, sedangkan ekonomi biru mengoptimalkan potensi kelautan secara lestari. Keduanya berkontribusi pada peningkatan produktivitas sekaligus menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan. Dengan pendekatan ini, pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan kelestarian

sumber daya alam untuk generasi mendatang, menciptakan keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.

A. Indeks Ekonomi Hijau

Indeks ekonomi hijau mencerminkan arah kebijakan daerah menuju pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Pada tahun 2024, Luwu Timur mencatat realisasi investasi sebesar Rp 2,9 triliun, menjadikannya daerah kedua terbesar dalam penyerapan investasi di Sulawesi Selatan setelah Kota Makassar program investasi ini diarahkan melalui strategi ekonomi hijau dan biru yang menekankan hilirisasi sektor pertambangan secara berkelanjutan. Kabupaten berupaya mengintegrasikan prinsip konservasi sumber daya dan peningkatan inklusi sosial sebagai bagian dari transformasi ekonomi lokal. Inisiatif ini menjadi dasar kuat bagi pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Berikut data indeks ekonomi hijau di Kabupaten Luwu Timur tahun 2023 :

Tabel 2. 99 Indeks Ekonomi Hijau Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023

Indikator	Tahun 2023		
Indeks Ekonomi Hijau	Pilar Lingkungan	Pilar Ekonomi	Pilar Sosial
82,2	98,5	60,2	74,5

Sumber : Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan

Pada tahun 2023, Indeks Ekonomi Hijau Kabupaten Luwu Timur menunjukkan capaian yang cukup tinggi sebesar 82,2, mencerminkan arah pembangunan yang relatif seimbang antara aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Pilar Lingkungan memperoleh nilai tertinggi yakni 98,5, menandakan keberhasilan dalam menjaga kualitas dan keberlanjutan lingkungan hidup. Namun, Pilar Ekonomi hanya mencapai 60,2 yang menunjukkan masih terdapat tantangan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Sementara itu, Pilar Sosial berada pada angka 74,5 yang mengindikasikan bahwa aspek kesejahteraan dan pemerataan sosial sudah cukup baik, meskipun tetap perlu ditingkatkan agar sejalan dengan capaian di sektor lingkungan.

B. Indeks Ekonomi Biru

Indeks ekonomi biru di Kabupaten Luwu Timur mencerminkan fokus pembangunan daerah terhadap pemanfaatan sumber daya kelautan secara berkelanjutan. Meskipun wilayah ini lebih dikenal sebagai pusat pertambangan nikel, pemerintah daerah telah berupaya memperluas investasi di sektor perikanan, pariwisata bahari, dan kegiatan kelautan lainnya yang mendukung prinsip ekonomi biru. Proyek hilirisasi hasil laut serta kolaborasi dengan investor lokal dan nasional bertujuan memperkuat nilai tambah sumber daya laut secara inklusif dan ramah lingkungan. Strategi pengembangan ini dipadukan dengan ekonomi hijau untuk memastikan pertumbuhan yang berdaya tahan, ramah lingkungan, dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat lokal:

Tabel 2. 100 Indeks Ekonomi Biru Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023

Indikator	Tahun 2023		
Indeks Ekonomi Biru (IBEI)	Pilar Lingkungan	Pilar Ekonomi	Pilar Sosial
68,8	51,7	59,7	60,5

Sumber : Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan

Pada tahun 2023, Indeks Ekonomi Biru (IBEI) Kabupaten berada pada angka 68,8 yang menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya kelautan dan perairan telah memberikan kontribusi positif namun belum optimal. Pilar Lingkungan mencatat nilai terendah sebesar 51,7 yang menandakan masih adanya tekanan terhadap ekosistem pesisir dan laut yang perlu mendapat perhatian serius. Pilar Ekonomi berada pada angka 59,7 yang menggambarkan bahwa potensi ekonomi biru belum sepenuhnya tergarap secara produktif dan berkelanjutan. Sementara itu, Pilar Sosial mencatat capaian 60,5 yang relatif lebih baik, menunjukkan adanya kontribusi sektor kelautan dan perairan terhadap kesejahteraan masyarakat, meski masih perlu ditingkatkan agar lebih inklusif dan berkesinambungan.

2.1.3.4 TRANSFORMASI DIGITAL

Transformasi digital menjadi arus utama dalam mendorong efektivitas pemerintahan, peningkatan produktivitas ekonomi, serta kualitas layanan publik. Pengarusutamaan transformasi digital mencakup integrasi teknologi dalam berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, administrasi publik, dan ekonomi, guna mempercepat pelayanan, meningkatkan transparansi, dan memperluas akses masyarakat terhadap informasi dan peluang. Dengan pemanfaatan teknologi yang inklusif dan berkelanjutan, transformasi digital diharapkan mampu memperkuat daya saing nasional serta mempercepat terwujudnya masyarakat digital yang adaptif dan inovatif.

A. Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi

Layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi adalah layanan yang disediakan oleh pemerintah melalui platform digital yang memungkinkan masyarakat mengakses berbagai layanan dalam satu sistem terpusat. Layanan ini memanfaatkan teknologi informasi untuk memberikan kemudahan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik.

Data layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi tahun 2023 sebanyak 23 layanan, yang tersebar di 27 (dua puluh tujuh) organisasi perangkat daerah. Berikut Persenatse Layanan publik yang diselenggarakan secara online dan off line yang terintegrasi di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023:

Tabel 2. 101 Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023

NO	PERANGKAT DAERAH	ONLINE	OFFLINE
1	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	3	
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1	1
3	Badan Pendapaan Daerah	1	
4	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1	
5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		3
6	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga		1
7	Dinas Perikanan		1
8	Sekretariat Daerah	1	
9	DPRD	1	
10	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		1

NO	PERANGKAT DAERAH	ONLINE	OFFLINE
11	Dinas Perhubungan		6
12	Dinas Penamanan Modal dan PTSP	2	
13	Disdukcapil	1	
14	RSUD Ilagaligo	2	
15	Dinas Kesehatan/PKM	2	1
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		2
17	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	2	
18	Badan Kesbangpol	2	
19	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian	1	1
20	Dinas Lingkungan Hidup	1	4
21	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		2
22	Dinas Sosial	1	4
23	Dinas Pemadam Kebakaran		3
24	DP2KB		5
25	Satpol PP		2
26	BPBD	1	
27	Kecamatan		1
	Total	**23**	**38**
	Persentase Layanan Publik yang online dan terintegrasi	**37,79**	

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Data layanan publik yang diselenggarakan oleh perangkat daerah sebelum tahun 2024 tidak tersedia karena belum dilakukan pendataan kepada semua OPD. Berdasarkan tabel di atas, persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi sebesar 37,70 persen pada tahun 2023, ini menunjukkan bahwa sekitar 37,7 persen dari total layanan publik yang tersedia telah diakses atau disediakan melalui platform digital yang terintegrasi. Pencapaian 37,70 persen adalah merupakan langkah maju, tetapi upaya lebih lanjut perlu terus dilakukan untuk memastikan lebih banyak layanan publik yang dapat diakses secara efisien dan inklusif melalui platform digital. Data persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi pada tahun 2024 belum tersedia.

2.1.3.5 INTEGRASI EKONOMI DOMESTIK DAN GLOBAL

Integrasi ekonomi domestik dan global menjadi langkah strategis dalam mendorong peningkatan produktivitas perekonomian nasional. Melalui konektivitas antarwilayah di dalam negeri dan keterlibatan aktif dalam perdagangan internasional, Indonesia dapat memperkuat daya saing produk lokal serta memperluas akses pasar global. Integrasi ini mendorong efisiensi rantai pasok, penguatan industri dalam negeri, dan peningkatan investasi. Dengan demikian, partisipasi Indonesia dalam rantai pasok global tidak hanya meningkatkan ekspor, tetapi juga menciptakan nilai tambah di dalam negeri serta mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

A. Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PDRB)

Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PDRB) adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat investasi dalam ekonomi. Pembentukan Modal

Tetap Bruto mencakup investasi dalam modal fisik seperti bangunan, peralatan, dan mesin. Perhitungan persentase PDRB melibatkan perbandingan antara nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto dengan nilai total PDRB. Biasanya, semakin tinggi persentase PDRB, semakin besar investasi yang dilakukan dalam pengembangan infrastruktur dan modal fisik di suatu wilayah. Pembentukan Modal Tetap Bruto penting karena investasi dalam modal fisik dapat mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Berikut disajikan capaian Pembentukan Modal Tetap Bruto di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020-2024:

Tabel 2. 102 Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PDRB)
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 - 2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pembentukan Modal Tetap Bruto	6395.72	7065.11	7804.71	8678.92	9672.61
PDRB	21529.81	23614.52	28410.41	30695.95	30391.94
Persentase Pembentukan Modal Tetap Bruto	29.71	29.92	27.47	28.27	31.83

Sumber: BPS,Kabupaten Luwu Timur dalam Angka tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas Capaian Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebagai persentase terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Luwu Timur menunjukkan fluktuasi selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020, PMTB tercatat sebesar 29,71 persen terhadap PDRB, kemudian sedikit meningkat menjadi 29,92 persen di tahun 2021. Namun, pada tahun 2022 dan 2023 terjadi penurunan masing-masing menjadi 27,47 persen dan 28,27 persen, sebelum kembali meningkat signifikan menjadi 31,83 persen di tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan adanya perbaikan dan peningkatan investasi fisik seperti infrastruktur, bangunan, serta mesin dan peralatan, yang menjadi penopang penting dalam pembangunan ekonomi.

B. Volume dan Nilai Ekspor

Volume dan Nilai Ekspor merupakan dua indikator penting dalam perdagangan. Volume ekspor mengacu pada jumlah fisik barang atau jasa yang diekspor, diukur dalam satuan seperti ton, liter, atau unit layanan. Sementara itu, nilai ekspor adalah nilai moneter dari ekspor tersebut, diperoleh dari hasil perkalian volume dengan harga per unit. Nilai ekspor dipengaruhi oleh harga komoditas, nilai tukar, dan permintaan pasar global. Kedua indikator ini digunakan untuk menilai kinerja perdagangan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara.. Volume dan nilai ekspor perdagangan di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 - 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2. 103 Volume dan Nilai Ekspor Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2020 - 2024

No	Tahun	Volume dan Nilai Ekspor	
		Volume (Ton)	Nilai Ekspor (Rp)
1	2020	75.753,87	10.829.167.631.380,00
2	2021	76.262,96	12.239.634.450.300,00
3	2022	78.498,20	16.713.873.245.320,00
4	2023	109,683,41	18.587.394.138.703,60

No	Tahun	Volume dan Nilai Ekspor	
		Volume (Ton)	Nilai Ekspor (Rp)
5	2024	112.118,55	17.517.558.085.575,90

Sumber: Dinas Dagkop UKM dan Perindustrian Tahun 2025

Berdasarkan data tabel diatas, Selama periode 2020–2024, ekspor Kabupaten Luwu Timur menunjukkan tren peningkatan signifikan, baik dari sisi volume maupun nilai. Volume ekspor meningkat dari 75.753,87 ton pada tahun 2020 menjadi 112.118,55 ton pada tahun 2024, mencerminkan pertumbuhan aktivitas perdagangan luar negeri daerah. Dari sisi nilai, ekspor mengalami lonjakan dari Rp 10,83 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp 18,59 triliun pada tahun 2023, meskipun sedikit menurun menjadi Rp 17,52 triliun di tahun 2024. Kenaikan paling signifikan terjadi antara tahun 2021 dan 2022, dengan nilai ekspor meningkat lebih dari Rp 4 triliun.

Peningkatan ini menunjukkan daya saing produk ekspor Luwu Timur semakin kuat, terutama didorong oleh sektor unggulan seperti pertambangan dan hasil olahan lainnya. Namun, penurunan nilai ekspor di tahun 2024 meskipun volume naik, dapat mengindikasikan turunnya harga komoditas ekspor global atau pergeseran struktur ekspor ke barang bernilai lebih rendah.

C. Net Ekspor Barang dan Jasa (%PDRB)

Net Ekspor Barang dan Jasa merupakan selisih antara ekspor dan impor barang dan jasa dalam suatu wilayah, yang kemudian dinyatakan sebagai persentase terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Perdagangan antar wilayah dan antar negara merupakan komponen penting pertumbuhan ekonomi daerah. Berikut tabel Net Ekspor Barang dan Jasa di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020-2024:

Tabel 2. 104 Net Ekspor Barang dan Jasa (%PDRB)
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 - 2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Net Ekspor Barang dan Jasa	4684.61	5537.48	8302.11	8309.6	5833.37
PDRB	21529	23614.52	28410.41	30695.95	30391.94
Persentase Net Ekspor Barang dan Jasa	21.76	23.45	29.22	27.07	19.19

Sumber: BPS, Kabupaten Luwu Timur dalam Angka tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas persentase net ekspor barang dan jasa terhadap PDRB di Kabupaten Luwu Timur menunjukkan tren fluktuatif selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020 tercatat sebesar 21,76 persen, kemudian meningkat menjadi 23,45 persen di 2021 dan mencapai puncaknya pada 2022 sebesar 29,22 persen. Meskipun masih tinggi, angka tersebut sedikit menurun menjadi 27,07 persen pada 2023 dan kembali turun signifikan ke 19,19 persen pada 2024. Pergerakan ini mencerminkan dinamika neraca perdagangan daerah, yang dipengaruhi oleh volume dan nilai ekspor komoditas utama, fluktuasi harga pasar global, serta pertumbuhan sektor domestik di dalam PDRB.

D. Koefisien Variasi Harga antar Waktu Barang Kebutuhan Pokok

Stabilitas harga barang kebutuhan pokok merupakan salah satu elemen penting dalam menjaga daya beli masyarakat dan menjaga ketahanan sosial-ekonomi daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menjadikan Koefisien Variasi Harga Antar Waktu (KVH) sebagai salah satu indikator strategis dalam memantau fluktuasi harga kebutuhan pokok. Koefisien Variasi Harga Antar Waktu (KVH) adalah indikator statistik yang mengukur tingkat ketidakstabilan atau fluktuasi harga barang kebutuhan pokok dari waktu ke waktu. Dinyatakan dalam bentuk persentase, KVH dihitung berdasarkan simpangan baku relatif terhadap rata-rata harga dalam kurun waktu tertentu (mingguan, bulanan, atau tahunan). Data hingga tahun 2024 belum tersedia.

2.1.3.6 PERKOTAAN DAN PEDESAAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI

Perkotaan dan perdesaan memiliki peran strategis sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang saling melengkapi. Wilayah perkotaan dikembangkan sebagai pusat jasa dan perdagangan yang maju, dengan infrastruktur yang memadai serta tata kelola yang inklusif dan berkelanjutan, guna menciptakan kota layak huni dan produktif. Sementara itu, pembangunan perdesaan diarahkan untuk mewujudkan desa yang mandiri dan berkelanjutan melalui penguatan potensi lokal, peningkatan kapasitas masyarakat, dan konektivitas antar wilayah. Sinergi pembangunan kota dan desa ini menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata, berkeadilan, dan berkelanjutan.

A. Indeks Layanan Infrastruktur

Indeks layanan infrastruktur menggambarkan seberapa efektif dan meratanya ketersediaan fasilitas dasar seperti jalan, jembatan, jaringan air bersih, dan konektivitas digital dalam mendukung akses masyarakat terhadap pelayanan dan aktivitas produktif. Berikut di sajikan capaian indeks layanan infrastruktur di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020-2024:

Tabel 2. 105 Indeks Layanan Infrastruktur Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 - 2024

TAHUN	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Layanan Infrastruktur	n/a	n/a	n/a	60,44	70,86

Sumber : Bapperida Kabupaten Luwu TImur

Dari data tabel di atas,pada tahun 2020 sampai dengan 2022 belum dilakukan perhitungan secara khusus, selanjutnya di tahun 2023, indeks pertama kali tercatat sebesar 60,44, menunjukkan bahwa layanan infrastruktur telah mulai mendapatkan perhatian serius di daerah ini. Di tahun berikutnya, yakni 2024, indeks tersebut naik tajam menjadi 70,86, menandakan peningkatan kualitas layanan infrastruktur mulai dari transportasi, sanitasi, hingga penyediaan fasilitas dasar di wilayah Kabupaten Luwu Timur. Lonjakan tersebut mencerminkan kemajuan nyata dalam pelaksanaan program pembangunan dan pengelolaan layanan publik di daerah ini.

B. Indeks Infrastruktur

Infrastruktur merupakan indikator komposit yang mengukur tingkat ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar di suatu wilayah, mencakup dimensi transportasi, energi, air bersih, telekomunikasi, dan fasilitas publik lainnya yang mendukung peningkatan kualitas hidup serta produktivitas ekonomi. Indeks ini digunakan untuk menilai sejauh mana pelayanan dasar fisik telah tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat di seluruh wilayah kecamatan. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur menjadi elemen kunci dalam mempercepat pembangunan daerah serta meningkatkan daya saing wilayah. Di Kabupaten Luwu Timur, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan merata terus didorong melalui berbagai program strategis lintas sektor untuk mendukung aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat secara menyeluruh. Data indeks infrastruktur Kabupaten Luwu Timur 2024 belum tersedia secara publik.

C. Proporsi Kontribusi PDRB Kabupaten Luwu Timur Terhadap Provinsi

Proporsi Kontribusi PDRB Kabupaten Luwu Timur terhadap Provinsi adalah persentase sumbangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Luwu Timur terhadap total PDRB Provinsi Sulawesi Selatan dalam satu tahun tertentu, berdasarkan harga berlaku atau harga konstan, sesuai kebutuhan analisis. Berikut disajikan dalam tabel proporsi kontribusi PDRB Kabupaten Luwu Timur terhadap Provinsi Tahun 2020 – 2024:

Tabel 2. 106 Proporsi Kontribusi PDRB Kebupaten Luwu Timur Terhadap Provinsi Tahun 2020 - 2024

No	Tahun	Proporsi Kontribusi PDRB Terhadap Provinsi (Milyar)	Persentase
1	2020	21.529,81	4,25
2	2021	23.614,52	4,33
3	2022	28.407,91	4,69
4	2023	30.695,95	4,69
5	2024	30.391,94	4,36

Sumber: BPS, Kabupaten Luwu Timur dalam Angka Tahun 2025

Kabupaten Luwu Timur merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki sumber daya alam yang sangat potensial. Sektor pertambangan dan penggalian adalah merupakan sektor yang sangat mempengaruhi PDRB Kabupaten Luwu Timur. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2024 mencapai 3,27 persen dibawah pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan. Dari tabel tersebut diatas diketahui bahwa pada tahun 2024 proporsi kontribusi PDRB Kabupaten Luwu Timur turun sebesar 4,36 persen terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan, namun mengalami peningkatan dari sisi rupiah.

D. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan

Rumah tangga diklasifikasikan memiliki akses terhadap hunian layak apabila memenuhi 4 (empat) kriteria yaitu kecukupan luas tempat tinggal minimal 7,2 m^2 per individu, memiliki akses terhadap air minum layak, memiliki akses terhadap sanitasi layak, dan ketahanan bangunan. Berikut Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses terhadap Hunian Layak, dan Terjangkau, di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2. 107 Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses terhadap Hunian Layak, dan Terjangkau Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 - 2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses terhadap Hunian Layak dan Terjangkau di Kab. Luwu Timur (%)	60.64	68.21	69.38	76.13	74.86

Sumbe r: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur tahun 2025

Dari tabel tersebut di atas, terlihat bahwa persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau di Kabupaten Luwu Timur menunjukkan tren peningkatan selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, persentase tercatat sebesar 60,64 persen dan terus meningkat menjadi 68,21 persen pada 2021, 69,38 persen pada 2022, hingga mencapai puncaknya di angka 76,13 persen pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024 terjadi sedikit penurunan menjadi 74,86 persen. Secara umum, capaian ini mencerminkan adanya perbaikan akses masyarakat terhadap hunian yang memenuhi standar kelayakan dan keterjangkauan.

E. Persentase Desa Mandiri

Persentase Desa Mandiri merupakan perbandingan antara jumlah desa dengan status pembangunan mandiri dibandingkan dengan total jumlah desa disuatu wilayah. Persentase desa mandiri ditentukan berdasarkan Indeks Desa. Dalam Indeks Desa, desa dikelompokkan menjadi 5 klasifikasi status yaitu status sangat tertinggal, tertinggal, berkembang, maju dan mandiri. Indeks desa, baru disepakati secara nasional sebagai dasar perhitungan persentase desa mandiri di bulan Maret Tahun 2024. Jumlah dan Persentase Desa mandiri Kabupaten Luwu Timur dari tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 108 Jumlah dan Persentase Desa Mandiri Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 - 2024

No	Tahun	Desa Mandiri	Persentase Desa Mandiri
1	2020	2	1.63
2	2021	7	5,69
3	2022	10	8,06
4	2023	24	19,20
5	2024	37	29,60

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

Pada tahun 2020 desa mandiri yang terbentuk hanya 2 desa yaitu Desa Sorowako Kecamatan Nuha dan Desa Puncak Indah di Kecamatan Malili dengan persentase sebesar 1,63 persen. Pada tahun 2021 terus meningkat dari 7 desa menjadi 24 desa mandiri pada tahun 2024 dengan persentase 29,60 persen. Desa mandiri tersebut tersebar di Kecamatan Nuha, Malili, Towuti, Mangkutana, Tomoni, Wotu, Burau dan Kalaena.

F. Persentase BUMDes yang Menghasilkan Laba

Persentase BUMDes yang Menghasilkan Laba adalah rasio antara jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang mencatatkan keuntungan (laba) dalam suatu

tahun anggaran terhadap total jumlah BUMDes yang aktif beroperasi, dinyatakan dalam persen. Indikator ini digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi dan keberlanjutan usaha BUMDes sebagai salah satu pilar penggerak ekonomi desa. Persentase BUMDes yang Menghasilkan Laba Kabupaten Luwu Timur dari tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 109 Persentase BUMDes yang Menghasilkan Laba Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 - 2024

TAHUN	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase BUMDes yang Menghasilkan Laba	n/a	n/a	n/a	n/a	68

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

Pada tahun 2020 sampai dengan 2023, dinas terkati belum mencatatkan BUMDes yang menghasilkan laba. Pertama kali di hitung pada tahun 2024, sebanyak 88 BUMDes di Kabupaten Luwu Timur telah menghasilkan laba, menandakan adanya peningkatan kinerja dan keberlanjutan usaha ekonomi desa. Capaian ini menunjukkan kemajuan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang belum tersedia datanya (*n/a*) atau belum dilakukan pengukuran secara sistematis. Hasil ini mencerminkan efektivitas pembinaan, peningkatan kapasitas, serta penguatan kelembagaan dan usaha BUMDes dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal di tingkat desa.

G. Persentase Desa yang Memiliki Layanan Administrasi Berbasis Digital

Persentase Desa yang Memiliki Layanan Administrasi Berbasis Digital adalah rasio antara jumlah desa yang telah mengimplementasikan sistem atau aplikasi digital dalam penyelenggaraan layanan administrasi pemerintahan desa (seperti pelayanan surat menyurat, data kependudukan, dan pelayanan publik lainnya) terhadap total jumlah desa, dinyatakan dalam persen. Indikator ini menggambarkan tingkat adopsi teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan desa yang efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyaraka. Persentase desa yang memiliki layanan administrasi berbasis digital Kabupaten Luwu Timur dari tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 110 Persentase Desa yang Memiliki Layanan Administrasi Berbasis Digital Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 - 2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Desa Yang Memiliki Layanan Administrasi Berbasis Digital	n/a	n/a	n/a	n/a	0,16

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

Pada tPada tahun 2024, persentase desa yang memiliki layanan administrasi berbasis digital Kabupaten Luwu Timur mencapai 0,16 persen atau 20 desa. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi layanan administrasi digital di tingkat desa masih berada pada tahap awal, dengan sebagian besar desa belum sepenuhnya mengadopsi sistem digital dalam pelayanan administrasinya. Capaian ini mencerminkan adanya kebutuhan peningkatan kapasitas infrastruktur digital, sumber daya manusia, serta komitmen lintas sektor agar transformasi digital desa dapat berjalan lebih optimal dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Luwu Timur.

2.1.3.7 STABILITAS EKONOMI MAKRO

Stabilitas ekonomi makro merupakan prasyarat penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan nasional. Kondisi ini diarahkan untuk mewujudkan keseimbangan fiskal melalui pengelolaan anggaran yang sehat dan berkelanjutan, serta menjaga stabilitas moneter dan sektor keuangan agar tetap responsif terhadap dinamika global dan domestik. Upaya tersebut mendukung kebijakan yang pro stabilitas, pro pertumbuhan, dan pro pemerataan, sehingga mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif, meningkatkan daya saing, serta memperkuat ketahanan ekonomi dalam jangka panjang.

A. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)

Rasio Pajak (Tax Ratio) merupakan suatu ukuran kinerja penerimaan pajak daerah dalam suatu Kabupaten/Kota. Namun dari berbagai literatur, *tax ratio* bukanlah satu satunya indikator yang digunakan dalam mengukur kinerja pajak daerah. Walaupun demikian, hingga saat ini *tax ratio* menjadi ukuran yang dianggap memberi gambaran umum atas kondisi perpajakan disuatu daerah. Adapun definisi sederhana *tax ratio* adalah perbandingan antara total penerimaan pajak dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dimasa yang sama. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Produk Domestik Regional Bruto adalah total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh perekonomian suatu Daerah, dikurangi nilai barang dan jasa yang digunakan dalam produksi. Perkembangan rasio pajak Kabupaten Luwu Timur dari Tahun 2020–2024 seperti dibawah ini:

Tabel 2. 111 Rasio Pajak Terhadap PDRB Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 - 2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Pajak Terhadap PDRB	0,90	0,78	0,71	0,80	0,85

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2025

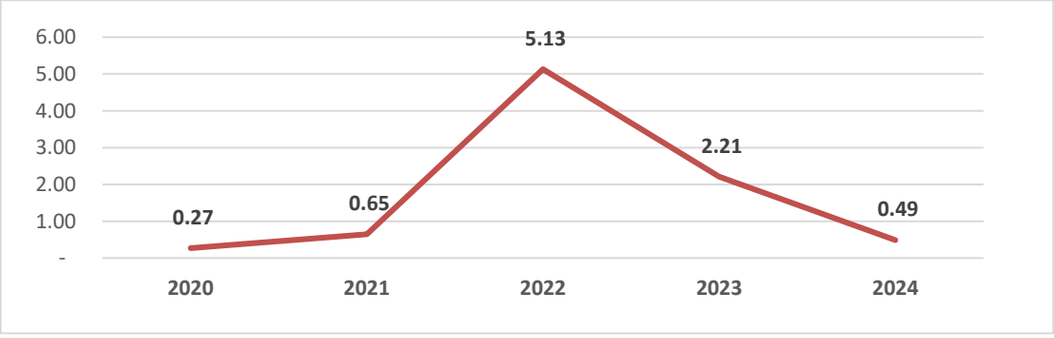
Berdasarkan data tabel, rasio pajak terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Luwu Timur selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan pergerakan yang fluktuatif. Pada tahun 2020, rasio pajak tercatat sebesar 0,90 persen, kemudian mengalami penurunan berturut-turut pada tahun 2021 dan 2022 masing-masing menjadi 0,78 persen dan 0,71 persen. Namun, mulai tahun 2023 rasio ini kembali menunjukkan tren peningkatan, yakni sebesar 0,80 persen, dan terus naik pada tahun 2024 menjadi 0,85 persen. Perubahan ini mencerminkan dinamika antara pendapatan pajak daerah dan besaran PDRB, yang dapat dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi, efektivitas pemungutan pajak, serta kebijakan fiskal daerah. Meningkatnya rasio pada dua tahun terakhir menandakan pemulihan ekonomi yang mulai stabil disertai perbaikan dalam kinerja perpajakan.

B. Tingkat Inflasi

Tingkat Inflasi adalah persentase kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam suatu periode waktu tertentu (biasanya tahunan). Inflasi mencerminkan penurunan daya beli uang, artinya dengan jumlah uang yang

sama, masyarakat dapat membeli lebih sedikit barang/jasa dibanding sebelumnya. Grafik di bawah ini memperlihatkan laju inflasi Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020-2024:

Grafik 2. 29 Laju Inflasi Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 - 2024



Sumber : BPS, Kabupaten Luwu Timur dalam Angka Tahun 2025

Tingkat inflasi Kabupaten Luwu Timur mengalami fluktuasi yang cukup tajam dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, inflasi tercatat sebesar 0,27 persen, kemudian mengalami sedikit peningkatan menjadi 0,65 persen di tahun 2021. Kenaikan tajam terjadi pada tahun 2022, di mana inflasi melonjak hingga mencapai 5,13 persen, yang diduga dipicu oleh tekanan harga pasca pandemi, gangguan rantai pasok, dan peningkatan permintaan. Namun, inflasi berhasil ditekan pada tahun-tahun berikutnya, dengan penurunan signifikan menjadi 2,21 persen di tahun 2023 dan terus menurun menjadi 0,49 persen pada tahun 2024.

C. Pertumbuhan Investasi Daerah

Pertumbuhan investasi daerah adalah salah satu indikator penting untuk memahami perkembangan ekonomi daerah sehingga membantu pemerintah daerah dalam merencanakan strategi ekonomi dan kebijakan yang kebih efektif. Pertumbuhan investasi di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 – 2024 seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 112 Pertumbuhan Investasi Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 - 2024

NO	TAHUN	REALISASI INVESTASI (Rp)	PERTUMBUHAN INVESTASI (%)
1	2020	3.821.150.431.748	537,95
2	2021	4.171.744.535.430	9,14
3	2022	4.092.099.248.242	-1,9
4	2023	4.024.437.259.150	-1,65
5	2024	3.327.337.640.056	-17,32

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2024

Realisasi investasi di Kabupaten Luwu Timur dalam lima tahun terakhir menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, realisasi investasi mencapai Rp 3,82 triliun dengan lonjakan pertumbuhan sebesar 537,95 persen, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh masuknya proyek-proyek besar atau perluasan usaha strategis. Pada tahun 2021, investasi masih tumbuh positif sebesar 9,14 persen dengan nilai mencapai Rp 4,17 triliun. Namun, mulai tahun 2022 hingga 2024, tren investasi mengalami penurunan. Pada tahun 2022, terjadi kontraksi sebesar -1,9 persen, dilanjutkan dengan penurunan -1,65 persen pada 2023, dan penurunan yang

lebih tajam sebesar -17,32 persen pada 2024 dengan nilai investasi turun menjadi Rp 3,33 triliun. Penurunan ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti ketidakpastian iklim usaha, hambatan regulasi, kondisi ekonomi global dan nasional, serta daya tarik iklim investasi daerah yang memerlukan penguatan kembali.

D. Proporsi Anggaran Riset Pemerintah Terhadap APBD

Proporsi anggaran riset pemerintah daerah terhadap APBD adalah rasio atau persentase dari total anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan riset dan pengembangan (R&D) dalam APBD suatu daerah. Tingkat proporsi ini mencerminkan prioritas dan komitmen pemerintah daerah terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), inovasi, serta peningkatan kapasitas dan daya saing daerah dalam berbagai sektor. Proporsi Anggaran Riset Pemerintah Daerah terhadap APBD Kabupaten Luwu Timur tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 113 Proporsi Anggaran Riset Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur terhadap APBD Tahun 2020 - 2024

No	Tahun	Anggaran Riset Daerah (Rp)	Proporsi Anggaran Riset Pemerintah Daerah terhadap APBD (Rp)
1	2020	374.819.000	0,025
2	2021	791.884.655	0,051
3	2022	975.639.375	0,057
4	2023	1.103.180.000	0,057
5	2024	1.233.180.000	0,083

Sumber: Bapperida Kabupaten Luwu Timur 2025

Kegiatan riset berada di Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah (Litbang) pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu Timur. Proporsi anggaran riset terhadap APBD Kabupaten Luwu Timur dari tahun 2020 - 2024 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 dengan total anggaran APBD sebesar Rp. 374.819.000,- atau sekitar 0,025 persen dari total APBD. Angka ini meningkat hampir dua kali lipat pada tahun 2021 anggaran riset bertambah menjadi Rp.791.884.655,- atau 0,051 persen sehingga memberikan kontribusi terhadap kegiatan inovasi daerah. Pada tahun 2022 anggaran riset naik sebesar Rp.975.639.375 atau 0,057 persen dari anggaran APBD tahun 2022. Kemudian pada tahun 2023, proporsi anggaran riset mengalami penambahan sebesar 1.103.180.000 anggaran riset sama dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,057 persen. Adanya kenaikan anggaran bagi pemenuhan kegiatan riset ini, berimplikasi pada kenaikan kinerja bidang Litbang. Pada tahun 2021, indeks Inovasi daerah masih dalam level kurang inovatif dengan nilai 22,28 poin. Kemudian naik menjadi 54,28 poin pada tahun 2022 dan berada pada peringkat 99 Pada tahun 2023 naik lagi dengan nilai 55,29 poin dan berada pada peringkat 69 Kabupaten se Indonesia masuk dalam ketegori inovatif.

E. Indeks Akses Keuangan Daerah

Indeks Akses Keuangan Daerah (IAKD) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kemudahan, pemerataan, dan keterjangkauan masyarakat terhadap layanan keuangan formal di suatu wilayah. Indeks ini mencakup berbagai aspek, seperti ketersediaan layanan perbankan, inklusi keuangan, literasi keuangan,

serta keberadaan dan jangkauan lembaga keuangan di tingkat lokal. Di Kabupaten Luwu Timur, hingga tahun 2024, data spesifik mengenai capaian Indeks Akses Keuangan Daerah belum tersedia secara resmi. Namun, upaya peningkatan akses keuangan terus dilakukan melalui penguatan program inklusi keuangan, optimalisasi peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), serta pengembangan layanan keuangan digital berbasis desa. Diperlukan pengumpulan dan pengolahan data lebih lanjut guna memperoleh gambaran komprehensif mengenai tingkat akses keuangan masyarakat secara kuantitatif di wilayah ini. Berikut disajikan Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020-2024:

Tabel 2. 114 Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 - 2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	n/a	n/a	3,40	3,54	3,63

Sumber : Survey Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK)

Data Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) Kabupaten menunjukkan tren peningkatan dari 3,40 pada tahun 2022 menjadi 3,54 pada tahun 2023, dan kembali naik ke 3,63 pada tahun 2024. Peningkatan ini menggambarkan bahwa akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal semakin membaik dari tahun ke tahun. Secara umum, tren positif ini mencerminkan adanya perluasan inklusi keuangan di daerah, baik melalui peningkatan ketersediaan lembaga keuangan, kemudahan layanan, maupun meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan produk dan jasa keuangan untuk mendukung aktivitas ekonomi.

2.1.4 ASPEK PELAYANAN UMUM

Aspek pelayanan umum adalah elemen atau bagian dari tata kelola pemerintahan yang mencakup upaya penyediaan layanan oleh pemerintah kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar, hak-hak publik, dan meningkatkan kesejahteraan warga negara secara adil, merata, dan berkualitas. Pelayanan umum mencakup berbagai sektor strategis seperti administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, transportasi, perizinan, infrastruktur dasar, serta layanan sosial lainnya. Aspek pelayanan umum di Kabupaten Luwu Timur pada regulasi dan tata kelola yang terintegrasi dan adaptif tercerminkan pada pencapaian indikator -indikator pelayanan pemerintahan sebagai berikut:

2.1.4.1 REGULASI DAN TATA KELOLA YANG BERINTEGRITAS DAN ADAPTIF

Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif merupakan pilar utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, responsif, dan profesional. Tata kelola pemerintahan diarahkan pada pengelolaan sektor publik yang efisien, efektif, dan akuntabel, dengan menjunjung tinggi prinsip transparansi serta partisipasi masyarakat. Regulasi yang adaptif dibutuhkan agar mampu menjawab dinamika pembangunan dan tantangan global secara cepat dan tepat. Integritas aparatur negara menjadi kunci dalam memastikan bahwa setiap kebijakan dan layanan publik dijalankan secara berkeadilan dan bebas dari korupsi, sehingga tercipta kepercayaan publik dan kualitas pelayanan yang semakin baik.

A. Indeks Reformasi Hukum (IRH)

Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah sebuah alat ukur atau indikator yang digunakan untuk menilai sejauh mana reformasi hukum telah dilakukan dan dicapai oleh suatu negara, daerah, atau institusi dalam kerangka pembangunan hukum yang adil, transparan, dan efektif . Indeks reformasi hukum merupakan amanat dari Peraturan Presiden nomor 81 tahun 2010 tentang *grand* desain reformasi birokrasi tahun 2010 – 2025.. Capaian Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Luwu Timur 2020 - 2024 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 115 Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 - 2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Reformasi Hukum	n/a	n/a	50.35	61,95	97,76

Sumber: Bagian Hukum Setda Kab. Luwu Timur Tahun 2025

Berdasarkan nilai rapor Indeks Reformasi Hukum (IRH) Kabupaten Luwu Timur, pada tahun 2022 diperoleh skor sebesar 50,35 dengan kategori CC (Cukup). Pada tahun 2023, nilai tersebut mengalami peningkatan menjadi 61,95 dengan kategori BB (Baik). Peningkatan ini antara lain didorong oleh naiknya nilai pada variabel tingkat koordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM dalam melakukan harmonisasi regulasi, yang meningkat dari 15 poin pada tahun 2022 menjadi 22,6 poin pada tahun 2023. Selain itu, nilai variabel kualitas regulasi atau deregulasi peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reviu juga menunjukkan perbaikan dari 6,7 poin pada tahun 2022 menjadi 10,7 poin pada tahun 2023. Namun demikian, pada variabel kompetensi ASN sebagai perancang peraturan perundang-undangan yang berkualitas, dari bobot maksimal 25 poin, Kabupaten Luwu Timur hanya memperoleh 17,4 poin baik pada tahun 2022 maupun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian indikator pada variabel ini masih perlu ditingkatkan guna mencapai hasil yang lebih optimal.

B. Indeks Pelayanan Publik

Berdasarkan PermenPAN RB No.17 Tahun 2017 Indeks Pelayanan Publik atau IPP adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Nilai indeks tidak hanya bertujuan untuk memberikan hasil akhir nilai semata, tetapi juga dapat dijadikan dasar perbaikan pelayanan, dimana Pemerintah Daerah dapat melihat aspek mana yang sudah baik dan aspek mana yang masih membutuhkan perbaikan. Capaian Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Luwu Timur 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 116 Nilai Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 - 2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pelayanan Publik	2,41 (D)	3,02 (B-)	3,25 (B-)	2,35 (C-)	1,74 (D)

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kab. Luwu Timur Tahun 2025

Indeks Pelayanan Publik menunjukkan fluktuasi dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, nilai indeks berada di angka 2,41 dengan kategori D (Buruk). Capaian ini mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2021, naik menjadi 3,02 dan masuk dalam kategori B- (Baik). Tren positif ini berlanjut pada tahun 2022, dengan nilai 3,25 yang masih berada pada kategori B- (Baik). Namun, pada tahun 2023, terjadi penurunan cukup tajam, di mana nilai indeks turun menjadi 2,35 dan masuk kategori C- (Kurang). Penurunan berlanjut pada tahun 2024, dengan capaian hanya 1,74, yang kembali menempatkan pelayanan publik pada kategori D (Buruk).

Tren ini mengindikasikan bahwa setelah mengalami peningkatan dalam dua tahun berturut-turut (2021–2022), kualitas pelayanan publik menurun cukup signifikan dalam dua tahun terakhir (2023–2024). Hal ini menjadi catatan penting bagi instansi terkait untuk segera melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap sistem dan kualitas pelayanan publik secara menyeluruh khususnya Perangkat Daerah yang menjadi Unit Lokus Evaluasi (ULE) yaitu Dinas Kependudukan dan Pencataatan Sipil, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan RSUD I Lagaligo.

C. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks SPBE) adalah ukuran kinerja yang digunakan untuk menilai tingkat kematangan dan kualitas penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Capaian SPBE Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2. 117 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 - 2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1,89	1,89	2,42	3,05	3,16

Sumber : Dinas Komunikasi, informatika, statistik dan Persandian Tahun 2025

Capaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Luwu Timur menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020 dan 2021, nilai indeks berada di angka 1,89, yang mencerminkan kondisi awal penerapan SPBE dengan kategori Kurang. Kemajuan mulai terlihat pada tahun 2022, di mana indeks meningkat menjadi 2,42 dan masuk dalam kategori Cukup. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2023, dengan peningkatan nilai menjadi 3,05, yang masuk dalam kategori Baik. Pada tahun 2024, capaian indeks kembali mengalami peningkatan menjadi 3,16, tetap berada dalam kategori Baik, sekaligus menunjukkan adanya konsistensi dalam penguatan tata kelola pemerintahan berbasis digital di Kabupaten Luwu Timur.

D. Indeks Survei Penilaian Integritas

Survei penilaian integritas merupakan survei untuk memetakan risiko korupsi dan menilai sejauh mana kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Nilai Indeks survei Penilaian integritas Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020-2024 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 118 Indeks Survey Penilaian Integritas Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 - 2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Survey Penilaian Integritas	n/a	74,91	74,6	75,39	74,07

Sumber: Inspektorat Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI) Kabupaten Luwu Timur selama periode 2021 hingga 2024 menunjukkan angka yang cukup stabil, meskipun dengan sedikit fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, indeks tercatat sebesar 74,91, sedikit menurun menjadi 74,6 pada 2022, dan mengalami kenaikan pada 2023 menjadi 75,39 yang merupakan capaian tertinggi dalam periode tersebut. Namun pada tahun 2024, nilai kembali turun ke 74,07. Secara umum, capaian SPI menunjukkan bahwa tingkat integritas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Luwu Timur berada pada level cukup baik, namun tren fluktuatif ini mengindikasikan perlunya penguatan budaya integritas, pengawasan internal, dan mitigasi potensi penyimpangan secara berkelanjutan untuk menjaga kredibilitas tata kelola pemerintahan.

E. Indeks Persepsi Anti Korupsi

Indeks Persepsi Anti Korupsi adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat persepsi korupsi di suatu daerah. IPAK diperoleh melalui survei yang melibatkan pengusaha, ahli bisnis, serta analis risiko. Responden diminta untuk menilai seberapa korupsi mereka persepsikan dalam lembaga pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat secara umum. IPAK dinyatakan dalam skala 0 hingga 100, dimana 0 menunjukkan tingkat korupsi yang sangat tinggi dan 100 menunjukkan tingkat korupsi yang sangat rendah. Semakin tinggi skor IPAK suatu daerah, semakin sedikit korupsi yang dipercaya ada dalam daerah tersebut. Tingkat indeks persepsi anti korupsi di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 119 Indeks Persepsi Anti Korupsi Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 - 2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Persepsi Anti Korupsi	n/a	81,71	84,6	82,75	81,04

Sumber: Inspektorat Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

Indeks Persepsi Antikorupsi (IPAK) Kabupaten Luwu Timur menunjukkan capaian yang relatif tinggi dan stabil selama periode 2021 hingga 2024. Tidak terdapat data pada tahun 2020. Pada tahun 2021, IPAK tercatat sebesar 81,71, kemudian meningkat menjadi 84,6 pada 2022, yang merupakan capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir. Namun demikian, indeks ini mengalami sedikit penurunan pada tahun 2023 menjadi 82,75, dan kembali turun ke 81,04 pada 2024. Meskipun masih berada dalam kategori baik, tren penurunan ini mengindikasikan perlunya penguatan integritas, transparansi layanan publik, serta pengawasan internal untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.

F. Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah tingkat kematangan penerapan sistem pengendalian intern di lingkungan instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara/daerah, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Berikut disajikan capaian SPIP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020-2024 dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2. 120 Indeks Maturitas SPIP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 - 2024

Indikator		Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Maturitas SPIP	Nilai	n/a	3,156	3,031	3,120	3.017
	Level	n/a	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3

Sumber : Inspektorat Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kabupaten Luwu Timur menunjukkan kondisi yang relatif stabil pada rentang Level 3 (Tertib) selama periode 2021 hingga 2024. Mulai tahun 2021, maturitas SPIP mencapai 3,156, menandakan bahwa penerapan sistem pengendalian intern telah cukup konsisten dan terdokumentasi. Namun, pada tahun 2022 terjadi sedikit penurunan menjadi 3,031, yang kemudian kembali mengalami kenaikan pada 2023 menjadi 3,120. Pada tahun 2024, skor sedikit menurun kembali ke angka 3,017. Meskipun masih berada pada level yang sama, fluktuasi nilai ini mengindikasikan perlunya penguatan konsistensi penerapan pengendalian intern, terutama dalam hal penilaian risiko, dokumentasi kegiatan pengendalian, dan sistem pemantauan. Upaya perbaikan secara berkelanjutan perlu dilakukan agar maturitas SPIP dapat meningkat menuju Level 4 (Terdefinisi) yang mencerminkan standar pengendalian yang terintegrasi dan terkendali secara sistematis di seluruh unit kerja.

G. Nilai MCP KPK

Nilai MCP KPK (Monitoring Center for Preventio) atau Pusat Pemantauan Pencegahan Korupsi adalah indikator yang digunakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam pencegahan korupsi. MCP berfungsi sebagai alat evaluasi untuk menilai sejauh mana penerapan kebijakan dan tindakan-tindakan pencegahan korupsi di berbagai pemerintah daerah. MCP KPK diberikan dalam bentuk nilai atau skor, biasanya dalam skala 0-100. Semakin tinggi nilai MCP suatu daerah, semakin baik penilaian KPK terhadap upaya pencegahan korupsi di wilayah tersebut. Nilai MCP KPK Kabupaten Luwu Timur tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 121 Nilai MCP KPK Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 - 2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai MCP KPK Kabupaten Luwu Timur	75	77	89	74	73.21

Sumber: Inspektorat Kabupaten Luwu Timur 2025

Nilai *Monitoring Center for Prevention* (MCP) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk Kabupaten Luwu Timur menunjukkan fluktuasi selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, nilai MCP tercatat sebesar 75 dan mengalami peningkatan menjadi 77 pada tahun 2021. Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2022 dengan nilai 89, yang mencerminkan penguatan tata kelola pemerintahan daerah dalam aspek pencegahan korupsi. Namun, pada tahun 2023 nilai menurun cukup tajam menjadi 74 dan kembali turun menjadi 73,21 pada tahun 2024. Fluktuasi ini mencerminkan perlunya konsistensi dan penguatan komitmen seluruh perangkat daerah dalam menjalankan program pencegahan korupsi secara berkelanjutan, terutama dalam hal perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, serta manajemen aset dan pelayanan publik.

H. Nilai SAKIP

Pada tahun 2020, Nilai SAKIP Kabupaten Luwu Timur adalah 61,06 dengan predikat B. Tahun berikutnya, nilai tersebut meningkat menjadi 62,82 dan masih mempertahankan predikat B. Pada tahun 2022, nilai SAKIP kembali meningkat menjadi 64,26 dengan predikat B. Peningkatan terus berlanjut pada tahun 2023 dengan nilai 66,51 dan predikat B. Pada tahun 2024, Nilai SAKIP Kabupaten Luwu Timur mencapai 67,77 dan masih dengan predikat B, sebagaimana tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 2. 122 Nilai SAKIP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 – 2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai SAKIP Kabupaten Luwu Timur	61,06 (B)	62,82 (B)	64,26 (B)	66,51 (B)	67,77 (B)

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur 2025

Peningkatan nilai SAKIP ini menunjukkan bahwa Kabupaten Luwu Timur telah melakukan upaya yang efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan anggaran. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Luwu Timur telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan anggaran, serta terus berupaya untuk meningkatkan nilai SAKIP dan mencapai predikat yang lebih tinggi.

2.1.4.2 HUKUM BERKEADILAN, KEAMANAN NASIONAL YANG TANGGUH, DAN DEMOKRASI SUBSTANSIAL

Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif menjadi fondasi utama dalam pembangunan hukum yang berkeadilan. Pembangunan hukum diarahkan untuk mewujudkan supremasi hukum yang menjunjung tinggi kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam konteks ini, regulasi ditata agar responsif terhadap dinamika masyarakat, mudah diakses, serta selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi dan inklusivitas. Tata kelola yang baik juga menuntut aparatur penegak hukum yang profesional, transparan, dan bebas dari intervensi, sehingga kepercayaan publik terhadap sistem hukum dapat terus diperkuat dan menjadi penopang pembangunan yang berkelanjutan.

A. Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah

Penegakan Peraturan Daerah (Perda) merupakan upaya untuk memastikan bahwa setiap ketentuan yang ditetapkan dapat dijalankan sesuai dengan tujuan

pembentukannya. Penegakan ini mencakup kegiatan pengawasan, penindakan hukum, serta langkah-langkah lain yang mendorong kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku. Adapun data pelaksanaan penegakan Perda dan Perkada di wilayah Kabupaten Luwu Timur selama periode tahun 2020-2024 sebagai berikut :

Tabel 2. 123 Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 - 2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	84,61	85,9	100	100	100

Sumber: Satpol PP Kabupaten Luwu Timur 2025

Dari tabel tersebut di atas diketahui bahwa penerapan Peraturan Daerah yang ditegakkan meningkat setiap tahunnya mulai dari tahun 2020 - 2024. Pada tahun 2020 sebanyak 40 pelanggaran perda yang diselesaikan atau sebesar 84,61 persen, kemudian meningkat menjadi 85,9 persen dari 22 kasus pelanggaran perda dan perkada. Selanjutnya meningkat menjadi 100 persen atau sebanyak 1.036 kasus yang tertangani. Penegakan Perda dan Perkada di tahun 2023 sebesar 100 persen dari 943 kasus pelanggaran yang terjadi dan di tahun 2024 juga 100 persen penegakan Peraturan Daerah untuk 856 kasus yang terjadi. Persentase capaian penyelesaian penegakan Peraturan Daerah dan tidak terlepas dari dukungan personil Satpol PP Kecamatan yang secara aktif melakukan pengawasan dan sosialisasi Peraturan Daerah dan Kepala Daerah di masyarakat. Selain itu, peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) juga tidak kalah pentingnya dalam melakukan penanganan kasus pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah secara Yustisial.

B. Persentase Tindak Kriminal yang Ditangani

Tindak kriminal adalah segala sesuatu perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan yang melanggar hukum yang berlaku, serta norma-norma sosial dan agama. Jumlah tindak kriminal yang terjadi pada tahun 2020-2024 di Kabupaten Luwu Timur dan dapat diatasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 124 Tindak Kriminal yang ditangani Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 - 2024

No	Tahun	Jumlah Kriminal (Kasus)	Tindak Kriminal yang Diatasi (%)
1	2020	158	100
2	2021	197	100
3	2022	169	100
4	2023	106	100
5	2024	143	100

Sumber : Polres Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

Dari keseluruhan tindak kriminal yang terjadi di Kabupaten Luwu Timur dari tahun 2020 - 2024, semuanya mampu diatasi dengan baik dengan jumlah kriminal yang terjadi berfluktuasi. Tindak kriminal yang ditangani oleh Polres adalah sebanyak 7 jenis tindak kriminal, yaitu penyalahgunaan narkoba, pembunuhan, kejahatan seksual, penganiayaan, pencurian, penipuan, dan pemalsuan uang. Pada tahun 2022 jumlah kriminal yang ditangani sebanyak 169 kasus. 169 kasus tersebut adalah penyalahgunaan narkoba sebanyak 1 kasus, pembunuhan 3 kasus, kejahatan seksual 7 kasus, penganiayaan 118 kasus, pencurian 15 kasus, penipuan 23 kasus.

Jumlah kriminal ini menurun pada tahun 2023 yaitu sebanyak 106 kasus. Rincian kasus yang tertangani tersebut adalah penyalahgunaan narkoba 1 kasus, pembunuhan 0 kasus, kejahatan seksual 6 kasus, penganiayaan 36 kasus, pencurian 55 kasus, pemalsuan uang 0 kasus, dan penipuan 8 kasus.

C. Persentase Gangguan Trantibum yang Dapat Diselesaikan

Ketenteraman dan ketertiban umum yang selanjutnya disebut trantibum adalah situasi dan kondisi yang memungkinkan pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tentram, tertib, dan teratur sesuai dengan kewenangannya. Persentase gangguan trantibum di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 125 Persentase gangguan Trantibum Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 - 2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Gangguan Trantibum yang dapat Diselesaikan	100	100	100	100	100

Sumber: Satpol PP Kabupaten Luwu Timur 2025

Jumlah kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terjadi di Kabupaten Luwu Timur dari tahun 2020 - 2024, dapat diselesaikan dengan baik dengan capaian 100 persen. Pada tahun 2020 jumlah pengaduan sebanyak 448 kasus, tahun 2021 sebanyak 459 kasus, tahun 2022 sebanyak 418 kasus, tahun 2023 sebanyak 378 kasus dan pada tahun 2024 sebanyak 336 kasus. Keseluruhan pengaduan yang masuk tersebut dapat ditangani dan diselesaikan mencapai 100 persen. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan penyelesaian kasus selalu dilakukan secara konsisten. Secara teknis, penempatan personil Polisi Pamong Praja disetiap Kecamatan menjadi faktor utama keberhasilan capaian indikator ini. Faktor keberhasilan berikutnya yaitu melakukan patroli wilayah yang secara rutin diseluruh kecamatan, sehingga potensi-potensi gangguan dapat dicegah secara cepat dan meminimalisir tindak kejahatan.

D. Persentase Perempuan Terpilih Terhadap Total Anggota DPRD

Indikator ini menunjukkan sejauh mana perempuan memiliki akses yang sama terhadap posisi penting pengambil keputusan dalam proses politik formal khususnya di lembaga legislatif. Namun, indikator ini tidak dapat mengukur kekuatan pengambil keputusan politik yang sebenarnya dan perempuan masih mengalami kendala dalam membawa mandat politik yang diberikan kepada mereka. Selain itu, kehadiran perempuan di parlemen bukan berarti secara otomatis menunjukkan dukungan terhadap isu perempuan. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur tahun 2014 – 2029 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 126 Persentase Perempuan Terpilih Terhadap Total Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur Periode 2014-2029

No	Periode	Nama	Partai	Jumlah Angggota DPRD (Orang)	Perempuan Terpilih (%)
1	2014 - 2019	1. Hj. Harisah Suharjo	PAN	30	3,33

No	Periode	Nama	Partai	Jumlah Angggota DPRD (Orang)	Perempuan Terpilih (%)
2	2019 - 2024	1. Ir. Hj. Harisah Suharjo	PAN	30	10
		2. Heryanti Harun, SE	Golkar		
		3. dr. Ramna Minggus	Golkar		
3	2024 - 2029	1. Ir. Hj. Harisah Suharjo	PAN	35	11,42
		2. Erni Malape, SP	NASDEM		
		3. Prima Eyza Purnama	PKS		
		4. SuwatI	NASDEM		

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur 2024

Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif pada tabel di atas, menunjukkan adanya peningkatan meskipun masih di bawah target ideal (30 persen). Dari seluruh anggota DPRD periode 2024-2029, terdapat 4 orang perempuan dari 35 anggota DPRD. Jumlah ini meningkat 33,33 persen dari periode 2019-2024 yang berjumlah 3 orang perempuan. Masih rendahnya angka ini memperlihatkan adanya hambatan bagi perempuan untuk terlibat secara aktif dalam politik, baik dari segi partisipasi, pencalonan, atau dukungan publik sehingga perlu upaya berkelanjutan untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan misalnya pelatihan calon legislatif perempuan.

E. Perda Inisiatif DPRD

Perda inisiatif DPRD menggambarkan peran aktif DPRD dalam sistem pemerintahan daerah yang otonom, serta peran legislatif dalam menciptakan aturan yang bisa memajukan kesejahteraan daerah dan masyarakatnya. Perda inisiatif DPRD biasanya merupakan respons terhadap aspirasi, kebutuhan, atau permasalahan yang disampaikan oleh masyarakat. Inisiatif ini mencerminkan upaya DPRD untuk memastikan bahwa kepentingan rakyat di daerah terakomodasi dalam kebijakan daerah. Perda yang merupakan Inisiatif DPRD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020–2024 seperti tabel di bawah ini:

Tabel 2. 127 Perda Inisiatif DPRD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 - 2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Perda Inisiatif DPRD Kabupaten Luwu Timur	1	0	1	2	3

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025

Sesuai data tabel, pada tahun 2021, tidak ada Perda Inisiatif yang dihasilkan oleh anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur karena masih dalam suasana covid 19. Tahun 2022 perda yang dihasilkan sebanyak 1 perda dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 2 perda. Adanya peningkatan ini menunjukkan keseriusan anggota DPRD dalam menanggapi kebutuhan masyarakat atau masalah yang muncul di masyarakat melalui pembuatan kebijakan yang spesifik. Perda inisiatif tahun 2022 tentang kepemudaan. Perda tahun 2023 tentang sistem pertanian terpadu dan perda tentang pengelolaan perikanan tangkap dan budidaya.

F. Persentase Perempuan Pengurus Partai Politik

Persentase perempuan dalam kepengurusan partai politik merupakan indikator penting dari keterlibatan perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan. Keterwakilan yang lebih tinggi dapat meningkatkan keberagaman perspektif dan pengalaman dalam pembuatan kebijakan, serta mempromosikan kesetaraan gender dalam politik. Persentase perempuan pengurus partai politik di Kabupaten Luwu Timur periode 2022 – 2025 seperti tabel dibawah ini:

Tabel 2. 128 Pesentase Perempuan Pengurus Partai Politik Kabupaten Luwu Timur

NO	PARTAI POLITIK	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL	%
1	GOLKAR	72	29	101	29
2	NASDEM	25	11	36	31
3	PAN	35	15	50	30
4	PDIP	11	4	15	27
5	GERINDRA	35	19	54	35
6	DEMOKRAT	52	34	86	40
7	HANURA	9	3	12	25
8	PKS	6	2	8	25
9	PKB	14	5	19	26
10	PBB	8	5	13	38
TOTAL		**267**	**127**	**394**	**32**

Sumber : Kesbangpol Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024

Keterwakilan perempuan di partai politik bedasarkan data pada tabel diatas sebesar 32 persen, hal ini menunjukkan adanya kemajuan dalam partisipasi perempuan dalam berpolitik. Namun nilai ini belum mencapai kesetaraan penuh. Untuk dapat meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik, maka perlu membuka peluang dengan mengikutsertakan perempuan dalam pendidikan dan kesadaran berpolitik.

2.1.4.3 KETANGGUHAN DIPLOMASI DAN PERTAHANAN BERDAYA GENTAR KAWASAN

Ketangguhan diplomasi dan pertahanan yang berdaya gentar merupakan elemen strategis dalam menjaga kedaulatan, keamanan nasional, serta memperkuat posisi Indonesia di kawasan dan dunia. Diplomasi yang tangguh ditunjukkan melalui kemampuan membangun hubungan internasional yang konstruktif, memperjuangkan kepentingan nasional, serta berperan aktif dalam menjaga stabilitas kawasan melalui kerja sama multilateral, penyelesaian konflik secara damai, dan penguatan peran Indonesia di forum global. Sementara itu, pertahanan yang berdaya gentar diwujudkan dengan pembangunan kekuatan pertahanan yang modern, profesional, dan didukung teknologi mutakhir, serta kemampuan deteksi dan respon dini terhadap ancaman. Sinergi antara diplomasi dan pertahanan menjadikan Indonesia sebagai negara yang tidak hanya disegani secara militer, tetapi juga dihormati dalam percaturan diplomasi global.

A. Persentase Kerjasama yang ditindaklanjuti

Kerjasama daerah adalah usaha bersama antar daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah diluar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas

dalam memenuhi pelayanan publik serta saling menguntungkan. Kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur dengan stakeholder Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 129 Jumlah Kerjasama antara Pemda Kabupaten Luwu Timur dengan Stakeholder Lainnya Tahun 2020 - 2024

No	Mitra Kerjasama	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Luar Provinsi Sulawesi Selatan	0	10	16	12	17
2	Kabupaten dalam Provinsi Sulawesi Selatan	1	0	4	7	2
3	Instansi Vertikal	2	13	6	10	12
4	Perbankan	0	1	2	3	0
5	Universitas/Lembaga Pendidikan	1	8	7	6	5
6	Perusahaan	2	13	8	47	9
Kerjasama yang ditindaklanjuti		**6**	**45**	**43**	**85**	**45**

Sumber: Bagian Pemerintahan Setda Kab. Luwu Timur Tahun 2025

Tabel 2. 130 Persentase Kerjasama yang Ditindaklanjuti Tahun 2021 - 2024

No	Mitra Kerjasama	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1	Luar Provinsi Sulawesi Selatan	22.22	37.21	14.12	37.78
2	Kabupaten dalam Provinsi Sulawesi Selatan	0.00	9.30	8.24	4.44
3	Instansi Vertikal	28.89	13.95	11.76	26.67
4	Perbankan	2.22	4.65	3.53	0.00
5	Universitas/Lembaga Pendidikan	17.78	16.28	7.06	11.11
6	Perusahaan	28.89	18.60	55.29	20.00
Kerjasama yg ditindaklanjuti		**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber: Bagian Pemerintahan Setda Kab. Luwu Timur Tahun 2025

Pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2021- 2024 telah menjalin kerjasama dengan beberapa *stakeholder*, baik pemerintah daerah di dalam maupun diluar Provinsi Sulawesi Selatan, juga dengan perusahaan, perbankan dan perguruan tinggi. Kerjasama ini dimaksudkan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat baik dibidang ekonomi, pendidikan dan sosial. Kerjasama yang dijalin pada tahun 2021-2024 keseluruhannya telah ditindaklanjuti dan dilaksanakan sesuai dengan materi kerjasamanya.

B. Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) adalah ukuran komprehensif yang digunakan untuk menilai kemampuan suatu daerah dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta daya saing yang berkelanjutan. IDSD Kabupaten Luwu Timur tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 131 Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 - 2024

Indikator	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Daya Saing Daerah	n/a	n/a	2,82	2,83	3,07

Sumber: Bapperida Kab. Luwu Timur Tahun 2025

Berdasarkan data tabel di atas, Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Luwu Timur mulai tercatat sejak tahun 2022 dengan nilai 2,82. Nilai ini mengalami peningkatan tipis pada tahun 2023 menjadi 2,83, dan kembali naik lebih signifikan menjadi 3,01 pada tahun 2024. Kenaikan skor IDSD ini mencerminkan adanya perbaikan bertahap dalam kapasitas dan kualitas pembangunan daerah, khususnya dalam aspek kelembagaan, infrastruktur, sumber daya manusia, serta ekonomi dan keuangan daerah. Meski data tahun 2020 dan 2021 belum tersedia, tren dari tahun 2022 hingga 2024 menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Luwu Timur mulai menunjukkan kemajuan dalam menciptakan daya saing daerah yang lebih kompetitif dan berkelanjutan.

2.1.4.4 KINERJA SETIAP URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Indikator Kinerja Kunci (IKK) per urusan pemerintah daerah merupakan alat ukur utama yang digunakan untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan setiap urusan pemerintahan, baik wajib maupun pilihan. IKK dirancang untuk mencerminkan hasil strategis dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah, serta menjadi dasar evaluasi capaian pembangunan daerah. Setiap urusan—seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, lingkungan hidup, dan lainnya—memiliki IKK yang spesifik dan terukur, sehingga memudahkan pengambilan keputusan berbasis kinerja. Dengan demikian, IKK menjadi instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi hasil.

A. Urusan Pendidikan

Selama periode 2020 hingga 2024, capaian indikator pendidikan di Kabupaten Luwu Timur menunjukkan perkembangan yang cukup positif, meskipun masih terdapat beberapa fluktuasi pada jenjang tertentu. Peningkatan yang konsisten terlihat pada indikator partisipasi pendidikan anak usia dini (PAUD), di mana Angka Partisipasi Kasar (APK) meningkat dari 49,31% pada tahun 2021 menjadi 67,04% pada 2024. Hal serupa juga terjadi pada Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Sekolah (APS) jenjang SD/MI, yang umumnya berada di atas 90%, bahkan mendekati atau mencapai 100% pada tahun-tahun terakhir. Angka Kelulusan (AL) untuk SD dan SMP pun terus meningkat hingga mencapai 100% pada 2023 dan 2024, menandakan keberhasilan sistem pendidikan dasar dalam mempertahankan siswa hingga lulus. Namun demikian, terdapat penurunan dan ketidakkonsistenan pada beberapa indikator jenjang SMP/MTs. Angka Partisipasi Sekolah (APS) jenjang ini sempat anjlok drastis pada 2021 hingga hanya 1,42%, meskipun kemudian membaik menjadi 87,75% pada 2024. Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Total (APT) untuk SMP juga menunjukkan tren menurun sejak 2022. Selain itu, meskipun angka putus sekolah jenjang SD dan SMP sempat mencapai 0% pada 2023, nilai tersebut kembali naik pada 2024, khususnya di SMP yang mencatat angka 0,43%. Indikator lain seperti rasio guru-murid dan rasio guru per kelas juga menunjukkan angka yang tidak stabil, mengindikasikan perlunya evaluasi terhadap distribusi tenaga pengajar. Dari sisi fasilitas, terdapat peningkatan kondisi bangunan sekolah yang baik pada jenjang SD dan SMP. Rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk usia sekolah juga mengalami peningkatan kecil namun stabil. Indikator keberhasilan jangka panjang seperti proporsi murid kelas 1 yang berhasil

menamatkan SD serta angka melek huruf penduduk usia 15–24 tahun terus menunjukkan tren positif, bahkan mencapai 100% pada 2024. Namun, angka melek huruf untuk penduduk usia di atas 15 tahun sempat mengalami penurunan pada 2023 sebelum kembali naik di tahun berikutnya. Sementara itu, proporsi guru berkualifikasi S1/D-IV yang sempat mencapai 98,30% pada 2023 mengalami sedikit penurunan pada 2024 menjadi 95,82%. Secara keseluruhan, kinerja sektor pendidikan dasar di Luwu Timur selama lima tahun terakhir menunjukkan kemajuan signifikan, terutama dalam akses, partisipasi, dan kelulusan. Namun, tantangan masih perlu diatasi pada jenjang pendidikan menengah pertama, distribusi guru, dan keberlanjutan kualitas pendidikan. Berikut capaian kinerja penyelenggaraan urusan pendidikan Kabupaten Luwu Timur sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2. 132 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pendidikan
Tahun 2020 - 2024

No	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Layanan Urusan Wajib Dasar						
	Pendidikan						
	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)						
1	Angka Partisipasi Kasar	%	67,8	49,31	56.62	60,45	67,04
	Angka Pendidikan yang ditamatkan						
2	APT SD/sederajat	%	26,39	n/a	110,02	110,03	105,63
3	APT SMP/sederajat	%	16,04	n/a	93,59	87,35	86,45
	Angka Partisipasi Murni						
4	Angka Partisipasi Murni (APM SD/MI/Paket A	%	102,45	93,07	99,65	97,08	99,1
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS/ Paket B	%	107,63	85,13	89,64	91,81	92,24
6	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	62,73	49,31	56,62	60,45	67,04
7	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	%	89,11	90.87	97,09	97,09	98,72
8	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	%	86,38	71	85,09	82,67	87,75
9	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belaum menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	51,98	100	93,94	93,94	100
	Angka Partisipasi Sekolah						

No	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
10	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	%	99,1	90,87	97,09	94,58	98,72
11	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTS/Paket B	%	97,7	1,42	82,67	84,73	87,75
	Angka Putus Sekolah :						
12	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,37	0,4	0.32	0	0.08
13	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	1,15	1,42	1.12	0	0.43
	AngkaKelulusan:						
14	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	99,75	99,98	99.85	100	100
15	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	99,5	99,81	100	99	99.98
	Angka Melanjutkan (AM)						
16	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	93,35	92,76	94.53	95.68	98,62
17	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTS ke SMA/SMK/MA	%	92,87	n/a	n/a	n/a	n/a
	Fasilitas Pendidikan:						
18	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	72,27	73,35	74.45	77.32	80.15
19	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	%	78,51	80,36	81.40	81.89	83.24
20	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	%	59,93	48,46	49.46	50.27	50,13
21	rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	%	691,32	577	592	716	715
22	Rasio Guru/ murid perkelas rata-rata Sekolah Dasar	%	48,14	n/a	43,52	48,77	48
23	Rasio Guru Terhadap Murid Perkelas rata-rata	%	n/a	n/a	283.88	35.35	42.39
24	proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	%	91.71	88,35	87.85	92.69	95.87
25	angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun perepmpuan dan laki-laki	%	95,5	99,41	99.70	99.71	100
26	penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%	96,94	n/a	96,3	94,96	95,99
27	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	88.98	84,09	98.00	98.30	95.82

Sumber: Dinas pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025

B. Urusan Kesehatan

Selama periode 2020 hingga 2024, capaian indikator kesehatan di Kabupaten Luwu Timur memperlihatkan kemajuan signifikan di sejumlah layanan dasar, meskipun masih ada tantangan terutama pada indikator mortalitas dan rasio tenaga kesehatan. Cakupan layanan kesehatan untuk ibu dan anak menunjukkan kinerja yang baik, misalnya cakupan pelayanan bagi ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, dan balita secara umum terus meningkat atau tetap tinggi. Persentase ibu hamil yang mendapat layanan mencapai 95,73% sejak 2023, sementara cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan berkualifikasi mencapai hampir 100% sebelum sedikit menurun ke 82,04% pada 2024. Bayi baru lahir yang mendapat pelayanan kesehatan tetap berada di atas 98%, dan cakupan imunisasi anak, termasuk campak dan UCI, umumnya berada di atas 90%, meskipun terdapat sedikit penurunan pada 2024. Beberapa indikator pelayanan skrining dan pengendalian penyakit menunjukkan tren positif. Misalnya, persentase warga usia lanjut (60 tahun ke atas) yang mendapatkan skrining kesehatan meningkat dari 71,84% pada 2020 menjadi 97,36% pada 2024. Pelayanan bagi penderita hipertensi, diabetes melitus (DM), ODGJ berat, HIV/AIDS, dan TBC pun konsisten di angka 100% pada beberapa tahun terakhir. Namun, angka kematian bayi dan balita justru meningkat, dari 8,16 per 1.000 kelahiran hidup (AKB) pada 2020 menjadi 14,12 pada 2024, begitu pula angka kematian balita yang naik drastis dari 0,72 menjadi 15,3. Angka kematian neonatal dan kematian ibu juga cenderung fluktuatif namun meningkat pada 2024, menandakan perlunya peningkatan kualitas penanganan kasus kritis dan pelayanan pascapersalinan. Dari sisi fasilitas kesehatan, rasio dokter terhadap jumlah penduduk meningkat dari 14,24 menjadi 19,62, namun rasio tenaga medis sempat menurun dan belum pulih ke angka awal. Rasio rumah sakit dan puskesmas masih berada di bawah satu per 100.000 penduduk, menunjukkan keterbatasan infrastruktur dibandingkan kebutuhan. Di sisi lain, cakupan layanan dasar seperti kunjungan bayi, K4 (kunjungan ibu hamil keempat), pelayanan nifas, dan anjang kesehatan masyarakat miskin terus mengalami peningkatan, menunjukkan sistem layanan yang semakin menjangkau kelompok rentan. Program penanganan penyakit menular seperti DBD, diare, TBC, dan pneumonia juga menunjukkan cakupan tinggi, meskipun penanganan diare justru menurun drastis di 2024. Cakupan penjaringan kesehatan anak usia sekolah dasar meningkat signifikan dari 0% pada 2020 menjadi 100% pada 2023 dan 2024. Pelayanan gawat darurat dan investigasi KLB (kejadian luar biasa) juga konsisten mencapai 100%. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI untuk keluarga miskin menunjukkan kemajuan besar dari 39,4% (2020) menjadi 92,3% (2024). Namun, angka prevalensi HIV/AIDS meski masih kecil, menunjukkan kenaikan dari 0,001 menjadi 0,04% dari total populasi. Cakupan pelayanan rujukan untuk masyarakat miskin meningkat bertahap dari 0,19% pada 2020 menjadi 5,76% pada 2024. Secara umum, indikator layanan kesehatan dasar di Luwu Timur mengalami perbaikan signifikan terutama dalam cakupan layanan, pencegahan penyakit, dan akses kelompok rentan. Namun demikian, peningkatan angka kematian ibu dan anak, serta belum meratanya rasio fasilitas kesehatan dan tenaga medis, menjadi tantangan utama yang perlu segera ditindaklanjuti untuk memastikan kualitas kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan. Berikut capaian kinerja penyelenggaraan urusan kesehatan Kabupaten Luwu Timur sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2. 133 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan
Tahun 2020 - 2024

NO	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Layanan Urusan Wajib Dasar						
	Kesehatan						
1	Rasio daya tampung rumah sakit terhadap jumlah penduduk	%	0,00091	0,00097	0,0010	0,00091	0,00095
2	Persentase rumah sakit rujukan tingkat Kabupaten/kota yang terakreditasi	%	100	100	100	100	100
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan Kesehatan ibu hamil	%	88,34	94,05	92,81	95,73	95,73
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	92,76	99,63	99,9	99,96	99,84
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	%	96,23	98,8	98,21	98,23	98,12
6	Cakupan pelayanan Kesehatan balita sesuai standar	%	69,31	94,88	93,34	92,02	93,86
7	Persentase anak usia Pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	%	59,57	79,84	95,74	100	100
8	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining Kesehatan sesuai standar	%	100	40,01	69,18	100	63,35
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining Kesehatan sesuai standar	%	71,84	84,07	80,29	83,25	97,36
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	%	100	17,35	91,2	100	78,67
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan Kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	55,58	100	100	100
12	Persentase OGDJ berat yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	%	100	53,24	100	100	100
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	100	100	100	100
14	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan	%	100	100	100	100	100

NO	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
	deteksi dini HIV sesuai standar						
15	Angka kematian bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Jiwa	8,16	9,56	10,24	13,44	14,12
16	Angka kelangsungan hidup bayi	Jiwa	91,85	990,44	989,76	986,56	985,88
17	Angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup	Jiwa	0,72	9,93	11,81	15,07	15,3
18	Angka kematian neonatal per 1000 kelahiran hidup	Jiwa	4,61	7,35	6,86	11,01	11,06
19	Angka kematian ibu per 100,000 kelahiran hidup	Jiwa	108,74	147,09	133,3	122,22	141,21
20	Rasio posyandu per satuan balita	1/1000	11,03	11,33	11,59	12,54	11,39
21	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	1/1000	0,33	0,35	0,36	0,54	0,53
22	Rasio rumah sakit per satuan penduduk	1/1000	0,007	0,006	0,006	0,006	0,006
23	Rasio dokter per satuan penduduk	Jumlah	14,24	15,42	16,34	18,5	19,62
24	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	1/1000	33,16	30,49	25,81	29,67	30,06
25	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Jiwa	35,88	82,7	69,50	60,69	74,52
26	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga anjangn yang memiliki kompetensi kebidanan	Jiwa	92,76	93,51	91,33	88,63	82,04
27	Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Jiwa	88,98	94,49	96,85	98	95
28	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	Jiwa	100	100	100	100	100
29	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	Jiwa	96,85	91,73	94,60	91,3	79,8
30	Non polio AFP rate per 100,000 penduduk	Kasus	4,45	1,73	1,20	3,31	3,5
31	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	Jiwa	7,64	20,78	39,27	52,08	52,45
32	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Jiwa	100	100	100	100	100
33	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	%	0,00011	0,65	0,6	0	0,3
34	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	Kasus	67,09	76,1	88,52	94	75
35	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati	Kasus	97,74	97,47	96,33	98	95,5

NO	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
	dan sembuh dalam program DOTS						
36	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Jiwa	100	100	100	100	100
37	Penderita diare yang ditangani	Jiwa	99,79	50,37	114,55	139,27	32,7
38	Angka kejadian Malaria	Jiwa	0	<1%	<1%	<1%	<1%
39	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	Jiwa	<0,013	0,001	0,001	0,038	0,04
40	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	0,19	4,8	4,92	5,21	5,76
41	Cakupan kunjungan bayi	%	88,52	97,96	100,15	98,03	96,09
42	Cakupan puskesmas	%	154,55	163,6	163,6	163,6	163,6
43	Cakupan pembantu puskesmas	%	57,48	57,48	57,48	103,91	103,91
44	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	%	88,34	91,61	86,55	84,64	93,14
45	Cakupan pelayanan nifas	%	92,71	93,13	91,26	88,13	99,13
46	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	46,78	55,89	69,55	44,35	63
47	Cakupan pelayanan anak balita	%	66,39	94,15	91,8	90,82	93,97
48	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 bulan keluarga miskin	1/100	39,4	92,1	80,09	80,09	92,3
49	Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	%	0	78,29	95,74	100	100
50	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	%	74,3	99,29	83,08	80,06	92,48
51	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	%	100	100	100	100	100
52	Cakupan Desa /Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Tahun 2025

C. Urusan Pekerjaan Umum

Capaian indikator bidang pekerjaan umum dan penataan ruang di Kabupaten Luwu Timur selama periode 2020–2024 menunjukkan perkembangan yang bervariasi. Di satu sisi, terdapat peningkatan akses layanan dasar infrastruktur, namun di sisi lain, kualitas dan kemantapan beberapa infrastruktur penting mengalami penurunan. Pada sektor jalan, tingkat kemantapan jalan kabupaten sempat meningkat tajam dari 40% pada 2020 menjadi 70,58% di 2022, namun justru

menurun drastis ke 36,92% pada 2024. Hal yang sama terjadi pada proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, yang menyusut dari 39,18% (2021) menjadi hanya 30,47% (2024). Begitu pula dengan persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (dengan kecepatan >40 km/jam) yang mengalami penurunan dari 40% menjadi 30,47% dalam lima tahun terakhir. Ketersediaan fasilitas pendukung jalan, seperti trotoar dan drainase, juga stagnan dan masih sangat rendah, yaitu hanya sekitar 0,113% di 2024. Sementara itu, pada aspek pengelolaan air dan sanitasi, capaian menunjukkan perbaikan yang signifikan. Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik meningkat drastis dari 0% pada 2020 menjadi 99,14% di 2024. Persentase rumah tinggal bersanitasi juga terus meningkat dari 97,37% ke 98,92%, dan kondisi drainase yang baik mengalami kenaikan dari 83,61% menjadi 94,26%. Meski demikian, frekuensi terjadinya genangan air menunjukkan tren memburuk, dengan capaian yang menurun dari 82,85% (2020) ke 73,6% (2024), mengindikasikan masih adanya titik rawan banjir atau drainase yang kurang optimal di wilayah tertentu. Pada sektor irigasi, rasio jaringan irigasi meningkat dari 7,482 menjadi 12,803 selama lima tahun, dan irigasi dalam kondisi baik mencapai puncak di 2023 (56,21%) sebelum sedikit menurun ke 50,91% pada 2024. Akses air minum layak pun terus meningkat meskipun relatif lambat, dari 57,17% pada 2020 menjadi 61,52% pada 2024, dengan pencapaian serupa untuk akses berkelanjutan di wilayah perkotaan dan perdesaan. Dalam aspek pengelolaan sampah, fasilitas pengurangan sampah di wilayah perkotaan mengalami dinamika, sempat hilang sama sekali pada 2021, namun kembali meningkat menjadi 13 unit pada 2024. Dari sisi penataan ruang, rasio ruang terbuka hijau (RTH) meningkat secara perlahan dari 0,0026 menjadi 0,0029, dan capaian luasan RTH publik sempat mencapai 26,37% (2023) namun kembali turun drastis ke 2,75% pada 2024, yang menunjukkan tantangan dalam mempertahankan atau merealisasikan kebijakan ruang hijau secara konsisten. Rasio bangunan ber-IMB (Izin Mendirikan Bangunan) menunjukkan perbaikan kecil dari 0,13 ke 0,146, menandakan peningkatan ketaatan terhadap regulasi pembangunan. Namun demikian, tingkat ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) justru menurun tajam dari 81,63% pada 2020 menjadi hanya sekitar 40% sejak 2021 hingga 2024, menandakan lemahnya pengawasan atau rendahnya penegakan aturan dalam pemanfaatan ruang. Secara umum, capaian pekerjaan umum menunjukkan kemajuan pada aspek layanan sanitasi, irigasi, dan pengolahan limbah, namun kondisi jalan, ruang terbuka hijau, dan tata ruang masih menghadapi tantangan serius yang perlu dibenahi melalui penguatan regulasi, perencanaan teknis, serta pengawasan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di daerah. Berikut capaian kinerja penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Luwu Timur sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2. 134 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2020 – 2024

NO	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Layanan Urusan Wajib Dasar						
	Pekerjaan Umum						
1	Tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota	%	40	70,57	70,58	36,34	36,92

NO	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
2	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	50,72	53,92	55,89	56,21	50,38
3	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	n/a	93,22	98,06	98,48	99,14
4	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	0,4	39,18	34,12	29,82	30,47
5	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	%	0,00626	0,0062	0,0062	0,0071	0,007
6	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	%	40	39,18	34,12	29,82	30,47
7	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	%	0,133	0,134	0,134	0,113	0,113
8	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	97,37	97,91	98,06	98,48	98,92
9	Persentase drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	83,61	84,02	84,21	87,53	94,256
10	Tidak terjadi genangan 2 kali satahun	%	82,85	81,6	79,28	75,61	73,6
11	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	50,65	54	55,97	56,21	50,91
12	Rasio Jaringan Irigasi	Angka	7,482	12,124	12,654	12,693	12,803
13	Persentase penduduk berakses air minum	%	57,17	58,7	60,67	61,2	61,52
14	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	%	57,17	58,7	60,67	61,2	61,52
15	Tersedianya Fasilitas Pengurangan Sampah diperkotaan	Unit	16	0	5	6	13
	Penataan Ruang:						
1	Rasio Ruangan terbuka hijau per satuan luas wilaya ber HPL / HGB	Angka	0,0026	0,0026	0,0028	0,0028	0,0029
2	Luasan RTH Publik sebesar 20% dari luas	%	0,256	0	16,44	26,37	2,75

NO	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
	wilayah Kota / Kawasan Perkotaan						
3	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	Angka	0,13	0,14	0,142	0,143	0,146
4	Ketaatan terhadap RTRW	%	81,63	39,8	39,94	39,95	40,089

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025

D. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Capaian kinerja di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman Kabupaten Luwu Timur pada periode 2020–2024 menunjukkan kemajuan signifikan dalam beberapa indikator, meskipun beberapa capaian lainnya menunjukkan fluktuasi yang perlu dicermati lebih lanjut. Sepanjang lima tahun terakhir, penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana selalu tercapai 100%, menunjukkan konsistensi dan keseriusan pemerintah daerah dalam merespons kebutuhan mendesak pasca-bencana. Selain itu, rasio rumah layak huni juga menunjukkan tren positif, meningkat dari hanya 0,175% pada 2020 menjadi 19,90% di 2024. Sejalan dengan itu, cakupan ketersediaan rumah layak huni juga mengalami pertumbuhan dari 86,65% menjadi 92,19%, dan rasio permukiman layak huni naik dari 0,757 ke 0,997. Namun demikian, cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau menunjukkan penurunan drastis dari 67,35% pada 2022 menjadi hanya 13,79% di 2023 dan sedikit membaik ke 18,81% di 2024. Ini mengindikasikan bahwa meskipun jumlah rumah layak huni meningkat, keterjangkauannya oleh masyarakat berpenghasilan rendah masih menjadi tantangan besar. Dari sisi penataan kawasan, capaian persentase pemukiman yang tertata meningkat secara konsisten, dari 75,74% pada 2020 menjadi hampir menyentuh angka sempurna, yakni 99,66% di 2024. Persentase lingkungan pemukiman kumuh relatif terkendali di angka 0,04–0,05%, namun luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan justru mengalami lonjakan signifikan pada 2024 hingga 6,91%, dari hanya 2,32% pada tahun sebelumnya. Hal serupa terjadi pada proporsi rumah tangga kumuh perkotaan, yang naik tajam dari 13,13% menjadi 42,69% dalam satu tahun terakhir. Indikator lain seperti jumlah perumahan yang sudah dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) sempat mencapai 90 unit pada 2022–2023, namun menurun drastis ke 44 unit pada 2024. Meski begitu, cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU tetap stabil, sedikit meningkat dari 67,72% ke 70,97% selama lima tahun. Secara umum, sektor ini menunjukkan kemajuan signifikan dalam penyediaan rumah dan penataan lingkungan permukiman, namun masih menghadapi tantangan serius dalam mengurangi rumah tangga kumuh perkotaan serta memastikan keterjangkauan rumah layak huni. Perlu strategi yang lebih integratif untuk menyeimbangkan antara peningkatan fisik dan daya akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan aman. Berikut capaian kinerja penyelenggaraan urusan perumahan rakyat dan Kawasan permukiman Kabupaten Luwu Timur sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2. 135 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2020 – 2024

NO	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Layanan Urusan Wajib Dasar						
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100
2	Persentase Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha di Kabupaten/kota yang ditangani	%	2,24	0,07	2,71	1,33	45,37
3	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (prasaran, Sarana dan Utilitas Umum)	%	0	89	90	90	44
4	Rasio rumah layak huni	%	0,175	18,3	19,00	19,00	19,90
5	Rasio permukiman layak huni	%	0,757	0,93	0,948	0,954	0,997
6	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	86,65	87,5	89,05	89,28	92,19
7	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	%	58,12	61,33	67,35	13,79	18,81
8	Persentase pemukiman yang tertata	%	75,74	93,37	94,78	95,44	99,66
9	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	%	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05
10	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	%	2,24	0,07	2,71	2,32	6,91
11	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	%	13,35	12,5	12,03	13,13	42,69
12	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU	%	67,72	70,08	70,87	70,87	70,97

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2025

E. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Selama lima tahun terakhir, hampir seluruh indikator menunjukkan capaian maksimal dan stabil. Gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (trantibun) berhasil diselesaikan 100% setiap tahun, begitu pula dengan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, serta layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana yang juga selalu tercapai 100%. Penegakan Perda dan Perkada menunjukkan peningkatan dari 84,61% pada 2020 menjadi 100% sejak 2021. Pelayanan informasi rawan bencana sempat menurun pada 2021 (88,23%) dan 2023 (91,46%), namun kembali mencapai 100% pada 2024. Meski demikian, masih terdapat tantangan, terutama pada pelayanan kebakaran. Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran sempat nol pada 2021 dan baru meningkat bertahap hingga 79,75% pada 2024. Hal ini sejalan dengan response time penanganan kebakaran yang masih rendah, yakni hanya 10,97% di 2024, meskipun naik dari 0% pada 2021. Cakupan petugas Linmas cenderung stagnan dan menurun dari 9,13% (2020) menjadi 7,26% (2024). Sementara itu, tingkat

penyelesaian pelanggaran K3 tetap terjaga di angka 100% setiap tahun. Secara keseluruhan, sektor ini menunjukkan kinerja yang baik dalam penegakan hukum dan layanan kebencanaan, namun perlu perbaikan signifikan dalam pelayanan kebakaran dan peningkatan jumlah petugas Linmas untuk memastikan kesiapsiagaan yang merata. Berikut capaian kinerja penyelenggaraan urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Luwu Timur sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2. 136 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020 – 2024

NO	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Layanan Urusan Wajib Dasar						
	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat						
1	Persentase gangguan trantibun yang dapat diselesaiakn	%	100	100	100	100	100
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	84,61	100	100	100	100
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	88,23	92,16	91,46	100
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	100	100	100
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	100	100
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	n/a	81,57	75,36	79,75
7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	%	91,18	n/a	8,76	12,25	10,97
8	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	%	9,13	7,16	7,34	7,31	7,26
9	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman,keindahan	%	100	100	100	100	100
10	Persentase Penegakan PERDA	%	84,61	99,9	100	100	100

Sumber : SatPol PP, Damkar,BPBD Tahun 2025

F. Urusan Sosial

Selama lima tahun terakhir, penanganan korban bencana alam dan sosial menunjukkan performa optimal, dengan 100% korban terpenuhi kebutuhan dasarnya baik saat maupun setelah masa tanggap darurat, termasuk dalam pemberian bantuan sosial dan evakuasi menggunakan sarana lengkap. Capaian terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menunjukkan tren meningkat, meskipun fluktuatif. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial naik dari 40,78% (2020) ke 65,69% (2022), namun menurun menjadi 59,46% di 2024. Pola serupa juga terjadi pada indikator PMKS yang tertangani, yang mengalami

puncak pada 2022 (66,56%) sebelum menurun di dua tahun terakhir. Penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan-pengemis yang kebutuhan dasarnya terpenuhi di luar panti tetap konsisten 100% tiap tahun. Sementara itu, penerima jaminan sosial dari kelompok lanjut usia tidak potensial dan penyandang cacat fisik/mental sangat rendah, hanya sekitar 7–10%, menunjukkan perlunya peningkatan intervensi.Capaian ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan sosial di panti sosial sudah 100% sejak 2021, dan di WKBSM meningkat dari 70% (2020–2021) menjadi 83,33% pada 2023–2024. Secara keseluruhan, sektor sosial menunjukkan kinerja sangat baik dalam penanganan korban bencana dan penyediaan layanan dasar, namun masih perlu peningkatan dalam cakupan bantuan sosial untuk kelompok rentan dan PMKS, terutama yang belum terlayani secara memadai. Berikut capaian kinerja penyelenggaraan urusan Sosial Kabupaten Luwu Timur sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2. 137 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Sosial
Tahun 2020 – 2024

NO	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Layanan Urusan Wajib Dasar						
	Sosial						
1	Persentase korban bencana alam dan social yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100
2	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan social	%	40,78	54,59	65,69	56,59	59,46
3	Persentase PMKS yang tertangani	%	36,52	52,7	66,56	56,59	59,46
4	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	40,13	56,83	65,69	56,59	59,46
5	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan social	%	70	100	100	100	100
6	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	70	70	80	83,33	83,33
7	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100	100	100	100	100
8	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	100	100	100	100	100
9	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan social	%	100	7,72	9,13	9,97	9,57

NO	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
10	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar,anak terlantar, lanjt usia terlatar,dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	%	100	100	100	100	100
11	Persentase korban bencana alam dan social yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial P3A Tahun 2025

G. Urusan Tenaga Kerja

Selama lima tahun terakhir, pencapaian tenaga kerja bersertifikat kompetensi mengalami fluktuasi signifikan, dari 75,75% (2020) turun drastis di 2021 (12,70%) namun perlahan meningkat hingga 32,12% di 2024. Penyelesaian sengketa hubungan industrial melalui Perjanjian Bersama juga menunjukkan peningkatan, dari 8,82% (2020) menjadi 48,72% (2024), meskipun sempat sangat tinggi di 2022 (80,43%). Tingkat penempatan pencari kerja cenderung rendah dan fluktuatif, dengan capaian tertinggi di awal (45,87% pada 2020), lalu turun drastis di 2022 (15,57%) dan sedikit meningkat hingga 35,2% pada 2024. Meskipun begitu, seluruh pekerja/buruh secara konsisten 100% terdaftar dalam program Jamsostek. Seluruh indikator pelatihan tenaga kerja, baik berbasis kompetensi, masyarakat, maupun kewirausahaan menunjukkan pencapaian yang relatif baik. Pelatihan kewirausahaan dan masyarakat mencapai 100% tiap tahun, sementara pelatihan berbasis kompetensi tertinggi pada 2022 (85,38%) dan menurun menjadi 47,43% di 2024. Rasio lulusan perguruan tinggi mengalami peningkatan konsisten dari 483,81% (2020) menjadi 600,98% (2024). Namun, persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja layak masih sangat rendah, hanya naik dari 2,04% (2021) menjadi 6,9% (2024). Tingkat produktivitas tenaga kerja meningkat signifikan hingga 2023 namun kembali menurun pada 2024. Meskipun begitu, tidak ada perselisihan buruh terhadap kebijakan pemerintah daerah yang tercatat selama periode ini. Secara umum, capaian di sektor ketenagakerjaan menunjukkan komitmen tinggi dalam jaminan sosial dan pelatihan tenaga kerja, namun masih perlu penguatan di aspek penempatan kerja, sertifikasi kompetensi, dan penerapan sistem kerja layak di perusahaan. Berikut capaian kinerja penyelenggaraan urusan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2. 138 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Tenaga Kerja
Tahun 2020 – 2024

NO	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Layanan Urusan Wajib Non Dasar						
	Tenaga Kerja						
1	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	%	75,75	12,70	13,83	25	32,12

NO	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
2	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	Per 1000 perusahaan	22,51	17,01	30,07	20	26,21
3	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	8,82	12,00	80,43	36,67	48,72
4	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	45,87	39,26	15,57	29,01	35,2
5	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	%	100	100	100	100	100
6	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	%	0	0	0	0	0
7	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	75,75	72,22	85,38	81,94	47,43
8	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	%	100	100,00	100	100	100
9	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	100	100,00	100	100	100
10	Rasio lulusan S1/S2/S3	%	483,81	523,02	557,64	579,89	600,98
11	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	85,71	95,00	95	95	95
12	Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja	%	39,36	153.211.670,00	153.102.405	190.940.307	115.688.376
13	Persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB,LKS Bipartip,Strukturskala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	90	2,04	2,61	5,33	6,9
14	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negri) melalui mekanisme layananan antar kerja dalam wilayah kabupaten/ kota	%	45,8	39,26	15,57	29,01	35,2

Sumber : Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 2025

H. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penanganan terhadap anak korban kekerasan dan pemberian layanan bantuan hukum kepada perempuan dan anak korban kekerasan tercapai 100% secara konsisten selama lima tahun. Begitu pula dengan cakupan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih, serta penegakan hukum atas kasus kekerasan yang terus meningkat dan stabil sejak 2022. Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah cukup tinggi, meski sedikit menurun pada 2023–2024. Proporsi kursi perempuan di DPR terus mengalami peningkatan dari 6,6% (2020) menjadi 13% (2024), menunjukkan kemajuan representasi politik perempuan. Di sisi lain, partisipasi perempuan di lembaga swasta sempat menurun di 2022–2023 namun kembali meningkat pada 2024. Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terus menurun tajam hingga hampir nol pada 2024, menandakan keberhasilan upaya perlindungan. Peningkatan paling mencolok terjadi pada partisipasi angkatan kerja perempuan, dari hanya 12,23% di 2020 melonjak drastis hingga 94,99% pada 2024. Secara keseluruhan, sektor ini menunjukkan perbaikan signifikan dalam perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak, terutama pada aspek hukum, keadilan, dan peran aktif perempuan di ruang publik. Berikut capaian kinerja penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2. 139 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020 – 2024

NO	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
1	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	100	100	100	100	100
2	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	76,02	78,29	82,35	75,25	74,67
3	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	6,6	6,67	10	10	13
4	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	23,98	21,71	17,65	17,65	25,32
5	Rasio KDRT	%	0,03	0,037	0,027	0,007	0,00002
6	Partisipasi angkatan kerja Perempuan	%	12,23	21,33	30,01	53,75	94,99
7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	100	100	100
8	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasuskekerasan terhadap perempuan dan anak	%	100	76	100	100	100
9	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang	%	100	100	100	100	100

NO	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
	mendapatkan layanan bantuan hukum						

Sumber : Dinas Sosial P3A Tahun 2025

I. Urusan Pangan

Ketersediaan pangan utama menunjukkan tren penurunan dari 69,61% di tahun 2020 menjadi 55,56% pada 2024. Demikian juga dengan ketersediaan energi dan protein per kapita per hari yang anjlok tajam dari 3.258,86 gram di tahun 2020 ke kisaran sekitar 200-an gram pada tahun-tahun berikutnya, meskipun sedikit membaik pada 2024. Sementara itu, kegiatan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan baru mulai aktif pada tahun 2022 dan 2023 dengan capaian 66,66%, namun kembali nol pada 2024. Secara umum, kinerja urusan pangan mengindikasikan perlunya penguatan ketahanan dan pengendalian mutu pangan ke depan. Berikut capaian kinerja penyelenggaraan urusan Pangan Kabupaten Luwu Timur sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2. 140 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pangan
Tahun 2020 – 2024

NO	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Layanan Urusan Wajib Non Dasar						
	Pangan						
1	Persentase Ketersediaan pangan utama	%	69,61	71,61	63,44	55,5	55,56
2	Ketersediaan energi dan protein perkapita	Gram/ perkapita/ hari	3.258,86	213	213	208	238
3	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	n/a	n/a	66,66	66,66	n/a

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2025

J. Urusan Pertanahan

Persentase luas lahan bersertifikat mengalami peningkatan signifikan dari 39,65% pada tahun 2020 menjadi 60,81% di tahun 2024, mencerminkan kemajuan dalam legalisasi aset tanah. Sementara itu, penyelesaian kasus tanah negara dan izin lokasi konsisten mencapai 100% selama lima tahun terakhir, menunjukkan kinerja optimal dalam aspek penyelesaian administrasi pertanahan. Secara umum, kinerja urusan pertanahan menunjukkan kemajuan positif dan stabil, baik dari sisi legalitas lahan maupun penyelesaian kasus. Berikut capaian kinerja penyelenggaraan urusan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2. 141 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pertanahan
Tahun 2020 – 2024

NO	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Layanan Urusan Wajib Non Dasar						
	Pertanahan						
1	Persentase luas lahan bersertifikat	%	39,65	41,56	59,94	60,72	60,81

NO	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
2	Penyelesaian kasus tanah Negara	%	100	100	100	100	100
3	Penyelesaian izin lokasi	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2025

K. Urusan Lingkungan Hidup

Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) cenderung menurun dari 86,87 pada tahun 2020 menjadi 77,93 di tahun 2024. Indeks kualitas air, udara, dan tutupan lahan juga menunjukkan tren penurunan. Penyusunan dokumen strategis seperti RPPLH dan integrasinya dalam perencanaan belum terlaksana, sedangkan KLHS mulai diselenggarakan sejak 2021 dan meningkat menjadi dua kegiatan pada 2024. Dari sisi pengelolaan sampah, jumlah sampah yang ditangani meningkat setiap tahun, mencapai 32.108 ton pada 2024. Pengurangan sampah melalui 3R meningkat dari 5,34% menjadi 15,47%, dan cakupan area pelayanan serta sampah yang tertangani juga mengalami peningkatan signifikan. Namun, pengelolaan oleh swasta belum berjalan, terlihat dari nihilnya penerbitan dan kepatuhan izin pengelolaan sampah oleh pihak swasta. Secara keseluruhan, terdapat kemajuan di aspek pengelolaan sampah, namun penurunan kualitas lingkungan dan belum tersusunnya dokumen perencanaan strategis menjadi tantangan utama yang perlu segera diatasi. Berikut capaian kinerja penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2. 142 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2020 – 2024

NO	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Layanan Urusan Wajib Non Dasar						
	Lingkungan Hidup						
1	Indeks kulitas lingkungan hidup (IKLH) Kab/Kota	Nilai/Skor	86,87	74,51	79,71	80,09	77,93
2	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Ada/tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
3	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Ada/tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
4	Terselenggaranya KLHSuntuk K/R/P tingkat daerah provinsi	Ada/tidak ada	tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Air	Indeks	0	80,69	25,01	24,92	24,44
6	Hasil Pengukuruan	Indeks	0	97,62	38,18	38,87	37,2

NO	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Indeks kualitas Udara						
7	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Tutupan Lahan	Indeks	0	76,48	16,52	16,31	16,29
8	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	%	0	52	52	22	32
9	Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional	MHA	3	0	0	0	0
10	Timbulan sampah yang ditangani	Ton/tahun	22.535,10	27343,7	31380,23	31473,69	32108,67
11	Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	%	5,34	6,59	12,85	15,47	15,47
12	Persentase cakupan area pelayanan	%	0	30,6	30,06	30,06	30,06
13	Persentase jumlah sampah yang tertangani	%	51,51	55,76	71,46	71,52	71,28
14	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten /kota	Nilai TPA (Program Adipura) ≥ 71	0	0	1	1	1
15	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang di terbitkan	%	0	0	0	0	0
16	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap	%	0	0	0	0	0

NO	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
	peraturan perundang-undangan						

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025

L. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Cakupan perekaman dan penerbitan KTP elektronik konsisten tinggi, mencapai 99,99% pada 2024. Kepemilikan akta kelahiran juga mengalami peningkatan signifikan dari 84,61% (2020) menjadi 98,21% (2024), meskipun sempat turun di 2022. Pemanfaatan data kependudukan oleh OPD naik tajam dari 2,56% menjadi 80% dalam lima tahun. Rasio penduduk ber-KTP tetap stabil mendekati angka 1, dan rasio bayi berakte kelahiran berada di atas 0,9. Rasio pasangan berakte nikah meningkat dari 0,41 menjadi 0,61. Database kependudukan tingkat provinsi tersedia penuh dan KTP Nasional berbasis NIK telah diterapkan sejak awal periode. Cakupan KIA (Kartu Identitas Anak) menunjukkan tren positif, meningkat dari 15,52% pada 2020 menjadi 58,83% pada 2024. Secara umum, pelayanan administrasi kependudukan menunjukkan kemajuan signifikan, dengan perluasan akses dan pemanfaatan data antar sektor. Berikut capaian kinerja penyelenggaraan urusan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2. 143 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020 – 2024

NO	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Layanan Urusan Wajib Non Dasar						
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
1	Perekaman KTP elektronik	%	99,71	99,91	97,17	98,21	99,99
2	Kepemilikan akta kelahiran	%	84.61	99,6	94,83	97,58	98,21
3	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasrkan perjanjian kerja	%	2,56	15,38	53,85	60	80
4	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Rasio	1	0,99	0,97	0,98	0,99
5	Rasio bayi berakte kelahiran	Rasio	0,96	0,97	1	0,99	0,91
6	Rasio pasangan berakte nikah	Rasio	0,41	0,44	0,49	0,56	0,61
7	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada/ Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
8	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah/ belum	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
9	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	99,71	98,73	97,17	98,21	99,99
10	Cakupan penerbitan akta kelahiran	%	95,54	96,99	100	99,03	90,6
11	Persentase anak usia 01-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	15,52	34,87	39,86	52,79	58,83

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2025

M. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pengentasan desa tertinggal menunjukkan pencapaian luar biasa dengan peningkatan dari 4,88% (2021) menjadi 100% sejak 2022. Status desa mandiri juga mengalami peningkatan signifikan dari 5,6% pada 2020 menjadi 29,6% di 2024. Cakupan sarana prasarana perkantoran desa terus meningkat dari 123 menjadi 125 unit. Jumlah kelompok binaan LPM dan PKK relatif stabil, masing-masing rata-rata 135 dan di atas 365 kelompok. LPM berprestasi meningkat dari 2% menjadi 20%, sedangkan PKK aktif dan Posyandu aktif tetap tinggi dan stabil di kisaran 140% dan 274%, mencerminkan tingginya partisipasi masyarakat. Namun, data LSM aktif belum tersedia. Secara keseluruhan, kinerja pemberdayaan masyarakat menunjukkan tren positif, terutama dalam peningkatan desa mandiri dan penguatan lembaga desa. Berikut capaian kinerja penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2. 144 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020 – 2024

NO	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Layanan Urusan Wajib Non Dasar						
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
1	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	93	4,88	100	100	100
2	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	5,6	5,69	8,06	19,2	29,6
3	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	%	123	124	124	125	125
4	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	%	135	135	135	135	135
5	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	%	365	365	365	375	370
6	Persentase LSM Aktif	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
7	Persentase LPM Berprestasi	%	2	10	10	20	20
8	Persentase PKK aktif	%	139	140	140	140	140
9	Persentase Posyandu aktif	%	273	274	274	274	274

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2025

N. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) relatif fluktuatif, dari 1,99% (2020) naik menjadi 2,63% (2024). Total Fertility Rate (TFR) turun dari 2,79% (2021–2022) menjadi 2,31% (2024), mencerminkan keberhasilan pengendalian kelahiran. Unmet need KB menurun signifikan dari 20,45% (2022) menjadi 8,14% (2024), seiring peningkatan penggunaan kontrasepsi modern (mCPR) dan MKJP yang tetap tinggi. Dukungan kebijakan dan kelembagaan ditunjukkan dengan tersusunnya Rancangan Induk Pengendalian Penduduk sejak 2022, serta tingginya peran perangkat daerah dalam Kampung KB dan penyediaan data mikro keluarga di seluruh desa. Capaian edukasi keluarga melalui BKB, BKR, dan BKL sempat tinggi namun menurun drastis pada 2023–2024, terutama BKL. Pemahaman pengasuhan anak dan pelaksanaan 8

fungsi keluarga terus meningkat, didukung oleh rata-rata usia kawin pertama wanita yang naik ke 22,5 tahun sejak 2022. Penyediaan alat dan obat kontrasepsi melampaui 100%, menunjukkan ketersediaan mencukupi. Seluruh faskes bekerja sama dengan BPJS untuk layanan KB, dan semua desa memiliki PPKBD aktif. Secara umum, program menunjukkan kinerja positif dalam pengendalian kuantitas penduduk, meskipun beberapa indikator kelembagaan dan edukasi remaja/keluarga menunjukkan tantangan keberlanjutan. Berikut capaian kinerja penyelenggaraan urusan pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2. 145 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020 – 2024

NO	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Layanan Urusan Wajib Non Dasar						
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	1,99	2,27	1,67	1,67	2,63
2	Total Fertility Rate (TFR)	%	2,21	2,79	2,79	2,31	2,31
3	Dokumen Rancangan Induk Pengendalian Penduduk dengan Lima Aspek	Dok	0	-	Ada	ada	Ada
4	Persentase Sektor tersosialisasi konsep pembangunan berwawasan kependudukan dan alat ukurnya (IPBK/ Indeks pembangunan berwawasan kependudukan)	%	0	100	100	100	0
5	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	%	56,25	32,14	57	57	57
6	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	%	100	0	0	100	100
7	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	Perda/ perkada	1	1	1	0	0
8	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi	Sektor	4	4	4	4	4

NO	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
	penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan						
9	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	Kerjasama	1	1	2	6	3
10	Rata-rata jumlah anak per keluarga	%	2,04	1,7	1,7	1,72	1,72
11	Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	%	72,47	69,95	66,37	71,15	71,34
12	Angka Kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1000 pereempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	%	67,7	35,41	35,41	30,6	30,6
13	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Istrinya di bawah 20 tahun	%	0	1,21	0,98	0,98	0,41
14	Ratio Akseptor KB	%	72,47	69,95	69,94	71,38	71,34
15	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	15,61	16,73	20,45	11,37	8,14
16	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	24,98	37,3	34,24	33,84	37,1
17	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	%	37,98	42,96	50,66	40,53	40,17
18	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	79,9	82,3	83,15	66,87	43,63
19	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	%	85,33	85,76	86,38	47,34	30,3
20	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	%	81,19	81,52	82,15	6,32	13,17
21	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	%	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09
22	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	%	436,36	445,45	445,45	436,36	472,7
23	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan	%	100	100	100	100	100

NO	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
	pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk						
24	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	%	0,86	0,85	0,88	0,99	35,05
25	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	%	100	100	100	100	100
26	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	113,76	109,87	132,28	228,05	195
27	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	%	100	100	100	100	100
28	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	%	0	100	100	100	100
29	Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	%	0	0	0	0	0
30	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	%	71,13	76,98	78,27	81,81	88,54
31	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	%	21,1	22,41	37,15	24,35	29,35
32	Rata-rata usia kawin pertama wanita	%	19	20	22,5	22,5	22,5
33	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	%	0,0058	0,043	0,041	0,051	0,051
34	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (mCPR)	%	72,47	56,9	62,86	71,15	70,65

NO	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
35	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi	%	15,61	18,43	11,37	11,38	8,14

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025

O. Urusan Perhubungan

Jumlah arus penumpang angkutan umum menunjukkan tren fluktuatif, dari 290.241 orang (2020) naik ke puncak 390.518 (2022), lalu turun menjadi 350.306 (2024). Jumlah orang/barang yang terangkut mencapai puncaknya pada 2022 sebesar 645.603 sebelum menurun ke 482.300 (2024). Rasio izin trayek masih sangat rendah dan tidak stabil, menurun kembali menjadi 0,01% di 2024 setelah mencapai 0,085% pada 2022. Jumlah kendaraan uji KIR meningkat dari 2.640 (2020) menjadi 3.130 (2023), lalu turun ke 2.710 (2024). Jumlah pelabuhan, bandara, dan terminal stabil di angka 15–16 unit. Persentase layanan angkutan darat serta kepemilikan KIR cenderung rendah dan menurun, menandakan perlunya peningkatan regulasi dan kepatuhan armada. Pemasangan rambu-rambu mencapai 100% pada 2020, 2022–2024, namun nihil pada 2021. Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan juga menurun drastis dari 67,31% (2020) menjadi 17,42% (2024), menunjukkan tekanan infrastruktur jalan terhadap jumlah kendaraan yang meningkat. Secara umum, sektor perhubungan mengalami dinamika dalam volume layanan dan tantangan pada aspek legalitas dan infrastruktur kendaraan. Berikut capaian kinerja penyelenggaraan urusan Perhubungan Kabupaten Luwu Timur sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2. 146 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Tahun 2020 – 2024

NO	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Layanan Urusan Wajib Non Dasar						
	Perhubungan						
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Orang	290.241	259.991	390.518	346.142	350.306
2	Rasio ijin trayek	%	0,011	0,043	0,085	0,011	0,01
3	Jumlah uji kir angkutan umum	Kendaraan	2640	2547	2757	3130	2710
4	Jumlah Pelabuhan Laut/ Udara/ Terminal Bis	Unit	15	15	16	16	16
5	Persentase Layanan angkutan darat	%	0,183	0,117	0,115	0,118	0,12
6	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	%	5,95	9,52	4,93	1,04	1,12
7	Pemasangaan Rambu –rambu	%	100	0	100	100	100
8	Rasio panjang jalan perjumlah kendaraan	%	67,31	17,007	19,819	25,34	17,42
9	Jumlah orang/barang yang	Org,brg	544.037	399.958	645.603	476.959	482.300

NO	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
	terangkut angkutan umum						
10	jumlah orang/ barang melalui dermaga/ bendara/ terminal per tahun	Org,brg	392.819	399.958	645.603	476.959	482.300

Sumber : Dinas Perhubungan Tahun 2025

P. Urusan Komunikasi dan Informatika

Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon relatif tinggi dan stabil, berkisar antara 85,14% hingga 91,83%, dengan sedikit penurunan di tahun-tahun akhir. Akses internet rumah tangga menunjukkan tren meningkat, dari 53,44% (2020) menjadi 73,51% (2024), mencerminkan peningkatan konektivitas digital. Namun, data tentang kepemilikan komputer pribadi hanya tercatat pada 2020 sebesar 85,14%, tanpa data lanjutan pada tahun-tahun berikutnya. Berikut capaian kinerja penyelenggaraan urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Timur sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2. 147 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 – 2024

NO	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Layanan Urusan Wajib Non Dasar						
	Komunikasi dan Informatika						
1	Persentasi penduduk yang menggunakan HP/telpon	%	85,14	91,83	89,51	85,16	87,03
2	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	%	53,44	64,4	65,55	69,15	73,51
3	proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	%	85,14	n/a	n/a	n/a	n/a

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025

Q. Urusan Koperasi,Usaha Kecil,dan Menengah

Persentase koperasi aktif menunjukkan tren positif, naik dari 75,75% (2020) menjadi 79,19% (2023–2024). Seluruh UKM non BPR/LKM dan BPR/LKM tercatat aktif 100% selama lima tahun berturut-turut. Sementara itu, usaha mikro dan kecil juga mengalami peningkatan, dari 95,28% (2020) menjadi 99,67% pada 2024, mencerminkan keberlanjutan dan pertumbuhan sektor usaha kecil di daerah. Berikut capaian kinerja penyelenggaraan urusan Koperasi,Usaha Kecil,dan Menengah Kabupaten Luwu Timur sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2. 148 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Koperasi,Usaha Kecil,dan Menengah Tahun 2020 – 2024

NO	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Layanan Urusan Wajib Non Dasar						
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah						
1	Persentase Koperasi aktif	%	75,75	0,7647	77,33	79,19	79,19
2	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	%	100	100	100	100	100
3	persentase BPR/LKM aktif	%	100	100	100	100	100

4	Persentase Usaha Mikro dan kecil	%	95,28	98,01	99,91	99,64	99,67

Sumber : Dinas Perdagangan,Koperasi,perindustrian,UMKM Tahun 2025

R. Urusan Penanaman Modal

Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) meningkat signifikan dari 26 perusahaan (2020) menjadi 176 perusahaan pada 2024. Namun, nilai investasi nasional mengalami fluktuasi, dari Rp3,82 triliun (2020) turun menjadi Rp3,33 triliun (2024). Rasio daya serap tenaga kerja cenderung menurun tajam dari 278,9% (2020) menjadi 73,21% (2024). Nilai realisasi PMDN juga menunjukkan dinamika, dengan capaian tertinggi pada 2020 (Rp1,51 triliun) dan kembali meningkat pada 2024 sebesar Rp397,51 miliar. Berikut capaian kinerja penyelenggaraan urusan Penanaman Modal Kabupaten Luwu Timur sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2. 149 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal Tahun 2020 – 2024

NO	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Layanan Urusan Wajib Non Dasar						
	Penanaman Modal						
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Perusahaan	26	46	85	78	176
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional PMDN/PMA	Rupiah	3.822.080.000.000	4.171.741.535.430	4.092.099.248.242	4.024.437.259.150	3.327.337.640.056
3	Rasio Daya serap Tenaga Kerja	%	278,9	455,3	243.38	171.01	73.21
4	Kenaikan Penurunan Nilai realisasi PMDN(Milyar rupiah)	Rupiah	1.511.201.000.000	38	331.98	304.37	397.51

Sumber : Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Tahun 2025

S. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Jumlah organisasi kepemudaan dan sosial sempat tidak tercatat pada 2021–2022, namun kembali meningkat menjadi 63 organisasi pada 2024. Persentase organisasi pemuda yang aktif juga mengalami peningkatan signifikan dari 40,54% (2020) menjadi 90% (2024). Persentase wirausaha muda sempat tertinggi di 2021 (60%) lalu berfluktuasi, mencapai 43,47% pada 2024. Cakupan pembinaan olahraga naik tajam dari 0% (2020) menjadi 100% sejak 2023. Namun, cakupan pelatih bersertifikat menurun dari 40% (2020) menjadi hanya 15% di 2024. Sementara itu, cakupan pembinaan atlet muda mencapai puncak 100% pada 2022, namun menurun di tahun berikutnya. Jumlah atlet berprestasi dan prestasi olahraga menunjukkan fluktuasi, dengan capaian tertinggi pada 2023 yaitu 76 atlet dan 213 prestasi. Berikut capaian kinerja penyelenggaraan urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2. 150 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2020 – 2024

NO	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Layanan Urusan Wajib Non Dasar						
	Kepemudaan dan Olahraga						

NO	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Jumlah	74	0	0	50	63
2	Persentase organisasi Pemuda yang aktif	%	40,54	42,69	42,7	50	90
3	persentase wirausaha muda	%	19	60	46,43	35,71	43,47
4	Cakupan pembinaan olaraga	%	0	8	74,07	100	100
5	Cakupan pelatih yang bersertifikat	%	40	26,14	11,76	0	15
6	Cakupan pembinaan atlet muda	%	0	0	100	32,2	31,77
7	Jumlah atlet berprestasi	Orang	30	74	21	76	53
8	Jumlah Prestasi Olahraga	Buah	0	75	197	213	105

Sumber : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Tahun 2025

T. Urusan Statistik

Selama lima tahun terakhir, Kabupaten Luwu Timur secara konsisten telah menyediakan sistem data dan statistik yang terintegrasi. Selain itu, publikasi penting seperti *Buku "Kabupaten dalam Angka"* dan *Buku "PDRB"* juga diterbitkan setiap tahun tanpa terputus sejak 2020 hingga 2024. Hal ini menunjukkan komitmen daerah dalam menyediakan data statistik yang berkelanjutan dan dapat diakses publik. Berikut capaian kinerja penyelenggaraan urusan Statistik Kabupaten Luwu Timur sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2. 151 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Statistik
Tahun 2020 – 2024

NO	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Layanan Urusan Wajib Non Dasar						
	Statistik						
1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada
2	Buku "Kabupaten dalam Angka"	Ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada
3	Buku "PDRB"	Ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada

Sumber : Dinas Komunikasi dan InformatikaTahun 2025

U. Urusan Persandian

Selama lima tahun terakhir, seluruh perangkat daerah di Kabupaten Luwu Timur secara konsisten telah menggunakan sandi dalam komunikasi kedinasan, dengan capaian 100% pada setiap tahunnya. Hal ini mencerminkan komitmen yang kuat terhadap keamanan informasi dan komunikasi pemerintahan. Berikut capaian kinerja penyelenggaraan urusan Persandian Kabupaten Luwu Timur sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2. 152 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Persandian
Tahun 2020 – 2024

NO	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Layanan Urusan Wajib Non Dasar						
	Persandian						
1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025

V. Urusan Kebudayaan

Pelestarian cagar budaya di Kabupaten Luwu Timur menunjukkan peningkatan dengan persentase pelestarian mencapai 100% sejak 2022. Penyelenggaraan festival seni dan budaya mulai diadakan sejak 2022 dan konsisten dilaksanakan empat kali per tahun pada 2023 dan 2024. Capaian pelestarian benda, situs, dan kawasan cagar budaya bervariasi, sementara karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi stabil pada 48 unit sejak 2021. Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu juga meningkat, meskipun fluktuatif, dengan capaian 8 unit pada 2023 dan 2024. Berikut capaian kinerja penyelenggaraan urusan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2. 153 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan
Tahun 2020 – 2024

NO	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Layanan Urusan Wajib Non Dasar						
	Kebudayaan						
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	45	n/a	100	100	100
2	Penyelenggaraan Festival seni dan budaya	Kali	0	0	1	4	4
3	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	15	28	8,3	16	10
4	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Unit	47	48	48	48	48
5	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Unit	3	29	4	8	8

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025

W. Urusan Perpustakaan

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat di Kabupaten Luwu Timur menunjukkan tren meningkat signifikan dari 53,62% pada 2020 menjadi 88% pada 2024. Jumlah koleksi judul buku terus bertambah dari 9.946 judul pada 2020 menjadi 16.314 judul pada 2024. Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan mengalami fluktuasi, dengan angka tertinggi tercatat pada 2023 sebanyak 22.527 orang. Rasio perpustakaan per satuan penduduk relatif stabil, sedangkan jumlah pustakawan bersertifikat tetap lima orang sejak 2022. Cakupan koleksi buku perpustakaan sempat mencapai 54,14% pada 2021 dan sedikit menurun di tahun-tahun berikutnya. Berikut capaian kinerja penyelenggaraan urusan Perpustakaan Kabupaten Luwu Timur sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2. 154 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan
Tahun 2020 – 2024

NO	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Layanan Urusan Wajib Non Dasar						
	Perpustakaan						
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	%	53,62	0	70,95	86,37	88
2	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	158	0,67	1,26	1,802	0,93
3	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	%	0,39	54,14	53,05	53,03	52,52
4	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	%	1,11	1,11	2,24	1,13	1,21
5	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	Orang	11.962	8,082	15,451	22,527	12,122
6	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Judul	9.946	11.695	13.262	14361	16314
7	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	%	100	3	5	5	5

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025

X. Urusan Kearsipan

Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku mengalami fluktuasi signifikan, dari 87,18% pada 2020 turun drastis menjadi 12,82% di 2021, lalu meningkat tajam hingga 100% pada 2023, namun kembali menjadi 0% pada 2024. Sementara itu, jumlah peningkatan SDM pengelola kearsipan meningkat tajam di 2023 sebanyak 700 orang, meskipun pada 2024 kembali turun menjadi 4 orang. Berikut capaian kinerja penyelenggaraan urusan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2. 155 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kearsipan
Tahun 2020 - 2024

NO	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Layanan Urusan Wajib Non Dasar						
	Kearsipan						
1	Persentase Perangkat Daerah yg mengelola arsip secara baku	%	87,18	12,82	95,12	100	n/a
2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Orang	4	85	40	700	4

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025

Y. Urusan Pariwisata

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB masih nol sepanjang 2020–2024, namun kontribusinya terhadap PAD mengalami peningkatan dari 0,41% pada 2020

menjadi 1,31% di 2024. Jumlah kunjungan wisata menunjukkan tren naik, dari 32.457 kunjungan pada 2020 menjadi puncaknya 1.220,71 ribu di 2023, meskipun menurun pada 2024. Lama kunjungan wisata stabil selama lima tahun, rata-rata tiga hari. PAD dari sektor pariwisata sempat nol di 2021–2023, namun meningkat menjadi 2,47 pada 2024. Berikut capaian kinerja penyelenggaraan urusan Pariwisata Kabupaten Luwu Timur sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2. 156 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pariwisata
Tahun 2020 – 2024

NO	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Pariwisata						
1	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
2	Konstribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%s	0,41	1,27	1,12	1,18	1,31
3	Kunjungan wisata	orang	32.457	123,3	939,45	1220,71	100,2
4	Lama kunjungan wisata	Hari/ kunjungan	3	3	3	3	3
5	PAD sektor pariwisata	%	0,41	n/a	n/a	n/a	2,47

Sumber : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Tahun 2025

Z. Urusan Pertanian

Kontribusi sektor pertanian dan perkebunan terhadap PDRB mengalami fluktuasi, dengan sektor pertanian mencapai 1,25% di 2024 dan sektor perkebunan tanaman keras meningkat dari 0,74% pada 2020 menjadi 12,68% di 2024. Sektor palawija memberikan kontribusi sebesar 21,93% di 2022, namun menurun menjadi 5,91% pada 2024. Produktivitas padi atau pangan lokal lainnya per hektar berfluktuasi dari 7,1 ton/ha pada 2020 menjadi 6,54 ton/ha di 2024. Cakupan pembinaan kelompok tani meningkat dari 0% di 2022 menjadi 23,97% pada 2023 dan 2024. Berikut capaian kinerja penyelenggaraan urusan Pertanian Kabupaten Luwu Timur sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2. 157 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pertanian
Tahun 2020-2024

NO	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Pertanian						
1	Kontribusi Sektor pertanian atau perkebunan terhadap PDRB	%	13,5	14,74	12,9	12,12	16,42
2	Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) terhadap PDRB (Tanaman Pangan)	%	3,82	3,82	3,61	2,92	3,15
3	Kontribusi Sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB (Tahunan dan Semusim)	%	13,50	14,74	12,90	12,68	16,42
4	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Ton/ha	7,01	6,85	5,48	6,7	6,54
5	Cakupan bina kelompok petani	%	58,15	n/a	n/a	23,97	23,97

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2025

a. Urusan Perdagangan

Nilai ekspor bersih perdagangan menunjukkan tren meningkat dari Rp773,51 juta pada tahun 2020 menjadi Rp1,31 miliar pada tahun 2024. Sementara itu, cakupan pembinaan terhadap kelompok pedagang atau usaha informal juga mengalami peningkatan signifikan, dari 29,02% pada 2020 menjadi 68,07% pada 2023 dan bertahan di angka yang sama hingga 2024. Berikut capaian kinerja penyelenggaraan urusan Perdagangan Kabupaten Luwu Timur sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2. 158 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perdagangan Tahun 2020-2024

NO	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Layanan Urusan Pilihan						
	Perdagangan						
1	Ekspor Bersih Perdagangan	Rp	773.511.973,67	919.980.854	1.251.398.446	1.251.398.446	1.313.160.356,70
2	Cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informal	%	29,02	20,08	59,17	68,07	68,07

Sumber : Dinas Koperasi Perdagangan Perindustrian dan UMKM Tahun 2025

b. Urusan Perindustrian

Cakupan pembinaan kelompok pengrajin di Kabupaten Luwu Timur mengalami fluktuasi selama lima tahun terakhir, dengan capaian tertinggi 20,08% pada 2021 dan berada di angka 7,07% pada 2024. Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri berdasarkan RPIP sempat mencapai 56% pada 2022–2023 namun menurun menjadi 9,51% di 2024. Meski demikian, informasi industri tetap tersedia secara lengkap dan terkini sejak tahun 2020. Berikut capaian kinerja penyelenggaraan urusan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur :

Tabel 2. 159 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perindustrian Tahun 2020-2024

NO	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Layanan Urusan Pilihan						
	Perindustrian						
1	Cakupan bina kelompok pengrajin	%	7,04	20,08	6,1	7,02	7,07
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industry termasuk turunan indikator pembangunan industry dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	%	50	n/a	56	56	9,51
3	Tersedianya informasi industry secara lengkap dan terkini	Ada/ Tidak ada	Ada	ada	ada	ada	ada

Sumber : Dinas Koperasi Perdagangan Perindustrian dan UMKM Tahun 2025

CC. Urusan Kelautan dan Perikanan

Selama periode 2020–2024, produksi perikanan di Kabupaten Luwu Timur relatif stabil dengan sedikit peningkatan pada 2023 (119,4) sebelum kembali menurun di 2024 (101,75). Konsumsi ikan konsisten berada di angka 100. Cakupan pembinaan kelompok nelayan meningkat signifikan dari 12,68% pada 2020 menjadi 35,38% di 2024, meskipun produksi perikanan dari kelompok nelayan mengalami penurunan tajam sejak 2022. Proporsi tangkapan ikan dalam batas biologis aman meningkat dari 1,25% di 2020 menjadi 87,02% di 2024. Sementara itu, rasio kawasan lindung perairan tetap rendah dan stagnan di angka 0,001 sejak 2021. Nilai Tukar Nelayan juga menunjukkan tren positif, mencapai 111,92 pada 2024. Berikut capaian kinerja penyelenggaraan urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu Timur sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2. 160 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 – 2024

NO	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Layanan Urusan Pilihan						
	Kelautan dan Perikanan						
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)	Ton	325,355	325,622	329,212	389,369,73	396,094,96
2	Produksi perikanan	%	101	100	101,6	119,4	101,75
3	Konsumsi ikan	Kg/ Kapita/ Tahun	100	100	100	100	100
4	Cakupan bina kelompok nelayan	%	12,68	16,79	26,66	29,41	35,38
5	Produksi perikanan kelompok nelayan	Ton/ Ha/ Tahun	37,58	42,04	3,11	3,75	2,64
6	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	%	83,33	83,33	83,33	86,12	87,02
7	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan territorial	%	0,23	0,001	0,001	0,001	0,001
8	Nilai Tukar Nelayan	%	105,05	100,37	103,92	103,93	111,92

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025

DD. Urusan Perencanaan

Selama periode 2020 hingga 2024, Kabupaten Luwu Timur menunjukkan tingkat konsistensi yang tinggi dalam perencanaan pembangunan. Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan daerah tercatat 97,61% pada 2020. Konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD serta RKPD ke dalam APBD tercapai 100% sejak 2021 hingga 2024. Seluruh dokumen perencanaan strategis seperti RPJPD, RPJMD, RKPD, dan RTRW telah tersedia dan ditetapkan melalui regulasi yang berlaku. Penjabaran konsistensi program RPJMD ke RKPD dan RKPD ke APBD juga telah dilaksanakan secara konsisten setiap tahun. Adapun kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW dinyatakan sesuai, meskipun pada 2023 dan 2024 telah ada revisi namun masih menunggu penetapan dalam bentuk Perda. Berikut capaian kinerja penyelenggaraan urusan Perencanaan Kabupaten Luwu Timur:

Tabel 2. 161 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2020 - 2024

NO	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Penunjang Urusan						
	Perencanaan Pembangunan						
1	Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	%	97,61	100	100	100	100
2	Persentase konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	%	97,29	100	100	100	100
3	Persentase konsistensi program RKPD kedalam APBD	%	93,15	100	100	100	100
4	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/ tidak	ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada/ tidak	ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada/ tidak	ada	Ada	Ada	Ada	Ada
7	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/ tidak	ada	Ada	Ada	Ada	Ada
8	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	Ada/ tidak	ada	Ada	Ada	Ada	Ada
9	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	Ada/ tidak	ada	Ada	Ada	Ada	Ada
10	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	Sesuai/ tidak sesuai	sesuai	Ada	Ada	Ada Tapi Belum ada Perda	Ada Tapi Belum ada Perda

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025

EE. Urusan Keuangan

Selama tahun 2020 hingga 2024, pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Luwu Timur menunjukkan konsistensi dan kinerja yang baik. Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan mengalami peningkatan dari 19,7% pada 2022 menjadi 22,21% di 2023, sebelum sedikit menurun ke 20,89% pada 2024. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan daerah secara konsisten memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama lima tahun berturut-turut. Persentase SILPA terhadap APBD menurun dari 1,72% pada 2020 menjadi 0,75% pada 2024, menandakan efisiensi pengelolaan anggaran. Belanja

pendidikan tetap di atas ambang batas minimal 20% di sebagian besar tahun, sementara belanja kesehatan konsisten melampaui ambang 10%, dengan puncak tertinggi 25,04% pada 2021. Distribusi belanja daerah juga menunjukkan keseimbangan, di mana belanja operasi rata-rata berada di atas 63%, belanja modal sekitar 17%, serta belanja tidak terduga dan transfer dijaga proporsinya secara stabil. Dana bagi hasil kabupaten/kota dan desa meningkat signifikan dari sekitar Rp17,26 miliar pada 2020 menjadi Rp24,99 miliar pada 2024. Penetapan APBD setiap tahunnya dilaksanakan tepat waktu, dengan perubahan APBD ditetapkan melalui Perda setiap bulan Oktober, kecuali tahun 2024 yang ditetapkan pada bulan September. Hal ini mencerminkan tata kelola fiskal daerah yang disiplin dan akuntabel. Berikut capaian kinerja penyelenggaraan urusan Keuangan Kabupaten Luwu Timur sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2. 162 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Keuangan
Tahun 2020 - 2024

NO	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Penunjang Urusan						
	Keuangan						
1	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	%	28,37	29,95	29,21	29,24	30,89
2	Rasio PAD	%	n/a	n/a	19,7	22,21	20,89
3	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4	Persentase SILPA	%	1,72	-53	-147	12	40
5	Persentase Program / kegiatan yang tidak terlaksana	%	0	0	0	0	0
6	Persentase Belanja Pendidikan (20%)	%	20,54	119	108	111	110
7	Persentase Belanja Kesehatan (10%)	%	20,71	210	192	184	193,06
8	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung.						
	a. Belanja Operasi terhadap total Belanja	%	n/a	114	132	130	132
	b. Belanja Modal terhadap Total Belanja	%	n/a	117	110	123	114
	c. Belanja Tidak Terduga terhadap Total Belanja	%	n/a	70	40	21	30
	d. Belanja Transfer terhadap Total Belanja	%	n/a	118	112	102	104
9	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	Rp	17.262.101.969	19.722.629.773	18.735.918.471	20.599.397.923	24.997.866.029
10	Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat waktu (perda Nomor 9 Tahun 2020 tentang perubahan APBD Tanggal 19	Tepat Waktu (Perda Nomor 12 Tahun 2021Tentang Perubahan APBD Tanggal 13	Tepat Waktu (Perda Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perubahan APBD Tanggal 17	Tepat waktu (Perda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan APBD Tanggal 16	Tepat waktu (Perda Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan APBD Tanggal 20

NO	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
			Oktober 2020	Oktober 2021	Oktober 2022)	Oktober 2023)	September 2024)

Sumber : Dinas Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025

FF. Urusan Kepegawaian

Selama periode 2020–2024, Kabupaten Luwu Timur menunjukkan peningkatan dalam manajemen kepegawaian dan pengembangan kompetensi aparatur. Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal sempat menurun dari 82,61% pada 2020 menjadi sekitar 5–7% pada 2021–2024, namun persentase ASN yang mengikuti pelatihan struktural tetap terjaga pada angka 100% sejak 2021. Jumlah jabatan pimpinan tinggi meningkat secara bertahap dari 27 orang pada 2020 menjadi 33 orang pada 2024. Jabatan administrasi sempat mencapai puncaknya di tahun 2022 dengan 944 jabatan, lalu menurun menjadi 861 pada 2024. Sementara itu, jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu menunjukkan tren naik yang signifikan, dari 2.572 orang pada 2020 menjadi 4.392 orang pada 2024, mencerminkan pergeseran struktur birokrasi yang lebih mengedepankan jabatan fungsional. Berikut capaian kinerja penyelenggaraan urusan Kepegawaian Kabupaten Luwu Timur sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2. 163 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan Tahun 2020 – 2024

NO	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Penunjang Urusan						
	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan						
1	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	82,61	7,49	5,08	6,14	7,28
2	Persentase ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	88,07	100	100	100	100
3	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Org	27	30	31	32	33
4	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Org	787	817	944	937	861
5	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Org	2572	2757	2936	2826	4392

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Tahun 2025

GG. Urusan Penelitian dan Pengembangan

Selama periode 2020–2024, pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan di Kabupaten Luwu Timur menunjukkan fluktuasi, dengan capaian tertinggi sebesar 48,71% pada tahun 2020 dan terendah 25% pada 2021 dan 2023. Sementara itu, fasilitasi penerapan inovasi daerah kepada perangkat daerah mengalami peningkatan yang signifikan dari 24,4% pada 2021 menjadi puncaknya 73,17% pada 2023, meskipun menurun kembali ke 51,22% di tahun 2024. Capaian ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam mengembangkan budaya inovatif di lingkungan birokrasi meski masih dihadapkan pada tantangan pemanfaatan hasil litbang secara optimal. Berikut capaian kinerja penyelenggaraan urusan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Luwu Timur sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2. 164 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2020 – 2024

NO	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Penunjang Urusan						
	Penelitian dan Pengembangan						
1	Persentase hasil peneltian dan pengembangan serta kajian yang dimanfaatkan	%	48,71	25	41,6	25	n/a
2	Persentase Perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	%	48,71	24,4	29,27	73,17	51,22

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025

HH. Urusan Pengawasan

Selama tahun 2020 hingga 2024, tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Kabupaten Luwu Timur konsisten berada pada level 3, yang menunjukkan sistem pengawasan internal telah berjalan pada tingkat terdokumentasi dan terstandarisasi. Persentase tindak lanjut temuan mengalami peningkatan signifikan dari 23,16% di tahun 2020 menjadi 94% pada 2024, mencerminkan perbaikan dalam respons terhadap hasil audit. Selama lima tahun berturut-turut, persentase pelanggaran pegawai tercatat 0%, menunjukkan kepatuhan disiplin yang tinggi. Jumlah temuan BPK menurun dari 25 temuan di tahun 2021 menjadi hanya 15 temuan pada 2024, menandakan perbaikan kualitas pengelolaan keuangan daerah secara bertahap.

Tabel 2. 165 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengawasan dan Pengembangan Tahun 2020 – 2024

NO	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Penunjang Urusan						
	Pengawasan						
1	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	level	3	3	3	3	3
2	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	level	3	3	3	3	3
3	Persentase tindak lanjut temuan	%	23,16	88	90	92	94
4	Persentase pelanggaran pegawai	%	0	0	0	0	0
5	Jumlah temuan BPK	%	8	25	22	20	15

Sumber : Inspektorat Tahun 2025

II. Urusan Sekretariat Dewan

Selama periode 2020 hingga 2024, seluruh alat kelengkapan DPRD Kabupaten Luwu Timur secara konsisten telah memiliki rencana kerja tahunan yang tersedia dan terdokumentasi dengan baik. Selain itu, program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda, dan fungsi anggaran juga telah tersusun dan terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD) maupun perencanaan tahunan (RKPD) setiap tahunnya. Program-program tersebut juga terintegrasi secara utuh ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Sekretariat DPRD (Setwan), menunjukkan sinergi antara fungsi

legislatif dan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Berikut capaian kinerja penyelenggaraan urusan Sekretariat Dewan Kabupaten Luwu Timur sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2. 166 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Sekretariat Dewan dan Pengembangan Tahun 2020 - 2024

NO	IKK OUTCOME	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Penunjang Urusan						
	Sekretariat Dewan						
1	Tersediahnya rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD Kabupaten/ Kota	Ada/ tidak	ada	ada	ada	ada	ada
2	Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan fungsi pembentukan Perda, dan fungsi Anggaran dalam dokumen rencana lima tahunan (RPJM) maupun Dokumen rencana tahunan RKPD	Ada/ tidak	ada	ada	ada	ada	ada
3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi Pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada/ tidak	ada	ada	ada	ada	ada

Sumber : Sekretariat DPRD Tahun 2025

2.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA INDIKATOR DAERAH

Analisis capaian dari indikator kinerja daerah yang ditetapkan pada RPJMD 2021-2026 Kabupaten Luwu Timur. Analisis kinerja dimaksud memuat target dan capaian yang telah dilaksanakan mulai tahun 2021 sampai pada pelaksanaan tahun 2024 sebagai tahapan tahun keempat pelaksanaan RPJMD tersebut. Analisis dilakukan membandingkan capaian dan target yang ditetapkan. Dengan memunculkan interpretasi untuk melihat ketercapaian dan kesesuian antara target dan capaian. Interpretasi tersebut adalah Ketika capaian lebih besar dari target yang diinterpretasikan melampaui (>), capaian sama dengan target yang diinterpretasikan sesuai (=), dan capaian lebih kecil dari target yang diinterpretasikan belum tercapai (<).

2.2.1 CAPAIAN KINERJA INDIKATOR DAERAH (IKD)

Capaian Kinerja Indikator Daerah (IKD) merupakan gambaran hasil pembangunan yang telah dicapai pemerintah daerah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan. IKD mencakup berbagai aspek pembangunan yang mencerminkan kondisi sosial, ekonomi, infrastruktur, tata kelola pemerintahan, serta lingkungan hidup di daerah. Melalui pengukuran IKD, dapat dilihat sejauh mana efektivitas program dan kegiatan pembangunan dalam menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah dan panjang. Capaian IKD yang positif menunjukkan adanya peningkatan kualitas hidup masyarakat dan kinerja pemerintah daerah yang baik, sementara capaian yang masih rendah menjadi dasar evaluasi dan perbaikan kebijakan agar pembangunan lebih tepat sasaran. Dengan demikian, IKD berfungsi tidak hanya sebagai alat monitoring dan evaluasi, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah ke depan.

Tabel 2. 167 Indikator Kinerja Daerah(IKD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 – 2024

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA			
			2021	2022	2023	2024
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi						
1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian					
1:01	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian					
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	-1,39	1,99	9,66	3,27
2	Laju inflasi	%	2,96	5,13	2,21	0,49
3	PDRB per kapita Berlaku	Juta	78,71	93,36	99,49	97,18
4	PDRB per kapita Konstan	Juta	53,34	53,73	58,11	59,2
5	Rasio Gini	Angka	0,396	0,394	0,393	0,35
6	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	%	93,06	93,19	93,07	93,45
7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	73,34	75,41	75,84	76,44
8	Angka melek huruf	%	93,59	92,71	92,87	97,26
9	Angka Rata-rata lama sekolah	Tahun	8,81	8,92	8,93	8,94
10	Angka usia harapan hidup	Tahun	70,63	74,08	74,32	74,55
11	Persentase balita gizi buruk	%	n/a	0,04	0,04	0,06
12	Prevalensi balita gizi kurang	%	n/a	1,8	1,6	1,8
13	Cakupan desa Siaga Aktif	%	100	100	100	100
14	Angka partisipasi angkatan kerja	%	161,182	161,47	157,3	162,431
15	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	73,14	71,51	69,25	70,18

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA			
			2021	2022	2023	2024
16	Tingkat pengangguran terbuka	%	4,96	4,48	5,42	4,58
17	Rasio penduduk yang bekerja	%	95,04	95,52	94,58	95,42
18	Laju Pertumbuhan PDB per Tenaga Kerja	%	n/a	n/a	n/a	n/a
19	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	%	n/a	0,65	0,73	0,75
20	Proporsi Tenaga Kerja yang berusaha Sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja	%	n/a	2,54	2,45	2,61
21	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga sejahtera I	%	n/a	n/a	n/a	n/a
22	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	85,03	85,17	85,24	86,32
23	Persentase PAD terhadap pendapatan	%	19,74	19,69	22,21	20,95
24	Opini BPK	Kategori	WTTP	WTP	WTP	WTP
25	Pencapaian skor pola pangan harapan (PPH)	Nilai/Skor	89,4	84,3	92	94
26	Penguatan cadangan pangan	Kg	n/a	3	3	3
27	Penanganan Daerah Rawan Pangan	%	n/a	77,23	82,91	88,54
28	Kontribusi Sektor Pertanian / Perkebunan terhadap PDRB	%	n/a	0,75	1	1,25
29	Kontribusi Sektor pertanian (Palawija)terhadap PDRB	%	n/a	21,93	5,85	5,91
30	Kontribusi Sektor Perkebunan(Tanaman Keras)Terhadap PDRB	%	n/a	12,52	12,6	12,68
31	**Produksi sektor perkebunan**					
	Kakao	ton	5659,4	3,627,63	18,538,01	3,470,04

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA			
			2021	2022	2023	2024
	Kelapa Sawit	ton	92606,73	90,935,00	84,233,39	51,800,83
	Lada	ton		21,335,20	21,335,20	3,228,46
32	Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB	%	43,99	50,03	50,3	44
33	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	%	n/a	n/a	n/a	Na
34	Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB	%	23,86	21,93	22,15	25,9
35	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	04,07	3,79	3,79	04,06
36	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	%	3,65	3,37	3,1	3,33
37	Pertumbuhan Industri	%	-0,54	-7,6	-8,01	7.4
ASPEK DAYA SAING DAERAH						
1	Pengeluaran Komsumsi Rumah Tangga per kapita	Rupiah	5,906,350	6,252,900	6,644,360	7,043,070
2	Nilai Tukar Petani	%	100,37	101,12	114,25	121,01
3	Persentase Pengeluaran Komsumsi Non Pangan Per Kapita	%	55,59	53,04	51,77	50,85
4	Persentase Desa Berstatus Swasembada terhadap Total desa	%	n/a	n/a	n/a	n/a
5	angka kriminalitas yang Tertangani	Kasus	6	12	12	4,525
ASPEK PELAYANAN UMUM						
	Layanan Urusan Wajib Dasar					
	Pendidikan					
	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)					

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA			
			2021	2022	2023	2024
1	Angka Partisipasi Kasar	%	49,31	56,62	60,45	67,04
	Angka Pendidikan yang ditamatkan					
2	APT SD/sederajat	%	n/a	110,02	110,03	105,63
3	APT SMP/sederajat	%	n/a	93,59	87,35	86,45
	Angka Partisipasi Murni					
4	Angka Partisipasi Murni (APM SD/MI/Paket A	%	93,07	99,65	97,08	99,1
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS/ Paket B	%	85,13	89,64	91,81	92,24
6	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	49,31	56,62	60,45	67,04
7	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	%	90,87	97,09	97,09	98,72
8	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	%	71	85,09	82,67	87,75
9	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belaum menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	100	93,94	93,94	100
	Angka Partisipasi Sekolah					
10	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	%	90,87	97,09	94,58	98,72
11	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTS/Paket B	%	1,42	82,67	84,73	87,75
	Angka Putus Sekolah :					
12	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,4	0,32	0	0,08

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA			
			2021	2022	2023	2024
13	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	1,42	1,12	0	0,43
	AngkaKelulusan:					
14	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	99,98	99,85	100	100
15	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	99,81	100	99	99,98
	Angka Melanjutkan (AM)					
16	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	92,76	94,53	95,68	98,62
17	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTS ke SMA/SMK/MA	%	n/a	n/a	n/a	n/a
	Fasilitas Pendidikan:					
18	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	73,35	74,45	77,32	80,15
19	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	%	80,36	81,40	81,89	83,24
20	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	%	48,46	49,46	50,27	50,13
21	rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	%	577	592	716	715
22	Rasio Guru/ murid perkelas rata-rata Sekolah Dasar	%	n/a	43,52	48,77	48
23	Rasio Guru Terhadap Murid Perkelas rata-rata	%	n/a	283,88	35,35	42,39
24	proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	%	88,35	87,85	92,69	95,87
25	angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun perepmpuan dan laki-laki	%	99,41	99,70	99,71	100

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA			
			2021	2022	2023	2024
26	penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%	n/a	**96,3**	94,96	95,99
27	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	84,09	98,00	98,30	95,82
	Kesehatan					
1	Rasio daya tampung rumah sakit terhadap jumlah penduduk	%	0,00097	0,0010	0,00091	0,00095
2	Persentase rumah sakit rujukan tingkat Kabupaten/kota yang terakreditasi	%	100	100	100	100
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan Kesehatan ibu hamil	%	94,05	92,81	95,73	95,73
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	99,63	99,9	99,96	99,84
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	%	98,8	98,21	98,23	98,12
6	Cakupan pelayanan Kesehatan balita sesuai standar	%	94,88	93,34	92,02	93,86
7	Persentase anak usia Pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	%	79,84	95,74	100	100
8	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining Kesehatan sesuai standar	%	40,01	69,18	100	63,35
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining Kesehatan sesuai standar	%	84,07	80,29	83,25	97,36
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	%	17,35	91,2	100	78,67
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan Kesehatan jiwa sesuai standar	%	55,58	100	100	100

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA			
			2021	2022	2023	2024
12	Persentase OGDJ berat yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	%	53,24	100	100	100
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	100	100	100
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100	100	100	100
15	Angka kematian bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Jiwa	9,56	10,24	13,44	14,12
16	Angka kelangsungan hidup bayi	Jiwa	990,44	989,76	986,56	985,88
17	Angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup	Jiwa	9,93	11,81	15,07	15,3
18	Angka kematian neonatal per 1000 kelahiran hidup	Jiwa	7,35	6,86	11,01	11,06
19	Angka kematian ibu per 100,000 kelahiran hidup	Jiwa	147,09	133,3	122,22	141,21
20	Rasio posyandu per satuan balita	1/1000	11,33	11,59	12,54	11,39
21	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	1/100000	0,35	0,36	0,54	0,53
22	Rasio rumah sakit per satuan penduduk	1/100000	0,006	0,006	0,006	0,006
23	Rasio dokter per satuan penduduk	Jumlah	15,42	16,34	18,5	19,62
24	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	1/100000	30,49	25,81	29,67	30,06
25	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Jiwa	82,7	69,50	60,69	74,52
26	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga anjangn yang memiliki kompetensi kebidanan	Jiwa	93,51	91,33	88,63	82,04
27	Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Jiwa	94,49	96,85	98	95

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA			
			2021	2022	2023	2024
28	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	Jiwa	100	100	100	100
29	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	Jiwa	91,73	94,60	91,3	79,8
30	Non polio AFP rate per 100,000 penduduk		1,73	1,20	3,31	3,5
31	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	Jiwa	20,78	39,27	52,08	52,45
32	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Jiwa	100	100	100	100
33	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100,000 penduduk)	%	0,65	0,6	0	0,3
34	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	Kasus	76,1	88,52	94	75
35	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	Kasus	97,47	96,33	98	95,5
36	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Jiwa	100	100	100	100
37	Penderita diare yang ditangani	Jiwa	50,37	114,55	139,27	32,7
38	Angka kejadian Malaria	Jiwa	<1%	<1%	<1%	<1%
39	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	Jiwa	0,001	0,001	0,038	0,04
40	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	4,8	4,92	5,21	5,76
41	Cakupan kunjungan bayi	%	97,96	100,15	98,03	96,09
42	Cakupan puskesmas	%	163,6	163,6	163,6	163,6
43	Cakupan pembantu puskesmas	%	57,48	57,48	103,91	103,91

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA			
			2021	2022	2023	2024
44	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	%	91,61	86,55	84,64	93,14
45	Cakupan pelayanan nifas	%	93,13	91,26	88,13	99,13
46	Cakupan anjang dengan komplikasi yang ditangani	%	55,89	69,55	44,35	63
47	Cakupan pelayanan anak balita	%	94,15	91,8	90,82	93,97
48	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 bulan keluarga miskin	1/100	92,1	80,09	80,09	92,3
49	Cakupan penjaringan anjangn siswa SD dan setingkat	%	78,29	95,74	100	100
50	Cakupan pelayanan anjangn dasar masyarakat miskin	%	99,29	83,08	80,06	92,48
51	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana anjangn (RS)	%	100	100	100	100
52	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	100	100	100	100
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
	Pekerjaan Umum					
1	Tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota	%	70,57	70,58	36,34	36,92
2	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	53,92	55,89	56,21	50,38
3	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	93,22	98,06	98,48	99,14
4	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	39,18	34,12	29,82	30,47
5	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	%	0,0062	0,0062	0,0071	0,007

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA			
			2021	2022	2023	2024
6	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	%	39,18	34,12	29,82	30,47
7	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	%	0,134	0,134	0,113	0,113
8	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	97,91	98,06	98,48	98,92
9	Persentase drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	84,02	84,21	87,53	94,256
10	Tidak terjadi genangan 2 kali satahun	%	81,6	79,28	75,61	73,6
11	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	54	55,97	56,21	50,91
12	Rasio Jaringan Irigasi	Angka	12,124	12,654	12,693	12,803
13	Persentase penduduk berakses air minum	%	58,7	60,67	61,2	61,52
14	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	%	58,7	60,67	61,2	61,52
15	Tersedianya Fasilitas Pengurangan Sampah diperkotaan	Unit	n/a	5	6	13
	Penataan Ruang:					
1	Rasio Ruangan terbuka hijau per satuan luas wilaya ber HPL / HGB	Angka	0,0026	0,0028	0,0028	0,0029
2	Luasan RTH Publik sebesar 20% dari luas wilayah Kota / Kawasan Perkotaan	%	n/a	16,44	26,37	2,75
3	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	Angka	0,14	142	143	146
4	Ketaatan terhadap RTRW	%	39,8	39,94	39,95	40,089
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA			
			2021	2022	2023	2024
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	100	100	100	100
2	Persentase Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten/kota yang ditangani	%	0,07	2,71	1,33	45,37
3	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (prasaran, Sarana dan Utilitas Umum)	%	89	90	90	44
4	Rasio rumah layak huni	%	18,3	19,00	19,00	19,90
5	Rasio permukiman layak huni	%	0,93	948	954	997
6	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	87,5	89,05	89,28	92,19
7	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	%	61,33	67,35	13,79	18,81
8	Persentase pemukiman yang tertata	%	93,37	94,78	95,44	99,66
9	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	%	0,04	0,04	0,04	0,05
10	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	%	0,07	2,71	2,32	6,91
11	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	%	12,5	12,03	13,13	42,69
12	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU	%	70,08	70,87	70,87	70,97
	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat					
1	Persentase gangguan trantibun yang dapat diselesaiakn	%	100	100	100	100
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100	100	100
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	88,23	92,16	91,46	100

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA			
			2021	2022	2023	2024
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	100	100
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	100
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	n/a	81,57	75,36	79,75
7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	%	n/a	8,76	12,25	10,97
8	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	%	7,16	7,34	7,31	7,26
9	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman,keindahan	%	100	100	100	100
10	Persentase Penegakan PERDA	%	99,90%	100	100	100
	Sosial					
1	Persentase korban bencana alam dan social yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	100
2	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan social	%	54,59	65,69	56,59	59,46
3	Persentase PMKS yang tertangani	%	52,7	66,56	56,59	59,46
4	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	56,83	65,69	56,59	59,46
5	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan social	%	100	100	100	100

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA			
			2021	2022	2023	2024
6	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	70	80	83,33	83,33
7	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100	100	100	100
8	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	100	100	100	100
9	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan social	%	7,72	9,13	9,97	9,57
10	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar,anak terlantar, lanjt usia terlatar,dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	%	100	100	100	100
11	Persentase korban bencana alam dan social yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	100
	Layanan Urusan Wajib Non Dasar					
	Tenaga Kerja					
1	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	%	12,70	13,83	25	32,12
2	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	Per 1000 perusahaan	17,01	30,07	20	26,21
3	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	12,00	80,43	36,67	48,72

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA			
			2021	2022	2023	2024
4	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	39,26	15,57	29,01	35,2
5	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	%	100,00	100	100	100
6	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	%	0	0	0	0
7	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	72,22	85,38	81,94	47,43
8	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	%	100,00	100	100	100
9	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	100,00	100	100	100
10	Rasio lulusan S1/S2/S3	%	523,02	557,64	579,89	600,98
11	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	95,00	95	95	95
12	Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja	%	153,211,670,00	153,102,405	190,940,307	115,688,376
13	Persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB,LKS Bipartip,Strukturskala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	02,04	2,61	5,33	6,9
14	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negri) melalui mekanisme layananan antar kerja dalam wilayah kabupaten /kota	%	39,26	15,57	29,01	35,2
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
1	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	100	100	100	100

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA			
			2021	2022	2023	2024
2	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	78,29	82,35	75,25	74,67
3	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	6,67	10	10	13
4	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	21,71	17,65	17,65	25,32
5	Rasio KDRT	%	37	27	7	2
6	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	21,33	30,01	53,75	94,99
7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	100	100
8	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasuskekerasan terhadap perempuan dan anak	%	76	100	100	100
9	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hokum	%	100	100	100	100
	Pangan					
1	Persentase Ketersediaan pangan utama	%	71,61	63,44	55,5	55,56
2	Ketersediaan energi dan protein perkapita	Gram/perkapita/hari	213	213	208	238
3	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	n/a	66,66	66,66	0
	Pertanahan					
1	Persentase luas lahan bersertifikat	%	41,56	59,94	60,72	60,81
2	Penyelesaian kasus tanah Negara	%	100	100	100	100
3	Penyelesaian izin lokasi	%	100	100	100	100

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA			
			2021	2022	2023	2024
	Lingkungan Hidup					
1	Indeks kulitas lingkungan hidup (IKLH) Kab/Kota	Nilai/Skor	74,51	79,71	80,09	77,93
2	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Ada / tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
3	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Ada / tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
4	Terselenggaranya KLHSuntuk K/R/P tingkat daerah provinsi	Ada / tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Air	Indeks	55	65,88	66,25	65
6	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Udara	Indeks	92,11	94,27	95,97	91,85
7	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Tutupan Lahan	Indeks	75,45	75,45	74,46	74,40
8	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	%	52	52	22	32
9	Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional	Jumlah MHA dan Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional yang di verifikasi	0	0	0	0
10	Timbulan sampah yang ditangani	%	27343,7	31380,23	31473,69	32108,67
11	Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	%	6,59	12,85	15,47	15,47
12	Persentase cakupan area pelayanan	%	30,6	30,06	30,06	30,06

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA			
			2021	2022	2023	2024
13	Persentase jumlah sampah yang tertangani	%	55,76	71,46	71,52	71,28
14	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	Nilai TPA (Program Adipura) ≥ 71	0	1	1	1
15	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang di terbitkan	%	0	0	0	0
16	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	%	0	0	0	0
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Siipil					
1	Perekaman KTP elektronik	%	99,91	97,17	98,21	99,99
2	Kepemilikan akta kelahiran	%	99,6	94,83	97,58	98,21
3	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasrkan perjanjian kerja	%	15,38	53,85	60	80
4	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Rasio	0,99	0,97	0,98	0,99
5	Rasio bayi berakte kelahiran	Rasio	0,97	1	0,99	0,91
6	Rasio pasangan berakte nikah	Rasio	0,44	0,49	0,56	0,61
7	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada/Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada
8	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah/belum	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
9	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	98,73	97,17	98,21	99,99
10	Cakupan penerbitan akta kelahiran	%	96,99	100	99,03	90,6
11	Persentase anak usia 01-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	34,87	39,86	52,79	58,83
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA			
			2021	2022	2023	2024
1	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	4,88	100	100	100
2	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	5,69	08,06	19,2	29,6
3	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	%	124	124	125	125
4	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	%	135	135	135	135
5	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	%	365	365	375	370
6	Persentase LSM Aktif	%				
7	Persentase LPM Berprestasi	%	10	10	20	20
8	Persentase PKK aktif	%	140	140	140	140
9	Persentase Posyandu aktif	%	274	274	274	274
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	2,27	1,67	1,67	2,63
2	Total Fertility Rate (TFR)	%	2,79	2,79	2,31	2,31
3	Dokumen Rancangan Induk Pengendalian Penduduk dengan Lima Aspek	Dok	-	ada	ada	ada
4	Persentase Sektor tersosialisasi konsep pembangunan berwawasan kependudukan dan alat ukurnya (IPBK/ Indeks pembangunan berwawasan kependudukan)	%	100	100	100	n/a
5	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	%	32,14	57	57	57

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA			
			2021	2022	2023	2024
6	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	%	0	0	100	100
7	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	Perda/perkada	1	1	0	0
8	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	Sektor	4	4	4	4
9	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	Kerjasama	1	2	6	3
10	Rata-rata jumlah anak per keluarga	%	1,7	1,7	1,72	1,72
11	Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	%	69,95	66,37	71,15	71,34
12	Angka Kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1000 pereempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	%	35,41	35,41	30,6	30,6
13	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Istrinya di bawah 20 tahun	%	1,21	0,98	0,98	0,41
14	Ratio Akseptor KB	%	69,95	69,94	71,38	71,34
15	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	16,73	20,45	11,37	8,14
16	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	37,3	34,24	33,84	37,1

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA			
			2021	2022	2023	2024
17	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	%	42,96	50,66	40,53	40,17
18	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	82,3	83,15	66,87	43,63
19	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	%	85,76	86,38	47,34	30,3
20	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	%	81,52	82,15	6,32	13,17
21	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	%	09,09	09,09	09,09	09,09
22	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	%	445,45	445,45	436,36	472,7
23	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	%	100	100	100	100
24	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	%	0,85	0,88	0,99	35,05
25	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	%	100	100	100	100
26	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	109,87	132,28	228,05	195
27	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS	%	100	100	100	100

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA			
			2021	2022	2023	2024
	dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan					
28	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	%	100	100	100	100
29	Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	%	0	0	0	0
30	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	%	76,98	78,27	81,81	88,54
31	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	%	22,41	37,15	24,35	29,35
32	Rata-rata usia kawin pertama wanita	%	20	22,5	22,5	22,5
33	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	%	0,0043	0,0041	0,0051	0,0051
34	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (mCPR)	%	56,9	62,86	71,15	70,65
35	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi	%	18,43	11,37	11,38	8,14
	Perhubungan					
1	jumlah arus penumpang angkutan umum	Orang	259,991	390,518	346,142	350,306
2	Rasio ijin trayek	%	0,043	0,085	0,011	0,01
3	Jumlah uji kir angkutan umum	Kendaraan	2547	2757	3130	2710
4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	Unit	15	16	16	16
5	Persentase Layanan angkutan darat	%	0,117	0,115	0,118	0,12

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA			
			2021	2022	2023	2024
6	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	%	9,52	4,93	01,04	1,12
7	Pemasangaan Rambu –rambu	%	0	100	100	100
8	Rasio panjang jalan perjumlah kendaraan	%	17,007	19,819	25,34	17,42
9	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	Org,brg	399,958	645,603	476,959	482,300
10	jumlah orang/barang melalui dermaga/bendara/terminal per tahun	Org,brg	399,958	645,603	476,959	482,300
	Komunikasi dan Informatika					
1	Persentasi penduduk yang menggunakan HP/telpon	%	91,83	89,51	85,16	87,03
2	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	%	64,4	65,55	69,15	73,51
3	proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	%	n/a	n/a	n/a	n/a
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah					
1	Persentase Koperasi aktif	%	7,647	77,33	79,19	79,19
2	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	%	100	100	100	100
3	persentase BPR/LKM aktif	%	100	100	100	100
4	Persentase Usaha Mikro dan kecil	%	98,01	99,91	99,64	99,67
	Penanaman Modal					
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Perusahaan	46	85	78	176
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional PMDN/PMA	Rupiah	4,171,741,535,430	4,092,099,248,242	4,024,437,259,150	3,327,337,640,056

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA			
			2021	2022	2023	2024
3	Rasio Daya serap Tenaga Kerja	%	455,3	243,38	171,01	73,21
4	Kenaikan Penurunan Nilai realisasi PMDN(Milyar rupiah)	Rupiah	38	331,98	304,37	397,51
	Kepemudaan dan Olahraga					
1	Organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	jumlah	0	0	50	63
2	Persentase organisasi Pemuda yang aktif	%	42,69	42,7	50	90
3	persentase wirausaha muda	%	60	46,43	35,71	43,47
4	Cakupan pembinaan olaraga	%	8	74,07	100	100
5	Cakupan pelatih yang bersertifikat	%	26,14	11,76	0	15
6	Cakupan pembinaan atlet muda	%	0	100	32,2	31,77
7	Jumlah atlet berprestasi	Orang	74	21	76	53
8	Jumlah Prestasi Olahraga	Medali	75	197	213	105
	Statistik					
1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada/tidak	ada	ada	ada	ada
2	Buku "Kabupaten dalam Angka"	Ada/tidak	ada	ada	ada	ada
3	Buku "PDRB"	Ada/tidak	ada	ada	ada	ada
	Persandian					
1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	%	100	100	100	100

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA			
			2021	2022	2023	2024
	Kebudayaan					
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	**%**		100	100	100
2	Penyelenggaraan Festival seni dan budaya	Kali	0	1	4	4
3	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	28	8,3	16	10
4	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Unit	48	48	48	48
5	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Unit	29	4	8	8
	Perpustakaan					
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	%	0	70,95	86,37	88
2	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	0,67	1,26	1,802	0,93
3	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	%	54,14	53,05	53,03	52,52
4	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	%	1,11	2,24	1,13	1,21
5	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	Orang	8,082	15,451	22,527	12,122
6	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Judul	11,695	13,262	14361	16314
7	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	%	3	5	5	5
	Kearsipan					
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	12,82	95,12	100	n/a
2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Orang	85	40	700	4
	Layanan Urusan Pilihan					

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA			
			2021	2022	2023	2024
	Pariwisata					
1	Kontribusi sector pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	n/a	n/a	n/a	n/a
2	Konstribusi sector pariwisata terhadap PAD	%	1,27	1,12	1,18	1,31
3	Kunjungan wisata	Orang	123,3	939,45	1220,71	100,2
4	Lama kunjungan wisata	Hari	3	3	3	3
5	PAD sektor pariwisata	%	n/a	n/a	n/a	2,47
	Pertanian					
1	Kontribusi Sektor pertanian atau perkebunan terhadap PDRB	%	14,74	12,9	12,12	16,42
2	Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) terhadap PDRB (Tanaman Pangan)	%	3,61	2,92	3,15	3,53
3	Kontribusi Sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB (Tahunan dan semusim)	%	14,74	12,90	12,68	16,42
4	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Ton/Ha	6,85	5,48	6,7	6,54
5	Cakupan bina kelompok petani	%	n/a	n/a	23,97	23,97
	Perdagangan					
1	Ekspor Bersih Perdagangan	Rupiah	919,980,854	1,251,398,446	1,251,398,446	1,313,160,356,70
2	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	20,08	59,17	68,07	68,07
	Perindustrian					
1	Cakupan bina kelompok pengrajin	%	20,08	6,1	07,02	07,07

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA			
			2021	2022	2023	2024
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industry termasuk turunan indicator pembangunan industry dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	%	n/a	56	56	9,51
3	Tersedianya informasi industry secara lengkap dan terkini	Ada/Tida ada	ada	ada	ada	ada
	Kelautan dan Perikanan					
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)	**Ton**	325,622	329,212	389,369,73	396,094,96
2	Produksi perikanan	%	100	101,6	119,4	101,75
3	Konsumsi ikan	%	100	100	100	100
4	Cakupan bina kelompok nelayan	%	16,79	26,66	29,41	35,38
5	Produksi perikanan kelompok nelayan	%	3,11	3,11	3,75	2,64
6	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	%	83,33	83,33	86,12	87,02
7	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	%	0,001	0,001	0,001	0,001
8	Nilai Tukar Nelayan	%	100.37	103.92	103.93	111.92
	Penunjang Urusan					
	Perencanaan Pembangunan					
1	Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	100
2	Persentase konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	%	100	100	100	100

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA			
			2021	2022	2023	2024
3	Persentase konsistensi program RKPD kedalam APBD	%	100	100	100	100
4	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada
6	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada
7	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada
8	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada
9	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada
10	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	Sesuai/tidak sesuai	Ada	Ada	Ada Tapi Belum ada Perda	Ada Tapi Belum ada Perda
	Keuangan					
1	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	%	29,95	29,21	29,24	30,89
2	Rasio PAD	%	n/a	19,7	22,21	20,95
3	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP
4	Persentase SILPA	%	-53	-147	12	40
5	Persentase Program / kegiatan yang tidak terlaksana	%	0	0	0	0
6	Persentase Belanja Pendidikan (20%)	%	119	108	111	110

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA			
			2021	2022	2023	2024
7	Persentase Belanja Kesehatan (10%)	%	210	192	184	193,06
9	**Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung,**					
	a, Belanja Operasi terhadap total Belanja	%	114	132	130	132
	b, Belanja Modal terhadap Total Belanja	%	117	110	123	114
	c, Belanja Tidak Terduga terhadap Total Belanja	%	70	40	21	30
	d, Belanja Transfer terhadap Total Belanja	%	118	112	102	104
10	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	Rupiah	19,722,629,773	18,735,918,471	20,599,397,923	24,997,866,029
11	Penetapan APBD	Tepat Waktu/Tidak	Tepat Waktu (Perda Nomor 12 Tahun 2021Tentang Perubahan APBD Tanggal 13 Oktober 2021	Tepat Waktu (Perda Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perubahan APBD Tanggal 17 Oktober 2022)	Tepat waktu (Perda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan APBD Tanggal 16 Oktober 2023)	Tepat waktu (Perda Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan APBD Tanggal 20 September 2024)
	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan					
1	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	7,49	05,08	6,14	7,28
2	Persentase ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	100	100	100	100
3	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Orang	30	31	32	33
4	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Orang	817	944	937	861
5	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Orang	2757	2936	2826	4392

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA			
			2021	2022	2023	2024
	Penelitian dan Pengembangan					
1	Persentase hasil peneltian dan pengembangan serta kajian yang dimanfaatkan	%	100	100	100	100
2	Persentase Implementasi rencana kelitbangan	%	100	100	100	100
3	Persentase Perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah,	%	0	31,71	75,61	51,22
4	Persentase kebijakan Inovasi yang diterapkan di daerah	%	0	100	100	95,24

Sumber : Bapperida,Data di olah Tahun 2025

2.2.2 KINERJA STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan gambaran capaian pemerintah daerah dalam memenuhi hak dasar masyarakat melalui penyediaan layanan publik yang wajib diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. SPM menjadi tolok ukur minimal kualitas pelayanan yang harus diterima oleh setiap warga negara, khususnya pada bidang pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta sosial. Capaian kinerja SPM tidak hanya mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah memenuhi kewajiban konstitusionalnya, tetapi juga menunjukkan kemampuan manajerial dalam mengelola sumber daya dan anggaran untuk memberikan layanan yang merata dan berkualitas. Oleh karena itu, peningkatan kinerja SPM sangat penting karena berimplikasi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan kepercayaan publik, serta menjadi dasar dalam pengukuran akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah

Tabel 2. 168 Kinerja Standar Pelayanan Minimal(SPM) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 – 2024

No	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Target Nasional	Satuan	Capaian					Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
				2020	2021	2022	2023	2024	
	PENDIDIKAN								
1	**Pendidikan Dasar**								
	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI,SMP/MTs)	100	%	88,19	89,95	92,93	63,87	82,13	Belum Tercapai
2	**Pendidikan Kesetaraan**								
	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpatisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100	%	51,98	67,07	-	98,68	3,9	Belum Tercapai
3	**Pendidikan Anak Usia Dini**								
	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	100	%	62,73	61,4	56,62	100	60,88	Belum Tercapai
	KESEHATAN								
1	**Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil**								
	Jumlah Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan K4 di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta	100	%	88,34	94,05	92,81	95,73	96,88	Belum Tercapai
2	**Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin**								
	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas Kesehatan	100	%	92,76	99,63	99,9	99,96	99,84	Belum Tercapai
3	**Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir**								
	Jumlah bayi baru lahir usia 0 – 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar	100	%	96,23	98,8	98,21	98,23	98,12	Belum Tercapai
4	**Pelayanan Kesehatan Balita**								
	Jumlah balita 0 – 59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan belita sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100	%	69,31	94,88	93,34	92,02	93,86	Belum Tercapai

No	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Target Nasional	Satuan	Capaian					Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
				2020	2021	2022	2023	2024	
5	**Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar**								
	Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan di satuan pendidikan dasar	100	%	-	79,84	95,74	100	100	Sesuai
6	**Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif**								
	Jumlah pengunjung usia 15-59 tahun mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100	%	23,5	40,01	67,15	100	63,35	Belum Tercapai
7	**Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut**								
	Jumlah pengunjung usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun	100	%	71,84	84,07	80,29	83,25	97,36	Belum Tercapai
8	**Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi**								
	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100	%	28,7	17,35	65,56	100	78,67	Belum Tercapai
9	**Pelayanan Kesehatan Penderita Diabeter Melitus**								
	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100	%	29,72	55,58	100	100	100	Sesuai
10	**Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat**								
	Jumlah ODGJ berat di kab/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100	%	41,97	52,93	64,95	100	100	Sesuai
11	**Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB**								
	Jumlah orang yang mendapatkan pelayana TB sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	100	%	100	100	100	100	100	Sesuai
12	**Pelayanan Kesehatan Orang denga Risiko Teninfeksi HIV**								
	Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu satu tahun	100	%	100	100	100	100	100	Sesuai
	PEKERJAAN UMUM								
1	**Penyediaan kebutuhan pokok Air minum**								

No	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Target Nasional	Satuan	Capaian					Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
				2020	2021	2022	2023	2024	
	(Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari).	100	%	89,41	58,65	93,2	100	100	Sesuai
	1). Pelayanan SPAM Jaringan Perpipaan	100	%	57,48					
	2). Pelayanan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	100	%	31,93					
2	**Penyediaan pengelolaan air limbah domestic**								
	(Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik)	100	%		93,21	100	100	100	Sesuai
	1.Penyediaan Pelayanan SPALD-S Akses Dasar	100	%	97,91					
	2. Penyediaan Pelayanan SPALD-S Akses aman	100	%	7,31					
	PERUMAHAN RAKYAT								
1	**Penyediaan & rehabiitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kabupaten**								
	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	%	-	-	100	100	100	Sesuai
2	**Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah**								
	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100	%	-	-	100	100	100	Sesuai
	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
1	**Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum**								
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100	%	100	100	100	100	100	Sesuai
2	**Pelayanan informasi rawan bencana**								
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	%	18,5	88,23	92,16	91,46	100	Sesuai
3	**Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana**								

No	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Target Nasional	Satuan	Capaian					Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
				2020	2021	2022	2023	2024	
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	%	14,41	100	100	100	100	Sesuai
4	**Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana**								
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	%	100	100	100	100	100	Sesuai
5	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran**								
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layananPenyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100	%	100	100	100	100	100	Sesuai
	SOSIAL								
1	**Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti**								
	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	%	95	86	100	100	100	Sesuai
2	**Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti**								
	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	%	50	100	100	100	100	Sesuai
3	**Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti**								
	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	%	97	90	98	98	98	Belum tercapai
4	**Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti**								
	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100	%	-	100	100	100	100	Sesuai
5	**Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana Kabupaten**								
	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100	%	184	84	100	100	100	Sesuai

Sumber: Bapperida data Diolah Tahun 2025

2.2.3 KINERJA TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SDGS)

Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan dengan memperhatikan dimensi sosial, ekonomi, lingkungan, serta tata kelola. Pencapaian kinerja SDGs menjadi ukuran sejauh mana program pembangunan daerah mampu mendukung target global yang telah disepakati, mulai dari pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penciptaan pekerjaan layak, pengurangan kesenjangan, hingga pelestarian lingkungan hidup. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip SDGs ke dalam perencanaan dan penganggaran, pemerintah daerah tidak hanya memastikan terpenuhinya kebutuhan masyarakat saat ini, tetapi juga menjamin keberlanjutan sumber daya untuk generasi mendatang. Oleh karena itu, kinerja SDGs dapat menjadi acuan penting dalam menilai efektivitas kebijakan pembangunan daerah sekaligus memperkuat kontribusi daerah terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan secara nasional.

Tabel 2. 169 Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2024

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	PILAR	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017) – ringkasan	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	Target 2024	Capaian 2024	KELOMPOK INDIKATOR
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	SOSIAL	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Menurun menjadi 7-8%	6,94	6,99	6,93	6,24	6,55	SS
			1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Meningkat menjadi 95%	88,52	1,33	1	99,01	68,97	SS
			1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Meningkat menjadi 62,4 juta pekerja formal; 3,5 juta pekerja informal	100	100	100	100	100	SS
			1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	Meningkat menjadi 17,12%	(blank)	(blank)	100	30	100	SS
			1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	Menurun menjadi 2,8 juta	(blank)	(blank)	(blank)	7,5	Na	BB
			1.4.1.(a)	Persentase perempuannn pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Meningkat menjadi 70%	93,2	99,9	99,96	94	99,88	SS
			1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	Meningkat menjadi 63%.	93,2	94,5	83,35	90	80,40	SS
			1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Meningkat menjadi 65%	69.95	66.37	71.15	72,5	71,34	SS
			1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Meningkat menjadi 100%	58.65	60.94	62,6	63,94	61,52	SB
			1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Meningkat menjadi 100%	77,49	77,49	98,48	63,94	98,92	SB
			1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat.	Meningkat menjadi 94,78%	93,07	99.65	98.73	102,65	99,10	SS
			1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat.	Meningkat menjadi 82,2%	73,93	89.64	92.75	107,83	92,24	SS
			1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	Meningkat menjadi 77,4%.	87,14	94,83	97,58	93,25	98,20	SS
			1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	Meningkat menjadi 100%	43,02	(blank)	(blank)	37,25	Na	SB

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	PILAR	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017) – ringkasan	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	Target 2024	Capaian 2024	KELOMPOK INDIKATOR
			1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Menurun	53,30	41,49	46,02	PM	37,03	SB
			1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	Meningkat menjadi 39 daerah	1,00	4,00	4,00	4,00	4,00	SS
			1.5.1.(e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	Menurun menjadi 118,6	202	194,8	152,28	202	133,38	BB
			1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Menurun	263500 0000	17227 35000	50331 84000	PM	2.260 .655. 000	SB
			1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Ada	0	1	2	0	0	SS
			2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	Menurun menjadi 17%	3,39	3,87	5,59	2,4	1261	SS
			2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Menurun	3,65	3,22	3,83	6,3	919	SB
			2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	Menurun menjadi 28%	3,96	3,28	1,09	7,3	3,75	SS
			2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Menurun	0,35	1,9	1,9	1,9	0,05	SS
			2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Menurun menjadi 28%	5,03	4,34	5,4	10,50	0,43	SS
			2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	Meningkat menjadi 50%	68.66	73,38	72,3	68	71,41	SS
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	SOSIAL	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	Menurun menjadi 306	147,09	133,31 /100.0 00 KH	122,22	100,64	141,21	SS
			3.1.2*	Proporsi perempuannn pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Meningkat menjadi 95%	93	100	88,63	94,5	100,00	SB
			3.1.2.(a)	Persentase perempuannn pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Meningkat menjadi 85 %	93,2	99,9	99.96	94	99,88	SS

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	PILAR	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017) – ringkasan	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	Target 2024	Capaian 2024	KELOMPOK INDIKATOR
			3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Menurun	0,37	1,52/1000 KH	1.02/1.000	0,72	15,3	SS
			3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Menurun	7,35	6,86/1000 KH	11,4	5,04	11,06	SB
			3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Menurun menjadi 24	9,56	10,28/1000 KH	14.87/1000 KH	7,75	14,12	SS
			3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Meningkat menjadi 95%	94	94,5	98,44	88	95	SS
			3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Menurun menjadi <0,5%	0,0068	0,0045	0,0373	0,01	0,01	SS
			3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Menurun menjadi 245	298	88,53	89,58	168	389	SB
			3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Menurun	4,26	18,15	21,61	<1	<1	SB
			3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.	Meningkat menjadi 300	11	11	11	11	11	SS
			3.3.4.(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	Meningkat	80	100	100	100	100	SS
			3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	Menurun	0	0	0	17,0	11,0	SS
			3.3.5.(a)	Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta.	Meningkat menjadi 34 provinsi	0	0	0	1,0	1,0	SS
			3.3.5.(b)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).	Meningkat menjadi 35.	1	1	1	1,0	1,0	SS
			3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	Menurun menjadi 5,4%	0,89	4,59	5,24	5,4	1,01	SS
			3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Menurun menjadi 24,3%	4,5	65,56	26,7	7,5	4,38	SB
			3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	Menurun	5,3	4,05	2,85	16	9,08	SS
			3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	Menurun menjadi angka 0,02%	PM	0	0	0	0	SS

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	PILAR	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017) – ringkasan	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	Target 2024	Capaian 2024	KELOMPOK INDIKATOR
			3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	Menurun	5,07	tidak tersedia data	tidak tersedia data	0,18	0,01	SB
			3.7.1*	Proporsi perempuannn usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	Meningkat menjadi 66%	69.95	66,37	35,41	72,5	Na	SB
			3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Meningkat menjadi 65%	56,9	66,37	71,15	59,7	71,34	SS
			3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	Meningkat menjadi 23,5%	37,3	34,24	33.84	40,81	36,74	SS
			3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuannn umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Menurun menjadi 38	35,41	35,41	30,6	25,6	35,41	SS
			3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	Menurun menjadi 2,28	2,79	2,79	2,31	2,47	2,31	SB
			3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Meningkat menjadi minimal 95%	98,07928169	95,48	96,26	97,5	97,29	SS
			3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Meningkat	100	100	90	100	100	SB
			3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Meningkat	PM	78	(blank)	3,97	4,35	SS
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	SOSIAL	4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	Meningkat	98.82	1	1	96,34	98,85	SS
			4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	Meningkat menjadi 84,2%	65,45	76,42	73,06	88,64	74,77	SB
			4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Meningkat menjadi 81%	51,06	59,28	58,26	88,4	84,31	SB
			4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat.	Meningkat menjadi 114,09%	99,41	103,4	98,87	114,84	99,78	SB
			4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat.	Meningkat menjadi 106,94%	97,37	90,23	92,78	139,56	94,1	SB
			4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	Meningkat menjadi 8,8 tahun	8,81	9,00	8,93	8,93	8,94	SS
			4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Meningkat menjadi 77,2%	2,06	56.62	2,50	68,6	67,04	SB

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	PILAR	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017) – ringkasan	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	Target 2024	Capaian 2024	KELOMPOK INDIKATOR
			4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuannn/laki-laki di (1) SD/MI/sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuannn/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	Meningkat	83,50	RAPM SD : 99,65, RAPM SMP = 89,63	RAPM SD : 97,08, RAPM SMP = 91,81	RAPM SD : 100, RAPM SMP: 100	RAPM SD: 99,10, RAPM SMP: 92,24	SS
			4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	Meningkat menjadi 96,1%	85,42	98,13	99.71	97,14	100,00	SS
			4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	Meningkat	PAMH 15 – 24 : 99.41 PAMH 15 – 59 : 96.06	PAMH 15 – 24 : 99.70 PAMH 15 – 59 : 97.23	99.71	PAMH 15-20: 99,60, PAMH 15-59: 96,94	PAMH 15-24: 100, PAMH 15-59: 96,94	SS
			4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	Meningkat	PSDAF (a) : 98.17 PSDAF (b) : 95.73 PSDAF (c) : 97.56 PSDAF (d) : 97.56 PSDAF (e) : 95.83	PSDAF (a) : 99,55 PSDAF (b) : 93,3 PSDAF (c) : 93,3 PSDAF (d) : 100%	PSDAF (a) : 99,55 PSDAF (b) : 93,3 PSDAF (c) : 93,3 PSDAF (d) : 100%	PSDAF (a):97, 62. PSDAF (b):53, 71. PSDAF (c): 39,08. PSDAF (d): 1,27. PSDAF (f):95, 18.	PSDAF (a):98,20 PSDAF (b):95,75. PSDAF (c): 97,57. PSDAF (d): 97,58	SS

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	PILAR	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017) – ringkasan	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	Target 2024	Capaian 2024	KELOMPOK INDIKATOR
						PSDAF (f) : 91.66 PSDAF (g) : 91.66 PSDAF (h) : 89.58			PSDAF (g): 79,32. PSDAF (h):97. 62	. PSDAF (f):Na. PSDAF (g): Na. PSDAF (h):Na	
			4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	Meningkat	26,90 37,03 45,21	TK : 15,27 SD : 39,68 SMP : 49,19	TK : 29,79 SD : 34,12 SMP : 34,41	TK : 73,48 SD : 65,45 SMP : 67,62	TK : 25,68 SD : 29,72 SMP : 32,42	SB
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuannn	SOSIAL	5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuannn.	Bertambah sebanyak 16	5	5	5	06.00	Na	SB
			5.2.1*	Proporsi perempuannn dewasa dan anak perempuannn (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Menurun	(blank)	(blank)	(blank)	0,02	Na	TAD
			5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	Menurun menjadi kurang dari 20,48%	0,04	0,03	(blank)	30	Na	SS
			5.2.2*	Proporsi perempuannn dewasa dan anak perempuannn (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Menurun	(blank)	(blank)	(blank)	0,02	Na	TAD
			5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuannn yang mendapat layanan komprehensif.	Meningkat menjadi 70%	100	100	(blank)	100	100	SS

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	PILAR	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017) – ringkasan	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	Target 2024	Capaian 2024	KELOMPOK INDIKATOR
			5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuannn di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Meningkat	6,67	10	(blank)	0,2965 27778	11,4	SS
			5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	Menurun menjadi 9,9%	18,43	20,45	11,38	12,01	8,14	SB
			5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Meningkat menjadi 85%	47	66,37	(blank)	80	91,86	SB
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	LINGKUNGAN	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Meningkat menjadi 100%	58.65	60.94	61,20	63,94	61,52	SB
			6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Meningkat menjadi 100%	58.65	77,49	61,20	63,94	61,52	SB
			6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	Meningkat	PM	(blank)	(blank)	77,16	Na	BB
			6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Meningkat menjadi 100%	97.91	98,06	98,48	97,41	Na	SB
			6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Meningkat menjadi 45.000 (skala nasional)	80	80	80	64	49	SB
			6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Meningkat	127	127	128	128	128	SS
			6.2.1.(e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	Meningkat menjadi 438 kabupaten/kota.	1	1	1	1	1	SS
			6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	Meningkat	360	360	96.98	0.1969 993	Na	SS
			6.3.1.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	Meningkat menjadi 409 kabupaten/kota	1	1	1	1	1	SS
			6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	Meningkat	0	0	0	0.1969 993		SB
			6.3.2.(a)	Kualitas air danau.	Meningkat	80900	66.67	(blank)			SS
			6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Meningkat	81,05 Baik	66,11 sedang	(blank)			SS

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	PILAR	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017) – ringkasan	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	Target 2024	Capaian 2024	KELOMPOK INDIKATOR
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	EKONOMI	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	Meningkat	-1.39	1,99	9,66	PM	-1,17	SS
			8.1.1.(a)	PDB per kapita.	Meningkat menjadi lebih dari Rp 50 juta	78,58	92.98	99,49	72,55	97,18	SS
			8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	00:51	73,14	71,51	69,25	42,6	37,4	SS
			8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	Meningkat	20050	20164	21444	21278	21021	SS
			8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Menurun	0,23	0,20	0,24	2,8	4,58	SB
			8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran.	Menurun	1,84	37.88	(blank)	PM	Na	SS
			8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	Meningkat menjadi 8%	PM	(blank)	(blank)	PM	Na	TAD
			8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	Meningkat menjadi 20 juta (skala nasional)	0	30	47	27	7	SS
			8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Meningkat	123,3	300962	402789	05.00	Na	SS
			8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.	Meningkat	0.17	(blank)	(blank)	01.31	Na	SB
			8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	Meningkat	25,18	16,44	(blank)	PM	Na	SB
			8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).	Menurun (mendekat)	5	5	5	PM	Na	SB
			8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	Meningkat	77.99	76,55	79,58	PM	Na	SS
			9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan.	Meningkat	8	8	8	8	8	SB
			9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	Meningkat	3,65	3,37	3,10	0,188194444	3,33	SB
			9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	Lebih tinggi dari pertumbuhan PDB	6,58	11,07	-0,68	5,12	3,64	SB
			9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	Meningkat	17,25	19,02	17,25	16,85	18,78	SB
			9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	Meningkat	3,65	1,49	22,45	30,25	Na	SS
			9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	Meningkat	PM	15	0,04	22,30	Na	SB
			9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	Meningkat	PM	PM	(blank)	PM	Na	TAD
			9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	Meningkat	91.93	89,51	85,16	PM	87,03	SB

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	PILAR	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017) – ringkasan	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	Target 2024	Capaian 2024	KELOMPOK INDIKATOR
			9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	Meningkat	64,40	65,55	69,15	PM	73,51	SS
10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	EKONOMI	10.1.1*	Koefisien Gini.	Menurun menjadi 0,36	0,396	0,394	0,393	0,171527778	0,35	SB
			10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Menurun menjadi 7-8%	6,94	6,99	6,93	6,24	6,55	SS
			10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal.	Berkurang sebanyak 5.000 desa (skala nasional)	6	0	0	7	37	SS
			10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri.	Meningkat paling sedikit 2.000 desa	7	10	24	7	37	SS
			10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Meningkat menjadi: TK formal 62,4 juta; TK informal 3,5 juta	100	100	100	100	100	SS
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	LINGKUNGAN	11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	3,7 juta rumah tangga	0.873658199	0.890503891	0,954	90,01	78,14	SS
			11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Menurun	161	41,49	46,02	PM	37,03	SB
			11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	Menurun menjadi 30%	202	194,8	152,28	202	133,38	SB
			11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	Ada	0	1	(blank)	1	0	SS
			11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Menurun	2635000000	1722735000	5033184000	PM	2.260.655.000	SB
			11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Meningkat menjadi 80%	62,35	71,52	70,56	74	71,28	SB
			11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	Ada	0	1	2	0	0	SS
12	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	LINGKUNGAN	12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Meningkat menjadi 150 juta ton (skala nasional)	21408.75	3734.44	(blank)	1,65	Na	SS
			12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	20 ton per hari (skala nasional)	2418.16	5640.72	5679.72	4,5	Na	SS

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	PILAR	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017) – ringkasan	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	Target 2024	Capaian 2024	KELOMPOK INDIKATOR
			12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Meningkat	1	1	1	1	1	SB
13	Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	LINGKUNGAN	13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Ada	0	1	2	0	0	SS
			13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Menurun	195,10	0,65	0,97	PM	1,9	SB
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	HUKUM & TATA KELOLA	16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Menurun	1	0	0	PM	1	SS
			16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	Menurun	0	0	0	0	0	SS
			16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Menurun	21	21	13	PM	Na	SS
			16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	Meningkat	SATPOL PP	(blank)	0	PM	Na	SB
			16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	Meningkat menjadi 4,0	81.71	(blank)	(blank)	PM	Na	SB
			16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Meningkat	(blank)	(blank)	(blank)	97,2	100	TAD
			16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Meningkat menjadi: Kementerian/Lembaga: 95%, Provinsi: 85%, Kabupaten:60%, Kota: 65%	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	SS
			16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Meningkat menjadi: Kementerian/Lembaga: 85%, Provinsi: 75%, Kabupaten/Kota: 50%	(blank)	(blank)	66,51	81,25	67,77	SS
			16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	Menjadi menjadi 80%	0,4128	(blank)	(blank)	80	50,91	SB
			16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Meningkatk menjadi: Kementerian/Lembaga 75%, Provinsi: 60%, Kabupaten/Kota: 45%	Nilai RB Tahun 2021: 6,63%	Nilai RB Tahun 2022: 57,68 %	(blank)	100	100	SS

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	PILAR	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017) – ringkasan	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	Target 2024	Capaian 2024	KELOMPOK INDIKATOR
			16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Meningkat menjadi: Kementerian: 100%, Lembaga: 100%, Provinsi: 100%, Kabupaten/Kota: 80%	2020 : Realisasi 84,31 2021 : Target 83,21 Realisasi 85,03 % Kenaikan = 0,85 %	(blank)	(blank)	100	100	SS
			16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuannn di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Meningkat	6,67	10	(blank)	0,7125	11,42	SS
			16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuannn sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Meningkat	14,28	12,19	(blank)	25	Na	SB
			16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Meningkat	0,97	100	99,03	97,42	90,6	SB
			16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	Meningkat menjadi 77,4%	95,51	94,97	(blank)	0	0	SB
			16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Meningkat menjadi 85%	96.99	100	4,08	93,32	98,2	SS
			16.10.2. (c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Meningkat	0	0	(blank)	10		SB
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan	EKONOMI	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Meningkat	1,295	1,20	1,29	Na	Na	SS
			17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Di atas 12%	0,77	0,71	0,8	Na	Na	SB

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	PILAR	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017) – ringkasan	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	Target 2024	Capaian 2024	KELOMPOK INDIKATOR
	Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan		17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	Meningkat menjadi: Perkotaan 100% populasi; Perdesaan 52% populasi.	PM	PM	(blank)	PM	Na	TAD
			17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	Meningkat	64,40	65,55	(blank)	PM	Na	SS
			17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	Meningkat	98,31	(blank)	(blank)	91	Na	SB
			17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	Meningkat	93,33	(blank)	(blank)	88,5	Na	SB
			17.18.1.(c)	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	Meningkat	6	(blank)	(blank)	6	Na	SB
			17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.	Meningkat	0,45	(blank)	(blank)	70	Na	SS
			17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	ada	ada	Ada	(blank)	Ada	Ada	SS
			17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	Meningkat	8459	(blank)	(blank)	11,60	Na	SB
			17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	Meningkat	86.67	(blank)	(blank)	82,50	Na	SB

Sumber : Bapperida, data di olah Tahun 2025

2.3 GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, dalam melaksanakan pembangunan, Pemerintah Daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah sesuai dengan kewenangannya sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Perencanaan Pembangunan Daerah tidak terlepas dari kondisi kemampuan keuangan daerah, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk memperoleh proyeksi yang tepat dan terukur mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan pemecahan permasalahan strategis secara tepat. Keuangan daerah merupakan komponen penting dalam perencanaan pembangunan sebagai konsekuensi dari penyelenggaraan desentralisasi termasuk desentralisasi fiskal dimana sumber penerimanaan pemerintah daerah tidak hanya tergantung pada pemerintah pusat, namun harus mengoptimalkan sumber penerimaan dari pendapatan asli daerah khsususnya dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana yang diamanahkan oleh UU Nomor 1 tahun 2020 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Sebagaimana amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Gambaran keuangan daerah Kabupaten Luwu Timur dalam rangka pembiayaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2026-2030, disajikan dalam tiga pembahasan, yang meliputi : 1) Kinerja keuangan masa lalu, 2) Kebijakan Keuangan Masa Lalu dan 3).Kerangka Pendanaan. Pengelolaan Keuangan Daerah telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam menyusun Rencana Pembangunan dan Penganggaran, Pemerintah Daerah diwajibkan menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yaitu sistem yang dapat diakses melalui situs jaringan resmi Kementerian Dalam Negeri yang dibangun dan dikembangkan untuk menghasilkan layanan informasi Pemerintahan Daerah yang saling terhubung dan terintegrasi dengan berbasis web yang memuat Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Informasi Keuangan Daerah menjadi satu kesatuan data yang terintegrasi. Hal ini sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

2.3.1 REALISASI APBD TAHUN ANGGARAN 2020-2024

Kinerja keuangan masa lalu merujuk pada kondisi keuangan yang tercatat sepanjang periode lima tahun terakhir, yakni dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Periode ini memiliki tujuan utama untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai pencapaian-pencapaian dalam berbagai aspek keuangan daerah, meliputi pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah, serta posisi neraca daerah. Data tersebut tidak hanya berfungsi sebagai cermin dari keberhasilan dan tantangan yang dihadapi selama periode tersebut, tetapi juga menjadi landasan yang krusial dalam merumuskan strategi dan kebijakan keuangan yang akan diterapkan pada lima tahun berikutnya. Dengan demikian, kinerja keuangan masa lalu menjadi acuan yang sangat penting dalam penyusunan perencanaan keuangan daerah untuk periode 2026 hingga 2030, yang diharapkan dapat mencerminkan proyeksi dan prioritas pembangunan yang lebih terarah, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

2.3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Sebagai salah satu instrumen utama kebijakan fiskal, kebijakan Penerimaan Pendapatan dan alokasi anggaran belanja daerah menempati posisi yang sangat strategis dalam mendukung akselerasi pembangunan yang inklusif, berkelanjutan dan berdimensi kewilayahan untuk mencapai dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Melalui kebijakan dan alokasi anggaran belanja daerah, pemerintah dapat secara langsung berperan aktif dalam mencapai berbagai tujuan dan sasaran program pembangunan di segala sektor mulai infrastruktur, pendidikan, kesehatan, maupun sektor-sektor lainnya. Selain itu, kebijakan ini juga mempengaruhi distribusi sumber daya ekonomi, baik antar kegiatan, antar program, antar sektor, maupun antar fungsi pemerintahan. Pengalokasian anggaran yang tepat dan efisien akan mendukung tercapainya stabilitas ekonomi daerah, serta menunjang distribusi pendapatan yang lebih merata.

Kebijakan ini memiliki dampak signifikan terhadap upaya pemerataan distribusi pendapatan, sehingga memperkecil kesenjangan ekonomi antar wilayah dan kelompok masyarakat. Melalui alokasi anggaran yang strategis, pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada pencapaian pembangunan jangka pendek, tetapi juga berusaha untuk menciptakan fondasi pembangunan yang kokoh untuk jangka panjang. Dengan demikian, kebijakan penerimaan pendapatan dan alokasi anggaran belanja daerah menjadi elemen kunci dalam mendorong terciptanya pembangunan yang adil, merata, dan berkelanjutan

2.3.1.1.1 Pendapatan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, dengan Penjelasan dan rincian masing-masing jenis pendapatan daerah sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Daerah yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

   Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

b. Pendapatan Transfer, Pendapatan Transfer tediri dari dua yaitu Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer antar Pemerintah Daerah.

   Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat merupakan pendapatan transfer yang bersumber dari APBN kepada Pemerintah Daerah yang terdiri dari :

   (1) Dana Perimbangan yang meliputi : Dana Transfer Umum (DTU) terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU dan Dana Transfer Khusus (DTK) terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.
   (2) Dana Insetif Daerah;
   (3) Dana Otonomi Khusus;
   (4) Dana Keistimewaan; dan
   (5) Dana Desa.

   Pendapatan Transfer Antar Daerah merupakan pendapatan Transfer dari Pemerintah Daerah Provinsi Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil dan Pendapatan Bantuan Keuangan.

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lai pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah Luwu Timur dari Sisi Pendapatan Transfer tidak mencakup Pendapatan Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan.

Capaian realisasi pendapatan daerah Kabupaten Luwu Timur dari tahun 2020 hingga 2024, berdasarkan data *unaudited* 2024, menunjukkan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 4,96%. Analisis lebih lanjut terhadap jenis-jenis pendapatan daerah menunjukkan variasi yang signifikan dalam hal pertumbuhannya, sebagai berikut:

1. **Pendapatan Asli Daerah (PAD)** mengalami rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 3,66%. Meskipun pertumbuhannya positif, angka ini menunjukkan adanya tantangan dalam mengoptimalkan sumber daya lokal yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan PAD.

2. **Pendapatan Transfer** mencatatkan rata-rata pertumbuhan yang lebih tinggi, yaitu sebesar 6,49%. Pendapatan transfer ini terdiri dari dua komponen utama, yakni:

   a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang menunjukkan pertumbuhan rata-rata yang signifikan, yaitu sebesar 18,25%. Komponen ini terdiri dari Dana Perimbangan (DBH, DAU, DAK), Dana Insentif Daerah (DID), Dana Desa, dan Intensif Fiskal. Secara keseluruhan, capaian dari jenis pendapatan ini telah mencapai 100% dari target yang ditetapkan.

   b. Pendapatan Transfer antar Daerah mengalami penurunan rata-rata pertumbuhan yang cukup signifikan, yaitu sebesar (16,57%). Penurunan ini terutama disebabkan oleh rendahnya pertumbuhan Dana Bagi Hasil (DBH) dari Provinsi yang hanya tercatat sebesar 2,29%. Selain itu, bantuan keuangan antar daerah mengalami kontraksi yang tajam sebesar (32,12%) disebabkan oleh tidak terealisasinya bantuan keuangan pada tahun 2022.

   c. Pendapatan Daerah yang Sah mencatatkan pertumbuhan yang sangat negatif, dengan rata-rata kontraksi sebesar (16,57%). Hal ini menunjukkan adanya penurunan yang cukup signifikan dalam komponen pendapatan daerah yang bersumber dari sumber-sumber yang sah, yang perlu mendapat perhatian khusus dalam upaya perbaikan kinerja keuangan daerah.

Secara keseluruhan, meskipun ada beberapa jenis pendapatan yang mengalami pertumbuhan yang positif, seperti Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, tantangan tetap ada dalam hal pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dan pendapatan transfer antar daerah. Oleh karena itu, strategi yang lebih efektif dan efisien diperlukan untuk meningkatkan kinerja penerimaan daerah, guna mendukung pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemerataan pembangunan di Kabupaten Luwu Timur.

Tabel 2. 170 Realisasi Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 – 2024

NO	Uraian	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2024* (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
I	**PENDAPATAN**	**1.495.670.435.578,45**	**1.549.649.873.412,52**	**1.732.661.442.909,29**	**1.778.344.595.911,33**	**1.880.770.756.353,54**	**4,96**
1.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**329.220.137.283,45**	**305.929.495.676,52**	**341.265.079.449,43**	**394.955.306.615,58**	**394.050.570.971,54**	**3,66**
1.1	Pajak Daerah	192.720.735.828,60	183.113.097.975,64	202.810.479.953,20	246.706.426.066,59	258.611.692.083,00	6,06
1.2	Retribusi Daerah	4.505.935.086,09	4.246.277.325,50	3.181.939.987,00	2.981.187.069,00	2.713.983.580,00	(9,64)
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	23.835.212.109,00	22.896.489.793,00	23.740.807.304,00	23.588.575.458,00	24.705.244.836,00	0,72
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	108.158.254.259,76	95.673.630.582,38	111.531.852.205,23	121.679.118.021,99	108.019.650.472,54	(0,03)
2	**Pendapatan Transfer**	**1.051.666.102.557,00**	**1.133.306.677.695,00**	**1.330.514.747.320,86**	**1.331.700.405.097,75**	**1.440.334.392.719,00**	**6,49**
2.1	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	**766.923.342.007,00**	**867.649.222.297,00**	**1.005.807.515.294,00**	**958.307.742.581,00**	**1.139.781.897.927,00**	**8,25**
2.1.1	Dana Bagi Hasil (DBH)	105.117.724.030,00	169.260.731.526,00	309.861.621.281,00	265.544.756.904,00	369.347.505.898,00	28,57
2.1.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	508.456.665.000,00	502.393.009.000,00	501.023.438.250,00	538.151.648.274,00	585.516.185.860,00	2,86
2.1.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	153.348.952.977,00	195.995.481.771,00	194.922.455.763,00	154.611.337.403,00	184.918.206.169,00	3,81
2.2	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya**	**115.448.707.000,00**	**117.263.644.446,00**	**103.003.087.000,00**	**122.632.632.000,00**	**134.495.764.000,00**	**3,10**
2.2.1	Dana Insentif Fiskal Daerah	0,00	0,00	0,00	11.794.502.000,00	20.916.486.000,00	33,17

NO	Uraian	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2024* (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
2.2.2	Dana Penyesuaian/Dana Desa	115.448.707.000,00	117.263.644.446,00	103.003.087.000,00	110.838.130.000,00	113.579.278.000,00	(0,33)
2.3	**Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya**	**169.294.053.550,00**	**148.393.810.952,00**	**221.704.145.026,86**	**250.760.030.516,75**	**166.056.730.792,00**	**(0,39)**
2.3.1	Bagi Hasil	145.149.964.222,00	143.826.880.952,00	221.704.145.026,86	243.656.469.516,75	162.577.012.792,00	2,29
2.3.2	Bantuan Keuangan	24.144.089.328,00	4.566.930.000,00	-	7.103.561.000,00	3.479.718.000,00	(32,12)
3	**Lain-lain pendapatan yang sah**	**114.784.195.738,00**	**110.413.700.041,00**	**60.881.616.139,00**	**51.688.884.198,00**	**46.385.792.663,00**	**(16,57)**
3.1	Pendapatan Hibah	64.822.256.207,00	92.833.379.152,00	42.436.704.251,00	51.688.884.198,00	43.662.279.738,00	(7,60)
3.2	Lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	49.961.939.531,00	17.580.320.889,00	18.444.911.888,00	0,00	2.723.512.925,00	(44,11)

Sumber : BKAD,LRA Auditied) LRA Anauditied 2024*

Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur masih didominasi oleh Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat dengan Proporsi sangat besar terhadap total pendapatan daerah dengan rentang 70-80 persen terhadap total pendapatan daerah. Sedangkan untuk PAD direntang 19-22 persen terhadap pendapatan daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah hanya di rentang 2-7 persen terhadap total pendapatan daerah.

Tabel 2. 171 Proporsi Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 – 2024 *(Dalam Persen)*

NO	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024*
1	**PENDAPATAN DAERAH**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
1.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**22,01**	**19,74**	**19,70**	**22,21**	**20,95**
1.1.1	Pajak Daerah	58,54	59,85	59,43	62,46	65,63
1.1.2	Retribusi Daerah	1,37	1,39	0,93	0,75	0,07
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7,24	7,48	6,96	5,97	6,27
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	32,85	31,27	32,68	30,81	27,41
1.2	**Pendapatan Transfer**	**70,31**	**73,13**	**76,79**	**74,88**	**76,58**
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	72,92	76,56	75,60	71,96	88,47
1.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	16,10	13,09	16,66	18,83	11,53
1.3	**Lain-lain pendapatan daerah yang sah**	**7,67**	**7,13**	**3,51**	**2,91**	**2,47**
1.3.1	Pendapatan Hibah	56,47	84,08	69,70	100,00	94,13
1.3.3	Lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	43,53	15,92	30,30	0,00	5,87

Sumber : BKAD Data diolah tahun 2025

Pencapaian pos-pos pendapatan daerah Kabupaten Luwu Timur selama kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 didukung dengan arah kebijakan Pendapatan Daerah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah khususnya Pajak Daerah dan Tertribusi daerah sesuai dengan amanah UU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Hubungan Keuanga Pusat dan Daerah;
2. Meningkatkan Manajemen Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;
3. Meningkatkan Penguatan Regulasi dengan Peraturan Daerah tentang Pendapatan Daerah dan Penyertaan Modal
4. Meningkatkan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
5. Menggali Sumber-sumber pendapatan daerah yang baru yang bersifat kontinyu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3.1.1.2 Belanja Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Sesuai Pasal 298 khususnya yang membahas tentang Belanja Daerah, telah dijelaskan beberapa hal sebagai berikut: (1) Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait dengan Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM); (2) Belanja Daerah berpedoman pada Standar Teknis dan Standar Harga Satuan Regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; serta (3) Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan

Daerah berpedoman pada Analisis Standar Belanja (ASB) dan Standar Harga Satuan Regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja Daerah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 pada pasal 1 menyebutkan Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja Daerah Terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dari tahun 2020-2024 rata-rata pertumbuhannya sebesar 5,25% dengan rincian jenis belanja operasi sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Rata-rata pertumbuhan belanja pegawai dari tahun 2020-2024 sebesar 8,14%

2. Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan. Rata-rata pertumbuhan belanja barang dan jasa dari tahun 2020-2024 sebesar 3,02%.

3. Belanja Hibah merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, Pemerintah Kota lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Rata-rata pertumbuhan belanja Hibah dari tahun 2020-2024 sebesar 6,05%

4. Belanja Bantuan sosial merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.Rata-rata pertumbuhan belanja bantuan sosial tahun 2020-2024 sebesar (-24,55%), rendahnya pertumbuhan ini dikarenakan realisasinya dari tahun ke tahun cenderung mengalmi penurunan.

b. Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud dan pengeluaran setelah perolehan yang menambah nilai aset yang bersangkutan (Subsequent Expenditures). Nilai yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangunan asset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset

tersebut siap digunakan.Rata-rata perumbuhan belanja modal dari tahun 2020-20244 sebesar 6,14%, yang terdiri dari :

1. Belanja Modal Tanah, rata-rata pertumbuhannya sebesar 10,44%;
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin,rata-rata pertumbuhannya sebesar 3,61%;
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan, rata-rata pertumbuhannya sebesar 14,32%
4. Belanja Modal Jalan,irigasi dan Jaringan,rata-rata pertumbuhannya sebesar 2,05%
5. Belanja Modal Aset Tetap lainnya; rata-rata pertumbuhannya sebesar 41,37
6. Belanja Modal Aset Lainnya. Pertumbuhannya cukup signifikan mencapai 100%, dikarenakan hanya pada tahun 2024 terealisasi belanja modal aset lainnya dalam lima tahun terakhir

a. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Rata-rata pertumbuhan belanja tidak terduga kabupaten luwu timur dari tahun 2020-2024 sebesar (18,40%), pertumbuhan yang kontraksi ini dikarenakan realisasi belanja tidak terduga dari tahun ketahun mengalami penurunan, hal ini menunjukkan hal yang positif yang berarti tingkat kebencanaan terus mengalami penurunan.

b. Belanja Transfer

Belanja Transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Belanja transfer terdiri dari belanja Bagi hasil pajak kepada Pemerintah Desa dengan rata-rata pertumbuhannya sebesar 7,69% dan Belanja Bantuan keuangan kepada pemerintah desa dengan rata-rata pertumbuhannya sebesar 11,28%.

Tabel 2. 172 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 – 2024

NO	Uraian	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2024* (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
	BELANJA	**1.436.964.978.788,05**	**1.502.710.316.729,40**	**1.666.445.074.250,42**	**1.837.814.574.982,01**	**1.951.311.419.219,76**	**6,31**
2	**Belanja Operasi**	**986.043.221.454,00**	**1.020.460.843.809,88**	**1.060.206.782.144,49**	**1.192.242.657.694,66**	**1.273.723.227.723,19**	**5,25**
2.1	Belanja Pegawai	407.693.545.053,00	450.113.688.581,00	486.820.782.784,00	537.360.420.558,47	602.791.654.688,20	8,14
2.2	Belanja Barang dan jasa	494.662.638.352,00	490.019.941.161,62	486.675.232.900,43	572.933.447.356,27	574.133.388.761,63	3,02
2.4	Belanja Hibah	69.606.738.049,00	78.663.751.067,26	80.641.627.360,06	77.372.989.779,92	93.354.484.273,36	6,05
2.5	Belanja Bantuan Sosial	14.080.300.000,00	1.464.368.000,00	6.069.139.100,00	4.575.800.000,00	3.443.700.000,00	(24,55)
3	**Belanja Modal**	**236.966.048.167,05**	**282.411.798.100,52**	**289.744.487.264,93**	**313.767.765.805,75**	**319.243.021.952,88**	**6,14**
3.1	Belanja Modal Tanah	486.845.575,00	571.282.000,00	7.860.552.480,00	343.256.122,00	799.999.800,00	10,44
3.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.030.983.980,00	52.160.400.224,13	48.712.736.356,00	46.103.713.018,52	57.338.993.158,66	3,61
3.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	60.919.461.918,58	97.920.824.771,06	94.715.866.695,32	105.765.564.552,59	118.961.416.302,24	14,32
3.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	127.319.574.693,47	131.513.051.105,33	138.096.590.733,61	160.649.281.012,64	140.909.321.991,98	2,05
3.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	209.182.000,00	246.240.000,00	319.241.000,00	905.951.100,00	1.181.290.700,00	41,37
3.6	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	39.500.000,00	0,00	52.000.000,00	100
4	**Belanja Tidak Terduga**	**1.708.532.100,00**	**1.451.400.000,00**	**707.600.000,00**	**548.000.000,00**	**618.000.000,00**	**(18,40)**
4.1	Belanja Tidak Terduga	1.708.532.100,00	1.451.400.000,00	707.600.000,00	548.000.000,00	618.000.000,00	(18,40)
5	**Belanja Transfer**	**212.247.177.067,00**	**198.386.274.819,00**	**315.786.204.841,00**	**331.256.151.481,60**	**357.793.542.612,29**	**11,01**
5.1	Belanja Bagi Hasil	17.262.101.969,00	19.722.629.773,00	18.735.918.471,00	20.599.397.923,00	24.997.866.029,00	7,69
5.2	Belanja Bantuan Keuangan	194.985.075.098,00	178.663.645.046,00	297.050.286.370,00	310.656.753.558,60	332.800.519.669,69	11,28

Sumber : BKAD,LRA Auditied) LRA Anauditied 2024*

Berdasarkan diatas, dapat dilihat bahwa kontribusi Jenis Belanja Terhadap Total Belanja daerah daerah yang terbesar adalah belanja Operasi dengan Kontribusi dikisaran 60-81% terhadap total belanja daerah, lalu di susul belanja modal sebesar 5-18%. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2. 173 Proporsi Jenis Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 – 2024 (Dalam Persen)

NO	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
2	BELANJA DAERAH	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1	Belanja Operasi	68,62	67,90	63,62	64,87	65,28
2.1.1	Belanja Pegawai	41,35	44,12	45,92	45,07	47,33
2.1.2	Belanja Barang dan jasa	50,17	48,03	45,90	48,06	45,08
2.1.3	Belanja Hibah	7,06	7,71	7,61	6,49	7,33
2.1. 4	Belanja Bantuan Sosial	1,43	0,14	0,57	0,38	0,27
2.2	Belanja Modal	16,49	18,80	17,39	17,07	16,36
2.2.1	Belanja Modal Tanah	0,21	0,20	2,71	0,11	0,25
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20,27	18,47	16,81	14,69	17,96
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	25,71	34,67	32,69	33,71	37,26
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	53,73	46,57	47,66	51,20	44,14
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,09	0,09	0,11	0,29	0,37
2.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,01	0,00	0,02
2.3	Belanja Tidak Terduga	0,12	0,10	0,04	0,03	0,03
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.4	Belanja Transfer	14,77	13,20	18,95	18,02	18,34
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	8,13	9,94	5,93	6,22	6,99
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	91,87	90,06	94,07	93,78	93,01

Sumber : BKAD Data diolah tahun 2025

Dari tebel 2.134 dapat terlihat bahwa proporsi belanja operasi selama tahun 2020-2024 lebih besar dibandingkan dengan proporsi belanja lainnya, hal ini disebabkan pada belanja operasi didominasi oleh pos belanja pegawai dan belanja barang dan jasa dengan rata-rata kontribusinya sebesar 40-50%. Sedangkan untuk belanja modal lebih didominasi oleh belanja modal jalan, irigasi dan jaringan dengan kontribusi sebesar 44-53% terhadap total belanja modal.hal ini sebagai Upaya Pemerintah Kabupaten Luwu Timur untuk terus mengupayakan pembangunan Infrastruktur Jalan,Jaringan dan Irigasi sebagai pendorong ekonomi daerah di Kabupaten Luwu Timur.

2.3.1.1.3 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Netto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran. Pembiayaan Daerah terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

1.) Penerimaan Pembiayaan Daerah bersumber dari :
Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Penerimaan Pembiayaan Daerah bersumbar dari :
   c. Sisa Lebihi Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA);
   d. Pencairan Dana Cadangan;
   e. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
   f. Penerimaan Pinjaman Daerah;
   g. Penerimaan kembali penerimaan pinjaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   h. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.) Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD. Pengeluaran pembiayaan dapat digunakan untuk :
   a. Pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo;
   b. Penyertaan Modal Daerah;
   c. Pemberian pinjaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   d. Pengeluaran pembiayaan daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembiayaan daerah Kabupaten Luwu Timur hingga tahun 2024, dalam hal penerimaan pembiayaan, masih bergantung pada sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (Silpa). Penerimaan tersebut menjadi salah satu sumber utama dalam mendanai kebutuhan pembiayaan daerah. Sementara itu, pengeluaran pembiayaan antara tahun 2020 hingga 2023 sebagian besar dialokasikan untuk penyertaan modal daerah, yang bertujuan untuk memperkuat posisi keuangan daerah serta meningkatkan kapasitas investasi daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Pada tahun 2024, pengeluaran pembiayaan daerah tidak hanya digunakan untuk penyertaan modal, tetapi juga untuk pembayaran pokok utang, yang mencerminkan upaya pengelolaan utang daerah secara lebih efisien dan bertanggung jawab.

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur antara tahun 2020 hingga 2022 menunjukkan hasil yang positif, dengan tercatatnya surplus anggaran yang memungkinkan daerah untuk meningkatkan kapasitas fiskal dan melakukan berbagai investasi strategis. Namun, pada tahun 2023 hingga 2024, Kabupaten Luwu Timur mengalami defisit anggaran, yang merupakan suatu kondisi di mana belanja daerah melebihi pendapatan yang diterima. Meskipun demikian, defisit tersebut dapat tertutupi berkat adanya penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari Silpa, yang memberikan ruang bagi daerah untuk tetap menjalankan program-program pembangunan tanpa mengorbankan kelangsungan keuangan daerah.

Secara keseluruhan, meskipun ada fluktuasi dalam keseimbangan anggaran, keberadaan pembiayaan daerah melalui Silpa dan pengelolaan utang yang bijaksana

memberikan fleksibilitas bagi pemerintah daerah untuk mengatasi defisit dan memastikan kelancaran pelaksanaan program pembangunan. Kedepannya, penting bagi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur untuk terus mengoptimalkan pengelolaan sumber pembiayaan daerah agar kondisi keuangan daerah tetap sehat dan dapat mendukung keberlanjutan pembangunan yang berkelanjutan.

Tabel 2. 174 Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupten Luwu Timur Tahun 2020 – 2024

Uraian	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024*
Pendapatan Daerah	**1.495.670.435.578,45**	**1.549.649.873.412,52**	**1.732.661.442.909,29**	**1.778.344.595.911,33**	**1.880.770.756.353,54**
Belanja Daerah	**1.436.964.978.788,05**	**1.502.710.316.729,40**	**1.666.445.074.250,42**	**1.837.814.574.982,01**	**1.951.311.419.219,76**
Surplus/(Defisit)	58.705.456.790,40	46.939.556.683,12	66.216.368.658,87	(59.469.979.070,68)	(70.540.662.866,22)
Pembiayaan Daerah					
Penerimaan Pembiayaan	26.201.839.853,65	72.907.296.644,25	113.846.853.327,37	173.616.122.250,24	103.570.143.179,56
Pengeluaran Pembiayaan	12.000.000.000,00	6.000.000.000,00	6.446.575.088,00	10.576.000.000,00	12.068.120.000,00
Pembiayaan Netto	**14.201.839.853,65**	**66.907.296.644,25**	**107.400.278.239,37**	**163.040.122.250,24**	**91.502.023.179,56**
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenan	72.907.296.644,05	113.846.853.327,37	173.616.646.898,24	103.570.143.179,56	20.961.360.313,34

Sumber : BKAD, LRA Auditied) LRA Anauditied 2024*

2.3.1.2 Neraca Daerah

Neraca daerah menggambarkan perkembangan dari kondisi aset pemerintah daerah, kondisi kewajiban pemerintah daerah dan kondisi ekuitas dana yang tersedia. Analisis Neraca Daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio likuiditas dan solvabilitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah.

Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Perkembangan neraca daerah menguraikan pelaporan keseimbangan umum daerah, yakni keseimbangan antara aset daerah dengan kewajiban dan ekuitas dana daerah.

2.3.1.2.1 Aset Daerah

Aset daerah adalah seluruh barang atau kekayaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, penyelenggaraan pelayanan publik, serta pembangunan daerah. Aset daerah juga berpotensi untuk memberikan manfaat ekonomi jangka panjang yang dapat berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan pengembangan perekonomian daerah di masa depan. Oleh karena itu, pengelolaan aset yang baik dan terencana dengan matang menjadi salah satu kunci dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Di Kabupaten Luwu Timur, aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah terbagi dalam beberapa kategori utama, yang masing-masing memiliki peran dan fungsi berbeda dalam mendukung pencapaian tujuan-tujuan pembangunan. Kategori aset tersebut meliputi **Aset Lancar**, **Investasi Jangka Panjang**, **Aset Tetap**, dan **Aset Lainnya**. Pembagian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai jenis-jenis aset yang dimiliki pemerintah daerah serta pemanfaatannya dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

a. Aset Lancar

Aset lancar merupakan aset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang dapat dengan mudah dikonversikan menjadi kas dalam jangka waktu kurang dari satu tahun. Rata-rata pertumbuhan aset lancar Pemerintah Kabupaten Luwu Timur mencapai **4,63%**. Berdasarkan data hingga tahun 2024 (unaudited), rincian aset lancar Pemerintah Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai berikut:

1. Kas dan Setara Kas: Rp20.961.360.313,34
2. Piutang: Rp154.307.180.037,19
3. Penyisihan Piutang: Rp(438.174.817,79)
4. Beban Dibayar di Muka: Rp45.952.234,25
5. Persediaan: Rp81.870.425.551,18

b. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang merupakan penanaman modal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi atau sosial dalam periode lebih dari satu tahun. Sampai dengan tahun 2024, rata-rata pertumbuhan

investasi jangka panjang Pemerintah Kabupaten Luwu Timur tercatat sebesar **8,60%**. Adapun komponen investasi jangka panjang hingga tahun 2024 meliputi:

1. Investasi Permanen: Rp197.588.591.246,22
2. Properti Investasi: Rp18.761.443.892,64

c. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki dan digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk operasional pemerintahan serta tidak dimaksudkan untuk dijual dalam aktivitas normal. Aset ini memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun dan berperan penting dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan publik. Rata-rata pertumbuhan aset tetap Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dari tahun 2020 hingga 2024 adalah sebesar 2,74%. Sampai dengan tahun 2024 (unaudited), aset tetap terdiri atas:

1. Tanah: Rp512.640.755.474,25
2. Peralatan dan Mesin: Rp622.906.397.959,87
3. Gedung dan Bangunan: Rp1.449.205.445.079,09
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan: Rp3.196.677.946.011,67
5. Aset Tetap Lainnya: Rp11.004.747.341,74
6. Konstruksi dalam Pengerjaan: Rp66.794.615.712,88
7. Akumulasi Penyusutan: Rp(2.643.943.953.334,80)

d. Aset Lainnya

Aset lainnya mencakup bentuk kekayaan yang tidak dikategorikan sebagai aset tetap, namun tetap memiliki nilai strategis bagi keberlangsungan operasional maupun pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah. Rata-rata pertumbuhan aset lainnya di Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam periode 2020–2024 mengalami penurunan sebesar -23,40%. Berdasarkan data unaudited hingga tahun 2024, rincian aset lainnya adalah sebagai berikut:

1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga: Rp1.815.266.391,11
2. Aset Tidak Berwujud: Rp3.713.521.100,00
3. Amortisasi Aset Tidak Berwujud: Rp(3.463.139.006,00)
4. Akumulasi Penyusutan: Rp235.301.403.453,37

Berdasarkan data yang ada, pertumbuhan rata-rata aset daerah Kabupaten Luwu Timur dari tahun 2020 hingga tahun 2024 tercatat sebesar 2,43%. Angka ini menunjukkan adanya peningkatan aset yang stabil selama periode tersebut, meskipun terdapat tantangan dari sisi perekonomian regional maupun nasional. Peningkatan ini terdiri dari beberapa komponen yang mempengaruhi berbagai jenis aset di daerah, dengan masing-masing kategori memberikan kontribusi yang berbeda terhadap perekonomian daerah.

2.3.1.2.2 Kewajiban

Kewajiban daerah merupakan salah satu komponen penting dalam laporan keuangan pemerintah daerah, yang diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Dalam neraca keuangan, kewajiban ini memberikan gambaran mengenai besaran utang yang

dimiliki pemerintah daerah kepada pihak ketiga, serta mencerminkan komitmen pembayaran yang berasal dari aktivitas masa lalu.

Secara umum, kewajiban pemerintah daerah meliputi seluruh jenis utang yang timbul dari kegiatan operasional di periode-periode sebelumnya. Berdasarkan hasil analisis data, rata-rata pertumbuhan kewajiban jangka pendek Pemerintah Kabupaten Luwu Timur selama periode 2020 hingga 2024 tercatat sebesar 8,19%. Pertumbuhan ini mencerminkan adanya peningkatan beban kewajiban yang harus ditanggung pemerintah daerah dalam jangka waktu satu tahun atau kurang.

Hingga tahun 2024, berdasarkan data unaudited, komponen kewajiban jangka pendek Pemerintah Kabupaten Luwu Timur terdiri dari:

1. **Pendapatan Diterima Dimuka** sebesar Rp512.953.469,67, yang mencerminkan penerimaan kas atas pendapatan yang belum diakui sebagai pendapatan dalam periode berjalan.

2. **Utang Belanja dan Transfer** sebesar Rp62.925.964.469,13, yang menunjukkan kewajiban pemerintah daerah untuk membayar belanja operasional dan transfer ke pihak lain yang telah jatuh tempo.

3. **Utang Jangka Pendek Lainnya** sebesar Rp67.835.405,00, yang mencakup berbagai kewajiban lain yang tidak termasuk dalam dua kategori sebelumnya.

Peningkatan kewajiban jangka pendek ini perlu menjadi perhatian serius, karena berpotensi mempengaruhi kemampuan fiskal daerah dalam memenuhi kebutuhan belanja jangka pendek, serta mengindikasikan tingkat ketergantungan pembiayaan daerah terhadap sumber-sumber eksternal. Oleh karena itu, pengelolaan kewajiban yang efektif dan berkelanjutan menjadi kunci dalam menjaga stabilitas keuangan daerah di masa mendatang.

2.3.1.2.3 Ekuitas

Ekuitas dana merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah, yang menunjukkan kemampuan modal sendiri yang dimiliki pemerintah daerah, sehingga tidak terlalu tergantung pada utang dalam kegiatan investasinya. Rata-rata pertumbuhan ekuitas pemerintah luwu timur dari tahun 2020 sampai tahun 2024 sebesar 2,35%. Jumlah kewajiban dan ekutias sampai tahun 2024 sebesar Rp.3.725.458.693.844,44 atau rata-rata pertumbuhannya sebesar 2,43% selama lima tahun terakhir.

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan aset, kewajiban, dan ekuitas Pemerintah Kabupaten Luwu Timur selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan kinerja yang relatif stabil dengan kecenderungan pertumbuhan positif di beberapa komponen utama. Aset daerah yang meliputi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya, mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 2,43% per tahun, mencerminkan penguatan kapasitas ekonomi dan operasional daerah, meskipun terdapat tekanan dari faktor eksternal.

Di sisi lain, kewajiban jangka pendek tercatat tumbuh dengan rata-rata 8,19% per tahun, yang menandakan adanya peningkatan beban pembayaran jangka pendek

yang perlu diantisipasi melalui pengelolaan keuangan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Kewajiban ini didominasi oleh utang belanja dan transfer, serta pendapatan diterima dimuka.

Sementara itu, pertumbuhan rata-rata ekuitas daerah sebesar 2,35% menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Luwu Timur masih mampu meningkatkan modal sendiri secara perlahan, meskipun perlu diiringi dengan upaya lebih lanjut untuk memperkuat ketahanan fiskal daerah. Secara keseluruhan, kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur selama lima tahun terakhir menunjukkan adanya perkembangan positif, namun tetap diperlukan langkah strategis dalam optimalisasi aset, pengelolaan kewajiban, serta penguatan ekuitas guna mendukung pencapaian pembangunan daerah yang berkelanjutan di masa mendatang.

Tabel 2. 175 Realisasi Neraca Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 – 2024

Uraian	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2024* (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
ASET						
Aset Lancar	203.134.604.392,96	283.061.901.309,22	325.920.043.406,51	253.524.232.462,88	254.746.743.318,17	4,63
Investasi Jangka Panjang	143.251.633.564,27	143.430.167.120,57	145.305.565.443,79	218.481.632.960,03	216.350.035.138,86	8,60
Aset Tetap	2.809.410.577.288,61	2.857.058.088.011,46	2.989.066.560.269,21	2.951.515.296.682,98	3.215.285.954.253,70	2,74
Aset Lainnya	148.182.016.824,55	43.137.703.695,54	55.252.743.851,40	121.412.836.182,24	39.075.961.133,71	(23,40)
JUMLAH ASET	**3.303.978.832.070,39**	**3.326.687.860.136,79**	**3.515.544.912.970,91**	**3.544.933.998.288,13**	**3.725.458.693.844,44**	**2,43**
KEWAJIBAN						
Kewajiban Jangka Pendek	42.841.649.073,41	52.235.642.592,09	67.035.612.464,86	52.967.634.398,60	63.506.753.343,80	8,19
JUMLAH KEWAJIBAN	**42.841.649.073,41**	**52.235.642.592,09**	**67.035.612.464,86**	**52.967.634.398,60**	**63.506.753.343,80**	**8,19**
EKUITAS	**3.261.137.182.996,98**	**3.274.452.217.544,70**	**3.448.509.300.506,05**	**3.491.966.363.889,53**	**3.661.951.940.500,64**	**2,35**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**3.303.978.832.070,39**	**3.326.687.860.136,79**	**3.515.544.912.970,91**	**3.544.933.998.288,13**	**3.725.458.693.844,44**	**2,43**

*Sumber : BKAD, Neraca Daerah Luwu Timur Auditied BPK RI)*Anauditied 2024*

2.3.1.3 Analisis Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah pada prinsipnya tercermin dalam kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pengelolaan keuangan daerah yang efektif bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah, serta ketepatan dalam pemanfaatan potensi pembiayaan daerah.

Keuangan daerah mencakup tatanan, perangkat, kelembagaan, dan kebijakan anggaran yang mengatur aktivitas fiskal pemerintah daerah. Unsur-unsur keuangan daerah meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang wajib dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, dilakukan analisis terhadap proporsi penggunaan anggaran serta evaluasi atas kebijakan pembiayaan daerah.

2.3.1.3.1 Kebijakan Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah

Kebijakan terkait pendapatan daerah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah guna memperkuat kemandirian fiskal, mengurangi ketergantungan pada fiskal pusat, dan memperluas ruang fiskal daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi elemen utama dalam upaya tersebut, karena selain mencerminkan kapasitas fiskal daerah, PAD juga memiliki potensi untuk memperbesar ruang fiskal bagi alokasi belanja prioritas pembangunan daerah. Selain itu, kapasitas fiskal juga dapat ditingkatkan melalui alokasi dana bagi hasil daerah (DBH), yang dapat diperoleh dari pengelolaan pajak serta pengelolaan sumber daya alam daerah lainnya.

Kebijakan pendapatan daerah ini tidak hanya bergantung pada inovasi pemerintah daerah, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Terkait dengan arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah, terdapat dua aspek penting yang perlu diperhatikan, yaitu: (1) Upaya untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah yang sudah ada melalui kebijakan intensifikasi, dan (2) Melakukan perluasan sumber pendapatan baru melalui kebijakan ekstensifikasi, baik yang terkait dengan PAD maupun DBH, baik pajak maupun non-pajak.

Pemerintah Daerah luwu timur terus mengoptimalkan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi mencakup: (1) Penguatan kekuatan pemungutan pajak daerah, dengan cara memperluas objek pajak dan retribusi daerah, menambah jenis pajak dan retribusi, serta menyesuaikan tarif maksimum pada beberapa jenis pajak dan retribusi daerah. (2) Mengoptimalkan pengelolaan objek-objek PAD yang potensial, melalui restrukturisasi sistem pengelolaan objek-objek PAD dan sumber pendapatan daerah lainnya yang sah.

Dari perspektif pengelolaan belanja daerah, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur senantiasa berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap alokasi anggaran dalam rangka pembiayaan berbagai program dan kegiatan pemerintah dilaksanakan

dengan prinsip efektivitas dan efisiensi yang tinggi. Dalam upaya ini, penggunaan anggaran daerah selalu dilakukan secara proporsional, dengan mengutamakan keterpaduan antara rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Kedua dokumen perencanaan ini menjadi acuan utama dalam setiap keputusan fiskal yang diambil oleh pemerintah daerah.

Pemerintah Luwu Timur berusaha untuk memastikan bahwa belanja daerah difokuskan pada sektor-sektor yang memberikan dampak langsung terhadap pelayanan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta program-program prioritas yang bersifat strategis dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah. Dalam konteks ini, alokasi anggaran diarahkan pada upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat serta pencapaian tujuan pembangunan daerah yang sudah ditetapkan dalam RPJMD dan RKPD.

Seiring dengan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur berhasil menjaga agar pengelolaan belanja daerah tidak mengalami defisit yang signifikan. Meskipun terdapat dinamika dan tantangan dalam penerimaan daerah, pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan dan akuntabel, dengan mempertimbangkan potensi sumber daya yang ada serta memprioritaskan pengeluaran yang benar-benar mendukung pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah. Dengan demikian, defisit anggaran yang tidak dapat ditutupi dapat dihindari, dan stabilitas fiskal daerah dapat tetap terjaga.

Penting untuk dicatat bahwa efisiensi dalam pengelolaan belanja daerah tidak hanya tercermin dari upaya penghematan anggaran, tetapi juga dari optimisasi pemanfaatan sumber daya yang ada, termasuk dalam pengelolaan aset daerah, pemilihan prioritas program, serta pengawasan yang ketat terhadap implementasi kegiatan. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan memastikan bahwa anggaran yang dikeluarkan memberikan dampak yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat serta pencapaian tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

2.3.1.3.2 Proporsi Penggunaan Anggaran

Salah satu aspek penting yang perlu dicermati dalam pengelolaan keuangan daerah adalah proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total alokasi belanja daerah dan pembiayaan pengeluaran daerah. Analisis ini menjadi penting untuk menilai sejauh mana kemampuan pemerintah daerah dalam menjamin kesejahteraan pegawai, yang pada akhirnya mendukung kelancaran kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah. Aparatur pemerintah daerah, yang tersebar di berbagai unit organisasi dan perangkat daerah, memainkan peran sentral dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan.

Alokasi belanja untuk kebutuhan aparatur ini berfungsi untuk menjamin kelancaran aktivitas pemerintahan daerah, baik dalam penyediaan layanan publik maupun dalam pelaksanaan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Dengan proporsi belanja yang memadai, pemerintah daerah diharapkan dapat mempertahankan kinerja organisasi, meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, serta memastikan tercapainya tujuan pembangunan daerah.

Tabel 2. 176 Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupten Luwu Timur Tahun 2020 – 2024

NO	Tahun	Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	Total Pengeluaran (Belanja+Pengeluaran Pembiayaan)	Persentase
		(a)	(b)	(a)/(b)x100%
1	2020	476.181.668.005,00	1.448.964.978.788,05	32,86
2	2021	497.387.651.765,00	1.508.710.316.729,40	32,97
3	2022	552.280.850.026,00	1.672.891.649.338,42	33,01
4	2023	597.807.613.847,18	1.848.390.574.982,01	32,34
5	2024*	673.155.212.767,00	1.997.497.196.736,00	33,70

*Sumber : BKAD, LRA Auditied) *LRA Anauditied*

Kebijakan proporsi anggaran untuk kebutuhan aparatur antara tahun 2020 hingga 2024 mencerminkan kebijakan keuangan daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, pemerintah daerah cenderung memprioritaskan alokasi anggaran untuk pembangunan yang memberikan dampak langsung terhadap layanan publik. Hal ini mencakup berbagai urusan wajib yang terkait dengan penyediaan layanan dasar serta urusan non-layanan dasar yang juga menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah. Selain itu, kebijakan ini mencerminkan langkah-langkah pemerintah daerah dalam menjalankan urusan pilihan yang bertujuan untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat secara keseluruhan.

Belanja pemenuhan kebutuhan aparatur di Kabupaten Luwu Timur selama tahun 2020-2024 dihitung dari beberapa rincian yang ada dalam pos Belanja Operasional yang terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan jasa. Rincian pemenuhan yang masuk dalam pos Belanja Operasional adalah sebagai beriku:

Tabel 2. 177 Proporsi rincian Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupten Luwu Timur Tahun 2020 – 2024

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
1.	**Belanja Operasional**					
1.1	**Belanja Pegawai**	**361.236.503.333,00**	**367.985.193.348,00**	**407.113.402.081,00**	**434.300.020.531,00**	**511.063.967.265,00**
	Belanja Gaji dan Tunjangan	262.054.425.123,00	264.691.948.566,00	290.533.445.595,00	317.456.968.341,00	376.655.288.788
	Belanja Tambahan Penghasilan	93.723.886.560,00	95.929.693.490,00	108.319.925.078,00	109.568.955.287,00	122.994.237.808,00
	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	4.336.666.650,00	488.422.848,00	553.200.000,00	571.200.000,00	962.880.000,00
	Belanja Pemungutan Pajak Daerah	44.450.000,00	4.666.787.944,0	5.380.517.408,00	5.026.532.903,00	8.484.286.669,00
	Belanja Uang Lembur	1.077.075.000,00	2.208.340.500,00	2.326.314.000,00	1.676.364.000,00	1.967.274.000,00
1.2	**Belanja Barang dan Jasa**	**114.945.164.672,00**	**129.402.458.417,00**	**145.167.447.945,00**	**163.507.593.316,18**	**162.091.245.502,00**
	Belanja Honorarium PNS	126.800.000,00	2.556.803.000,00	2.890.886.286,00	4.452.442.000,00	4.863.630.000,00
	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	2.981.945.000,00	2.701.946.000,00	1.840.200.000,00	204.900.000,00	305.000.000,00
	Belanja Kursus, Pelatihan Sosialisasi dan bimbingan tekhnis	2.041.105.607,00	5.775.049.950,00	5.555.849.881,00	7.155.799.978,00	8.749.335.000,00
	Belanja Premsi Asuransi Kesehatan	54.331.048.372,00	54.998.195.771	56.227.721.806,00	60.543.949.027,00	61.415.840.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Pegawai	4.618.845.750,00	7.378.192.400,00	7.472.618.495,00	8.831.096.301,00	11.526.692.000,00
	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	387.222.000,00	243.280.000,00	484.544.800,00	272.720.000,00	543.780.000,0
	Belanja Pakaian Khusus hari tertentu	2.462.835.000,00	212.480.540,0	370.427.370,00	472.602.000,00	483.858.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas	47.995.362.943,00	55.536.510.756,00	70.325.199.307,00	81.574.084.010,18	74.203.110.502,00
	TOTAL	**476.181.668.005,00**	**497.387.651.765,00**	**552.280.850.026,00**	**597.807.613.847,18**	**673.155.212.767,00**

*Sumber : BKAD, LRA Auditied) *LRA Anauditied*

2.3.1.4 Analisis Fiskal Daerah

Analisis fiskal daerah merupakan analisis terhadap kondisi keuangan daerah kabupaten luwu timur, terutama dalam hal pendapatan dan belanja daerah, untuk menilai kapasitas fiskal, tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran yang bertujuan memastikan kebijakan fiskal yang diterapkan sangat mendukung keberlanjutan pembangunan ekonomi daerah serta pelayanan publik.

Analisis fiskal APBD dilakukan dengan dua pendekatan, pendekatan dengan analisis sektor pendapatan dan analisis sektor belanja. Analisis dari sektor pendapatan dilihat dengan menggunakan analisis rasio kemandirian keaungan daerah, ruang fiskal daerah dan rasio pajak daerah.

2.3.1.4.1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah adalah indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu pemerintah daerah mampu membiayai kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik secara mandiri, tanpa ketergantungan yang tinggi terhadap bantuan keuangan dari pemerintah pusat.

Tabel 2. 178 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 – 2024

Tahun	Total Pendapatan Daerah (Rp)	Rasio Transfer Terhadap Pendapatan Daerah	Rasio Pad Terhadap Pendapatan Daerah
2020	1.495.670.435.578,45	70,31	22,01
2021	1.549.649.873.412,52	72,13	19,74
2022	1.732.661.442.909,29	76,79	19,70
2023	1.778.344.595.911,33	74,88	22,21
2024	1.880.770.756.353,54	76,58	20,95

Sumber : Data diolah

Berdasarkan tabel diatas, keuangan daerah kabupaten luwu timur masih belum masuk dalam kategori mandiri, hal ini tercermin dari tingkat rasio PAD terhadap total pendapatan daerah masih <25% sedangkan rasio pendapatan transfer terhadap total pendapatan daerah >70% yang berarti ketergantungan kabupaten luwu timur pada pembiayaan yang berasal dari pemerintah pusat masih sangat tinggi.

2.3.1.4.2 Ruang Fiskal Daerah

Fiskal daerah merupakan kebijakan dan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik yang tercermin dengan pengelolaan pendapatan dan belanja daerah.

Ruang fiskal (fiscal space) merupakan kapasitas anggaran pemerintah daerah untuk menyediakan sumber daya keuangan yang diperlukan guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan, tanpa menimbulkan risiko terhadap keberlanjutan fiskal jangka panjang. Secara sederhana, ruang fiskal dapat diartikan sebagai bagian dari anggaran yang tidak terikat oleh kewajiban atau ketentuan tertentu, sehingga dapat dialokasikan secara fleksibel (diskresioner) oleh pemerintah daerah sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.

Ruang fiskal dihitung dari total pendapatan daerah setelah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya telah ditentukan (earmarked revenues) serta belanja wajib yang bersifat mengikat, seperti belanja pegawai dan pembayaran bunga utang. Dengan demikian, ruang fiskal mencerminkan tingkat keleluasaan fiskal suatu daerah dalam merancang program dan kegiatan strategis berdasarkan kebutuhan dan potensi lokal.

Pemerintah Luwu Timur hingga saat ini tidak pernah mempunyai hutang yang berkonsekuensi terhadap belanja bunga, sehingga perhitungan ruang fiskal tidak menyertakan belanja bunga dalam perhitungan ruang fiskal.

Tabel 2. 179 Rasio Fiskal Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 – 2024

Tahun	TOTAL PENDAPATAN DAERAH (Rp)	PENDAPATAN HIBAH (Rp)	DANA ALOKASI KHUSUS	BELANJA PEGAWAI	RUANG FISKAL (%)
2020	1.495.670.435.578,45	64.822.256.207,00	153.348.952.977,00	407.693.545.053,00	58,15
2021	1.549.649.873.412,52	92.833.379.152,00	195.995.481.771,00	450.113.688.581,00	52,32
2022	1.732.661.442.909,29	42.436.704.251,00	194.922.455.763,00	486.820.782.784,00	58,20
2023	1.778.344.595.911,33	51.688.884.198,00	154.611.337.403,00	537.360.420.558,47	58,18
2024	1.880.770.756.353,54	43.662.279.738,00	184.918.206.169,00	602.791.654.688,20	55,80

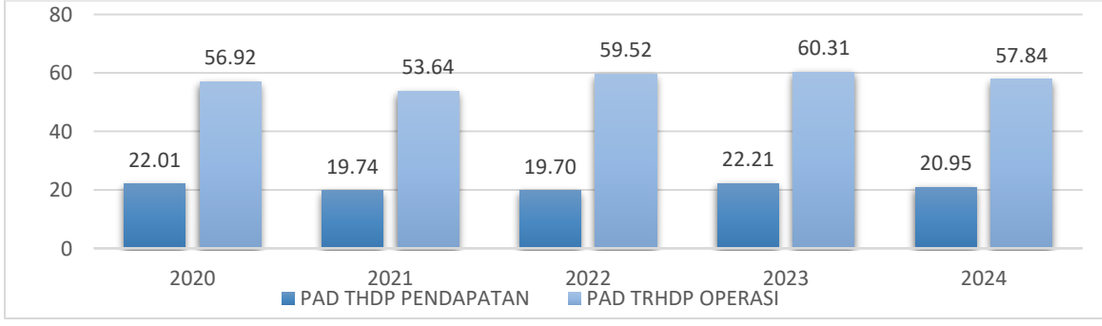
*Sumber : LRA Auditied) *LRA Anauditied*

Berdasarkan tabel diatas, tercermin ruang fiskal pemerintah luwu timur dari tahun 2020 hingga 2024 mempunyau space yang cukup untuk pembiayaan pencapaian pembangunan daerah dengan ruang fiskal di rentang 52% hingga 58%. Hal ini tidak terlepas dari kebijakan pengelolaan keuangan pemerintah luwu timur yang tetap efektif dan efisien dalam mencapai target pendapatan dan merencanakan belanja daerah.

2.3.1.4.3 Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah dan Belanja Barang dan Jasa diluar belanja pegawai

Untuk mengukur kemandirian keuangan daerah yang berbasis pada pendapatan asli daerah, maka dapat diukur dengan rasio PAD terhadap total pendapatan daerah.selain itu, untuk mengukur kontribusi PAD terhadap belanja yang tidak menghasilkan aset daerah dapat di ukur dengan rasio persentase PAD terhadap belanja Barang dan Kontribusi persentase PAD dalam menghasilkan aset daerah melalui belanja modal. Pengukuran tersebut disajikan melalui Grafik berikut :

Grafik 2. 30 Persentase Proporsi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 - 2025



Sumber : BKAD Tahun 2025, Data diolah

Berdasarkan Grafik di atas, Persentase proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah direntang 19-22%. Hal ini menunjukkan kemandirian keuangan Kabupaten Luwu Timur masih ralatif tinggi terhadap pendapatan yang bersumber dari dana transfer pemerintah pusat. Rasio PAD terhadap belanja barang dan jasa tergolong tinggi di rentang 53-60%, yang berarti bahwa jika belanja barang dan jasa tanpa memperhitungkan belanja pegawai, pembiayaannya bersumber dari PAD maka belanja barang dan jasa menelan porsi cukup besar dari PAD.

2.3.1.4.4 Rasio Pajak Daerah (Tax Rasio)

Rasio pajak merupakan suatu indikator yang menggambarkan tingkat kontribusi penerimaan pajak terhadap pendapatan dalam suatu perekonomian. Dalam kajian ini, istilah rasio pajak merujuk pada perbandingan antara total penerimaan pajak dengan total pendapatan ekonomi. Pada level pemerintah daerah, rasio pajak diukur melalui perbandingan antara penerimaan pajak daerah dengan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB). Dengan demikian, rasio pajak daerah menunjukkan seberapa besar peran pajak dalam mendukung kapasitas fiskal wilayah tersebut. Besaran rasio ini sangat dipengaruhi oleh nilai PDRB, karena semakin tinggi PDRB suatu daerah, maka potensi dan kapasitas pemungutan pajaknya juga cenderung meningkat.

Tabel 2. 180 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 – 2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0.9	0.78	0.71	0.8	1.338

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur tahun 2025

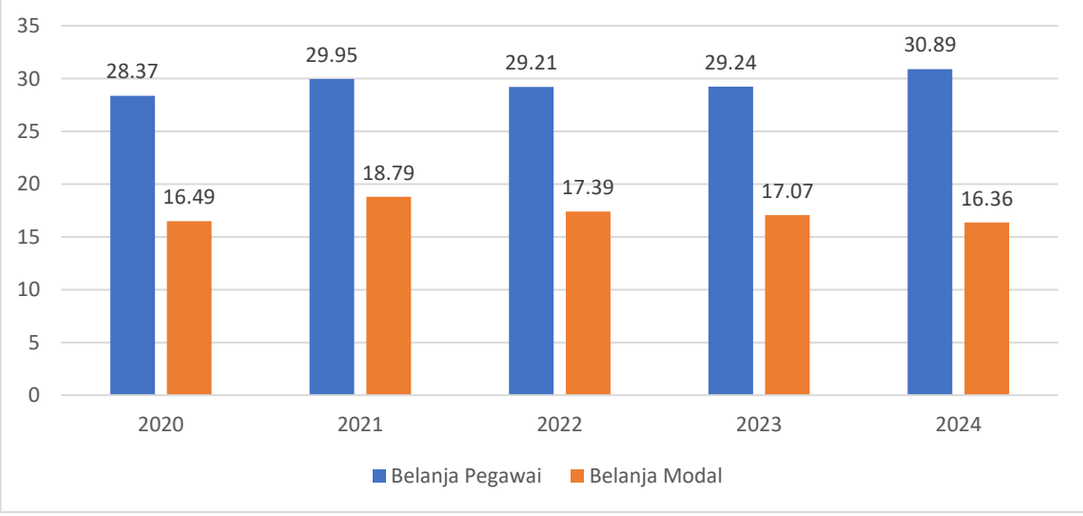
Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten Luwu Timur dalam lima tahun terakhir mengalami fluktuasi, dari 0,9% pada tahun 2020, turun menjadi 0,71% pada 2022, dan meningkat signifikan hingga mencapai 1,338% pada tahun 2024. Rasio ini mencerminkan kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap total output ekonomi wilayah, serta menunjukkan efektivitas kinerja fiskal daerah dalam menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD). Kenaikan tajam pada 2024 mengindikasikan adanya perbaikan dalam sistem pemungutan pajak, peningkatan kesadaran wajib pajak, serta penguatan kapasitas ekonomi yang dapat dikenai pajak. Meskipun demikian, nilai rasio ini masih berada pada level yang dapat ditingkatkan, sehingga diperlukan strategi penguatan kelembagaan perpajakan daerah, inovasi kebijakan fiskal, dan percepatan digitalisasi sistem pemungutan untuk mendorong kemandirian fiskal secara berkelanjutan.

2.3.1.4.5 Rasio Belanja Pegawai dan Belanja Modal

Rasio belanja pegawai dan belanja modal terhadap total belanja daerah merupakan indikator penting dalam menilai struktur dan kualitas pengeluaran pemerintah daerah. Belanja pegawai mencerminkan alokasi anggaran untuk gaji, tunjangan, serta pengeluaran lainnya yang berkaitan dengan aparatur sipil negara. Sementara itu, belanja modal menunjukkan investasi pemerintah dalam pembangunan infrastruktur dan aset tetap yang berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Rasio belanja pegawai yang tinggi sering kali menjadi indikator dominannya pengeluaran rutin dibandingkan dengan pengeluaran produktif. Hal ini dapat mengindikasikan rendahnya fleksibilitas fiskal dan terbatasnya ruang fiskal daerah untuk mendanai program-program pembangunan. Sebaliknya, rasio belanja modal yang lebih besar mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas ekonomi dan kualitas layanan publik melalui pembangunan sarana dan prasarana.Oleh karena itu, keseimbangan antara belanja pegawai dan belanja modal menjadi penting untuk menciptakan tata kelola keuangan daerah yang sehat, efisien, dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Analisis terhadap rasio-rasio ini dapat memberikan gambaran mengenai prioritas kebijakan fiskal daerah serta efektivitas dalam mengalokasikan sumber daya publik.

Grafik 2. 31 Rasio Belanja Pegawai dan Belanja Modal terhadap Belanja Daerah Tahun 2020 – 2030



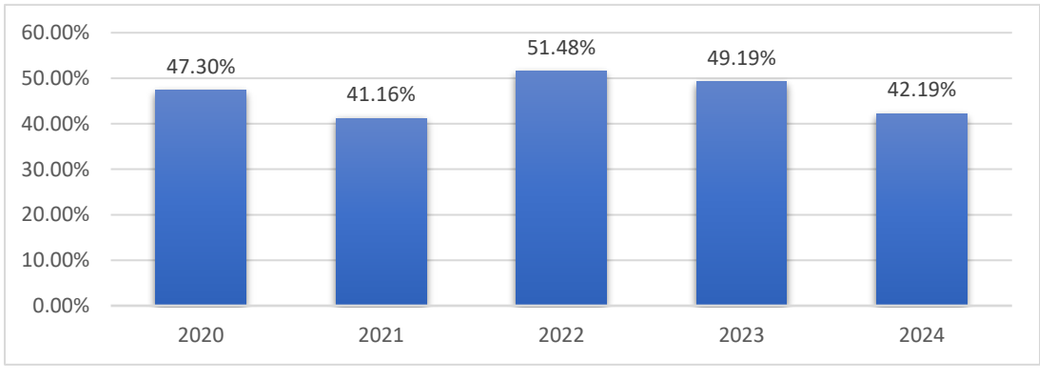
Sumber : BKAD Tahun 2025; Data diolah

Rasio belanja pegawai pemerintah luwu timur terhadap total bealanja daerah dari tahun 2020 hingga 2024 terus mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan adanya penambahan ASN (PNS dan P3K) dari tahun ketahun dalam lingkup pemerintah luwu timur. Sedangkan untuk rasio belanja modal cenderung stagnan, tertinggi hanya pada tahun 2021.

2.3.1.4.6 Derajat Desentralisasi Fiskal Murni

Derajat Desentralisasi fiskal murni merupakan suatu ukuran kemandirian daerah dengan memperbandingkan antara kemampuan memperoleh pendapatan yang bersumber dari daerah sendiri dibandingkan dengan total belanja daerah. Pendapatan yang bersumber dari daerah sendiri pada konteks ini adalah merupakan pendapatan yang dipungut didaerah kabupaten/kota apabila diasumsikan Pemerintah pusat mendesentralisasikan seluruh pajak negara pada daerah penghasil. Demikian pula untuk pajak-pajak provinsi yang objeknya berada didaerah diasumsikan diserahkan sepenuhnya pada daerah.

Grafik 2. 32 Rasio Derajat DesntralisasI Fiskal Murni Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020-2024



Sumber : BKAD Tahun 2025; Data diolah.

Berdasarkan Grafik diatas, dapat dijelaskan bahwa derajat desentralisasi fiskal murni kabupaten luwu timur dari tahun 2020-2024 menunjukkan hal yang positif, yang tergambarkan dari nilai rasionya di atas 40%.Hal ini dikarenakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari PAD, DBH Pemerintah Pusat dan DBH Provinsi serta capaian belanja daerah yang terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun.

2.3.1.4.7 Kapasitas Fiskal Daerah

Kapasitas Fiskal Daerah merupakan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu. Kapasitas fiskal daerah diukur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Kapasitas Fiskal Daerah yang di terbitkan setiap tahun. Peta Kapasitas Fiskal Daerah adalah gambaran kemampuan keuangan daerah yang dikelompokkan berdasarkan indeks kapasitas fiskal daerah.

Tabel 2. 181 Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020-2024

TAHUN	INDEKS KFD	KATEGORI KFD
2020	1,127	Sedang
2021	1,023	Sedang
2022	2,277	Sangat Tinggi
2023	1,676	Tinggi
2024	1,897	Sangat Tinggi

Sumber : Kementerian Keuangan RI

2.3.1.5 Analisis Share Belanja Daerah terhadap Nilai PDRB menurut pengeluaran

Share Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut pengeluaran menggambarkan seberapa besar peran belanja pemerintah daerah dalam mendorong aktivitas ekonomi di suatu wilayah. Dalam pendekatan pengeluaran, PDRB mencerminkan total permintaan akhir terhadap barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu daerah, yang terdiri dari konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, investasi (pembentukan modal tetap bruto), perubahan inventori, serta ekspor neto.

Belanja pemerintah daerah yang tercermin dalam APBD, terutama pada komponen belanja barang dan jasa serta belanja modal, secara langsung masuk ke dalam komponen konsumsi pemerintah (G) dan pembentukan modal tetap bruto

(PMTB) dalam perhitungan PDRB. Oleh karena itu, semakin besar nilai APBD yang dialokasikan untuk belanja produktif, semakin tinggi kontribusinya terhadap peningkatan nilai tambah ekonomi daerah.

Pada Persentase share APBD terhadap PDRB ini dihitung dengan membandingkan total realisasi belanja daerah jeis belanja barang dan jasa dengan nilai PDRB menurut jenis pengeluaran atas dasar harga berlaku. Nilai ini memberikan gambaran mengenai kapasitas fiskal daerah dalam mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Share yang tinggi dapat mencerminkan ketergantungan aktivitas ekonomi terhadap intervensi fiskal pemerintah, sedangkan share yang rendah menunjukkan bahwa peran sektor swasta dan rumah tangga lebih dominan dalam struktur ekonomi wilayah.

Analisis terhadap share APBD terhadap PDRB untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan fiskal daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, pemanfaatan APBD harus diarahkan untuk menciptakan dampak ekonomi multiplikatif yang luas, baik melalui penguatan infrastruktur, layanan publik, maupun investasi sektor strategis daerah.

Tabel 2. 182 Share Belanja Daerah terhadap Nilai PDRB Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020-2024

Tahun	KONSUMSI PEMERINTAH	TOTAL BELANJA OPEASI	SHARE BELANJA OPERASI TERHADAP KONSUMSI PEMERINTAH
2020	1.104.210.000,00	986.043.221.454,00	89,29
2021	1.123.790.000,00	1.020.460.843.809,88	90,80
2022	1.233.350.000,00	1.060.206.782.144,49	85,96
2023	1.364.710.000,00	1.192.242.657.694,66	87,36

Sumber : BKAD Tahun 2025; Data diolah

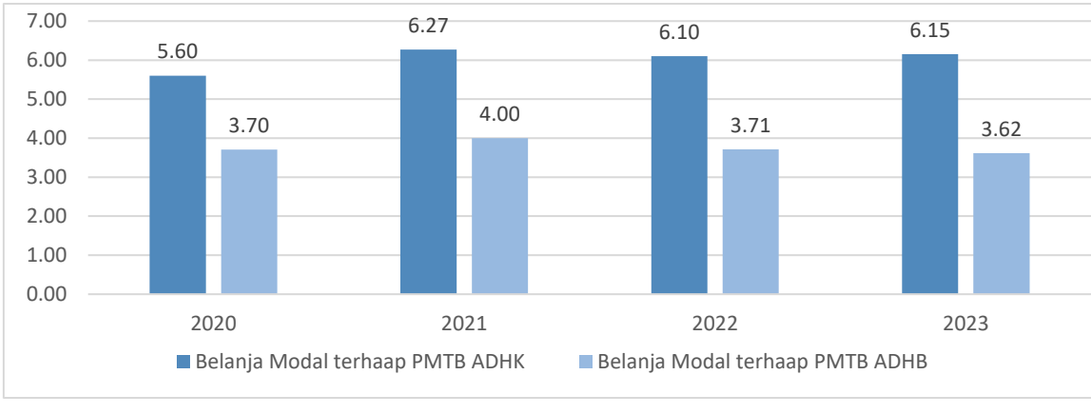
Berdasarkan tabel diatas, terlihat share belanja daerah Jenis Belanja Barang da jasa pemerintah luwu timur terhadap konsumsi pemerintah pada PDRB menurut jenis pengeluaran dari tahun 2020 hingga 2024 cukup signifikan mencapai 80-90%

2.3.1.6 Analisis Share Belanja Modal terhadap PMTB menurut pengeluaran

Belanja modal merupakan salah satu komponen penting dalam pengeluaran pemerintah yang diarahkan untuk pembentukan aset tetap jangka panjang, seperti pembangunan infrastruktur, pengadaan alat berat, serta pembangunan sarana dan prasarana publik. Dalam konteks makroekonomi, kontribusi belanja modal pemerintah terhadap Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) menjadi indikator penting untuk menilai peran pemerintah dalam mendorong investasi domestik.

Dengan menganalisis share belanja modal terhadap PMTB baik dalam ADHB maupun ADHK, kita dapat memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai efektivitas dan kontribusi belanja modal dalam mendorong investasi secara nominal maupun riil.

Grafik 2. 33 Share Belanja Modal terhadap PMTB Tahun 2020-2023



Sumber: BKAD Tahun 2025; data diolah

Berdasarkan Graifk 2.45, share belanja modal terhadap PMTB ADHK dan ADHB menunjukkan share belanja modal terhadap PMTB ADHK menunjukkan kenaikan, sedangkan terhadap PMTB ADHB cenderung mengalami penurunan. Kecenderungan share belanja modal terhadap PMTB ADHB biasanya dipengaruhi oleh kebijakan fiskal, kapasitas fiskal pemerintah, dan dinamika harga pasar. Apabila proporsi belanja modal terhadap PMTB ADHB meningkat, hal ini mengindikasikan peran aktif pemerintah dalam mendorong pertumbuhan investasi melalui pembelanjaan langsung.

Sementara itu, dari sisi atas dasar harga konstan (ADHK), share belanja modal terhadap PMTB mencerminkan kontribusi riil atau volume fisik dari belanja modal pemerintah dalam keseluruhan pembentukan modal tetap. Indikator ini menggambarkan dampak kuantitatif dari pengeluaran pemerintah terhadap investasi riil, terlepas dari pengaruh inflasi atau perubahan harga. Kenaikan share belanja modal terhadap PMTB ADHK menunjukkan peningkatan volume investasi riil yang dilakukan oleh pemerintah, dan sebaliknya.

2.3.1.7 Analisis Ratio Likuiditas dan Ratio Solvabilitas

2.3.1.7.1 Ratio Likuiditas

Rasio Likuiditas merupakan kemampuan suatu perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu, yang dapat diukur dengan pendekatan Rasio Lancar *(Current Ratio)* dan Rasio Cepat *(Quick Ratio).*

a. Current Ratio, merupakan rasio untuk mengukur kemampuan entitas dalam membayar kewajiban jangka pendek atau hutang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Standar umum rata-rata 2:1 atau atau minimal 2 kali, artinya dengan hasil rasio seperti itu, berada dititik aman dalam jangka pendek.

b. Quick Ratio, atau ratio sangat lancar (acid test ratio) merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan dalam memenuhi atau membayar kewajiban atau hutang lancar (hutang jangka pendek) dengan aktiva lancar tanpa mempertimbangkan nilai persediaan (inventory). Standar umum rata-rata 1 : 1 atau minimal 1,5 kali.

2.3.1.7.2 Rasio Solvabilitas

Rasio Solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva dibiayai dengan hutang. Artinya berapa besar beban hutang yang ditanggung dibandingkan dengan aktivanya. Dalam arti luas dapat dikatakan bahwa rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan untuk membayar seluruh kewajiban, baik jangka pendek ataupun jangka panjang. Hal ini dapat diukur dengan pendekatan Debt To Asset Rasio (DAR) dan Debt To Equity Rasio (DER).

a. Debt To Asset Ratio, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar aktiva dibiayai oleh hutang, atau seberapa hutang berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Semakin tinggi DAR akan menunjukkan semakin berisiko karena semakin besar hutang yang digunakan untuk pembelian asetnya.

b. Debt to Equity Ratio digunakan untuk mengukur seberapa besar modal sendiri atas hutang yaitu perbandingan antara modal sendiri dengan total hutang (hutang lancar + hutang jangka panjang). Rasio ini menggambarkan sampai sejauh mana modal pemilik dapat menutup hutang-hutang kepada pihak luar.Tujuannya adalah untuk mengukur seberapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan total hutang dengan cara membandingkan antara total hutang dengan modal sendiri yang disediakan.

Tabel 2. 183 Ratio Likuiditas dan Solvabilitas Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020-2023

Tahun	Ratio Likuiditas		Ratio Solvabilitas	
	Current Ratio	Quick Ratio	Debt To Asset Ratio	Debt To Equity Ratio
2020	4,74	3,36	1,30	1,31
2021	5,42	4,49	1,57	1,60
2022	4,86	3,87	1,91	1,94
2023	4,79	3,44	1,49	1,52

Sumber : Data diolah

Berdasarkan tabel di atas, rasio keuangan yang dianalisis terdiri atas rasio likuiditas dan solvabilitas. Rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio likuditas yang digunakan dalam analisis yaitu:

a. Current Rasio atau rasio lancar menunjukkan kemampuan untuk membayar hutang yang segera harus dipenuhi dengan aktiva lancar. Berdasarkan tabel di atas, Rasio lancar pada Tahun 2023 sebesar 4,79. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Luwu Timur mempunyai kemampuan untuk membayar hutang sebesar 4 kali lebih.
b. Quick Rasio atau rasio cepat menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid. Berdasarkan tabel diatas, Rasio Quick pada Tahun 2023 sebesar 3,44. Ini berarti kemampuan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam membayar kewajiban jangka pendeknya sangat baik

Sedangkan Rasio Solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Rasio Solvabilitas terdiri atas:

1. Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aktiva, dimana semakin besar nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh hutang terhadap pembiayaan dan menandakan semakin besar risiko yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Besar Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset pada Tahun 2023 sebesar 1,49. Hal ini berarti pengaruh hutang terhadap aktiva sangat kecil.

2. Rasio Hutang Terhadap Modal menunjukkan seberapa perlu hutang jika dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki, dimana semakin kecil nilainya berarti semakin mandiri, tidak tergantung pembiayaan dari pihak lain. Pada Tahun 2023 Rasio Hutang Terhadap Modal Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sebesar 1,52. Hal ini menunjukkan bahwa nilai total hutang berada di bawah nilai modal yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Luwu Timur semakin mandiri dan tidak tergantung pada hutang.

2.3.1.8 Analisis Rasio Arus Kas (Cash Flow Ratio)

Rasio arus kas mengukur proporsi sumber penerimaan kas daerah ditinjau dari sisi operasi (Operating), Investasi (Investing), dan Pembiayaan (Financing). Secara teoritik sebuah entitas dianggap sehat apabila sumber penerimaannya sebagian besar berasal dari aktivitas operasi.Hal ini mengingat aktivitas operasi merupakan aktivitas utama dari sebuah entitas.

Tabel 2. 184 Cash Flow Ratio Analysis Kab.Luwu Timur 2020-2023

Tahun	Operating Inflow Ratio	Investing Inflow Ratio	Financing Inflow Ratio	Operating Cash Flow Ratio
2020	96,32	0,03	3,65	124,60
2021	95,80	0,00	4,20	126,99
2022	96,09	0,00	3,90	125,85
2023	95,66	0,04	4,29	116,63

Sumber : Data diolah

Cash Flow Pemerintah luwu timur dari tahun 2020 hingga 2023 menunjukkan trend yang positif. Operating inflow rasio menunjukkan nilai direntang 95-96%, financing inflow rasio di rentang 3-4% dan Operating Cash Flow Rasio direntang 116-126 persen. Sedangkan investing inflow rasio sangat rendah hanya 0,04%. Namun secara keseluruhan cash flow pemerintah luwu timur terkategori sangat baik.

2.3.2 KERANGKA PENDANAAN

Kerangka pendanaan merupakan instrumen strategis dalam perencanaan penganggaran yang memproyeksikan kebutuhan dan kapasitas fiskal selama lima tahun ke depan. Sebagai bagian dari perspektif perencanaan jangka menengah, penyusunan kerangka ini didasarkan pada proyeksi asumsi makroekonomi, trend realisasi capaian APBD lima tahun lalu, serta pertimbangan kondisi sosial yang relevan. Penjabaran kapasitas fiskal riil dalam kerangka ini harus diorientasikan pada kebutuhan pembangunan daerah yang telah ditetapkan sebagai prioritas dalam

rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Oleh karena itu, alokasi anggaran dalam kerangka pendanaan mencerminkan besaran dan struktur pembiayaan yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah secara akuntabel dan berkelanjutan.

2.3.2.1 Asumsi Makro Ekonomi dan Kondisi Sosial Daerah

Asumsi makro ekonomi daerah dan kondisi sosial masyarakat memiliki keterkaitan yang erat, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap keuangan daerah di masa mendatang. Di satu sisi, indikator makro ekonomi dan sosial mencerminkan kondisi yang diinginkan sebagai tujuan pembangunan, sementara di sisi lain indikator tersebut menjadi faktor determinan dalam mengkreasikan potensi pendapatan daerah yang dapat digali. Dengan demikian, indikator-indikator tersebut bukan hanya sekadar ukuran kinerja pembangunan yang akan menentukan besarnya kebutuhan belanja daerah, tetapi juga mencerminkan peluang yang dapat dimanfaatkan pemerintah daerah untuk memperkuat basis penerimaan dan memperbesar pendapatan daerah di masa depan.

Tabel 2. 185 Proyeksi Indikator Makro Ekonomi dan Sosial Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2030

No	Indikator Makro	Satuan	Baseline 2024	Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	76,44	76,72	77,07	77,42	77,75	78,04	78,38
2	Tingkat kemiskinan	Persen	6,55	6,47-5,88	6,3-5.35	6,11-5,34	5,83-5,33	5,56-4,56	5,29-4,49
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,58	4,49	4,34	4,31	4,22	4,13	4,03
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	3,27	3,57	5,31-6,11	5,35-6,15	5,39-6,19	5,43-6,27	5,47-6,27
5	PDRB Perkapita	Rp. Juta	97,18	100,65	101,89	106	109,15	123,59	131,34
6	Rasio Gini	Nilai	0,350	0,344	0,337	0,331	0,325	0,319	0,312
7	Penurunan Intensitas Emisi GRK	Persen	2,11	2,11	2.31	2.93	3.56	4.17	4,88
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	77,93	81,74	81,91	82,08	82,25	82,42	82,59
9	Kontribusi PDRB Kabupaten	Persen	4,36	4,69	4,72	4,75	4,78	4,81	4,84

Sumber : Bapperida,Data diolah Tahun 2025

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Luwu Timur diproyeksikan terus meningkat dari 76,44 pada tahun 2024 menjadi 78,38 pada tahun 2030, mencerminkan perbaikan kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat. Sejalan dengan itu, Tingkat kemiskinan diperkirakan menurun dari 6,55 persen menjadi sekitar 4,5–5,3 persen pada 2030 melalui penguatan perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan pemerataan pembangunan desa–kota. Tingkat pengangguran terbuka juga diproyeksikan turun dari 4,58 persen menjadi 4,03 persen, didorong oleh penciptaan lapangan kerja baru, pengembangan

sektor unggulan, serta peningkatan investasi. Pertumbuhan ekonomi daerah diperkirakan meningkat signifikan dari 3,27 persen pada 2024 menuju kisaran 5,5–6,3 persen di 2030, sehingga mendorong kenaikan PDRB per kapita dari Rp97,18 juta menjadi Rp131,34 juta. Peningkatan ini diharapkan disertai dengan penurunan ketimpangan, di mana Rasio Gini menurun dari 0,350 menjadi 0,312, mencerminkan distribusi pendapatan yang lebih merata. Dari sisi lingkungan, komitmen pembangunan berkelanjutan ditunjukkan melalui penurunan intensitas gas rumah kaca dari 2,11 persen menjadi 4,59 persen serta peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dari 77,93 menjadi 85,2. Pada saat yang sama, kontribusi PDRB Kabupaten Luwu Timur terhadap perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan diperkirakan meningkat dari 4,36 persen menjadi 4,84 persen, menegaskan peran strategis Luwu Timur sebagai salah satu motor pertumbuhan ekonomi daerah di masa mendatang.

2.3.2.2 Proyeksi Pendapatan Daerah

Dalam rangka memperkuat kemandirian fiskal dan mendukung agenda pembangunan berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui strategi **intensifikasi dan ekstensifikasi** yang terarah dan adaptif terhadap potensi daerah.

a. **Intensifikasi PAD,** dilakukan dengan mengoptimalkan sumber pendapatan yang sudah ada, seperti pajak daerah dan retribusi daerah. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur terus mendorong peningkatan efektivitas pemungutan pajak, seperti Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), pajak mineral bukan logam dan batuan, serta retribusi jasa usaha. Digitalisasi layanan, pembaruan basis data wajib pajak, dan peningkatan kesadaran masyarakat menjadi bagian penting dalam strategi ini untuk memastikan penerimaan PAD berjalan optimal dan transparan.

b. **ekstensifikasi PAD** difokuskan pada perluasan dan penggalian potensi baru yang belum tergarap secara maksimal. Kabupaten Luwu Timur memiliki sumber daya alam dan potensi ekonomi lokal yang besar, mulai dari sektor pertambangan, pertanian, perikanan, hingga pariwisata alam. Pemerintah daerah mendorong terbentuknya unit-unit usaha milik daerah (BUMD) yang inovatif, serta mendorong pemanfaatan aset-aset daerah yang masih idle untuk menjadi sumber pendapatan baru.

Tabel 2. 186 Target Pendapatan Tahun 2025 dan Proyeksi Pendapatan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2026-2030

NO	URAIAN	BASE LINE 2025	PROYEKSI 2026	PROYEKSI 2027	PROYEKSI 2028	PROYEKSI 2029	PROYEKSI 2030
1	**PENDAPATAN**	**2.056.791.920.400,00**	**2.297.020.947.750,00**	**2.388.080.051.550**	**2.600.020.582.950,00**	**2.800.636.075.250,00**	**3.044.926.804.450,00**
1 . 1	**Pendapatan Asli Daerah**	**478.888.988.337,80**	**546.528.594.750,00**	**679.473.150.350,00**	**794.525.796.950,00**	**891.446.390.950,00**	**972.481.340.950,00**
	Pajak Daerah	260.907.207.986,00	271.985.000.000,00	315.245.000.000,00	352.600.000.000,00	397.900.000.000,00	430.900.000.000,00
	Retribusi Daerah	103.299.535.950,00	103.543.594.750,00	90.938.150.350,00	90.114.696.950,00	91.725.390.950,00	93.279.340.950,00
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	75.625.000.000,00	131.000.000.000,00	231.290.000.000,00	308.811.100.000,00	357.821.000.000,00	403.302.000.000,00
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	39.057.244.401,40	40.000.000.000,00	42.000.000.000,00	43.000.000.000,00	44.000.000.000,00	45.000.000.000,00
1 . 2	**Pendapatan Transfer**	**1.513.402.932.062,20**	**1.630.992.353.000,00**	**1.591.106.901.200,00**	**1.681.494.786.000,00**	**1.777.189.684.300,00**	**1.932.445.463.500,00**
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.236.167.632.000,00	1.394.992.353.000,00	1.345.606.901.200,00	1.415.994.786.000,00	1.500.689.684.300,00	1.624.945.463.500,00
	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	277.235.300.062,20	236.000.000.000,00	245.500.000.000,00	265.500.000.000,00	276.500.000.000,00	307.500.000.000,00
1 . 3	**Lain-lain pendapatan daerah yang sah**	**64.500.000.000,00**	**119.500.000.000,00**	**117.000.000.000,00**	**124.000.000.000,00**	**132.000.000.000,00**	**140.000.000.000,00**
	Pendapatan Hibah dari pemerintah pusat	0,00	0,00	4,500.000.000,00	6.000.000.000,00	7.500.000.000,00	8.000.000.000,00
	Hibah dari badan usaha LN dan DN	64.500.000.000,00	119.500.000.000,00	113.000.000.000,00	118.000.000.000,00	124.000.000.000,00	132.000.000.000,00

Sumber: Bapenda data diolah tahun 2025

2.3.2.3 Proyeksi Belanja Daerah

Kebijakan Belanja Daerah di Kabupaten Luwu Timur Pada Tahun 2025–2030 akan diarahkan dengan beberapa kebijakan sebagai berikut:

a. Membiayai program dan kegiatan yang menjadi prioritas Kabupaten Luwu Timur, dalam kurun waktu 2025-2030;
b. Membiayai pelaksanaan program prioritas daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan sesuai kewenangan pemerintah daerah;
c. Memenuhi pelaksanaan Program Standar Pelayanan Minimal (SPM);
d. Mengakomodir program pembangunan yang sesuai aspirasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang prioritas untuk dilaksanakan;
e. Melaksanakan program yang menunjang indikator makro ekonomi daerah terutama mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja,pengentasan kemiskinan dan mendorong peningkatan Human Development Indeks atau IPM.
f. Memenuhi belanja yang bersifat wajib dan mengikat untuk keberlangsungan pemenuhan pelayanan dasar;
g. Memenuhi alokasi belanja daerah untuk sektor Pendidikan minimal 20%.

Kebijakan Belanja Daerah disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, dan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun mendatang,dengan cara selektif, terukur, akuntabel, transparan, dan berkeadilan.

Kebutuhan belanja daerah tahun 2025-2030 diproyeksikan meningkat dalam rangka untuk mendorong percepatan pencapaian target pembangunan sesuai target rencana pembangunan yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan dinamika perekonomian Global dan Nasional. Selain itu, Kebijakan belanja daerah tetap mengacu pada regulasi-ragulasi pemerintah pusat yang telah ada dan yang terbaru.

Tabel 2. 187 Target Belanja Tahun 2025 dan Proyeksi Belanja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2026-2030

NO	URAIAN	BASE LINE 2025	PROYEKSI 2026	PROYEKSI 2027	PROYEKSI 2028	PROYEKSI 2029	PROYEKSI 2030
2	**BELANJA**	**2,111,020,770,505.92**	**2,363,328,659,126.50**	**2,428,525,166,407.02**	**2,640,020,582,950.00**	**2,815,636,075,250.00**	**3,071,926,804,450.00**
2.01	**Belanja Operasi**	**1,457,262,568,546.62**	**1,682,019,772,637.00**	**1,708,159,050,755.27**	**1,760,682,936,520.40**	**1,795,514,651,441.81**	**1,831,538,222,523.42**
2.01.1	Belanja Pegawai	746,929,460,040.62	884,652,454,751.00	886,857,549,922.11	901,219,535,340.00	905,409,348,226.00	910,236,072,804.68
2.01.2	Belanja Barang dan Jasa	628,956,380,805.00	690,292,328,221.00	695,549,636,426.53	701,617,410,576.07	703,523,932,893.35	715,241,710,880.16
2.01.3	Belanja Hibah	66,152,927,701.00	49,027,189,665.00	58,252,869,406.63	67,884,098,789.33	93,920,621,753.01	95,466,652,840.66
2.01.4	Belanja Bantuan Sosial	15,223,800,000.00	58,047,800,000.00	67,498,995,000.00	89,961,891,815.00	92,660,748,569.45	110,593,785,997.92
2.02	**Belanja Modal**	**384,192,183,773.00**	**311,386,039,489.50**	**331,282,697,476.75**	**482,395,990,752.30**	**611,376,518,460.57**	**811,381,431,311.58**
2.02.1	Belanja Modal Tanah	12,975,460,000.00	2,246,480,000.00	3,302,642,000.00	2,398,503,794.56	3,470,458,908.40	2,593,981,853.82
2.02.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	81,740,466,417.00	38,419,762,912.00	42,380,256,984.80	51,745,910,424.34	58,114,043,823.07	110,326,307,781.97
2.02.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	164,194,006,107.00	120,000,000,000.00	124,775,000,000.00	139,693,940,150.00	145,250,629,250.00	151,163,160,712.50
2.02.4	Belanja Modal Jalan,Irigasi dan Jaringan	124,429,251,024.00	150,179,546,052.50	160,271,041,703.82	287,881,986,711.22	403,845,467,316.75	546,567,265,842.83
2.02.5	Belanja Modal Aset tetap lainnya	812,200,225.00	469,450,525.00	481,186,788.13	601,219,180.93	619,255,756.36	650,218,544.17
2.02.6	Belanja Modal Aset Lainnya	40,800,000.00	70,800,000.00	72,570,000.00	74,430,491.25	76,663,405.99	80,496,576.29
2.03	**Belanja Tidak Terduga**	**4,500,000,000.00**	**3,500,000,000.00**	**3,500,000,000.00**	**3,500,000,000.00**	**3,500,000,000.00**	**3,500,000,000.00**
2.03.1	Belanja Tidak Terduga	4,500,000,000.00	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00
2.04	**Belanja Transfer**	**265,066,018,186.30**	**366,422,847,000.00**	**385,583,418,175.00**	**393,441,655,677.30**	**405,244,905,347.62**	**425,507,150,615.00**
2.04.1	Belanja Bagi Hasil	26,132,567,566.30	38,130,000,000.00	39,083,250,000.00	39,880,167,000.00	41,076,572,010.00	43,130,400,610.50
2.04.2	Belanja Bantuan Keuangan	238,933,450,620.00	328,292,847,000.00	346,500,168,175.00	353,561,488,677.30	364,168,333,337.62	382,376,750,004.50

Sumber : BKAD tahun 2025

2.3.2.4 Proyeksi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah seluruh penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, dan pada hakikatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

2.3.2.4.1 Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan antara lain untuk:

a) Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebagai sumber penerimaan pada APBD Tahun Anggaran berjalan, didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional
b) SiLPA diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan anggaran;

Pada tahun 2025, Pembiayaan ditargetkan Rp93.643.378.918,00 dan diproyeksikan terus mengalami penurunan hingga tahun 2030 dengan proyeksi Rp 34.425.893.318,00. Kebijakan proyeksi pembiayaan daerah lebih diarahkan pada penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari silpa tidak begitu besar dengan harapan perencanaan anggaran dalam rangka pembiayaan program dapat terserap secara maksimal, proporsional dan efektif. Sedangkan untuk

2.3.2.4.2 Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan daerah pada tahun 2025 ditergetkan sebesar Rp.34.000.000.000,00 dan hingga tahun 2030 sebesar Rp7.425.893.318,00. Penyertaan modal pemerintah dalam bentuk investasi diharapkan dapat memberikan timbal balik pada kas daerah dalam bentuk deviden.

2.3.2.4.3 Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan

Pemerintah Luwu Timur tetap melakukan pengendalian batas maksimal defisit Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dengan berpedoman pada penetapan batas maksimal defisit Anggaran Pendapatan Belanja Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Tabel 2.188 Target Pembiayaan Daerah Tahun 2025 – 2030

URAIAN	BASE LINE 2025	PROYEKSI 2026	PROYEKSI 2027	PROYEKSI 2028	PROYEKSI 2029	PROYEKSI 2030
PEMBIAYAAN DAERAH						
Penerimaan Pembiayaan	**2**0.961.360.313,34					
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	0,00	73.307.711.376,50	47.445.114.857,02	48.000.000.000,00	21.500.000.000,00	34.425.893.318,00
Pengeluaran Pembiayaan						
Pengeluaran Pembiayaan	33.000.000.000,00	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	8.000.000.000,00	6.500.000.000,00	7.425.893.318,00
Pembiayaan Netto	-12.038.639.686,66	66.307.711.376,50	40.445.114.857,02	40.000.000.000,00	15.000.000.000,00	27.000.000.000,00

Sumber : BKAD tahun 2025

2.3.2.5 Proyeksi Belanja Wajib dan Mengikat

Belanja wajib mengikat merupakan komponen anggaran dalam APBD yang secara hukum dan kebijakan harus diprioritaskan oleh pemerintah daerah karena bersifat esensial, berkelanjutan, dan tidak dapat ditunda pelaksanaannya. Ketentuan mengenai belanja wajib ini diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan turunannya yang mengharuskan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan dasar pelayanan publik dan kewajiban administratif yang tidak dapat dikurangi.

Secara umum, belanja wajib mengikat mencakup pengeluaran yang dialokasikan untuk memenuhi kewajiban rutin dan fundamental daerah, seperti belanja pegawai (gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara), belanja operasional DPRD. Karakteristik utama belanja wajib mengikat adalah sifatnya yang tidak fleksibel, karena pengalokasiannya harus dilakukan terlebih dahulu sebelum belanja lainnya dapat direncanakan. Hal ini menyebabkan ruang fiskal (fiscal space) daerah menjadi terbatas, sehingga perencanaan belanja harus dilakukan dengan sangat hati-hati agar efisiensi dan efektivitas anggaran tetap terjaga.

Selain belanja wajib mengikat, maka perlu dihitung belanja transfer pemerintah daerah terhadap pemerintah desa dan pengeluaran pembiayaan daerah sebagai bagian dalam perhitungan pengluaran daerah,adapun dalam komponen Belanja Transfer, terdapat pengeluaran berupa belanja bagi hasil serta biaya pemungutan pajak dan retribusi daerah, yang merupakan bentuk transfer fiskal dari pemerintah kabupaten kepada pemerintahan desa. Transfer ini diwujudkan melalui alokasi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang penggunaannya diatur oleh peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis yang berlaku. Tujuannya adalah untuk mendorong pemerataan pembangunan, meningkatkan pelayanan publik di tingkat desa, serta memperkuat kapasitas keuangan desa dalam mendukung pembangunan berbasis masyarakat. Sementara itu, pada pos Pengeluaran Pembiayaan, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur mengalokasikan dana untuk kegiatan Penyertaan Modal (Investasi) Daerah, baik k kepada PT. Bank Sulselbar maupun BUMD.

Secara keseluruhan, proyeksi belanja wajib mengikat dan pembiayaan pengeluaran dalam dokumen ini menggambarkan arah kebijakan fiskal Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang menitikberatkan pada efisiensi, keberlanjutan fiskal, dan penguatan kelembagaan daerah untuk mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Tabel 2. 189 Analisis Proyeksi Belanja Wajib dan Mengikat dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2030

NO	URAIAN	BASE LINE	PROYEKSI	PROYEKSI	PROYEKSI	PROYEKSI	PROYEKSI
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
	BELANJA DAERAH						
A.	**Belanja Operasi**	**457.979.097.661,11**	**885.630.558.751,00**	**887.863.559.122,11**	**902.265.784.908,00**	**906.486.985.281,04**	**911.351.427.156,65**
	Belanja Gaji dan Tunjangan	457.066.617.661,11	884.652.454.751,00	886.857.549.922,11	901.219.535.340,00	905.409.348.226,00	910.236.072.804,68
	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	912.480.000,00	978.104.000,00	1.006.009.200,00	1.046.249.568,00	1.077.637.055,04	1.115.354.351,97
B	**Belanja Transfer**	**29.062.000.000,00**	**30.515.100.000**	**32.040.855.000**	**33.612.071.850**	**34.620.434.006**	**35.832.149.196**
	Belanja bagi hasil	28.130.000.000,00	29.536.500.000	31.013.325.000,00	32.563.991.250,00	33.540.910.987,50	34.714.842.872,06
	Biaya Penungutan Pajak dan Retribusi Daerah	932.000.000,00	978.600.000	1.027.530.000,00	1.048.080.600,00	1.079.523.018,00	1.117.306.323,63
C	**Pengeluaran Pembiayaan**	**34.000.000.000,00**	**7.000.000.000,00**	**7.000.000.000,00**	**8.000.000.000,00**	**6.500.000.000,00**	**7.425.893.318,00**
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	34.000.000.000,00	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	8.000.000.000,00	6.500.000.000,00	7.425.893.318,00
	TOTAL BELANJA WAJIB DAN PENGELUARAN YANG WAJIB MENGIKAT SERTA PRIORITAS UTAMA	**521.041.097.661,11**	**923.145.658.751,00**	**926.904.414.122,11**	**943.877.856.758,00**	**947.607.419.286,54**	**954.609.469.670,34**

Sumber : BKAD Data diolah tahun 2025

Pada Tabel di atas disajikan Analisis Proyeksi Belanja Wajib mengikat dan Pembiayaan Pengeluaran Kabupaten Luwu Timur Tahun 2026-2030 yang meliputi Belanja Operasi, Belanja Transfer dan Pengeluaran Pembiayaan. Belanja Pegawai dan Tunjangannya sebagai salah satu belanja wajib yang bersumber dari Pendapatan dari Dana Transfer Umum dalam Pos Dana Alokasi Umum (DAU).Peningkatan Belanja Pegawai dan Tunjangan dengan acres 2,5% juga untuk mengantisipasi penerimaan ASN. Untuk belanja Operasi, Belanja Pegawai dan Tunjangan adalah belanja wajib yang dikeluarkan untuk membiayai gaji PNS beserta tunjangannya serta tambahan penghasilan PNS. Begitupun Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH adalah belanja yang diperuntukkan untuk Gaji dan Tunjangan beserta biaya operasional Kepala Daerah,Wakil Kepala, pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.

Pada Belanja Transfer yang meliputi belanja bagi hasil dan Biaya pemungutan pajak dan retribusi daerah adalah belanja Transfer dari pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur kepada Pemerintah Desa yang terdiri dari Dana Desa dan Anggaran Dana Desa (ADD) yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan dan Petunjuk Tekhnis penyaluran dan pengguanannya. Sedangkan untuk Pengeluaran Pembiayaan yang meliputi Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur di alokasikan Investasi kepada PT.Bank Sulelbar dan Badan usaha Milik Daerah (BUMD) yang dapat berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam bentuk Deviden.

2.3.2.6 Kapasitas Rill

Penyajian analisis Kapasitas Rill kemampuan keuangan daerah menjelaskan seberapa besar Kemampuan keuangan daerah yang akan di gunakan dalam membiayai Program Prioritas setelah belanja wajib dan pengeluaran wajib mengikat serta prioritas utama dengan menghitung proyeksi pendapatan dan penerimaan pembiayaan. Hal ini sebagai acuan dalam pengalokasian anggaran dalam belanja program kegiatan untuk menunjang Penyelenggaraan pemerintahan dan pencapaian Visi Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Analisis Kapasitas Rill kemampuan keuangan daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2030 di sajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 2. 190 Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah untuk membiayai Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2030

NO	URAIAN	BASE LINE 2025	PROYEKSI 2026	PROYEKSI 2027	PROYEKSI 2028	PROYEKSI 2029	PROYEKSI 2030
1	Pendapatan	2.056.791.920.400,00	2.337.326.364.100,00	2.466.525.166.407,00	2.842.065.117.800,00	3.110.697.827.420,00	3.221.046.136.000,00
	Sisa Rill Perhitungan Anggaran	93.643.378.915,00	56.353.927.865,00	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	30.500.000.000,00	30.500.000.000,00
2.	Total Penerimaan	2.150.435.299.315,00	2.393.680.291.965,00	2.496.525.166.407,00	2.872.065.117.800,00	3.141.197.827.420,00	3.251.546.136.000,00
	Di Kurangi :						
	Total Belanja Wajib dan Pengeluaran Yang Wajib Mengikat Serta Prioritas Utama	521.041.097.661,11	754.477.291.589,50	786.904.414.122,11	901.877.856.758,00	982.607.419.286,54	1.017.609.469.670,34
3.	Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah	1.629.394.201.653,89	1.639.203.000.375,50	1.709.620.752.284,89	1.970.187.261.042,00	2.158.590.408.133,46	2.233.936.666.329,66

Sumber : BKAD Data diolah Tahun 2025

Berdasarkan proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah, selanjutnya ditetapkan kebijakan alokasi dari kapasitas kemampuan keuangan daerah agar dalam mengalokasikan anggaran benar-benar sesuai dengan prioritas daerah. Selanjutnya ditetapkan kebijakan alokasi dari kapasitas kemampuan keuangan daerah tersebut kedalam 3 Kelompok Prioritas, yaitu Prioritas I, Prioritas II dan Prioritas III, yaitu:

Prioritas I, merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan Kepala daerah yang terintegrasi dengan program nasional dan harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan minimal 20% (duapuluh persen), pemenuhan SPM/penerapan pelayanan dasar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, serta memberikan dampak luas pada masyarakat dan juga berdampak pada capaian visi/misi daerah. selain itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prioritas II, merupakan program prioritas ditingkat SKPD yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan. Suatu prioritas II berhubungan dengan program/kegiatan unggulan SKPD berkaitan dengan visi misi Kepala Daerah dan berhubungan dengan pelayanan serta tugas dan fungsi SKPD.

Prioritas III, merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Tabel 2. 191 Rencana Alokasi Penggunaan Kemampuan Keuangan Daerah Menurut Kelompok Prioritas Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2030

Kelompok Prioritas RPJMD 2025-2030	PROYEKSI					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Kemampuan Keuangan Daerah	**1.629.394.201.653,89**	**1.447.183.000.375,50**	**1.508.620.752.284,91**	**1.704.142.726.192,00**	**1.874.528.655.963,46**	**2.124.743.228.097,66**
Kelompok Prioritas I (Pertama)	814.697.100.826,95	723.591.500.187,75	754.310.376.142,46	852.071.363.096,00	937.264.327.981,73	1.062.371.614.048,83
Kelompok Prioritas II (Kedua)	488.818.260.496,17	434.154.900.112,65	452.586.225.685,47	511.242.817.857,60	562.358.596.789,04	637.422.968.429,30
Kelompok Prioritas III (Ketiga)	325.878.840.330,78	289.436.600.075,10	301.724.150.456,98	340.828.545.238,40	374.905.731.192,69	424.948.645.619,53

Sumber : BKAD, Data diolah tahun 2025

2.4 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS.

2.4.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH.

Permasalahan Pembangunan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realitas/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia/dicapai. Hasil evaluasi terhadap gambaran umum kondisi daerah menjadi dasar identifikasi sejumlah permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan dan isu strategis daerah yang perlu diselesaikan dalam 5(lima) tahun ke depan dalam periode tahun 2025 - 2029. Beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian dalam pembangunan jangka panjang Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut:

2.4.1.1 Belum optimalnya Laju Pertumbuhan Perekonomian Daerah

Laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Luwu Timur dalam lima tahun terakhir masih menghadapi berbagai tantangan sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat belum optimal. Capaian pertumbuhan ekonomi menunjukkan fluktuasi cukup tajam, yaitu sebesar –1,39 persen pada tahun 2021, kemudian melonjak signifikan menjadi 9,66 persen pada tahun 2023, namun kembali menurun menjadi 3,27 persen pada tahun 2024. Kondisi ini mencerminkan tingginya ketergantungan struktur ekonomi daerah pada sektor pertambangan dan penggalian. Ketergantungan pada sektor ekstraktif tersebut membuat perekonomian daerah rentan terhadap gejolak harga komoditas global dan belum mampu menciptakan fondasi pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

Di sisi lain, peningkatan ekonomi belum sepenuhnya diikuti penciptaan lapangan kerja yang memadai, di mana penurunan angka pengangguran cenderung melambat hingga tahun 2024. Permasalahan kesenjangan distribusi pendapatan juga masih terlihat jelas, karena manfaat pertumbuhan ekonomi belum dirasakan secara merata, terutama bagi masyarakat yang bekerja di sektor informal serta pelaku UMKM. Keterbatasan infrastruktur pendukung, rendahnya investasi di sektor non-pertambangan, serta lemahnya inovasi dan daya saing industri lokal semakin memperlambat transformasi ekonomi daerah.

Menghadapi tantangan tersebut, diperlukan kebijakan yang lebih progresif untuk mendorong diversifikasi ekonomi melalui pengembangan sektor industri pengolahan, penguatan sektor unggulan daerah, serta pemberdayaan UMKM dan ekonomi kreatif. Selain itu, peningkatan investasi daerah, pengembangan kawasan ekonomi terpadu, optimalisasi alokasi APBD untuk kegiatan produktif, serta strategi promosi dan kerja sama daerah perlu diakselerasi agar mampu memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi Luwu Timur yang lebih inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

2.4.1.2 Ketimpangan Pendapatan Masyarakat Masih Tinggi

Kesenjangan pendapatan di Kabupaten Luwu Timur masih menjadi salah satu permasalahan utama yang menghambat terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dalam lima tahun terakhir. Hal ini tergambar dari capaian gini ratio sebesar 0,405 pada tahun 2020 yang meskipun mengalami perbaikan menjadi 0,35 pada tahun 2024, namun masih berada pada kategori ketimpangan

pendapatan sedang–tinggi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa manfaat dari pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Sebagian besar pendapatan masih terkonsentrasi pada kelompok tertentu yang terlibat langsung dalam industri pertambangan dan perusahaan besar, sedangkan masyarakat yang bekerja di sektor pertanian, perikanan, serta usaha mikro kecil menengah (UMKM) cenderung memiliki tingkat pendapatan yang lebih rendah.

Selain itu, keterbatasan akses terhadap pendidikan berkualitas dan pelatihan keterampilan semakin memperlebar kesenjangan, karena tenaga kerja lokal sering kalah bersaing dengan tenaga kerja dari luar daerah yang lebih terampil. Ketimpangan distribusi sumber daya ekonomi juga terlihat jelas dari perbedaan pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik antara kawasan perkotaan dan pedesaan, yang semakin memperdalam jurang kesejahteraan. Jika tidak segera diatasi, kesenjangan pendapatan ini berpotensi menimbulkan ketidakstabilan sosial serta memperlambat akselerasi pertumbuhan ekonomi inklusif di Luwu Timur.

Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan langkah strategis yang berfokus pada pemerataan akses ekonomi dan kesempatan kerja, pelaksanaan reforma agraria dan peningkatan akses lahan produktif, serta penguatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang merata. Kebijakan fiskal yang berkeadilan, penguatan program perlindungan sosial yang terarah, serta percepatan pembangunan infrastruktur dasar di seluruh wilayah juga menjadi faktor kunci dalam memperkecil ketimpangan pendapatan. Dengan intervensi kebijakan yang terukur dan berkesinambungan, diharapkan kesenjangan pendapatan di Kabupaten Luwu Timur dapat ditekan, sehingga pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan dapat terwujud.

2.4.1.3 Melambatnya Penurunan Tingkat kemiskinan

Penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren yang relatif melambat. Data mencatat tingkat kemiskinan sebesar 6,85 persen pada tahun 2020 dan hanya mengalami penurunan 0,30 poin menjadi 6,55 persen pada tahun 2024, sehingga masih jauh dari target ideal di bawah 5,00 persen. Kondisi ini mengindikasikan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan belum sepenuhnya optimal. Beberapa faktor penyebab antara lain penanganan kemiskinan yang belum terfokus pada kantong-kantong kemiskinan tertinggi, meningkatnya rasio ketergantungan penduduk yang memperbesar beban ekonomi kelompok usia produktif, serta belum optimalnya integrasi layanan dan sistem data kependudukan sebagai basis perencanaan penanganan kemiskinan dan perlindungan sosial. Selain itu, struktur ketenagakerjaan di perdesaan yang masih bergantung pada sektor primer dengan akses pembiayaan yang tidak merata antara perdesaan dan perkotaan turut memperlambat mobilitas sosial ekonomi masyarakat. Rendahnya kepesertaan jaminan sosial baik di sektor formal maupun informal, keterbatasan akses bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan di pasar kerja, serta minimnya peluang peningkatan keterampilan dan pekerjaan layak juga menjadi faktor penghambat dalam menurunkan tingkat kemiskinan.

Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih inklusif dan terintegrasi dengan menitikberatkan pada penguatan program bantuan sosial daerah yang tepat

sasaran, pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal, serta perluasan lapangan kerja melalui program padat karya produktif. Upaya ini perlu didukung dengan peningkatan akses pendidikan dan layanan kesehatan dasar yang merata, perbaikan kualitas lingkungan melalui penanganan kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni, serta pemetaan wilayah miskin untuk memastikan intervensi lebih tepat sasaran. Selain itu, peningkatan partisipasi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan dalam kegiatan ekonomi perlu didorong, sejalan dengan kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan lembaga sosial. Dengan pendekatan yang terintegrasi tersebut, percepatan penurunan kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur diharapkan dapat tercapai secara berkelanjutan dan mendekati target ideal yang telah ditetapkan.

2.4.1.4 Masih Rendahnya Daya Saing Daerah

Daya saing daerah Kabupaten Luwu Timur masih tergolong rendah akibat berbagai tantangan struktural pada aspek infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, dan diversifikasi ekonomi. Kondisi ini tercermin dari capaian Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) yang pada tahun 2022 baru mencapai 2,82 poin dan hanya meningkat 0,25 poin menjadi 3,07 pada tahun 2024, sehingga masih berada dalam kategori capaian rendah. Meskipun Luwu Timur memiliki potensi besar pada sektor pertambangan dan perkebunan, tingginya ketergantungan terhadap komoditas primer membuat struktur ekonomi daerah sangat rentan terhadap fluktuasi harga global. Keterbatasan dalam pengembangan industri hilir, pemanfaatan inovasi, dan adopsi teknologi turut membatasi peningkatan nilai tambah produk lokal. Selain itu, kualitas sumber daya manusia yang masih relatif rendah, terutama dalam hal keterampilan teknis dan kompetensi pendidikan, menjadi faktor penghambat daya saing daerah dalam menghadapi persaingan baik di tingkat regional maupun nasional.

Dalam rangka meningkatkan daya saing, Kabupaten Luwu Timur memerlukan strategi pembangunan yang terarah dan terintegrasi, meliputi penguatan infrastruktur fisik dan digital guna meningkatkan konektivitas dan efisiensi rantai pasok, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan vokasi, pelatihan keterampilan, dan pengembangan kompetensi berbasis teknologi. Upaya reformasi birokrasi dan perbaikan iklim investasi perlu dilakukan secara konsisten, termasuk penyederhanaan proses perizinan serta percepatan layanan investasi berbasis digital. Di samping itu, pengembangan ekonomi lokal dan UMKM harus terus didorong melalui perluasan akses pembiayaan, fasilitasi pasar, serta adopsi inovasi dan teknologi. Pemerintah daerah juga perlu memperkuat promosi investasi yang diarahkan pada sektor-sektor strategis non-ekstraktif, mendorong pengembangan kawasan khusus dan klaster industri, serta meningkatkan efisiensi keuangan daerah dengan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dan belanja yang lebih produktif. Perbaikan tata kelola serta regulasi yang pro-bisnis menjadi faktor pendukung penting dalam menciptakan ekosistem usaha yang kompetitif dan berkelanjutan. Dengan implementasi kebijakan yang konsisten, Kabupaten Luwu Timur berpeluang mempercepat transformasi ekonomi, mengurangi ketergantungan pada sektor primer, serta meningkatkan daya saing daerah secara berkesinambungan..

2.4.1.5 Kualitas Layanan Kesehatan Belum Optimal dan Merata

Meskipun Usia Harapan Hidup (UHH) di Kabupaten Luwu Timur menunjukkan tren kenaikan, dari 70,53 tahun pada 2020 menjadi 74,55 tahun pada 2024, kualitas pelayanan kesehatan masih belum optimal dan merata. Hal ini tercermin dari berbagai indikator kesehatan yang menunjukkan permasalahan serius. Angka Kematian Bayi (AKB) justru meningkat dari 8,16 per 1.000 kelahiran hidup pada 2020 menjadi 14,12 pada 2024. Angka Kematian Balita juga naik tajam, dari 0,72 pada 2020 menjadi 15,3 pada 2024. Demikian pula, Angka Kematian Ibu (AKI) masih fluktuatif dan meningkat signifikan menjadi 141,21 per 100.000 kelahiran hidup pada 2024.

Selain itu, prevalensi stunting masih tinggi sebesar 21,8 persen pada 2024, menunjukkan masalah gizi kronis yang belum terselesaikan. Kasus tuberkulosis (TBC) juga belum terkendali, sedangkan upaya promotif dan preventif masih belum optimal. Dari sisi infrastruktur, rasio rumah sakit dan puskesmas masih di bawah 1 per 100.000 penduduk, menandakan keterbatasan fasilitas kesehatan dibandingkan kebutuhan. Kondisi tenaga kesehatan juga belum memadai, di mana rasio dokter baru mencapai 0,192 per 1.000 penduduk atau hanya 62 dokter untuk melayani 323.422 penduduk, jauh dari kondisi ideal sebanyak 100 dokter per 100.000 penduduk. Terbatasnya tenaga kesehatan terlatih dalam penanganan kegawatdaruratan maternal dan neonatal serta belum terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum (SPM) di semua fasilitas kesehatan semakin memperburuk kondisi pelayanan kesehatan di daerah.

Oleh karena itu, diperlukan kebijakan kesehatan yang terpadu melalui: penguatan layanan kesehatan dasar, pemerataan distribusi tenaga medis, percepatan digitalisasi layanan kesehatan, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai dan terintegrasi, optimalisasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), peningkatan kualitas SDM kesehatan, penguatan layanan promotif-preventif, pengembangan sistem rujukan yang efektif, serta peningkatan peran aktif masyarakat dan lembaga non-pemerintah dalam mendukung pembangunan kesehatan di Kabupaten Luwu Timur.

2.4.1.6 Belum Optimalnya Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Akses Pendidikan

Belum optimalnya peningkatan kualitas dan pemerataan akses pendidikan di Kabupaten Luwu Timur masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan sumber daya manusia. Meskipun intervensi program telah dilaksanakan, disparitas antara wilayah perkotaan dan pedesaan masih terlihat signifikan, baik dari aspek ketersediaan sarana dan prasarana, kualitas tenaga pendidik, maupun pemanfaatan teknologi pembelajaran. Beberapa satuan pendidikan di wilayah terpencil masih menghadapi keterbatasan fasilitas, minimnya akses internet, serta kekurangan guru dengan kualifikasi yang memadai.

Kondisi tersebut berimplikasi pada belum tercapainya capaian indikator pendidikan secara optimal. Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk usia 13–15 tahun baru mencapai 87,75 persen pada tahun 2024, masih di bawah target ideal lebih dari 95 persen. Demikian pula Angka Partisipasi Murni (APM) 13–15 tahun

yang juga berada pada level 87,75 persen. Sementara itu, persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang berpendidikan tinggi pada tahun 2023 baru mencapai 10,03 persen, masih jauh dari kondisi ideal lebih dari 20 persen.

Dengan demikian, diperlukan kebijakan yang lebih terarah dan efektif melalui penguatan pemerataan sarana prasarana pendidikan, peningkatan kualitas dan distribusi tenaga pendidik, serta perluasan akses pembelajaran berbasis teknologi. Langkah-langkah strategis ini diharapkan dapat mempercepat peningkatan kualitas pendidikan dan memperkecil kesenjangan akses antarwilayah, sehingga pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Luwu Timur dapat berjalan lebih inklusif dan berkelanjutan.

2.4.1.7 Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan

Tata kelola pemerintahan daerah di Kabupaten Luwu Timur masih menghadapi tantangan signifikan dalam mewujudkan birokrasi yang efektif, transparan, dan akuntabel. Hal ini tercermin dari capaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang meskipun mengalami peningkatan dari 1,89 pada tahun 2020 menjadi 3,16 pada tahun 2024, namun masih berada di bawah kondisi ideal minimal 4,00 untuk masuk kategori sangat baik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi tata kelola pemerintahan belum sepenuhnya optimal dalam mendukung pelayanan publik yang terpadu dan efisien.Selain itu, hingga tahun 2024 Kabupaten Luwu Timur bersama sejumlah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan belum memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) maupun Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Di sisi lain, capaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) menunjukkan tren penurunan dengan nilai 1,74 poin pada tahun 2024 yang masuk dalam kategori kurang serta berada di bawah rata-rata provinsi. Hal ini mengindikasikan kualitas layanan publik masih belum sesuai standar yang diharapkan masyarakat. Rendahnya capaian tata kelola pemerintahan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain: belum optimalnya implementasi kebijakan SPBE, kurangnya penerapan manajemen dan audit SPBE, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang belum maksimal, serta keterbatasan kapasitas aparatur dalam manajemen data dan keamanan informasi. Di samping itu, kerentanan terhadap risiko korupsi masih cukup tinggi karena transparansi anggaran, pengadaan barang/jasa, serta layanan perizinan digital belum sepenuhnya berjalan efektif.

2.4.1.8 Belum Optimalnya Penerapan Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Luwu Timur

Penerapan ekonomi hijau dan ekonomi biru di Kabupaten Luwu Timur masih belum optimal dengan belum tersedianya penilaian indeks. Beberapa isu utama dalam optimalisasi penerapan ekonomi hijau meliputi: Masih tingginya alih fungsi lahan untuk sektor budidaya (seperti perkebunan dan pertanian monokultur), pertambangan, dan permukiman mengakibatkan rendahnya persentase luas tutupan lahan hutan, alokasi tata ruang untuk budidaya belum seimbang dengan pelestarian kawasan lindung dan lahan kritis, meningkatnya kerentanan produksi komoditas unggulan akibat perubahan iklim, Pengembangan komoditas berbasis lahan yang berkelanjutan, rendah emisi, dan resilien terhadap perubahan iklim perlu menjadi prioritas, ekstensifikasi produksi belum memperhatikan risiko bencana di wilayah

sekitar, hilirisasi sektor ekonomi berbasis lahan, seperti pertanian, perikanan, dan kehutanan, masih rendah, hilirisasi komoditas unggulan belum berkelanjutan dan tidak memperhatikan dampak perubahan iklim. Untuk ekonomi biru, arah kebijakan pembangunan belum berfokus pada: Perluasan wilayah konservasi perairan dan penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan zona penangkapan, pengembangan perikanan budidaya berkelanjutan di laut, pesisir, dan tawar yang berorientasi ekspor dan berbasis kearifan lokal, pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dari kegiatan ekonomi yang merusak serta pengurangan sampah plastik di laut.

2.4.1.9 Lambatnya Penurunan Ketimpangan Gender dan Implementasi Inklusi Sosial

Ketimpangan gender di Kabupaten Luwu Timur masih relatif tinggi meskipun menunjukkan tren penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini tercermin dari capaian Indeks Ketimpangan Gender (IKG) tahun 2024 sebesar 0,465 poin yang masih berada pada kategori kurang serta lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan. Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) juga masih rendah dengan capaian 53,38 poin pada tahun 2023, sedangkan Indeks Pembangunan Gender (IDG) baru mencapai 90,44 poin pada tahun 2024 sehingga belum mencerminkan kondisi kesetaraan penuh. Beberapa faktor utama yang memengaruhi kondisi tersebut antara lain belum meratanya distribusi layanan kesehatan, keterbatasan sarana prasarana, dan kekurangan tenaga kesehatan sehingga kelompok rentan seperti masyarakat miskin, ibu dan anak, serta penyandang disabilitas belum memperoleh akses layanan yang memadai. Pada dimensi pendidikan, rendahnya akses masyarakat di wilayah 3T, keterbatasan sarana prasarana, serta ketidakmerataan kualitas tenaga pendidik masih menjadi tantangan. Sementara itu, faktor sosial budaya berupa masih kuatnya budaya patriarki berkontribusi pada terbatasnya peluang pendidikan bagi perempuan dibandingkan laki-laki. Pada dimensi ketenagakerjaan, perempuan dan penyandang disabilitas menghadapi keterbatasan kesempatan kerja, akses yang tidak setara terhadap peluang pekerjaan, serta kesenjangan upah yang signifikan. Partisipasi perempuan dalam politik juga belum optimal, sehingga representasi perempuan dalam posisi pengambilan keputusan masih rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketimpangan gender di Luwu Timur bersifat struktural dan kultural, sehingga diperlukan kebijakan afirmatif yang lebih terarah untuk memperkuat akses perempuan dalam pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan politik, serta pengarusutamaan gender dalam seluruh program pembangunan daerah.

2.4.1.10 Belum Optimalnya Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Luwu Timur masih belum optimal, yang terlihat dari capaian beberapa indikator lingkungan pada tahun 2024. Indeks Kualitas Lahan (IKL) hanya mencapai 74,40 poin dan belum masuk dalam kategori ideal, sementara Indeks Kualitas Air (IKA) berada pada level 65 poin dengan status cemar ringan. Akses terhadap sanitasi aman juga masih sangat rendah, yakni baru mencapai 11,46 persen, sedangkan pengelolaan sampah menghadapi tantangan dengan tren peningkatan timbunan dari tahun ke tahun dan baru 58,35 persen yang dapat diolah melalui fasilitas pengolahan sampah. Kondisi ini dipengaruhi oleh

berkurangnya neraca sumber daya lahan akibat alih fungsi, lemahnya pengelolaan dan pelestarian ekosistem alami seperti hutan dan mangrove, serta keterbatasan dalam menjaga luasan hutan sebagai wilayah jelajah satwa dan konektivitas habitat spesies dilindungi. Selain itu, perencanaan tata ruang belum sepenuhnya mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta risiko bencana, penegakan hukum tata ruang daerah masih kurang optimal, penyediaan sanitasi terpusat belum memadai, dan sistem pengelolaan sampah masih belum efektif terutama pada aspek pemilahan dari sumber dan pengangkutan. Untuk menjawab permasalahan tersebut, diperlukan kebijakan yang lebih komprehensif melalui pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, peningkatan efektivitas pengelolaan sampah dan limbah, rehabilitasi dan konservasi lingkungan, penguatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, pelibatan aktif masyarakat dan dunia usaha, serta pemanfaatan digitalisasi dan transparansi data lingkungan guna memperkuat akuntabilitas dan partisipasi publik..

2.4.1.11 Rendahnya Kapasitas Adaptasi, Mitigasi Bencana dan Perubahan Iklim

Rendahnya kapasitas adaptasi dan mitigasi bencana serta perubahan iklim di Kabupaten Luwu Timur masih menjadi tantangan strategis dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan tangguh. Kondisi ini tercermin dari capaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) tahun 2024 sebesar 0,65 yang meskipun menunjukkan perbaikan dibandingkan periode 2019–2022, masih berada di bawah target ideal ≥0,80 agar masuk kategori tinggi. Demikian pula Indeks Risiko Bencana (IRB) yang mengalami tren penurunan signifikan dari 2020 (202) menjadi 133,38 pada 2024, namun masih berada pada kategori sedang dan belum mencapai kondisi ideal <100 untuk mewujudkan daerah yang benar-benar resilien. Tantangan ini diperburuk oleh belum optimalnya integrasi isu perubahan iklim dan kebencanaan dalam dokumen perencanaan daerah, keterbatasan pemetaan risiko berbasis wilayah, serta minimnya program adaptasi berbasis masyarakat seperti Desa Tangguh Bencana dan Kampung Iklim. Infrastruktur mitigasi, termasuk sistem peringatan dini, konservasi DAS, serta rehabilitasi lahan kritis, masih terbatas dari sisi cakupan dan efektivitas. Selain itu, koordinasi lintas sektor, kapasitas kelembagaan, serta sumber daya manusia dalam pengelolaan risiko iklim dan bencana belum memadai, ditambah rendahnya partisipasi publik dan dunia usaha dalam pengurangan emisi serta pemanfaatan energi terbarukan. Menghadapi kondisi tersebut, diperlukan kebijakan dan program terintegrasi yang memperkuat sistem ketahanan iklim daerah, mencakup penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Perubahan Iklim, penguatan tata ruang berbasis risiko, peningkatan sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan bencana, pengelolaan sumber daya alam dan ekosistem, percepatan transisi energi dan transportasi ramah iklim, ketahanan pangan dan pertanian adaptif, serta peningkatan literasi, edukasi, partisipasi publik, dan kolaborasi lintas sektor. Dengan demikian, Kabupaten Luwu Timur dapat menuju pembangunan yang tangguh, berkelanjutan, dan adaptif terhadap risiko iklim dan bencana.

2.4.2 ISU STRATEGIS DAERAH.

Isu strategis perlu diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang. Isu-isu strategis daerah yang berdampak luas dan memiliki konsekuensi jauh ke depan yang berpotensi menimbulkan kerusakan dan biaya yang makin besar dalam Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Luwu Timur meliputi :

2.4.2.1 Degradasi Lingkungan dan Alih Fungsi Lahan

Degradasi lingkungan dan alih fungsi lahan menjadi isu strategis di Kabupaten Luwu Timur seiring dengan pesatnya aktivitas pertambangan, perkebunan skala besar, dan pembangunan infrastruktur. Eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkelola dengan baik menyebabkan deforestasi, pencemaran air dan tanah, serta berkurangnya lahan produktif yang sebelumnya digunakan untuk pertanian dan konservasi. Alih fungsi lahan yang tidak terkendali juga berdampak pada hilangnya habitat satwa liar, penurunan kualitas lingkungan, serta meningkatnya risiko bencana seperti banjir dan tanah longsor, terutama di daerah yang mengalami deforestasi tinggi. Jika tidak diatasi dengan kebijakan yang tepat, degradasi lingkungan ini dapat mengancam kesejahteraan masyarakat, ketahanan pangan, serta keberlanjutan ekosistem. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis seperti perencanaan tata ruang yang lebih ketat, rehabilitasi lahan kritis, pengawasan ketat terhadap aktivitas industri, serta keterlibatan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan guna memastikan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Luwu Timur.

2.4.2.2 Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Luwu Timur menjadi isu strategis dalam upaya meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kualitas layanan bagi masyarakat. Digitalisasi layanan pemerintahan mulai diterapkan untuk mempercepat birokrasi dan mengurangi potensi praktik maladministrasi, namun masih terdapat tantangan dalam infrastruktur teknologi dan kesiapan SDM aparatur. Selain itu, akses terhadap layanan publik yang merata, terutama di wilayah terpencil, masih perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat memperoleh hak-haknya dengan lebih mudah dan cepat. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan juga menjadi kunci dalam membangun pemerintahan yang lebih responsif dan akuntabel. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mendorong inovasi pelayanan publik, peningkatan kapasitas aparatur, serta optimalisasi penggunaan teknologi informasi guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih modern dan efektif. Dengan transformasi ini, Kabupaten Luwu Timur dapat menjadi daerah yang lebih maju, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

2.4.2.3 Akses dan Kualitas Pendidikan

Akses dan kualitas pendidikan di Kabupaten Luwu Timur masih menjadi isu strategis yang memerlukan perhatian untuk mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Meskipun pemerintah daerah telah berupaya meningkatkan fasilitas pendidikan, masih terdapat kesenjangan akses di daerah

terpencil, di mana infrastruktur sekolah, ketersediaan tenaga pendidik, serta sarana belajar belum memadai. Kualitas pendidikan juga menjadi tantangan, terutama dalam hal peningkatan kompetensi guru, kurikulum yang relevan dengan kebutuhan industri, serta pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran. Selain itu, angka putus sekolah di beberapa wilayah masih menjadi perhatian akibat faktor ekonomi dan sosial. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan kebijakan yang lebih inklusif, seperti pemerataan tenaga pendidik, penyediaan beasiswa bagi siswa kurang mampu, serta peningkatan fasilitas sekolah berbasis teknologi. Dengan langkah-langkah strategis tersebut, diharapkan akses dan kualitas pendidikan di Kabupaten Luwu Timur dapat meningkat, sehingga mampu mencetak generasi yang lebih kompetitif di masa depan.

2.4.2.4 Daya Saing Industri

Rendahnya daya saing industri di Kabupaten Luwu Timur menjadi isu strategis yang perlu segera diatasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Meskipun wilayah ini memiliki potensi sumber daya alam yang besar, seperti pertambangan, perkebunan, dan perikanan, pengolahan industri masih terbatas, sehingga nilai tambah produk lokal belum maksimal. Keterbatasan infrastruktur, akses pasar, serta kurangnya inovasi dan teknologi dalam proses produksi menjadi faktor utama yang menghambat daya saing industri di daerah ini. Selain itu, rendahnya keterampilan tenaga kerja serta minimnya investasi di sektor manufaktur membuat industri lokal sulit bersaing di pasar nasional maupun global. Untuk meningkatkan daya saing, diperlukan strategi seperti pengembangan industri hilir berbasis sumber daya lokal, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pendidikan vokasi, serta penguatan kebijakan yang mendukung investasi dan kemitraan dengan pelaku usaha. Dengan upaya ini, Kabupaten Luwu Timur dapat mendorong pertumbuhan industri yang lebih kompetitif dan berkelanjutan, sekaligus menciptakan lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat setempat.

2.4.2.5 Stunting dan Gizi Buruk

Stunting dan gizi buruk masih menjadi tantangan serius di Kabupaten Luwu Timur, terutama di kalangan anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah dan daerah terpencil. Kurangnya akses terhadap makanan bergizi, pola asuh yang kurang optimal, serta terbatasnya layanan kesehatan menjadi faktor utama yang menyebabkan tingginya angka stunting. Selain itu, kesadaran masyarakat tentang pentingnya asupan gizi seimbang selama masa kehamilan dan pertumbuhan anak masih perlu ditingkatkan. Dampak dari stunting tidak hanya berpengaruh pada pertumbuhan fisik anak, tetapi juga pada perkembangan kognitif mereka, yang dapat berdampak jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia di daerah ini. Oleh karena itu, diperlukan intervensi yang lebih kuat melalui program pemberian makanan tambahan bergizi, edukasi gizi bagi ibu hamil dan balita, serta peningkatan layanan kesehatan untuk memastikan setiap anak mendapatkan asupan yang cukup guna mendukung pertumbuhan optimal mereka. Dengan langkah-langkah strategis ini, diharapkan angka stunting dan gizi buruk di Kabupaten Luwu Timur dapat ditekan, sehingga menciptakan generasi yang lebih sehat dan produktif di masa depan.

2.4.2.6 Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender dan partisipasi perempuan menjadi isu strategis di Kabupaten Luwu Timur yang perlu mendapat perhatian untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Meskipun telah ada kemajuan dalam pemberdayaan perempuan, masih terdapat kesenjangan dalam akses terhadap pendidikan, pekerjaan, serta peran kepemimpinan di berbagai sektor. Perempuan di wilayah ini sering kali menghadapi tantangan dalam mendapatkan kesempatan yang sama dalam ekonomi, politik, serta pengambilan keputusan, terutama di sektor formal dan pemerintahan. Selain itu, masih terdapat kasus kekerasan terhadap perempuan serta stigma sosial yang membatasi peran mereka di masyarakat. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan kebijakan afirmatif yang mendukung peningkatan kapasitas perempuan, akses yang lebih luas terhadap pendidikan dan ekonomi, serta penguatan peran perempuan dalam pengambilan kebijakan. Dengan meningkatkan partisipasi perempuan di berbagai sektor, Kabupaten Luwu Timur dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan berdaya saing.

2.4.2.7 Kesenjangan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan

Kesenjangan dalam akses dan kualitas layanan kesehatan menjadi isu strategis di Kabupaten Luwu Timur yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, terutama di daerah terpencil dan pedalaman. Meskipun pemerintah telah berupaya meningkatkan infrastruktur kesehatan, masih terdapat tantangan seperti keterbatasan tenaga medis, fasilitas yang kurang memadai, serta distribusi layanan yang tidak merata. Beberapa puskesmas dan klinik di wilayah pelosok masih mengalami kekurangan alat medis, obat-obatan, dan tenaga kesehatan profesional, sehingga masyarakat harus menempuh jarak yang jauh untuk mendapatkan layanan kesehatan yang lebih baik. Selain itu, kurangnya kesadaran akan pentingnya pencegahan penyakit serta layanan kesehatan ibu dan anak masih menjadi tantangan dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan kebijakan yang lebih inklusif, seperti peningkatan jumlah tenaga kesehatan, pemerataan fasilitas medis, serta program edukasi kesehatan berbasis komunitas. Dengan strategi yang tepat, Kabupaten Luwu Timur dapat memperbaiki akses dan kualitas layanan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

2.4.2.8 Pemerataan Infrastruktur dan Jaringan Prasarana

Ketidakmerataan infrastruktur dan jaringan prasarana di Kabupaten Luwu Timur menjadi isu strategis yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Meskipun beberapa wilayah telah mengalami pembangunan yang pesat, masih banyak daerah terpencil yang belum memiliki akses jalan yang memadai, jaringan listrik yang stabil, serta infrastruktur telekomunikasi yang baik. Kondisi ini menyulitkan mobilitas masyarakat, menghambat distribusi barang dan jasa, serta membatasi akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Selain itu, minimnya akses internet di beberapa kawasan juga menjadi kendala dalam pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan daya saing ekonomi lokal. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan kebijakan pembangunan infrastruktur yang lebih merata, termasuk peningkatan kualitas jalan, perluasan jaringan listrik dan air bersih, serta penguatan akses digital di seluruh

wilayah. Dengan pemerataan infrastruktur, Kabupaten Luwu Timur dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

2.4.2.9 Risiko Bencana

Risiko bencana di Kabupaten Luwu Timur menjadi isu strategis yang perlu mendapat perhatian serius, mengingat wilayah ini rentan terhadap berbagai bencana alam seperti banjir, tanah longsor, serta gempa bumi. Faktor utama yang memicu tingginya risiko bencana adalah perubahan tata guna lahan, deforestasi akibat aktivitas industri dan pertambangan, serta perubahan iklim yang menyebabkan cuaca ekstrem. Banjir dan longsor kerap terjadi di daerah dengan topografi curam dan minim vegetasi penahan air, sementara kenaikan intensitas hujan semakin memperburuk kondisi tersebut. Selain itu, minimnya kesadaran masyarakat terhadap mitigasi bencana serta kurangnya infrastruktur penanggulangan bencana dapat memperbesar dampak yang ditimbulkan. Untuk mengurangi risiko ini, diperlukan langkah strategis seperti penguatan sistem peringatan dini, penegakan aturan tata ruang berbasis mitigasi bencana, serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi dan menanggulangi bencana. Dengan pendekatan yang lebih terintegrasi, diharapkan Kabupaten Luwu Timur dapat meningkatkan ketahanan terhadap bencana serta melindungi keselamatan dan kesejahteraan masyarakatnya.

2.4.2.10 Adaptasi dan Ketahanan Terhadap Perubahan Iklim

Perubahan iklim menjadi isu strategis di Kabupaten Luwu Timur yang berdampak signifikan terhadap lingkungan, pertanian, serta kesejahteraan masyarakat. Peningkatan suhu, perubahan pola curah hujan, dan cuaca ekstrem seperti banjir serta kekeringan telah mempengaruhi produktivitas pertanian dan ketersediaan air bersih. Selain itu, aktivitas industri dan pertambangan yang masif turut berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca, yang mempercepat proses perubahan iklim di wilayah ini. Hilangnya kawasan hutan akibat deforestasi juga semakin memperparah kondisi, mengurangi daya serap karbon, serta meningkatkan risiko bencana alam seperti longsor dan banjir bandang. Untuk menghadapi tantangan ini, diperlukan langkah-langkah mitigasi dan adaptasi yang lebih konkret, seperti rehabilitasi hutan, penerapan energi terbarukan, serta kebijakan tata ruang yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan. Dengan strategi yang tepat, Kabupaten Luwu Timur dapat mengurangi dampak perubahan iklim dan membangun ketahanan ekologi serta sosial yang lebih baik bagi masa depan.

2.4.2.11 Pengelolahan Limbah dan Sanitasi

Pengelolaan limbah dan sanitasi di Kabupaten Luwu Timur menjadi isu strategis yang memerlukan perhatian serius, terutama seiring dengan meningkatnya aktivitas industri, pertambangan, dan pertumbuhan penduduk. Limbah domestik dan industri yang tidak terkelola dengan baik berpotensi mencemari sumber air, tanah, serta mengganggu kesehatan masyarakat. Di beberapa daerah, sistem sanitasi masih terbatas, menyebabkan masalah lingkungan seperti pencemaran sungai dan meningkatnya risiko penyakit akibat air yang terkontaminasi. Kurangnya fasilitas pengolahan limbah yang memadai serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sanitasi bersih memperburuk situasi ini. Untuk mengatasi permasalahan

tersebut, diperlukan kebijakan yang lebih tegas dalam pengelolaan limbah industri, peningkatan infrastruktur sanitasi, serta edukasi masyarakat tentang pentingnya pola hidup sehat dan ramah lingkungan. Dengan pengelolaan limbah dan sanitasi yang lebih baik, diharapkan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat di Kabupaten Luwu Timur dapat terus meningkat.

BAB III
VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1 VISI DAN MISI.

3.1.1 VISI

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada). Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan selama lima tahun sesuai misi yang diemban. Visi pembangunan daerah Kabupaten Luwu Timur untuk periode 2025-2029 sesuai dengan Visi Kepala Daerah terpilih adalah

“Luwu Timur Maju dan Sejahtera”.

Visi ini bermakna bahwa pada tahun 2029 Luwu Timur mencapai kemajuan dalam ekonomi, infrastruktur, dan tata kelola melalui peningkatan daya saing ekonomi, pembangunan wilayah yang merata, serta pemerintahan yang efektif dan berbasis digital dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas, berbudaya, dan berdaya saing , pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang terintegrasi, serta pemerataan pembangunan yang berkeadilan.

Aspek-aspek yang menjadi penanda dari Luwu Timur yang Maju dan Sejahtera adalah terbangunnya masyarakat dan daerah yang berdaya, tangguh, serta mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara berkelanjutan, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Dalam khazanah bahasa dan budaya lokal, kondisi ini tergambarkan dalam frasa **“Wanua Mappatuo Naewai Alena”**, yang berarti *"negeri yang menghidupi rakyat dan mengukuhkan dirinya."* Frasa ini menekankan makna daerah yang tidak hanya mampu menyejahterakan warganya, tetapi juga memiliki kapasitas untuk berdiri kuat dan berdaulat atas sumber daya dan masa depannya sendiri.

Maju dan Sejahtera ini tercapai melalui pengembangan ekonomi kerakyatan secara terpadu dan berkelanjutan dengan berbasis pada sumberdaya yang dimiliki daerah ini. Dengan demikian, dalam rumusan pernyataan visi ini terkandung dua pokok visi yakni: **Maju dan Sejahtera** yang diterjemahkan pengertiannya sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 3. 1 Perwujudan Visi RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2025-2029

Visi	Pokok Visi	Penjelasan Pokok Visi
Luwu Timur Maju dan Sejahtera	**Maju**	kondisi dimana Luwu Timur mencapai kemajuan dalam ekonomi, infrastruktur, dan tata kelola melalui peningkatan daya saing ekonomi, pembangunan wilayah yang merata, serta pemerintahan yang efektif dan berbasis digital. Ini ditandai dengan ekonomi yang tumbuh, konektivitas yang baik, pelayanan publik yang efektif dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan.
	Sejahtera	kondisi dimana Luwu Timur mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang terintegrasi, serta pemerataan pembangunan yang berkeadilan. Kondisi ini tercermin dari pemerataan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, penurunan tingkat kemiskinan, pemberdayaan ekonomi masyarakat yang bersifat inklusif, serta terjaganya kelestarian lingkungan hidup sebagai fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Rumusan penjelasan pokok visi RPJMD diatas, merupakan manifestasi konkret dari visi pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan “Maju dan Berkarakter” dan selaras dengan Visi Nasional “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045.” Ketiganya berorientasi pada pembangunan yang progresif, berkeadilan, dan berbasis pada keunggulan manusia serta tata kelola yang baik, yang saling menguatkan dari tingkat lokal ke nasional.

Luwu Timur dan Sulawesi Selatan sama-sama menekankan kemajuan, baik di sektor SDM, ekonomi, maupun tata kelola, selaras dengan cita-cita Indonesia Emas 2045, fokus pada kualitas manusia dan nilai-nilai karakter yang sesuai dengan misi nasional dalam peningkatan SDM dan penguatan ideologi serta kesejahteraan rakyat sebagai ujung dari pembangunan yang juga menjadi target nasional pada penurunan kemiskinan dan peningkatan IPM. Keselarasan Visi RPJMD Luwu Timur dengan Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan dan Visi RPJMD Tahun 2025-2029 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3. 2 Keselarasan Visi RPJMN 2025-2029, Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029

Visi RPJM Nasional Tahun 2025-2029	Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029	RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029
"**Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045**"	"**Sulawesi Selatan Maju dan Berkarakter**"	**"Luwu Timur Maju dan Sejahtera"**
Visi RPJMD Kabupaten Luwu Timur mendukung pencapaian visi RPJMN dan visi RPJMD Provinsi dimana visi diatas menggambarkan perwujudan pembangunan daerah menuju Indonesia Emas 2045 lebih maju dan sejahtera serta berkarakter		

Sumber: Bapperida, data diolah tahun 2025

3.1.2 MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya strategis yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah. Misi berfungsi sebagai panduan arah kebijakan dan prioritas pembangunan, serta menjadi dasar untuk merumuskan tujuan, sasaran, strategi, dan program daerah selama periode RPJMD.

Misi RPJMD Kabupaten Luwu Timur adalah rumusan umum mengenai arah kebijakan dan langkah strategis yang akan ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam kurun waktu lima tahun untuk mewujudkan visi pembangunan daerah: "Luwu Timur Maju dan Sejahtera."

Misi RPJMD Kabupaten Luwu Timur disusun dengan mempertimbangkan berbagai tantangan dan peluang pembangunan daerah, kondisi geografis, potensi sumber daya alam, serta dinamika sosial ekonomi masyarakat. Dalam merumuskannya, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur mengedepankan prinsip inklusivitas, berkelanjutan, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, misi pembangunan diarahkan untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi lokal berbasis potensi unggulan, peningkatan layanan dasar, serta pelestarian lingkungan hidup yang mendukung ketahanan wilayah.

Misi ini juga menjadi kerangka strategis yang akan diterjemahkan ke dalam tujuan pembangunan yang terukur, sasaran pembangunan yang spesifik, strategi pencapaian yang efektif, serta program-program prioritas yang mampu menjawab permasalahan aktual di masyarakat. Dengan demikian, pelaksanaan misi RPJMD diharapkan dapat memberikan arah dan kepastian bagi seluruh pemangku kepentingan dalam membangun sinergi, integrasi, dan kolaborasi lintas sektor serta antarlevel pemerintahan demi terwujudnya **"Luwu Timur Maju dan Sejahtera"** secara merata dan berkelanjutan.

Adapun rumusan misi RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2025-2029 beserta penjelasan dan keselarasannya dengan pokok visi disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. 3 Keselarasan Visi dan Misi serta Penjelasan Misi RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029

No.	Visi	Misi	Penjelasan Misi
1.	**Sejahtera**	Meningkatkan sumber daya yang berkualitas, berbudaya dan berdaya saing (M1)	Misi ini mencakup upaya untuk mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan dan derajat kesehatan yang inklusif dan merata. Fokus utama dari misi ini adalah memperluas akses dan meningkatkan infrastruktur layanan pendidikan dan kesehatan secara adil dan menyeluruh. Selain itu, misi ini juga mencakup upaya membangun masyarakat yang religius, yang tercermin dalam kehidupan keluarga dan sosial yang harmonis, saling menghormati, serta menjunjung nilai kebersamaan untuk mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan tanpa adanya kesenjangan dalam akses, partisipasi, dan manfaat pembangunan
2.	**Maju**	Meningkatkan daya saing ekonomi untuk Pertumbuhan yang berkualitas (M2)	Misi mencakup upaya untuk meningkatkan daya saing ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan merupakan upaya strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang produktif, merata, dan berkelanjutan melalui penguatan sektor-sektor unggulan, transformasi struktur ekonomi, serta peningkatan nilai tambah berbasis UMKM dan ekonomi kreatif. Misi ini juga mencakup penguatan ketahanan pangan sebagai fondasi kemandirian ekonomi lokal, dengan mendorong efisiensi produksi dan distribusi. Seluruh upaya tersebut diarahkan untuk meningkatkan produktivitas perekonomian daerah secara merata, menciptakan pertumbuhan yang inklusif serta memperkuat daya saing wilayah dalam menghadapi tantangan global dan nasional
3.	**Maju**	Mempercepat pertumbuhan dan pengembangan wilayah yang merata dan berkeadilan (M3)	Misi ini mencakup upaya untuk memperkuat konektivitas wilayah, memperluas akses terhadap layanan dasar, dan mendorong desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Mewujudkan konektivitas yang akan meningkatkan keterjangkauan masyarakat terhadap pelayanan dasar, sementara kualitas

No.	Visi	Misi	Penjelasan Misi
			infrastruktur daerah memperkuat daya saing wilayah. Misi ini juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa sebagai pilar utama pembangunan yang partisipatif dan efektif, serta penguatan usaha ekonomi desa sebagai penggerak utama ekonomi lokal.
4.	**Sejahtera**	Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan hidup yang terintegrasi (M4)	Misi ini mencakup upaya untuk mendorong pemanfaatan sumber daya alam secara bijak, efisien, dan berkelanjutan melalui pendekatan lintas sektor dan wilayah yang saling mendukung. Pengelolaan ini dilakukan dengan menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan kelestarian lingkungan, guna meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan ekologi daerah. Misi ini pun menekankan penguatan tata kelola lingkungan, pengendalian pencemaran, konservasi ekosistem, serta adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Fokus utama diarahkan pada terkelolanya sumber daya alam secara berkelanjutan dan terintegrasi, serta meningkatnya ketahanan daerah terhadap risiko bencana dan dampak perubahan iklim, sehingga pembangunan yang dijalankan tidak hanya mendorong pertumbuhan, tetapi juga menjamin keberlanjutan fungsi lingkungan hidup bagi generasi mendatang.
5.	**Maju**	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang melayani efektif, efisien dan bersih melalui Transformasi Digital (M5)	Misi ini mencakup upaya membentuk pemerintahan daerah yang berintegritas, transparan, dan responsif terhadap dinamika masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Tata kelola pemerintahan yang efektif menjadi pendorong utama reformasi birokrasi, yang tidak hanya mempercepat proses layanan publik, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan. Misi ini mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang adaptif terhadap perubahan, didukung oleh peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital dan

No.	Visi	Misi	Penjelasan Misi
			penguatan inovasi di tingkat daerah. Dengan demikian, misi ini memperkuat fondasi pemerintahan yang bersih, profesional, dan berdaya saing, yang mampu memberikan layanan publik yang lebih berkualitas, mudah diakses, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Keselarasan Misi RPJMD Luwu Timur dan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan dan ASTA CITA tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 3. 4 Keselarasan Misi RPJMD Kab. Luwu Timur Tahun 2025-2029, RPJMD Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 dan RPJM Nasional (Asta Cita)

No	Misi RPJMD Luwu Timur	Misi RPJMD Sulawesi Selatan	Misi RPJMN /Asta Cita
1	Misi 1 Meningkatkan sumber daya yang berkualitas, berbudaya dan berdaya saing	Misi.1 Meningkatkan Sumberdaya Manusia yang Berkualitas, Berakhlak, dan Berdaya Saing	Asta Cita 1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
			Asta Cita 4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
			Asta Cita 8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur
2	Misi 2 Meningkatkan daya saing ekonomi untuk Pertumbuhan yang berkualitas	Misi 2. Meningkatkan perekonomian daerah yang merata dan berkelanjutan	Asta Cita 5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri
			Asta Cita 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air,

No	Misi RPJMD Luwu Timur	Misi RPJMD Sulawesi Selatan	Misi RPJMN /Asta Cita
			Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru
			Asta Cita 3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Modal
			Asta Cita 6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
3	Misi 3 Mempercepat pertumbuhan dan pengembangan wilayah yang merata dan berkeadilan	Misi 4. Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan, tangguh terhadap bencana dan perubahan iklim untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi	Asta Cita 3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Modal
4	Misi 4 Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan hidup yang terintegrasi		Asta Cita 8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur
5	Misi 5 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang melayani efektif, efisien dan bersih melalui Transformasi Digital	Misi 3. Mempercepat dan memperkuat transformasi digital dan birokrasi yang berintegritas, adaptif, dan melayani	Asta Cita 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RPJMD TAHUN 2025-2029.

Tujuan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapaianya visi selama 5 (lima) Tahun. Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang merupakan hasil penyelenggaran pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD. Berdasarkan pemahaman hal tersebut, maka rumusan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2025-2029 berdasarkan masing-masing misi dipetakan dalam 6 Tujuan dan 15 Sasaran sebagai berikut;

Tujuan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Luwu Timur selama kurun waktu 2025-2029 berdasarkan Misi RPJMD sebagai beriku;

Misi 1. Meningkatkan sumber daya yang berkualitas, berbudaya dan berdaya saing, dicapai melalui perwujudan ;
Tujuan 1 yaitu : Meningkatnya kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia

Misi 2. Meningkatkan daya saing ekonomi untuk Pertumbuhan yang berkualitas, dicapai melalui perwujudan ;
Tujuan 2 yaitu : Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah secara merata

Misi 3. Mempercepat pertumbuhan dan pengembangan wilayah yang merata dan berkeadilan, dicapai melalui perwujudan 2 Tujuan :
Tujuan 3 yaitu : Terciptanya konektivitas wilayah untuk pelayanan dasar dan aktivitas ekonomi
Tujuan 4 yaitu : Meningkatnya perkembangan desa sebagai pusat pelayanan dan pertumbuhan ekonomi

Misi 4. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan hidup yang terintegrasi dicapai melalui perwujudan ;
Tujuan 5 yaitu : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan ekologi

Misi 5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang melayani efektif, efisien dan bersih melalui Transformasi Digital, dicapai melalui perwujudan ;
Tujuan 6 yaitu : Terwujudnya tata kelola pemerintahan berintegritas dan adaptif

Selanjutnya, 6 tujuan pembangunan diatas diturunkan menjadi 15 sasaran pembangunan sebagai rangkaian kinerja untuk mencapai tujuan RPJMD. Sasaran pembangunan Kabupaten Luwu Timur yang hendak diwujudkan dalam lima tahun kedepan sebagai berikut;

1. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat
2. Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat
3. Meningkatnya Kesejahteraan Sosial dan Kualitas keluarga
4. Meningkatnya Kualitas kehidupan beragama dan pemajuan kebudayaan
5. Meningkatnya transformasi struktur perekonomian daerah
6. Meningkatnya nilai tambah ekonomi berbasis UMKM dan ekosistem ekonomi kreatif
7. Meningkatnya ketahanan pangan daerah

8. Meningkatnya keterjangkauan masyarakat terhadap pelayanan dasar
9. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah
10. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan usaha ekonomi desa
11. Terkelolanya sumberdaya alam secara berkelanjutan dan terintegrasi
12. Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana dan dampak perubahan iklim
13. Meningkatnya akuntabilitas Pemerintahan daerah
14. Meningkatnya Kualitas pelayanan publik berbasis digital
15. Meningkatnya inovasi daerah

Keterkaitan antara tujuan dan sasaran terhadap misi pembangunan RPJMD Luwu Timur, RPJMD Provinsi dan Misi RPJMN/ Asta Cita/ Prioritas Nasional disajikan pada tabel berikutt;

Tabel 3. 5 Keterkaitan Tujuan, dan Sasaran Pembangunan RPJMD Kabupaten Luwu Timur terhadap Misi RPJMD Provinsi dan Misi RPJMN/ Asta Cita/ Prioritas Nasional

TUJUAN	SASARAN	MISI RPJMD Prov Sul-Sel	Misi RPJMN/ Asta Cita/ Prioritas Nasional (PN)
1	2	3	4
T.1. Meningkatnya kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia	S.1. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	1. Meningkatkan Sumberdaya Manusia yang Berkualitas, Berakhlak, dan Berdaya Saing	PN 4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
	S.2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		
	S.3. Meningkatnya Kesejahteraan Sosial dan Kualitas keluarga		PN 1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
	S.4. Meningkatnya Kualitas kehidupan beragama dan pemajuan kebudayaan		PN 8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur
T.2. Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah secara merata	S.5. Meningkatnya transformasi struktur perekonomian daerah	2. Meningkatkan perekonomian daerah yang merata dan berkelanjutan	PN 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru
	S.6. Meningkatnya nilai tambah ekonomi berbasis UMKM dan ekosistem ekonomi kreatif		PN 5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri
	S.7. Meningkatnya ketahanan pangan daerah		PN 3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Modal

TUJUAN	SASARAN	MISI RPJMD Prov Sul-Sel	Misi RPJMN/ Asta Cita/ Prioritas Nasional (PN)
1	2	3	4
T.4. Meningkatnya perkembangan desa sebagai pusat pelayanan dan pertumbuhan ekonomi	S.10. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan usaha ekonomi desa		PN 6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
T.6. Terwujudnya tata kelola pemerintahan berintegritas dan adaptif	S.13. Meningkatnya akuntabilitas Pemerintahan daerah	3. Mempercepat dan memperkuat transformasi digital dan birokrasi yang berintegritas, adaptif, dan melayani	PN 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan
	S.14. Meningkatnya Kualitas pelayanan publik berbasis digital		
	S.15. Meningkatnya inovasi daerah		
T.3. Terciptanya konektivitas wilayah untuk pelayanan dasar dan aktivitas ekonomi	S.8. Meningkatnya keterjangkauan masyarakat terhadap pelayanan dasar	4. Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan, tangguh terhadap bencana dan perubahan iklim untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi	PN.3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Modal
	S.9. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah		PN.8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur
T.5. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan ekologi	S.11. Terkelolanya sumberdaya alam secara berkelanjutan dan terintegrasi		
	S.12. Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana dan dampak perubahan iklim		

Sumber: Bapperida; data diolah tahun 2025

Untuk mengukur apakah tujuan dan sasaran pembangunan dapat dicapai atau tidak, ditetapkan alat ukur atau indikator tujuan dan sasaran serta target tujuan dan sasaran pada akhir periode RPJMD Tahun 2029, dan Tahun 2030 sebagai tahun transisi secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 6 Target Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2030

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
T.1. Meningkatnya kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia	IT.1. Indeks Pembangunan Manusia	Angka	76.44	76.72	77.07	77.42	77.75	78.04	78.38
S.1. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	IS.1.1. Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8.94	8.95	8.96	8.97	8.98	8.99	9
	IS.1.2. Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.18	13.2	13.22	13.24	13.26	13.28	13.3
S.2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	IS.2.3. Usia Harapan Hidup	Tahun	74.55	75.61	76.4	76.8	77.2	78.78	78.8
S.3. Meningkatnya Kesejahteraan Sosial dan Kualitas keluarga	IS.3.4. Tingkat Kemiskinan	Persen	6.55	6,47-5,88	6,3-5,35	6,11-5,34	5,83-5,33	5,56-4,56	5,29-4,49
	IS.3.5. Indeks Pembangunan Keluarga	Angka	65.99	66.1	66.9	67.7	68.5	69.3	70.1
	IS.3.6. Indeks Pembangunan Gender	Angka	90,44	90,60	90,75	90,90	91,05	91,20	91,35
S.4. Meningkatnya Kualitas kehidupan beragama dan berbudaya	IS.4.7. Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	80,47	80,77	81,07	81,37	81,67	81,97	82,27
	IS.4.8. Persentase Benda,bangunan, struktur dan situs cagar budaya yang ditetapkan terhadap total registrasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100
T.2 Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah secara merata	IT.2.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	3.27	3,57	5,31-6,11	5,35-6,15	5,39-6,19	5,43-6,27	5,47-6,27
	IT.2.3. PDRB/Kapita (Rp jt/Tahun)	Rupiah	97.18	100,65	101,89	106	109,15	115,14	115,25
	I.T.2.4. Rasio Gini	Nilai	0.35	0.344	0.337	0.331	0.325	0.319	0.312

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	I.T.2.5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	4.58	4,49	4.34	4.31	4.22	4.12	4.03
S.5. Meningkatnya transformasi struktur perekonomian daerah	IS.5.9. Persentase Kontribusi Industri Manufaktur (pengolahan) terhadap total PDRB	Persen	3.33	3.39	3.46	3.53	3.6	3.67	3.73
S.6. Meningkatnya nilai tambah ekonomi berbasis UMKM dan ekosistem ekonomi kreatif	IS.6.10. Persentase Kontribusi UMKM dan ekonomi kreatif terhadap PDRB	Persen	9.05	9.4	9.75	10.1	10.4	10.8	11.15
S.7. Meningkatnya ketahanan pangan daerah	IS.7.11. Indeks Ketahanan Pangan Daerah	Persen	87.73	68,8	71,1	70,93	70,76	70,59	70,59
T.3. Terciptanya konektivitas wilayah untuk pelayanan dasar dan aktivitas ekonomi	IT.3. 6. Nilai Pilar 2 (Infrastruktur) Indeks Daya Saing Daerah	Nilai	2.55	2.9	3.2	3.45	3.65	3.8	3.9
S.8. Meningkatnya keterjangkauan masyarakat terhadap pelayanan dasar	IS.8.12. Rasio puskesmas perjumlah penduduk	Persen	0,52	0,57	0,56	0,55	0,55	0,57	0,56
	IS.8.13. Rasio Siswa terhadap ketersediaan Ruang belajar pada jenjang pendidikan dasar	Siswa per RKB	21,87	21,57	21,52	21,46	21,41	21,36	21,31
	IS.8.14. Akses Rumah Tangga perkotaan terhadap air	Persen	29,88	32	35	38	42	45	48

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	minum siap minum perpipaan								
	IS.8.15. Persentase Rumah Tangga dengan akses sanitasi aman	Persen	11.88	11,88	12,22	12,56	12,91	13,25	13,59
S.9. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah	IS.9.16. Indeks Layanan Infrastruktur	Indeks	70,86	70,88	71,60	72,93	74,13	75,31	76,32
T. 4. **Meningkatnya perkembangan desa sebagai pusat pelayanan dan pertumbuhan ekonomi**	IT.4. 7. Indeks Desa *(Presentase Desa Mandiri berdasarkan Indeks Desa)*	Persen	29,6	32	34,4	36,8	39,2	41,6	44
S.10. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan usaha ekonomi desa	IS.10.17. Persentase desa yang memiliki layanan administrasi berbasis digital	Persen	0,16	0.16	10.4	19.2	28	36.8	46
	IS.10.18. Persentase BUMdes yang menghasilkan laba	Persen	68	70	71	72	73	74	75
T. 5. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan ekologi	IT.5. 8. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	77,93	81.74	81.91	82.08	82.25	82.42	82.59
S.11. Terkelolanya sumberdaya alam	IS.11.19. Indeks Kualitas Air	Indeks	65	81,64	81,84	82,04	82,24	82,44	82,64

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
secara berkelanjutan dan terintegrasi	IS.11.20. Indeks Kualitas Udara	Indeks	91.85	81.35	81.55	81.75	81.95	82.15	82,35
	IS.11.21. Indeks Kualitas Tutupan lahan	Indeks	74.4	82.61	82.68	82.75	82.81	82.88	82,95
S.12. Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana dan dampak perubahan iklim daerah	IS.12.22. Indeks Risiko Bencana	Poin	133.38	132	130	128	127	126	125
	IS.12.23. Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Persen	2.11	2,11	2.31	2.93	3.56	4.17	4,88
T. 6. Terwujudnya tata kelola pemerintahan berintegritas dan adaptif	IT.6. 9. Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	Indeks	75.46 (BB)	76.15 (BB)	77.56 (BB)	81.07 (A)	84.6 (A)	85.1 (A)	88.1 (A)
S.13. Meningkatnya akuntabilitas Pemerintahan daerah	IS.13.24. Nilai SAKIP	Angka	67.77 (B)	70,01 (BB)	70.42 (BB)	71.82 (BB)	73.3 (BB)	74.5 (BB)	76.1 (BB)
S.14. Meningkatnya Kualitas pelayanan publik berbasis digital (S.14)	IS.14.25. Indeks Pelayanan Publik	Poin	1.74	2,49	2.58	3.06	3.24	3.32	3.6
	IS.14.26. Indeks SPBE	Poin	3.16	3.17	1	1,3	1,6	2	2,2
S.15. Meningkatnya inovasi daerah	IS.15.27. Indeks Inovasi Daerah	Angka	60,01	63,49	65,13	66,77	68,41	70,05	70,05

Sumber: Bapperida data diolah tahun 2025

Berdasarkan tabel 3.6 diatas, menunjukkan tujuan dan sasaran serta indikator yang akan mendukung pencapaian Misi Kabupaten Luwu Timur yang terdiri atas 6 tujuan, 15 sasaran dengan rumusan indikator sebanyak 6 indikator tujuan dan 30 indikator sasaran, sehingga total indikator yang digunakan untuk mengukur capaian Misi Kabupaten Luwu Timur sebanyak 36 indikator.

3.3 STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi dan misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan pemerintah daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (value added) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan berkaitan dengan pengaturan waktu. Kebijakan tahunan yang belum terlaksana tetap akan menjadi perhatian pada tahun berikutnya disamping kebijakan prioritas tahun berjalan. Berdasarkan berbagai landasan pemikiran tersebut maka rumusan strategi dan arah kebijakan dalam pencapaian sasaran RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2025 - 2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 7 Arah Kebijakan dan Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025 -2029

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi					Program Prioritas	Intervensi Kegiatan
					2026	2027	2028	2029	2030		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
Luwu Timur Maju dan Sejahtera	Misi 1: Meningkatkan sumber daya yang berkualitas, berbudaya dan berdaya saing	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia (T1)	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat (S1)	Arah kebijakan difokuskan pada peningkatan pemerataan akses dan mutu pendidikan formal maupun nonformal. Pendidikan vokasi dikembangkan agar selaras dengan kebutuhan dunia kerja, sementara literasi, numerasi, serta pemanfaatan teknologi digital diperkuat dalam proses pembelajaran. Selain itu, upaya membangun budaya baca sejak dini dilakukan	Strategi difokuskan pada penguatan pondasi Pendidikan berkualitas dan inklusif pemantapan kebijakan dan regulasi program Kartu Pintar dan Beasiswa, perencanaan Taman Pintar, serta studi kelayakan dan penyediaan Bus Sekolah. fasilitasi sertifikasi guru serta mentoring siswa dimulai dengan identifikasi kebutuhan, penyusunan kurikulum, dan pendaftaran peserta pelatihan. Sementara itu, fasilitasi Perguruan Tinggi dan hibah untuk SMA dilakukan dengan inventarisasi kebutuhan mitra, penyusunan mekanisme hibah, dan sosialisasi ke	Strategi diarahkan pada Akselerasi peningkatan kualitas pelaksanaan program prioritas, yaitu distribusi Kartu Pintar, penyaluran beasiswa, pembangunan Taman Pintar, dan pengadaan Bus Sekolah. selain itu peningkatan kualitas sertifikasi guru serta mentoring siswa, fasilitasi pendirian Perguruan Tinggi dan hibah untuk SMA. Peningkatan kualitas pembelajaran berbasis literasi, numerasi, dan sains, serta integrasi pendidikan karakter,	Strategi menekankan pada perluasan cakupan, baik jumlah penerima beasiswa maupun fasilitas pendidikan. Hibah kepada SMA dan fasilitasi perguruan tinggi mulai diintensifkan, Optimalisasi Peningkatan kualitas pembelajaran berbasis literasi, numerasi, dan sains, serta integrasi pendidikan karakter, kewirausahaan, dan literasi digital. Hal ini sesuai sesuai arah kebijakan yang menekankan konektivitas pendidikan dengan dunia kerja.	Strategi diarahkan pada integrasi pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri dan dunia kerja, serta optimalisasi literasi digital. Memantapkan program yang telah dijalankan sudah berada pada tahap keberlanjutan penguatan Pendidikan berkualitas dan inklusif. Penguatan peran keluarga dan masyarakat dalam pendidikan termasuk pengembangan kemitraan sekolah–komunitas untuk	Strategi difokuskan pada pelembagaan kerjasama pendidikan dengan perguruan tinggi, dunia usaha, dan industri, pemantapan layanan akses Pendidikan melalui pemenuhan kebutuhan Sekolah, pemantapan kualitas tenaga pendidik dan Pendidikan tinggi, sehingga arah kebijakan terkait peningkatan daya saing SDM dapat berkelanjutan	1) Penguatan pendidikan berkualitas dan inklusif 6) Pengembangan Daya saing kepemudaan dan Olahraga	Sekolah gratis (Pengadaan seragam/perlengkapan sekolah) (KARTU PINTAR); Peningkatan kesejahteraan Guru; Penyediaan Bus sekolah; Fasilitasi Perguruan tinggi; Penyediaan Taman Pintar; Beasiswa; Mentoring Siswa; Bantuan khusus SMA (Hibah); Pembangunan kampus Politeknik, SMK Pertanian, dan revitalisasi fasilitas pendidikan; Fasilitasi program peningkatan kompetensi gratis; Perwujudan kerjasama pendirian dan pengelolaan Perguruan Tinggi.

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi					Program Prioritas	Intervensi Kegiatan
					2026	2027	2028	2029	2030		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
				melalui penyediaan sarana pendukung seperti taman pintar	SMA serta perguruan tinggi, pemberian Dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Pembangunan Sekolah Rakyat. Hal ini sesuai dengan arah kebijakan yang menekankan pada pemerataan akses dan penguatan mutu pendidikan, ,	kewirausahaan, literasi digital, dan keterampilan abad 21. Pengembangan fasilitasi penyediaan layanan pendidikan 1 tahun pra sekolah (pendidikan anak usia dini) dengan melibatkan peran aktif pihak terkait secara holistik dan integrative, termasuk Integrasi layanan PAUD nonformal ke dalam kegiatan Posyandu Era Baru melalui kegiatan stimulasi dini Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah berbasis wilayah secara kolaboratif Ini mencerminkan realisasi		memperkaya pengalaman belajar siswa, Pengembangan pendidikan vokasi dan keterhubungan dengan dunia kerja melalui kerja sama SMK, perguruan tinggi, dan industri untuk program magang dan penempatan kerja. Hal ini memperkuat arah kebijakan yang menekankan pendidikan relevan dengan tuntutan global			

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi					Program Prioritas	Intervensi Kegiatan
					2026	2027	2028	2029	2030		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
						kebijakan peningkatan akses pendidikan secara nyata.					
			Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (S2)	Perluasan akses layanan kesehatan yang adil dan merata bagi semua masyarakat. Peningkatan mutu pelayanan dilakukan melalui pembangunan sarana kesehatan primer dan rujukan, serta penguatan sumber daya manusia kesehatan. Upaya preventif juga diperkuat, terutama dalam penanggulangan stunting, penyakit menular, serta penurunan angka	Pemantapan kebijakan program Kartu Sehat dan penyusunan desain pembangunan RS Malili serta Puskesmas Plus. Strategi ini mendukung arah kebijakan dengan memulai pondasi pemerataan layanan kesehatan - penguatan program kesehatan ibu dan anak, termasuk pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan anak-anak, untuk memastikan kesehatan dan keselamatan mereka. - Pelaksanaan Puskesmas Plus yang memperhatikan kebutuhan lokal, sehingga layanan kesehatan dapat disesuaikan dengan	Optimalisasidan distribusi Kartu Sehat berbasis NIK serta pembangunan RS dan layanan Puskesmas plus, pemantapan Layanan AJAK dan Rumah Singgah pun mulai dioperasikan, memfasilitasi pasien yang membutuhkan perawatan lebih lanjut dengan tempat tinggal sementara yang nyaman dan akses. penguatan program kesehatan ibu dan anak, termasuk pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan anak-anak, untuk memastikan kesehatan dan	Operasional RS Malili & Towuti serta penguatan layanan Ibu & Anak Sehat. Strategi ini memperluas dampak arah kebijakan ke pelayanan primer dan rujukan Optimalisasi program-program yang telah dilaksanakan dan disempurnakan. Menjadikan Kartu Sehat menjadi bagian dari sistem jaminan kesehatan masyarakat yang lebih terintegrasi, diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan Ibu & Anak Sehat yang lebih holistik. Dan peningkatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular	Integrasi layanan kesehatan dengan fokus pada pencegahan stunting dan penyakit menular. Hal ini sesuai arah kebijakan yang mengutamakan kualitas layanan secara holistik. Optimalisasi pembangunan RS Malili & Towuti dan Puskesmas Plus beroperasi penuh dengan kapasitas maksimal, menawarkan layanan kesehatan yang lebih modern dan komprehensif. Penguatan	Evaluasi dan pelembagaan program layanan kesehatan terpadu, sehingga kebijakan layanan kesehatan berkelanjutan dapat diwujudkan	2)Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan untuk semua	Pembangunan/pemeunuhan sapras Puskesmas Plus di daerah terpencil; Pembangunan/Optimalisasi Rumah sakit Malili dan Towuti; Pelayanan Dokter spesialis berkala di puskesmas; Peningkatan insentif dokter spesialis dan kesejahteraan tenaga kesehatan dan kader posyandu; Bantuan keuangan layanan kesehatan bagi yang dirujuk keluar daerah; Pengadaan ambulans darat dan laut; Peningkatan program Ibu & Anak Sehat; Pelayanan kesehatan melalui Kartu Sehat berbasis NIK/KTP; Penambahan ambulans danau dan ambulans 1 desa.

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi					Program Prioritas	Intervensi Kegiatan
					2026	2027	2028	2029	2030		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
				kematian ibu dan anak	kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat. - Pelatihan dasar untuk tenaga kesehatan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi mereka dalam memberikan layanan kesehatan yang berkualitas. - Pelayanan dokter spesialis secara berkala untuk meningkatkan akses masyarakat ke layanan medis yang lebih kompleks dan spesialis. - Dukungan terhadap upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular, eliminasi penyakit tropis terabaikan, serta pencegahan dan penurunan stunting dan kematian ibu dan anak	keselamatan mereka. - Pelaksanaan Puskesmas Plus yang memperhatikan kebutuhan lokal, sehingga layanan kesehatan dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat. - Pelatihan dasar untuk tenaga kesehatan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi mereka dalam memberikan layanan kesehatan yang berkualitas. - Pelayanan dokter spesialis secara berkala untuk meningkatkan akses masyarakat ke layanan medis yang lebih kompleks dan spesialis. - Dukungan terhadap upaya		pelayanan, sumber daya manusia, dan tata kelola kesehatan			

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi					Program Prioritas	Intervensi Kegiatan
					2026	2027	2028	2029	2030		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
						pencegahan dan pengendalian penyakit menular, eliminasi penyakit tropis terabaikan, serta pencegahan dan penurunan stunting dan kematian ibu dan anak. Hal ini menjadi wujud nyata kebijakan peningkatan akses layanan kesehatan					
			Meningkatnya Kesejahteraan Sosial dan Kualitas keluarga (S3)	Kebijakan diarahkan pada pengintegrasian program sosial agar lebih adaptif dan tepat sasaran melalui pemanfaatan data terpadu. Perlindungan sosial diperluas dengan memperluas layanan BPJS Ketenagakerjaan bagi	Mengintegrasikan Program Kartu Lansia dengan basis data DTKS/DataSEN untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyaluran bantuan. Memperluas layanan BPJS Ketenagakerjaan untuk warga rentan seperti buruh harian, nelayan, dan pelaku UMKM.	Meningkatkan akurasi dan ketepatan sasaran bantuan sosial melalui penggunaan data yang terintegrasi. Mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi untuk mengelola data dan layanan BPJS Ketenagakerjaan. Meningkatkan kualitas pelayanan keluarga melalui penyediaan fasilitas dan	Mengevaluasi efektivitas perlindungan adaptif melalui program kartu lansia, program integrasi data dan perluasan layanan BPJS Ketenagakerjaan. Peningkatan kualitas layanan keluarga; Pengembangan program pemberdayaan keluarga	Mengembangkan strategi keberlanjutan program untuk peran keluarga dalam mendukung pengembangan pemuda melalui program terintegrasi dan berkelanjutan.	Mengembangkan program pemberdayaan ekonomi keluarga untuk meningkatkan kemandirian. Integrasi keberlanjutan program sosial adaptif	10)Perlindungan Sosial yang Adaptif	Kartu LANSIA; Bantuan Sosial (Uang Duka Bagi Warga Tidak Mampu); Bpjs Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan, Guru, Tenaga Kesehatan Dan Non Asn; Memastikan setiap layanan publik dan infrastruktur/fasilitas umum ramah terhadap disabilitas.

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi					Program Prioritas	Intervensi Kegiatan
					2026	2027	2028	2029	2030		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
				kelompok rentan, serta peningkatan kualitas pelayanan keluarga untuk mendukung ketahanan sosial dan ekonomi rumah tangga.		program yang mendukung kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan keluarga.					
			Meningkatnya Kualitas kehidupan beragama dan pemajuan kebudayaan (S4)	penguatan infrastruktur keagamaan, pemberian insentif kepada tokoh agama, serta peningkatan peran masyarakat dalam pelestarian budaya daerah. Pelestarian nilai-nilai budaya lokal didorong melalui festival, temu ilmiah, dan revitalisasi tradisi, sehingga	Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan kebudayaan di kabupaten melalui pendataan dan verifikasi terhadap guru mengaji, imam, pendeta, serta rumah-rumah ibadah. Meningkatkan kesejahteraan tokoh agama dan masyarakat melalui insentif keagamaan dan bantuan sosial duka. Penguatan ekosistem budaya berbasis urban heritage, pemanfaatan cagar budaya dan	Implementasi Insentif Keagamaan: Mengimplementasikan insentif keagamaan dan bantuan sosial duka kepada tokoh agama dan masyarakat dengan peningkatan peran tokoh agama. Prosedur Sertifikasi Rumah Ibadah: Mengembangkan prosedur sertifikasi rumah ibadah yang efektif dan efisien. Kegiatan Kebudayaan: Meningkatkan	Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pelestarian budaya melalui sosialisasi program dan kegiatan kebudayaan. peningkatan ekosistem budaya berbasis urban heritage, pemanfaatan cagar budaya dan revitalisasi budaya bahari serta pengembangan teknologi tradisional	Optimalisasi peran guru mengaji, imam, dan pendeta dalam masyarakat. Mekanisme transparan dan akuntabel akan diterapkan melalui kerja sama dengan KUA, lembaga keagamaan, dan masyarakat. Meningkatkan sertifikasi rumah ibadah melalui RAB proposal rumah ibadah. Menyelenggar	Menguatkan kerjasama dengan komunitas budaya, akademisi, dan seniman lokal untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan kebudayaan.	3) Menjamin Stabilitas Sosial, Politik dan keamanan yang kondusif 5)Pariwisata Maju dan Pelestarian Budaya Daerah	Penguatan peran lembaga keagamaan; Fasilitasi insentif bagi petugas keagamaan; Peningkatan fasilitas dan pelayanan ibadah; Peningkatan kesejahteraan Guru Mengaji, Imam Masjid, Pendeta dan Pandita (petugas Keagamaan); Pengadaan Kendaraan Motor bagi Imam Masjid, Pendeta, Pandita; Sertifikasi rumah ibadah dan bangunan keagamaan Pemberdayaan komunitas adat dan pengembangan Desa wisata berbasis partisipasi masyarakat; Festival

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi					Program Prioritas	Intervensi Kegiatan
					2026	2027	2028	2029	2030		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
				kebudayaan dapat menjadi sumber identitas sekaligus penggerak ekonomi kreatif daerah.	revitalisasi budaya bahari serta pengembangan teknologi tradisional.	kualitas dan kuantitas kegiatan kebudayaan melalui penyusunan grand design Temu Ilmiah Kebudayaan dan Festival Daerah. Optimalisasi ekosistem budaya berbasis potensi, pemanfaatan cagar budaya dan revitalisasi budaya bahari serta pengembangan teknologi tradisional		akan Temu Ilmiah Kebudayaan pertama dan festival daerah perdana yang melibatkan pelajar, seniman, tokoh adat, dan peneliti dan pelibatan dengan dampak ekonomi bagi pelaku seni, UMKM, dan ekonomi kreatif lokal.		6)Pengembangan Daya saing Kepemudaan dan Olahraga	Daerah Berbasis Potensi Lokal; Pengembangan destinasi pariwisata terpadu; Pengembangan wisata dan olahraga Bahari; Pengembangan ekosistem kuliner; Peningkatan nilai-nilai kebudayaan lokal; Revitalisasi sarana dan prasarana olahraga; Pembinaan atlet berprestasi; Penghargaan Untuk Para Atlet Berprestasi, Pelatih dan Tokoh Olahraga.
	Misi 2: Meningkatkan daya saing ekonomi untuk Pertumbuhan yang berkualitas	Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah secara merata (T2)	Meningkatnya transformasi struktur perekonomian daerah (S5)	Arah kebijakan difokuskan pada penciptaan iklim investasi yang kondusif dan peningkatan nilai tambah sektor pertanian, perikanan, dan	Fokus: Pondasi & Perencanaan. • Reformasi regulasi & simplifikasi perizinan. • Menyusun Peta Potensi Investasi. • Studi kelayakan sentra IKM & industri.	Fokus: Implementasi & Akselerasi. • Meluncurkan perizinan OSS terintegrasi. • Menyelenggarakan Investment Forum. • Memulai pembangunan infrastruktur dasar ke sentra produksi.	Fokus: Ekspansi & Optimalisasi. • Meluncurkan insentif fiskal daerah. • Mengembangkan Kawasan Peruntukan Industri (KPI). • Memastikan realisasi pembangunan fasilitas pengolahan.	Fokus: Integrasi & Penguatan. • Mengintegrasikan promosi investasi dengan pariwisata. • Membentuk klaster industri berbasis komoditas. • Menjajaki	Fokus: Keberlanjutan & Evaluasi. • Melembagakan praktik terbaik kemudahan investasi. • Mendorong riset & inovasi produk turunan. • Evaluasi dampak ekonomi.	5)UMKM Maju dan Ketenagakerjaan yang Unggul	Memperluas kemudahan akses permodalan UMKM; Membangun kawasan ekonomi khusus berbasis potensi unggulan daerah; Pengembangan sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan; Penguatan kelembagaan dan kapasitas koperasi; Sekolah vokasi.

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi					Program Prioritas	Intervensi Kegiatan
					2026	2027	2028	2029	2030		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
				agroindustri. Reformasi regulasi perizinan, pembangunan kawasan industri, serta pengembangan sentra IKM dilakukan untuk mempercepat transformasi perekonomian daerah				akses pasar ekspor.			
			Meningkatnya nilai tambah ekonomi berbasis UMKM dan ekosistem ekonomi kreatif (S6)	Kebijakan diarahkan pada peningkatan daya saing UMKM melalui sertifikasi produk, digitalisasi koperasi, pembentukan start-up, serta perluasan akses pasar. Pengendalian inflasi juga didukung dengan memperkuat ekosistem	Fokus: Basis Data & Kapasitas Dasar.• Pendataan komprehensif UMKM & koperasi. • Pelatihan dasar manajemen & pengemasan. • Identifikasi kebutuhan keterampilan tenaga kerja. Peningkatan dukungan pengendalian inflasi	Fokus: Peningkatan Kualitas & Digitalisasi Awal. • Pendampingan sertifikasi produk (P-IRT, Halal). • Pelatihan pemasaran digital. • Membuka inkubasi start-up UMKM. • Pilot project digitalisasi koperasi.	Fokus: Akselerasi & Perluasan Pasar. • Program "UMKM Naik Kelas" & akses permodalan. • Link and match tenaga kerja bersertifikat & industri. • Kemitraan UMKM dengan ritel modern.	Fokus: Integrasi Ekosistem. • Menguatkan ekosistem start-up (mentor, investor). • Integrasi koperasi digital ke rantai pasok. • Memperkuat BLK & branding kolektif.	Fokus: Keberlanjutan & Daya Saing. • Mendorong kemandirian inkubator bisnis. • Menjajaki pasar ekspor untuk produk UMKM. • Evaluasi daya saing global.	5)UMKM Maju dan Ketenagakerjaan yang Unggul	Peningkatan nilai tambah komoditi pertanian, perikanan dan kelautan; Pengembangan budidaya perikanan; Pengembangan sektor industri unggulan; Bantuan Teknologi Untuk Usaha Rumahan; Pengembangan Pasar Ikan Rakyat Terpadu dengan wisata kuliner.

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi					Program Prioritas	Intervensi Kegiatan
					2026	2027	2028	2029	2030		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
				UMKM berbasis inovasi dan digitalisasi.							
			Meningkatnya ketahanan pangan daerah (S7)	Kebijakan difokuskan pada penguatan pertanian dan perikanan berkelanjutan melalui penyediaan pupuk dan bibit unggul, diversifikasi pangan lokal, serta pengembangan sistem logistik terpadu. Petani difasilitasi dengan pendampingan intensif, teknologi tepat guna, dan akses pasar sehingga	Pelaksanaan program pupuk gratis plus dan bibit unggul sudah berjalan lebih luas, dan pemantauan serta evaluasi program dilakukan untuk memastikan dampaknya. Pendampingan intensif terhadap petani dilanjutkan dengan pembentukan kelompok tani yang lebih terorganisir, yang memungkinkan petani untuk saling berbagi pengetahuan dan sumber daya.	Baruga Petani menjadi lebih fungsional, dengan berbagai kegiatan yang melibatkan petani dalam diskusi, pelatihan, dan akses ke pasar.	Optimalisasi dimana semua program yang telah dimulai pada tahun-tahun sebelumnya akan diperluas. Program pupuk gratis plus dan bibit unggul diperluas ke lebih banyak wilayah, dengan penambahan varietas tanaman unggul dan pupuk yang lebih ramah lingkungan.	Pendampingan petani semakin diperkaya dengan informasi pasar dan strategi pemasaran hasil pertanian, serta pengenalan teknologi baru yang bisa meningkatkan hasil pertanian. Baruga Petani menjadi semakin aktif. Peningkatan dukungan pengendalian inflasi melalui optimalisasi produksi	Pematapan program-program yang telah dilaksanakan sudah berada pada tahap keberlanjutan dan mendukung distribusi hasil pertanian yang lebih efisien. Pembangunan jalan dan jembatan sudah merata, dan memastikan dampaknya terhadap kesejahteraan petani dan ketahanan pangan. Pembinaan hubungan antara petani dan pasar, membantu petani dalam merencanakan produk yang sesuai dengan permintaan pasar.	4)Pertanian Maju dan Kemandirian Pangan	Pengadaan Pupuk Gratis Plus; Pendampingan Dan Pelatihan Intens Bagi Petani (Petani Penyuluh); Membangun dan merevitalisasi Jaringan irigasi dan logistik untuk menaikkan produktivitas dan menurunkan biaya produksi; Mengaktifkan Baruga Petani di Desa-desa; Bantuan Bibit Unggul; Pembangunan Pabrik dan komoditi unggulan (Beras dan Merica); Pembangunan Kawasan Unggul; Akses Mudah Dan Layanan Jaminan Kredit Bagi Petani; Pembangunan Sistem

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi					Program Prioritas	Intervensi Kegiatan
					2026	2027	2028	2029	2030		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
				ketahanan pangan daerah lebih kokoh.							Logistik Terpadu Ke Desa –Desa.
	Misi 3: Mempercepat pertumbuhan dan pengembangan wilayah yang merata dan berkeadilan	Terciptanya konektivitas wilayah untuk pelayanan dasar dan aktivitas ekonomi (T3)	Meningkatnya keterjangkauan masyarakat terhadap pelayanan dasar (S8)	Arah kebijakan diarahkan pada pembangunan infrastruktur dasar berupa air bersih, sanitasi, jalan, jembatan, dan irigasi, terutama di desa-desa. Skema Dana 2 Miliar/Desa menjadi motor pemerataan pembangunan sekaligus meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar	Fokus: Data, Perencanaan & Prioritas. • Melakukan pemetaan GIS untuk "titik buta" layanan dasar. • Menyusun/memperbarui Rencana Induk (SPAM, SPALD, Jalan). • Menyiapkan DED untuk proyek-proyek prioritas. • Sosialisasi juknis dana 2 Miliar/desa. • Implementasi tahap pertama dana 2 Miliar/desa dukungan terhadap program prioritas nasional pembangunan wilayah pemukiman, PSU dan Program 3 juta rumah	Fokus: Konstruksi Pondasi & Terobosan Cepat. • Memulai konstruksi infrastruktur utama air bersih & sanitasi. • Rehabilitasi jalan akses & jembatan vital. • Rehabilitasi jaringan irigasi primer & sekunder • Perluasan cakupan program dana 2 Miliar/desa. Peningkatan dukungan terhadap program prioritas nasional pembangunan wilayah pemukiman, PSU.	Fokus: Akselerasi & Perluasan Jaringan. • Memperluas jaringan perpipaan air & sanitasi ke rumah tangga. • Peningkatan/pembangunan jalan usaha tani. • Rehabilitasi irigasi tersier. • Fasilitasi pembangunan menara telekomunikasi (BTS).	Fokus: Integrasi & Penjaminan Mutu. • Memastikan konektivitas antar infrastruktur yang dibangun. • Melakukan audit teknis & uji kualitas konstruksi. • Membentuk & melatih lembaga pengelola tingkat masyarakat (KPSPAMS, P3A).	Fokus: Optimalisasi, Serah Terima & Keberlanjutan. • Menyelesaikan target cakupan layanan RPJMD. • Melakukan serah terima aset & pengelolaan ke desa/lembaga. • Membangun sistem & alokasi anggaran pemeliharaan rutin. • Evaluasi dampak sosial-ekonomi.	8)Infrastruktur Merata dan Berkualitas	Pemerataan pembangunan dengan skema alokasi 2 Miliar per desa; Pembangunan kawasan ekonomi baru di Tarengge kecamatan Wotu; Konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar (infrastruktur jalan dan jembatan untuk mendukung konektivitas); Rehabilitasi jaringan irigasi; Pembangunan dan perbaikan jaringan air bersih; Peningkatan layanan transportasi darat dan laut; Penataan kawasan permukiman; Pembangunan dan perbaikan sanitasi; Pembangunan jalan dan jembatan.
			Meningkatnya Kualitas Infrastrukt	Kebijakan difokuskan pada pembanguna	Memastikan adanya keselarasan tata ruang dan kebijakan lintas	Percepatan penyusunan AMDAL dan DED dari proyek	KIMAL dimulai, dan maka akan difasilitasi dukungan berupa pelatihan tenaga	Skala komersial, dengan efek berganda	Melakukan evaluasi menyeluruh untuk memperkuat kelembagaan,	8)Infrastruktur Merata dan Berkualitas	Intervensi kegiatan terkait infrastruktur sama dengan S8, karena masuk dalam

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi					Program Prioritas	Intervensi Kegiatan
					2026	2027	2028	2029	2030		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
			ur Daerah (S9)	n kawasan strategis seperti Kawasan Industri Malili (KIMAL) dan pengembanga n smelter nikel serta besi. Kebijakan ini juga mengintegras ikan pembanguna n multimoda transportasi, sehingga mampu mendorong konektivitas dan investasi berskala nasional.	sektor. Penyusunan masterplan Kawasan Industri Malili (KIMAL), Penetapan lokasi strategis bersama Pemerintah Provinsi dan Kementerian, Koordinasi dengan Bappenas agar pengembangan KIMAL dapat terintegrasi ke dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN), pengembangan konektivitas kawasan dengan infrastruktur Waru-waru (bandara, pelabuhan, dan terminal multimoda),	smelter bersama pelaku usaha. Mengoptimalkan peran pemerintah daerah dalam sebagai fasilitator utama koordinasi lintas sektor, termasuk penyelesaian hambatan sosial yang mungkin timbul di lapangan. Memperkuat Dukungan kemudahan perizinan dan pemetaan investor potensial untuk pengembangan smelter nikel dan besi. Menyiapkan kerangka regulasi daerah dan insentif untuk mendukung iklim investasi.	kerja lokal, insentif retribusi, dan kemudahan akses. Mengoptimalkan peran perseroda agar dapat berperan dalam pengembangan KIMAL dapat lebih terarah dan profesional. Penataan Kawasan Wilayah Strategis kabupaten	terhadap pendapatan daerah dan kesempatan kerja, Mekanisme pengawasan lingkungan, sosial, dan tata kelola kawasan berjalan efektif. Pemantapan kemudahan perizinan dan pemetaan investor potensial untuk pengembanga n smelter nikel dan besi dan kerangka regulasi daerah dan insentif untuk mendukung iklim investasi.	efisiensi pelayanan, dan keberlanjutan kawasan industri ke depan.		program prioritas yang sama dan saling terkait.

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi					Program Prioritas	Intervensi Kegiatan
					2026	2027	2028	2029	2030		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
		Meningkatnya perkembangan desa sebagai pusat pelayanan dan pertumbuhan ekonomi (T4)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan usaha ekonomi desa (S10)	ebijakan diarahkan pada peningkatan tata kelola pemerintahan desa, pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa, serta penguatan kelembagaan ekonomi desa melalui BUMDes dan koperasi. Dengan demikian, desa tidak hanya menjadi pusat pelayanan dasar, tetapi juga motor pertumbuhan ekonomi baru	Penguatan kapasitas kelembagaan tata kelola pemerintahan desa. Memperluas jangkauan akses keuangan pelaku perbankan untuk mendukung literasi keuangan.	Optimalisasi kapasitas kelembagaan tata kelola pemerintahan desa.dan usaha ekonomi desa antara lain bundesma dan koperasi	Mendorong kemandirian desa berkelanjutan.	Pemantapan kemandirian desa berkelanjutan.	Evaluasi dan tindaklanjut kemandirian desa berkelanjutan.	8)Infrastruktur Merata dan Berkualitas 3) Menjamin Stabilitas Sosial, Politik dan keamanan yang kondusif	Pembangunan desa dan kawasan perdesaan; Peningkatan kapasitas aparat desa dan BPD; Pembangunan infrastruktur desa; Pengembangan ekonomi lokal berbasis desa. Pemantapan koordinasi tim terpadu pengawasan ormas menjaga stabilitas politik, keamanan dan ketertiban umum Pemantapan peran tokoh stakeholder di desa-desa dalam dialog interaktif, Penciptaaan kondisi aman desa fasilitasi rehabilitas narkoba dan penurunan tingkat penyakit masyarakat

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi					Program Prioritas	Intervensi Kegiatan
					2026	2027	2028	2029	2030		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Misi 4: Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan hidup yang terintegrasi	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan ekologi (T5)	Terkelolanya sumberdaya alam secara berkelanjutan dan terintegrasi (S11)	Arah kebijakan menekankan pada penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan, konservasi ekosistem, serta pengelolaan limbah terpadu. Kegiatan penghijauan, rehabilitasi hutan dan lahan kritis, serta pengendalian pencemaran air dan udara diperkuat untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan ekologi.	Kampanye lingkungan dan pengembangan program advokasi kebijakan agar dapat mempengaruhi kebijakan publik secara lebih luas. Pengelolaan hutan berbasis masyarakat difokuskan pada identifikasi komunitas lokal dan pelibatan masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan kondisi hutan. Insentif mulai diterapkan sebagai bentuk motivasi. Mendorong kebijakan lokal yang mendukung kelestarian hutan produktif berbasis hutan lestari. Pengelolaan sampah berkelanjutan. Optimalisasi pengelolaan limbah terpadu.	Implementasi replikasi dan keberlanjutan.	Fokus pada monitoring dan evaluasi menyeluruh serta pelembagaan, evaluasi efektivitas program mitigasi dan pemutakhiran dokumen tanggap darurat dan rehabilitasi pasca bencana.	Fokus pada monitoring dan evaluasi menyeluruh serta pelembagaan, evaluasi efektivitas program mitigasi dan pemutakhiran dokumen tanggap darurat dan rehabilitasi pasca bencana.	Fokus pada monitoring dan evaluasi menyeluruh serta pelembagaan, evaluasi efektivitas program mitigasi dan pemutakhiran dokumen tanggap darurat dan rehabilitasi pasca bencana. Penanganan pencemaran air dan udara. Pemeliharaan.	9)Pengelolaan SDA, Lingkungan Hidup, dan Mitigasi Bencana yang terintegrasi dan berkelanjutan	Penghijauan dan revitalisasi hutan; Rehabilitasi lahan kritis dan konservasi tanah dan air; Pengelolaan sampah terpadu; Pengelolaan limbah B3; Pengendalian pencemaran air dan udara; Pengelolaan hutan berkelanjutan berbasis Masyarakat; Perlindungan terhadap kompleks danau Malili.
			Meningkatnya	kebijakan diarahkan	Pelaksanaan inventarisasi dan	Memperluas sosialisasi dan	Pemantapan pembangunan	Mengembangkan inovasi,	Optimalisasi replikasi dan	9)Pengelolaan SDA,	Penguatan sistem peringatan dini

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi					Program Prioritas	Intervensi Kegiatan
					2026	2027	2028	2029	2030		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
			ketahanan daerah terhadap bencana dan dampak perubahan iklim (S12)	pada peningkatan kapasitas mitigasi bencana, pengembangan sistem peringatan dini, serta kesiapsiagaan masyarakat. Program Desa Tangguh Bencana, pembangunan sarana mitigasi, dan pendidikan kebencanaan di sekolah dilakukan untuk meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana	pemetaan daerah rawan bencana berbasis geospasial, pelatihan dasar mitigasi bencana bagi aparat desa dan relawan, serta pengembangan sistem peringatan dini berbasis komunitas. Pembangunan sarana prasarana mitigasi (tempat evakuasi sementara/akhir). Integrasi sistem informasi kebencanaan berbasis data real-time. Penguatan kemitraan dengan dunia usaha (CSR untuk kebencanaan). Program desa tangguh bencana (DESTANA). Pendidikan kebencanaan di sekolah dan madrasah. Pengembangan model kota/kecamatan tangguh bencana.	simulasi bencana di sekolah dan masyarakat, pelatihan teknis Tim Reaksi Cepat (TRC), Tagana, dan relawan, serta penanaman vegetasi untuk mitigasi longsor dan banjir. Pembangunan sarana mitigasi; Optimalisasi Pendidikan kebencanaan di sekolah	infrastruktur daerah, evaluasi dan uji coba sistem peringatan dini berbasis komunitas, dan meningkatkan kapasitas dan infrastruktur mitigasi dengan fokus infrastruktur fisik dan sistem mitigasi.	adaptasi, dan kesiapsiagaan komunitas dengan fokus pada adaptasi berbasis komunitas.	keberlanjutan fokus pada monitoring dan evaluasi menyeluruh serta pelembagaan, evaluasi efektivitas program mitigasi dan pemutakhiran dokumen perencanaan lanjutan berbasis pembelajaran (lesson-learned).	Lingkungan Hidup, dan Mitigasi Bencana yang terintegrasi dan berkelanjutan	bencana; Sekolah dan pendidikan kebencanaan (sekolah edukasi bencana); Pembangunan pusat-pusat krisis dan kebencanaan pada Lokasi rawan bencana; Perlindungan Studi dan Kajian mitigasi kawasan rawan bencana pada kawasan yang bertampalan dengan kegiatan budidaya; Sosialisasi penanggulangan bencana pada kawasan rawan bencana; Peningkatan infrastruktur penanganan bencana kawasan.

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi					Program Prioritas	Intervensi Kegiatan
					2026	2027	2028	2029	2030		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Misi 5: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang melayani efektif, efisien dan bersih melalui Transformasi Digital	Terwujudnya tata kelola pemerintahan berintegritas dan adaptif (T6)	Meningkatnya akuntabilitas Pemerintahan daerah (S13)	Kebijakan menekankan pada penguatan reformasi birokrasi, peningkatan kesejahteraan ASN dan aparatur desa, serta optimalisasi pengelolaan aset daerah. Pemerintahan diarahkan menjadi lebih transparan, efisien, dan adaptif melalui penerapan tata kelola berbasis datadaerah; Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam tata kelola; Memperkuat upaya pemberantasan korupsi integritas birokrasi; Peningkatan	Pemantapan pemanfaatan aset dan penguatan perseroda sebagai sumber pendapatan yang fokus pada inventarisasi dan valuasi aset daerah, pemetaan potensi aset untuk disewakan. Pemberian insentif fiskal. Optimalisasi peran forum kerjasama antar kabupaten/kota (dalam dan luar provinsi), kemitraan strategis dengan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur, layanan publik dan pengembangan ekonomi.	Pemantapan reformasi birokrasi, meningkatkan kesejahteraan ASN, P3K, aparat desa & petugas keagamaan, pemantapan fungsi klinik riset & gerai perizinan.	Optimalisasi transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.	Mempercepat penerapan pemerintahan berbasis data yang fokus pada pemanfaatan data sebagai dasar pengambilan keputusan dan peningkatan pengawasan masyarakat dalam tata kelola.	Konsolidasi layanan proaktif dan SPBE berkelanjutan yang fokus pada konsolidasi semua capaian menjadi tata kelola adaptif.	11)Tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien dan bersih; 3) Menjamin Stabilitas Sosial, Politik dan keamanan yang kondusif	Memperkuat Sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE); Membangun kemitraan pemerintah – Badan Usaha, keterlibatan pihak swasta dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD non APBD); Beasiswa bagi ASN dengan berbasis kebutuhan pemerintah daerah kabupaten Luwu Timur; Meningkatkan keterampilan dan kesejahteraan ASN, P3K dan Upah Jasa; Mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi melalui unit-unit percontohan; Peningkatan keterampilan dan kesejahteraan aparat desa, BPD, Kepala Dusun, RT dan RW; Memastikan masa hubungan perjanjian kerja bagi P3K selama 5 Tahun; Insentif Zfiskal (BPHTB);.

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi					Program Prioritas	Intervensi Kegiatan
					2026	2027	2028	2029	2030		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
				kualitas produk hukum daerah; Pemanfaatan Teknologi Digital dan Data untuk Inovasi Pelayanan Publik							
			Meningkatnya Kualitas pelayanan publik berbasis digital (S14)	Arah kebijakan difokuskan pada percepatan digitalisasi layanan publik, integrasi data antar-OPD, serta pemanfaatan SPBE. Mall pelayanan publik, gerai perizinan desa, dan sistem layanan berbasis NIK diperluas untuk meningkatkan keterjangkauan layanan	Implementasi awal digitalisasi layanan publik dan sistem internal pemerintahan melalui layanan digital prioritas (layanan perizinan, administrasi kependudukan dan kesehatan). Menyusun standar.	Penguatan pondasi kelembagaan, kebijakan dan infrastruktur dasar SPBE melalui strategi harmonisasi arsitektur SPBE daerah dengan arsitektur SPBE nasional, tata kelola.	Mempercepat pemerataan integrasi lintas OPD dan pengelolaan data terpadu yang fokus pada pengembangan sistem pengelolaan data lintas sektor.	Konsolidasi layanan proaktif dan SPBE berkelanjutan yang fokus pada konsolidasi semua capaian menjadi tata kelola adaptif.	Konsolidasi layanan proaktif dan SPBE berkelanjutan yang fokus pada konsolidasi semua capaian menjadi tata kelola adaptif.	11)Tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien dan bersih	Meningkatkan akses dan kualitas informasi Publik; Ibu Pulang Bawa akta lahir; Pengembangan Mall Pelayanan Perizinan Terpadu; Gerai perizinan di desa dan kelurahan.

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi					Program Prioritas	Intervensi Kegiatan
					2026	2027	2028	2029	2030		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
			Meningkatnya inovasi daerah (S15)	Kebijakan diarahkan pada pembentukan ekosistem inovasi melalui klinik riset, inkubator bisnis, dan kolaborasi dengan dunia pendidikan serta industri. Inovasi pelayanan publik dan ekonomi kreatif diperkuat agar mendorong peningkatan daya saing dan keberlanjutan pembangunan	Fokus: Pondasi & Kesadaran. • Membentuk "Klinik Riset & Inovasi" untuk ASN. • Meluncurkan kompetisi "Satu OPD, Satu Inovasi". • Memetakan ekosistem inovasi ekonomi lokal. • Mengadakan kampanye & literasi inovasi.	Fokus: Inkubasi & Eksperimentasi. • Mendampingi & mengimplementasikan 3-5 pilot project pelayanan publik. • Mendirikan inkubator bisnis "Luwu Timur Innovation Hub". • Menggelar lomba inovasi publik	Fokus: Akselerasi & Peningkatan Skala. • Mereplikasi inovasi layanan publik yang berhasil. • Mengukur dampak inovasi (waktu layanan, kepuasan). • Memfasilitasi akses permodalan bagi startup. • Membangun/memfasilitasi creative hub.	Fokus: Integrasi & Kolaborasi. • Mengintegrasikan inovasi layanan ke sistem utama SPBE. • Menjalin kemitraan antara inkubator dengan dunia pendidikan. • Menginisiasi forum kolaborasi "Quadruple Helix".	Fokus: Pelembagaan & Keberlanjutan.Menetapkan inovasi OPD/ASN. Menerbitkan "Buku Inovasi Daerah" & mengadakan malam penghargaan. Mengembangkan model bisnis berkelanjutan untuk inkubator.	11)Tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien dan bersih	Membangun klinik riset dan inovasi pelayanan.

Sumber: Bapperida data dioalh tahun 2025

Sejalan dengan perumusan arah kebijakan dan strategi tersebut diatas, perumusan strategi merupakan tindak lanjut dari arah kebijakan dimana strategi berperan penting dalam menerjemahkan misi pembangunan ke dalam langkah-langkah operasional yang lebih konkret, terarah, dan terukur. Strategi membantu memastikan bahwa setiap arah kebijakan dapat dijalankan secara efektif melalui penentuan program dan kegiatan prioritas, penyusunan kerangka kerja yang terpadu lintas sektor, serta penetapan indikator kinerja yang jelas untuk memudahkan pemantauan dan evaluasi. Selain itu, strategi memungkinkan pemerintah merespons dinamika dan tantangan yang muncul selama periode pembangunan tanpa harus mengubah arah kebijakan utama. Dengan demikian, strategi menjadi alat penting untuk menjembatani perencanaan dan implementasi dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Luwu Timur Tahun 2025–2029, telah ditetapkan tahapan pembangunan tahunan daerah yang dijadikan sebagai tema pembangunan setiap tahunnya. Tahapan pembangunan tahunan ini mencakup kurun waktu tahun 2025 hingga 2030, dan diharapkan dapat menjadi fokus utama pembangunan pada masing-masing tahun guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran setiap misi pembangunan daerah, menuju terwujudnya Luwu Timur Maju dan Sejahtera. Tahun 2030 diposisikan sebagai masa transisi pembangunan yang bertujuan untuk menjaga kesinambungan estafet pembangunan ke periode selanjutnya. pentahapan pembangunan tahunan tersebut disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3. 8 Pentahapan RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2025-2030

TAHAP I (2025)	TAHAP II (2026)	TAHAP III (2027)	TAHAP IV (2028)	TAHAP V (2029)	TAHAP VI (2030)
Pemantapan Kualitas Pelayanan Publik, Kualitas Pertumbuhan Ekonomi, dan Kualitas Ketahanan Desa	Konsolidasi Pembangunan Manusia, Ekonomi Dan Sosial Dalam Mendukung Kesejahteraan Masyarakat	Akselarasi Pembangunan Ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat	Pengembangan kemandirian ekonomi inklusif yang berkelanjutan	Perwujudan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan Kualitas Hidup masyarakat yang maju	Memperkokoh pemantapan ekonomi yang tangguh dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat

Sumber: Bapperida data diolah tahun 2025

Penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu tahapan ke tahapan lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima (5) tahunan dalam RPJMD.

3.3.1 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.

Program prioritas pembangunan daerah memiliki posisi strategis dalam pencapaian target sasaran pembangunan, dalam mewujudkan visi dan misi serta program kerja kepala daerah terpilih. Program Prioritas Pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing pengelompokan program prioritas kepala daerah terpilih yang digambarkan dengan keterpaduan program prioritas dengan tujuan dan sasaran.

Pengelompokkan prioritas pembangunan RPJMD Tahun 2025-2029 dimaksud, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. 9 Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Timur

No	Intervensi Kegiatan Prioritas RPJMD	Program Prioritas Pembangunan Daerah RPJMD
1	Sekolah gratis (Pengadaan seragam/ perlengkan sekolah) (KARTU PINTAR)	1) Penguatan pendidikan berkualitas dan inklusif
2	Peningkatan kesejahteraan Guru	
3	Penyediaan Bus sekolah	
4	Fasilitasi Perguruan tinggi	
5	Penyediaan Taman Pintar	
6	Beasiswa	
7	Mentoring Siswa	
8	Bantuan khusus SMA (Hibah)	
9	Program Ibu dan Anak Sehat, Susu.vitamin dan makan tambahan gratis sampai umur 2 tahun	2) Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan untuk semua
10	Pembangunan Rumah Sakit di Malili dan Towuti	
11	Pelayanan Dokter spesialis berkala di puskesmas	
12	Peningkatan insentif dokter spesialis dan kesejahteraan tenaga kesehatan dan kader posyandu	
13	Bantuan keuangan layanan kesehatan bagi yang dirujuk keluar daerah	
14	Antar jemput warga sakit (AJAK)	
15	Layanan Kesehatan gratis berbasis NIK/KTP (KARTU SEHAT)	
16	Layanan Kesehatan (fast respon) pasien rujukan ke Rumah sakit yang kerja sama Pemda	
17	Puskemas plus untuk daerah jauh dan terpencil	
18	Rumah Singgah Pasien (Makassar dan Malili)	
19	Satu sanitarian satu desa	
20	Pemenuhan sarana dan prasarana danalat kesehatan puskesmas	
21	Penambahan ambulans danau dan ambulans 1 desa	
22	Pemantapan koordinasi tim terpadu pengawasan ormas untuk menjaga stabilitas politik,kemanan dan ketertiban umum	3) Menjamin Stabilitas Sosial, Politik dan Keamanan yang kondusif
23	Pemantapan peran tokoh stakeholder di desa-desa melalui dialog intraktif	
24	Penciptaan kondisi aman di tingkat desa-desa	
25	Mewujudkan Fasilitasi rehabilitas narkoba dan penurunan tingkat penyakit masyarakat	
26	Pengadaan Pupuk Gratis Plus	
27	Pendampingan Dan Pelatihan Intens Bagi Petani (Petani Penyuluh)	
28	Membangun dan merevitalisasi Jaringan irigasi dan logistik untuk menaikkan produktivitas dan menurunkan biaya produksi	
29	Mengaktifkan Baruga Petani di Desa-desa	
30	Bantuan Bibit Unggul	

No	Intervensi Kegiatan Prioritas RPJMD	Program Prioritas Pembangunan Daerah RPJMD
31	Pembangunan Pabrik dan komoditi unggulan (Beras dan Merica)	4) Pertanian Maju dan Kemandirian Pangan
32	Pembangunan Kawasan Unggul	
33	Akses Mudah Dan Layanan Jaminan Kredit Bagi Petani	
34	Pembangunan Sistem Logistik Terpadu Ke Desa –Desa	
35	Pembangunan/pengembangan Pasar Agro	
36	Bantuan Alat Mesin Pertanian Modern Tepat Guna	
37	Gerakan Pro Produk Lokal	
38	Kebun Bibit Desa Dalam Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari	
39	Sarana Dan Prasaran Pembudidaya Rumput Laut	
40	Bantuan Peralatan Melaut Dan Termasuk Alat Penangkapan Ikan Bagi Nelayan	
41	Layanan perizinan usaha dan sertifikasi halal gratis bagi UMKM	5) UMKM Maju dan Ketenagakerjaan yang Unggul
42	Bantuan modal sampai dengan 50 juta	
43	Lutim Mart (Menghimpun produk-produk lokal)	
44	Modernisasi Koperasi Pedagang Pasar	
45	Bengkel Usaha Komunitas berbasis kecamatan	
46	Pendampingan berkelanjutan (Layanan konsultasi Usaha gratis)	
47	Pelatihan kewirausahaan secara berjenjang dan komprensif	
48	Sertifikasi Profesi dan Sertifikasi Kompetensi Gratis	
49	Menciptakan Enterpreneur 1000 Orang Per Tahun	
50	Penyediaan Platform Digital Siap Kerja Dan Karir	
51	Memperluas Akses Pasar Dengan Membangun Kemitraan Dengan Pihak Swasta Di Dalam Dan Luar Daerah	
52	Bantuan Teknologi Untuk Usaha Rumahan	
53	Pengembangan Pasar Ikan Rakyat Terpadu dengan wisata kuliner	
54	Sekolah vokasi	
55	Pemetaan dan Pengembangan wisata desa dan kampung tematik	6) Pariwisata Maju dan Pelestarian Budaya Daerah
56	Pemberdayaan komunitas adat dan pengembangan Desa wisata berbasis partisipasi masyarakat	
57	Pembangunan sentra pemasaran dan Promosi Kerajinan Rakyat (promosi Wisata Minat Khusus)	
58	Pembangunan fasilitas publik, pengembangan jalan, sarana UMKM di lokasi wisata	
59	Membangun SDM Pariwisata	

No	Intervensi Kegiatan Prioritas RPJMD	Program Prioritas Pembangunan Daerah RPJMD
60	Promosi terpadu antara pelaku usaha, industri pariwisata, perdagangan, investasi dan kebudayaan	
61	Temu ilmiah kebudayaan Tana Luwu Bertaraf internasional	
62	Menyelenggarakan festival tahunan/ promosi event daerah	
63	Pembangunan Matano Geo Park	
64	Pembangunan Wahana Olahraga dan pembinaan kegiatan kepemudaan di setiap desa	7) Pengembangan Daya Saing Kepemudaan dan Olahraga
65	Camp enterpreneur muda setiap tahunnya	
66	Revitalisasi pembangunan lapangan terpadu di tingkat kecamatan (berkorelasi dengan creativ hub)	
67	Pembangunan gedung creatifitas pemuda	
68	Pembangunan stadion dan GOR serta pengadaan prasarana bagi organisas seni,pencinta alam danorganisasi lokal lainnya	
69	Liga antar desa dari berbagai cabang olahraga	
70	Tuan Rumah PORDA	
71	Pembangunan Sirkuit Balap Motor Standar Internasional	
72	Penghargaan Untuk Para Atlet Berprestasi, Pelatih dan Tokoh Olahraga	
73	Pemerataan pembangunan dengan skema alokasi 2 Miliar per desa	8) Infrastruktur Merata dan Berkualitas
74	Pembangunan kawasan ekonomi baru di Tarengge kecamatan Wotu	
75	Konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar (infrastruktur jalan dan jembatan untuk mendukung konektivitas)	
76	Terbangunnya jaringan telekomunikasi ke semua desa (internet gratis di fasilitas –fasilitas umum	
77	Memastikan ketersediaan infrastruktur yang menjamin ketersediaan air bersih bagi kegiatan sehari-hari masyarakat	
78	Pembangunan kawasan industri Malili (KIMAL)	
79	Memfasilitasi pengembangan Terminal	
80	Memfasilitasi pembangunan pabrik nikel dan besi (smelter)	
81	Memfasilitasi pengembangan bandara dan pelabuhan waru-waru	
82	Pabrik ramah lingkungan, produk ramah ingkungan, kawasan industri ramah ingkungan, dan rantai	9) Pengelolaan SDA, Lingkungan Hidup, dan Mitigasi Bencana yang terintegrasi dan berkelanjutan
83	Pusat pendidikan dan inovasi pengelolaan sampah	
84	Kampanye lingkungan dan aksi gotong royong serentak di desa -desa	

No	Intervensi Kegiatan Prioritas RPJMD	Program Prioritas Pembangunan Daerah RPJMD
85	Mengintensifkan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan kemitraan pengelolaan bidang SDA untuk peningkatan kualitas hidup	
86	Pengelolaan sampah secara terpadu	
87	Pengelolaan Hutan berkelanjutan berbasis Masyarakat	
88	Crisis Center : membangun pusat – pusat krisis dan kebencanaan pada lokasi – lokasi rawan bencana	
89	Sekolah dan pendidikan kebencanaan (sekolah edukasi bencana)	
90	Perlindungan terhadap kompleks danau Malili (Matano, Mahalona, Towuti)	
91	Kartu LANSIA	10) Perlindungan Sosial yang Adaptif
92	Bantuan Sosial (Uang Duka Bagi Warga Tidak Mampu)	
93	Bpjs Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan, Guru, Tenaga Kesehatan Dan Non Asn	
94	Memastikan setiap layanan publik dan infrastruktur/fasilitas umum ramah terhadap disabilitas	
95	Memperkuat Sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	11) Tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien dan bersih
96	Meningkatkan akses dan kualitas infromasi Publik	
97	Ibu Pulang Bawa akta lahir	
98	Pengembangan Mall Pelayanan Perizinan Terpadu	
99	Membangun kemitraan pemerintah –Badan Usaha, keterlibatan pihak swasta daalm rencana kerja pemerintah daerah (RKPD non APBD)	
100	Beasiswa bagi ASN dengan berbasis kebutuhan pemerintah daerah kabupaten Luwu Timur	
101	Meningkatkan keterampilan dan kesejahteraan ASN, P3K dan Upah Jasa	
102	Mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi melalui unit-unit percontohan	
103	Peningkatan keterampilan dan kesejahteraan aparat desa, BPD,Kepala Dusun, RT dan RW	
104	Peningkatan kesejahteraan Guru Mengaji, Imam Masjid, Pendeta dan Pandita (petugas Keagamaan)	
105	Membangun klinik riset dan inovasi pelayanan	
106	Gerai perizinan di desa dan kelurahan	
107	Memastikan masa hubungan perjanjian kerja bagi P3K selama 5 Tahun	
108	Pengadaan Kendaraan Motor bagi Imam Masjid, Pendeta, Pandita	
109	Insentif Zfiskal (BPHTB)	

No	Intervensi Kegiatan Prioritas RPJMD	Program Prioritas Pembangunan Daerah RPJMD
111	Sertifikasi rumah ibadah dan bangunan keagamaan	
112	Wisata religi	
113	Bantuan peningkatan sarana dan prasarana kegiatan belajar keagamaan	

Sumber: Visi, Misi Kepala daerah Terpilih; Data Diolah

Program prioritas Pembangunan tersebut ditetapkan untuk mewujudkan Misi Pembangunan Luwu Timur dengan penyelarasan sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3. 10 Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Misi Pembangunan Daerah

No.	Misi Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah
1	Meningkatkan sumber daya yang berkualitas, berbudaya dan berdaya saing (M1)"	1) Penguatan pendidikan berkualitas dan inklusif
		2) Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan untuk semua
		3) Menjamin Stabilitas Sosial, Politik dan Keamanan yang kondusif
		5) UMKM Maju dan Ketenagakerjaan yang Unggul
		6) Pariwisata Maju dan Pelestarian Budaya Daerah
		7) Pengembangan Daya Saing Kepemudaan dan Olahraga
		10) Perlindungan Sosial yang Adaptif
2	Meningkatkan daya saing ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas(M2)"	4) Pertanian Maju dan KemandirianPangan
		6) Pariwisata Maju dan PelestarianBudaya Daerah
		5) UMKM Maju dan Ketenagakerjaanyang Unggul
3	Mempercepat pertumbuhan dan pengembangan wilayah yang merata dan berkeadilan(M3)	8) Infrastruktur Merata dan Berkualitas
4	Meningkatkan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup yang terintegrasi (M4)	9) Pengelolaan SDA, Lingkungan Hidup, dan Mitigasi Bencana yang terintegrasi dan berkelanjutan
5	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien dan bersih melalui transformasi digital (M5)	11) Tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien dan bersih

Prioritas rincian kinerja yang dicapai dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama lima tahun, sesuai dengan prioritas pembangunan daerah ditetapkan melalui penekanan Program Prioritas dalam RPJMD. Penekanan prioritas tersebut bukan berarti bahwa program/kegiatan/Sub Kegiatan pembangunan operasional pada OPD di luar yang diprioritaskan tidak berjalan, tetapi berjalan dengan penekanan strategis yang lebih rendah dibanding yang diprioritaskan. Berikut cascading Tujuan, Sasaran, outcome dan Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 disajikan dalam tabel berikut;

Tabel 3. 11 Cascading Tujuan, Sasaran, Outcome dan Program Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Kabupaten Luwu Timur

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggungjawab	Program Prioritas Pembangunan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
VISI : LUWU TIMUR MAJU DAN SEJAHTERA							
MISI 1:							
Meningkatkan Sumber Daya Yang Berkualitas, Berbudaya Dan Berdaya Saing (M1)	Tujuan 1:						
	T.1.Meningkatnya kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia			IT.1.Indeks Pembangunan Manusia			1) Penguatan pendidikan berkualitas dan inklusif
		Sasaran-1:					
		S.1.Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat		IS.1.1. Rata-rata Lama Sekolah IS.1.2. Harapan Lama Sekolah			1) Penguatan pendidikan berkualitas dan inklusif
			Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah	Persentase Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) (%) Literasi Membaca (Nilai) (%) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada assesmen tingkat nasional (%) Numerasi (Nilai) (Nilai)	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	1) Penguatan pendidikan berkualitas dan inklusif
		Sasaran-2					
		S.2.Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		IS.2.3. Usia Harapan Hidup			2) Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan untuk semua
			Meningkatnya kualitas upaya Kesehatan Perorangan dan upaya Kesehatan Masyarakat	Rata-Rata Capaian SPM Rumah Sakit (%) Rata-Rata Capaian SPM Kesehatan (%)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan	Dinas Kesehatan, Rumah sakit dan Puskemas	2) Menjamin tersedianya pelayanan

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggungjawab	Program Prioritas Pembangunan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
				Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	Upaya Kesehatan Masyarakat		kesehatan untuk semua
				Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)			
				Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)			
				Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)			
				Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)			
				Persentase orang usia15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)			
				Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar (%)			
				Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)			
				Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)			
				Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)			
				Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)			
				Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)			

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggungjawab	Program Prioritas Pembangunan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
		Sasaran-3					
		S.3.Meningkatnya Kesejahteraan Sosial dan Kualitas keluarga		IS.3.4. Tingkat Kemiskinan IS.3.5.Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga IS.3.6.Indeks Pembangunan Gender			10) Perlindungan Sosial yang Adaptif
			Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang memperoleh peningkatan kapasitas (%)	Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
			Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar,anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM)	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
			Meningkatnya Kualitas Dan Efektifitas Penyelenggaraan PUG dan Peran Perempauan Dalam Pembangunan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan perempuan	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
			Meningkatnya Pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera	Persentase keluarga yang mengkuti kelompok kegiatan ketahanan Keluarga	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	
			Terkendalinya pertambahan Jumlah Penduduk	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	Program Pengendalian Penduduk	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
				Angka Kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age specific fertility rate/ASPR 15-19)			

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggungjawab	Program Prioritas Pembangunan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan keluarga berencana	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive/mCPR)	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera	Presentase Keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
			Meningkatnya kemandirian dan kontribusi pemuda dalam pembangunan ekonomi melalui kewirausahaan	Persentase tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Pengembangan Kepemudaan (%)	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olaharaga	6) Pengembangan Daya Saing Kepemudaan dan Olahraga
			Meningkatnya prestasi dan daya saing atlet daerah pada tingkat regional, nasional, maupun internasional	Persentase tingkat prestasi olahraga (%)	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olaharaga	6) Pengembangan Daya Saing Kepemudaan dan Olahraga
			Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai NSPK	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1) Penguatan pendidikan berkualitas dan inklusif
		Sasaran 4					
		S.4.Meningkatnya Kualitas kehidupan beragama dan berbudaya		IS.4.7.Indeks Kerukunan Umat Beragama			5) Pariwisata Maju dan Pelestarian Budaya Daerah
				IS.4.8.Persentase Benda,bangunan,struktur dan situs cagar budaya yang ditetapkan terhadap total registrasi			

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggungjawab	Program Prioritas Pembangunan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
			Meningkatnya Warisan Budaya Yang Dilestarikan	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (%)	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	5) Pariwisata Maju dan Pelestarian Budaya Daerah
			Meningkatnya Ketahanan ekonomi,Sosial dan Budaya	Persentase kebijakan ketahanan eknonomi,sosial, budaya yang dilaksanakan (%)	Program Pembinaan dan Pengembagan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Badan Kesbangpol	3) Menjamin Stabilitas Sosial, Politik dan Keamanan yang kondusif
MISI 2							
Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas (M2)	Tujuan-2						
	T.2.Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah secara merata			IT.2.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi			
				IT.2.3. PDRB/Kapita (Rp jt/Tahun)			
				I.T.2.4. Rasio Gini			
				I.T.2.5.Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)			
		Sasaran-5					
		S.5.Meningkatnya transformasi struktur perekonomian daerah		IS.5.9Persentase Kontribusi Industri Manufaktur (pengolahan) terhadap total PDRB (%)			5) UMKM Maju dan Ketenagakerjaan yang Unggul
			Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	Realisasi Total Terhadap Target Investasi (Angka)	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5) UMKM Maju dan Ketenagakerjaan yang Unggul
			Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investor Yang Berinvestasi (%)	Program Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5) UMKM Maju dan Ketenagakerjaan yang Unggul
			Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri (%)	Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	5) UMKM Maju dan Ketenagakerjaan yang Unggul
			Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai Ekspor Barang (Nilai)	Program Pengembangan Ekspor	Dinas Perdagangan, Koperasi, UMKM Dan Perindustrian	5) UMKM Maju dan Ketenagakerjaan yang Unggul
			Meningkatnya realisasi	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (%)	Program Perencanaan Dan	Dinas Perdagangan, Koperasi, UMKM Dan Perindustrian	5) UMKM Maju dan Ketenagakerjaan yang Unggul

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggungjawab	Program Prioritas Pembangunan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
			pembangunan industri		Pembangunan Industri		
			Meningkatnya Kapasitas dan Kompetensi Sumberdaya Tenaga Kerja (%)	Pesaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi ('%)	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	5) UMKM Maju dan Ketenagakerjaan yang Unggul
		Sasaran-6					
		S.6.Meningkatnya nilai tambah ekonomi berbasis UMKM dan ekosistem ekonomi kreatif		IS.6.10.Persentase Kontribusi UMKM dan ekonomi kreatif terhadap PDRB			5) UMKM Maju dan Ketenagakerjaan yang Unggul
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (%)	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian	5) UMKM Maju dan Ketenagakerjaan yang Unggul
				Proporsi UKM menjalin kemitraan dan ekspor (%)	Program Pengembangan UMKM	Dinas Perdagangan, Koperasi, Ukm Dan Perindustrian	
			Meningkatnya Kerjasama dan Harmonisasi Antara Perusahaan dengan Pekerja	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun ('%)	Program Hubungan Industrial	Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja	
			Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi Yang Berkualitas (%)	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian	
			Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha Yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	Program Pelayanan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Jumlah Kunjungan Wisatawan (%)	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga	6) Pengembangan Daya Saing

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggungjawab	Program Prioritas Pembangunan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
			Meningkatnya Jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Event Pemasaran yang di laksanakan/di Ikuti (%)	Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga	Kepemudaan dan Olahraga
			Meningkatnya jumlah pelaku ekonomi kreatif yang mandiri dan berdaya saing	Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif (%)	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga	
		Sasaran-7					
		S.7.Meningkatnya ketahanan pangan daerah		IS.7.11. Indeks Ketahanan Pangan Daerah			4) Pertanian Maju dan Kemandirian Pangan
			Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	4) Pertanian Maju dan Kemandirian Pangan
			Tersedianya Cadangan Pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan (%)	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan		
			Meningkatnya produksi tanaman pangan	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (%)	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian		
			Meningkatnya produksi tanaman perkebunan	Peningkatan produksi tanaman perkebunan (%)			
			Meningkatnya populasi peternakan	peningkatan populasi peternakan (%)			
			Meningkatnya Lahan Pertanian LP2B yang dioptimalkan	Cakupan Luas Lahan Pertanian LP2B (Ha) yang dioptimalkan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian		
			Meningkatnya SDM Penyuluh Pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian Yang Ditingkatkan (%)	Program Penyuluhan Pertanian		

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggungjawab	Program Prioritas Pembangunan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
			Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan	
			Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya		
MISI 3							
Mempercepat Pertumbuhan Dan Pengembangan Wilayah Yang Merata Dan Berkeadilan (M3)	Tujuan 3;						
	T.3.Terciptanya konektivitas wilayah untuk pelayanan dasar dan aktivitas ekonomi			IT.3.6. Nilai Pilar 2 (Infrastruktur) Indeks Daya Saing Daerah			8) Infrastruktur Merata dan Berkualitas
		Sasaran-8					
		S.8.Meningkatnya keterjangkauan masyarakat terhadap pelayanan dasar		IS.8.12. Ratio puskesmas perjumlah penduduk			8) Infrastruktur Merata dan Berkualitas
				IS.8.13.Rasio Siswa terhadap ketersediaan Ruang Kelas pada jenjang pendidikan dasar			8) Infrastruktur Merata dan Berkualitas
				IS.8.14.Persentase Rumah Tangga dengan akses air minum aman			8) Infrastruktur Merata dan Berkualitas
				IS.8.15.Persentase Rumah Tangga dengan akses sanitasi aman			8) Infrastruktur Merata dan Berkualitas
			Meningkatnya kualitas upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rata-Rata Capaian SPM Kesehatan (%)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	8) Infrastruktur Merata dan Berkualitas
			Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah Dasar	Persentase Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) (%)	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	8) Infrastruktur Merata dan Berkualitas

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggungjawab	Program Prioritas Pembangunan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
			Meningkatnya jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	8) Infrastruktur Merata dan Berkualitas
			Meningkatnya jalan kondisi baik	Persentase jalan kabupaten kondisi baik	Program Penyelenggaraan Jalan		
			Meningkatnya infrastruktur persampahan yang dibangun	Persentase infrastruktur persampahan yang dibangun	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional		
		Sasaran-9					
		S.9.Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah		IS.9.16. Indeks Layanan Infrastruktur			8) Infrastruktur Merata dan Berkualitas
			Meningkatnya drainase dalam kondisi baik	Persentase Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	8) Infrastruktur Merata dan Berkualitas
			Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Persentase Luas Permukiman kumuh dibawah 10 H yang ditangani	Program Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	
			Meningkatnya rasio bangunan ber-IMB	Ratio kepatuhan IMB kabupaten (%)	Program Penataan Bangunan Gedung	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
			Meningkatnya luas RTH publik yang ditata	Persentase Luas RTH pubkik yang ditata	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
			Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Danau	Konektivitas Danau (Ratio)	Program Pengelolaan Pelayaran	Dinas Perhubungan	8) Infrastruktur Merata dan Berkualitas
			Tersedianya dokumen perencanaan Bandar	Persentase Dokumen Perencanaan Bandar Udara (%)	Program Pengelolaan Penerbangan		

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggungjawab	Program Prioritas Pembangunan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
			Udara yang telah disetujui				
			Meningkatnya Kualitas layanan transportasi darat	Konektivitas darat (Rasio) persentase kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	Program Penyelenggaraan Lalu lintas dan Angkutan jalan (LLAJ)		
			Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan (%)	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	
	Tujuan 4;						
	T.4.Meningkatnya perkembangan desa sebagai pusat pelayanan dan pertumbuhan ekonomi			IT.4. 7. Indeks Desa *(Presentase Desa Mandiri berdasarkan Indeks Desa)*			8) Infrastruktur Merata dan Berkualitas
		Sasaran 10					
		S.10. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan usaha ekonomi desa		IS.10.17. Persentase desa yang memiliki layanan administrasi berbasis digital			8) Infrastruktur Merata dan Berkualitas
				IS.10.18. Persentase BUMdes yang menghasilkan laba			
			Meningkatnya Kualitas Penataan Desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa (%)	Program Penataan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	8) Infrastruktur Merata dan Berkualitas
			Meningkatnya Kualitas Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Aparatur Desa Dan Anggota BPD Yang Ditingkatkan Kapasitasnya (%)	Program Administrasi Pemerintahan Desa		
MISI 4							
Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam	Tujuan 5;						
	T.5.Meningkatnya kualitas			IT.5. 8. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah			9) Pengelolaan SDA, Lingkungan

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggungjawab	Program Prioritas Pembangunan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Dan Lingkungan Hidup Yang Terintegrasi (M4)	lingkungan hidup dan ketahanan ekologi						Hidup, dan Mitigasi Bencana yang terintegrasi dan berkelanjutan
		Sasaran-11					
		S.11.Terkelolanya sumberdaya alam secara berkelanjutan dan terintegrasi		IS.11.19. Indeks Kualitas Air IS.11.20. Indeks Kualitas Udara IS.11.21. Indeks Kualitas Tutupan lahan			9) Pengelolaan SDA, Lingkungan Hidup, dan Mitigasi Bencana yang terintegrasi dan berkelanjutan
			Menurunnya Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Udara	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	9) Pengelolaan SDA, Lingkungan Hidup, dan Mitigasi Bencana yang terintegrasi dan berkelanjutan
			Meningkatnya Kualitas Pengelolaaan Keanekarangaman Hayati	Persentase RTH yang tertangani dengan baik	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Dinas Lingkungan Hidup	9) Pengelolaan SDA, lingkungan hidup dan Mitigasi bencana yang terintegrasi dan berkelanjutan
			Meningkatnya Kepattuhan Usaha Dan/Atau Kegiatan Terhadap Persetujuan Lingkungan Yang Diterbitkan	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha Dan/Atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH DAN PUU LH (%)	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Dinas Lingkungan Hidup	9) Pengelolaan SDA, Lingkungan Hidup, dan Mitigasi Bencana yang terintegrasi dan berkelanjutan
			Meningkatnya Tata Kelola Persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup	9) Pengelolaan SDA, Lingkungan Hidup, dan Mitigasi Bencana yang terintegrasi dan berkelanjutan

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggungjawab	Program Prioritas Pembangunan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
			Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan Lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang ditingkatkan kompetensinya	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup	9) Pengelolaan SDA, Lingkungan Hidup, dan Mitigasi Bencana yang terintegrasi dan berkelanjutan
		Sasaran-12					
		S.12.Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana dan dampak perubahan iklim daerah		IS.12.22. Indeks Risiko Bencana IS.12.23. Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)			9) Pengelolaan SDA, Lingkungan Hidup, dan Mitigasi Bencana yang terintegrasi dan berkelanjutan
			Meningkatknya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan bencana pada saat tanggap darurat dan pasca bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (%) Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana (%) Persentase Penanganan Pasca Bencana (%)	Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9) Pengelolaan SDA, Lingkungan Hidup, dan Mitigasi Bencana yang terintegrasi dan berkelanjutan
			Meningkatnya perlindungan masyarakat dan asset dari bahaya kebakaran melalui penanganan yang cepat dan akurat	Cakupan Penyebaran Informasi Dan Edukasi Rawan Kebakaran Cakupan Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	9) Pengelolaan SDA, Lingkungan Hidup, dan Mitigasi Bencana yang terintegrasi dan berkelanjutan
			Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota (%)	Program Penanganan Bencana	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	9) Pengelolaan SDA, Lingkungan Hidup, dan Mitigasi Bencana yang terintegrasi dan berkelanjutan

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggungjawab	Program Prioritas Pembangunan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
			Meningkatnya penanganan bencana pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	9) Pengelolaan SDA, Lingkungan Hidup, dan Mitigasi Bencana yang terintegrasi dan berkelanjutan
			Meningkatnya penanganan dampak perubahan iklim terhadap pertanian	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian			
			Meningkatnya pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan	Persentase Infrastruktur pengendali daya rusak air	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	9) Pengelolaan SDA, Lingkungan Hidup, dan Mitigasi Bencana yang terintegrasi dan berkelanjutan
				Rasio Jaringan irigasi			
MISI 5							
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Melayani Efektif, Efisien Dan Bersih Melalui Transformasi Digital (M5)	Tujuan 6;						
	T.6.Terwujudnya tata kelola pemerintahan berintegritas dan adaptif			IT.6. 9. Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)			11)Tata Kelola Pemerintahan Yang Melayani, Efektif, Efisien Dan Bersih
		Sasaran-13					
		S.13.Meningkatnya akuntabilitas Pemerintahan daerah		IS.13.24. Nilai SAKIP			11)Tata Kelola Pemerintahan Yang Melayani, Efektif, Efisien Dan Bersih
			Meningkatnya Kualitas Produk Hukum yang dihasilkan dan terselesaikannya penanganan perkara dan permasalahan hukum	Persentase Produk Hukum yang dihasilkan (%)	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah	11)Tata Kelola Pemerintahan Yang Melayani, Efektif, Efisien Dan Bersih
				Persentase Perkara dan Permasalahan hukum yang ditangani (%)			11)Tata Kelola Pemerintahan Yang Melayani, Efektif, Efisien Dan Bersih
			Meningkatnya Kualitas	Nilai LPPD (Nilai)			11)Tata Kelola Pemerintahan Yang

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggungjawab	Program Prioritas Pembangunan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
			Penyelenggaraan Pemerintahan				Melayani, Efektif, Efisien Dan Bersih
			Meningkatnya kualitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan (%)			11)Tata Kelola Pemerintahan Yang Melayani, Efektif, Efisien Dan Bersih
			Meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian dan pembangunan	Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang dilaksanakan (%)	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Sekretariat Daerah	11)Tata Kelola Pemerintahan Yang Melayani, Efektif, Efisien Dan Bersih
			Meningkatnya Kualitas Layanan pengadaan Barang dan Jasa	Tingkat Kematangan UKPBJ (Angka)			
			Meningkatnya Kualitas Persidangan dan Kajian Peraturan Perundang Undangan	Ketetapan Penetapan Ranperda Tahun N	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRD	11)Tata Kelola Pemerintahan Yang Melayani, Efektif, Efisien Dan Bersih
			Meningkatnya Kualitas Penganggaran dan Pengawasan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (%)			11)Tata Kelola Pemerintahan Yang Melayani, Efektif, Efisien Dan Bersih
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RPJMD Dengan RKPD (%)	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	11)Tata Kelola Pemerintahan Yang Melayani, Efektif, Efisien Dan Bersih
				Persentase Keselarasan RPJMD Dengan Renstra PD (%)			
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan RKPD Dengan Renja PD Pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	11)Tata Kelola Pemerintahan Yang Melayani, Efektif, Efisien Dan Bersih

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggungjawab	Program Prioritas Pembangunan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD Pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			11)Tata Kelola Pemerintahan Yang Melayani, Efektif, Efisien Dan Bersih
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD Pada Bidang Perekonomian dan SDA			11)Tata Kelola Pemerintahan Yang Melayani, Efektif, Efisien Dan Bersih
			Meningkatnya Tata Kelola Anggaran	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah	11)Tata Kelola Pemerintahan Yang Melayani, Efektif, Efisien Dan Bersih
				Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik			
			Meningkatnya Tata Kelola Perbendaharaan	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah	11)Tata Kelola Pemerintahan Yang Melayani, Efektif, Efisien Dan Bersih
				Persentase Penurunan SILPA			
			Meningkatnya Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah	11)Tata Kelola Pemerintahan Yang Melayani, Efektif, Efisien Dan Bersih
			Meningkatnya Akuntabilitas proses penyaluran bantuan keuangan daerah				
			Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah	11)Tata Kelola Pemerintahan Yang Melayani, Efektif, Efisien Dan Bersih
			Meningkatnya Upaya Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah	11)Tata Kelola Pemerintahan Yang Melayani, Efektif, Efisien Dan Bersih

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggungjawab	Program Prioritas Pembangunan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
			Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pelaporan	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendaptan			
			Meningkatnya Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	Persentase Penerapan Sistem Infomasi Keuangan Berbasis Digital			
			Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Produktivitas serta Budaya kerja yang Positif	Persentase penyelesaian layanan kepegawaian (%)	Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	11)Tata Kelola Pemerintahan Yang Melayani, Efektif, Efisien Dan Bersih
				Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (Persentase)			
				Persentase Pelayanan Mutasi yang Terselesaikan (%)			
				Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya (Persentase)			
			Meningkatnya kepatuhan perangkat daerah terhadap rekomendasi hasil pengawasan	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat	11)Tata Kelola Pemerintahan Yang Melayani, Efektif, Efisien Dan Bersih
		Sasaran-14					
		S.14.Meningkatnya Kualitas pelayanan publik berbasis digital		IS.14.25.Indeks Pelayanan Publik			11)Tata Kelola Pemerintahan Yang Melayani, Efektif, Efisien Dan Bersih
				IS.14.26. Indeks SPBE			
			Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan (%)	Program Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	11)Tata Kelola Pemerintahan Yang Melayani, Efektif, Efisien Dan Bersih
				Persentase Akta Kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan (%)			

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggungjawab	Program Prioritas Pembangunan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
			Meningkatnya Kualitas Layanan Pencacatan Sipil	Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan (%)	Program Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	11)Tata Kelola Pemerintahan Yang Melayani, Efektif, Efisien Dan Bersih
				Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)			
				Persentase Akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan (%)			
				Persentase Akta Kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan (%)			
			Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi publik pemerintah daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses Dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (Survei)	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	11)Tata Kelola Pemerintahan Yang Melayani, Efektif, Efisien Dan Bersih
			Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Aplikasi Pemerintah Daerah Yang Terintegrasi (%)	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	11)Tata Kelola Pemerintahan Yang Melayani, Efektif, Efisien Dan Bersih
				Persentase Perangkat Daerah Yang Terkoneksi Dengan Jaringan Internet Intra Pemerintah Daerah (%)			
			Meningkatnya ketersediaan dan kualitas data sektoral pemerintah daerah untuk mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan	Persentase data statistik sektoral yang tersedia dan diperbaharui	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	11)Tata Kelola Pemerintahan Yang Melayani, Efektif, Efisien Dan Bersih
			Meningkatnya Tata Kelola Arsip Dinamis dan Statis	Tingkat Ketersediaan Arsip	Program Pengelolaan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	11)Tata Kelola Pemerintahan Yang Melayani, Efektif, Efisien Dan Bersih

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggungjawab	Program Prioritas Pembangunan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
			Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (%)	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	SATPOLPP	11)Tata Kelola Pemerintahan Yang Melayani, Efektif, Efisien Dan Bersih
			Meningkatnya penanganan gangguan keteteraman dan ketertiban umum	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)			
			Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (Persentase)			
			Meningkatnya kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)			
			Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsi	Persentase kegiatan penunjjang urusan perangkat daerah yang berjalan sesuai standar (%)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Seluruh Perangkat Daerah	11)Tata Kelola Pemerintahan Yang Melayani, Efektif, Efisien Dan Bersih
		Sasaran-15					
		S.15.Meningkatnya inovasi daerah		IS.15.27. Indeks Inovasi Daerah		Bapperida	11)Tata Kelola Pemerintahan Yang Melayani, Efektif, Efisien Dan Bersih
			Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase Produk Inovasi yang dimanfaatkan	Program Riset Dan Inovasi Daerah	Bapperida	11)Tata Kelola Pemerintahan Yang Melayani, Efektif, Efisien Dan Bersih

Sumber : Bapperida data diolah tahun 2025

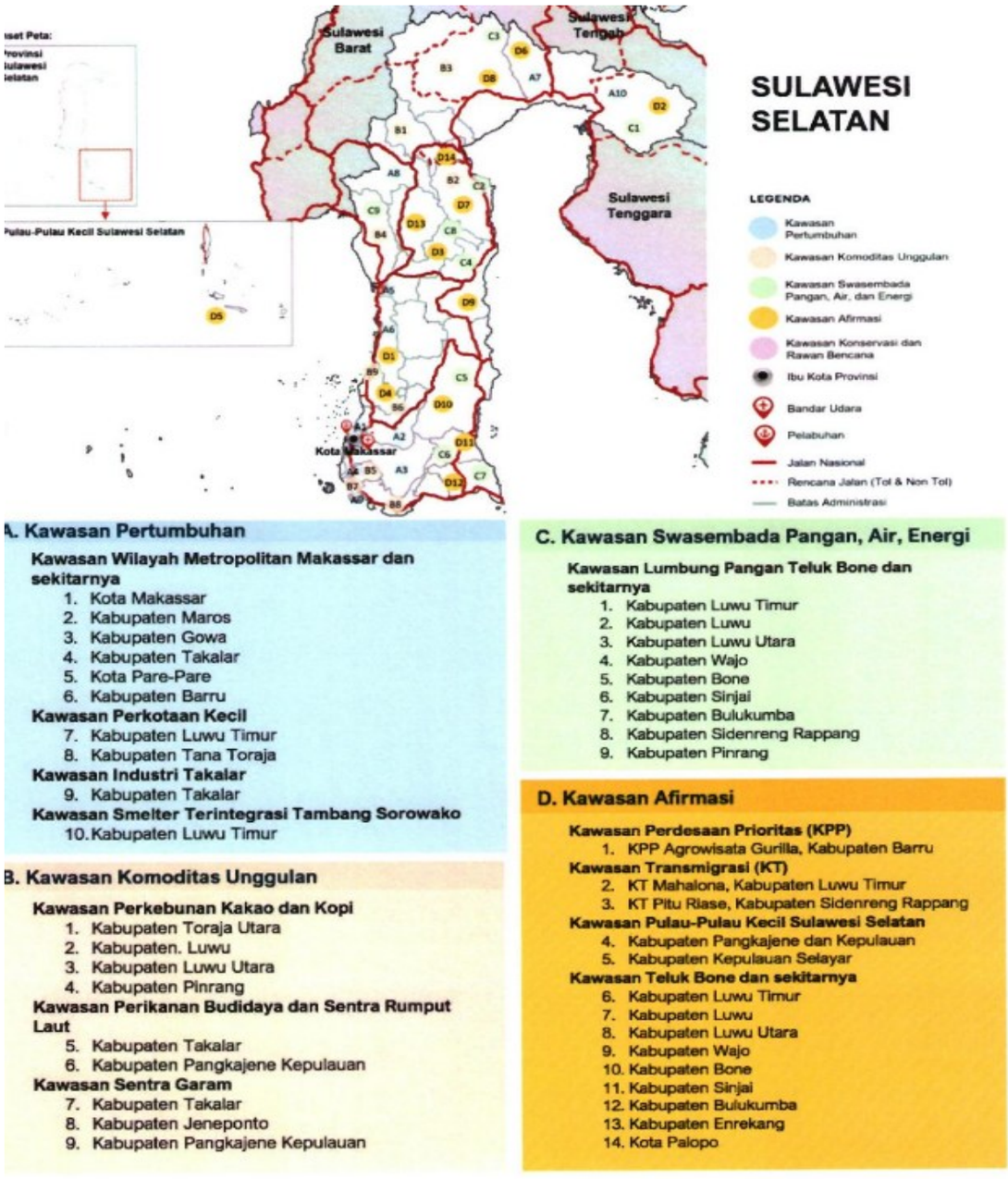
3.3.2 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

3.3.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah Nasional Terhadap Kabupaten Luwu Timur

Kabupaten Luwu Timur merupakan bagian dari Kawasan Strategis Nasional (KSN) Sorowako dan Sekitarnya yang ditetapkan melalui Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) sebagai kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi berdasarkan potensi sumber daya alam strategis nasional berupa sumber daya dan cadangan nikel yang berkontribusi besar terhadap PDB nasional. Sedangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029, mengarahkan pembangunan kabupaten Luwu Timur sebagai lokasi prioritas berdasarkan kawasan pertumbuhan dengan strategi pengembangan hilirisasi yang padat karya dan inovatif berorientasi ekspor dan berkelanjutan sebagai Kawasan Smelter Terintegrasi Tambang Sorowako dan strategi pembangunan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan aglomerasi yang menetapkan kabupaten Luwu Timur sebagai kawasan perkotaan kecil.

Selain pendekatan klaster pertumbuhan, RPJMN tahun 2025-2029 juga mengarahkan pembangunan kabupaten Luwu Timur berdasarkan pendekatan klaster pemerataan sebagai kawasan swasembada pangan, air dan energi yaitu Kawasan Lumbung Pangan Teluk Bone dan Sekitarnya dan sebagai kawasan afirmasi yaitu Kawasan Teluk Bone dan Sekitarnya untuk mendukung pengembangan ekonomi local dan perlindungan lingkungan. Selain itu, untuk peningkatan layanan dasar dilaksanakan melalui strategi eliminasi stunting, pengendalian penyakit menular, eliminasi penyakit tropis terabaikan, pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul dan penguatan Pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi.

Gambar 3. 1 Peta Arah Pembangunan dan Lokasi Prioritas Wilayah Sulawesi Selatan dalam RPJMN 2025-2029



Sumber : RPJMN tahun 2025 - 2029

Tabel 3. 12 Highlight Indikasi Intervensi Pembangunan Wilayah Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Kawasan Pembangunan RPJMN, Prioritas Provinsi dan Kegiatan Prioritas Utama

No	Kawasan Pembangunan Kewilayahan			
	Kawasan Pembangunan Dalam RPJMN	**Program Prioritas Provinsi**	**Program Prioritas Pembangunan Daerah**	**Hightlight Indikasi Intervensi Berdasarkan Prioritas Pembangunan dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029**
1	Kawasan Perkotaan Kecil • A7: Kabupaten Luwu Timur (Sorowako)	7. Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan	8.Infrastruktur Merata dan Berkualitas	Pembangunan Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan melalui - Pembangunan Kawasan Perkotaan Kecil, dengan ouput Penyediaan dan peningkatan layanan konektivitas transportasi yang disesuaikan dcngan karakteristik kawasan perkotaan yang akan dibangun, penguatan peran kawasan perkotaan dalam skala regional untuk pemerataan ekonomi melalui penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan, bantuan peralatan/sarana, pembinaan dan pengawasan pengembangan sanitasi, Pembangunan SPAM kabupaten/kota, bantuan PSU bidang perumahan, sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala kota, Penguatan konektivitas dan pengembangan transportasi perkotaan yang berkelanjutan yang terintegrasi melalui: - fasilitasi pengembangan pelabuhan pengumpul dan pengembangan pelabuhan pengumpan regional termasuk pengembangan dermaga pendukung bandar udara perairan (*seaplane*) yang terintegrasi dengan simpul transportasi, - fasilitasi pengembangan jaringan bandara terpadu; - peningkatan dan preservasi jalan daerah; - pemenuhan fasilitas keselamatan jalan provinsi dan peningkatan keselamatan angkutan darat; dan - dukungan dan fasilitasi penyusunan masterplan pengembangan dan penataan kawasan. Penyediaan perumahan dan permukiman serta pemenuhan pelayanan dasar melalui: - penyediaan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman; - penanganan permukiman kumuh; pembangunan serta pemenuhan akses air minum dan sanitasi aman termasuk pengembangan SPAM kabupaten, - pemenuhan kebutuhan air baku, - pembinaan dan pengawasan pengembangan sanitasi dan SPALD terpusat skala Kabupaten, - pengembangan kawasan permukiman pendukung kawasan Smelter Terintegrasi Tambang Sorowako,

No	Kawasan Pembangunan Kewilayahan			
	Kawasan Pembangunan Dalam RPJMN	**Program Prioritas Provinsi**	**Program Prioritas Pembangunan Daerah**	**Hightlight Indikasi Intervensi Berdasarkan Prioritas Pembangunan dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029**
				- fasilitasi pemberian bantuan PSU, - penanganan sampah sistem regional yang optimal dari hulu hingga hilir dengan melibatkan partisipasi masyarakat berbasis 3 R; - fasilitasi pembangunan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik berbasis energi baru terbarukan serta jaringan transmisi dan jaringan distribusi tenaga listrik; - fasilitasi pemerataan jangkauan dan kualitas infrastruktur digital dan peningkatan literasi digital dan keterampilan SDM
		1. Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi	2. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan untuk semua	Penguatan pelayanan, sumber daya manusia, dan tata kelola kesehatan melalui - pengembangan unit pelayanan kesehatan berbasis digital, - peningkatan kesediaan farmasi dan alat kesehatan, - peningkatan pendayagunaan SDM Kesehatan, - peningkatan pemanfaatan, inovasi teknologi dan pelayanan kesehatan digital. - peningkatan penyediaan dan mutu fasilitas kesehatan primer dan rujukan; - perkuatan SDM kesehatan dan optimalisasi pelaksanaan program promotive, preventif dan perluasan jaminan kesehatan berbasis NIK/KTP; - Penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular, eliminasi penyakit tropis terabaikan, serta pencegahan dan penurunan stunting dan kematian ibu dan anak; - dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya program Makan Bergizi Gratis Pengendalian penyakit menular, eliminasi penyakit tropis terabaikan, serta pencegahan dan penurunan stuntng dan kematian ibu dan anak melalui: - penuntasan TBC, - pengendalian penyakit HIV/AIDS, - pengendalian penyakit malaria, - pengendalian penyakit kusta, - pengendalian penyakit rabies, - penguatan intervensi spesifk stunting - peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan reproduksi perempuan.

No	Kawasan Pembangunan Kewilayahan			
	Kawasan Pembangunan Dalam RPJMN	**Program Prioritas Provinsi**	**Program Prioritas Pembangunan Daerah**	**Hightlight Indikasi Intervensi Berdasarkan Prioritas Pembangunan dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029**
			2) Penguatan Pendidikan berkualitas dan inklusif	Penguatan Pendidikan berkualitas dan inklusif, melalui - peningkatan pemerataan akses dan mutu pendidikan, - pengembangan pendidikan vokasi terintegrasi dengan kebutuhan pasar kerja, - pemanfaatan teknologi informasi dan digital dalam proses pembelajaran, - pemenuhan gizi dan kesehatan siswa, dan - peningkatan kompetensi literasi dan numerasi, pengembangan budaya baca masyarakat sejak dini; serta dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Pembangunan Sekolah Rakyat. - Pengembangan fasilitasi penyediaan layanan pendidikan 1 tahun pra sekolah (pendidikan anak usia dini) dengan melibatkan peran aktif pihak terkait secara holistik dan integrative, termasuk Integrasi layanan PAUD nonformal ke dalam kegiatan Posyandu Era Baru melalui kegiatan stimulasi dini - Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah berbasis wilayah secara kolaboratif - Peningkatan kapasitas guru dan siswa dalam literasi digital. - Penguatan peran keluarga dan masyarakat dalam pendidikan termasuk pengembangan kemitraan sekolah–komunitas untuk memperkaya pengalaman belajar siswa.

No	Kawasan Pembangunan Kewilayahan			
	Kawasan Pembangunan Dalam RPJMN	**Program Prioritas Provinsi**	**Program Prioritas Pembangunan Daerah**	**Hightlight Indikasi Intervensi Berdasarkan Prioritas Pembangunan dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029**
		5. Peningkatan kemandirian desa melalui Pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan	10)Perlindungan Sosial yang Adaftif	Perwujudan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) serta reformasi dan integrasi bantuan sosial, jaminan sosial, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yang adaptif, melalui; - pengembangan tata kelola registrasi Regrosek, - dukungan penguatan JKN dan penyaluran bantuan sosial adaptif dan subsidi tepat sasaran; - pemberian Kartu LANSIA, - Perluasan Layanan BPJS Ketenagakerjaan, - Peningkatan kualitas pelayanan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan - dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; serta dukungan terhadap program 3 juta rumah
		2. Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal	12) Menjamin stabilitas Sosial,Politik dan Keamanan yang Kondusif	Penguatan ekosistem budaya berbasis rural heritage melalui: - Pengelolaan terpadu festival seni budaya daerah berkelas internasional, - peningkatan tata kelola pembangunan kebudayaan; dan pelestarian nilai budaya, tradisi, dan kearifan lokal
			6)Perwujudan Pariwisata Maju dan Pelestarian Budaya Daerah	Pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan melalui: - pengembangan aksesibilitas pariwisata dan konektivitas layanan transportasi; - pengembangan keterampilan SDM dan layanan pariwisata - pengembangan industry penunjang pariwisata dan diversifikasi atraksi pariwisata; dan pemanfaatan kawasan suaka alam sebagai objek wisata, dan - pengelolaan destinasi berbasis masyarakat dengan pemberdayaan komunitas adat dan pengembangan desa wisata; - penyelenggaraan festival tahunan, serta - promosi terpadu antara pelaku usaha, industry pariwisata, perdagangan, investasi dan kebudayaan

No	Kawasan Pembangunan Kewilayahan			
	Kawasan Pembangunan Dalam RPJMN	**Program Prioritas Provinsi**	**Program Prioritas Pembangunan Daerah**	**Hightlight Indikasi Intervensi Berdasarkan Prioritas Pembangunan dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029**
		8. Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi	9) Pengelolaan SDA, Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana yang terintegrasi dan berkelanjutan	Peningkatan ketahanan dan penanganan bencana serta penguatan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan, melalui; - pengendalian risiko bencana dan pemberdayaan masyarakat, - peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan wisata kawasan konservasi perairan, - pengendalian daya rusak air dan peningkatan manajemen risiko serta - pengendalian banjir, dan peningkatan infrastruktur berketahanan bencana dan layanan peringatan dini bencana Terkait Pengelolaan kebencanaan, perwujudannya dalam RTRW sebagai berikut : - Perlindungan Studi dan Kajian mitigasi kawasan rawan bencana pada kawasan yang bertampalan dengan kegiatan budidaya - Sosialisasi penganggulangan bencana pada kawasan rawan bencana, terutama pada kawasan yang bertampalan dengan kegiatan budidaya - Peningkatan infrastruktur penanganan bencana kawasan yang bertampalan dengan kegiatan budidaya
				Pembangunan berketahanan iklim, pengelolaan keanekaragaman hayati, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan tata ruang, melalui: - peningkatan pengelolaan kualitas air, udara air laut, dan lahan, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3); - penguatan kelembagaan, pengendalian, penerbitan dan penegakan hukum lingkungan hidup serta kehutanan; - penguatan instrument pencegahan dampak lingkungan hidup; - penguatan implementasi pembangunan rendah karbon yang diarahkan pada penguatan aksi penurunan emisi gas rumah kaca disetiap sektor dan penguatan tata kelola dan factor pendukung pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca,. - penguatan pengendalian rencana tata ruang wilayah dengan mempertimbangkan risiko bencana khususnya bencana hidrometeorologi

No	Kawasan Pembangunan Kewilayahan			
	Kawasan Pembangunan Dalam RPJMN	**Program Prioritas Provinsi**	**Program Prioritas Pembangunan Daerah**	**Hightlight Indikasi Intervensi Berdasarkan Prioritas Pembangunan dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029**
				- penuntasan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang didukung dengan penguatan pengendalian dan penegakan hukum implementasi tata ruang daerah
		3. Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru	4) Pertanian Maju dan Kemandirian Pangan	Pengembangan nilai tambah dan kompleksitas industri, termasuk hilirisasi industri berbasis sumber daya alam mineral, pertanian dan perikanan berikut pengembangan teknologi dan elisiensi rantai distribusinya, melalui: - pengembangan industri produk olahan hasil laut, - fasilitasi pengembangan lndustri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, - penguatan tata kelola dan pengembangan industri hilir, - jaminan ketersediaan bahan baku, peningkatan adaptasi teknologi, riset inovasi, dan kapasitas tenaga kerja di industri rumput laut dan komoditas unggulan lainnya; - Peningkatan adopsi teknologi dan pemanfaatan riset/inovasi industri padat karya terampil dan pengembangan industri medium-high tecnology. - dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka hilirisasi, industrialisasi dan transformasi digital yaitu Kawasan Industri Indonesia Huali Industry Park., berupa dukungan pengembangan dan peningkatan investasi
				Pengembangan kawasan pertanian dan perikanan, melalui: peningkatan - produktivitas lahan pertanian termasuk peningkatan indeks pertanaman serta rehabilitasi dan dukungan peningkatan jaringan irigasi, - pengawasan kualitas mutu dan keamanan pangan, - pengembangan pangan hewani, - fasilitasi stabilisasi pasokan dan harga pangan; pengelolaan sarana prasarana produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya; - penguatan logistik, pemasaran dan sistem rantai dingin produk perikanan; - peningkatan daya saing sumber daya manusia pembudidaya dan penyedia jasa logistik, kelembagaan, usaha kelautan dan perikanan;

No	Kawasan Pembangunan Kewilayahan			
	Kawasan Pembangunan Dalam RPJMN	**Program Prioritas Provinsi**	**Program Prioritas Pembangunan Daerah**	**Hightlight Indikasi Intervensi Berdasarkan Prioritas Pembangunan dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029**
				- fasilitasi kerja sama perluasan pasar, pengembangan koperasi, serta rantai pasok ekspor produk perikanan.
				KPU - 09 - Pengembangan Pangan Akuatik (Blue Food) melalui ; - peningkatan sarana dan prasarana penangkapan ikan, - penguatan kapasitas SDM, serta - penguatan tata kelola dan kapasitas kelembagaan nelayan. **KPU - 11 - Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati,** melalui ; - peningkatan produktifitas lahan pertanian, peningkatan produktifitas - komoditas tanaman pangan, peningkatan pemanfaatan hutan dalam mendukung ketahanan pangan, pemberian subsidi pupuk, akses - benih/pestisida dan BBM, serta alat dan mesin pertanian, modernisasi dan digitalisasi data pangan, serta pelatihan dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam kelompok usaha pertanian dan wanatani
		4. Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing	5) UMKM Maju dan Ketenagakerjaan yang Unggul	Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kualitas ketenagakerjaan untuk mendorong perkotaan yang maju dan menyejahterakan melalui; - penguatan ekosistem pemangku ekonomi kreatif; - penguatan ekosistem film,animasi, video, dan musik; - penguatan ekosistem fesyen dan kriya; penguatan ekosistem aplikasi dan gim; - penguatan ekosisitem kuliner
		6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital	11) Tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien dan bersih	Fasilitasi dan pembinaan kerja sama antar daerah untuk mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan serta penguatan kerja sama multipihak dalam pembiayaan dan pembangunan perkotaan melalui; - penguatan tata kelola dan teknologi pemerintah digital, - pengembangan kompetensi dan budaya digital aparatur sipil negara, - transformasi digital layanan publik prioritas, serta - penguatan ketersediaan dan pemanfaatan data pemerintah

No	Kawasan Pembangunan Kewilayahan			
	Kawasan Pembangunan Dalam RPJMN	**Program Prioritas Provinsi**	**Program Prioritas Pembangunan Daerah**	**Hightlight Indikasi Intervensi Berdasarkan Prioritas Pembangunan dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029**
				Peningkatan tata kelola pelayanan publik yang efektif dan akuntabel melalui - peningkatan kualitas dan tata keloLa pelayanan publik, - penguatan manajemen kinerja pembangunan, - Sinergi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan
	Kawasan Industri Indonesia Huali Industry Park	3. Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru	8) Infrastruktur Merata dan berkualitas	Pengembangan Kawasan Industri Indonesia Huali Industry Park, melalui ; - dukungan pembangunan dan pengembangan infrastruktur jalandan jembatan; - pengembangan sarana prasarana pendukung (perumahan, kesehatan, air bersih serta pengolahan persampahandan limbah); - peningkatan investasi kawasan; - pengembangan kemitraan usaha dan rantai pasok; dan penyediaan pendidikan dan pelatihan SDM
2	**Kawasan Smelter Terintegrasi Tambang Sorowako • A10: Kabupaten Luwu Timur**			Pengembangan kawasan dan hilirisasi nikel di Smelter Terintegrasi Tambang Sorowako, melalui: - tata kelola industri nikel serta ketersediaan bahan baku dan energi, dengan output rekomendasi keprospekan sumber daya mineral, kebijakan rencana produksi dan pemanfaatan mineral logam dan batubara untuk kebutuhan dalam negeri, dan tingkat implementasi P3DN dan Peningkatan TKDN pada subsektor pertambangan mineral, serta hasil monitoring pembangunan fasilitas pengolahan pemurnian mineral dalam negeri. - Dekarbonisasi industri dan ekonomi sirkuler di industri nikel yang sejalan dengan dokumen Peta Jalan Dekarbonisasi Industri Nikel Nasional untuk mewujudkan komitmen Net Zero Emissions (NZE) nasional, dengan output : penurunan emisi gas rumah kaca, pengkajian kebutuhan standar industri hijau, penerapan transisi energi dan Nilai Ekonomi Karbon (NEK), pemanfaatan teknologi dan pendampingan pencegahan pencemaran industri, dan sertifikasi industri hijau, dan fasilitasi industri pengolahan sisa hasil produksi dan kebijakan penguatan industri logam berbasis nikel.

No	Kawasan Pembangunan Kewilayahan			
	Kawasan Pembangunan Dalam RPJMN	**Program Prioritas Provinsi**	**Program Prioritas Pembangunan Daerah**	**Hightlight Indikasi Intervensi Berdasarkan Prioritas Pembangunan dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029**
				- Hilirisasi industri berbasis mineral penting, terutama nikel, dengan output : hasil monitoring pembangunan fasilitas pengolahan pemurnian mineral dalam negeri, industri smelter/pemurnian/pengolahan nikel hidrometalurgi termonitor dan terevaluasi, fasilitasi industri pengolahansisa hasil produksi smelter nikel -
3	**Kawasan Lumbung Pangan Teluk Bone dan sekitarnya** **• C1: Kabupaten Luwu Timur**		4) Pertanian Maju dan Kemandirian Pangan	Penguatan swasembada pangan serta pengembangan ekonomi biru di Kawasan Teluk Bone dan sekitarnya, melalui: - Ekstensifikasi dan intensifikasi lahan pertanian, modernisasi, hilirisasi, peningkatan ekspor komoditas pertanian dan pengembangan sumber daya manuasi, pemanfaatan pupuk organik untuk pertanian, serta peningkatan sarana prasarana, dengan output : pengembangan lahan pertanian produktif, alat dan mesin pertanian, pengembangan jaringan irigasi, pembangunan irigasi perpipaan, embung pertanian, irigasi perpompaan, konservasi air, alat dan mesin pertanian pra panen, jaringan irigasi pertanian yang direhabilitasi, pemenuhan bibit dan pupuk, penerapan pertanian berteknologi tinggi, meningkatnya kapasitas sumber daya manusia dalam bidang pertanian, berkembangnya kelompok tani terlatih, kemudahan akses pembiayaan, sertifikat benih padi, meningkatnya produksi, promosi dan kerja sama di bidang pertanian - Peningkatan kualitas dan kuantitaa hasil peternakan serta pengendalian dan penanggulangan penyakit ternak, dengan output : bantuan pakan, bibit dar benih ternak unggul, ternak ruminansia potong dan perah, alat dan mesin sub sektor peternakan, pembinaan dan pengawasan mutu, sarana prasarana kesehatan hewan, dan layanan optimalisasi reproduksi. - Pengembangan praktik pertanian berkelanjutan, dengan output : rekomendasi perlindungan Iahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan pengendalian alih fungsi lahan pertanian

No	Kawasan Pembangunan Kewilayahan			
	Kawasan Pembangunan Dalam RPJMN	**Program Prioritas Provinsi**	**Program Prioritas Pembangunan Daerah**	**Hightlight Indikasi Intervensi Berdasarkan Prioritas Pembangunan dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029**
				- Pengembangan input produksi, sarana prasarana, kawasan berbasis unggulan, penguatan dan tata kelola perikanan budidaya, dengan output : produksi calon induk ikan air payau, ikan air laut, dan udang, produksi pakan ikan untuk operasional UPT, produksi Sampel monitoring penyakit ikan yang diuji, jumlah benih ikan payau, ikan air laut dan udang, penyaluran calon induk ikan payau, ikan air laut, dan udang yarg disalurkan ke masyarakat, jumlah benih ikan payau, ikan air laut, dan udang ke masyarakat, dan pengujian sampel surveillance resistensi Antimikroba (AMU/AMR) ikan air payau, ikan air laut, dan udang.
4	**Kawasan Transmigrasi (KT) • D2: KT Mahalona, Kawasan Luwu Timur**	5. Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi asyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka engangguran, dan pemberantasan kemiskinan	8) Infrastruktut yang merata dan berkualitas	Pengembangan Kawasan Transmigrasi Mahalona di Kab. Luwu Timur, melalui; Pembangunan infrastruktur permukiman dan aksesibititas logistik, dengan output pembangunan dan pengembangan jalan non-status, jembatan, sistem drainase, dan sarana permukiman - Pengembangan ekonomi kawasan transmigrasi, dengan output bantuan sarana produksi pertanian - Redistribusi aset (tanah) transmigrasi, dengan output, fasilitasi pengurusan sertifikat hak milik atas tanah transmigrasi - Penataan persebaran penduduk dan penyediaan tenaga terampil, dengan output perpindahan dan penempatan transmigran
	Kawasan Afirmasi-Kawasan Teluk Bone DSK			Pemerataan kawasan di Kawasan Teluk Bone dan Sekitarnya, melalui; - Pemenuhan infrastruktur dan pelayanan dasar, dengan output terpenuhinya akses dan pelayanan terkait energi, air minum, sanitasi, persampahan dan penyediaan perumahan - Peningkatan konektivitas dan layanan transportasi, dengan output jalan, dan jembatan koridor logistik, pembangunan dan peningkatan jalan, peningkatan fasilitas Pelabuhan Lampia. - Diversifikasi energi, peningkatan kapasitas pembangkit listrik terbarukan, dan perluasan pemanfaatan biofuel , dengan output pengembangan bioetanol, PLTMH,

No	Kawasan Pembangunan Kewilayahan			
	Kawasan Pembangunan Dalam RPJMN	**Program Prioritas Provinsi**	**Program Prioritas Pembangunan Daerah**	**Hightlight Indikasi Intervensi Berdasarkan Prioritas Pembangunan dan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Nasional Tahun 2025-2029**
				PLTS, PLTM, volume biofuel untuk domestik, sertifikasi kompetensi tenaga listrik sektor ketenagalistrikan dan EBTKE - Penguatan Konektivitas Udara, Iaut, Jalan, dan darat, melalui Pengembangan jaringan bandara terpadu, dengan output bandar udara, bandar udara perairan, angkutan udara perintis penumpang, termasuk di Sorowako.

3.3.2.2 Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan terhadap Kabupaten Luwu Timur

Dalam pembangunan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Luwu Timur termasuk dalam Kawasan pembangunan Palopo diarahkan menjadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Biru di Kawasan Teluk Bone dan Industri Berbasis Riset dan Teknologi serta Pusat Pariwisata Budaya, untuk itu sasaran pembangunan wilayah Kawasan Palopo Tahun 2025-2029 sebagai berikut.

Tabel 3. 13 Sasaran Pembangunan Kabupaten/Kota di Kawasan Palopo Tahun 2025-2029 dan Tahun 2030

Kabupaten/Kota	Tahun	Palopo	Luwu	Luwu Utara	Luwu Timur	Tana Toraja	Toraja Utara
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	2025	4,59	5,23	4,48	3,57	5,39	4,67
	2029	6,99	6,93	6,88	6,27	7,79	7,07
	2030	7,29	7,23	7,18	6,27	8,09	7,37
PDRB per kapita (Rp. Juta)	2025	59,25	62,44	60,92	100,65	36,61	49,96
	2029	75,61	79,52	77,44	123,59	48,14	63,95
	2030	81,11	85,72	83,01	131,34	52,03	68,66
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2025	7,55	4,05	2,30	4,49	3,89	2,44
	2029	7,19	3,69	1,94	4,13	3,53	1,99
	2030	7,09	3,59	1,84	4,03	3,43	1,89
Tingkat Kemiskinan (%)	2025	7,17-6,58	11,16–10,57	10,50–9,91	6,47-5,88	9,44-8,85	10,32-9,73
	2029	6,20-5,20	9,41-8,41	8,48-7,47	5,56-4,56	8,67-7,67	7,57-6,57
	2030	5,93-5,13	8,91–8,30	7,97–7,36	5,29-4,49	8,46-7,85	6,66-6,05
Rasio Gini	2025	0,327	0,313	0,266	0,344	0,314	0,310
	2029	0,302	0,288	0,241	0,319	0,289	0,285
	2030	0,295	0,281	0,234	0,312	0,282	0,278
Indeks Pembangunan Manusia	2025	81,50	74,28	74,44	76,72	72,37	72,73
	2029	82,73	76,14	76,44	78,04	74,53	74,79
	2030	83,04	76,54	76,90	78,38	75,09	75,27
Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	2025	18,76	20,77	10,15	2,11	39,28	29,72
	2029	28,51	31,07	24,13	4,17	51,20	41,99
	2030	31,24	33,87	27,60	4,88	53,86	44,71

Sumber: Bappelitbangda Prov. Sulawesi Selatan, diolah Tahun 2025

Dalam kurun waktu 5 tahun ke depan pengembangan Kawasan Palopo akan difokuskan pada penguatan ekosistem percepatan pembangunan daerah. Adapun kebijakan pembangunan provinsi di wilayah kabupaten Luwu Timur akan difokuskan melalui:

Pertama, peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi melalui pendidikan inklusif dalam rangka peningkatan layanan dasar dan modal manusia yang diprioritaskan pada pengembangan sarana dan prasarana bidang pendidikan, percepatan wajib belajar 13 tahun, perluasan akses pendidikan sektor strategis, pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul, penguatan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, dan revitalisasi sarana dan prasarana sekolah. Selain itu juga akan dilakukan penguatan pelayanan, sumber

daya manusia, dan tata kelola kesehatan, perluasan akses dan layanan kesehatan berkualitas dan terjangkau melalui pengembangan unit pelayanan kesehatan berbasis digital dan pelayanan kesehatan bergerak di daerah sulit akses, , peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, pengendalian penyakit tidak menular dan peningatan upaya kesehatan jiwa, pembudayaan hidup sehat dan pengendalian factor risiko penyakit tidak menular serta pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung pola hidup sehat dan aktivitas fisik, penyehatan lingkungan, penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular termasuk penuntasan TBC, pengendalian penyakit HIV/AIDS dan malaria, penguatan upaya eliminasi penyakit tropis terabaikan, serta pencegahan dan penurunan stunting dan kematian ibu dan anak, utamanya pada kabupaten/kota yang angka prevalensi stuntingnya di atas rata-rata provinsi Sulawesi Selatan.

Kedua, peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan kearifan local social kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal melalui penguatan kerukunan umat beragama, peningkatan ketangguhan keluarga, peningkatan kualitas perlindungan anak, peningkatan kualitas pemuda yang diarahkan pada pengembangan kapasitas pemuda yang kreatif dan inovatif, peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan dari kekerasan, peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia, peningkatan pembinaan prestasi olahraga yang diarahkan pada pelatihan, pembinaan, serta pemberian penghargaan kepada atlet dan pengembangan prasarana olahraga, pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta penguatan karakter bangsa yang diarahkan pada penguatan ekosistem budaya berbasis rural heritage, dan pemanfaatan cagar budaya yang juga terhubung dengan destinasi pariwisata pada kawasan lainnya dan dilengkapi dengan atraksi yang unik, amenitas, aksesibiltas dan *ancillary* yang baik.

Ketiga, hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan biru melalui swasembada pangan berupa peningkatan produktivitas pertanian pada komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta peternakan, pada beberapa komoditas unggulan yang diprioritaskan berdasarkan potensi komoditas, luas area dan produksi, melalui pengembangan kawasan lumbung pangan Teluk Bone dan Sekitarnya, pengembangan kawasan komoditas unggulan berupa kawasan perkebunan kakao, pengembangan pangan hewani serta pengembangan pangan local dan nabati. Pengembangan ekonomi biru sebagai sumber pertumbuhan baru yang diprioritaskan pada pengembangan pangan akuatik (*blue food*) khususnya pengembangan produktivitas perikanan yang diarahkan pada pengembangan komoditas perikanan tangkap dan perikanan budidaya berupa budidaya air tawar, dan budidaya rumput laut serta budidaya air payau melalui peningkatan produktivitas perikanan yang terintegrasi, modern dan berkelanjutan. Selain itu pengembangan kabupaten Luwu Timur, juga diprioritaskan dukungan terhadap pengembangan Kawasan Sorowako sebagai Kawasan Strategis Nasional diarahkan pada dukungan pengembangan kawasan smelter terintegrasi tambang Sorowako melalui pengembangan kawasan dan hilirisasi nikel di smelter terintegrasi tambang

Sorowako di kabupaten Luwu Timur, termasuk pengembangan kawasan Industri Indonesia Huali Industry Park (IHIP), berupa tata kelola industry nikel serta ketersediaan bahan baku dan energi, dekarbonisasi industry dan ekonomi sirkuler di industry nikel yang sejalan dengan peta jalan, dan hilirisasi industry berbasis nikel, serta terintegrasi dengan kebijakan industry hijau yang meliputi transisi energi, ekonomi sirkular dan dekarbonisasi industry dukungan program fasilitasi kemitraan usaha dan penguatan rantai pasok sektor industry prioritas melalui fasilitasi pembangunan dan pengembangan infrastruktur termasuk pendukung konektivitas kawasan industry dengan lokasi bahan baku, serta peningkatan investasi kawasan yang didukung oleh penyediaan dan peningkatan tenaga kerja serta terintegrasi dengan kebijakan industry hijau yang meliputi transisi energi, ekonomi sirkular dan dekarbonisasi industry. Selain itu pengembangan kawasan Palopo dan Sekitarnya juga diarahkan pada percepatan pembangunan destinasi pariwisata berupa pengembangan aksesibilitas pariwisata dan konektivitas layanan transportasi yang didukung pengembangan keterampilan SDM dan layanan pariwisata serta pengembangan industry penunjang pariwisata dan diversifikasi atraksi pariwisata diiringi dengan pengelolaan destinasi berbasis masyarakat.

Keempat, peningkatan ekonomi dan fiscal daerah yang modern dan berdaya saing melalui penguatan ekonomi syariah dan digital, penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual, serta penguatan swasembada energi yang diarahkan pada fasilitasi peningkatan cadangan dan produktivitas energi serta penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual.

Kelima, peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat perdesaan dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran dan pemberantasan kemiskinan melalui penguatan sistem pendataan social ekonomi terintegrasi yang diarahkan pada dukungan perwujudan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), perlindungan social yang adaptif dan inklusif yang diarahkan pada reformasi dan integrasi bantuan social, jaminan social, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yang adaptif, peningkatan akses lapangan kerja dan penumbuhan usaha berkelanjutan dan inovatif yang diarahkan pada dukungan penataan aset pertanahan melalui fasilitasi pelaksanaan reforma agraria, peningkatan kemandirian perdesaan yang berkelanjutan yang diarahkan pada pengembangan kawasan afirmasi yaitu kawasan transmigrasi Mahalona melalui pembangunan infrastruktur permukiman dan aksesibilitas logistik, dan pemerataan pembangunan kawasan melalui pemenuhan infrastruktur dan pelayanan dasar, dukungan dan fasilitasi peningkatan konektivitas dan layanan transportasi, serta diversifikasi energi dan peningkatan kapasitas pembangkit listrik terbarukan, pengembangan dan diversifikasi ekonomi local, serta pengembangan kawasan unggulan berbasis potensi local sebagai bagian dari kawasan Teluk Bone dan Sekitarnya. Selain itu peningkatan kemandirian perdesaan juga diarahkan pada pembangunan perkotaan non wilayah Metropolitan di kabupaten Luwu Timur melalui pembangunan kawasan perkotaan kecil dan pengembangan kawasan permukiman pendukung Kawasan Smelter Terintegrasi Tambang Sorowako di Kabupaten Luwu Timur.

Keenam, transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif dan melayani berbasis digital melalui penataan keuangan dan asset daerah untuk mewujudkan *good governance* dan kemandirian fiscal berbasis digital; peningkatan kapasitas dan tata kelola perkotaan melalui perwujudan pemerintahan berbasis digitalisasi yang transparan, inklusif dan efisien, transformasi tata kelola pelayanan public, penerapan prinsip meritokrasi dan reformasi manajemen aparatur sipil negara, peningkatan kualitas tata kelola pemerintah daerah, peningkatan produktivitas, daya saing dan efisiensi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), optimalisasi pendapatan dan belanja daerah, pengendalian inflasi serta perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan pembangunan. Selain itu pengembangan kabupaten Luwu Timur juga diarahkan pada pengembangan *smart city*; dan penguatan kerjasama antar daerah untuk mendorong perdagangan domestic dan antar daerah serta penguatan Kerjasama multi pihak dalam pembiayaan dan pembangunan wilayah serta pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;

Ketujuh, peningkatan layanan transportasi dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan diarahkan melalui penyediaan perumahan dan permukiman serta pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan layanan perkotaan untuk mewujudkan perkotaan yang layak huni, inklusif dan berbudaya berupa penyediaan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman, penanganan permukiman kumuh, peningkatan rumah tangga yang terlayani akses air minum layak dan/atau aman, penyediaan dan pengawasan sanitasi aman, berkelanjutan dan berketahanan iklim, penanganan sampah sistem regional dan terpadu yang optimal dari hulu hingga hilir dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan berbasis 3R, dukungan fasilitasi peningkatan konektivitas ketenagalistrikan, digital dan transisi energi listrik yang diarahkan pada dukungan dan fasilitasi pembangunan jaringan infrastruktur jaringan ketenagalistrikan dan pembangkit listrik, penguatan konektivitas dan pengembangan transportasi yang berkelanjutan yang terintegrasi berupa dukungan pengembangan bandar udara, pengembangan angkutan umum perkotaan dan perdesaan, pembangunan dan pengembangan pelabuhan pengumpan regional, pembangunan, peningkatan dan preservasi jalan kewenangan provinsi serta peningkatan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

Kedelapan, peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi melalui pengelolaan risiko bencana berbasis penataan ruang yang diarahkan pada peningkatan ketahanan dan penanganan bencana melalui pengendalian risiko bencana berbasis pemberdayaan masyarakat, penurunan tingkat kerentanan bencana, peningkatan kapasitas dan kompetensi sumberdaya manusia bidang penanggulan bencana, peningkatan layanan peringatan dini, peningkatan ketahanan dan penanganan bencana serta pembangunan infrastruktur berketahanan bencana, penguatan kapasitas pencegahan, penanggulangan dan mitigasi bencana berupa pengendalian daya rusak air dan peningkatan manajemen risiko dan pengendalian banjir dan pengelolaan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir dan pulau pulau kecil. Selain itu juga diarahkan pada pembangunan berketahanan iklim, pengelolaan keanekaragaman hayati, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan tata ruang yang diarahkan pada peningkatan pengelolaan kualitas air, udara air laut, dan lahan, pengelolaan limbah

bahan berbahaya dan beracun (B3), penguatan kelembagaan, pengendalian, penerbitan dan penegakan hukum lingkungan hidup serta kehutanan, penguatan instrument pencegahan dampak lingkungan hidup, penguatan implementasi pembangunan rendah karbon yang diarahkan pada penguatan aksi penurunan emisi gas rumah kaca disetiap sektor dan penguatan tata kelola dan factor pendukung pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca, serta penguatan pengendalian rencana tata ruang wilayah dengan mempertimbangkan risiko bencana khususnya bencana hidrometeorologi serta penuntasan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten/kota yang didukung dengan penguatan pengendalian dan penegakan hukum implementasi tata ruang daerah.

Selain hal tersebut diatas secara umum Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sulawesi Selatan sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022, mengamanahkan arah Pengembangan wilayah di Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut :

1) Kawasan Pertanian meliputi pengembangan Kawasan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Pemerintah telah menetapkan kabupaten Luwu Timur sebagai salah satu lokasi pengembangan Kawasan pertanian nasional untuk pengembangan komoditas tanaman pangan di Sulawesi Selatan yaitu lokasi pengembangan komoditas tanaman padi, pengembangan komoditas jagung serta Pengembangan komoditas perkebunan kakao dan lada.
2) Pengembangan kawasan perikanan tangkap di Sulawesi Selatan dilakukan di perairan laut sampai dengan 12 (dua belas) mil dari garis pantai.
3) Pengembangan kawasan perikanan budidaya meliputi kawasan peruntukan budidaya laut
4) Pengembangan kawasan industri prioritas nasional yaitu Kawasan Industri Hualy Luwu Timur

3.3.2.3 Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah Kabupaten Luwu Timur

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Luwu Timur sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025, Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Luwu Timur diarahkan pada perwujudan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur yang berkeadilan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan industri dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan serta berbasis mitigasi. Arah Pengembangan wilayah kabupaten Luwu Timur sebagai berikut :

Kebijakan umum dalam Rencana Tata Ruang Kabupaten Luwu Timur antara lain :

a. pengembangan pusat-pusat permukiman dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi Wilayah;
b. peningkatan kualitas dan pelayanan jaringan prasarana wilayah secara terpadu dan merata di seluruh wilayah kabupaten;
c. pelestarian lingkungan melalui pemantapan kawasan lindung sebagai pengendali terhadap kelestarian ekosistem;

d. pengembangan kawasan budidaya secara optimal sesuai dengan kemampuan daya dukung lingkungan;
e. pengembangan potensi kawasan pesisir melalui pendekatan keberagaman sosial dan budaya yang bernilai ekologis, dan ekonomis; dan
f. pengembangan kawasan Industri dan sentra agroindustri berdasarkan potensi komoditi unggulan dan karakteristik wilayah.

Sebagai upaya mewujudkan kabupaten Luwu Timur Maju dan Sejahtera maka dalam kurun waktu 5 tahun ke depan arah kebijakan pembangunan kewilayahan di kecamatan akan dilaksanakan berdasarkan prioritas pembangunan daerah yang dijabarkan sebagai berikut:

Pertama Penguatan Pendidikan berkualitas dan inklusif melalui peningkatan pemerataan akses dan mutu pendidikan, pengembangan pendidikan vokasi terintegrasi dengan kebutuhan pasar kerja, pemanfaatan teknologi informasi dan digital dalam proses pembelajaran, pemenuhan gizi dan kesehatan siswa, dan peningkatan kompetensi literasi dan numerasi, pengembangan budaya baca masyarakat sejak dini, serta dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Pembangunan Sekolah Rakyat. Penyelenggaraan sekolah gratis berbasis Kartu Pintar, penguatan system transportasi pendidikan melalui penyediaan bus sekolah untuk daerah dengan hambatan transportasi, dan bantuan khusus SMA (hibah) untuk menjamin keberlangsungan sekolah. Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, termasuk peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan, serta pelatihan dan sertifikasi guru untuk penguatan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Mendorong perluasan akses pendidikan tinggi yang terjangkau, termasuk fasilitasi masuk perguruan tinggi bagi lulusan berprestasi dan program beasiswa untuk mahasiswa berprestasi dan kurang mampu. Pengembangan ekosistem pembelajaran yang inovatif dan berbasis teknologi, termasuk pembangunan dan pengelolaan taman pintar sebagai pusat literasi dan sains, serta penguatan layanan pendampingan akademik dan non-akademik bagi siswa melalui mentoring siswa untuk meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik.

Kedua, Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan untuk semua diarahkan pada penguatan pelayanan, sumber daya manusia, dan tata kelola kesehatan, melalui peningkatkan akses layanan kesehatan untuk semua, peningkatan dan perluasan kerjasama multipihak di bidang kesehatan, peningkatan penyediaan dan mutu fasilitas kesehatan primer dan rujukan, perkuatan SDM kesehatan dan optimalisasi pelaksanaan program promotive, preventif dan perluasan jaminan kesehatan berbasis NIK/KTP, Penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular, eliminasi penyakit tropis terabaikan, serta pencegahan dan penurunan stunting dan kematian ibu dan anak, serta dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya program Makan Bergizi Gratis. Pada program prioritas Kesehatan untuk semua, beberapa kegiatan pendukungnya yang terkait dengan keruangan wilayah antara lain: Pembangunan Puskesmas Plus di daerah terpencil dan Pembangunan/Optimalisasi Rumah sakit Malili dan Towuti

Ketiga, Menjamin Stabilitas Sosial, Politik dan Keamanan yang kondusif, melalui pemantapan koordinasi tim terpadu dan pengawasan ormas untuk menjaga stabilitas politik,kemanan dan ketertiban umum, pemantapan peran tokoh stakeholder di desa-desa melalui dialog intraktif, penciptaan kondisi aman di tingkat desa-desa dan fasilitasi rehabilitasi narkoba dan penurunan tingkat penyakit masyarakat.

Keempat, untuk mewujudkan Pertanian Maju dan Kemandirian Pangan serta hilirisasi sumber daya alam difokuskan pada penguatan komoditas pertanian dan perikanan yang unggul dan produktif melalui pengembangan kawasan pertanian untuk mendukung program nasional swasembada pangan yang didukung pemberdayaan petani, peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, penyediaan dan pemberian sarana produksi dan peralatan mesin pertanian pendukung peningkatan produksi pertanian, fasilitasi pelatihan pertanian serta pemberian sarana pasca panen, pengawasan kualitas mutu dan keamanan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, penguatan logistik, dan pemasaran produk pertanian melalui pembangunan dan pengembangan pasar agro, dan standarisasi mutu, serta dukungan dan fasilitasi terhadap Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati, melalui peningkatan produktifitas lahan pertanian, peningkatan produktifitas komoditas tanaman pangan, peningkatan pemanfaatan hutan dalam mendukung ketahanan pangan, pemberian subsidi pupuk, akses benih/pestisida dan BBM, serta alat dan mesin pertanian, modernisasi dan digitalisasi data pangan; serta pelatihan dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam kelompok usaha pertanian dan wanatani. Sedangkan untuk pengembangan kawasan perikanan melalui fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pembudidaya rumput laut, pengelolaan sarana prasarana produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya, penguatan logistik, pemasaran dan sistem rantai dingin produk perikanan, peningkatan daya saing sumber daya manusia pembudidaya dan penyedia jasa logistik, kelembagaan, usaha kelautan dan perikanan, fasilitasi kerja sama perluasan pasar, pengembangan koperasi, dan rantai pasok ekspor produk perikanan serta dukungan dan fasilitasi terhadap pengembangan pangann akuatik (blue food) melalui peningkatan sarana dan prasarana penangkapan ikan, penguatan kapasitas SDM, serta penguatan tata kelola dan kapasitas kelembagaan nelayan. Sedangkan hilirisasi sumber daya alam difokuskan pada dukungan kebijakan pembangunan nasional yaitu Kawasan Pertumbuhan-Kawasan Smelter Terintegrasi Tambang Sorowako melalui dukungan dan fasilitasi: pembangunan dan pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan; pengembangan sarana prasarana pendukung (perumahan, kesehatan, air bersih serta pengolahan persampahandan limbah); peningkatan investasi kawasan; pengembangan kemitraan usaha dan rantai pasok; dan penyediaan pendidikan dan pelatihan SDM dan Kawasan Industri Indonesia Huali Industry Park **melalui** Pengembangan kawasan dan hilirisasi nikel di Smelter Terintegrasi Tambang Sorowako, melalui dukungan dan fasilitasi tata kelola industri nikel serta ketersediaan bahan baku dan energi, Dekarbonisasi industri dan ekonomi sirkuler di industri nikel yang sejalan dengan dokumen Peta Jalan Dekarbonisasi Industri Nikel Nasional untuk mewujudkan komitmen *Net Zero Emissions (NZE)* nasional; dan Hilirisasi industri berbasis mineral penting, terutama nikel. Kegiatan prioritas yang terkait dengan keruangan wilayah antara lain : Membangun dan merevitalisasi jaringan irigasi dan logistic untuk menaikkan

produktivitas dan biaya produksi, Pembangunan baruga -baruga tani di desa, Pembangunan Kawasan unggul dan Pembangunan pasar agro.

Kelima, UMKM Maju dan Ketenagakerjaan yang Unggul difokuskan pada peningkatan peran UMKM dan ekonomi kreatif, peningkatan daya saing tenaga kerja, penyelengaraan sertifikasi profesi dan perkembangan start-up UMKM, modernisasi koperasi berbasis digital, peningkatan jaringan pasar yang didukung oleh iklim investasi dan persaingan usaha yang baik serta dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. kegiatan prioritas yang terkait dengan keruangan daerah antara lain : Pembangunan Lutim Mart untuk menghimpun produk-produk UMKM dan Pembangunan Balai Latihan Kerja. Penyediaan sarana dan prasarana perdagangan tersebut tersebar pada semua kecamatan sehingga jika merujuk pada hal tersebut, kehadiran Lutim Mart dapat ditempatkan di semua kecamatan.

Keenam, perwujudan Pariwisata Maju dan Pelestarian Budaya Daerah diarahkan pada pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan melalui, pengembangan aksesibilitas pariwisata dan konektivitas layanan transportasi, pengembangan keterampilan SDM dan layanan pariwisata, pengembangan industry penunjang pariwisata dan diversifikasi atraksi pariwisata, pemanfaatan kawasan suaka alam sebagai objek wisata, dan pengelolaan destinasi berbasis masyarakat dengan pemberdayaan komunitas adat dan pengembangan desa wisata, penyelenggaraan festival tahunan, serta promosi terpadu antara pelaku usaha, industry pariwisata, perdagangan, investasi dan kebudayaan. Sedangkan Penguatan ekosistem budaya berbasis rural heritage melalui dukungan dan fasilitasi melalui pengelolaan terpadu festival seni budaya daerah berkelas internasional **,** peningkatan tata kelola pembangunan kebudayaan**,** pelestarian nilai budaya, tradisi, dan kearifan local**,** dan pemanfaatan kawasan cagar budaya sebagai objek wisata**.** kegiatan prioritas yang terkait dengan keruangan antara lain : Pemetaan dan pengembangan wisata desa dan kampung tematik, Pembangunan fasilitas publik, pengembangan jalan sarana UMKM di Lokasi pariwisata, Pembangunan sentra pemasaran dan promosi kerajinan rakyat, dan Pembangunan Matano Geopark. Dalam dokumen RTRW, perwujudan ruang Kawasan pariwisata diarahkan untuk : Peningkatan kegiatan kepariwisataan pada kawasan peruntukan Pariwisata berupa pemeliharaan, peningkatan kapasitas, peningkatan layanan. Penyusunan/Revisi dan legislasi Rencana Induk pariwisata Daerah (RIPARDA), Penataan kawasan pariwisata, penyiapan dan pengembangan sarana dan prasarana penunjang wisata, Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata (kawasan, obyek, atraksi wisata) , Intensifikasi dan Optimalisasi pemanfaatan ruang kawasan peruntukan pariwisata (pengisian ruang, pengaturan intensitas pemanfaatan ruang dan pemantauan KKPR) , Peningkatan tata kelola destinasi pariwisata dan pemberdayaan masyarakat. Promosi event wisata. Sementara untuk Pembangunan Geopark diarahkan sebagai berikut : Studi dan kajian pengembangan kawasan Geopark Matano dan Sistem Danau Malili dan Rehabilitasi dan reservasi/konservasi kawasan Geopark Matano dan Sistem Danau Malili.

Ketujuh, Pengembangan Daya Saing Kepemudaan dan Olahraga melalui peningkatan pembinaan prestasi olahraga yang diarahkan pada pelatihan, pembinaan, serta pemberian penghargaan kepada atlet dan pengembangan dan revitalisasi prasarana olahraga, penyelenggaraan kejuaran antar desa pada berbagai cabang olahraga, pembangunan sarana dan prasarana kepemudaan serta penyelenggaraan event bagi entrepreneur muda secara berkala. Selain itu juga dilakukan Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kualitas ketenagakerjaan untuk mendorong perkotaan yang maju dan menyejahterakan melalui Penguatan ekosistem pemangku ekonomi kreatif, Penguatan ekosistem film, animasi, video, dan music, Penguatan ekosistem fesyen dan kriya, penguatan ekosistem aplikasi dan gim; dan Penguatan ekosisitem kuliner. program rencana aksi kepemudaan yang terkait dengan kebutuhan ruang dan kebijakan tata ruang antara lain : Pembangunan wahana olahraga dan pembinaan kegiatan kepemudaan, Pembangunan Gedung kreatifitas pemuda atau creatuf centre dan pembangunan sirkuit balap motor standar internasional

Kedelapan, Infrastruktur Merata dan Berkualitas, diarahkan pada penguatan konektivitas dan pengembangan transportasi perkotaan yang berkelanjutan yang terintegrasi dengan TOD melalui: fasilitasi pengembangan pelabuhan pengumpul dan pengembangan pelabuhan pengumpan regional termasuk pengembangan dermaga pendukung bandar udara perairan (*seaplane*) yang terintegrasi dengan simpul transportasi, fasilitasi pengembangan jaringan bandara terpadu, peningkatan dan preservasi jalan daerah, pemenuhan fasilitas keselamatan jalan provinsi dan peningkatan keselamatan angkutan darat, dan dukungan dan fasilitasi penyusunan masterplan pengembangan dan penataan kawasan. Selain itu diarahkan pula pada Penyediaan perumahan dan permukiman serta pemenuhan pelayanan dasar melalui dukungan dan fasilitasi: penyediaan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman; penanganan permukiman kumuh; peningkatan rumah tangga yang terlayani akses air minum dan sanitasi aman melalui pembangunan dan pengembangan SPAM yang terintegrasi dengan pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan sanitasi berupa pengembangan SPAM dan SPALD terpusat skala kabupaten, pemenuhan kebutuhan air baku, pembinaan dan pengawasan pengembangan air minum dan sanitasi, pengembangan kawasan permukiman pendukung kawasan Smelter Terintegrasi Tambang Sorowako, pemberian bantuan PSU, penanganan sampah yang optimal dari hulu hingga hilir dengan melibatkan partisipasi masyarakat berbasis 3 R, fasilitasi pembangunan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik berbasis energi baru terbarukan serta jaringan transmisi dan jaringan distribusi tenaga listrik, serta fasilitasi pemerataan jangkauan dan kualitas infrastruktur digital dan peningkatan literasi digital dan keterampilan SDM. Selain itu sebagai dukungan terhadap kebijakan nasional yang menetapkan lokasi prioritas sebagai klaster pemerataan dilakukan Dukungan dan fasilitasi terhadap Pengembangan Kawasan Transmigrasi Mahalona di Kab. Luwu Timur, melalui pembangunan infrastruktur permukiman dan aksesibilitas logistik, pengembangan ekonomi kawasan transmigrasi, redistribusi aset (tanah) transmigrasi, serta penataan persebaran penduduk dan penyediaan tenaga terampil dan dukungan dan fasilitasi terhadap pemerataan kawasan di Kawasan Teluk Bone dan Sekitarnya, melalui pemenuhan infrastruktur dan pelayanan dasar; peningkatan

konektivitas dan layanan transportasi terutama peningkatan fasilitas pelabuhan Lampia; serta diversifikasi energi dan peningkatan kapasitas pembangkit listrik terbarukan. Program prioritas strategi pemerataan Pembangunan, beberapa kegiatan prioritas memerlukan kebutuhan ruang antara lain : Konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar, ketersediaan infrastruktur air bersih bagi Masyarakat,Fasilitasi Pembangunan pabrik / indsutri smelter, juga termasuk dalam indikasi program utama RTRW yakni pada program penyediaan sarana, dan prasarana serta utilitas umum (PSU) yang mendukung permukiman Fasilitasi pengembangan bandar udara dan Pelabuhan, Fasilitasi Pembangunan terminal, pembangunan pabrik komodiri unggulan, pembangunan Kawasan industry Malili, pengembangan pasar ikan, terbangunnya jaringan komunikasi di seluruh desa, dan pembangunan Kawasan ekonomi baru di Tarengge. Terkait perwujudan infrastruktur Bandara udara : Peningkatan bandar udara pengumpan Sorowako di Kecamatan Nuha berupa pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan kualitas, peningkatan kapasitas serta peningkatan layanan. Perwujudan dan pengembangan bandar Udara pengumpan Luwu Timur di Kecamatan Angkona berupa studi dan perencanaan teknis, dokumen pendukung lainnya, serta penyiapan lahan. Terkait Infrsatruktur Kepelabuhanan : Peningkatan pelabuhan pengumpan regional di Kecamatan malili dan pelabuhan pengumpan lokal di Kecamatan Wotu yaitu pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan kualitas, peningkatan kapasitas, serta peningkatan layanan. Pengembangan pelabuhan pengumpan regional dan pelabuhan pengumpan lokal yaitu Studi dan perencanaan teknis, dokumen pendukung lainnya serta penyiapan lahan.

Kesembilan, Pengelolaan SDA, Lingkungan Hidup, dan Mitigasi Bencana yang terintegrasi dan berkelanjutan yang diarahkan pada Peningkatan ketahanan dan penanganan bencana serta penguatan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan, melalui dukungan dan fasilitasi, pengendalian risiko bencana dan pemberdayaan masyarakat, peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan wisata kawasan konservasi perairan, pengendalian daya rusak air dan peningkatan manajemen risiko serta pengendalian banjir; dan peningkatan infrastruktur berketahanan bencana dan layanan peringatan dini bencana. Sedangkan pembangunan berketahanan iklim, pengelolaan keanekaragaman hayati, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan tata ruang diarahkan pada peningkatan pengelolaan kualitas air, udara air laut, dan lahan, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), penguatan kelembagaan, pengendalian, penerbitan dan penegakan hukum lingkungan hidup serta kehutanan, penguatan instrument pencegahan dampak lingkungan hidup, penguatan implementasi pembangunan rendah karbon yang diarahkan pada penguatan aksi penurunan emisi gas rumah kaca disetiap sektor dan penguatan tata kelola dan factor pendukung pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca, serta penguatan pengendalian rencana tata ruang wilayah dengan mempertimbangkan risiko bencana khususnya bencana hidrometeorologi serta penuntasan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang didukung dengan penguatan pengendalian dan penegakan hukum implementasi tata ruang daerah. Pada Program peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup terintegrasi yang memerlukan kebutuhan ruang dan kebijakan tata ruang antara lain : Pabrik ramah lingkungan, produk ramah lingkungan dan industry

ramah lingkungan, dan Membangun pusat-pusat krisis dan kebencanaan pada Lokasi rawan bencana, dan pengelolaan sampah secara terpadu serta Pengelolaan hutan berkelanjutan berbasis Masyarakat dan perlindungan kompleks danau Malili.

Kesepuluh, Perlindungan Sosial yang Adaptif, diarahkan pada Perwujudan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) serta reformasi dan integrasi bantuan sosial, jaminan sosial, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yang adaptif melalui pengembangan tata kelola registrasi Regrosek, dukungan penguatan JKN dan penyaluran bantuan sosial adaptif dan subsidi tepat sasaran pemberian Kartu LANSIA, pemberian Bantuan Uang Duka Bagi Warga Tidak Mampu, Perluasan Layanan BPJS Ketenagakerjaan, Peningkatan kualitas pelayanan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, dan dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih serta dukungan program 3 juta rumah.

Kesebelas Tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien dan bersih yang diarahkan pada fasilitasi dan pembinaan kerja sama antar daerah untuk mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan serta penguatan kerja sama multipihak dalam pembiayaan dan pembangunan perkotaan, penguatan tata kelola dan teknologi pemerintah digital, pengembangan kompetensi dan budaya digital aparatur sipil negara, transformasi digital layanan publik prioritas; Peningkatan dan optimalisasi pemanfaatan serta pengamanan barang/asset milik daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah serta penguatan ketersediaan dan pemanfaatan data pemerintah. Sedangkan peningkatan tata kelola pelayanan publik yang efektif dan akuntabel melalui peningkatan kualitas dan tata kelola pelayanan public, dan penguatan manajemen kinerja pembangunan, serta sinergi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan.

Adapun Pengembangan wilayah Kabupaten Luwu Timur yang mengacu pada Rencana Pembanguna Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Luwu Timur tahun 2025-2045, RPJMN dan Perda No.1 RTRW Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3. 14 Lokasi Indikasi Highlight Intervensi berdasarkan kecamatan, mengacu pada Struktur dan Pola Ruang pada RTRW Kabupaten Luwu Timur

HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI KECAMATAN BERDASARKAN ARAHAN RTRWK
Highlight Intervensi RPJMN	
Penguatan pelayanan, sumber daya manusia, dan tata kelola kesehatan	Semua kecamatam
Penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular, eliminasi penyakit tropis terabaikan, serta pencegahan dan penurunan stunting dan kematian ibu dan anak	Semua kecamatan
Pengembangan sarana dan prasarana bidang pendidikan, perluasan akses pendidikan sektor strategis, penguatan pendidkan tinggi dan pengembangan bidang STEAM serta penguatan pendidikan vokasi dan produktivitas tenaga kerja	Semua kecamatan

HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI KECAMATAN BERDASARKAN ARAHAN RTRWK
Dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Pembangunan Sekolah Rakyat	Lokasi strategis yang mengacu pada kebijakan dan/atau penetapan kepala daerah.
Dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya program Makan Bergizi Gratis	Lokasi seluruh kecamatan
Penguatan ekosistem budaya berbasis urban heritage, pemanfaatan cagar budaya dan revitalisasi budaya bahari serta pengembangan teknologi tradisional	Lokasi kawasan cagar budaya : Kecamatan Wotu, Mangkutana, Malili, Nuha dan Towuti
ARAHAN UMUM PROV SULAWESI SELATAN	
Pengembangan nilai tambah dan kompleksitas industri, termasuk hilirisasi industri berbasis sumber daya alam mineral, pertanian dan perikanan berikut pengembangan teknologi dan elisiensi rantai distribusinya	Lokasi kawasan peruntukan industri : Kecamtan Malili, Tomoni dan Angkona Lokasi Kawasam peruntukan Pertambangan dan Energi meliputi : Kawasan Pertambangan Mineral Bukan Logam di Kecamatan Kalena dan Mangkutana dan Kawasan Pertambangan Logam di Kecamatan Angkona, Malili, Mangkutana, Nuha, Towuti dan Wasuponda
Pengembangan kawasan pertanian dan perikanan	Lokasi seluruh kecamatan meliputi Kawasan Pertanian Tanaman Pangan, Hortkultura, dan Perkebunan Rakyat; Kawasan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya
ARAHAN KHUSUS LOKASI PRIORITAS	
▪ Pengembangan kawasan dan hilirisasi nikel di smelter trintegrasi tambang Sorowako, Luwu Timur; ▪ Penguatan swasembada pangan serta pengembangan ekonomi biru di Kawasan Teluk Bone dan Sekitarnya;	Lokasi yang ditetapkan sebagai berikut: ▪ KPI atau kawasan transportasi untuk industry transportasi laut; meliputi Kecamtan Wotu, Kecamatan Angkona, Kecamatan Tomoni, Kecamatan Malili, Kecamatan Nuha, dan Kecamatan Towuti. ▪ kawasan peruntukan industry untuk hilirisasi nikel; meliputi Kecamatan Malili, Kecamatan Angkona, dan Kecamatan Tomoni ▪ kawasan pertanian tanaman pangan, perkebunan, hortikultura; meliputi seluruh kecamatan; ▪ kawasan perikanan tangkap dan/atau perikanan budidaya;meliputi Kecamatan angkona, Kecamatan Burau, Kecamatan Malili, Kecamatan Mangkutana, Kecamatan Wasuponda, dan Kecamatan Wotu ▪ kawasan peternakan sesuai kebijakan/hasil penetapan kepala daerah.

HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI KECAMATAN BERDASARKAN ARAHAN RTRWK
Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan kualitas ketenagakerjaan	Lokasi seluruh kecamatan dengan potensi ruang wilayah antara lain: Pengembangan Kawasan Pariwisata meliputi Kawasan Wisata Alam (Danau) dan Wisata Pesisir Pantai (Laut/Bahari) di Kecamatan Burau, Malili, Mangkutana, Nuha, Tomoni, Towuti dan Wotu.
ARAHAN UMUM PROV SULAWESI SELATAN	
Perwujudan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) serta reformasi dan integrasi bantuan sosial, jaminan sosial, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yang adaptif	Lokasi seluruh kecamatan
ARAHAN KHUSUS LOKASI PRIORITAS	
Pengembangan kawasan transmigrasi Mahalona di kabupaten Luwu Timur	Lokasi berdasarkan penetapan kawasan oleh pemerintah daerah dan saat ini meliputi Kecamatan Towuti
Fasilitasi dan pembinaan kerja sama antar daerah untuk mendorong perdagangan domestik dan antar daerah	Lokasi seluruh kecamatan
ARAHAN UMUM PROV. SULAWESI SELATAN	
Penguatan konektivitas udara, laut, jalan dan darat;	Sistem Jaringan Transportasi Darat, Sistem Jaringan Transportasi Udara dan Sistem Jaringan Transportasi Laut. Lokasi berdasarkan sistem jaringan transportasi meliputi : Kecamatan Wotu, Kecamatan Angkona, Kecamatan Tomoni, Kecamatan Malili, Kecamatan Nuha, dan Kecamatan Towuti; Terminal yang akan dikembangkan di Kabupaten Luwu Timur: meliputi Terminal Tarengge, Terminal Malili, Terminal Tomoni, Terminal Sorowako dan Terminal Wawodula Sistem kebandaraan Provinsi Sulawesi yang tedapat di Kabupaten Luwu Timur, terdapat Bandara Udara Sorowako di Kecamatan Nuha dan rencana pengembangan Bandara Udara Luwu Timur Angkona di Kecamatan Angkona. Bandara pengumpan (*Spoke*) ini yang akan terhubung dengan bandara pengumpul (*hub*) dengan skala pelayanan primer di Makassar Berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2022-2042 Ttng RTRW Prov. Sulawesi Selatan bahwa rencana pengembangan pelabuhan khusus di Kabupaten Luwu Timur ditetapkan di Pelabuhan Terminal Khusus Luwu Timur, Pelabuhan Terminal Khusus Depo Minyak Lampia, dan Terminal Khusus Smelter Malili yang berada di Kecamatan Malili Berdasarkan Kepmen Perhubungan No. KP 432 Tahun 2017 pelabuhan

HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI KECAMATAN BERDASARKAN ARAHAN RTRWK
	pengumpan yang ada di Kabupaten Luwu Timur yaitu Pelabuhan Pengumpan Lokal Wotu yang berada di Kecamatan Wotu Berdasarkan Kepmen Perhubungan No. KP 432 Tahun 2017 pelabuhan pengumpan yang ada di Kabupaten Luwu Timur yaitu Pelabuhan Pengumpan Regional Malili yang berada di Kecamatan Malili Berdasarkan Kepmen Perhubungan No. KP 432 Tahun 2017 pelabuhan pengumpul yang ada di Kabupaten Luwu Timur yaitu Pelabuhan Pengumpul Lampia yang berada di Kecamatan Malili Jembatan tersebar di seluruh wilayah kecamatan
ARAHAN KHUSUS LOKASI PRIORITAS	
Pembangunan perkotaan Non-Wilayah Metropolitan di kabupaten Luwu Timur	Lokasi berdasarkan sistem jaringan prasarana lainnya (SPAM, SPAL, Persampahan) meliputi Kawasan Permukiman di seluruh kecamatan
Pemerataan kawasan di Kawasan Teluk Bone dan Sekitarnya	Lokasi berdasarkan sistem jaringan transportasi dan/atau Sistem jaringan prasarana lainnya meliputi Kecamatan Wotu, Kecamatan Angkona, Kecamatan Burau, Kecamatan Malili,
Peningkatan ketahanan dan penanganan bencana serta penguatan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan	Lokasi berdasarkan sistem jaringan evakuasi bencana, kawasan rawan bencana, dan/atau kawasan konservasi pesisir dan pulau pulau kecil meliputi : Kawasan rawan bencana di Kabupaten Luwu Timur meliputi: 1) kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi, 2) kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi, 3) kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi, 4) kawasan rawan bencana gempa sesar aktif tingkat tinggi, dan 5) kawasan rawan bencana gerakan tanah tingkat tinggi. Kawasan konservasi meliputi : a. Kawasan Cagar Alam (CA) Kecamatan Angkona, Kalaena, Malili, Mangkutana, Nuha, Wasuponda b. Kawasan Pelestarian Alam (KPA) meliputi Kecamatan Nuha, Towuti dan Wasuponda c. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau kecil di kecamatan Malili Kawasan perlindungan lainnya; - Kawasan Hutan Adat di kecamatan Malili - Kawasan Lindung geologi di Kecmatan wasuponda

HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI KECAMATAN BERDASARKAN ARAHAN RTRWK
	- Kawasan Ekosistem, Mangrove di kecamatan Angkona, Burau, Malili dan Wotu
Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Malili diarahkan untuk memperkuat peran Kecamatan Malili sebagai pusat utama kegiatan di Kabupaten Luwu Timur. Secara **fungsi primer**, Malili berperan sebagai ibu kota kabupaten sekaligus pusat pemerintahan, serta menjadi pusat pelayanan sosial dan ekonomi tingkat kabupaten yang menyediakan berbagai fasilitas dasar bagi masyarakat. Selain itu, Malili juga memiliki **fungsi sekunder** yang menopang dinamika pembangunan daerah, antara lain sebagai pusat perdagangan regional, simpul dalam sistem transportasi, pengembangan industri jasa, serta pengembangan jasa kepariwisataan. Fungsi sekunder lainnya meliputi pengembangan kawasan permukiman, agroindustri, dan agrobisnis yang didukung oleh potensi sumber daya lokal. Dengan perpaduan fungsi primer dan sekunder ini, Malili ditetapkan sebagai pusat kegiatan lokal yang berperan strategis dalam mendorong pertumbuhan wilayah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Luwu Timur.	Malili Kecamatan Malili sebagai Pusat Kegiatan Lokal •
Kawasan Perkotaan Wotu sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) berperan strategis sebagai simpul utama pelayanan bagi beberapa kecamatan di sekitarnya. Kawasan ini berfungsi sebagai pusat pelayanan sosial dan ekonomi dengan dukungan fasilitas pendidikan, kesehatan, perdagangan, serta jasa, sekaligus menjadi bagian penting dalam sistem transportasi darat dan laut yang menghubungkan wilayah Luwu Timur. Selain itu, Wotu juga didukung oleh potensi sektor perdagangan, pertanian, perkebunan, serta perikanan darat dan kelautan yang diarahkan pada pengembangan agrobisnis terintegrasi. Perpaduan fungsi primer dan sekunder tersebut menjadikan Wotu sebagai pusat pertumbuhan wilayah yang mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat	Kawasan Perkotaan Wotu sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)
Adapun Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) di Kabupaten Luwu Timur tersebar pada beberapa wilayah strategis sesuai dengan potensi dan peran masing-masing kecamatan. PPK tersebut meliputi: Pusat Pelayanan	Adapun pusat Pelayanan Kawasan (PPK) adalah sebagai berikut: • Kecamatan Burau; • Kecamatan Kalaena;

HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI KECAMATAN BERDASARKAN ARAHAN RTRWK
Kawasan Burau di Kecamatan Burau, Pusat Pelayanan Kawasan Kalaena Kiri di Kecamatan Kalaena, Pusat Pelayanan Kawasan Mangkutana di Kecamatan Mangkutana, Pusat Pelayanan Kawasan Sorowako di Kecamatan Nuha, Pusat Pelayanan Kawasan Solo di Kecamatan Angkona, Pusat Pelayanan Kawasan Tomoni di Kecamatan Tomoni, Pusat Pelayanan Kawasan Tomoni Timur di Kecamatan Tomoni Timur, Pusat Pelayanan Kawasan Wasuponda di Kecamatan Wasuponda, serta Pusat Pelayanan Kawasan Wawondula di Kecamatan Towuti. Keseluruhan PPK ini berfungsi sebagai simpul pelayanan dan penggerak utama pembangunan wilayah sesuai karakteristik dan potensi lokal masing-masing kawasan	• Kecamatan Mangkutana; • Kecamatan Nuha; • Pusat Pelayanan Kawasan Solo/Kecamatan Angkona; • Pusat Pelayanan Kawasan Tomoni/Kecamatan Tomoni; • Kecamatan Tomoni Timur; • Kecamatan Wasuponda; • Kawasan Pelayanan Kawasan Wawondula/Kecamatan Towuti;
Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa dan mendukung pemerataan pembangunan wilayah. PPL di Kabupaten Luwu Timur meliputi: Pusat Pelayanan Lingkungan Harapan di Kecamatan Malili, Pusat Pelayanan Lingkungan Mahalona di Kecamatan Towuti, Pusat Pelayanan Lingkungan Taripa di Kecamatan Angkona, Pusat Pelayanan Lingkungan Kasintuwu di Kecamatan Mangkutana, serta Pusat Pelayanan Lingkungan Matano di Kecamatan Nuha. Secara **fungsi primer**, PPL berperan sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat pelayanan sosial dan ekonomi, serta menjadi basis utama kegiatan pertanian dan perkebunan. Sementara itu, dalam **fungsi sekunder**, PPL mendukung pengembangan industri kecil rakyat, pengolahan hasil pertanian dan perkebunan, jasa kepariwisataan, pengembangan permukiman, serta kegiatan perikanan darat maupun laut. Peran strategis ini menjadikan PPL sebagai simpul pelayanan antar desa yang mengintegrasikan kegiatan sosial, ekonomi, dan pengembangan potensi lokal.	Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa dan mendukung pemerataan pembangunan wilayah meliputi: • Pusat Pelayanan Lingkungan Harapan/Kecamatan Malili; • Pusat Pelayanan Lingkungan Mahalona/Kecamatan Towuti • Pusat Pelayanan Lingkungan Taripa/Kecamatan Angkona; • Pusat Pelayanan Lingkungan Kasintuwu/Kecamatan Mangkutana; dan • Pusat Pelayanan Lingkungan Matano/Kecamatan Nuha

Sumber : Bapperida Luwu Timur Tahun 2025,(data diolah).

BAB IV
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH.

Selanjutnya berdasarkan kerangka pendanaan sebagaimana dimaksud di atas, dijabarkan kedalam program perangkat daerah dalam rencana strategis perangkat daerah (RENSTRA-PD) Tahun 2025-2029 berdasarkan urusan/fungsi yang diampuh. Program perangkat daerah adalah program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Program pembangunan Daerah disusun untuk menggambarkan keterkaitan program perangkat daerah dalam mencapai sasaran pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan yang dipilih. Perencanaan program perangkat daerah dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu:

a. Pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM)
b. Penjabaran visi dan misi Kepala Daerah Terpilih.
c. Berbasis permasalahan serta isu strategis daerah.
d. Peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup.

Rencana program perangkat daerah Kabupaten Luwu Timur merupakan pelaksanaan dari urusan / penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kewenangan daerah yang akan dioperasionalkan oleh Perangkat daerah.. Arsitektur perencanaan pembangunan memisahkan antara aspek strategis dan operasional, maka program prioritas dipisahkan pula menjadi 2 (dua), yaitu program prioritas untuk perencanaan strategis dan program prioritas untuk perencanaan operasional. Suatu program prioritas yang dimaksudkan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah pada dasarnya adalah perencanaan operasional. Suatu program prioritas, baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala OPD.Namun, bagi program prioritas yang dikategorikan strategik merupakan tanggung jawab bersama Kepala OPD dengan kepala daerah pada tingkat kebijakan.

Keseluruhan rangkaian perencanaan pembangunan daerah bermuara pada penentuan program Perangkat Daerah yang selanjutnya diterjemahkan oleh OPD ke dalam kegiatan pada RENSTRA-PD. Perencanaan program Perangkat Daerah dalam dokumen RPJMD harus dirumuskan dengan seksama mengingat pentingnya esensi program Perangkat Daerah bagi rujukan utama pelaksanaan perencanaan kegiatan tiap tahun yang dituangkan kedalam Renstra Perangkat Daerah (RENSTRA-PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renja Perangkat Daerah (Renja-PD) yang merupakan dokumen operasional dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2025-2029. Dalam upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah yaitu pijakan penyusunan RKPD Tahun 2030, yang akan menjadi tanggungjwab kepala daerah Tahun 2030-2034, maka Rencana Program Perangkat Daerah dimulai dari Tahun 2025-2030.

Adapun pagu yang ditetapkan merupakan gambaran kebutuhan pendanaan yang bersifat indikatif untuk penyusunan program tahunan Perangkat daerah. Selain program pembangunan daerah (program prioritas II), program dan kegiatan ini wajib mendapatkan prioritas pendanaan karena sifatnya yang berkesinambungan. Program Perangkat daerah yang disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatifnya kemudian dijadikan sebagai acuan bagi OPD dalam penyusunan Rencana Strategis OPD, termasuk penjabaran kegiatan beserta kebutuhan pendanaannya. Pagu indikatif merupakan rancangan maksimal atas rencana belanja atau anggaran yang pada akhirnya akan dituangkan dalam APBD setiap tahunnya.

Mengacu pada hubungan klasifikasi belanja menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah di atas, maka program perangkat daerah dalam 5 (lima) tahun disusun berdasarkan program perangkat daerah beserta pagu indikatif pelaksanaannya. Rencana program perangkat daerah dan kebutuhan pendanaan RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 Program Perangkat Daerah selengkapnya dapat disajikan dibawah ini :

Tabel 4. 1 Indikasi Rencana Program Perangkat Daerah yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2026-2030

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				416,141,113,695		426,401,780,765		436,761,825,284		467,129,940,916		505,488,080,189		530,667,782,193	1.01.2.22.1.01.01.0000 - Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				295,720,121,290		309,175,912,837		317,635,502,166		347,673,617,798		385,711,757,071		410,561,459,075	
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Tugas dan Fungsi	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	295,720,121,290	100	309,175,912,837	100	317,635,502,166	100	347,673,617,798	100	385,711,757,071	100	410,561,459,075	
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				120,420,992,405		117,125,867,928		119,026,323,118		119,356,323,118		119,676,323,118		120,006,323,118	
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah	Angka Literasi (Nilai)	65,89	70,96	120,420,992,405	79,02	117,125,867,928	79,5	119,026,323,118	79,98	119,356,323,118	81,5	119,676,323,118	82,35	120,006,323,118	
	Angka Numerasi (Nilai)	88	88,8		89,6		90,4		91,2		92		92,8		
	Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) (%)	0	93,8		94,35		95,75		96,25		96,78		97,5		
	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada assesmen tingkat nasional (%)	78,87	80,22		82,15		83,5		84,75		85,5		87		
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM				0		50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000	
Meningkatnya Kualitas Kurikulum Pendidikan	Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (%)	0	0	0	100	50,000,000	100	50,000,000	100	50,000,000	100	50,000,000	100	50,000,000	
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				0		25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
Meningkatnya Mutu Tenaga Pendidik dan Tenaga Pendidikan	Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik (%)	0	0	0	100	25,000,000	100	25,000,000	100	25,000,000	100	25,000,000	100	25,000,000	
1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN				0		25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000	
Meningkatnya Kualitas dan Distribusi Institusi Pendidikan	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan Pendidikan yang Diterbitkan/Diperbaharui (%)	0	0	0	100	25,000,000	100	25,000,000	100	25,000,000	100	25,000,000	100	25,000,000	
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				541,211,212,965		588,314,231,141		632,844,284,767		678,283,324,660		747,719,754,745		781,185,822,550	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				289,917,171,206		368,410,387,363		377,943,357,344		386,679,449,599		407,160,004,262		429,179,099,462	
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Tugas dan Fungsi	Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Berjalan Sesuai Standar (%)	100	100	140,957,853,037	100	200,115,807,391	100	210,850,847,012	100	215,976,939,267	100	234,657,493,930	100	253,676,589,130	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Tugas dan Fungsi	Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Berjalan Sesuai Standar (%)	100	100	148,959,318,169	100	168,294,579,972	100	167,092,510,332	100	170,702,510,332	100	172,502,510,332	100	175,502,510,332	1.02.0.00.0.00.02.0000 - RSUD I LAGALIGO
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				247,183,178,059		203,975,714,392		238,651,040,180		273,560,756,989		322,416,188,044		336,838,670,179	
Meningkatnya kualitas Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	96,88	100	126,061,105,314	100	109,250,088,858	100	141,731,637,777	100	174,768,862,704	100	220,728,940,869	100	233,234,521,299	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	99,84	100		100		100		100		100		100		
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	98,12	100		100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	93,86	100		100		100		100		100		100		
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkanpelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase orang usia15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	63,35	100		100		100		100		100		100		
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar (%)	97,36	100		100		100		100		100		100		
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	78,67	100		100		100		100		100		100		
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
Meningkatnya kualitas Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rata-Rata Capaian SPM Rumah Sakit (%)	88,8	90	57,367,442,365	90	34,187,379,220	92	35,042,063,701	95	35,918,115,293	95	36,816,068,175	95	37,736,469,880	1.02.0.00.0.00.02.0000 - RSUD I LAGALIGO
Meningkatnya kualitas Upaya Kesehatan	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	100	100	3,842,244,000	100	3,971,716,000	100	4,071,067,250	100	4,151,503,812	100	4,277,440,936	100	4,284,513,209	1.02.0.00.0.00.01.0001 - Puskesmas Burau

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkanpelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase orang usia15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	(5)	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
Meningkatnya kualitas Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	100	100	4,932,800,156	100	4,820,660,200	100	4,941,335,915	100	5,015,005,562	100	5,191,766,952	100	5,221,697,376	1.02.0.00.0.00.01.0002 - Puskesmas Wotu
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkanpelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase orang usia15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan	100	100		100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
	deteksi dini HIV sesuai standar (%)														
Meningkatnya kualitas Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	100	100	4,227,604,456	100	3,907,889,000	100	4,005,745,575	100	4,107,001,302	100	4,208,859,128	100	4,214,239,957	1.02.0.00.0.00.01.0003 - Puskesmas Mangkutana
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkanpelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase orang usia15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
Meningkatnya kualitas Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	100	100	4,258,172,708	100	3,883,460,500	100	3,976,551,731	100	4,058,758,159	100	4,180,896,113	100	4,185,587,516	1.02.0.00.0.00.01.0004 - Puskesmas Tomoni
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkanpelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase orang usia15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan	100	100		100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
	pelayanan TBC sesuai standar (%)														
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
Meningkatnya kualitas Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	100	100	3,063,320,900	100	2,724,655,200	100	2,792,874,330	100	2,862,790,188	100	2,934,415,443	100	3,007,933,829	1.02.0.00.0.00.01.0005 - Puskesmas Tomoni Timur
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkanpelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase orang usia15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
Meningkatnya kualitas Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	100	100	2,908,754,746	100	2,756,909,600	100	2,816,917,115	100	2,896,649,818	100	2,969,150,838	100	3,043,464,384	1.02.0.00.0.00.01.0006 - Puskesmas Kalaena
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkanpelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase orang usia15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan	100	100		100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
	pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)														
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
Meningkatnya kualitas Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	100	100	4,040,558,261	100	3,825,260,300	100	3,916,984,308	100	4,007,101,415	100	4,064,334,726	100	4,122,755,737	1.02.0.00.0.00.01.0007 - Puskesmas Angkona
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkanpelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
Meningkatnya kualitas Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	100	100	3,195,543,173	100	3,144,926,000	100	3,223,167,525	100	3,201,046,713	100	3,381,947,881	100	3,405,921,578	1.02.0.00.0.00.01.0008 - Puskesmas Lakawali
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkanpelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase orang usia15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase penderita DM yang mendapatkan	100	100		100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
	pelayanan kesehatan sesuai standar (%)														
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
Meningkatnya kualitas Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	100	100	2,123,407,636	100	2,128,146,386	100	2,181,050,046	100	2,235,288,797	100	2,290,896,017	100	2,347,905,917	1.02.0.00.0.00.01.0009 - Puskesmas Parumpanai
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkanpelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase orang usia15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
Meningkatnya kualitas Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	100	100	5,740,424,224	100	5,529,090,666	100	5,646,874,683	100	5,708,646,549	100	5,753,962,713	100	5,802,911,781	1.02.0.00.0.00.01.0010 - Puskesmas Malili
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkanpelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase orang usia15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan	100	100		100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
	kesehatan sesuai standar (%)														
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
Meningkatnya kualitas Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	100	100	2,581,745,563	100	2,555,970,150	100	2,587,474,029	100	2,674,011,379	100	2,741,187,163	100	2,820,072,199	1.02.0.00.0.00.01.0011 - Puskesmas Lampia
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkanpelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase orang usia15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
Meningkatnya kualitas Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	100	100	3,892,738,200	100	3,770,231,690	100	3,827,719,932	100	3,760,387,930	100	4,059,472,629	100	4,161,034,445	1.02.0.00.0.00.01.0012 - Puskesmas Wasuponda
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkanpelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase orang usia15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan	100	100		100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
	kesehatan sesuai standar (%)														
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
Meningkatnya kualitas Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	100	100	3,390,426,107	100	3,230,596,150	100	3,308,538,179	100	3,294,503,758	100	3,429,543,477	100	3,566,709,189	1.02.0.00.0.00.01.0013 - Puskesmas Nuha
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkanpelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
Meningkatnya kualitas Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	100	100	4,192,606,340	100	3,897,909,386	100	3,993,373,371	100	4,013,392,854	100	4,195,912,826	100	4,200,995,797	1.02.0.00.0.00.01.0014 - Puskesmas Wawondula
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkanpelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase orang usia15-59 tahun mendapatkan	100	100		100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	(5)	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
	skrining kesehatan sesuai standar (%)														
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
Meningkatnya kualitas Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	100	100	2,532,244,982	100	2,365,805,000	100	2,421,360,000	100	2,485,069,300	100	2,547,296,040	100	2,611,078,441	1.02.0.00.0.00.01.0015 - Puskesmas Timampu
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkanpelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	100	100		100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
	Persentase orang usia15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
Meningkatnya kualitas Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	100	100	2,575,324,086	100	2,522,408,286	100	2,545,760,368	100	2,650,696,252	100	2,717,255,534	100	2,785,478,797	1.02.0.00.0.00.01.0016 - Puskesmas Mahalona
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkanpelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase orang usia15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
Meningkatnya kualitas Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	100	100	2,816,855,642	100	2,484,227,000	100	2,526,400,925	100	2,610,129,198	100	2,675,450,678	100	2,752,405,195	1.02.0.00.0.00.01.0017 - Puskesmas Bantilang
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkanpelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
Meningkatnya kualitas Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	100	100	3,439,859,200	100	3,018,384,800	100	3,094,143,420	100	3,141,796,006	100	3,251,389,906	100	3,332,973,653	1.02.0.00.0.00.01.0018 - Puskesmas Bonepute
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	100	100		100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkanpelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase orang usia15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	100	100		100		100		100		100		100		
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				3,369,528,300		5,746,000,000		5,804,550,000		6,853,100,000		5,853,100,000		6,053,800,000	
Meningkatnya Kualitas dan distribusi Sumber	Persentase tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan	82,41	83	3,054,264,700	83	5,294,750,000	84	4,842,850,000	84	5,808,100,000	84	4,865,100,000	84	5,025,000,000	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
Daya Manusia Kesehatan	peningkatan kompetensi (%)														
Meningkatnya Kualitas dan distribusi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Peningkatan SDM Rumah Sakit (%)	62	62	315,263,600	62	451,250,000	62	961,700,000	62	1,045,000,000	62	988,000,000	62	1,028,800,000	1.02.0.00.0.00.02.0000 - RSUD I LAGALIGO
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				531,840,000		5,007,878,486		5,037,828,949		5,913,774,672		6,811,619,039		8,731,909,509	
meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase ketersediaan obat esensial (%)	100	100	531,840,000	100	5,007,878,486	100	5,037,828,949	100	5,913,774,672	100	6,811,619,039	100	8,731,909,509	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
	Persentase alat kesehatan sesuai standar (%)	58,37	60		60		60		60		60				
	Persentase produk makanan dan minuman yang terjamin keamanan dan kualitasnya (%)	32	35		37		42		47		53				
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				209,495,400		5,174,250,900		5,407,508,294		5,276,243,400		5,478,843,400		382,343,400	
Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase desa /kelurahan dengan Posyandu Siklus Hidup yang aktif (%)	40	45	111,205,000	50	5,070,000,000	60	5,284,824,894	70	5,150,000,000	75	5,350,000,000	80	250,000,000	1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase desa /kelurahan dengan Posyandu Siklus Hidup yang aktif (%)	100	100	5,310,000	100	5,374,000	100	5,450,000	100	5,450,000	100	5,450,000	100	5,450,000	1.02.0.00.0.00.01.0001 - Puskesmas Burau
Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase desa /kelurahan dengan Posyandu Siklus Hidup yang aktif (%)	100	100	5,472,400	100	5,472,400	100	5,472,400	100	5,472,400	100	5,472,400	100	5,472,400	1.02.0.00.0.00.01.0002 - Puskesmas Wotu
Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase desa /kelurahan dengan Posyandu Siklus Hidup yang aktif (%)	100	100	5,074,000	100	6,374,000	100	6,374,000	100	6,374,000	100	6,374,000	100	6,374,000	1.02.0.00.0.00.01.0003 - Puskesmas Mangkutana
Meningkatnya kualitas Pemberdayaan	Persentase desa /kelurahan dengan	44	50	5,470,000	50	5,194,500	60	6,760,000	70	6,760,000	75	6,760,000	80	6,760,000	1.02.0.00.0.00.01.0004 - Puskesmas Tomoni

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
Masyarakat Bidang Kesehatan	Posyandu Siklus Hidup yang aktif (%)														
Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase desa /kelurahan dengan Posyandu Siklus Hidup yang aktif (%)	44	44	6,110,000	50	6,110,000	60	6,160,000	70	6,220,000	75	6,320,000	75	6,320,000	1.02.0.00.0.00.01.0005 - Puskesmas Tomoni Timur
Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase desa /kelurahan dengan Posyandu Siklus Hidup yang aktif (%)	100	100	3,391,000	100	3,391,000	100	3,391,000	100	3,391,000	100	3,391,000	100	3,391,000	1.02.0.00.0.00.01.0006 - Puskesmas Kalaena
Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase desa /kelurahan dengan Posyandu Siklus Hidup yang aktif (%)	100	100	3,700,000	100	3,700,000	100	3,700,000	100	3,700,000	100	3,700,000	100	3,700,000	1.02.0.00.0.00.01.0007 - Puskesmas Angkona
Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase desa /kelurahan dengan Posyandu Siklus Hidup yang aktif (%)	100	100	11,335,000	100	11,335,000	100	12,000,000	100	15,000,000	100	17,000,000	100	20,000,000	1.02.0.00.0.00.01.0008 - Puskesmas Lakawali
Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase desa /kelurahan dengan Posyandu Siklus Hidup yang aktif (%)	100	100	3,097,000	100	8,000,000	100	8,500,000	100	9,000,000	100	9,500,000	100	10,000,000	1.02.0.00.0.00.01.0009 - Puskesmas Parumpanai
Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase desa /kelurahan dengan Posyandu Siklus Hidup yang aktif (%)	100	100	3,470,000	100	3,470,000	100	4,000,000	100	4,000,000	100	4,000,000	100	4,000,000	1.02.0.00.0.00.01.0010 - Puskesmas Malili
Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase desa /kelurahan dengan Posyandu Siklus Hidup yang aktif (%)	44	50	1,616,000	60	1,585,000	70	13,020,000	75	13,020,000	80	13,020,000	80	13,020,000	1.02.0.00.0.00.01.0011 - Puskesmas Lampia
Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase desa /kelurahan dengan Posyandu Siklus Hidup yang aktif (%)	50	55	2,178,000	60	2,178,000	65	3,000,000	70	3,000,000	70	3,000,000	70	3,000,000	1.02.0.00.0.00.01.0012 - Puskesmas Wasuponda
Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase desa /kelurahan dengan Posyandu Siklus Hidup yang aktif (%)	50	50	7,085,000	65	7,085,000	70	7,085,000	75	7,085,000	0	7,085,000	80	7,085,000	1.02.0.00.0.00.01.0013 - Puskesmas Nuha

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	(5)	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase desa /kelurahan dengan Posyandu Siklus Hidup yang aktif (%)	100	100	5,290,000	100	5,290,000	100	7,406,000	100	7,406,000	100	7,406,000	100	7,406,000	1.02.0.00.0.00.01.0014 - Puskesmas Wawondula
Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase desa /kelurahan dengan Posyandu Siklus Hidup yang aktif (%)	44	50	3,327,000	60	3,327,000	70	4,000,000	75	4,000,000	75	4,000,000	80	4,000,000	1.02.0.00.0.00.01.0015 - Puskesmas Timampu
Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase desa /kelurahan dengan Posyandu Siklus Hidup yang aktif (%)	100	100	11,675,000	100	11,675,000	100	11,675,000	100	11,675,000	100	11,675,000	100	11,675,000	1.02.0.00.0.00.01.0016 - Puskesmas Mahalona
Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase desa /kelurahan dengan Posyandu Siklus Hidup yang aktif (%)	50	50	2,730,000	50	2,730,000	65	2,730,000	70	2,730,000	75	2,730,000	75	2,730,000	1.02.0.00.0.00.01.0017 - Puskesmas Bantilang
Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase desa /kelurahan dengan Posyandu Siklus Hidup yang aktif (%)	100	100	11,960,000	100	11,960,000	100	11,960,000	100	11,960,000	100	11,960,000	100	11,960,000	1.02.0.00.0.00.01.0018 - Puskesmas Bonepute
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				170,139,988,003		204,445,835,750		205,084,849,792		212,163,679,362		214,575,511,584		232,562,219,197	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				14,033,308,246		14,869,252,724		15,768,848,000		16,452,240,000		17,159,949,000		17,992,764,000	
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Tugas dan Fungsi	Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Berjalan Sesuai Standar (%)	90,94	100	14,033,308,246	100	14,869,252,724	100	15,768,848,000	100	16,452,240,000	100	17,159,949,000	100	17,992,764,000	
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				11,230,557,733		10,791,107,748		11,060,891,000		11,337,421,000		11,620,864,000		11,911,391,000	
Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan	25,73	25,83	11,230,557,733	25,93	10,791,107,748	26,03	11,060,891,000	26,13	11,337,421,000	26,23	11,620,864,000	26,33	11,911,391,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
banjir dan meningkatnya akses terhadap irigasi	banjir kewenangan Kab/kota (%)														
	Persentase peningkatan perlindungan Kawasan dari abrasi dan banjir rob kewenangan Kabupaten/Kota (%)	92,84	93,34		93,84		94,34		94,84		95,34		95,84		
	Persentase Luas layanan irigasi multikomoditas kewenangan kab/kota (%)	62,5	62,65		62,87		63,09		63,31		63,53		63,75		
	Persentase Kondisi irigasi kewenangan kab/kota (%)	50,31	51,63		52,37		53,11		53,84		54,58		55,32		
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				2,704,822,401		11,945,531,322		12,231,672,000		12,524,965,000		12,825,591,000		13,133,733,000	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi (%)	61,52	61,4	2,704,822,401	61,48	11,945,531,322	61,56	12,231,672,000	61,64	12,524,965,000	61,72	12,825,591,000	61,8	13,133,733,000	
1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL				3,799,000,000		4,357,500,000		4,466,438,000		4,578,100,000		4,692,553,000		4,809,867,000	
Meningkatnya layanan persampahan regional	Persentase peningkatan kapasitas fasilitas pengelolaan sampah terbangun (%)	-84	-84	3,799,000,000	-36	4,357,500,000	-18,75	4,466,438,000	3,8	4,578,100,000	9,52	4,692,553,000	14,61	4,809,867,000	
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				5,634,914,950		6,504,662,600		6,664,780,000		6,828,901,000		6,997,125,000		7,169,554,000	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD-S Akses Aman (%)	11,88	11,88	5,634,914,950	12,22	6,504,662,600	12,56	6,664,780,000	12,91	6,828,901,000	13,25	6,997,125,000	13,59	7,169,554,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	(5)	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				20,006,038,210		14,977,663,466		15,352,107,000		15,735,910,000		16,129,309,000		16,532,543,000	
Meningkatnya kualitas sistem drainase	Persentase saluran drainase dalam kondisi baik (%)	94,26	93,1	20,006,038,210	93,62	14,977,663,466	94,51	15,352,107,000	95,19	15,735,910,000	95,71	16,129,309,000	96,14	16,532,543,000	
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				50,600,875,480		47,610,076,084		46,284,062,792		48,274,930,362		47,883,117,584		55,247,428,197	
Meningkatnya kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota	Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota (%)	76,65	79,28	50,600,875,480	81,38	47,610,076,084	83,09	46,284,062,792	84,51	48,274,930,362	85,71	47,883,117,584	86,74	55,247,428,197	
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				5,188,370,054		5,959,470,528		6,108,458,000		6,261,170,000		6,417,700,000		6,578,143,000	
Meningkatnya cakupan RTH publik yang ditata	Persentase Luas RTH publik yang ditata (%)	0,29	0,29	5,188,370,054	0,29	5,959,470,528	0,29	6,108,458,000	0,29	6,261,170,000	0,29	6,417,700,000	0,29	6,578,143,000	
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				55,297,539,441		84,348,856,500		83,988,829,000		86,932,304,000		87,530,616,000		95,785,137,000	
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota (%)	36,06	37,15	55,297,539,441	38,25	84,348,856,500	39,35	83,988,829,000	40,45	86,932,304,000	41,55	87,530,616,000	42,65	95,785,137,000	
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				853,125,488		1,496,069,778		1,533,475,000		1,571,814,000		1,611,113,000		1,651,394,000	
Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Ahli (%)	20,05	22,17	853,125,488	23,71	1,496,069,778	24,88	1,533,475,000	25,79	1,571,814,000	26,53	1,611,113,000	27,13	1,651,394,000	
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				791,436,000		1,585,645,000		1,625,289,000		1,665,924,000		1,707,574,000		1,750,265,000	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase kesesuaian penataan ruang (%)	40,09	42,09	791,436,000	44,09	1,585,645,000	46,09	1,625,289,000	48,09	1,665,924,000	50,09	1,707,574,000	52,09	1,750,265,000	
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				36,513,791,366		21,875,436,158		23,549,697,061		24,247,513,542		21,915,924,469		26,809,205,942	1.04.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	(5)	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6,266,892,394		10,111,762,850		10,617,350,993		11,148,218,542		11,705,629,469		12,290,910,943	
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Tugas dan Fungsi	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota (%)	91,91	100	6,266,892,394	100	10,111,762,850	100	10,617,350,993	100	11,148,218,542	100	11,705,629,469	100	12,290,910,943	
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				2,160,931,490		880,000,000		1,447,610,000		2,615,000,000		2,605,000,000		3,607,000,000	
Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	100	100	2,160,931,490	100	880,000,000	100	1,447,610,000	100	2,615,000,000	100	2,605,000,000	100	3,607,000,000	
	Persentase warga Negara yang terkena relokasi akibat program Kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (%)	100	100		100		100		100		100		100		
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				7,952,371,747		2,000,000,000		2,900,000,000		3,000,000,000		4,000,000,000		5,000,000,000	
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani (%)	44,82	19,27	7,952,371,747	23,87	2,000,000,000	31,35	2,900,000,000	45,66	3,000,000,000	84,03	4,000,000,000	100	5,000,000,000	
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH				0		8,053,673,308		7,754,736,068		6,654,295,000		2,775,295,000		5,081,294,999	
Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman kumuh	Persentase Penanganan RTLH di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha (%)	61,88	9,51	0	10,5	8,053,673,308	11,74	7,754,736,068	13,3	6,654,295,000	15,34	2,775,295,000	18,12	5,081,294,999	
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				20,133,595,735		800,000,000		800,000,000		800,000,000		800,000,000		800,000,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
Meningkatnya penyediaan PSU perumahan	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (%)	54,83	62,18	20,133,595,735	70,25	800,000,000	79,18	800,000,000	89,09	800,000,000	96,32	800,000,000	98,24	800,000,000	
1.04.06 - PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				0		30,000,000		30,000,000		30,000,000		30,000,000		30,000,000	
Meningkatnya sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan menengah	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU (%)	0	0	0	100	30,000,000	100	30,000,000	100	30,000,000	100	30,000,000	100	30,000,000	
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				39,490,747,487		49,523,130,658		50,897,458,925		53,693,364,953		55,621,932,929		57,652,852,988	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				19,195,248,689		42,028,920,998		43,225,791,793		44,480,620,921		45,767,562,979		47,069,568,206	
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Tugas dan Fungsi	Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Berjalan Sesuai Standar (%)	97,41	100	8,918,351,210	100	21,266,012,066	100	21,797,662,368	100	22,342,603,927	100	22,901,169,025	100	23,473,698,251	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	(5)	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Tugas dan Fungsi	Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Berjalan Sesuai Standar (%)	92,92	100	3,670,039,230	100	5,548,039,156	100	5,832,887,905	100	6,152,894,436	100	6,481,643,332	100	6,801,500,567	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Tugas dan Fungsi	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	6,606,858,249	96	15,214,869,776	96,5	15,595,241,520	97	15,985,122,558	97,5	16,384,750,622	98	16,794,369,388	1.05.0.00.0.00.03.0000 - Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				5,317,591,690		2,550,000,000		2,750,000,000		3,895,000,000		3,905,000,000		4,010,000,000	
Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (%)	100	100		100		100		100		100		100		
Meningkatnya penanganan gangguan keteteraman dan ketertiban umum	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	100	100		100		100		100		100		100		1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja
Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (%)	7,26	0		7,34		7,38		7,42		7,81		7,89		
Meningkatnya kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya (%)	0	0		25		50		75		100		100		
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				9,666,940,950		2,379,922,800		2,293,273,100		2,589,350,000		2,993,143,465		3,379,180,900	
Meningkatknya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan bencana pada saat tanggap darurat dan pasca bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (%)	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana (%)	100	100		100		100		100		100		100		1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Persentase Penanganan Pasca Bencana (%)	100	100		100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				5,310,966,158		2,564,286,860		2,628,394,032		2,728,394,032		2,956,226,485		3,194,103,882	1.05.0.00.0.00.03.0000 - Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
Meningkatnya perlindungan masyarakat dan asset dari bahaya kebakaran melalui penanganan yang cepat dan akurat	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (%)	0	0		15,62		32,81		53,91		76,56		100		
	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (%)	0	0		81,82		81,82		81,82		90,91		100		
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				24,352,845,613		58,387,139,374		62,502,633,486		70,199,174,798		92,709,929,502		108,183,312,823	1.06.2.08.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4,607,057,182		6,572,267,109		8,906,000,000		10,858,775,000		11,177,275,000		12,201,500,000	
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Tugas dan Fungsi	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	91,71	100	4,607,057,182	100	6,572,267,109	100	8,906,000,000	100	10,858,775,000	100	11,177,275,000	100	12,201,500,000	
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				5,382,166,351		1,982,000,000		2,032,000,000		2,042,000,000		2,082,000,000		2,082,000,000	
Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang memperoleh peningkatan kapasitas (%)	7,14	7,14	5,382,166,351	7,14	1,982,000,000	14,28	2,032,000,000	50	2,042,000,000	75	2,082,000,000	100	2,082,000,000	
1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN				0		150,000,000		150,000,000		150,000,000		150,000,000		150,000,000	
Meningkatnya layanan penanganan warga negara	Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan (%)	100	100	0	100	150,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				13,055,647,400		47,750,148,265		49,449,343,486		55,147,099,798		77,261,224,502		91,669,939,823	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	(5)	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar,Anak Terlantar,Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti (Indikator SPM) (%)	15,05	15,05	13,055,647,400	15,24	47,750,148,265	17,71	49,449,343,486	20	55,147,099,798	22,72	77,261,224,502	24,76	91,669,939,823	
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				607,441,180		1,366,546,000		1,370,000,000		1,375,000,000		1,380,000,000		1,385,000,000	
Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Prosentase Jumlah warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosialr (%)	100	100	607,441,180	100	1,366,546,000	100	1,370,000,000	100	1,375,000,000	100	1,380,000,000	100	1,385,000,000	
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA				456,029,500		375,000,000		385,000,000		395,000,000		405,000,000		415,000,000	
Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota (%)	100	100	456,029,500	100	375,000,000	100	385,000,000	100	395,000,000	100	405,000,000	100	415,000,000	
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				244,504,000		191,178,000		210,290,000		231,300,000		254,430,000		279,873,000	
Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan yang dipelihara (%)	100	100	244,504,000	100	191,178,000	100	210,290,000	100	231,300,000	100	254,430,000	100	279,873,000	
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				8,057,693,915		9,185,475,238		9,448,894,935		11,571,355,777		12,677,294,436		13,354,347,162	
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5,261,134,715		5,912,375,638		6,621,694,500		5,100,764,655		6,039,178,214		6,868,230,940	3.32.2.07.3.31.01.0000 - Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kegiatan Penunjang	Persentase penunjang urusan perangkat daerah	97,16	95	5,261,134,715	95	5,912,375,638	95	6,621,694,500	95	5,100,764,655	95	6,039,178,214	95	6,868,230,940	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	(5)	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
Urusan Perangkat Daerah Sesuai Tugas dan Fungsi	berjalan sesuai standar (%)														
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA				21,027,000		0		0		0		95,000,000		0	
Terlaksananya Program dan Kegiatan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja (%)	0	100	21,027,000	0	0	0	0	0	0	100	95,000,000	0	0	
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				2,251,123,800		2,038,770,800		1,221,921,213		4,815,809,400		4,870,000,000		4,890,000,000	
Meningkatnya Kapasitas dan Kompetensi Sumberdaya Tenaga Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)	47,43	78,75	2,251,123,800	76,36	2,038,770,800	75,3	1,221,921,213	71,53	4,815,809,400	71,65	4,870,000,000	71,78	4,890,000,000	
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				208,920,900		851,471,400		910,356,472		912,856,472		949,356,472		955,356,472	
Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri (%)	35,2	35,22	208,920,900	35,94	851,471,400	36,26	910,356,472	37,28	912,856,472	38,3	949,356,472	39,32	955,356,472	
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				315,487,500		382,857,400		694,922,750		741,925,250		723,759,750		640,759,750	
Meningkatnya Kerjasama dan Harmonisasi Antara Perusahaan dengan Pekerja	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun (%)	26,21	14,5	315,487,500	25,39	382,857,400	24,61	694,922,750	26,99	741,925,250	25,88	723,759,750	26,12	640,759,750	
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				1,445,045,251		1,925,784,352		2,318,113,333		2,385,113,333		2,531,113,333		2,637,113,333	1.06.2.08.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				247,476,171		321,000,000		661,000,000		698,000,000		744,000,000		773,000,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	(5)	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
Meningkatnya kualitas dan efektifitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (%)	12,57	12,57	247,476,171	12,6	321,000,000	12,65	661,000,000	12,75	698,000,000	12,8	744,000,000	12,8	773,000,000	
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	53,55	53,55		53,57		53,6		53,66		53,7		53,7		
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				801,015,880		548,196,219		540,000,000		555,000,000		565,000,000		580,000,000	
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	70	70	801,015,880	72,73	548,196,219	81,82	540,000,000	81,82	555,000,000	81,82	565,000,000	90,91	580,000,000	
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				53,991,000		200,000,000		200,000,000		205,000,000		265,000,000		307,000,000	
Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai (Indeks)	7	7	53,991,000	7	200,000,000	15	200,000,000	23	205,000,000	31	265,000,000	39	307,000,000	
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				26,846,300		40,274,800		50,800,000		60,800,000		70,800,000		80,800,000	
Meningkatnya pemanfaatan data gender anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan (%)	100	100	26,846,300	100	40,274,800	100	50,800,000	100	60,800,000	100	70,800,000	100	80,800,000	
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				315,715,900		500,000,000		550,000,000		550,000,000		570,000,000		580,000,000	
Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	56,81	56,81	315,715,900	59	500,000,000	62	550,000,000	65	550,000,000	68	570,000,000	71	580,000,000	
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				0		316,313,333		316,313,333		316,313,333		316,313,333		316,313,333	
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus	100	100	0	100	316,313,333	100	316,313,333	100	316,313,333	100	316,313,333	100	316,313,333	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
kekerasan, eksploitasi, penelantaran perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)														
	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	73,99	73,99		77,5		81,01		84,52		88,03		91,54		
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				30150973937.80		38,155,029,097		35,690,205,884		38,843,273,144		39,281,421,643		42,100,962,364	3.27.2.09.0.00.01.0000 - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				29472377953.80		36,979,882,647		34,281,266,634		37,345,333,894		37,836,482,393		40,783,023,114	
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Tugas dan Fungsi	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	29,472,377,954	100	36,979,882,647	100	34,281,266,634	100	37,345,333,894	100	37,836,482,393	100	40,783,023,114	
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN				14,251,734		300,000,000		275,000,000		320,000,000		320,000,000		120,000,000	
Meningkatnya Pengelolaan sumberdaya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan (%)	16,77	36,95	14,251,734	49,5	300,000,000	62,5	275,000,000	75,95	320,000,000	89,4	320,000,000	100	120,000,000	
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				620,158,950		515,671,300		645,000,000		685,000,000		750,000,000		815,000,000	
Meningkatnya Diversifikasi dan ketahan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	90,4	90,5	620,158,950	91	515,671,300	91,5	645,000,000	92	685,000,000	92,5	750,000,000	93	815,000,000	
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				18,908,000		310,255,250		388,939,250		390,939,250		319,939,250		324,939,250	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	(5)	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	rasio konsumsi perkapita terhadap ketersediaan pangan (NCPR) (Nilai)	0,25	0,24	18,908,000	0,23	310,255,250	0,22	388,939,250	0,21	390,939,250	0,2	319,939,250	0,19	324,939,250	
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				25,277,300		49,219,900		100,000,000		102,000,000		55,000,000		58,000,000	
meningkatnya pengawasan mutu dan kemanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu (%)	0	66,66	25,277,300	93	49,219,900	93	100,000,000	93	102,000,000	93	55,000,000	93	58,000,000	
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				9,363,692,150		5,095,000,000		4,095,000,000		4,095,000,000		4,095,000,000		3,095,000,000	1.04.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN				3,239,900		5,000,000		5,000,000		5,000,000		5,000,000		5,000,000	
Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase terselesaikannya kasus tanah garapan yang belum bersertifikat yang dilakukan melalui mediasi (%)	100	100	3,239,900	100	5,000,000	100	5,000,000	100	5,000,000	100	5,000,000	100	5,000,000	
2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN				9,188,913,950		5,000,000,000		4,000,000,000		4,000,000,000		4,000,000,000		3,000,000,000	
Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan (%)	95	100	9,188,913,950	95	5,000,000,000	95	4,000,000,000	95	4,000,000,000	95	4,000,000,000	95	3,000,000,000	
2.10.06 - PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE				0		35,000,000		35,000,000		35,000,000		35,000,000		35,000,000	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal Kelebihan	95	0	0	95	35,000,000	95	35,000,000	95	35,000,000	95	35,000,000	95	35,000,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
	dari Tanah Maksimum dan Tanah Absentee (%)														
2.10.08 - PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG				115,982,500		10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000	
Meningkatnya pengelolaan tanah kosong	Persentase tanah kosong yang dikelola (%)	95	100	115,982,500	95	10,000,000	95	10,000,000	95	10,000,000	95	10,000,000	95	10,000,000	
2.10.09 - PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH				4,844,350		5,000,000		5,000,000		5,000,000		5,000,000		5,000,000	
Meningkatnya pengelolaan izin membuka tanah	Persentase pengelolaan izin membuka tanah (%)	100	100	4,844,350	100	5,000,000	100	5,000,000	100	5,000,000	100	5,000,000	100	5,000,000	
2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH				50,711,450		40,000,000		40,000,000		40,000,000		40,000,000		40,000,000	
Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah	Persentase Luas Lahan Bersertifikat (%)	95	100	50,711,450	95	40,000,000	95	40,000,000	95	40,000,000	95	40,000,000	95	40,000,000	
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				12,573,056,901		16,207,807,467		16,127,206,490		17,046,398,859		17,770,776,469		17,945,141,458	
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6,254,928,812		7,263,406,156		7,086,722,336		8,270,346,594		8,534,179,471		8,940,227,464	
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Tugas dan Fungsi	Persentase Rata-Rata Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	6,254,928,812	100	7,263,406,156	100	7,086,722,336	100	8,270,346,594	100	8,534,179,471	100	8,940,227,464	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				0		350,000,000		250,000,000		0		300,000,000		0	
Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomedasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (%)	0	0	0	100	350,000,000	100	250,000,000	0	0	100	300,000,000	0	0	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	(5)	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				477,041,186		1,675,000,000		1,757,000,000		1,765,000,000		1,773,000,000		1,781,000,000	
Terpantaunya Kualitas Lingkungan	Persentase titik pantau sungai dengan status memenuhi parameter indeks kualitas air (%)	82,6	82,6	477,041,186	82,6	1,675,000,000	82,6	1,757,000,000	82,6	1,765,000,000	82,6	1,773,000,000	82,6	1,781,000,000	
	Persentase titik pantau udara dengan status memenuhi parameter indeks kualitas udara (%)	9,09	9,09		9,09		9,09		9,09		9,09		9,09		
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				141,233,820		155,000,000		120,000,000		120,000,000		168,000,000		133,000,000	
Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH yang tertangani dengan baik (%)	26,43	26,43	141,233,820	26,43	155,000,000	26,43	120,000,000	26,43	120,000,000	26,43	168,000,000	26,43	133,000,000	
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				27,228,510		59,853,950		65,839,345		72,423,280		79,665,607		79,665,607	
Meningkatnya penanganaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang terkelola (%)	100	100	27,228,510	100	59,853,950	100	65,839,345	100	72,423,280	100	79,665,607	100	79,665,607	
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				54,050,540		100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000	
Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan	Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan	52	52	54,050,540	55	100,000,000	60	100,000,000	65	100,000,000	70	100,000,000	75	100,000,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	(5)	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
terhadap persetujuan lingkungan yang ditertibkan	terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH (%)														
2.11.07 - PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH				15,226,190		450,000,000		500,000,000		550,000,000		600,000,000		650,000,000	
Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan Lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase MHA yang ditingkatkan kapasitasnya (%)	3	3	15,226,190	1	450,000,000	1	500,000,000	1	550,000,000	1	600,000,000	1	650,000,000	
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				31,188,430		47,000,000		52,000,000		57,000,000		62,000,000		67,000,000	
Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Lingkungan Hidup	Persentase penyuluh lingkungan hidup yang ditingkatkan kompetensinya (%)	100	100	31,188,430	100	47,000,000	100	52,000,000	100	57,000,000	100	62,000,000	100	67,000,000	
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				281,748,650		53,145,761		55,803,049		55,803,049		61,522,861		64,599,004	
Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pemgelolaan lingkungan hidup (%)	50	50	281,748,650	50	53,145,761	50	55,803,049	50	55,803,049	50	61,522,861	50	64,599,004	
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				137,456,600		54,401,600		59,841,760		65,825,936		72,408,530		79,649,383	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	(5)	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
Meningkatnya penyelesaian sengketa / kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup (%)	100	100	137,456,600	100	54,401,600	100	59,841,760	100	65,825,936	100	72,408,530	100	79,649,383	
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				5,152,954,163		6,000,000,000		6,080,000,000		5,990,000,000		6,020,000,000		6,050,000,000	
Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks kinerja pengelolaan sampah (Indeks)	74	74	5,152,954,163	48,5	6,000,000,000	49	6,080,000,000	49,5	5,990,000,000	50	6,020,000,000	51	6,050,000,000	
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				7,652,931,304		7,752,932,613		8,352,003,736		8,739,645,167		8,913,638,452		9,425,336,461	2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6,848,298,324		6,329,937,621		6,784,350,236		7,139,558,992		7,298,747,967		7,693,286,666	
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Tugas dan Fungsi	Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Berjalan Sesuai Standar (%)	93,85	94	6,848,298,324	95	6,329,937,621	96	6,784,350,236	97	7,139,558,992	98	7,298,747,967	100	7,693,286,666	
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				225,482,040		445,648,996		455,000,000		457,000,000		459,000,000		462,000,000	
Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Identitas digital (%)	8,19	8	225,482,040	20	445,648,996	20	455,000,000	20	457,000,000	20	459,000,000	20	462,000,000	
	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (%)	58	58		60		61		62		63		63		
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL				246,142,510		235,651,995		368,653,500		390,086,175		393,890,485		500,049,795	
Meningkatnya Kualitas Layanan Pencatatan Sipil	Persentase Akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan (%)	100	100	246,142,510	100	235,651,995	100	368,653,500	100	390,086,175	100	393,890,485	100	500,049,795	
	Persentase Akta Kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan (%)	98	98		98		98		98		98		98		
	Persentase Akta Perkawinan yang	61	61		61		61		62		63		63		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	diterbitkan bagi yang melaporkan (%)														
	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (%)	100	100		100		100		100		100		100		
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				113,089,000		383,087,000		384,000,000		388,000,000		392,000,000		395,000,000	
Meningkatnya pemanfaatan Informasi Kependudukan	Persentase Pemanfaatan Informasi kependudukan (%)	80	80	113,089,000	86	383,087,000	93	384,000,000	100	388,000,000	100	392,000,000	100	395,000,000	
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN				219,919,430		358,607,001		360,000,000		365,000,000		370,000,000		375,000,000	
Meningkatnya Kualitas Profil Kependudukan	Cakupan Pengelolan Profil Kependudukan (%)	100	100	219,919,430	100	358,607,001	100	360,000,000	100	365,000,000	100	370,000,000	100	375,000,000	
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				5,909,643,279		17,086,628,986		9,528,243,368		9,816,411,679		10,164,057,381		10,718,511,885	2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4,605,104,064		10,878,425,829		5,644,046,379		7,856,769,504		6,308,113,596		7,519,816,163	
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Tugas dan Fungsi	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	4,605,104,064	100	10,878,425,829	100	5,644,046,379	100	7,856,769,504	100	6,308,113,596	100	7,519,816,163	
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA				36,541,050		150,000,000		76,544,500		90,000,000		90,000,000		243,000,000	
Meningkatnya kualitas Penataan Desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa (%)	80,00	80	36,541,050	80	150,000,000	83	76,544,500	85	90,000,000	85	90,000,000	90	243,000,000	
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA						50,000,000		30,000,000		50,000,000		50,000,000		150,000,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	(5)	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
Meningkatnya Kualitas Kerjasama Desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa (%)	0	0		60	50,000,000	65	30,000,000	70	50,000,000	75	50,000,000	80	150,000,000	
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				505,238,175		5,080,891,838		3,157,949,020		1,050,685,396		2,966,987,006		1,486,719,874	
Meningkatnya Kualitas Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (%)	0	0	505,238,175	70	5,080,891,838	75	3,157,949,020	80	1,050,685,396	85	2,966,987,006	88	1,486,719,874	
	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa (%)	60,79	80		72,5		75		82,5		85		87,5		
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				762,759,990		927,311,319		619,703,469		768,956,779		748,956,779		1,318,975,848	
Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (%)	60	67,5	762,759,990	67,5	927,311,319	77,5	619,703,469	77,5	768,956,779	82,5	748,956,779	87,5	1,318,975,848	
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				10,467,090,484		12,260,743,426		11,472,274,496		13,339,873,562		13,903,479,651		14,533,566,642	2.14.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3,846,428,726		6,103,290,976		6,103,290,976		7,188,774,496		7,188,774,496		7,188,774,496	
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Tugas dan Fungsi	Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Berjalan Sesuai Standar (%)	98	100	3,846,428,726	100	6,103,290,976	100	6,103,290,976	100	7,188,774,496	100	7,188,774,496	100	7,188,774,496	
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				424,629,550		567,994,150		576,489,976		576,489,976		576,489,976		576,489,976	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	(5)	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
Terkendalinya Pertambahan jumlah penduduk	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) (Angka)	2,24	2,24	424,629,550	2,23	567,994,150	2,22	576,489,976	2,21	576,489,976	2,2	576,489,976	2,19	576,489,976	
	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Angka)	23,1	23,1		23		22		21		20		18		
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				4,200,012,500		4,289,458,300		3,292,493,544		3,874,609,090		4,438,215,179		4,438,215,179	
meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan keluarga berencana	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalensi Rate/mCPR) (%)	70,65	71,69	4,200,012,500	72,04	4,289,458,300	72,39	3,292,493,544	72,74	3,874,609,090	73,09	4,438,215,179	73,44	4,438,215,179	
	Persentasse kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) (%)	8,14	8,14		8,12		8,1		8,08		8,06		8		
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				1,996,019,708		1,300,000,000		1,500,000,000		1,700,000,000		1,700,000,000		2,330,086,991	
Meningkatnya Pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera	Presentase Keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga (%)	50,94	50,94	1,996,019,708	60	1,300,000,000	65	1,500,000,000	70	1,700,000,000	75	1,700,000,000	80	2,330,086,991	
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				28,137,524,059		30,184,701,178		36,376,092,965		131,035,203,712		138,375,326,269		141,126,700,269	
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5,612,917,987		12,976,451,112		14,462,927,262		13,421,427,262		13,494,927,262		13,967,427,262	2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Tugas dan Fungsi	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	5,612,917,987	100	12,976,451,112	100	14,462,927,262	100	13,421,427,262	100	13,494,927,262	100	13,967,427,262	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				20,808,826,572		14,018,096,816		17,540,012,453		111,264,623,200		113,619,245,757		117,039,119,757	
Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Konektivitas darat (Rasio)	0,47	0,53	20,808,826,572	0,6	14,018,096,816	0,67	17,540,012,453	0,73	111,264,623,200	0,8	113,619,245,757	0,87	117,039,119,757	
	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (%)	39,2	44,65		45,33		46,01		47,89		49,78		51,67		
2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN				783,368,500		1,190,153,250		2,373,153,250		5,849,153,250		10,761,153,250		9,320,153,250	
Meningkatnya kualitas layanan Transportasi danau	Konektivitas danau (Rasio)	0,58	0,67	783,368,500	0,75	1,190,153,250	0,83	2,373,153,250	0,92	5,849,153,250	1	10,761,153,250	1	9,320,153,250	
2.15.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN				932,411,000		2,000,000,000		2,000,000,000		500,000,000		500,000,000		800,000,000	
Tersedianya dokumen perencanaan Bandar Udara yang telah disetujui	Persentase Dokumen Perencanaan Bandar Udara (%)	20	40	932,411,000	100	2,000,000,000	100	2,000,000,000	100	500,000,000	100	500,000,000	100	800,000,000	
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				16,065,267,481		14,584,782,305		14,879,401,862		15,323,136,909		15,706,215,332		16,098,870,714	
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				7,624,670,741		8,182,333,271		8,386,891,602		8,596,563,893		8,811,477,990		9,031,764,939	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Tugas dan Fungsi	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	3,631,945,400	100	8,182,333,271	100	8,386,891,602	100	8,596,563,893	100	8,811,477,990	100	9,031,764,939	
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				4,330,748,640		3,470,090,690		3,556,842,957		3,645,764,031		3,736,908,132		3,830,330,835	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	(5)	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi publik pemerintah daerah	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%)	0	70	4,330,748,640	75	3,470,090,690	80	3,556,842,957	85	3,645,764,031	90	3,736,908,132	95	3,830,330,835	
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				4,109,848,100		2,932,358,344		2,935,667,303		3,080,808,985		3,157,829,210		3,236,774,940	
Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Persentase Aplikasi Pemerintah Daerah Yang Terintegrasi (%)	0	30	4,109,848,100	32	2,932,358,344	35	2,935,667,303	39	3,080,808,985	44	3,157,829,210	50	3,236,774,940	
	Persentase Perangkat Daerah Yang Terkoneksi Dengan Jaringan Internet Intra Pemerintah Daerah (%)	97	97		100		100		100		100		100		
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				5,668,907,884		14,305,762,508		14,730,383,276		13,407,680,588		14,002,392,659		14,513,209,868	3.30.2.17.3.31.01.0000 - Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4,855,394,234		7,786,385,802		7,808,797,339		7,389,017,273		7,573,742,705		7,763,086,272	
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Tugas dan Fungsi	Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Berjalan Sesuai Standar (%)	97	97	4,855,394,234	96	7,786,385,802	96,5	7,808,797,339	97	7,389,017,273	97,5	7,573,742,705	98	7,763,086,272	
2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM				21,523,850		127,000,000		130,000,000		135,000,000		137,000,000		138,000,000	
Meningkatnnya Kualitas layanan izin usaha simpan pinjam	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (%)	12,65	5,65	21,523,850	6	127,000,000	6,15	130,000,000	6,33	135,000,000	6,46	137,000,000	6,62	138,000,000	
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				118,145,200		260,000,000		190,000,000		70,000,000		100,000,000		120,000,000	
Meningkatnnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (%)	34,44	29,5	118,145,200	32,63	260,000,000	32,82	190,000,000	34,44	70,000,000	36,13	100,000,000	38,99	120,000,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI				49,591,700		45,000,000		54,086,691		55,500,000		62,370,000		76,450,000	
Meningkatnnya Kinerja dan pengelolaan koperasi	Persentase Koperasi Aktif (%)	34,34	33,82	49,591,700	38,24	45,000,000	48,42	54,086,691	58,61	55,500,000	68,79	62,370,000	78,96	76,450,000	
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				0		110,000,000		100,370,000		110,370,000		115,370,000		93,445,354	
Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (%)	14,12	10,5	0	10,71	110,000,000	12,18	100,370,000	14,12	110,370,000	15,61	115,370,000	16,01	93,445,354	
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				108,018,900		225,000,000		325,000,000		325,000,000		375,000,000		385,000,000	
Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (%)	34,44	31,21	108,018,900	32,63	225,000,000	32,82	325,000,000	34,44	325,000,000	36,13	375,000,000	38,99	385,000,000	
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				278,477,000		2,212,376,706		2,289,129,246		2,512,793,315		2,668,909,954		2,807,228,242	
Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (%)	50	38	278,477,000	40	2,212,376,706	45	2,289,129,246	50	2,512,793,315	55	2,668,909,954	60	2,807,228,242	
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				237,757,000		3,540,000,000		3,833,000,000		2,810,000,000		2,970,000,000		3,130,000,000	
Meningkatnnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor (%)	5,19	5,19	237,757,000	10,76	3,540,000,000	11	3,833,000,000	11	2,810,000,000	11	2,970,000,000	11	3,130,000,000	
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				15,760,068,813		13,284,038,906		9,435,751,923		9,145,055,496		9,249,865,786		10,031,130,300	2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				15,127,362,463		12,152,358,575		7,202,451,923		7,586,631,496		7,675,871,472		8,370,321,157	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Tugas dan Fungsi	Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Berjalan Sesuai Standar (%)	95	95	15,127,362,463	96	12,152,358,575	97	7,202,451,923	98	7,586,631,496	99	7,675,871,472	100	8,370,321,157	
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				62,126,600		65,000,000		820,000,000		69,000,000		65,112,594		69,125,972	
Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi (Angka)	90	90	62,126,600	90	65,000,000	90	820,000,000	90	69,000,000	90	65,112,594	90	69,125,972	
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				101,406,100		326,180,331		450,000,000		465,000,000		470,000,000		490,000,000	
Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (%)	100	100	101,406,100	100	326,180,331	100	450,000,000	100	465,000,000	100	470,000,000	100	490,000,000	
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				253,960,250		450,000,000		550,000,000		590,000,000		600,000,000		650,000,000	
Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Persentase Pelaku Usaha yang memperoleh Izin sesuai Ketentuan (%)	94	95	253,960,250	95	450,000,000	95	550,000,000	95	590,000,000	95	600,000,000	95	650,000,000	
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				197,955,400		250,000,000		370,800,000		390,924,000		393,381,720		405,183,171	
Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam membuka Usaha (%)	95	95	197,955,400	95	250,000,000	95	370,800,000	95	390,924,000	95	393,381,720	95	405,183,171	
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				17,258,000		40,500,000		42,500,000		43,500,000		45,500,000		46,500,000	
Meningkatnya Pemanfaatan dan Informasi Penanaman Modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (%)	0	75	17,258,000	75	40,500,000	75	42,500,000	75	43,500,000	75	45,500,000	75	46,500,000	
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				12,418,848,448		11,286,703,330		11,431,703,330		11,496,703,330		10,506,703,330		11,801,703,330	3.26.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				4,150,690,498		2,990,000,000		3,035,000,000		3,100,000,000		3,110,000,000		4,155,000,000	
Meningkatnya kemandirian dan kontribusi pemuda dalam pembangunan ekonomi melalui kewirausahaan	Persentase tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Pengembangan Kepemudaan (%)	0	6,28	4,150,690,498	6,28	2,990,000,000	6,3	3,035,000,000	6,32	3,100,000,000	6,34	3,110,000,000	6,36	4,155,000,000	
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				7,768,157,950		7,796,703,330		7,796,703,330		7,796,703,330		6,796,703,330		6,796,703,330	
Meningkatnya prestasi dan daya saing atlet daerah pada tingkat regional, nasional, maupun internasional	Persentase tingkat prestasi olahraga (%) (%)	0	85	7,768,157,950	85,5	7,796,703,330	86	7,796,703,330	86,5	7,796,703,330	87	6,796,703,330	87	6,796,703,330	
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN				500,000,000		500,000,000		600,000,000		600,000,000		600,000,000		850,000,000	
Meningkatnya keterlibatan dan peran aktif masyarakat dalam kegiatan kepramukaan sebagai bagian dari pembentukan karakter dan wawasan kebangsaan	persentase gugus depan yang aktif (%)	95	98	500,000,000	99	500,000,000	100	600,000,000	100	600,000,000	100	600,000,000	100	850,000,000	
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				157,092,000		131,092,000		134,369,300		137,728,533		141,171,746		144,701,039	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				157,092,000		131,092,000		134,369,300		137,728,533		141,171,746		144,701,039	
Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas data Sektoral Pemerintah Daerah untuk Mendukung Perencanaan dan	Persentase Perangkat Daerah yang menjadi produsen data sektoral aktif (%)	0	50	157,092,000	52	131,092,000	55	134,369,300	59	137,728,533	64	141,171,746	70	144,701,039	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
Pengambilan Keputusan															
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				35,884,100		52,709,400		124,027,135		55,377,813		56,762,259		58,181,315	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				35,884,100		52,709,400		124,027,135		55,377,813		56,762,259		58,181,315	
Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah (%)	0	0	35,884,100	27	52,709,400	33	124,027,135	39,7	55,377,813	44,7	56,762,259	48,7	58,181,315	
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				1,836,594,700		294,994,800		1,655,000,000		365,000,000		395,000,000		735,000,000	1.01.2.22.1.01.01.0000 - Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				1,688,835,400		169,994,800		1,500,000,000		200,000,000		220,000,000		550,000,000	
Meningkatnya Warisan Budaya Yang Dilestarikan	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (%)	0	10	1,688,835,400	30	169,994,800	50	1,500,000,000	70	200,000,000	95	220,000,000	100	550,000,000	
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL				36,530,000		30,000,000		30,000,000		30,000,000		30,000,000		30,000,000	
Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kesenian Tradisional	Presentase Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kesenian Tradisional (%)	0	10	36,530,000	20	30,000,000	40	30,000,000	60	30,000,000	80	30,000,000	100	30,000,000	
2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH				0		25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000	
Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Informasi Sejarah	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Sejarah Lokal (%)	0	100	0	100	25,000,000	100	25,000,000	100	25,000,000	100	25,000,000	100	25,000,000	
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA				111,229,300		70,000,000		100,000,000		110,000,000		120,000,000		130,000,000	
Tercapainya Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan	Presentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya tak	100	40	111,229,300	55	70,000,000	70	100,000,000	85	110,000,000	95	120,000,000	100	130,000,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Budaya tak benda yang ditetapkan	benda yang ditetapkan (%)														
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				5,504,739,279		6,754,020,575		6,875,105,628		7,055,437,243		8,236,827,149		8,428,389,303	2.23.2.24.0.00.01.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4,965,217,129		6,044,960,085		6,036,820,928		6,209,152,543		7,387,542,449		7,579,104,603	
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Tugas dan Fungsi	Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Berjalan Sesuai Standar (%)	98,71	98,71	4,965,217,129	98,71	6,044,960,085	98,85	6,036,820,928	98,9	6,209,152,543	98,96	7,387,542,449	98,96	7,579,104,603	
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				539,522,150		689,061,700		808,284,700		816,284,700		819,284,700		819,284,700	
Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai NSPK	Nilai tingkat kegemaran mambaca masyarakat (%)	71,35	73	539,522,150	74	689,061,700	74,05	808,284,700	75	816,284,700	76	819,284,700	76,05	819,284,700	
2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO				0		19,998,790		30,000,000		30,000,000		30,000,000		30,000,000	
Meningkatnya pelestarian budaya daerah	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki (%)	0	0	0	100	19,998,790	100	30,000,000	100	30,000,000	100	30,000,000	100	30,000,000	
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				202,066,200		361,359,550		418,159,000		420,159,000		425,659,000		425,659,000	2.23.2.24.0.00.01.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				173,167,150		342,342,800		370,218,000		370,218,000		375,218,000		375,218,000	
Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Tingkat Ketersediaan Arsip (%)	100	100	173,167,150	100	342,342,800	100	370,218,000	100	370,218,000	100	375,218,000	100	375,218,000	
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP				24,611,450		12,927,750		37,941,000		37,941,000		37,941,000		37,941,000	
Meningkatnya perlindungan arsip	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (%)	100	100	24,611,450	100	12,927,750	100	37,941,000	100	37,941,000	100	37,941,000	100	37,941,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
dan penyelamatan arsip sesuai NSPK															
2.24.04 - PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP				4,287,600		6,089,000		10,000,000		12,000,000		12,500,000		12,500,000	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup (%)	25	100	4,287,600	100	6,089,000	100	10,000,000	100	12,000,000	100	12,500,000	100	12,500,000	
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				20,170,420,676		22,820,307,700		22,950,873,567		22,550,873,567		23,050,873,567		23,250,873,567	3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perikanan
3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5,314,165,137		7,689,273,567		7,783,873,567		7,883,873,567		8,183,873,567		8,383,873,567	
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Tugas dan Fungsi	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	90,34	100	5,314,165,137	92	7,689,273,567	95	7,783,873,567	97	7,883,873,567	99	8,183,873,567	99	8,383,873,567	
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				5,897,337,450		5,535,000,000		5,517,000,000		5,517,000,000		5,517,000,000		5,517,000,000	
Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	10.481,44	11.41	5,897,337,450	10,798	5,535,000,000	11,014	5,517,000,000	11,234	5,517,000,000	11,515	5,517,000,000	11,803	5,517,000,000	
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				8,265,702,289		6,500,000,000		6,700,000,000		6,200,000,000		6,400,000,000		6,400,000,000	
Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	385.613,16	416.897	8,265,702,289	458,587	6,500,000,000	504,445	6,700,000,000	554,889	6,200,000,000	610,378	6,400,000,000	671,416	6,400,000,000	
3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN				56,496,500		500,000,000		660,000,000		660,000,000		660,000,000		660,000,000	
Meningkatnya peran serta masyarakat pesisir dalam pengawasan	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan-	96	96	56,496,500	97	500,000,000	97	660,000,000	98	660,000,000	98	660,000,000	98	660,000,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
sumberdaya kelautan dan perikanan	perundangan yang berlaku (%)														
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				636,719,300		2,596,034,133		2,290,000,000		2,290,000,000		2,290,000,000		2,290,000,000	
Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	47,15	47,59	636,719,300	48,03	2,596,034,133	48,47	2,290,000,000	48,91	2,290,000,000	49,35	2,290,000,000	49,79	2,290,000,000	
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				9,114,251,178		12,683,195,710		12,834,228,186		13,330,108,938		13,983,642,855		16,653,110,384	3.26.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4,935,905,365		8,706,294,210		9,065,981,611		9,483,452,034		9,961,153,008		10,366,996,047	
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Tugas dan Fungsi	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	98	98	4,935,905,365	100	8,706,294,210	100	9,065,981,611	100	9,483,452,034	100	9,961,153,008	100	10,366,996,047	
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				2,672,750,963		1,150,000,000		800,000,000		730,000,000		750,000,000		850,000,000	
Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Jumlah Kunjungan Wisatawan (%)	100	100	2,672,750,963	100	1,150,000,000	100	800,000,000	100	730,000,000	100	750,000,000	100	850,000,000	
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				1,366,393,000		1,711,449,500		1,797,021,975		1,886,871,074		1,981,214,726		2,080,275,461	
Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Event Pemasaran yang di Laksanakan/di Ikuti (%)	100	100	1,366,393,000	100	1,711,449,500	100	1,797,021,975	100	1,886,871,074	100	1,981,214,726	100	2,080,275,461	
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				139,201,850		1,115,452,000		1,171,224,600		1,229,785,830		1,291,275,121		3,355,838,876	
Meningkatnya jumlah pelaku ekonomi kreatif yang mandiri dan berdaya saing	Persentase peningkatan kapasitas sdm pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif (%)	7,7	7,7	139,201,850	8	1,115,452,000	8,3	1,171,224,600	8,6	1,229,785,830	8,9	1,291,275,121	9,2	3,355,838,876	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	(5)	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				50602440215.20		43,460,658,117		36,855,082,050		38,417,018,540		38,516,780,119		40,049,452,547	3.27.2.09.0.00.01.0000 - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				25253268716.20		27,758,266,000		22,800,000,000		23,000,000,000		23,500,000,000		24,400,000,000	
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Ton/Tahun)	22.099,62	5.352,59	25,253,268,716	5,608,18	27,758,266,000	5,873,46	22,800,000,000	5,973,31	23,000,000,000	6,253,53	23,500,000,000	6,362,96	24,400,000,000	
	Peningkatan Produksi Tanaman hortikultura (Ton/Tahun)	740,58	543,92		832,2		857,17		1,177,17		2,707,5		1,606,84		
	Peningkatan Produksi Tanaman perkebunan (Ton/Tahun)	-32.109,25	5.586,83		6,169,68		6,775,22		10,888,03		12,481,21		14,402,75		
	Peningkatan Produksi Komoditas peternakan (Ton/Tahun)	461,4	54,17		60,35		72,54		87,84		99,05		107,64		
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				22,985,491,949		10,172,479,285		10,787,882,050		12,021,218,540		11,487,380,119		11,961,452,547	
Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	cakupan luas lahan pertanian yang menjadi lahan pangan berkelanjutan (%)	75,02	75,02	22,985,491,949	75,02	10,172,479,285	75,02	10,787,882,050	75,02	12,021,218,540	75,02	11,487,380,119	75,02	11,961,452,547	
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				512,679,000		1,050,000,000		850,000,000		990,000,000		1,135,000,000		1,280,000,000	
Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Dokumen)	1	1	512,679,000	1	1,050,000,000	1	850,000,000	1	990,000,000	1	1,135,000,000	1	1,280,000,000	
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				373,199,750		3,063,600,000		1,077,200,000		1,090,800,000		1,104,400,000		1,118,000,000	
Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (%)	95	95	373,199,750	100	3,063,600,000	100	1,077,200,000	100	1,090,800,000	100	1,104,400,000	100	1,118,000,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				1,477,800,800		1,416,312,832		1,340,000,000		1,315,000,000		1,290,000,000		1,290,000,000	
Meningkatnya Kapasitas SDM penyuluh pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (%)	100	100	1,477,800,800	100	1,416,312,832	100	1,340,000,000	100	1,315,000,000	100	1,290,000,000	100	1,290,000,000	
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				17,880,499,205		6,151,953,755		6,271,781,538		5,148,972,910		5,317,193,910		5,571,193,910	3.30.2.17.3.31.01.0000 - Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN				0		550,000,000		850,000,000		550,000,000		550,000,000		550,000,000	
Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (%)	0	0	0	10	550,000,000	10	850,000,000	10	550,000,000	10	550,000,000	10	550,000,000	
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				17,039,580,631		3,854,453,800		3,959,463,175		3,165,463,175		3,361,463,175		3,569,463,175	
Meningkatnnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (%)	10	10	17,039,580,631	20	3,854,453,800	20	3,959,463,175	20	3,165,463,175	20	3,361,463,175	20	3,569,463,175	
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				518,643,156		803,642,855		553,461,263		494,652,635		441,873,635		462,873,635	
Meningkatnnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (%)	7,8	7,8	518,643,156	8,5	803,642,855	8	553,461,263	7,8	494,652,635	7,5	441,873,635	7,5	462,873,635	
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				242,262,418		355,000,000		320,000,000		350,000,000		375,000,000		400,000,000	
Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai Ekspor Barang (Nilai)	15	15	242,262,418	1,15	355,000,000	1,3	320,000,000	1,3	350,000,000	1,3	375,000,000	1,3	400,000,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				80,013,000		588,857,100		588,857,100		588,857,100		588,857,100		588,857,100	
Meningkatnnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase penanganan pengaduan konsumen (%)	5	5	80,013,000	100	588,857,100	100	588,857,100	100	588,857,100	100	588,857,100	100	588,857,100	
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				701,332,550		3,822,924,810		3,885,492,285		3,837,995,027		3,694,736,046		3,963,255,237	3.30.2.17.3.31.01.0000 - Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Dan Perindustrian
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				668,736,550		3,507,168,300		3,566,383,185		3,665,602,872		3,543,717,536		3,812,236,727	
Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (%)	1	98	668,736,550	97,6	3,507,168,300	97,9	3,566,383,185	98,2	3,665,602,872	98,5	3,543,717,536	98,8	3,812,236,727	
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI				15,543,000		264,738,000		240,000,000		71,373,645		50,000,000		50,000,000	
Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor industri	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (%)	91,66	20	15,543,000	21	264,738,000	21,5	240,000,000	22	71,373,645	22,5	50,000,000	23	50,000,000	
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				17,053,000		51,018,510		79,109,100		101,018,510		101,018,510		101,018,510	
Meningkatnnya pemanfaatan informasi industri	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini (%)	1	1	17,053,000	1	51,018,510	1	79,109,100	1	101,018,510	1	101,018,510	1	101,018,510	
3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				1,058,757,600		813,446,650		1,200,000,000		1,200,000,000		1,240,000,000		1,385,000,000	3.32.2.07.3.31.01.0000 - Dinas Transmigrasi, Dan Tenaga Kerja
3.32.02 - PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI				213,720,000		156,780,000		150,000,000		155,000,000		170,000,000		280,000,000	
Terlaksananya Penetapan Kawasan Transmigrasi	Persentase Penetapan Kawasan Transmigran (%)	100	100	213,720,000	100	156,780,000	100	150,000,000	100	155,000,000	100	170,000,000	100	280,000,000	
3.32.03 - PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI				204,271,500		176,856,500		385,000,000		395,000,000		405,000,000		425,000,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	(5)	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
Meningkatnya Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang (%)	100	100	204,271,500	100	176,856,500	100	385,000,000	100	395,000,000	100	405,000,000	100	425,000,000	
3.32.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI				640,766,100		479,810,150		665,000,000		650,000,000		665,000,000		680,000,000	
Meningkatnya Pengembangan Kawasan dan Pembinaan Transmigrasi	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan (%)	100	100	640,766,100	100	479,810,150	100	665,000,000	100	650,000,000	100	665,000,000	100	680,000,000	
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH				113,830,834,049		120,110,745,983.50		118,270,783,393.02		118,171,762,371		133,118,957,276		138,639,561,190	4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				37,649,020,317		38,993,190,636.50		38,974,648,524.02		38,588,395,323		43,384,592,860		45,905,196,775	
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Tugas dan Fungsi	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	94,63	100	37,649,020,317	100	38,993,190,636.50	100	38,974,648,524.02	100	38,588,395,323	100	43,384,592,860	100	45,905,196,775	
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				74,980,147,650		78,455,237,080		76,719,430,500		76,799,430,500		86,869,430,500		89,869,430,499	
Meningkatnya Kualitas Produk Hukum yang dihasilkan dan terselesaikannya penanganan perkara dan permasalahan hukum	Persentase Produk Hukum yang dihasilkan (%)	100	100		100	925,000,000	100	975,000,000	100	975,000,000	100	1,050,000,000	100	1,050,000,000	
	Persentase Perkara dan Permasalahan hukum yang ditangani (%)	100	100		100		100		100		100		100		
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai LPPD (Nilai)	3,005	3,042		3,072	560,261,000	3,087	560,261,000	30,945	570,261,000	30,982	570,261,000	31,002	570,261,000	
Meningkatnya kualitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan (%)	100	100		100	76,969,976,080	100	75,184,169,500	100	75,254,169,500	100	85,249,169,500	100	88,249,169,499	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				1,201,666,082		2,662,318,267		2,576,704,369		2,783,936,548		2,864,933,916		2,864,933,916	
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang dilaksanakan (%)	100	100	1,201,666,082	100	882,483,270	100	796,869,372	100	1,004,101,551	100	1,085,098,919	100	1,085,098,919	
Meningkatnya Kualitas Layanan pengadaan Barang dan Jasa	Tingkat Kematangan UKPBJ (Angka)	35,56	35,82		35,87	1,779,834,997	36	1,779,834,997	36,5	1,779,834,997	37,01	1,779,834,997	37,1	1,779,834,997	
4.02 - SEKRETARIAT DPRD				42,694,299,444		52,788,397,755		52,757,796,037		52,711,560,476		52,637,377,951		52,816,532,000	4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat DPRD
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				28,488,550,294		29,536,006,471		29,924,156,471		29,782,099,921		30,796,752,682		30,950,328,992	
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Tugas dan Fungsi	Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Berjalan Sesuai Standar (%)	92	92	28,488,550,294	93	29,536,006,471	96	29,924,156,471	98	29,782,099,921	100	30,796,752,682	98	30,950,328,992	
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				14,205,749,150		23,252,391,284		22,833,639,566		22,929,460,555		21,840,625,269		21,866,203,008	
Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (%)	90	90	14,205,749,150	92	7,800,930,284	95	7,780,794,016	97	7,803,745,905	98	6,724,482,919	98	6,750,488,358	
Meningkatnya Kualitas Penganggaran dan Pengawasan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (%)	100	100		100	15,451,461,000	100	15,052,845,550	100	15,125,714,650	100	15,116,142,350	100	15,115,714,650	
5.01 - PERENCANAAN				9,060,278,683		11,606,390,648		11,709,391,648		11,974,691,648		11,915,041,648		12,911,491,648	5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6,399,827,733		9,198,741,648		9,258,741,648		9,258,741,648		9,358,741,648		9,458,741,648	
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat	Persentase Rata-Rata Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	6,399,827,733	100	9,198,741,648	100	9,258,741,648	100	9,258,741,648	100	9,358,741,648	100	9,458,741,648	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	(5)	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
Daerah Sesuai Tugas dan Fungsi															
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				1,792,847,500		1,150,000,000		1,170,000,000		1,150,000,000		1,250,000,000		1,600,000,000	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (%)	100	100	1,792,847,500	100	1,150,000,000	100	1,170,000,000	100	1,150,000,000	100	1,250,000,000	100	1,600,000,000	
	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (%)	100	100		100		100		100		100		100		
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				867,603,450		1,257,649,000		1,280,650,000		1,565,950,000		1,306,300,000		1,852,750,000	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (%)	100	100	867,603,450	100	603,634,445	100	551,018,627	100	657,750,000	100	511,932,000	100	699,878,000	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (%)	100	100		100	340,874,555	100	377,970,000	100	468,440,000	100	408,320,000	100	590,968,000	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (%)	100	100		100	313,140,000	100	351,661,373	100	439,760,000	100	386,048,000	100	561,904,000	
5.02 - KEUANGAN				366,662,606,825.92		447,849,291,896		461,302,330,585		474,330,780,858		486,055,703,618		617,934,175,134	
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				90,488,116,240		99,858,780,368		107,868,300,118		119,350,038,197		122,041,604,967		124,125,705,972	
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	95	95	74,387,017,279	96	81,091,423,618	96,5	86,912,444,232	97	97,870,285,914	97,5	99,081,503,638	98	101,558,541,229	5.02.0.00.0.00.01.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	(5)	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
Daerah Sesuai Tugas dan Fungsi															
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Tugas dan Fungsi	Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Berjalan Sesuai Standar (%)	83,37	100	16,101,098,961	100	18,767,356,750	100	20,955,855,886	100	21,479,752,283	100	22,960,101,329	100	22,567,164,743	5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pendapatan Daerah
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				272,662,453,886		345,616,814,622		351,375,230,467		350,259,342,661		360,249,898,651		487,891,369,162	
Meningkatnya Tata Kelola Anggaran	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (%)	47,09	37,57		38,79		40		41,35		42,35		44,5		
	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (%)	27,35	32,79		34,36	1,662,266,650	30	1,745,379,985	30	1,832,648,982	30	1,924,281,431	30	2,020,495,502	
Meningkatnya Tata Kelola Perbendaharaan	Persentase Penurunan SILPA (%)	79,76	76		75		73		72		71		70		5.02.0.00.0.00.01.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah
	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (%)	90	90		90,5	548,372,500	91	575,791,126	91,5	604,580,681	92	634,809,715	92,5	666,550,201	
Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu (%)	100	100		100	1,260,974,250	100	1,324,022,963	100	1,390,224,111	100	1,459,735,316	100	1,532,722,084	
meningkatnya akuntabilitas proses penyaluran bantuan keuangan daerah	Persentase Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Keuangan ke Desa dan Pengelolaan Dana Darurat (%)	100	100	272,662,453,886	100	342,145,201,222	100	347,730,036,393	100	346,431,888,887	100	356,231,072,189	100	483,671,601,375	
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				1,297,326,500		696,316,206		773,400,000		808,700,000		824,000,000		947,900,000	5.02.0.00.0.00.01.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah
Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Penambahan nilai Aset tetap (%)	8,97	8,99	1,297,326,500	9	696,316,206	9,1	773,400,000	9,3	808,700,000	9,4	824,000,000	9,5	947,900,000	
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				2,214,710,200.00		1,677,380,700		1,285,400,000		3,912,700,000		2,940,200,000		4,969,200,000	5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pendapatan Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	(5)	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
Meningkatnya Upaya Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan	Persentase PAD terhadap Pendapatan (%)	20,95	23,28		23,79		29,06		30,56		31,83		31,94		
Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pelaporan	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan (%)	0	0	2,214,710,200.00	90,5	1,677,380,700	91	1,285,400,000	91,5	3,912,700,000	92	2,940,200,000	92,5	4,969,200,000	
Meningkatnya Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital (%)	0	0		90,5		91		91,5		92		92,5		
5.03 - KEPEGAWAIAN				7,116,414,504		9,626,572,798		9,993,804,679		10,113,804,679		10,213,804,679		10,313,804,679	
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5,085,064,554		5,820,103,048		7,317,065,564		6,459,270,471		7,143,993,000		6,624,607,343	
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Tugas dan Fungsi	Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Berjalan Sesuai Standar (%)	97	98	5,085,064,554	98	5,820,103,048	98	7,317,065,564	99	6,459,270,471	99	7,143,993,000	100	6,624,607,343	
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				2,031,349,950		3,806,469,750		2,676,739,115		3,654,534,208		3,069,811,679		3,689,197,336	5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Produktivitas serta Budaya kerja yang Positif	Persentase penyelesaian layanan kepegawaian (%)	95	96	2,031,349,950	96	3,806,469,750	96	2,676,739,115	97	3,654,534,208	98	3,069,811,679	98	3,689,197,336	
	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (%)	95	96		96		96		97		98		98		
	Persentase Pelayanan Mutasi yang Terselesaikan (%)	97	93		93		93,5		92		94		88,5		
	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya (%)	95,5	77,4		77,4		78		78		78,5		79,3		
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				1,700,218,000		6,650,957,000		6,274,390,000		6,374,390,000		6,474,390,000		6,574,390,000	
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				1,700,218,000		6,650,957,000		6,274,390,000		6,374,390,000		6,474,390,000		6,574,390,000	5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	(5)	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
Meningkatnya Jumlah ASN yang Mampu Menyelesaikan TUPOKSInya secara Efektif dan Efisien	Persentase ASN yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan fungsional (%)	7,28	13,41	1,700,218,000	13,41	6,650,957,000	4,31	6,274,390,000	4,31	6,374,390,000	3,97	6,474,390,000	4,65	6,574,390,000	
	Persentase ASN yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi teknis melalui BKPSDM (%)	5,62	2,79		2,79		3,88		3,35		3,22		3,35		
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				1,275,493,000		680,777,414		820,000,000		835,000,000		845,000,000		830,000,000	
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				1,275,493,000		255,600,000		376,200,000		190,000,000		275,600,000		340,000,000	
Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (%)	100	100	1,275,493,000	100	255,600,000	100	376,200,000	100	190,000,000	100	275,600,000	100	340,000,000	5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH				0		425,177,414		443,800,000		645,000,000		569,400,000		490,000,000	
Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (%)	100	100	0	100	425,177,414	100	443,800,000	100	645,000,000	100	569,400,000	100	490,000,000	
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH				23,625,445,495		23,724,364,801		24,317,473,921		24,925,410,769		25,548,546,038		26,187,259,689	
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				13,408,247,920		13,490,223,301		13,768,832,921		14,379,870,269		13,736,329,038		13,931,042,689	
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Tugas dan Fungsi	Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Berjalan Sesuai Standar (%)	100	100	13,408,247,920	100	13,490,223,301	100	13,768,832,921	100	14,379,870,269	100	13,736,329,038	100	13,931,042,689	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				7,737,617,975		7,567,398,500		7,815,390,000		7,826,614,500		8,961,567,000		9,405,567,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	(5)	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
Meningkatnya kepatuhan perangkat daerah terhadap rekomendasi hasil pengawasan	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (%)	92,2	92,3	7,737,617,975	92,5	7,567,398,500	92,7	7,815,390,000	93	7,826,614,500	93,3	8,961,567,000	93,5	9,405,567,000	
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				2,479,579,600		2,666,743,000		2,733,251,000		2,718,926,000		2,850,650,000		2,850,650,000	
Meningkatnya efektivitas perumusan kebijakan, pendampingan, dan asistensi pengawasan internal kepada perangkat daerah	Persentase OPD yang SPIP nya berada pada Level 3 (Terdefinisi) (%)	0	75	2,479,579,600	75	2,666,743,000	80	2,733,251,000	85	2,718,926,000	90	2,850,650,000	95	2,850,650,000	
	Nilai Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerimtah (APIP) (Nilai)	3,02	3,02		3,03		3,04		3,05		3,06		3,07		
7.01 - KECAMATAN				37,512,485,093		43,585,861,506		45,053,359,537		46,606,967,785		48,664,496,224		50,516,291,323	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				35,038,131,803		40,698,128,370		41,788,315,075		43,146,150,146		45,122,082,310		46,833,778,366	
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Tugas dan Fungsi	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	3,402,389,967	100	3,589,197,674	100	3,674,197,674	100	3,909,197,674	100	4,009,197,674	100	4,114,111,593	7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Burau
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Tugas dan Fungsi	Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Berjalan Sesuai Standar (%)	100	100	2,900,993,435	100	3,220,903,982	100	3,306,903,982	100	3,429,903,982	100	3,517,903,981	100	3,617,903,982	7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kecamatan Wotu
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Tugas dan Fungsi	Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Berjalan Sesuai Standar (%)	100	100	4,472,430,125	100	5,235,964,036	100	5,377,864,106	100	5,434,222,163	100	5,555,926,606	100	5,652,834,006	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Tomoni

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	(5)	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Tugas dan Fungsi	Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Berjalan Sesuai Standar (%)	100	100	2,874,272,457	100	3,019,633,852	100	3,161,179,081	100	3,322,279,081	100	3,471,879,081	100	3,625,179,081	7.01.0.00.0.00.05.0000 - Kecamatan Tomoni Timur
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Tugas dan Fungsi	Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Berjalan Sesuai Standar (%)	100	100	2,575,439,045	100	3,273,951,776	100	3,309,533,115	100	3,386,902,188	100	3,472,505,488	100	3,566,312,789	7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Mangkutana
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Tugas dan Fungsi	Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Berjalan Sesuai Standar (%)	100	100	2,485,296,504	100	3,225,833,409	100	3,308,040,377	100	3,381,073,812	100	3,460,333,082	100	3,547,873,834	7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Kalaena
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Tugas dan Fungsi	Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Berjalan Sesuai Standar (%)	98,11	100	2,814,049,305	100	3,098,197,292	100	3,366,233,526	100	3,635,148,423	100	3,581,307,291	100	3,839,230,680	7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Angkona
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Tugas dan Fungsi	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	3,965,512,503	100	4,698,971,463	100	4,846,153,150	100	4,911,080,200	100	5,044,700,459	100	5,181,661,225	7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kecamatan Malili
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Tugas dan Fungsi	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	2,470,711,594	100	3,287,004,120	100	3,366,840,316	100	3,446,413,481	100	3,529,853,235	100	3,624,063,795	7.01.0.00.0.00.09.0000 - Kecamatan Wasuponda
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Tugas dan Fungsi	Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Berjalan Sesuai Standar (%)	100	100	3,481,811,410	100	3,908,269,905	100	4,007,505,763	100	4,111,038,506	100	4,216,682,459	100	4,646,964,551	7.01.0.00.0.00.10.0000 - Kecamatan Towuti
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Tugas dan Fungsi	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	3,595,225,458	100	4,140,200,861	100	4,063,863,985	100	4,178,890,636	100	5,261,792,954	100	5,417,642,830	7.01.0.00.0.00.11.0000 - Kecamatan Nuha

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	(5)	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				125,028,350		415,190,800		447,858,600		528,256,300		532,586,540		542,867,544	
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berjalan sesuai standar (%)	100	100	4,745,000	100	20,655,000	100	20,655,000	100	20,655,000	100	20,655,000	100	20,655,000	7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Burau
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berjalan sesuai standar (%)	100	100	6,019,500	100	10,523,500	100	12,523,500	100	12,523,500	100	12,523,500	100	12,523,500	7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kecamatan Wotu
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berjalan sesuai standar (%)	100	100	10,270,000	100	15,000,000	100	15,000,000	100	15,000,000	100	15,000,000	100	15,000,000	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Tomoni
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%)	100	100	10,745,500	100	30,000,000	100	40,000,000	100	40,000,000	100	40,000,000	100	40,000,000	7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Mangkutana
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berjalan sesuai standar (%)	100	100	22,029,000	100	33,180,000	100	34,180,000	100	35,180,000	100	36,180,000	100	37,180,000	7.01.0.00.0.00.05.0000 - Kecamatan Tomoni Timur
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berjalan sesuai standar (%)	100	100	6,403,000	100	34,556,000	100	36,000,000	100	40,000,000	100	42,000,000	100	45,000,000	7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Kalaena
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berjalan sesuai standar (%)	100	100	18,856,500	100	17,081,000	100	34,674,000	100	74,438,000	100	74,587,000	100	79,992,000	7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Angkona

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	(5)	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%)	100	100	11,132,400	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kecamatan Malili
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berjalan sesuai standar (%)	100	100	5,453,000	100	2,840,000	100	3,124,000	100	3,436,400	100	3,780,040	100	4,158,044	7.01.0.00.0.00.09.0000 - Kecamatan Wasuponda
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berjalan sesuai standar (%)	100	100	21,939,600	100	86,355,300	100	86,702,100	100	87,023,400	100	87,861,000	100	88,359,000	7.01.0.00.0.00.10.0000 - Kecamatan Towuti
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%)	100	100	7,434,850	100	65,000,000	100	65,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	7.01.0.00.0.00.11.0000 - Kecamatan Nuha
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1,735,874,150		1,352,713,400		1,588,857,450		1,590,671,415		1,635,892,050		1,671,024,750	
Meningkatnya Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase capaian kinerja pelayanan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang berjalan sesuai standar (%)	100	100	79,299,000	100	123,180,000	100	123,180,000	100	123,180,000	100	123,180,000	100	123,180,000	7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Burau
Meningkatnya Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase capaian kinerja pelayanan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang berjalan sesuai standar (%)	100	100	62,231,750	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kecamatan Wotu
Meningkatnya Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase capaian kinerja pelayanan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang berjalan sesuai standar (%)	100	100	470,359,400	100	344,360,450	100	344,360,450	100	344,360,450	100	344,360,450	100	354,360,450	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Tomoni

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	(5)	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
Optimalnya Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase capaian kinerja pelayanan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang berjalan sesuai standar (%)	100	100	65,239,400	100	83,391,300	100	89,391,300	100	89,391,300	100	90,391,300	100	91,391,300	7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Mangkutana
Meningkatnya Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase capaian kinerja pelayanan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang berjalan sesuai standar (%)	100	100	60,238,200	100	117,844,000	100	118,844,000	100	119,844,000	100	120,844,000	100	121,844,000	7.01.0.00.0.00.05.0000 - Kecamatan Tomoni Timur
Meningkatnya Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase capaian kinerja pelayanan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang berjalan sesuai standar (%)	100	100	84,306,500	100	99,000,000	100	100,000,000	100	106,000,000	100	109,000,000	100	114,000,000	7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Kalaena
Meningkatnya Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase capaian kinerja pelayanan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang berjalan sesuai standar (%)	100	100	71,454,100	100	74,844,250	100	110,162,000	100	119,337,000	100	119,262,000	100	128,738,000	7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Angkona
Meningkatnya Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	100	100	320,370,500	100	55,000,000	100	55,000,000	100	55,000,000	100	55,000,000	100	55,000,000	7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kecamatan Malili
Meningkatnya Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase capaian kinerja pelayanan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang berjalan sesuai standar (%)	100	100	88,424,250	100	96,066,000	100	100,869,300	100	105,912,765	100	111,208,400	100	117,844,000	7.01.0.00.0.00.09.0000 - Kecamatan Wasuponda
Meningkatnya Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase capaian kinerja pelayanan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang berjalan sesuai standar (%)	100	100	119,924,100	100	117,469,400	100	117,934,400	100	118,529,900	100	118,529,900	100	120,551,000	7.01.0.00.0.00.10.0000 - Kecamatan Towuti
Meningkatnya Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	100	100	314,026,950	100	141,558,000	100	329,116,000	100	309,116,000	100	344,116,000	100	344,116,000	7.01.0.00.0.00.11.0000 - Kecamatan Nuha

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	(5)	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				179,040,490		360,742,912		386,251,112		468,219,100		479,124,100		494,213,100	
Meningkatnya Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum yang berjalan sesuai standar (%)	100	100	9,635,000	100	18,577,500	100	18,577,500	100	18,577,500	100	18,577,500	100	18,577,500	7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Burau
Meningkatnya Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum yang berjalan sesuai standar (%)	100	100	9,175,000	100	15,525,000	100	20,525,000	100	25,525,000	100	30,525,000	100	33,525,000	7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kecamatan Wotu
Meningkatnya Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum yang berjalan sesuai standar (%)	100	100	9,340,250	100	12,192,200	100	12,192,200	100	12,192,200	100	12,192,200	100	13,500,000	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Tomoni
Meningkatnya Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum yang berjalan sesuai standar (%)	100	100	12,680,600	100	25,630,600	100	27,680,600	100	31,680,600	100	33,680,600	100	34,680,600	7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Mangkutana
Meningkatnya Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum yang berjalan sesuai standar (%)	100	100	32,929,500	100	42,627,500	100	43,627,500	100	44,627,500	100	45,627,500	100	46,627,500	7.01.0.00.0.00.05.0000 - Kecamatan Tomoni Timur
Meningkatnya Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum yang berjalan sesuai standar (%)	100	100	19,984,500	100	40,000,000	100	42,000,000	100	45,000,000	100	48,000,000	100	52,000,000	7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Kalaena
Meningkatnya Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum yang berjalan sesuai standar (%)	100	100	12,634,800	100	18,409,800	100	32,868,000	100	35,446,000	100	35,351,000	100	38,329,000	7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Angkona

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	(5)	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
Meningkatnya Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum (%)	100	100	17,470,000	100	113,123,822	100	113,123,822	100	178,558,000	100	178,558,000	100	178,558,000	7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kecamatan Malili
Meningkatnya Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum yang berjalan sesuai standar (%)	100	100	11,311,650	100	17,584,500	100	17,584,500	100	17,584,500	100	17,584,500	100	17,584,500	7.01.0.00.0.00.09.0000 - Kecamatan Wasuponda
Meningkatnya Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum yang berjalan sesuai standar (%)	100	100	26,958,340	100	30,071,990	100	30,071,990	100	31,027,800	100	31,027,800	100	32,831,000	7.01.0.00.0.00.10.0000 - Kecamatan Towuti
Meningkatnya Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum (%)	100	100	16,920,850	100	27,000,000	100	28,000,000	100	28,000,000	100	28,000,000	100	28,000,000	7.01.0.00.0.00.11.0000 - Kecamatan Nuha
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				300,264,800		379,006,581		402,736,681		414,953,681		422,849,681		486,860,600	
Meningkatnya Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	Persentase capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum kecamatan yang berjalan sesuai standar (%)	100	100	23,023,000	100	27,493,000	100	27,493,000	100	27,493,000	100	27,493,000	100	27,493,000	7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Burau
Meningkatnya Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	Persentase capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum kecamatan yang berjalan sesuai standar (%)	100	100	25,248,500	100	30,428,500	100	35,428,500	100	40,428,500	100	45,428,500	100	50,428,500	7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kecamatan Wotu
Meningkatnya Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	Persentase capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum kecamatan yang berjalan sesuai standar (%)	100	100	16,742,000	100	28,861,000	100	28,861,000	100	28,861,000	100	28,861,000	100	28,861,000	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Tomoni
Meningkatnya Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	Persentase capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum kecamatan yang berjalan sesuai standar (%)	100	100	27,348,100	100	35,748,100	100	36,748,100	100	37,748,100	100	38,748,100	100	38,748,100	7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Mangkutana

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	(5)	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
Meningkatnya Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	Persentase capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum kecamatan yang berjalan sesuai standar (%)	100	100	26,855,000	100	25,395,000	100	26,395,000	100	27,395,000	100	28,395,000	100	29,395,000	7.01.0.00.0.00.05.0000 - Kecamatan Tomoni Timur
Meningkatnya Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	Persentase capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum kecamatan yang berjalan sesuai standar (%)	100	100	18,845,000	100	35,000,000	100	35,000,000	100	35,000,000	100	35,000,000	100	35,000,000	7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Kalaena
Meningkatnya Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	Persentase capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum kecamatan yang berjalan sesuai standar (%)	100	100	15,152,600	100	25,276,100	100	39,369,000	100	42,536,000	100	42,732,000	100	45,829,000	7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Angkona
Meningkatnya Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	Persentase capaian Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Umum kecamatan (%)	100	100	62,658,300	100	60,086,081	100	60,086,081	100	60,086,081	100	60,086,081	100	85,000,000	7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kecamatan Malili
Meningkatnya Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	Persentase capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum kecamatan yang berjalan sesuai standar (%)	100	100	18,238,500	100	20,500,000	100	20,500,000	100	22,550,000	100	22,550,000	100	22,550,000	7.01.0.00.0.00.09.0000 - Kecamatan Wasuponda
Meningkatnya Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	Persentase capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum kecamatan yang berjalan sesuai standar (%)	100	100	33,530,800	100	35,218,800	100	37,856,000	100	37,856,000	100	38,556,000	100	38,556,000	7.01.0.00.0.00.10.0000 - Kecamatan Towuti
Meningkatnya Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	Persentase capaian Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Umum kecamatan (%)	100	100	32,623,000	100	55,000,000	100	55,000,000	100	55,000,000	100	55,000,000	100	85,000,000	7.01.0.00.0.00.11.0000 - Kecamatan Nuha
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				134,145,500		380,079,443		439,340,619		458,717,143		471,961,543		487,546,963	
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase capaian kinerja pelayanan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang berjalan sesuai standar (%)	100	100	6,925,000	100	22,510,000	100	22,510,000	100	22,510,000	100	22,510,000	100	22,510,000	7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Burau

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase capaian kinerja pelayanan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang berjalan sesuai standar (%)	100	100	5,059,650	100	11,375,000	100	13,375,000	100	15,375,000	100	17,375,000	100	19,375,000	7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kecamatan Wotu
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase capaian kinerja pelayanan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang berjalan sesuai standar (%)	100	100	11,752,900	100	39,625,100	100	39,625,100	100	39,625,100	100	39,625,100	100	40,259,900	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Tomoni
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase capaian kinerja pelayanan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang berjalan sesuai standar (%)	100	100	16,181,800	100	38,851,800	100	47,851,800	100	54,851,800	100	56,851,800	100	59,851,800	7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Mangkutana
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase capaian kinerja pelayanan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang berjalan sesuai standar (%)	100	100	20,709,500	100	59,202,500	100	60,202,500	100	61,202,500	100	62,202,500	100	63,202,500	7.01.0.00.0.00.05.0000 - Kecamatan Tomoni Timur
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase capaian kinerja pelayanan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang berjalan sesuai standar (%)	100	100	13,137,500	100	40,086,081	100	42,086,082	100	45,086,081	100	49,086,081	100	53,086,081	7.01.0.00.0.00.06.0000 - Kecamatan Kalaena
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku (%)	100	100	7,731,100	100	11,669,650	100	33,590,000	100	36,628,000	100	36,517,000	100	39,163,000	7.01.0.00.0.00.07.0000 - Kecamatan Angkona
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase penyelengaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan	100	100	17,264,000	100	60,086,081	100	60,086,081	100	60,086,081	100	60,086,081	100	60,086,081	7.01.0.00.0.00.08.0000 - Kecamatan Malili

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
	perundangan yang berlaku (%)														
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase capaian kinerja pelayanan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang berjalan sesuai standar (%)	100	100	8,945,150	100	9,018,250	100	9,920,075	100	10,912,000	100	12,003,200	100	13,203,520	7.01.0.00.0.00.09.0000 - Kecamatan Wasuponda
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase capaian kinerja pelayanan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang berjalan sesuai standar (%)	100	100	16,147,550	100	27,568,900	100	30,007,900	100	32,354,500	100	35,618,700	100	36,723,000	7.01.0.00.0.00.10.0000 - Kecamatan Towuti
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku (%)	100	100	10,291,350	100	60,086,081	100	80,086,081	100	80,086,081	100	80,086,081	100	80,086,081	7.01.0.00.0.00.11.0000 - Kecamatan Nuha
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				8,758,174,674		9,095,693,006		9,295,693,006		9,495,693,006		9,895,693,006		10,095,693,006	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3,679,499,109		3,489,892,441		4,404,270,741		4,421,770,741		4,464,270,741		4,656,770,741	
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Tugas dan Fungsi	Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Berjalan Sesuai Standar (%)	98,6	100	3,679,499,109	100	3,489,892,441	100	4,404,270,741	100	4,421,770,741	100	4,464,270,741	100	4,656,770,741	
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				1,688,484,300		1,659,210,100		1,457,000,000		1,557,000,000		1,657,000,000		1,657,000,000	
Meningkatnya nilai-nilai Pancasila dan karakter kebangsaan	Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (%)	80	100	1,688,484,300	100	1,659,210,100	100	1,457,000,000	100	1,557,000,000	100	1,657,000,000	100	1,657,000,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
dalam kehidupan bermasyarakat															
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				1,234,902,265		1,241,440,265		1,282,922,265		1,282,922,265		1,332,922,265		1,332,922,265	
Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase partai politik yang melaksanakan Pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik melalui hibah daerah (%)	100	100	1,234,902,265	100	1,241,440,265	100	1,282,922,265	100	1,282,922,265	100	1,332,922,265	100	1,332,922,265	
	Persentase peningkatan pemahaman pendidikan politik dan pengembangan serta etika budaya politik kepada masyarakat (%)	100	100		100		100		100		100		100		
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				77,664,400		204,120,600		139,000,000		144,000,000		149,000,000		154,000,000	
Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakat	Persentase Ormas/Rumah Ibadah/kelompok terdaftar setiap tahun (%)	100	100	77,664,400	100	204,120,600	100	139,000,000	100	144,000,000	100	149,000,000	100	154,000,000	
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				562,385,000		630,044,000		665,000,000		715,000,000		865,000,000		865,000,000	
Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Persentase Kebijakan diBidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang Dilaksanakan (%)	100	100	562,385,000	100	630,044,000	100	665,000,000	100	715,000,000	100	865,000,000	100	865,000,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	(5)	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				1,515,239,600		1,870,985,600		1,347,500,000		1,375,000,000		1,427,500,000		1,430,000,000	
Meningkatnya kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Persentase konflik dan kejadian yang terselesaikan (%)	84	87	1,515,239,600	89	1,870,985,600	91	1,347,500,000	93	1,375,000,000	95	1,427,500,000	95	1,430,000,000	
TOTAL KESELURUHAN			**2,111,020,770,505.92**		**2.363.328.659.126.50**		**2.428.525.166.407.02**		**2.640.020.582.950**		**2.815.636.075.250**		**3.071.926.804.450**		

Sumber: https://sipd-ri.kemendagri.go.id, data diolah tahun 2025

4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.

Indikator kerja daerah merupakan tolak ukur yang digunakan untuk mengukur kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di daerah. Indikator kerja daerah ditetapkan oleh pemerintah daerah dan digunakan sebagai acuan untuk mengukur kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Penetapan Indikator Kinerja Daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terdiri dari Indikator Kinerja Makro, Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah, dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disebut sebagai Indikator Kinerja Kunci (IKK), Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Suistainable Development Goals (TPB/SDG's) pada akhir periode masa jabatan

4.2.1 INDIKATOR KINERJA MAKRO

Indikator Kinerja Makro merupakan serangkaian ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam periode 5 (lima) tahun. Indikator Kinerja Makro Kabupaten Luwu Timur yang terdiri dari 9 (sembilan) indikator mencakup berbagai aspek utama dalam pembangunan daerah, baik dari aspek sosial, ekonomi, lingkungan dan pemerintahan. Indikator-indikator yang tercantum pada tabel menjadi gambaran target capaian tujuan dan sasaran Pembangunan Kabupaten Luwu Timur tahun 2025-2029. Indikator Kinerja Makro Kabupaten Luwu Timur yang disajikan merupakan gambaran keselarasan atas dukungan pemerintah daerah dengan tujuan pembangunan nasional. Indikator Kinerja Makro Kabupaten Luwu Timur tahun 2025-2029 disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 4. 2 Indikator Makro Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2030

No	Indikator Makro	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2024)	Asumsi Capaian 2025	Target Tahun Ke-					Kondisi Akhir Periode RPJMD
					2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	76,44	76,72	77,07	77,42	77,75	78,04	78,38	78,04
2	Tingkat Kemiskinan	Persen	6,55	6,47-5,88	6,3-5.35	6,11-5,34	5,83-5,33	5,56-4,56	5,29-4,49	5,56-4,56
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,58	4,49	4,34	4,31	4,22	4,13	4,03	4,13
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	3,27	3,57	5,31-6,11	5,35-6,15	5,39-6,19	5,43-6,27	5,47-6,27	5,43-6,27
5	PDRB Perkapita	Rp. Juta	97,18	100,65	101,89	106	109,15	123,59	131,34	123,59
6	Rasio Gini	Nilai	0,350	0,344	0,337	0,331	0,325	0,319	0,312	0,319
7	Penurunan Intensitas Emisi GRK	Persen	2,11	2,11	2,31	2,93	3,56	4,17	4,88	4,17
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	77,93	81,74	81,91	82,08	82,25	82,42	82,59	82,42
9	Kontribusi PDRB Kabupaten	Persen	4,36	4,69	4,72	4,75	4,78	4,81	4,84	4,81

Sumber: Bapperida data diolah tahun 2025

4.2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan tolok ukur dalam memberikan gambaran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan. Pengukuran keberhasilan rencana pembangunan jangka menengah daerah dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah periode 2025-2029 tercermin dari capaian indikator kinerja utama yang ditetapkan. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif diharapkan akan terus berlangsung dalam proses pembangunan di Kabupaten Luwu Timur lima tahun kedepan. Pemerataan pendapatan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan diupayakan dapat menciptakan lapangan kerja bagi angkatan kerja yang tersedia sehingga dapat menekan angka pengangguran dan mengurangi tingkat kemiskinan. Muara dari seluruh pelaksanaan pembangunan tersebut adalah peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Dalam upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah yaitu pijakan penyusunan RKPD Tahun 2030, yang akan menjadi tanggungjawab kepala daerah Tahun 2030-2034, maka target Indikator Kerja Utama maupun Rencana Program Perangkat Daerah dimulai dari Tahun 2025-2030. Untuk mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditentukan maka dipilih Indikator Kinerja Utama dan target capaian selama lima tahun ke depan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4. 3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2030

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	76,44	76,72	77,07	77,42	77,75	78,04	78,38
2	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,94	8,95	8,96	8,97	8,98	8,99	9
3	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,18	13,2	13,22	13,24	13,26	13,28	13,3
4	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,55	75,61	76,4	76,8	77,2	78,78	78,8
5	Tingkat Kemiskinan	Persen	6,55	6,47-5,88	6,3-5.35	6,11-5,34	5,83-5,33	5,56-4,56	5,29-4,49
6	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	90,44	90,6	90,75	90,9	91,05	91,2	91,35
7	Indeks Pembangunan Keluarga	Angka	65,99	66,1	66,9	67,7	68,5	69,3	70,1
8	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	80,47	80,77	81,07	81,37	81,67	81,97	82,27
9	Persentase Benda, Bangunan, Struktur dan Situs Cagar Budaya yang Ditetapkan Terhapadap Total Registrasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100
10	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	3,27	3,57	5,31-6,11	5,35-6,15	5,39-6,19	5,43-6,27	5,47-6,27
11	PDRB PerKapita	Rp. Juta	97,18	100,65	101,89	106	109,15	123,59	131,34
12	Rasio Gini	Nilai	0,350	0,344	0,337	0,331	0,325	0,319	0,312
13	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	4,58	4,49	4,34	4,31	4,22	4,13	4,03
14	Persentase Kontribusi Industri Manufaktur (pengolahan) terhadap total PDRB	Persen	3,33	3,39	3,46	3,53	3,6	3,67	3,73
15	Persentase Kontribusi UMKM dan ekonomi kreatif terhadap PDRB	Persen	9,05	9,4	9,75	10,1	10,4	10,8	11,15
16	Indeks Ketahanan Pangan Daerah	Indeks	87,73	68,8	71,1	70,93	70,76	70,59	70,59
17	Nilai Pilar 2 (Infrastruktur) Indeks Daya Saing Daerah	Nilai	2,55	2,9	3,2	3,45	3,65	3,8	3,9
18	Ratio puskesmas perjumlah penduduk	Persen	0,52	0,57	0,56	0,55	0,55	0,57	0,56
19	Rasio Siswa Terhadap Ketersediaan Ruang Belajar Pada Jenjang Pendidikan Dasar	Siswa per RKB	21,87	21,57	21,52	21,46	21,41	21,36	21,31
20	Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan	Persen	29,88	32	35	38	42	45	48
21	Persentase Rumah Tangga dengan akses sanitasi aman	Persen	11,88	11,88	12,22	12,56	12,91	13,25	13,59
22	Indeks Layanan Infrastruktur	Indeks	70,86	70,88	71,6	72,93	74,13	75,31	76,32

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
23	Indeks Desa (Persentase Desa Mandiri Berdasarkan Indeks Desa)	Persen	29,6	32	34,4	36,8	39,2	41,6	44
24	Persentase desa yang memilik layanan administrasi berbasis digital	Persen	0,16	0,16	10,4	19,2	28	36,8	46
25	Persentase BUMdes yang menghasilkan laba	Persen	68	70	71	72	73	74	75
26	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	77,93	81,74	81,91	82,08	82,25	82,42	82,59
27	Indeks Kualitas Air	Indeks	65	81,64	81,84	82,04	82,24	82,44	82,64
28	Indeks Kualitas Udara	Indeks	91,85	81,35	81,55	81,75	81,95	82,15	82,35
29	Indeks Kualitas Tutupan lahan	Indeks	74,4	82,61	82,68	82,75	82,81	82,88	82,95
30	Indeks Risiko Bencana	Indeks	133,38	132	130	128	127	126	125
31	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Persen	2,11	2,11	2,31	2,93	3,56	4,17	4,88
32	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	BB	BB	BB	A	A	A	A
			75,46	76,15	77,56	81,07	84,6	85,1	88,1
33	Nilai SAKIP	Nilai	B	B	BB	BB	BB	BB	BB
			67,77	70,01	70,42	71,82	73,3	74,5	76,1
34	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	1,74	2,49	2,58	3,06	3,24	3,32	3,6
35	Indeks SPBE	Indeks	3,16	3,17	1	1,3	1,6	2	2,2
36	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	60,01	63,49	65,13	66,77	68,41	70,05	70,05

Sumber: Bapperida data diolah tahun 2025

4.2.3 INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD)

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan dalam penyelengaraan pemerintah daerah Khususnya dalam pemenuhan kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan umum dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. lndikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcomes) atau kompositnya (impact). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2025-2029 yang telah direncanakan. Hal ini menuntut adanya berbagai indikator kinerja pemerintah daerah. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan publik dalam rangka perwujudan transaksi dan akuntabilitas penyelengaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Selanjutnya, indikator kinerja daerah dibagi menjadi 4 (empat) aspek yaitu Aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Aspek geografi dan demografi diukur dengan capaian indek yeng terkait data ketahanan pangan, kependudukan lingkungan dan Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi sosial. Aspek Pelayanan Umum merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti infrastruktur dasar baik secara fisik maupun sosial. Aspek Daya Saing Daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Luwu Timur tersebut secara rinci disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2030

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Asumsi	Target Kinerja					Akhir Periode RPJMD 2029
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI									
Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan										
1	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	87,73	68,8	71,1	70,93	70,76	70,59	70,59	70,59
2	Konsumsi Listrik Per Kapita	Kwh/kapita/ Tahun	290,16	257	258,36	259,72	261,08	262,44	263,8	262,44
3	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	Persen	5,23	5,1	5,05	5,02	5,01	5	4,95	5
4	Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	90,4	90,5	91	91,5	92	92,5	93	92,5
5	Kapasitas Air Baku	Meter^3/detik	1,873	1,873	1,873	1,873	1,873	1,873	1,873	1,873
6	Akses Air Minum Aman Perpipaan	Persen	41,54	55	58	62	65	68	70	68
7	Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan	Persen	29,88	32	35	38	42	45	48	45
Lingkungan Hidup Berkualitas										
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	77,93	81,74	81,91	82,08	82,25	82,42	82,59	82,42
9	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Persen	11,88	11,88	12,22	12,56	12,91	13,25	13,59	13,25
10	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Persen	14,59	13,12	13,38	13,65	13,92	14,2	14,49	14,2
11	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	Persen	35	35,7	36,41	37,14	37,89	38,64	39,42	38,64

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Asumsi	Target Kinerja					Akhir Periode RPJMD 2029
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
12	Proporsi Realisasi Penyaluran Pupuk Organik terhadap Pupuk Kimia	Persen	0	1,69	2,11	2,64	3,57	5,00	6,99	5,00
13	Indeks Pertanaman (IP) Padi	Indeks	1,78	1,8	1,83	1,85	1,87	1,89	1,91	1,89
14	Proporsi Sawah Irigasi	Persen	88,61	88,61	88,66	88,74	89,12	89,49	89,68	89,49
Riseliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim										
15	Indeks Risiko Bencana	Skor	133,38	132	130	128	127	126	125	126
16	Indeks Ketahanan Daerah	Poin	0,65	0,66	0,68	0,7	0,72	0,75	0,8	0,75
17	Penurunan Intensitas Emisi GRK	Persen	2,11	2,11	2,31	2,93	3,56	4,17	4,88	4,17
Demografi										
18	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	1,37	1,3	1,25	1,2	1,15	1,1	1	1,1
19	Rasio Penduduk	Persen	107,41	105,5	103,5	101,5	99,5	97,5	95	97,5
20	Kepadatan Penduduk	Orang/m^2	47,93	48,43	48,93	49,43	49,93	50,43	50,93	50,43
II	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
Kesejahteraan Ekonomi										
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	3,27	3,57	5,31-6,11	5,35-6,15	5,39-6,19	5,43-6,27	5,47-6,27	5,43-6,27
2	Tingkat Kemiskinan	Persen	6,55	6,47-5,88	6,2-5,35	6,11-5,34	5,83-5,33	5,56-4,56	5,29-4,49	5,56-4,56
3	PDRB per kapita	Rp Juta	97,18	100,65	101,89	106	109,15	115,14	115,25	115,14
4	Tingkat pengangguran terbuka	Persen	4,58	4,49	4,34	4,31	4,22	4,13	4,03	4,13
5	Rasio Gini	Nilai	0,35	0,344	0,337	0,331	0,325	0,319	0,3112	0,319
6	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	76,44	76,72	77,07	77,42	77,75	78,04	78,38	78,04

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Asumsi	Target Kinerja					Akhir Periode RPJMD 2029
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Kesehatan Untuk Semua										
7	Usia harapan hidup	Tahun	74,55	75,61	76,4	76,8	77,2	78,78	78,8	78,78
8	proporsi Jumlah penerima pemeriksaan gratis pada semua kelompok usia terhadap jumlah penduduk	Persen	na	5	15	25	35	40	45	40
9	Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan	Persen	99,84	99	>99	>99	>99	>99	100	>99
10	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 Kelahiran Hidup	141,21	119,05	118,48	94,56	94,12	70,26	70,.26	70,26
11	Prevalensi Stunting	Persen	21,8	20,5	19,2	17,9	16,6	15,3	14	15,3
12	Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberculosis	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
13	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberculosis	Persen	95,5	95,8	96,5	96,8	97	97,3	97,5	97,3
Pendidikan Berkualitas yang Merata										
14	Rata-rata lama sekolah	Tahun	8,94	8,95	8,96	8,97	8,98	8,99	9	8,99
15	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,18	13,2	13,22	13,24	13,26	13,28	13,3	13,28
16	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	Persen	10,03(2023)	10,2	10,5	10,8	11,2	11,6	12	11,6
17	Persentase Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Pendidikan tinggi yang Ditamatkan	Persen	65,37	65,49	65,6	65,7	65,8	65,9	66	65,9

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Asumsi	Target Kinerja					Akhir Periode RPJMD 2029
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
18	Rasio Siswa Terhadap Ketersediaan Ruang Belajar Pada Jenjang Pendidikan Dasar	Siswa per RKB	21,87	21,57	21,52	21,46	21,41	21,36	21,31	21,36
19	Angka Literasi	Nilai	65,89(2023)	70,96	79,02	79,5	79,98	81,5	82,35	81,5
20	Angka Numerasi	Nilai	58,79(2023)	67,64	76,5	77,05	77,65	78,11	80	78,11
21	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	88	88,8	89,6	90,4	91,2	92	92,8	92
22	Indeks Masyarakat Digital Indonesia	Nilai	41,92	41,92	43,98	45,01	46,04	47,07	48,1	47,07
Perlindungan Sosial yang Adaktif										
23	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Persen	70	68,41	68,7	68,95	69,15	69,75	70,35	69,75
24	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	Persen	0,0155	0,016	0,0165	0,0171	0,0185	0,0189	0,0195	0,0189
Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju										
25	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	80,47	80,77	81,07	81,37	81,67	81,97	82,27	81,97
27	Persentase Benda, Bangunan, Struktur, dan Situs Cagar Budaya yang Telah Ditetapkan Terhadap Total Registrasi	Persen	n/a	100	100	100	100	100	100	100
Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif										
28	Indeks Pembangunan Keluarga	Angka	65,99	66,1	66,9	67,7	68,5	69,3	70,1	69,3
29	Indeks Perlindungan Anak	Angka	73,99	75,75	77,5	81,01	84,52	88,03	91,54	88,03
30	Indeks Ketimpangan Gender	Poin	0,465	0,44	0,432	0,425	0,418	0,41	9:21	0,41

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Asumsi	Target Kinerja					Akhir Periode RPJMD 2029
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
31	Persentase Pemuda yang pernah mengikuti pelatihan/kursus/ training dan memperoleh sertifikat	Persen	0,15	0,15	0,19	0,21	0,24	0,25	0,28	0,25
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH									
Daya Saing Sumber Daya Manusia										
1	Angka Ketergantungan	Persen	47,31	46,8	46,2	45,6	45	44,5	44	44,5
Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi										
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Persen	3,33	3,39	3,46	3,53	3,6	3,67	3,73	3,67
3	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	Persen	0,18	0,19	0,2	0,21	0,22	0,23	0,24	0,23
4	Jumlah Industri Ekonomi Kreatif	Angka	110	110	115	120	125	125	125	125
5	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah	Persen	6,51	7,25	7,62	7,75	8,75	8,95	9,1	8,95
6	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Persen	70,18	71,04	71,77	72,52	73,15	74,08	74,9	74,08
7	Tingkat partisipasi angkatan kerja Perempuan	Persen	53,55	54,55	54,85	55,25	56,15	57	60	57
8	Indeks Inovasi Daerah	Skor	60,01	63,49	65,13	66,77	68,41	70,05	70,05	70,05
9	Jumlah Wisatawan Domestik dan Mancanegara	Orang	410.816	422.800	432.980	443.128	454.841	467.725	481.897	467.725
10	Persentase Koperasi Berpredikat Sehat	Persen	34,34	28,06	38,24	48,42	58,61	68,79	78,96	68,79
11	Return On Aset (ROA) BUMD	Persen	Na	0-2	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5	2-5
12	Produktivitas Padi	Ton/Ha/Tahun	6,54	6,77	6,80	6,84	6.87	6,90	6,94	6,90
13	Angka Konsumsi Ikan	Kg/KAP/TH	47,12	47,55	47,99	48,43	48,86	49,29	49,72	49,29

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Asumsi	Target Kinerja					Akhir Periode RPJMD 2029
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
14	Jumlah Produktivitas Perikanan Budidaya (Perikanan)	Ton/Ha/Tahun	26,455	26,99	27,81	28,64	29,5	30,74	31,29	30,74
Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru										
15	Indeks Ekonomi Hijau	Skor	82,2(2023)	63,74	65,28	66,82	68,37	69,93	69,95	69,93
16	Indeks Ekonomi Biru	Skor	68,8(2023)	87,56	96,94	106,32	115,71	125,09	134,5	125,09
Transformasi Digital										
17	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi	Persen	37,70	37,7	40,32	43,55	46,77	50	53,23	50
18	Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet	Persen	73,51	73,51	75,86	77,06	78,26	79,46	80,66	79,46
Integrasi Ekonomi Domestik dan Global										
19	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Persen PDRB	31,83	31,88	31,94	32	32,2	32,4	32,5	32,4
20	Volume dan Nilai Ekspor	Rupiah	17.517.558.085.575,90	17.695.693.302.320,20	17.875.639.967.629,00	18.342.814.391.479,90	18.620.651.603.405,00	18.927.326.027.255,00	20.870.000.451.105,10	18.927.326.027.255,00
21	Ekspor Barang dan Jasa	Persen PDRB	19,19	22,23	25,2	27,33	29,11	32,45	34,07	32,45
22	Koefisien Variasi Harga antar Waktu Barang Kebutuhan Pokok	Indeks	7,8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8
Perkotaan dan Pedesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi										
23	Indeks Layanan Infrastruktur	Indeks	70,86	70,88	71,6	72,93	74,13	75,31	76,32	75,31
24	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	Persen	91,98	79,34	79,41	80,55	81,99	83,41	84,83	83,41
25	Indeks Desa (Presentase Desa Mandiri berdasarkan Indeks Desa)	Persen	29,6	32	34,4	36,8	39,2	41,6	44	41,6

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Asumsi	Target Kinerja					Akhir Periode RPJMD 2029
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
26	Kontribusi PDRB Kab/Kota terhadap Provinsi	Persen	4,36	4,69	4,72	4,75	4,78	4,81	4,84	4,81
Stabilitas Ekonomi Makro										
27	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Persen	0,85	1	1,03	1,12	1,21	1,28	1,31	1,28
28	Tingkat Inflasi	Persen	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3
29	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) kabupaten	Nilai	3,63	3,71	3,75	3,79	3,83	3,87	3,9	3,87
IV	ASPEK PELAYANAN UMUM									
Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaftif										
1	Indeks Reformasi Hukum	Nilai	97,96	97.98	98	98,25	98,5	98,75	99	98,75
2	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	1,74	2,49	2,58	3,06	3,24	3,32	3,6	3,32
3	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Nilai	3,16	3,17	1	1,3	1,6	2	2,2	2
4	Indeks Survei Penilaian Integritas	Nilai	74.07	76,07	78.07	80.07	82.07	84.07	86.07	84.07
5	Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3,017	3,018	3,019	3,020	3,021	3,022	3,023	3,022
6	Nilai MCP KPK	Nilai	73,21	75,21	77,21	79,21	81,21	83,21	85,21	83,21
7	Nilai SAKIP	Nilai	67,77	70,01	70,42	71,82	73,3	74,5	76,1	74,5
Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Bemokrasi Substansial										
9	Persentase Penegakan Perda	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Asumsi	Target Kinerja					Akhir Periode RPJMD 2029
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
10	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	Angka	88,59	76	84	85	87	88	91	88
11	Persentase Tindak Kriminal yang Diatasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
12	Persentase Perempuan Terpilih Terhada Total Anggota DPRD	Persen	11,42	11,42	11,42	11,42	11,42	11,42	11,42	11,42
13	Perda yang Merupakan Inisiatif DPRD	Perda	3	1	1	1	1	1	1	1
14	Persentase Perempuan Pengurus Partai Politik	Persen	32	32	32	32	32	32	32	32
Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan										
15	Jumlah Kerja Sama yang Ditindaklanjuti dengan Stakeholder lainnya	JKS	45	35	35	35	35	35	35	35
16	Indeks Daya Saing Daerah	Nilai	3,01	3,1	3,2	3,29	3,39	3,48	4,58	3,48
V	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**									
Layanan Urusan Wajib Dasar										
Pendidikan										
1	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persen	67,04	68,5	70,35	73,35	75	78,25	80	78,25
2	Tingkat Paritisipasi warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Dasar	Persen	0	93,8	94,35	95,75	96,25	96,78	97,5	96,78

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Asumsi	Target Kinerja					Akhir Periode RPJMD 2029
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3	Tingkat Partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
Kesehatan										
1	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen	96,88	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persen	99,84	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	98,12	100	100	100	100	100	100	100
4	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	93,87	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	97,36	100	100	100	100	100	100	100
7	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	78,67	100	100	100	100	100	100	100

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Asumsi	Target Kinerja					Akhir Periode RPJMD 2029
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
8	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
9	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
10	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
11	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
12	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	Persen	0,49	0,6	0,7	0,85	1	1,2	1,4	1,2
13	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten yang terakrediatasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
14	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehtan sesuai standar	Persen	63,35	100	85	90	95	98	100	98
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
Pekerjaan Umum										
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/kota	Persen	25,73	25,83	25,93	26,03	26,13	26,23	26,33	26,23

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Asumsi	Target Kinerja					Akhir Periode RPJMD 2029
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/kota	Persen	92,84	93,34	93,84	94,34	94,84	95,34	95,84	95,34
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persen	62,5	62,65	62,87	63,09	63,31	63,53	63,75	63,53
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh	Persen	39,61	41,61	43,61	45,61	47,61	49,61	51,61	49,61
5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	90,38	91,08	91,78	92,48	93,18	93,88	94,58	93,88
6	Tingkat Kemantapan Jalan	Persen	36,06	37,15	38,25	39,35	40,45	41,55	42,65	41,55
7	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	82,95	98,74	64,45	73,34	82,23	91,11	100	91,11
8	Rasio kepatuhan IMB Kabupaten	Persen	91,06	91,06	91,06	91,09	91,12	91,15	91,18	91,15
9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Persen	84,74	100	100	100	100	100	100	100
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman										

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Asumsi	Target Kinerja					Akhir Periode RPJMD 2029
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	Persen	44,82	19,27	23,87	31,35	45,66	84,03	100	84,03
3	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Persen	6,9	6,05	5,2	4,37	3,03	2,71	1,89	2,71
4	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU(Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persen	54,83	62,18	70,25	79,18	89,09	96,32	98,24	96,32
5	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat										
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	250	250	250	250	250	250	250	250
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	316000	330149	321020	325110	329150	333140	337160	333140

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Asumsi	Target Kinerja					Akhir Periode RPJMD 2029
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	996	550	500	500	500	500	500	500
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	10,97	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15
Sosial										
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Persen	100	100	50	60	70	80	90	80
2	Persentase korban bencana alam, sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
Layanan Urusan Wajib Non Dasar										
Tenaga Kerja										
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Persen	90	90	90	90	90	90	90	90

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Asumsi	Target Kinerja					Akhir Periode RPJMD 2029
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Persen	32,12	33,97	35,82	39,67	43,52	46,37	48,22	46,37
3	Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja	Rupiah	115.688.376	115.900.000	116.600.000	118.500.000	120.500.000	123.500.000	125.500.000	123.500.000
4	Persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartip, Strukturskala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persen	6,9	7,11	7,32	8,53	9,74	10,95	11,16	10,95
5	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negri) melalui mekanisme layananan antar kerja dalam wilayah kabupaten	Persen	35,2	35,22	35,94	36,26	37,28	38,3	39,32	38,3
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak										
1	Persentase ARG Daerah	Persen	12,57	12,68	12,6	12,65	12,75	12,8	12,8	12,8
2	Persentase anak korban kekerasan yang di tangani instasi terkait kabupaten	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
Pangan										
1	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	Persen	100	95	95	95,00	95	95	95,00	95,00
Pertanahan										
1	persentase penetapan tanah untuk Pembangunan fasilitas umum	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Asumsi	Target Kinerja					Akhir Periode RPJMD 2029
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
Lingkungan Hidup										
1	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten	Persen	52	52	55	60	65	70	75	70
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten	Persen	47	47,9	48,9	49,9	50,9	51,9	52,9	51,9
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil										
1	Persentase anak usia 1-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Persen	58,83	58,83	60	61	62	63	63	63
2	Kepemilikan akta kelahiran	Persen	98,21	98,21	99	99	99	99	99	99
3	Perekaman KTP Elektronik	Persen	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99
4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Persen	80	80	86,67	100	100	100	100	100
Pemberdayaan Masyarakat Desa										
1	Persentase peningkatan status desa mandiri	Persen	29,6	32	34,4	36,8	39,2	41,6	44	41,6
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana										

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Asumsi	Target Kinerja					Akhir Periode RPJMD 2029
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Total Fertility Rate (TFR)	Persen	2.31	2.3	2.29	2.28	2.27	2.18	02.09	2.18
2	Persentase Pemakaian kontrasepsi modern(mCPR)	Persen	70.65	71.69	72.04	72.39	72.74	73.09	73.44	73.09
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi	Persen	8.14	8,13	8,12	8,1	8,08	8,06	8	8,06
4	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	Persen	9.37	10.15	10.93	11.71	12.5	13.28	100	13.28
5	Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja	Indeks	90.8	91.5	92.0	92.6	93.1	93.5	93.9	93.5
6	Rata-rata usia kawin pertama wanita	Persen	22.5	>21	>21	>21	>21	>21	>21	>21
7	Dokumen Rancangan Induk Pengendalian Penduduk dengan Lima Aspek	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
8	Persentase Sektor tersosialisasi konsep pembangunan berwawasan kependudukan dan alat ukurnya (IPBK/ Indeks pembangunan berwawasan kependudukan)	Persen	n/a	>75	>75	>75	>75	>75	>75	>75
9	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	Persen	57	>60	>60	>60	>60	>60	>60	>60

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Asumsi	Target Kinerja					Akhir Periode RPJMD 2029
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
10	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Persen	100	>80	>80	>80	>80	>80	>80	>80
11	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	Perda/Perkada	0	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
12	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	Sektor	4	4	4	4	4	4	4	4
13	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	Kerjasama	3	4	4	4	4	4	4	4
14	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Persen	1.72	1.71	1.70	1.69	1.68	1.67	1.66	1.67
15	Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	Persen	71.34	71.69	72.04	72.39	72.74	73.09	73.44	73.09

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Asumsi	Target Kinerja					Akhir Periode RPJMD 2029
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
16	Angka Kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1000 pereempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	Persen	23.1	23.00	22.00	21.00	20.00	18.00	17.00	18.00
17	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	8.14	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
18	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persen	37.1	37.1	>37.2	>37.3	>37.4	>37.5	>37.6	>37.5
19	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	Persen	43.63	45	47	50	53	55	58	55
20	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	Persen	30.6	>40	>40	>40	>40	>40	>40	>40
21	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	Persen	13.17	15	>30	>30	>30	>30	>30	>30
22	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	Persen	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09
23	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	Persen	472.7	479.51	486.32	493.13	499.94	506.75	513.56	506.75
24	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Asumsi	Target Kinerja					Akhir Periode RPJMD 2029
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	daerah di bidang pengendalian penduduk									
25	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	Persen	35.05	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50
26	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	Persen	195	100	100	100	100	100	100	100
27	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
28	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
29	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	Persen	88.54	91.43	94.32	97.21	100	100	100	100
30	Rata-rata usia kawin pertama wanita	Persen	22.5	>21	>21	>21	>21	>21	>21	>21
Perhubungan										

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Asumsi	Target Kinerja					Akhir Periode RPJMD 2029
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Rasio Konektivitas Kabupaten	Rasio	0,50	0,57	0,65	0,72	0,79	0,86	0,91	0,86
2	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten	Rasio	0,47	0,47	0,47	0,48	0,48	0,49	0,49	0,49
Komunikasi dan Informatika										
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas Kominfo	Persen	97,56	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah	Persen	40,63	40,63	41,41	42,19	42,97	43,75	44,53	43,75
3	Akses Publik Terhadap Informasi Keuangan Daerah (Public acces to fical information)	Persen	n/a	100	100	100	100	100	100	100
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah										
1	Meningkatnya usaha Kecil yang menjadi Wirausaha	Persen	11	12	13	14	15	16	17	16
2	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Persen	34,44	31,21	32,63	32,82	34,44	36,13	38,99	36,13
Penanaman Modal										
1	Persentase Peningkatan Investasi	Persen	-17,32	1,28	1,48	1,75	2,12	2,21	2,21	2,21
Kepemudaan dan Olahraga										

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Asumsi	Target Kinerja					Akhir Periode RPJMD 2029
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	43,47	44	44,5	45,00	45,5	46,00	46,00	46,00
2	Tingakt partisipasi pemuda dalam oraganisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	1,24	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,5	2,5
3	Peningkatan prestasi olahraga	Medali	64	64	74	84	94	104	104	104
Statistik										
1	Persentasen organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
2	persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
Persandian										
1	Tingkat Keamanan informasi pemerintah	Persen	n/a	0%	27%	33%	39,70%	44,70%	48,70%	44,70%
Kebudayaan										
1	Presentase Jumlah Warisan Budaya yang Dilestarikan	Persen	0	10%	30%	50%	70%	95%	100	95%
Perpustakaan										
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	71,35	73	74	74,05	75	76	76,05	76

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Asumsi	Target Kinerja					Akhir Periode RPJMD 2029
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	88,00	88,05	89	89,05	89,55	90,05	90,55	90,05
Kearsipan										
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintah, pelayanan publik, dan kesejahteraan rakyat	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
Layanan Urusan Pilihan										
Pariwisata										
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Persen	14,89	15,39	15,89	16,39	16,89	17,39	17,89	17,39
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang	Persen	1,98	2	2,05	2,1	2,15	2,2	2,2	2,2
3	Tingkat hunian Akomodasi	Persen	15, 75	15,75	15,8	15,85	15,9	16	16	16
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Persen	0,1645	0,166	0,1675	0,169	0,1705	0,172	0,1735	0,172

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Asumsi	Target Kinerja					Akhir Periode RPJMD 2029
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Pertanian										
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Persen	2,97	2,88	2,81	2,89	3,29	3,76	3,88	3,76
2	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	Persen	-0,9	-1,48	-1,75	-2,27	-2,37	-2,87	-1,84	-2,87
Perdagangan										
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan(IUPP/SIUP pusat perbeleanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP toko swalayan)	Persen	0	0	3	3	3	3	3	3
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persen	70	80	80	80	80	80	80	80
Perindustrian										
1	Tersedianya informasi industri secara lengkap,akurat dan terkini	Laporan	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Pertambahan Jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten	Persen	6,3	7,02	8,25	8,4	9,59	9,83	10,02	9,83
3	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan inidkator pembangunan	Persen	20	20	22	24	26	28	30	28

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Asumsi	Target Kinerja					Akhir Periode RPJMD 2029
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP									
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	9,51	9,83	10,15	10,47	10,72	11,02	11,34	11,02
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin perluasan industri (IPUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Persentse jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha Kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kebupaten	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0
Transmigrasi										
1	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	Kawasan	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Jumlah Satuan Pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	Kawasan	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Jumlah satuan Pemukiman yang dibina	Kawasan	1	1	1	1	1	1	1	1

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Asumsi	Target Kinerja					Akhir Periode RPJMD 2029
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Perikanan										
1	Jumlah total Produksi perikanan (tangkap dan Budidaya)	Ton	396.094,60	427.536	469.385	515.459	566.123	621.893	683.219	621.893
Penunjang Urusan										
Perencanaan Pembangunan										
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/tidak	Ada	Ada	ada	Ada	ada	ada	ada	ada
2	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada/tidak	Ada	Ada	ada	Ada	ada	ada	ada	ada
3	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada/tidak	Ada	Ada	ada	Ada	ada	ada	ada	ada
Keuangan										
1	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	Persen	24,8	24	24	24,5	25	25	25,5	25
2	Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3	Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	Persen	1,03	1,5	2,4	2,4	2,2	2,3	2,5	2,3
4	Manajemen Aset	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Deviasi Realisasi Belanja Terhadap Belanja Total Dalam APBD	Persen	91,98	92	92, 50	93	93,5	93,5	94	93,5

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Asumsi	Target Kinerja					Akhir Periode RPJMD 2029
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
6	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditure)	Persen	60,48	60,5	61	61,5	61,85	62	62,5	62
7	Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD	Persen	107,75	100	100	100	100	100	100	100
8	Rasio PAD	Persen	20,95	23,28	23,79	29,06	30,56	31,83	31,94	31,83
Kelembagaan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan										
1	Rasio pegawai Pendidikan tinggi dan Menengah/dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	81,39	70,15	71,84	73,5	75,21	77,07	78,75	77,07
2	Rasio pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	36,77	22,67	22,64	36,81	36,96	37,13	37,37	37,13
3	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	37,91	32,54	33,45	21,6	22,21	23,17	23,89	23,17
Penelitian dan Pengembangan										
1	Persentase Perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	Persen	51,22	100	100	100	100	100	100	100
Pengawasan										
1	Opini Laporan Keuangan (10 tahun terakhir)	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Asumsi	Target Kinerja					Akhir Periode RPJMD 2029
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3,017	3,018	3,019	3,020	3,021	3,022	3,023	3,022
3	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Nilai	3,02	3,02	3,03	3,04	3,05	3,06	3,07	3,06
Sekretariat Dewan										
1	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Tepat/Tidak Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat
2	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	Persen	84%	84%	91%	92%	92%	92%	100%	92%
Sekretariat Daerah										
1	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Nilai	86,4	87,6	88,5	89,6	90,25	91,5	92,6	91,5
2	Skor Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Poin	25,45	25,46	26,2	26,55	27	27,18	27,33	27,18
3	Skor Indikator Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	Poin	8,4	9,78	9,78	9,8	10	10,5	11	10,5
4	Skor Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ	Poin	35,56	35,82	35,87	36	36,5	37,01	37,1	37,01
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik										
1.	Persentase Menurunnya Konflik IPOLEKSOSBUD	Persen	0	18,18	27,27	36,36	54,55	63,64	72,73	63,64
2.	Persentase Peran Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembangunan Daerah	Persen	50	52	54	56	59	61	63	61

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2024	Asumsi	Target Kinerja					Akhir Periode RPJMD 2029
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3.	Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pilkada	Persen	80,35	-	-	-	-	81,5	-	81,5
4.	Persentase perempuan pengurus partai politik	Persen	32	32	32	32	32	32	32	32

Sumber : Data Proyeksi Bapperida 2025

4.2.4 INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. SPM ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 serta diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Mekanisme penerapan SPM tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan: (i) pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis; (ii) perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; (iii) penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan (iv) pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar yang kesemuanya itu dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas:

1. Pendidikan.
2. Kesehatan .
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
6. Sosial.

Penetapan target indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 4. 5 Penetapan Target Indikator SPM Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2030

NO	Bidang Urusan/ Jenis Pelayanan Dasar/ Indikator	Satuan	Target Nasional (per tahun)					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Pendidikan							
1.1	Pendidikan Dasar							
	Persentase jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi,SMP/MTs)	%	100	100	100	100	100	100
1.2	Pendidikan Kesetaraan							
	Persentase Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpatisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	100	100	100	100	100	100
1.3	Pendidikan Anak Usia Dini							
	Persentase Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	%	100	100	100	100	100	100
2	Kesehatan							
2.1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil							
	Persentase jumlah Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan K4 di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta	%	100	100	100	100	100	100
2.2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin							
	Persentase jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan	%	100	100	100	100	100	100
2.3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir							
	Persentase jumlah bayi baru lahir usia 0 – 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar	%	100	100	100	100	100	100
2.4	Pelayanan Kesehatan Balita							
	Persentase jumlah balita 0 – 59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan belita sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100
2.5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar							
	Persentase jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan di satuan pendidikan dasar	%	100	100	100	100	100	100
2.6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif							
	Persentase Jumlah pengunjung usia 15-59 tahun mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100
2.7	Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut							
	Persentase jumlah pengunjung usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali	%	100	100	100	100	100	100
2.8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi							
	Persentase Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100

NO	Bidang Urusan/ Jenis Pelayanan Dasar/ Indikator	Satuan	Target Nasional (per tahun)					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
2.9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabeter Melitus							
	Persentase jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100
2,10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat							
	Persentase jumlah ODGJ berat di kab/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif	%	100	100	100	100	100	100
2,11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB							
	Persentase jumlah orang yang mendapatkanb pelayana TB sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100
2,12	Pelayanan Kesehatan Orang denga Risiko Teninfeksi HIV							
	Persentase jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
3.1	Penyediaan kebutuhan pokok Air minum							
	Persentase jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	100	100	100	100	100	100
3.2	Penyediaan pengelolaan air limbah domestic							
	Persentase jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	100	100	100	100	100	100
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman							
4.1	Penyediaan & rehabiitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana							
	Persentase jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100	100	100	100	100
4.2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah							
	Persentase jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	100	100	100	100	100	100
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat							
5.1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum							
	Persentase jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	%	100	100	100	100	100	100
5.2	Pelayanan informasi rawan bencana							
	Persentase jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100	100	100	100
5.3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana							
	Persentase jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	100	100	100	100
5.4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana							
	Persentase jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	100	100	100
5.5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran							
	Persentase jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	100	100	100	100	100	100

NO	Bidang Urusan/ Jenis Pelayanan Dasar/ Indikator	Satuan	Target Nasional (per tahun)					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
6	Sosial							
6.1	Persentase Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti							
	Persentase jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100	100	100	100	100
6.2	Persentase Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti							
	Persentase jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100	100	100	100	100
6.3	Persentase Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti							
	Persentase jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	100	100	100	100	100
6.4	Persentase Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti							
	Persentase jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	%	100	100	100	100	100	100
6.5	Persentase Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana Kabupaten							
	Persentase jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	%	100	100	100	100	100	100

Sumber : Data Proyeksi Bapperida tahun 2025

4.2.5 INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/ SUISTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (TPB/SDGS)

Sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk mengintegrasikan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Suistainable Development Goals (TPB/SDGs) kedalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global. TPB/SDGs bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat masyarakat mencakup 17 tujuan. Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat Provinsi. Penetapan target indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Suistainable Development Goals (TPB/SDGs) disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 4. 6 Matriks Bagian 1 : Target Pencapaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (Tpb/Sdgs) Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 – 2029

Kode	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Pencapaian SDGS Tahun					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Tujuan SDGs 01 : MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN									
1.1.1.*	Tingkat Kemiskinan Ekstrem	BPS	%	n/a	PM	PM	PM	PM	PM	PM
1,2	Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.									
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	BPS/Dinas Sosial P2PA	%	6,55	6,47-5,88	6,2-5,35	6,11-5,34	5,83-5,33	5,56-4,56	5,29-4,49
1,3	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.									
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Dinas Kesehatan	%	79,29	81	81	81	81	81	81
1.3.1.(b)	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	%	70,00	68,41	68,70	68,95	69,15	69,75	70,35
1.5	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.									
1.5.1*	Jumlah korban meninggal.hilang,dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	BPBD	Jiwa per 100,000 orang	37,03	PM	PM	PM	PM	PM	PM
	Tujuan SDGs 02 : MENGHILANGKAN KELAPARAN, MENCAPAI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI YANG BAIK, SERTA MENINGKATKAN PERTANIAN BERKELANJUTAN									
2.2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.									
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Dinas Kesehaan	%	21,8	20,5	19,2	17,9	16,6	15,3	14

Kode	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Pencapaian SDGS Tahun					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	Dinas Kesehaan	%	20,9	19,9	18,8	17,5	16,3	15,2	14,2
2.2.2*	Prevalensi Wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe	Dinas Kesehaan	%	6,40%	6,40%	6,20%	6,00%	5,8	5,60%	5,40%
2.2.2.(a)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Angka	90,4	90,5	91	91,5	92	92,5	93
2.2.3*	Prevalensi anemia pada ibu hamil usia 15-49 tahun	Dinas Kesehaan	%	9,90%	9,50%	9,00%	8,70%	8,50%	8,20%	8,00%
	Tujuan SDGs 03 : MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA									
3.1	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.									
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	Dinas Kesehatan	Kematian per 100.000 kelahiran hidup	141,21	119,05	118,48	94,56	94,12	70,26	70,.26
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Dinas Kesehatan	%	99%	99,40%	99,50%	99,70%	99,80%	99,90%	100%
3,2	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.									
3.2.1*	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Dinas Kesehatan	Kematian per 1000 kelahiran hidup	14,12	13,33	12,83	12,29	11,76	11,24	11,24

Kode	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Pencapaian SDGS Tahun					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.									
3.3.2*	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Dinas Kesehatan	Per 100.000 penduduk (Capaian dihitung hanya pada data penemuan di faskes/ DOTS)	190	190	185	180	175	170	170
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Dinas Kesehatan	Per 1000 penduduk	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
3.4	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.									
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Dinas Kesehatan	%	7,75,	7,75,	7,75,	7,75,	7,75,	7,75,	7,75,
3,7	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.									
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	Dinas P2KB	%	70,65	71,69	72,04	72,39	72,74	73,09	73,44
3.7.2*	Angka kelahiran remaja (umur 10-14 tahun;umur 15-19 tahun) per 1.000 perempuan di kelompok umur yang sama	Dinas P2KB	%	23,1	23,1	23	22	21	20	18

Kode	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Pencapaian SDGS Tahun					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	Dinas P2KB	%	2,24	2,24	2,23	2,22	2,21	2,2	2,19
3.8.	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.									
3.8.1.(a)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak Terpenuhi(Unmeet Need)	Dinas P2KB	%	8,14	8,14	8,12	8,01	8,08	8,06	8
3.8.2.(a)	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Dinas Kesehatan	%	104,29	98	98,6	98,6	98,6	99	99
	Tujuan SDGs 04 : MENJAMIN KUALITAS PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MENINGKATKAN KESEMPATAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT UNTUK SEMUA									
4.1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.									
4.1.1.(a)	Angka Anak Tidak Sekolah usia 7-12 tahun, usia 13-15 tahun dan usia 16-18 tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Orang	ATS 7-12 : 810 ; ATS 13-15 : 924 ;ATS 16-18 : 807	ATS 7-12 : 802 ; ATS 13-15 : 916 ;ATS 16-18 : 799	ATS 7-12 : 800 ; ATS 13-15 : 914 ;ATS 16-18 : 797	ATS 7-12 : 796 ; ATS 13-15 : 910 ;ATS 16-18 : 795	ATS 7-12 : 794 ; ATS 13-15 : 908 ;ATS 16-18 : 793	ATS 7-12 : 792 ; ATS 13-15 : 905 ;ATS 16-18 : 790	ATS 7-12 : 790 ; ATS 13-15 : 903 ;ATS 16-18 : 788
4.5	Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.									
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/SMK/sederajat danPerguruan Tinggi untuk(a) perempuan/laki-laki. (b) Perdesaan/perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabiitas	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan								
	(1) APM SD sederajat		%	99,1	100	100	100	100	100	100
	(2) APK SMP sederajat		%	94,1	97,25	99,98	100	100	100	100
4,6	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.									

Kode	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Pencapaian SDGS Tahun					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	100	100	100	100	100	100	100
	Tujuan SDGs 05 : MENCAPAI KESETERAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN KAUM PEREMPUAN									
5.1	Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun									
5.1.1*	Ketesediaan kerangka hukum yang mendorong, menetapkan dan memantau keseteraan gender dan penghapusan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin	Dinas Sosial P2PA	Jumlah Regulasi	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
5.3	Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.									
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun	Dinas P2KB	%	23.36	25.2	27.3	29.15	30.45	32.25	34.5
5.5	Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.									
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di	Sekretariat DPRD								
	(b) Pemerintah Daerah		%	11,42	11,42	11,42	11,42	11,42	11,42	11,42
	Tujuan SDGs 06 : MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA									
6.1	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.									
6.1.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman	Dinas PUPR	%	41,54	55	58	62	65	68	70

Kode	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Pencapaian SDGS Tahun					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
6.2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.									
6.2.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan denga air dan sabun	Dinas Kesehatan	%	8,02	11,88	12,22	12,56	12,91	13,25	13,59
	Tujuan SDGs 07 : MENJAMIN AKSES ENERGI YANG TERJANGKAU, ANDAL, BERKELANJUTAN DAN MODERN UNTUK SEMUA									
7.1	Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.									
7.7.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita	PLN	Kwh	290,16	257,00	258,36	259,72	261,08	262,44	263,80
	Tujuan SDGs 08 : MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF DAN MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YANG LAYAK UNTUK SEMUA									
8.1	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang									
8.1.1.(a)	PDB per kapita	BPS	Juta/Jiwa	97,18	100,65	101,89	106	109,15	123,59	131,34
8.6	Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.									
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	%	9,50	9,30	9,23	9,15	9,04	8,95	8,89
8.8	Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan yang berbahaya.									
8.8.1.(a)	Persentase cakupan kepesertaan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nasional	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	%	17,90	17,90	19,00	19,95	22,05	23,85	25,00

Kode	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Pencapaian SDGS Tahun					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
8.9	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.									
8.9.1*	Proporsi dan laju pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDB.	Dinas Pariwisata Pemuda dan olahraga	%	0,1645	0,166	0,1675	0,169	0,1705	0,172	0,1735
8.9.1.(a)	Jumlah Wisatawan Mancanegara	Dinas Pariwisata Pemuda dan olahraga	Org	7	11	16	24	35	53	80
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Dinas Pariwisata Pemuda dan olahraga	Org	410.816	419.032	439.984	461.983	485.082	509.336	509.336
	Tujuan SDGs 09 : MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YANG TANGGUH, MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, SERTA MENDORONG INOVASI									
9.1	Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.									
9.1.2.(a)	Jumlah bandara	Dinas Perhubungan	Unit	1	1	1	1	1	1	1
9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan.	Dinas Perhubungan	Unit	8	8	8	8	8	8	8
9,2	Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.									
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDRB industri pengolahan	BPS	%	3,33	3,39	3,46	3,53	3,6	3,67	3,73
	Tujuan SDGs 10 : MENGURANGI KESENJANGAN INTRA - DAN ANTAR NEGARA									
10.1	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.									
10.1.1*	Koefisien Gini.	BPS	Poin	0,35	0,344	0,337	0,331	0,325	0,319	0,312

Kode	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Pencapaian SDGS Tahun					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
10.1.1.(b)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Dinas Sosial P2PA	%	6,55	6,47-5,88	6,2-5,35	6,11-5,34	5,83-5,33	5,56-4,56	5,29-4,49
10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal.	Dinas PMD	Desa	0	0	0	0	0	0	0
10.1.1.(d)	Jumlah desa mandiri	Dinas PMD	Desa	37	40	43	46	49	52	55
10.4	Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar									
10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan .	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	%	70,00	68,41	68,70	68,95	69,15	69,75	70,35
	Tujuan SDGs 11 : MENJADIKAN KOTA DAN PERMUKIMAN INKLUSIF, AMAN, TANGGUH DAN BERKELANJUTAN									
11.6	Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.									
11.6.1.(a)	Persentase rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah	Dinas Lingkungan Hidup	%	35	35,7	36,41	37,14	37,89	38,64	39,42
	Tujuan SDGs 12 : MENJAMN POLA PRODUKSI DAN KONSUMSI YANG BERKELANJUTAN									
12.5	Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang dan penggunaan kembali.									
12.5.1.(a)	Persentase timbulan sampah yang didaur ulang di fasilitas pengolahan sampah	Dinas Lingkungan Hidup	Persen	12.93	13.19	13.46	13.73	14	14.28	14.57
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang di fasilitas pengolahan sampah	Dinas Lingkungan Hidup	Ton/Tahun	5.826,59	5.943,12	6.061,98	6.183,22	6.306,89	6.433,03	6.561,69
	Tujuan SDGs 13 : MENGAMBIL TINDAKAN CEPAT UNTUK MENGATASI PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA									
13.3	Meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan iklim									
13.3.1.(a)	Jumlah satuan pendidikan formal dan lembaga/komunitas masyarakat	DLH dan Disdikpora	Unit	136	145	155	165	175	185	195

Kode	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Pencapaian SDGS Tahun					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
	peduli dan berbudaya lingkungan hidup									
	Tujuan SDGs 14 : MELESTARIKAN DAN MEMANFAATKAN SECARA BERKELANJUTAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN SAMUDERA UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN									
14.6	Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontriusi terhadap keleihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, mengihilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan dan tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang dan negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada The World Trade Organization.									
14.6.1.(a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan	Dinas Perikanan	%	96	96	97	97	98	98	98
14.b	Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumberdaya laut dan pasar									
14.b.1.(a)	Jumlah nelayan yang terlindungi	Dinas Perikanan	Orang	1.07	30	400	400	400	400	400
	Tujuan SDGs 15 : MELINDUNGI, MERESTORASI DAN MENINGKATKAN PEMANFAATAN BERKELANJUTAN EKOSISTEM DARATAN, MENGELOLAH HUTAN SECARA LESTARI, MENGHENTIKAN PENGGURUNAN, MEMULIHKAN DEGRADASI LAHAN, SERTA MENGHENTIKAN KEHILANGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI									
15.1	Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara									
15.1.1*	Proporsi tutupan hutan terhadap total luas daratan	Dinas Lingkungan Hidup	%	74,40	74,40	74,40	74,40	74,40	74,40	74,40
	Tujuan SDGs 16 : MENGUATKAN MASYARAKAT YANG INKLUSIF DAN DAMAI UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, MENYEDIAKAN AKSES KEADILAN UNTUK SEMUA, DAN MEMBANGUN KEEMBAGAAN YANG EFEKTIF, AKUNTABEL, DAN INKLUSIF DISEMUA TINGKATAN									
16.2	Menghentikan perlakuan kejam,eksploitasi perdagangan,dan segala bentuk kekersan dan penyiksaan terhadap anak									
16.2.1.(b)	Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya	Dinas P3AP2KB	%	11	50	45	45	40	40	35
16.2.3	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-29 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun	Dinas P3AP2KB	%	20	50	45	45	40	40	35
16.5	Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya									

Kode	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Pencapaian SDGS Tahun					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	Inspektorat	Poin	81,04	81,50	82,50	83,50	84,50	85,50	86,50
16.6	Mengembangkan lembaga yang efektif,akuntabel,dan transparan disemua tingkat									
16.6.1.(a)	Persentase instansi pemerintah yang mendapat opini WTP	Inspektorat	%	100	100	100	100	100	100	100
16.6.1.(b)	Persentase instansi pemerintah dengan skorsistem Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerntah (SAKIP) ≥ B	Sekretariat Daerah	%	67,77	70,01	70,42	71,82	73,3	74,5	76,1
16.6.1.(c)	Persentase instansi pemerintah dengan indeks RB ≥ B	Sekretariat Daerah	%	75,46	76,15	77,56	81,07	84,6	85,1	88,1
16,7	Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.									
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakian Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyar Daerah (DPRD)	Dinas Sosial P2PA	%	21,30%	21,30%	21,30%	21,30%	21,30%	21,30%	30%
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Dinas Sosial P2PA	%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
16,9	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.									
16.9.1*	Proporsi anak di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur	Disdukcapil	%	98,68	98,68	98,69	98,72	98,75	98,78	98,8
16.9.1.(b)	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran untuk penduduk 0-17 tahun	Disdukcapil	%	98,68	98,68	98,69	98,72	98,75	98,78	98,8
16,1	Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.									
16.10.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)	Sekretariat Daerah	%	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM

Kode	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Pencapaian SDGS Tahun					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Tujuan SDGs 17 : MENGUATKAN SARANA PELAKSANAAN DAN MEREVITALISASI KEMITRAAN GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN									
17,1	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.									
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Bapenda	%	0,85	1	1,03	1,12	1,21	1,28	1,31
17.6	Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global									
17.6.1.(b)	Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik (kumulatif)	Diskominfo SP	%	100	100	100	100	100	100	100
17.8	Mengoperasinalisasikan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi hyang memampukan, khusunya teknologi informasi dan komunikasi									
17.8.1*	Persentase pengguna internet	Diskominfo SP	%	73,51	73,51	75,86	77,06	78,26	79,46	80,66

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Tahun 2025-2030 dan Metadata SDG's Bappenas, data diolah

BAB V
PENUTUP

5.1 PEDOMAN TRANSISI

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 adalah dokumen kerangka kebijakan daerah dalam rangka mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Pemerintah Daerah dalam 5 (lima) Tahun Kedepan. Pada Tahun 2029 mendatang merupakan masa tran sisi guna menjaga kesinambungan pembangunan daerah diperlukan pedoman transisi guna menjembatani proses perencanaan pada periode RPJMD selanjutnya 2030-2035. Selain itu dalam rangka mengisi kekosongan Pedoman Penyusunan dokumen RKPD Tahun 2030 setelah RPJMD berakhir, dalam masa transisi kepemimpinan daerah, maka penyusunan RKPD tahun 2030 mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka menengah (RPJMD) yang selanjutnya akan menjadi bagian dari pengukuran kinerja RPJMD Periode selanjutnya (2030-2035).

Pedoman transisi dimaksud bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa pemerintahan baru.

Selanjutnya RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2025-2029 masih menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD tahun pertama (2030) dibawah kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) pada periode berikutnya.

RKPD masa transisi merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil pemilukada pada periode berikutnya. RPJMD merupakan dokumen bersama (seluruh stakeholder) dalam rangka melaksanakan pembangunan di Kabupaten Luwu Timur. Selanjutnya, dokumen RPJMD secara teknis menjadi pedoman dan dijabarkan dalam perencanaan tahunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

5.2 KAIDAH PELAKSANAAN.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran tahap pertama Periode ke 5 (lima) RPJPD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029, diharapkan Seluruh komponen masyarakat, pemerintah, dan swasta ikut bertanggungjawab untuk menjaga konsistensi antara rencana jangka menengah dengan implementasi tahunannya sehingga rencana pembangunan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan sebaik- baiknya. untuk memastikan hal tersebut maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. **Konsistensi Perencanaan**

   Kaidah Perencanaan dan Penganggaran yang terpadu yang dimaksudkan untuk menekankan adanya "benang emas" yang tidak terputus antara dokumen perencanaan strategis (RPJMD, Renstra PD) dengan dokumen

perencanaan tahunan dan penganggaran (RKPD, Renja PD, KUA-PPAS, hingga APBD). Untuk menjamin konsistensi ini, implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) menjadi wajib, di mana modul *e-Planning* dan *e-Budgeting* terintegrasi secara digital untuk mengunci program dan anggaran agar selaras dengan prioritas yang telah ditetapkan.

2. Kerangka Pendanaan Pembangunan yang Inovatif dan Integratif

Kerangka Pendanaan Pembangunan diharapakan Inovatif dan Integratif dimana Pemerintah daerah tidak hanya bergantung pada APBD, tetapi secara proaktif memobilisasi sumber pendanaan non-pemerintah. Ini dilakukan melalui strategi seperti pengembangan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk proyek infrastruktur strategis, serta sinergi program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) yang terarah melalui pembentukan Forum CSR Kabupaten Luwu Timur.

3. Kerangka Mitigasi Fiskal Daerah

Kerangka pelaksanaan ini penting untuk menjaga keberlanjutan fiskal, pemerintah daerah secara sistematis mengidentifikasi, memetakan, dan mengelola risiko fiskal yang berasal dari faktor eksternal (misalnya, fluktuasi harga komoditas) dan domestik (misalnya, target PAD tidak tercapai). Strategi mitigasi mencakup penguatan kemandirian fiskal, efisiensi belanja, dan pengelolaan utang yang bijaksana (*prudent debt management*).

4. **Penguatan Kerangka Pengendalian Pembangunan**

Kerangka Pengendalian Pembangunan yang terintegrasi dilaksanakan melalui harmonisasi regulasi dan implementasi penuh SIPD sebagai tulang punggung pengawasan. dan Pemanfaatan *e-Monev* (SI-Pengendali PeDe) secara *real-time* menjadi alat utama untuk memantau kemajuan fisik dan keuangan, mendeteksi deviasi secara dini, dan menjadi dasar evaluasi kinerja serta pengambilan keputusan pimpinan.

5. Mekanisme Perubahan RPJMD yang Adaptif dan Terukur

RPJMD bersifat mengikat, namun tetap adaptif. Perubahan hanya dapat dilakukan jika terjadi kondisi mendasar yang diatur ketat oleh peraturan perundang-undangan, seperti bencana alam skala besar atau perubahan kebijakan nasional yang strategis. Prosedur perubahan harus mengikuti kembali seluruh tahapan penyusunan RPJMD awal untuk menjaga kualitas dan legitimasi dokumen.

6. Strategi Komunikasi Publik yang Inklusif dan Partisipatif

Pemerintah daerah membangun dialog dua arah dengan seluruh pemangku kepentingan. Strategi ini mencakup pemetaan audiens untuk penyesuaian pesan dan kanal komunikasi termasuk kepada dunia usaha, akademisi, dan kelompok rentan serta penguatan mekanisme umpan balik melalui platform digital seperti SP4N-LAPOR! dan forum tatap muka.

7. Masa Transisi untuk Keberlanjutan Pembangunan

Untuk mencegah kekosongan pedoman perencanaan di akhir periode, RPJMD 2025-2029 menjadi acuan utama dalam penyusunan RKPD Tahun 2030, Mekanisme ini memastikan program-program strategis, terutama yang bersifat multi-tahun, dapat terus berjalan hingga RPJMD periode berikutnya ditetapkan oleh kepala daerah terpilih.

8. Sistem Insentif untuk Mendorong Partisipasi Pembangunan

Untuk memotivasi seluruh pelaku pembangunan, diterapkan sistem insentif. Bagi unsur pemerintah (OPD), insentif diintegrasikan dalam sistem manajemen kinerja (SAKIP) dan alokasi anggaran, serta fasilitasi untuk meraih Dana Insentif Daerah (DID). Bagi unsur non-pemerintah (swasta, masyarakat), insentif diberikan dalam bentuk non-fiskal seperti kemudahan perizinan, fasilitasi penyediaan sarana, dan penghargaan publik untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi dan partisipasi.

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur bersama DPRD dan *Stakeholders* Pembangunan daerah harus bersungguh-sungguh memperhatikan serta bersinergi dalam mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama periode 5 (lima) tahun sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029, sehingga pencapaian kinerja pembangunan daerah secara optimal dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara merata dan berkeadilan dalam kerangka mewujudkan visi daerah yakni **"LUWU TIMUR MAJU DAN SEJAHTERA ".**

BUPATI LUWU TIMUR

IRWAN BACHRI SYAM